

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada)	:	5 Juli 2024
Masa Penawaran Umum	:	28 Juni – 2 Juli 2024	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	5 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2024	Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2024

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526 Fax.: (021) 841-3540
E-mail: jasmarg@jasmarga.com
Situs internet: www.jasmarga.com

Kantor Regional

2 (dua) kantor regional yang berlokasi di Jakarta Timur
Perusahaan Anak
25 (dua puluh lima) Perusahaan Anak yang berdomisili di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Madiun, Manado, Deli Serdang, Sidoarjo, Solo, Semarang, Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, Pasuruan dan Denpasar.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp932.350.000.000,- (SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp90.155.000.000,- (sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 241.055.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp601.140.000.000,- (enam ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 5 Juli 2034 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JASA MARGA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (i) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (ii) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MEMBENGKAKNYA BIAYA KONSTRUKSI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

AA (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui Surat No. BA.KU.09.02.478 tanggal 28 Maret 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”).

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024” pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04582/BEI.PP2/05-2024 tanggal 14 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan yaitu melalui kepemilikan Negara Republik Indonesia berdasarkan definisi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI & SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xiv
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	17
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	39
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	44
VI. FAKTOR RISIKO	52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	56
8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	56
8.2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 2 TAHUN TERAKHIR	57
8.3. IZIN-IZIN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN	58
8.4. PERJANJIAN PENTING	59
8.5. ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN	79
8.6. STRUKTUR ORGANISASI	82
8.7. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	82
8.8. PENGURUS DAN PENGAWAS	83
8.9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	89
8.10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)	89
8.11. SUMBER DAYA MANUSIA	100
8.12. ASURANSI	105
8.13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	106
8.14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	107
8.15. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	108
8.16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	114
8.17. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	116
IX. PERPAJAKAN	126
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	128
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	129
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	132
XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	138
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	143
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	144
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	184

Halaman Sengaja Dikosongkan

DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1) suami atau istri;2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">1) orang tua dan anak;2) kakek dan nenek serta cucu; atau3) saudara dari orang yang bersangkutan;(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;(d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;(f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil, dan berkewajiban untuk membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) dan hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.</p>
Akta Pengakuan Utang	<p>Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 48 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.</p>
Beban Operasional	<p>Berarti pengeluaran Perseroan yang dipergunakan untuk kebutuhan operasional Perseroan yang meliputi seluruh beban usaha/beban pendapatan</p>

	yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya.
BEI atau Bursa Efek	Berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BPJT	Berarti singkatan dari Badan Pengatur Jalan Tol.
BUJT	Berarti singkatan dari Badan Usaha Jalan Tol.
BUMN	Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
Bunga Obligasi	Berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Seri A: 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun;• Seri B: 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan• Seri C: 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang meliputi antara lain Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perjanjian Perwalianamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaruannya dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
EBITDA	Berarti laba usaha sebelum bunga, pajak, beban provisi pelapisan jalan, depresiasi, amortisasi, pendapatan dan beban konstruksi, dan penghasilan dan beban lain-lain.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan

	dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Emisi	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan, yang meliputi banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, perang atau huru-hara di Indonesia (baik yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah maupun belum), yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
IAPI	Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPP0, yaitu dua Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Modal	Berarti total ekuitas per laporan keuangan konsolidasian.
Obligasi	Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp932.350.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.

Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan penjamin emisi obligasi lainnya (jika ada).
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah ini PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 73 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-026/OBL/KSEI/0324 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 72 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 02 tanggal 02 Mei 2024, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 62 tanggal 27 Mei 2024, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I

Tahun 2024 No. 49 tanggal 20 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 71 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 01 tanggal 02 Mei 2024, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 61 tanggal 27 Mei 2024, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 47 tanggal 20 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 70 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 60 tanggal 27 Mei 2024, dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 46 tanggal 20 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan UUPM, yaitu (a) pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau (b) pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Perpres 13/2018	Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: (i) kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah; namun tidak termasuk Perusahaan Anak.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Asosiasi	Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pihak Berelasi	<p>Berarti, sesuai dengan PSAK 7, adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait perusahaan pelapor jika orang tersebut: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas perusahaan pelapor; - memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan pelapor; atau - personal manajemen kunci perusahaan pelapor atau Perusahaan induk Perusahaan pelapor 2. Suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pelapor jika (salah satu); <ul style="list-style-type: none"> - perusahaan dan perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama - Suatu perusahaan adalah perusahaan asosiasi atau ventura bersama bagi perusahaan lain (atau perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu suatu kelompok usaha dimana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya kelompok usaha, dimana perusahaan lain tersebut adalah anggotanya; - Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; - Satu perusahaan adalah ventura bersama dari perusahaan ketiga dan perusahaan yang lain adalah perusahaan asosiasi dari perusahaan ketiga; - Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan yang terkait dengan perusahaan pelapor; - Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); - Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan atau anggota manajemen kunci perusahaan (atau perusahaan induk dari perusahaan).
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp932.350.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp90.155.000.000,- (sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo;Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp241.055.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo; danObligasi Seri C dengan jumlah sebesar Rp601.140.000.000,- (enam ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri C pada tanggal jatuh tempo. <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
PP	Berarti Peraturan Pemerintah.
PPJT	Berarti Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

Prospektus	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 7/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang juga merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi

	berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 5 Juli 2034 untuk Obligasi Seri C.
Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya antara lain utang kredit dan Efek bersifat utang, dengan pengecualian utang usaha, utang dividen, beban akrual, utang pajak dan utang kontraktor dan kewajiban kerjasama operasi.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Anak

MSJ	:	PT Marga Sarana Jabar
JKC	:	PT Jasamarga Kunci Cengkareng
MTN	:	PT Marga Trans Nusantara
JSM	:	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
JGP	:	PT Jasamarga Gempol Pasuruan
JBT	:	PT Jasamarga Bali Tol
JMKT	:	PT Jasamarga Kualanamu Tol
CSJ	:	PT Cinere Serpong Jaya
JBS	:	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
JMB	:	PT Jasamarga Manado Bitung
JJS	:	PT Jasamarga Japek Selatan
JPB	:	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
JLJ (dalam likuidasi)	:	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi)
JMTM	:	PT Jasamarga Tollroad Maintenance
JMRB	:	PT Jasamarga Related Business
JMTO	:	PT Jasamarga Tollroad Operator
JTT	:	PT Jasamarga Transjawa Tol
LMJ	:	PT Lintas Marga Jawa
JRB	:	PT Jasamarga Restarea Batang
JNK	:	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
JB	:	PT Jasamarga Jogja Bawen
AJP	:	PT Asiana Jakarta Properti
JAP	:	PT Jasamarga Akses Patimban
JSN	:	PT Jasamarga Solo Ngawi
JSB	:	PT Jasamarga Semarang Batang

Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama

TLKJ	:	PT Trans Lingkar Kita Raya
TMJ	:	PT Trans Marga Jateng
JPT	:	PT Jasamarga Pandaan Tol
JMJ	:	PT Jasamarga Jogja Solo
PPSB	:	PT PP Sinergi Banjaratma
MLJ	:	PT Marga Lingkar Jakarta
JPM	:	PT Jasamarga Pandaan Malang
JJC	:	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian yang dikeluarkan OJK untuk Perseroan.

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang didirikan dengan nama 'PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)' berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1978, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 187 tanggal 19 Mei 1981, yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 766 dan No. 767 tanggal 2 Maret 1982, yang keduanya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No. 1138/1982 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Marga Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125817.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 ("**Akta No. 40/2021**").

Berdasarkan Akta No. 40/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (5), Pasal 4 ayat (6), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dari anggaran dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40/2021.

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12 September 2007, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269/RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676/2007 *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153029.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016 *juncto* (iii) Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan per 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**"), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- Negara Republik Indonesia	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
- Manajemen :			
- Subakti Syukur	477.700	238.850.000	0,00
- Fitri Wiyanti	316.600	158.300.000	0,00
- Reza Fabriano	289.600	144.800.000	0,00
- Bagus Cahya Arinta B.	289.200	144.600.000	0,00
- Mohamad Agus	282.000	141.000.000	0,00
- M. Roskanedi	139.300	69.650.000	0,00
- Raja Erizman	139.400	69.700.000	0,00
- Pramitha Wulanjani	50.000	25.000.000	0,00
- Masyarakat	2.175.377.560	1.087.688.780.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.782.128.800	5.891.064.400.000	

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- Melakukan kegiatan pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini.

Prospek Usaha

Perseroan sampai dengan akhir 2023 telah mengoperasikan 1.264 km jalan tol, atau 47% dari keseluruhan total panjang jalan tol beroperasi di Indonesia. Dengan kondisi tersebut di atas, menjadikan Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan penyelesaian pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Di samping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan.
- Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044.
- Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga akhir konsesi terdekat.
- Adanya potensi penambahan konsesi penguasaan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi).
- Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol Indonesia.
- Perkembangan penduduk yang pesat.
- Perkembangan industri properti.
- Pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat yang merupakan pasar terbesar dari pengguna jalan tol.

C. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITAWARKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024.
Target Obligasi Berkelanjutan	:	Sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp932.350.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Seri A dengan jumlah sebesar Rp90.155.000.000,- (sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah); • Seri B dengan jumlah sebesar Rp241.055.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah); dan • Seri C dengan jumlah sebesar Rp601.140.000.000,- (enam ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 3 (tiga) tahun; • Seri B: 5 (lima) tahun; dan • Seri C: 10 (sepuluh) tahun. <p>Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 5 Juli 2034 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.</p>
Tingkat Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun; • Seri B: 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan • Seri C: 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan/jaminan khusus, namun namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang telah ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Cadangan (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan : idAA (*Double A*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Penjelasan mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Penawaran Umum Obligasi.”

D. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebesar Rp899.650 juta dengan rincian sebagai berikut:

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah (Rp juta)	Tingkat Suku Bunga	Peringkat saat ini	Bursa Pencatatan
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga 2020 Seri B	8 September 2020	8 September 2025	286.000	8,25%	idAA oleh Pefindo	BEI
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga 2020 Seri C	8 September 2020	8 September 2027	90.050	8,60%	idAA oleh Pefindo	BEI
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga 2020 Seri D	8 September 2020	8 September 2030	523.600	9,00%	idAA oleh Pefindo	BEI
Total			899.650			

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja berupa pemeliharaan jalan tol dan pengoperasian jalan tol, dengan rincian sebesar 70% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengoperasian jalan tol dan sisanya sebesar 30% akan digunakan untuk pemeliharaan jalan tol.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.”

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00762/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Registrasi Akuntan Publik No. 0645) dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset Lancar	7.974.775	12.372.212
Aset Tidak Lancar	121.337.214	78.766.970
Total Aset	129.311.989	91.139.182
Liabilitas Jangka Pendek	22.821.163	12.142.988
Liabilitas Jangka Panjang	67.579.620	53.374.805
Total Liabilitas	90.400.783	65.517.793
Total Ekuitas	38.911.206	25.621.389
Total Liabilitas dan Ekuitas	129.311.989	91.139.182

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Total Pendapatan	21.318.605	16.582.849
Total Beban Pokok Pendapatan	(12.360.079)	(9.164.752)
Laba Bruto	8.958.526	7.418.097
Laba Usaha	11.318.320	7.383.007
Laba Tahun Berjalan	6.749.489	2.323.708
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	6.586.549	817.616
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	936	378

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.165.956	4.022.207
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(8.324.353)	(1.639.671)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	168.230	(62.057)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	(3.990.167)	2.320.479
Kas dan Setara Kas dari Entitas Anak yang Didekonsolidasikan		
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	8.429.118	6.279.089
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	4.438.951	8.429.118

Rasio Keuangan

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	28,56	9,32
Laba kotor	20,77	14,58
Laba usaha	53,50	9,87
Laba/(rugi) tahun berjalan	190,46	166,71
EBITDA	36,21	16,72
Jumlah aset	41,88	(9,98)
Jumlah liabilitas	37,98	(13,50)
Jumlah ekuitas	51,87	0,47
Rasio Usaha (%)		
Laba kotor / pendapatan	42,02	44,73
Laba usaha / pendapatan	53,09	44,52
Laba tahun berjalan / pendapatan	31,66	14,01
Laba tahun berjalan / jumlah aset	5,22	2,55
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	17,35	9,07
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	34,94	101,89
Jumlah liabilitas / total aset	69,91	71,89
Jumlah liabilitas / total ekuitas	232,33	255,72
Marjin EBITDA	64,54%	60,91%
<i>Interest coverage ratio</i>	3,21	1,96
<i>Debt service coverage ratio</i>	2,23	7,49

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting."

G. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 25 (dua puluh lima) Perusahaan Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 8 (delapan) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
Perusahaan Anak (Jalan Tol)							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,56%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran- Cengkareng	78,53%	2008	2008	Beroperasi	4,20%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	3,16%
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% ⁽¹⁾	1994	1994	Beroperasi	- (b)
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol- Pasuruan	99,35% ⁽²⁾	2010	2010	Beroperasi	- (b)
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,50%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	2014	Beroperasi	3,15%
8.	CSJ	Pengusahaan jalan tol ruas Cinere-Serpong	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,67%
9.	JBS	Pengusahaan jalan tol ruas Balikpapan- Samarinda	67,39%	2016	2016	Beroperasi	7,52%
10.	JMB	Pengusahaan jalan tol ruas Manado-Bitung	64,97%	2016	2016	Beroperasi	3,52%
11.	JJS	Pengusahaan jalan tol ruas Japek-Selatan	90,97%	2017	2017	Konstruksi	6,61%
12.	JPB	Pengusahaan jalan tol ruas Probolinggo- Banyuwangi	94,98%	2017	2017	Konstruksi	1,74%
13.	JNK	Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi – Kertosono	59,60% ⁽⁸⁾	2009	2015	Beroperasi	- (b)
14.	JJB	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen	63,15%	2020	2020	Konstruksi	2,46%
15.	JSN	Pengusahaan jalan tol ruas Solo-Ngawi	59,53% ⁽⁷⁾	2009	2015	Beroperasi	- (b)
16.	JSB	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Batang	59,80% ⁽³⁾	2016	2016	Beroperasi	- (b)
17.	JAP	Pengusahaan jalan tol ruas Akses Patimban	57,17%	2023	2023	Konstruksi	0,76%
Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)							
18.	JLJ (dalam likuidasi) ^(d)	Operator jalan tol JORR	99,96%	2000	2000	Dalam likuidasi	0,03%
19.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	2,05%
20.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,76%
21.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,11%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
22.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol Transjawa	99,00%	2017	2017	Beroperasi	47,15%
23.	JRB	Pengelolaan tempat peristirahatan dan pelayanan	89,08% ⁽⁴⁾	2019	2019	Beroperasi	- (c)
24.	LMJ	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	97,32% ⁽⁵⁾	2018	2023	Beroperasi	- (b)
25.	AJP	Pembangunan properti	99,48% ⁽⁶⁾	2012	2012	Beroperasi	- (c)
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)							
26.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	50,91% ⁽¹¹⁾	2007	2007	Beroperasi	- (a)
27.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% ⁽¹⁰⁾	2016	2016	Beroperasi	- (a)
28.	JPM	Pengusahaan jalan tol ruas Pandaan-Malang	51,00% ⁽¹²⁾	2016	2016	Beroperasi	- (a)
29.	TLKJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	21,24%	2006	2012	Beroperasi	2,51%
30.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol- Pandaan	40,00%	1996	2011	Beroperasi	- (a)
31.	MLJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	51,00%	2009	2009	Beroperasi	- (a)
32.	JMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	52,82%	2020	2020	Konstruksi	- (a)
33.	PPSB	Pengelolaan Rest Area KM 260 Brebes	20,00% ⁽¹³⁾	2019	2019	Beroperasi	- (c)

Catatan:

- (a) *Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan*
- (b) *Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)*
- (c) *Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB*
- (d) *Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLJ No. 11 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Siti Nur Isminingsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, para pemegang saham JLJ telah menyetujui dilakukannya pembubaran atas JLJ dan telah menunjuk likuidator atas nama Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan konsultan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Likuidasi JLJ akan berlaku sejak Menkumham mencatat berakhirnya status badan hukum JLJ dan menghapus nama JLJ dari daftar perseroan.*
- ⁽¹⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.*
- ⁽²⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.*
- ⁽³⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,80%.*
- ⁽⁴⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.*
- ⁽⁵⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 97,32%.*
- ⁽⁶⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.*
- ⁽⁷⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,53%.*
- ⁽⁸⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,60%.*
- ⁽⁹⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.*
- ⁽¹⁰⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%.*
- ⁽¹¹⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 50,91%.*
- ⁽¹²⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%.*
- ⁽¹³⁾ *Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 20,00%.*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan adalah JTT, yang memberikan kontribusi 47,15% dari total aset Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023.

Informasi mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII subbab 8.14 dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.”

H. FAKTOR RISIKO

i. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Membengkaknya Biaya Konstruksi.

ii. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

- a. Risiko Terkait Pembebasan Lahan atau Pengadaan Tanah (Keterlambatan dan Klaim);
- b. Risiko Penyesuaian Tarif;
- c. Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal;
- d. Risiko Perubahan Peraturan;
- e. Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia.

iii. Risiko Umum

- a. Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global;
- b. Risiko Perubahan Suku Bunga;
- c. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan;
- d. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum;
- e. Risiko Kebijakan Pemerintah.

iv. Risiko Yang Dihadapi Investor

- a. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi;
- b. Risiko Gagal Bayar.

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko.”

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024"

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp932.350.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp90.155.000.000,- (sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp241.055.000.000,- (dua ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp601.140.000.000,- (enam ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A, 5 Juli 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 5 Juli 2034 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024	5 Oktober 2024
2	5 Januari 2025	5 Januari 2025	5 Januari 2025
3	5 April 2025	5 April 2025	5 April 2025
4	5 Juli 2025	5 Juli 2025	5 Juli 2025
5	5 Oktober 2025	5 Oktober 2025	5 Oktober 2025
6	5 Januari 2026	5 Januari 2026	5 Januari 2026
7	5 April 2026	5 April 2026	5 April 2026
8	5 Juli 2026	5 Juli 2026	5 Juli 2026
9	5 Oktober 2026	5 Oktober 2026	5 Oktober 2026
10	5 Januari 2027	5 Januari 2027	5 Januari 2027
11	5 April 2027	5 April 2027	5 April 2027
12	5 Juli 2027	5 Juli 2027	5 Juli 2027
13		5 Oktober 2027	5 Oktober 2027
14		5 Januari 2028	5 Januari 2028
15		5 April 2028	5 April 2028
16		5 Juli 2028	5 Juli 2028
17		5 Oktober 2028	5 Oktober 2028
18		5 Januari 2029	5 Januari 2029
19		5 April 2029	5 April 2029
20		5 Juli 2029	5 Juli 2029
21			5 Oktober 2029
22			5 Januari 2030
23			5 April 2030
24			5 Juli 2030
25			5 Oktober 2030
26			5 Januari 2031
27			5 April 2031
28			5 Juli 2031
29			5 Oktober 2031
30			5 Januari 2032
31			5 April 2032
32			5 Juli 2032
33			5 Oktober 2032
34			5 Januari 2033
35			5 April 2033
36			5 Juli 2033
37			5 Oktober 2033
38			5 Januari 2034
39			5 April 2034
40			5 Juli 2034

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan kedudukan Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki utang yang bersifat senior atau didahulukan pembayarannya daripada pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut

dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

1.2. IKHTISAR MENGENAI PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali untuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.
- g. rencana pembelian kembali wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
- i. pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit pada media sebagai berikut:
 - (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- j. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
- k. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- l. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

- m. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- n. Perseroan wajib melaporkan informasi pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
- 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- o. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
- p. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- q. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- r. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

- a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali agunan atau jumlah yang:
 - a. telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijaminkan tersebut telah dilepaskan maka aktiva tersebut tidak dapat diikat lagi menjadi agunan;
 - b. termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
 1. Jaminan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk atau untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari.
 2. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 4. Agunan yang diberikan sehubungan dengan penerusan kelanjutan utang atau novasi yang diberikan dalam rangka beralihnya PPJT sepanjang agunannya diambil dari hasil jalan tol atas PPJT.

Dalam hal Wali Amanat menyetujui permohonan Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan terhadap utang-utang yang ditarik oleh Perseroan, maka jaminan-jaminan yang sama juga wajib diberikan untuk pembayaran Obligasi, untuk keperluan mana Perseroan dan Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani perjanjian jaminan yang berkaitan.

2. Memberikan jaminan-jaminan kepada pihak lain (penanggunggan) atas kewajiban-kewajiban pihak lain tersebut kecuali penanggunggan sehubungan dengan Perusahaan Anak;
 3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, kecuali hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; atau
 - c. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam pengusahaan/ pengoperasian jalan tol; atau
 - d. Akuisisi pada perusahaan jalan tol; atau
 - e. Akuisisi pada perusahaan non tol tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terakhir.
 4. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
 5. Melaksanakan perubahan yang pokok dari bidang usaha Perseroan;
 6. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
 7. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
 - a. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terakhir yang telah diaudit; atau
 - b. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - c. pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Perseroan sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan PPJT; atau
 - d. dilakukan dalam rangka program restrukturisasi BUMN; atau
 - e. tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Raising*.
 8. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi, kecuali bila:
 - a. transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim; atau
 - b. transaksi tersebut wajib dilakukan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai akibat dari pengakhiran dan/atau pengalihan PPJT.
 9. Memberi pinjaman atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali:
 - a. Penyertaan saham pada Perusahaan di jalan tol; atau
 - b. Penyertaan saham dalam rangka program atau instruksi dari Pemerintah; atau
 - c. Penyertaan saham pada perusahaan di sektor non tol yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terakhir; atau
 - d. Pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak dan/atau pihak lain; atau
 - e. Pemberian pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan dan/atau karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan Perusahaan Anak serta PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan Program Pemerintah.
- b. Perseroan berkewajiban untuk:
1. Memenuhi kewajiban keuangan konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memelihara perbandingan antara laba sebelum bunga, pajak, provisi pelapisan utang jalan tol, penyusutan dan amortisasi dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan sedikitnya 1,1 : 1 (satu koma satu berbanding satu).
Yang dimaksud dengan Beban Bunga Yang Disesuaikan adalah beban atas Utang yang juga termasuk bunga yang dikapitalisasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Memelihara perbandingan antara Utang dengan Modal tidak lebih dari 5: 1 (lima berbanding satu).

2. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 12 (dua belas) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat Utang baru baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;
 - c. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen, yang diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan, setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - d. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
6. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan yang disyaratkan OJK dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan untuk penerbitan dan penawaran Obligasi, untuk pembuatan dan pelaksanaan setiap perjanjian yang berhubungan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas menyerahkan:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya
 - (a) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau
 - (b) pada saat penyerahan laporan konsolidasi ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
 - ii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasian) selambat-lambatnya dalam waktu
 - (a) (i) 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan; atau (ii) 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau (iii) 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka audit atas laporan keuangan konsolidasian, atau
 - (b) pada saat penyerahan Laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) ke OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana yang lebih lama.
7. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang potensial yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
8. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan salinan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
9. Memberikan izin kepada Wali Amanat untuk sewaktu-waktu pada Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib

memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

10. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu antara lain:

- a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
- b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan
- c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014
- d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat palingkurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terdapat perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

11. Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.

PERNYATAAN DAN JAMINAN PERSEROAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perseroan menyatakan dan menjamin kepada Wali Amanat dan Pemegang Obligasi antara lain:

1. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.

2. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
4. Perseroan menyatakan dan menjamin bahwa Perseroan telah dan akan memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
5. Perseroan membebaskan Wali Amanat dari segala tanggung jawab sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Butir 2 huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Butir 2 huruf f di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. Butir 2 huruf b, c, d, e, dan g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan itu atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanatmaka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman di dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut untuk dipenuhinya tagihan yang bersangkutan Perseroan belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka Wali Amanat wajib segera memanggil RUPO berikutnya. Wali Amanat wajib melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali RUPO berikutnya tersebut masih memberi waktu kepada Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya yang telah dilalaikan tersebut dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja.
2. kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi.
 - b. Selain ketentuan huruf a di atas, apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - c. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai

- dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksempurnaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan.
- d. Apabila suatu pihak yang berwenang secara hukum telah menyita atau merampas dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar dari harta benda Perseroan yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya.
 - e. Jika terjadi peristiwa kelalaian (*event of default*) pada perjanjian utang, baik Utang yang dibuat Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Perseroan yang mengakibatkan perjanjian utang / utang menjadi berakhir atau jumlah yang terutang oleh Perseroan menjadi dapat ditagih oleh kreditur sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan ketentuan peristiwa kelalaian tersebut terjadi dalam 1 (satu) tahun buku dengan jumlah utang yang wajib dibayar adalah lebih besar atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan Perseroan terakhir.
 - f. Apabila hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau Perseroan tidak mendapat izin dan/atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat lagi melanjutkan usahanya.
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut.
 - h. Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU/moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.
3. apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun (dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 huruf c Perjanjian Perwaliamanatan) atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan badan peradilan yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU / moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf h di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Wali Amanat dapat langsung melakukan penagihan kepada Perseroan dan Obligasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum waktunya (akselerasi pembayaran kembali).

RUPU

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;

- e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (yang bukan merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh

- pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Suara blanko, abstain, dan/atau suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
 - h. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf h, kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas diatur sebagai berikut:
 1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang

- hadir dalam RUPO.
- ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.

9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Perjanjian Perwaliamanatan" dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan yang baru dan jika dilakukan perubahan Akta Pengakuan Utang, maka para pihak di dalam Perjanjian Perwaliamanatan wajib menyesuaikan definisi "Akta Pengakuan Utang" dengan menambahkan Akta Pengakuan Utang yang baru.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal, tersebut yang berlaku.

14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPST. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK No. 16/2020.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Wali Amanat:
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : *Capital Market Services*

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan mengenai Obligasi dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Telp.: (021) 8413526, 841360
Fax.: (021) 8413540
e-mail: www.jasamarga.com

Wali Amanat:
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Up. : *Capital Market Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

1.3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**PUB**") ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- a. PUB dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
- b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.

- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. BA.KU.09.02.466 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik No. 3240324/DSN/11211 tanggal 25 Maret 2024.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

1.4. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-348/PEF-DIR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasamarga Tahap I Tahun 2024, dengan peringkat:

idAA (Double A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 25 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

Peringkat mencerminkan dukungan yang kuat dari Pemerintah untuk menyelesaikan proyek jalan tol, posisi dominan Perseroan di dalam industri jalan tol, portofolio jalan tol yang terdiversifikasi dengan masa konsesi yang panjang, dan fleksibilitas keuangan yang kuat. Namun, peringkat dibatasi oleh risiko bisnis terkait dengan pembangunan jalan tol baru dan *leverage* yang tinggi.

Peringkat akan dinaikkan jika Perusahaan dapat memperkuat profil bisnisnya secara substansial melalui keberhasilan dalam mengembangkan dan mengoperasikan jalan tol baru dengan volume lalu lintas yang kuat yang mendukung perbaikan profil keuangannya, dengan *leverage* yang lebih rendah dan cakupan arus kas yang lebih kuat.

Peringkat akan diturunkan jika dukungan pemerintah melemah atau profil keuangannya memburuk karena turunnya pendapatan akibat penurunan volume lalu lintas atau jika Perseroan menambah utang lebih tinggi dari yang diproyeksikan tanpa dikompensasi oleh prospek pertumbuhan yang baik

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja berupa pemeliharaan jalan tol dan pengoperasian jalan tol, dengan rincian sebesar 70% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengoperasian jalan tol dan sisanya sebesar 30% akan digunakan untuk pemeliharaan jalan tol.

Rencana modal kerja untuk pengoperasian jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan transaksi jalan tol, pelayanan lalu lintas jalan tol, dan pemeliharaan rutin fasilitas sarana transaksi, gedung kantor Gerbang Tol (GT) maupun bangunan pelengkap jalan tol sedangkan untuk pemeliharaan jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada *overlay* jalan tol, pemeliharaan rutin jalan tol, pemeliharaan sarana pelengkap jalan tol (*guardrail*, *concrete barrier*, pagar ROW (*Right of Way*) dan marka), penelitian jembatan, dan perkerasan.

Ruas jalan tol yang menjadi tujuan dalam penggunaan modal kerja tersebut adalah ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan dan berada di wilayah Regional Metropolitan yang mencakup area Jabodetabek dan Bandung.

Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dilakukan berdasarkan perjanjian jasa pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol antara Perseroan dengan Perusahaan Anak Perseroan, yaitu JMTO dan JMTM, yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan JMTO telah menandatangani beberapa perjanjian jasa pengoperasian jalan tol, yakni sebagai berikut: (i) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Jakarta – Bogor – Ciawi No. 98/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (ii) Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol JORR W2S dan Ulujami – Pondok Aren No. 99/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (iii) Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cawang – Tomang Pluit, Prof. DR. Ir. Soedijatmo, Jakarta – Tangerang No. 100/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan (iv) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cipularang - Padaleunyi No. 101/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan JMTM juga telah menandatangani perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol sebagai berikut: (i) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi PT Jasamarga (Persero) Tbk No. 02/Kontrak-/Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (ii) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S dan Ulujami-Pondok Aren PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 05/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (iii) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Tangerang-Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 03/Kontrak-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), dan (iv) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Cipularang-Padaleunyi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 04/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Uraian singkat mengenai perjanjian-perjanjian jasa pengoperasian jalan tol dan pemeliharaan jalan tol dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol antara Perseroan Dengan Perusahaan Anak”.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dimaksud maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan yang lain diantaranya mengoptimalkan *stand by loan* yang dimiliki Perseroan dengan perbankan maupun melakukan aksi korporasi lainnya seperti divestasi saham di *subholding* Perseroan maupun Perusahaan Anak Perseroan.

Perjanjian jasa pengoperasian jalan tol antara Perseroan dan JMTO dan perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol antara Perseroan dan JMTM merupakan suatu transaksi afiliasi yang juga merupakan kegiatan usaha Perseroan, JMTO dan JMTM yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin,

berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, yang hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

Selain itu, perjanjian jasa pengoperasian jalan tol dan perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol merupakan kegiatan usaha Perseroan, JMTO dan JMTM yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, sehingga Perseroan hanya wajib mengungkapkan perjanjian pengoperasian jalan tol dan perjanjian pemeliharaan jalan tol tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan yang nilainya termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. BF.KU09.0218 tanggal 13 Januari 2021 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 per 31 Desember 2020.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan (belum termasuk pajak) adalah sekitar 0,64% dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebesar 0,20%, yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,01%, biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,18%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,01%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,24%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,10%; biaya jasa Notaris sebesar 0,01%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,13%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,08% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,01% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,07%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,12% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI dan KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence* dan *public expose*, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00762/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Registrasi Akuntan Publik No. 0645) dengan opini tanpa modifikasi, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp90.400.783 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp22.821.163 juta dan Rp67.579.620 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	179.230
Utang kontraktor	560.316
Utang pajak	363.898
Beban akrual	8.120.532
Utang bank	4.499.415
Utang lembaga keuangan bukan bank	908.102
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	5.072.042
Utang lembaga keuangan bukan bank	200.000
Liabilitas pembebasan tanah	1.298.843
Liabilitas sewa	72.631
Provisi pelapisan jalan tol	541.854
Pendapatan diterima dimuka	46.724
Liabilitas imbalan kerja	1.794
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	955.782
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	22.821.163
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	5.651.292
Utang kontraktor jangka panjang	488.130
Beban akrual jangka panjang	715.029
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	57.046.445
Utang obligasi	897.353
Liabilitas pembebasan tanah	251.067
Liabilitas sewa	57.385
Provisi pelapisan jalan tol	731.649
Pendapatan diterima dimuka	73.683
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.316.108
Liabilitas derivatif	67.171
Liabilitas jangka panjang lainnya	284.308
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	67.579.620
TOTAL LIABILITAS	90.400.783

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas

Utang Usaha

Akun ini merupakan utang kepada pemasok terkait dengan pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, obat-obatan, pakaian dinas, dan utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol. Pada tanggal 31 Desember 2023 saldo utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp179.230 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak Berelasi	9.523
Pihak Ketiga	169.707
Total	179.230

Seluruh utang usaha terdenominasi dalam mata uang Rupiah.

Utang Kontraktor

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol, dan bangunan lain.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Jangka Pendek	
Pihak Berelasi	336.172
Pihak Ketiga	224.144
Total	560.316
Jangka Panjang	
Pihak Berelasi	267.658
Pihak Ketiga	
KSO Adhi-Abipraya-MKN	110.983
KSP PP-Waskita-Wika	105.489
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	4.000
Total	488.130

Seluruh utang kontraktor terdenominasi dalam mata uang Rupiah.

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp363.898 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	3.174
Pasal 21	9.796
Pasal 22	106
Pasal 23	2.869
Pasal 26	-
Pasal 29	160.359
Pasal 25	31.243
Pajak Pertambahan Nilai	31.608
	239.156

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2023	
Perusahaan Anak		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)		25.598
Pasal 21		12.023
Pasal 22		36.579
Pasal 23		2.438
Pasal 26		5
Pasal 29		28.849
Pajak Bumi Bangunan		17.116
Pajak Pertambahan Nilai		1.148
Kewajiban Pajak Lainnya		986
		124.742
Total		363.898

Beban Akruai

Saldo beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.120.532 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2023	
Beban kontraktor dan konsultan		
Pihak Berelasi		2.679.752
Pihak Ketiga		2.684.231
Beban umum dan administrasi		
Pihak Ketiga		1.588.273
Akrual insentif kerja		936.739
Hutang investasi ke Pemerintah		715.029
Beban bunga		
Pihak Berelasi		
Utang bank		13.826
Pihak Ketiga		
Utang pembebasan lahan		88.555
Utang bank sindikasi		81.853
Utang obligasi		5.013
Utang bagi hasil		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		13.809
PT Bank DKI		5.425
PT Bank Permata Tbk		2.500
PT Bank CIMB Niaga Tbk		650
Utang bank		
PT Bank Central Asia Tbk		8.744
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		6.089
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		74
Lain-lain		4.999
Total		8.835.561
Dikurangi bagian lancar		8.120.532
Bagian tidak lancar		715.029

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek lainnya

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2023	
Pihak Ketiga		
Uang titipan		249.113
Utang pencadangan		
Multi Lane Free Flow (MLFF)		257.096

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Utang pinjaman afiliasi TMJ	162.518
Utang jaminan pihak lain	101.642
Lainnya (di bawah Rp2.000)	185.414
Total	955.782

Utang titipan merupakan utang yang muncul akibat belum selesainya proses rekonsiliasi penerimaan pendapatan tol pada rekening escrow antar ruas yang saling bersinggungan dengan BUJT lainnya yang masuk kedalam rekening Perseroan.

Utang Bank

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Jangka Pendek	
Pihak Berelasi	2.726.257
Pihak Ketiga	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.173.216
PT Bank Central Asia Tbk	599.942
Total	4.499.415
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - utang bank jangka panjang	
Pihak Berelasi	815.638
Pihak Ketiga	
PT Bank DKI	1.750.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.004.901
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	1.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	357.606
PT Bank Permata Tbk	35.891
PT Bank CIMB Niaga Tbk	18.450
PT Bank Mega Tbk	14.489
PT Bank ICBC Indonesia	12.583
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	10.841
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	9.658
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.249
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	7.239
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	5.065
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	4.940
PT Bank Pembangunan Daerah	4.940
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	4.348
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	2.902
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.853
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.449
Subtotal	4.256.404
Total Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - utang bank jangka panjang	5.072.042
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pihak Berelasi	35.263.080
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	13.602.235
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.943.511
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.229.459
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.129.200
PT Bank Mega Tbk	940.507
PT Bank ICBC Indonesia	593.454
PT Bank Permata Tbk	500.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	494.562
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	345.240

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	282.218
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	210.092
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	188.364
PT Bank KEB Hana Indonesia	164.422
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	158.169
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	158.169
PT Bank Jabar Banten Syariah	93.854
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	59.316
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	40.252
Subtotal	22.133.024
Biaya belum diamortisasi	(349.659)
Total bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	57.046.445
Total Utang Bank Jangka Panjang	62.118.487

Informasi lain mengenai pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jangka Pendek

Kreditur	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas Terutang	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service	Debt to Equity
						Coverage Ratio (DSCR)	Ratio (DER)
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Japek Selatan							
Pinjaman Sindikasi							
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Pinjaman Talangan	1.538.257	17 Juli 2024	6,75%	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Jogja Bawen							
Pinjaman Dana Talangan Tanah							
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek	729.088	1 September 2024	6,40%	-	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek	444.128	21 Juni 2024	7,00%	-	-	-
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek	37.942	26 Desember 2024	6,50%	-	-	Maksimal 70% dari Project Cost
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Transjawa Tol							
Pinjaman Dana Talangan Tanah							
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Jangka Pendek	563.000	20 Januari 2024	6,00%	-	<i>Interest Coverage Ratio (ICR): Minimal 110% / 1.1</i>	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Jangka Pendek	525.000	21 Januari 2024	5,88%	-	<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR): Minimal 1.5</i>	Maksimal 3:1
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek	562.000	20 Januari 2024	6,00%	-	<i>Interest Coverage Ratio (ICR): Minimal 1.25 : 1</i>	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Kredit Jangka Pendek	100.000	20 Januari 2024	6,15%	-	<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR): Minimal 1 : 1</i>	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
Total		4.499.415				<i>EBITDA to Interest Ratio: Minimal 110% / 1.1</i>	

Jangka Panjang

Perseoran	Kreditur	Nama Fasilitas	Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun / Nisbah Bagi Hasil	Agunan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")		PMK iB Musyarakah	-	500.000	31 Juli 2025	6,50%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")		Term Loan	-	2.200.000	20 Oktober 2025	6,50%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")		Kredit Modal Kerja I (KMK)	-	350.000	26 September 2026	6,25%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")		Kredit Modal Kerja III (KMK)	-	350.000	26 September 2026	6,25%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")		Musyarakah	-	1.485.000	14 Oktober 2025	6,15%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")		Musyarakah	-	685.000	14 Oktober 2025	5,95%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Maybank, Tbk ("Maybank")		PPB Musyarakah iB	-	1.643.511	21 Desember 2025	6,20%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Maybank, Tbk ("Maybank")		PPB Musyarakah iB	-	300.000	21 Desember 2025	6,00%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")		Time Loan	-	2.000.000	24 Mei 2026	6,40%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Permata, Tbk ("Permata")		Musyarakah	-	500.000	30 Oktober 2026	6,00%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")		Kredit Berjangka	1.000.000	-	21 Oktober 2024	5,85%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%

	Kreditur	Nama Fasilitas	Jatuh tempo dalam satu tahun	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)				
	PT Bank Danamon - Unit Usaha Syariah ("Danamon Syariah")	Pembiayaan Musyarah	1.000.000	-	21 Oktober 2024	6,00%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%				
	PT Bank DKI ("DKI")	Modal Kerja - Musyarakah	1.000.000	-	21 Desember 2024	6,20%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%				
	PT Bank DKI ("DKI")	Modal Kerja - Musyarakah	750.000	-	9 Desember 2024	6,20%	-	Minimal 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%				
	Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)				
	Perusahaan Anak - PT Marga Sarana Jabar Pinjaman Sindikasi terdiri dari												
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	Kredit Investasi	5.046	993.021	30 Desember 2025	6,75%	Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lainnya Selama Masa Konsesi	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	-				
	Pinjaman Bank												
	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")	Pembiayaan Bilateral	4.901	1.129.200	28 Maret 2035	6,25%			-				
	Perusahaan Anak - PT Jasamarga Kunciran Cengkareng Pinjaman Sindikasi terdiri dari												
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk ("SMI")	Kredit Investasi	21.667	3.188.329	18 Desember 2038	6,75%	Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset Jalan Tol	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur				
	Perusahaan Anak - PT Marga Trans Nusantara												
	PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	1.227	2.576.655	23 Oktober 2037	6,75%	Hak Penguasaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur				

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Bali Tol								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	167.980	614.310	22 Juni 2027	7,13%	Hak Konsesi, Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya yang Diikat secara Fidusia	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")								
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")								
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ("BTN")								
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")								
PT Bank Pembangunan Daerah Bali								
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Kualanamu Tol								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi	94.514	1.800.916	13 Juli 2030	5,92%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")								
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	2. Bunga Masa Konstruksi	8.464	194.677			2. Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Asset Jalan Tol		
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara						3. Rekening Dana Penampungan		
						4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia		
Perusahaan Anak - PT Cinere Serpong Jaya								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	-	2.140.191	11 Oktober 2034	7,25%	Pendapatan Tol	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")								
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")								
Perusahaan Anak - PT Cinere Serpong Jaya								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Dana Talangan Tanah	32.645	-	4 Maret 2024	8,50%	1. Tagihan atas pengembalian Dana	-	-

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI") PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")						Talangan Tanah dari Pemerintah dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah 2. Rekening Penampungan Dana Talangan Tanah yang dilikat dengan gadai rekening senilai Rp 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh milyar rupiah) yang dimiliki nasabah 3. LOU (<i>Letter of Undertaking</i>) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemegang Saham Nasabah dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler	Minimal 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Perusahaan Anak - Jasamarga Balikpapan Samarinda								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	101.106	6.563.202	20 Desember 2033	6,25%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi 2. Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Asset Jalan Tol 3. Rekening dana tampungan 4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah dilikat fidusia	Minimal 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")								
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")								
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")								
PT Bank Mega, Tbk								
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk								
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")								
PT Bank (CBC Indonesia								

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank Pembangunan Daerah Papua								
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk								
PT Bank Pembangunan Kalimantan Selatan								
PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJB")								
Perusahaan Anak - Jasamarga Manado Bitung								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	1. Kredit Investasi	79.476	2.544.548	12 Oktober 2032	6,28%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal 100% / 1 kali sejak tahun 2027	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	2. Bunga Masa Konstruksi	8.937	286.129					
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")								
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")								
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")								
PT Bank ICBC Indonesia								
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat								
PT Bank Pembangunan Daerah Riau								
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah								
Perusahaan Anak - Jasamarga Japek Selatan								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Pinjaman Talangan	-	1.500.000	20 Oktober 2025	6,50%		Minimal 110% / 1 kali	Maksimal 5 (lima) : 1 (satu)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	Kredit Investasi	98.879	-	11 April 2024	7,75%		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Perusahaan Anak - Jasamarga Probolinggo Banyuwangi								
Pinjaman Sindikasi terdiri dari								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi	-	243.323	20 November 2038	7,85%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	2. Bunga Masa Konstruksi	-	37			2. Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain		

	Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jangka jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") PT Bank Pembangunan Daerah Papua PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Bali						terkait dengan Hak Pengusahaan Jalan Tol 3. Rekening Dana Penampungan 4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah dilikat fidusia		
	Pinjaman Dana Talangan Tanah PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Dana Talangan Tanah	35.891	-	30 Oktober 2024	8,75%	1. Tagihan atas pengembalian Dana Talangan Tanah dari Pemerintah dan/atau Instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah 2. Rekening Penampungan Dana Talangan Tanah yang dilikat dengan gadai rekening senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dimiliki nasabah 3. LOU (<i>Letter of Undertaking</i>) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemegang Saham Nasabah dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler	-	-
	Perusahaan Anak - PT Jasamarga Jogja Bawen PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	-	1.587.233	25 Oktober 2025	6,50%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	-

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Perusahaan Anak - PT Jasamarga Transjawa Tol								
Pinjaman Sindikasi PT JSM								
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	119.510	3.607.054	13 Oktober 2033	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimum 2,2 (dua koma dua) kali / 220%
Pinjaman Sindikasi PT JGP								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	65.703	2.286.457	24 Agustus 2032	6,65%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi	Minimal lebih dari 100% / 1 kali sejak tahun ke 4 setelah ruas tol beroperasi	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
Pinjaman Sindikasi PT JSN								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	48.833	1.930.671	21 Desember 2034	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	43.358	1.714.228	21 Desember 2034	6,75%			
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	31.359	1.239.815	21 Desember 2034	6,75%			
PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")	Kredit Investasi	18.450	729.459	21 Desember 2034	6,75%			
Pinjaman Sindikasi PT JNK								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	11.958	1.717.896	25 Juni 2037	6,65%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	Minimal lebih dari 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	11.958	1.717.896	25 Juni 2037	6,65%		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Kredit Investasi	4.234	414.908	25 Juni 2037	6,65%		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	
Pinjaman Sindikasi PT JSB								

Kreditur	Nama Fasilitas	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga Per Tahun	Agunan	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi	23.721	2.845.896	27 Desember 2036	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha-usaha lain, keseluruhan <i>escrow accounts</i> , pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah	Minimal 100% / 1 kali	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi	111.978	1.873.637	27 Desember 2036	6,75%		Minimal 100% / 1 kali	
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi	160.996	2.870.481	27 Desember 2036	6,75%		Minimal 100% / 1 kali	
PT Keb Hana Indonesia, Tbk ("Hana")	Kredit Investasi	9.249	164.424	27 Desember 2036	6,75%		Minimal lebih dari 100% / 1 kali	
Total		5.072.041	57.396.104					

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2023
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi	908.102
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Pendek	908.102
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi	200.000
Biaya belum diamortisasi	-
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang	200.000
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun – utang lembaga keuangan bukan bank	200.000

Perseroan

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 29 tanggal 16 September 2020 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dengan perubahan terakhir ke VIII No.PERJ-174/SMI/1222, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp350.000 juta dengan jangka waktu selambat-lambatnya pada 15 September 2024. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 6,10% per tahun dan pada 31 Desember 2022 adalah 5,75% per tahun. Pinjaman bank tidak mensyaratkan Perseroan untuk menyerahkan jaminan/agunan kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. *Interest coverage ratio* minimal 1,1 kali; dan
- b. *Debt to equity ratio* maksimal 5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi seluruh pembatasan penting.

Saldo terutang fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp200.000 juta.

Perusahaan Anak

Akun ini merupakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (“SMI”) di JAP. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 06 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 4 April 2023, JAP menandatangani perjanjian kredit dengan SMI untuk membiayai dana talangan pengadaan tanah. Fasilitas kredit yang diterima JAP adalah sebesar Rp908.102 juta dengan jangka waktu selama 12 bulan. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 6,75% per tahun.

Perjanjian tersebut tidak akan menjaminkan harta kekayaan JAP yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali atau pelunasan kewajiban secara tepat waktu yang telah disepakati berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka JAP berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyatakan *Negative Pledge*. Apabila terdapat harta kekayaan JAP yang telah dijaminkan terlebih dahulu menjadi agunan bagi kreditur lain sebelum perjanjian pembiayaan ditandatangani, maka *Negative Pledge* berlaku. SMI sebagai kreditur akan memperoleh bagian secara proporsional sesuai jumlah fasilitas pembiayaan masing-masing.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. *Interest coverage ratio* minimal 1,10 kali; dan
- b. *Debt to equity ratio* maksimal 5 kali.

Saldo terutang jangka panjang JAP pada pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp908.102 juta.

Utang Obligasi

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Perseroan	
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020	
Seri A	-
Seri B	286.000
Seri C	90.050
Seri D	523.600
Subtotal	899.650
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(2.297)
Total utang obligasi	897.353
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Utang obligasi bagian jangka panjang	897.353

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("**Obligasi**") 4 (empat) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

- Seri A sebesar Rp1.100.350 juta dan suku bunga 7,90% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.
- Seri B sebesar Rp286.000 juta dan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2025.
- Seri C sebesar Rp90.050 juta dan suku bunga 8,60% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2027.
- Seri D sebesar Rp523.600 juta dan suku bunga 9,00% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2030.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 8 September 2020 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp2.000.000 juta. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, diantaranya namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol. Peringkat obligasi ini adalah idAA berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 13 November 2023.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Interest Coverage Ratio* (ICR) (rasio cakupan bunga minimal 1,1 : 1; dan
- Debt to Equity Ratio* (DER) (rasio utang) maksimal 5:1

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Liabilitas Pembebasan Tanah

Akun ini merupakan liabilitas Perusahaan Anak atas dana talangan pembelian tanah dan untuk pembangunan ruas jalan tol dengan menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol. Penggunaan dana talangan tersebut oleh JSM adalah untuk pembangunan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto, MTN adalah untuk pembangunan ruas Tol Kunciran - Serpong dan JKC adalah untuk pembangunan ruas tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran.

Selain itu, kewajiban pembebasan tanah juga merupakan kewajiban pembebasan tanah untuk pelunasan utang ganti rugi pelebaran Jalan Tol Sedyatmo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.385 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari 1 tahun	72.912
Antara 1 – 3 tahun	74.436
Total	142.348
Dikurangi : Bunga Diskonto	(17.332)
Nilai Kini Pembayaran	130.016
Sewa Minimum	
Dikurangi : bagian jatuh tempo satu tahun	(72.631)
Bagian jangka panjang	57.385

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Perseroan	
Aset tetap dan aset takberwujud	765.119
Provisi pelapisan jalan tol	(101.979)
Liabilitas imbalan kerja	(141.743)
Beban insentif	(210.265)
Penyisihan piutang tak tertagih	(3.382)
Efek tersedia untuk dijual	1.487
Aset hak guna	10.880
Liabilitas sewa	(10.315)
	309.802
Perusahaan Anak	
Aset tetap dan aset takberwujud	5.467.186
Provisi pelapisan jalan tol	(49.598)
Liabilitas imbalan kerja	25
Penyisihan kerugian penurunan piutang	(4.369)
Rugi fiskal	(72.969)
Beban akrual	(33.978)
Nilai wajar investasi saham	34.168
Aset hak guna	14.962
Liabilitas sewa	(13.937)
	5.341.490
Total	5.651.292

Liabilitas Imbalan Kerja

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Perseroan	
Program Kesehatan Pensiunan	618.557

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2023	
Program Purna Karya		493.295
Program Pasca Kerja Lainnya		140.267
Program Jangka Panjang Lainnya		20.499
Program Pensiun		-
Subtotal		1.272.618
Perusahaan Anak		
Program Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya		
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta		23.557
PT Jasamarga Transjawa Tollroad		10.867
PT Jasamarga Related Business		4.472
PT Jasamarga Bali Tol		4.466
PT Marga Sarana Jabar		635
PT Jasamarga Tollroad – Maintenance		295
PT Jasamarga Japek Selatan		262
PT Jasamarga Kunci Cengkareng		212
PT Cinere Serpong Jaya		165
PT Jasamarga Balikpapan – Samarinda		150
PT Jasamarga Manado Bitung		109
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi		47
PT Jasamarga Kualanamu Tol		46
PT Jasamarga Jogja Bawen		1
Subtotal		45.284
Total		1.317.902
Dikurangi : bagian jangka pendek		(1.794)
Bagian jangka panjang		1.316.108

Liabilitas Derivatif

Instrumen	Jumlah Nosional	Aset Derivatif	Liabilitas Derivatif
Lindung Nilai Arus Kas	2.532.881	23.142	67.171

Transaksi pokok yang mendasari nilai arus kas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada anak perusahaan PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) No. 73 WCO. KP/479/KI/2021 dengan limit kredit setinggi-tingginya Rp2.630.000 juta dan suku bunga berlaku terdiri dari JIBOR 1M + margin 1,35% per tahun. Dengan menggunakan lindung nilai arus kas, suku bunga JGP menjadi datar sebesar 6,65%, dimulai dari tanggal 29 Oktober 2021 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2024;
2. Fasilitas *treasury line* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada anak perusahaan PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) No. 04 WCO. KP/0006/TL/2022 dengan limit kredit setinggi-tingginya Rp1.989.404 juta; dan
3. Fasilitas *Treasury Line-interest rate swap* (IRS) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada anak perusahaan PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) No. 42 WCO. KP/0007/TL/2022 dengan limit kredit setinggi-tingginya Rp2.935.061 juta dan suku bunga berlaku terdiri dari JIBOR 1M + margin per tahun. Dengan menggunakan lindung nilai arus kas, suku bunga JSB menjadi tetap sebesar 6,75%, dimulai dari tanggal 28 Desember 2021 dan berakhir tanggal 28 Desember 2024.

Perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas derivatif diakui dalam penghasilan/(beban) komprehensif lain.

2. Komitmen dan Kontinjensi

Berikut adalah kontinjensi Perseroan dan Perusahaan Anak yang terdapat kemungkinan arus keluar manfaat ekonomi :

- a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
- c. Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah untuk Jalan Tol

- d. Penggantian Lahan
- e. Pengembalian Investasi Pemerintah
- f. Kompensasi Pengembalian Aset Tanah Jalan Tol Semarang-Demak
- g. Gugatan Perjanjian Pembangunan Simpang Susun Karawang Barat STA 47+130
- h. Gugatan Budhi Yulianor pada Perkara Ganti Rugi Banjir
- i. Gugatan Eucharia Binti Neneng S
- j. Gugatan PT Citra Lamtoro Gung Persada dan PT Hanurata

3. Perubahan Liabilitas setelah 31 Desember 2023 sampai dengan Prospektus

Selama periode 2024, Perseroan telah melakukan pencairan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BNI sebesar Rp1.100.000 juta dengan rincian Rp400.000 juta pada tanggal 29 Februari 2024, Rp500.000 juta pada tanggal 1 Maret 2024, dan Rp200.000 juta pada tanggal 18 Maret 2024. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Maret 2024 adalah sebesar 6,00%, dengan sifat perjanjian *revolving* dan perjanjian kredit ini tidak disyaratkan adanya agunan. Dengan pemenuhan ketentuan *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali dan *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 5 kali.

Perseroan telah melakukan pencairan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp200.000 juta pada tanggal 22 Maret 2024. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Maret 2024 adalah sebesar 6,50%, dengan sifat perjanjian *revolving* dan perjanjian kredit ini tidak disyaratkan adanya agunan. Dengan pemenuhan ketentuan *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali dan *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 5 kali.

Perseroan telah melakukan pencairan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Maybank sebesar Rp1.016.441 juta pada tanggal 26 Maret 2024. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Maret 2024 adalah sebesar 6,34%, dengan sifat perjanjian *revolving* dan perjanjian kredit ini tidak disyaratkan adanya agunan. Dengan pemenuhan ketentuan *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali dan *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 5 kali.

4. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	Bank	Plafond (Rp)	Outstanding (Rp)	Jatuh Tempo
Induk	BNI	1.100.000	-	30-Aug-24
Induk	PT SMI	350.000	200.000	15-Sep-24
JJS	BNI	1.538.256	1.538.256	17-Jul-24
JJB	Maybank	102.000	37.942	21-Jun-24
JJS	BCA	4.000.000	729.087	1-Sep-24
JJB	BCA	700.000	444.128	1-Sep-24

Kewajiban ini akan dilakukan melalui perpanjangan jatuh tempo dengan pihak perbankan.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK

DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00762/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Registrasi Akuntan Publik No. 0645) dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	4.438.951	8.429.118
Investasi jangka pendek	1.360.795	2.394.007
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	344.226	527.578
Pihak ketiga	922.121	697.414
Persediaan	119.490	98.627
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	95.910	68.276
Pajak dibayar dimuka	134.956	86.149
Dana dibatasi penggunaannya	558.326	71.043
TOTAL ASET LANCAR	7.974.775	12.372.212
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang lain-lain	275.000	115.000
Dana dibatasi penggunaannya	292.783	165.776
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	6.155.705	8.974.143
Aset tetap - neto	474.401	360.716
Properti investasi - neto	751.557	604.289
Aset takberwujud - neto		
Hak pengusahaan jalan tol	111.246.294	66.979.662
Lainnya	109.573	81.074
<i>Goodwill</i>	41.849	41.849
Aset keuangan lainnya - neto	246.677	349.695
Aset tidak lancar lainnya - neto	1.720.233	1.094.766
Aset derivatif	23.142	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	121.337.214	78.766.970
TOTAL ASET	129.311.989	91.139.182
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	179.230	134.726
Utang kontraktor	560.316	457.783
Utang pajak	363.898	785.809
Beban akrual	8.120.532	5.224.379
Utang bank	4.499.415	1.853.174
Utang lembaga keuangan bukan bank	908.102	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	5.072.042	360.177
Utang lembaga keuangan bukan bank	200.000	-

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang obligasi	-	1.100.350
Liabilitas pembebasan tanah	1.298.843	838.542
Liabilitas sewa	72.631	29.379
Provisi pelapisan jalan tol	541.854	493.242
Pendapatan diterima dimuka	46.724	139.659
Liabilitas imbalan kerja	1.794	1.794
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	955.782	723.974
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	22.821.163	12.142.988
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	5.651.292	1.634.980
Utang kontraktor jangka panjang	488.130	213.454
Beban akrual jangka panjang	715.029	693.945
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	57.046.445	46.687.743
Utang lembaga keuangan bukan bank	-	200.000
Utang obligasi	897.353	895.770
Liabilitas pembebasan tanah	251.067	859.008
Liabilitas sewa	57.385	91.114
Provisi pelapisan jalan tol	731.649	475.964
Pendapatan diterima dimuka	73.683	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.316.108	1.256.108
Liabilitas derivatif	67.171	90.748
Liabilitas jangka panjang lainnya	284.308	275.971
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	67.579.620	53.374.805
TOTAL LIABILITAS	90.400.783	65.517.793
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham		
Modal dasar 19.040.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 saham seri B	3.628.936	3.628.936
Tambahkan modal disetor - neto	3.997.085	3.997.085
Selisih atas transaksi entitas non-pengendali	(51.064)	(46.482)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	8.971.304	8.971.304
Belum ditentukan penggunaannya	13.697.656	7.453.482
Penghasilan komprehensif lain:		
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar	(1.166.806)	(1.049.514)
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	(50.675)	(100.596)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(1.134.999)	(1.028.612)
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	27.891.437	21.825.603
Kepentingan Non-Pengendali	11.019.769	3.795.786
TOTAL EKUITAS	38.911.206	25.621.389
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	129.311.989	91.139.182

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN		
Pendapatan tol	13.948.029	12.443.950
Pendapatan usaha lainnya	1.617.953	1.338.608
Pendapatan konstruksi	5.752.623	2.800.291
Total	21.318.605	16.582.849
BEBAN POKOK PENDAPATAN		
Beban tol dan usaha lainnya	(6.643.256)	(6.391.616)
Beban konstruksi	(5.716.823)	(2.773.136)
Total	(12.360.079)	(9.164.752)
LABA BRUTO	8.958.526	7.418.097
Penghasilan keuangan	255.966	152.421
Penghasilan lain-lain	150.107	238.004
Beban umum dan administrasi	(2.007.934)	(1.934.783)
Beban lain-lain	(120.097)	(708.320)
Beban pajak atas penghasilan keuangan	(30.675)	(27.457)
Keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi	4.017.364	-
Kerugian dari nilai wajar investasi jangka pendek	(963.687)	-
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	1.058.750	-
Keuntungan dari pelepasan investasi	-	2.245.045
LABA USAHA	11.318.320	7.383.007
Beban keuangan	(3.592.352)	(3.885.342)
Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	200.457	228.130
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.926.425	3.725.795
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(867.313)	(1.261.086)
Tanggungan	(309.623)	(141.001)
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1.176.936)	(1.402.087)
LABA TAHUN BERJALAN	6.749.489	2.323.708
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(131.347)	(219.139)
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama	(92)	(142)
Pajak penghasilan terkait	25.398	23.062
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - setelah pajak	(106.041)	(196.219)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya		
Kerugian yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar	(1.115.351)	(1.313.484)
Penyesuaian reklasifikasi atas investasi jangka pendek diukur nilai wajar	963.687	-
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	48.884	5.939
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama	11.895	(10.242)
Pajak penghasilan terkait	33.986	7.914
Subtotal pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya	(56.899)	(1.309.873)
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(162.940)	(1.506.092)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	6.586.549	817.616
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	6.793.551	2.746.884
Kepentingan non-pengendali	(44.062)	(423.176)
TOTAL	6.749.489	2.323.708
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	6.619.793	1.239.322
Kepentingan non-pengendali	(33.244)	(421.706)
TOTAL	6.586.549	817.616
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	936	378

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pendapatan tol	13.957.336	12.459.781
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	1.561.622	1.191.174
Pembayaran kepada pemasok	(3.710.254)	(3.463.136)
Pembayaran kepada karyawan	(2.248.918)	(1.843.883)
Pembayaran biaya pelapisan ulang	(651.833)	(412.303)
Kas Neto Diperoleh dari Operasi	8.907.953	7.931.633
Pembayaran pajak penghasilan	(1.297.085)	(835.321)
Penerimaan bunga	225.291	917.842
Pembayaran bunga	(3.670.203)	(3.991.947)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.165.956	4.022.207
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Dampak kombinasi bisnis	366.494	-
Penerimaan atas pelepasan investasi di Entitas Anak dan Asosiasi	-	4.217.916
Penambahan hak pengusahaan jalan tol	(5.641.190)	(4.367.426)
Penambahan aset takberwujud lainnya	(67.713)	(61.804)
Penambahan piutang talangan tanah kepada Pemerintah	(83.596)	(461.847)
Pencairan dana dibatasi penggunaannya - neto	22.689	279.299
Penambahan investasi asosiasi dan ventura bersama	(704.529)	(371.625)
Penerimaan dividen atas Investasi Asosiasi	-	1.822
Penambahan aset tetap	(74.372)	(53.593)
Penerimaan atas penjualan aset tetap	34.493	16.073
Perolehan properti investasi	(227.701)	(207.484)
Penambahan uang muka setoran modal aset keuangan	(2.365)	-
Penerimaan dividen atas aset keuangan	17.773	10.866
Penambahan investasi aset keuangan	-	(278.345)
Penambahan aset tidak lancar lainnya	(58.383)	(53.490)
Penerimaan pelunasan pinjaman entitas asosiasi dan ventura bersama	-	621.178
Pelepasan investasi jangka pendek	-	125.391
Penambahan investasi jangka pendek	(1.905.953)	(1.056.602)
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(8.324.353)	(1.639.671)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank	17.673.280	10.786.708
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank	908.102	-
Penerimaan dari penerbitan saham di entitas anak oleh pihak non-pengendali	102.699	244.892
Pembayaran utang bank	(16.567.983)	(9.863.478)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	-	(1.149.300)
Pembayaran utang obligasi	(1.100.350)	-
Liabilitas pembebasan tanah	(147.640)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(144.774)	(76.710)
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham non-pengendali	-	(4.021)
Pembayaran dividen	(555.104)	(148)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	168.230	(62.057)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(3.990.167)	2.320.479
Kas dan Setara Kas dari Entitas Anak yang Didekonsolidasikan	-	(170.450)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	8.429.118	6.279.089
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4.438.951	8.429.118

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	28,56	9,32
Laba kotor	20,77	14,58
Laba usaha	53,30	9,87
Laba/(rugi) tahun berjalan	190,46	166,71
EBITDA	36,21	16,72
Jumlah aset	41,88	(9,98)
Jumlah liabilitas	37,98	(13,50)
Jumlah ekuitas	51,87	0,47
Rasio Usaha (%)		
Laba kotor / pendapatan	42,02	44,73
Laba usaha / pendapatan	53,09	44,52
Laba tahun berjalan / pendapatan	31,66	14,01
Laba tahun berjalan / jumlah aset	5,22	2,55
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	17,35	9,07
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	34,94	101,89
Jumlah liabilitas / total aset	69,91	71,89
Jumlah liabilitas / total ekuitas	232,33	255,72
Margin EBITDA	64,54%	60,91%
<i>Interest coverage ratio</i>	3,21	1,96
<i>Debt service coverage ratio</i>	2,23	7,49

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Keterangan	Persyaratan	31 Desember 2023
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	Minimal 1,1	3,21
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio (x)</i>	Maksimal 5	2,32

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00762/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Registrasi Akuntan Publik No. 0645) dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol, memiliki 36 konsesi jalan tol (\pm 1.736 km) dan mengoperasikan \pm 1.264 km (72,6%) jalan tol yang beroperasi. yang dioperasikan baik di level induk, anak perusahaan, dan di bawah *sub-holding* PT Jasamarga Transjawa Tol. Bisnis Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dimana sebagian besar jalan tol yang berada di Pulau Jawa (\pm 1.008 km) sudah terkoneksi dan memberikan dampak positif kepada volume lalu lintas dan pertumbuhan pendapatan tol.

Perseroan memiliki 3 anak perusahaan yang berfokus pada bisnis pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta 1 anak perusahaan di bisnis prospektif.

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Tarif Tol

Sebagai perusahaan jalan tol, tarif tol merupakan sumber utama pendapatan sehingga penyesuaian tarif tol akan sangat berdampak pada kondisi keuangan Perseroan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Perseroan berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif jalan tol setiap dua tahun sekali dengan mengacu pada inflasi daerah. Untuk mendapatkan kenaikan tarif reguler tersebut setiap ruas jalan tol perlu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dipersyaratkan.

Volume Lalu Lintas

Bisnis usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat volume lalu lintas pada jalan tol yang nantinya akan berdampak pada arus pendapatan. Volume lalu lintas pada jalan tol terutama ditentukan (i) perubahan kondisi perekonomian, (ii) kenaikan harga BBM, dan (iii) pertumbuhan panjang jalan tol yang beroperasi. Selain itu, tersedianya alternatif transportasi lain (misal: kereta api, MRT, LRT ataupun Trans Jakarta) juga turut mempengaruhi penurunan volume lalu lintas.

Konstruksi Jalan Tol Baru

Memperluas jaringan jalan tol dan meningkatkan konektivitas pada portofolio Perseroan yang ada. Membangun dan mengoperasikan jalan tol baru secara bertahap untuk menyesuaikan dengan investasi dan kemampuan finansial Perseroan sehingga dapat mendatangkan keuntungan dan meningkatkan nilai Perseroan.

3. Hasil Kegiatan Operasional

Pendapatan

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.318.605 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 28,56% atau setara dengan Rp4.735.756 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.582.849 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan karena pertumbuhan yang didorong oleh kinerja volume lalu lintas yang meningkat seiring dengan pandemi yang dinyatakan telah usai oleh pemerintah yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat khususnya pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta keberhasilan penyesuaian tarif atas 19 ruas jalan tol, sehingga mendorong peningkatan pendapatan tol. Selain itu, peningkatan pendapatan usaha lainnya dan pendapatan konstruksi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan.

Pendapatan Usaha Diluar Konstruksi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.565.982 juta di mana terjadi peningkatan sebesar 12,94% atau setara dengan Rp1.783.424 juta dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.782.558 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan karena aktivitas operasional dengan adanya pertumbuhan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif normal ataupun tarif spesial yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.360.079 juta, meningkat sebesar 34,87% atau setara dengan Rp3.195.327 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp9.164.752 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan beban pokok pendapatan tersebut disebabkan oleh percepatan progress konstruksi atas ruas – ruas jalan tol baru.

Beban Usaha Diluar Konstruksi Perseroan pada tanggal tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.643.256 juta, meningkat sebesar 3,94% atau setara dengan Rp251.640 juta dibanding dengan beban usaha diluar konstruksi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.391.616 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sebagai syarat implementasi penyesuaian tarif di 19 ruas jalan tol pada tahun 2023.

Laba Bruto

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 20,77% menjadi Rp8.958.526 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari sebelumnya Rp7.418.097 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Margin laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 turun menjadi 42,02% dari sebelumnya 44,73% untuk tahun yang sama pada tahun 2022, sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas dan penyesuaian tarif pada beberapa ruas tol yang berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan tol.

Laba Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 190,46% menjadi Rp6.749.489 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari sebelumnya Rp2.323.708 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.586.549 juta, di mana terjadi peningkatan sebesar 705,58% atau setara dengan Rp5.768.933 juta, dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp817.616 juta. Peningkatan total penghasilan komprehensif tahun berjalan disebabkan karena adanya keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi sebagai efek dari pembelian kembali RDPT MIET atas tiga ruas jalan tol (Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono).

4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Aset Lancar	7.974.775	12.372.212
Aset Tidak Lancar	121.337.214	78.766.970
Total Aset	129.311.989	91.139.182
Liabilitas Jangka Pendek	22.821.163	12.142.988
Liabilitas Jangka Panjang	67.579.620	53.374.805
Total Liabilitas	90.400.783	65.517.793
Total Ekuitas	38.911.206	25.621.389

Aset

Pada tanggal 31 Desember 2023 total aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp7.974.775 juta atau menurun sebesar 35,54% atau setara dengan Rp4.397.437 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.372.212 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2023 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp121.337.214 juta atau meningkat sebesar 54,05% atau setara dengan Rp42.570.244 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp78.766.970 juta. Peningkatan aset tidak lancar pada tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan aset tak berwujud - neto hak pengusahaan jalan tol dengan adanya pembelian kembali RDPT MIET di PT LMJ pada tiga ruas jalan tol sehingga diterapkan efek kombinasi bisnis berdasarkan PSAK 22.

Pada tanggal 31 Desember 2023 total aset Perseroan adalah sebesar Rp129.311.989 juta atau meningkat sebesar 41,88% atau setara dengan Rp38.172.807 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp91.139.182 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar pada aset tak berwujud - neto hak pengusahaan jalan tol dengan dilakukannya pembelian kembali atas Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (MIET) di PT Lintas Marga Jawa (LMJ) pada tiga ruas jalan tol, yakni Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono sehingga berlaku penerapan Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 tentang Kombinasi Bisnis.

Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023, total liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anaknya adalah sebesar Rp22.821.163 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 87,94% setara dengan Rp10.678.175 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.142.988 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 disebabkan karena peningkatan utang bank dengan terkonsolidasinya kembali Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono.

Pada tanggal 31 Desember 2023, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp67.579.620 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 26,61% setara dengan Rp14.204.815 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp53.374.805 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan liabilitas pajak tangguhan yang dipengaruhi oleh efek konsolidasi kembali atas tiga ruas jalan tol (Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono) dan utang kontraktor jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2023, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp90.400.783 juta di mana terjadi kenaikan sebesar 37,98% setara dengan Rp24.882.990 juta dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.517.793 juta. Kenaikan total liabilitas pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh terkonsolidasinya kembali tiga ruas jalan tol, yakni Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono pada neraca Perseroan sebagai pengaruh dari pembelian kembali RDPT MIET pada PT LMJ melalui PT JTT pada Juli 2023.

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2023, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp38.911.206 juta, meningkat sebesar 51,87% atau setara Rp13.289.817 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp25.621.389 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan ekuitas neto atas kepentingan non-pengendali terhadap pembelian kembali RDPT MIET pada PT LMJ melalui PT JTT dan juga kinerja laba bersih di tahun 2023.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal dengan menggunakan kas yang diperoleh secara internal dari aktivitas operasi dan secara eksternal dari kegiatan pendanaan. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas pinjaman bank, sebagai sumber likuiditas eksternal yang material, yang belum ditarik sebesar Rp17.628.953 juta. Sedangkan sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp4.165.956 juta.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki arus kas yang kuat dari aktivitas operasi untuk mendanai kebutuhan pendanaan Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan saat ini memiliki *standby loan* dari pinjaman perbankan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan penerbitan pendanaan melalui surat utang pasar modal dan/atau pinjaman perbankan, serta aksi korporasi seperti divestasi di level *subholding* maupun Perusahaan Anak, tentunya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.165.956	4.022.207
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(8.324.353)	(1.639.671)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	168.230	(62.057)

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan tol, penerimaan dari pendapatan lainnya, pembayaran ke pemasok, pembayaran ke karyawan dan pembayaran biaya pelapisan ulang.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 3,57% menjadi Rp4.165.956 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp4.022.207 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan tol Perseroan dengan adanya penyesuaian tarif di beberapa ruas jalan tol dan peningkatan pendapatan usaha lain yang terealisasi di tahun 2023.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.639.671 juta dan Rp8.324.353 juta masing masing pada tahun 2022 dan 2023, yang terutama terdiri dari atas penambahan hak pengusahaan jalan tol dan investasi jangka pendek. Pada tahun 2023, Perseroan juga melakukan penambahan investasi asosiasi dan ventura bersama.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp168.230 juta pada tahun 2023 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp62.057 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh penerimaan utang bank sebesar Rp17.673.280 juta yang sebagian di-*offset* dengan pembayaran utang bank sebesar Rp16.567.983 juta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan.

6. Informasi segmen

Berikut adalah kontribusi masing-masing segmen usaha yang dimiliki Perseroan untuk pendapatan dan laba/(rugi) tahun berjalan :

Segmen Usaha	Pendapatan				Laba Tahun Berjalan			
	2023	Kontribusi per segmen	2022	Δ%	2023	Kontribusi per segmen	2022	Δ%
Usaha Jalan Tol	19.804.063	92,90%	15.432.178	28,33%	10.911.747	161,67%	2.346.190	365,08%
Pengoperasian	2.100.397	9,85%	1.880.023	11,72%	233.654	3,46%	133.890	74,51%
Pemeliharaan	1.498.379	7,03%	1.155.661	29,66%	416.562	6,17%	269.350	55,23%
Bisnis Terkait	617.665	2,90%	503.224	22,74%	16.554	0,25%	32.664	-49,32%
Eliminasi	(2.701.899)		(2.298.237)	17,56%	(5.792.715)		(458.386)	1.163,72%
Konsolidasian	21.318.605		16.672.849	110,01%	6.749.489		2.322.708	1.609,22%

Pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan segmen usaha jalan tol meningkat sebesar 28,33%, yang terutama disebabkan oleh kenaikan volume lalin dimana hal dipengaruhi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia tanggal 22 Juni 2023, sehingga pergerakan masyarakat kembali menuju kondisi normal dan perekonomian berangsur pulih. Selain itu, terealisasi penyesuaian tarif pada 19 ruas yaitu Pandaan – Malang, Semarang ABC, BORR, Kunciran - Serpong, Balikpapan – Samarinda, Cikampek – Padalarang, Padalarang-Cileunyi, Palikanci, Jagorawi, Prof. Dr. Ir. Soedijatmo, Ngawi - Kertosono – Kediri, Gempol – Pasuruan, Belawan – Medan – Tanjung Morawa, Solo – Ngawi, Surabaya – Gempol, Semarang-Batang, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (JKT), Semarang - Solo dan JORR.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan segmen pengoperasian meningkat sebesar 11,72%, yang berasal dari penambahan kontrak pengoperasian ruas jalan tol baru antara lain pada ruas Cibitung - Cilincing (seksi 4, Tarumajaya – Cilincing), Cimanggis - Cibitung (seksi 2A, Jatikarya – Simpang Susun Cikeas), Bogor - Ciawi – Sukabumi (seksi 2, Cigombong – Cibadak), dan Cinere - Serpong (seksi 2, Pamulang - Cinere).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan segmen pemeliharaan meningkat sebesar 29,66%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk dari Aspal *Mixing Plant Heavy Equipment* dan pekerjaan proyek konstruksi dalam hal pekerjaan SFO (Scrapping, Filling Overlay).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan segmen bisnis terkait meningkat sebesar 22,74%, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari pengelolaan *rest area* (BBM dan sewa tenant) dan pendapatan iklan dan utilitas

Laba Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laba tahun berjalan segmen usaha jalan tol meningkat sebesar 365,08%, yang terutama disebabkan oleh adanya *gain* atas *fair value* dan keuntungan pembelian diskon atas akuisisi bertahap sehubungan dengan aksi korporasi *buyback* Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada 3 ruas jalan tol antara lain Semarang – Batang (JBS), Solo – Ngawi (JSN), dan Ngawi – Kertosono (JNK).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laba tahun berjalan segmen pengoperasian dan pemeliharaan meningkat sebesar 74,51% dan 55,23%, yang terutama disebabkan oleh upaya pengendalian biaya operasional dan pertumbuhan pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, laba tahun berjalan segmen bisnis terkait menurun sebesar 49,32%, yang terutama disebabkan kenaikan HPP BBM yang dijual di *rest area* dan kenaikan HPP pemeliharaan *rest area*.

7. Belanja modal

Selama tahun 2023, tidak terdapat ikatan material untuk komitmen investasi barang modal sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing.

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Belanja modal neto untuk per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut adalah sebesar Rp12.128.028 juta dan Rp7.915.393 juta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

8. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur terhadap suku bunga Perseroan dan Perusahaan Anak terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas keuangan sebesar Rp25.211.003 juta dan Rp24.964.219 juta yang dikenakan suku bunga mengambang. Pada 31 Desember 2023, penurunan (kenaikan) 19 poin dasar pada tingkat bunga liabilitas keuangan bunga mengambang, variabel lain dianggap konstan, ekuitas dan laba atau rugi masing-masing akan naik (turun) sebesar Rp48.600.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki risiko kurs mata uang asing dikarenakan sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan tidak menggunakan mata uang asing. Namun, risiko untuk suku bunga acuan pinjaman dapat mempengaruhi kondisi keuangan.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak untuk operasi normal Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Berikut adalah tabel liabilitas Perseroan berdasarkan jatuh temponya :

(dalam jutaan Rupiah)

	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun dan Kurang Dari 5 Tahun	Lebih Dari 5 Tahun	Jumlah
Utang Usaha	179.230	-	-	179.230
Utang Kontraktor	560.316	488.130	-	1.048.446
Beban Akrua	8.120.532	715.029	-	8.835.561
Liabilitas Keuangan Lainnya	955.782	-	-	955.782
Utang Bank Jangka Pendek	4.499.415	-	-	4.499.415
Utang Bank Jangka Panjang	5.072.042	13.883.035	43.163.410	62.118.487
Utang Lembaga Keuangan				
Bukan Bank Jangka Panjang	200.000	-	-	200.000
Liabilitas Pembebasan Tanah	1.298.843	-	251.067	1.513.910
Liabilitas Sewa	72.631	57.385	-	130.016
Utang Obligasi	-	376.050	521.303	897.353
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	284.308	284.308
Total	20.958.791	15.519.629	44.184.088	80.662.508

9. Kebijakan akuntansi penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK yang fungsinya telah dialihkan kepada OJK sejak tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Selain laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten diantara laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 dan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

10. Perubahan kebijakan akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak penerapan manajemen maupun perubahan kebijakan manajemen pada tahun yang berakhir pada 2023 dan 2022.

11. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Pada tanggal 5 Juli 2023, JTT melakukan pembelian kembali (*buy back*) atas seluruh unit penyertaan pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (RDPT MIET), sehingga JTT secara tidak langsung mengakuisisi kepemilikan saham pada PT Lintas Marga Jawa (LMJ) sebanyak 194.336.593 lembar saham.

Setelah aksi korporasi tersebut dilakukan, JTT memperoleh pengendalian langsung dan tidak langsung atas LMJ, JSB, JSN dan JNK dengan persentase kepemilikan pada masing-masing sebesar 97,32%, 59,80%, 59,53% dan 59,60%.

Sebelum pengendalian diperoleh, JTT memiliki kepemilikan langsung atas JSB, JSN dan JNK yang mana Investasi ini diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas.

12. Komponen Penting Dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan, selain perubahan tarif tol, volume lalu lintas dan perubahan dari beban tol dan pemeliharaan jalan tol.

13. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 dan PP No. 15 tahun 2005, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif tol untuk setiap jalan tol yang dioperasikan Perseroan setiap dua tahun sekali berdasarkan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Perubahan harga atas penyesuaian tarif bersifat inelastic terhadap penjualan Perseroan, hal ini tercermin di pendapatan tol perusahaan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian, ada risiko penyesuaian tarif tertunda atau besarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tertundanya penyesuaian tarif bisa disebabkan oleh belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penolakan masyarakat. Tertundanya penyesuaian tarif akan membawa dampak negatif terhadap pencapaian tingkat keuntungan dan arus kas kegiatan usaha Perseroan. Oleh sebab itu, untuk memitigasi dampak tersebut Perseroan mengajukan permohonan penyesuaian tarif 3 (tiga) bulan sebelum rencana implementasi penyesuaian tarif dengan secara parallel Perseroan memastikan pemenuhan SPM berdasarkan Permen PU No 16/PRT/M/2014 dengan 8 indikator yang harus dipenuhi. Selain itu Perseroan melakukan FGD dengan *Key Opinion Leader* (KOL) dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai strategi komunikasi untuk menghindari penolakan dari masyarakat atas penerapan penyesuaian tarif.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan lain tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material Perseroan dan Perusahaan Anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dimulai dari risiko utama.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Membengkaknya Biaya Konstruksi

Risiko ini dapat disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang berlarut-larut sehingga skenario biaya konstruksi pun berubah. Disamping itu, proses pembangunan jalan tol biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain itu, selama proses pembangunan tersebut ada kemungkinan harga materi yang digunakan untuk proyek tersebut berubah. Biaya proyek yang membengkak akan berpengaruh pada kelayakan ekonomis dari proyek jalan tol dan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko Terkait Pembebasan Lahan atau Pengadaan Tanah (Keterlambatan dan Klaim)

Salah satu kunci sukses pembangunan jalan tol adalah tersedianya lahan. Implementasi UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan lahan yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur. Keterlambatan dalam proses pembebasan lahan dapat berpengaruh terhadap mundurnya jadwal konstruksi sehingga menyebabkan kenaikan biaya investasi jalan tol (*cost overrun*). Biaya investasi yang lebih mahal membuat pembiayaan yang dibutuhkan lebih besar sehingga *cost of fund* menjadi lebih tinggi dan rasio hutang perusahaan meningkat.

Selain itu, keterbatasan APBN juga menjadi kendala sehingga Perseroan sebagai badan usaha harus memberikan dana talangan dalam rangka pembebasan lahan. Dana talangan tersebut kemudian akan diajukan klaim kepada Pemerintah yang selanjutnya akan diganti oleh Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Keterlambatan dalam penggantian klaim atas dana talangan tanah tersebut telah menambah beban keuangan bagi Perseroan.

Risiko Penyesuaian Tarif

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 dan PP No. 15 Tahun 2005, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyesuaian tarif tol untuk setiap jalan tol yang dioperasikan Perseroan setiap dua tahun sekali berdasarkan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik. Namun demikian, ada risiko penyesuaian tarif tertunda atau besarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tertundanya penyesuaian tarif bisa disebabkan oleh belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penolakan masyarakat. Tertundanya penyesuaian tarif akan membawa dampak negatif terhadap tingkat keuntungan, arus kas, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Volume Lalu Lintas Tidak Sesuai Perkiraan Awal

Risiko cukup signifikan di dalam berinvestasi pada infrastruktur jalan tol adalah risiko volume lalu lintas yang nantinya akan berdampak pada arus pendapatan. Perseroan telah membuat kajian terkait prediksi volume lalu lintas sebelum jalan tol mulai dibangun untuk menilai kelayakan suatu proyek. Namun demikian, realisasi atas volume lalu lintas tersebut seringkali tidak sesuai dengan perhitungan awal khususnya di awal-awal ruas tol mulai beroperasi. Hal ini disebabkan oleh asumsi volume lalu lintas yang terlalu optimis atau adanya perubahan kondisi ekonomi, misalnya: daya beli masyarakat yang mengalami penurunan sehingga masyarakat akan

cenderung memilih untuk menggunakan jalan arteri yang tidak berbayar dibandingkan menggunakan jalan tol. Selain itu, adanya kenaikan harga BBM, pembangunan jalan arteri baru, tersedianya alternatif transportasi lain (misal: kereta api) juga turut mempengaruhi penurunan volume lalu lintas sehingga tidak sesuai dengan perkiraan awal.

Risiko Perubahan Peraturan

Usaha jalan tol merupakan usaha yang diatur oleh UU dan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, potensi risiko lain yang dihadapi Perseroan adalah terjadinya perubahan UU dan Peraturan Pemerintah, antara lain terkait tarif yang dapat berpengaruh pada kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Perubahan peraturan yang terkait desentralisasi pihak yang berwenang terhadap pekerjaan pengembangan jalan tol kepada Pemerintah Daerah dapat menimbulkan biaya tambahan, yang pada akhirnya menambah beban usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Bencana Alam atau Akibat Perbuatan Manusia

Jika jalan tol Perseroan rusak, akibat bencana alam atau akibat perbuatan manusia, baik sebagian atau seluruhnya untuk periode yang cukup lama, dapat berpengaruh pada volume arus kendaraan dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha, pendapatan, prospek dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Terdapat beberapa risiko umum lain yang mana mempengaruhi kinerja usaha maupun kinerja keuangan dari Perseroan, di antaranya adalah:

Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia dan ekonomi global. Setiap ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia atau regional dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara di pasar berkembang secara global, telah terpapar dampak negatif dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara maju. Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa-nya rendah, nilai tukar Rupiah Indonesia terus berfluktuasi dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita dari tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek lainnya dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam iklim ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menimbulkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap volatilitas yang meningkat, pertumbuhan ekonomi global yang melambat atau negatif, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko Perubahan Suku Bunga

Sebagian besar pendanaan proyek-proyek yang dikembangkan Perseroan berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Dengan demikian, beban bunga dapat berbeda dan berubah bila terjadi perubahan suku bunga bank. Kenaikan tingkat suku bunga dapat berdampak negatif terhadap beban pembayaran suku bunga pinjaman, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tahun dalam laporan keuangan konsolidasian juga terdapat laporan terkait dengan kepatuhan. Hal-hal yang mungkin sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha Perseroan yaitu apabila ada peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan misalnya kebijakan terkait penyesuaian tarif tol.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan berhasil dan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan Pemerintah. Perubahan pada peraturan serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan serta menunda penyelesaian konstruksi jalan tol baru.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. 00762/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Registrasi Akuntan Publik No. 0645) atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 98 tanggal 31 Agustus 2023 atas Fasilitas Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp1.100.000 juta, pada tanggal 1 Maret 2024, Perseroan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp500.000 juta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Pada tanggal 18 Maret 2024, Perseroan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp200.000 juta pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 12 tanggal 21 Oktober 2020, pada tanggal 1 Maret 2024, Perseroan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp500.000 juta pada PT Bank Danamon Indonesia-Unit Usaha Syariah.
4. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 21 Oktober 2020, pada tanggal 22 Maret 2024, Perseroan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp450.000 juta pada PT Bank Danamon Indonesia.
5. Berdasarkan Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/0619/TLN/2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 150 tanggal 21 Oktober 2022 beserta perubahannya yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H notaris di Bandung, pada tanggal 22 Maret 2024, Perseroan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp200.000 juta pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6. Berdasarkan Perjanjian Line Facility dengan Prinsip Musyarakah No. 29 tanggal 16 September 2020 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan VIII Perjanjian Line Facility, pada tanggal 22 Maret 2024. Perseroan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp150.000 juta pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
7. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 13 yang dibuat dihadapan Bambang Sularso, S.H., ditandatangani di Jakarta, tanggal 28 November 2019, pada tanggal 26 Maret 2024, Perseroan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp1.016.442 juta pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Penarikan fasilitas utang bank pada bank BNI, Bank Mandiri, SMI, dan Bank Maybank dipergunakan untuk memenuhi modal kerja, *Capital Expenditure*, dan *General Purpose* Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang didirikan dengan nama 'PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)' berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1978, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 187 tanggal 19 Mei 1981, yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 766 dan No. 767 tanggal 2 Maret 1982, yang keduanya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No. 1138/1982 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000. per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Prioritas	200	2.000.000.000	
- Saham Biasa	800	8.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	1.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Saham Prioritas			
- Negara Republik Indonesia	199	1.990.000.000	99,50
- Dr. Ir. Poernomosidi Hadjisarosa	1	10.000.000	0,50
- Saham Biasa*	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200	2.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	800	8.000.000.000	-

*Berdasarkan Akta Pendirian, tidak ada pemegang Saham Biasa pada saat pendirian Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Marga Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125817.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 ("Akta No. 40/2021").

Berdasarkan Akta No. 40/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (5), Pasal 4 ayat (6), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dari anggaran dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40/2021.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;

- c. Melakukan kegiatan pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- d. Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

8.2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 2 TAHUN TERAKHIR

Selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan. Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12 September 2007, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269/RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676/2007 *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153029.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016 (“**Akta No. 39/2016**”). Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 39/2016 *juncto* DPS Perseroan per 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	500	
- Seri B	19.039.999.999	9.519.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	19.040.000.000	9.520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	500	-
- Seri B			
- Negara Republik Indonesia	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
- Manajemen :			
- Subakti Syukur	477.700	238.850.000	0,00
- Fitri Wiyanti	316.600	158.300.000	0,00
- Reza Fabriano	289.600	144.800.000	0,00
- Bagus Cahya Arinta B.	289.200	144.600.000	0,00
- Mohamad Agus	282.000	141.000.000	0,00
- M. Roskanedi	139.300	69.650.000	0,00
- Raja Erizman	139.400	69.700.000	0,00
- Pramitha Wulanjani	50.000	25.000.000	0,00
- Masyarakat	2.175.377.560	1.087.688.780.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham Dalam Portepel	11.782.128.800	5.891.064.400.000	

8.3. IZIN-IZIN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dengan No. 0220205700518 tanggal 1 Juli 2020 dan dicetak pada tanggal 9 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (“OSS”)	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
2.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Pemberian Konsesi Terhadap Ruas Jalan Tol Yang Diusahakan oleh Perseroan tanggal 8 Juni 2006	Masa konsesi selama 40 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005, atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2044.	Penetapan konsesi terhadap ruas-ruas jalan tol sebagai berikut: a. Jakarta – Bogor – Ciawi b. Jakarta – Tangerang c. Surabaya – Gempol* d. Jakarta – Cikampek* e. Padalarang - Cileunyi f. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo g. Cawang – Tomang – Pluit h. Belawan - Medan - Tanjung Morawa i. Semarang Seksi A, B, C* j. Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami k. Palimanan – Kanci* l. Lingkar Luar Jakarta (JORR) (i) Seksi E1 Utara (Hankam Raya - Cikunir) (ii) Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC – Hankam Raya) (iii) Seksi E2 (Cikunir - Cakung) (iv) Seksi E3 (Cakung - Cilincing) (v) Seksi W2 Selatan (Pondok Pinang – Ulujami) (vi) Seksi W2 Utara (Ulujami – Kebon Jeruk) m. Cikampek – Padalarang
3.	Sertifikat Standar No. 02202057005180004 tanggal 22 Juni 2023	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Untuk kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 52213 (Aktivitas Jalan Tol) dengan klasifikasi risiko ‘Menengah Tinggi’.

*) Pada tanggal 1 Juli 2022, Perseroan telah melakukan pemisahan tidak murni (*spin-off*) kepada JTT, yakni dengan mengalihkan 4 segmen ruas hak pengusahaan jalan tol (hak konsesi) yang meliputi ruas: (i) Jakarta – Cikampek, (ii) Palimanan – Kanci, (iii) Semarang Seksi A, B, C, dan (iv) Surabaya – Gempol (“*Pemisahan*”). Pemisahan tersebut telah dilakukan berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Tollroad PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kepada PT Jasamarga Transjawa Tol No. 02 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, serta dengan ditandatanganinya perjanjian amandemen dan pernyataan kembali atas PPJT untuk masing-masing ruas jalan tol tersebut.

Untuk masing-masing ruas jalan tol di atas, Perseroan (dan JTT) telah menandatangani PPJT dengan ringkasan sebagaimana tercantum dalam angka 8.4 Bab XIII Prospektus ini perihal Perjanjian Penting Yang Dimiliki oleh Perseroan.

8.4. PERJANJIAN PENTING

Di bawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, adalah sebagai berikut:

A. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Perseroan telah menandatangani 9 PPJT dengan BPJT yang seluruhnya memiliki masa berlaku konsesi sampai dengan tanggal 31 Desember 2044, masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

No.	PPJT	Ruas Jalan Tol	Tarif Tol																	
1.	PPJT Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi No. 246/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi No. 10 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi pengusahaan ruas jalan tol Jakarta - Bogor - Ciawi dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 854KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023: <table border="1" data-bbox="740 629 1390 741"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jagorawi Terbuka</td> <td>7.500</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>17.000</td> <td>17.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Jagorawi Terbuka	7.500	12.000	12.000	17.000	17.000
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Jagorawi Terbuka	7.500	12.000	12.000	17.000	17.000															
2.	PPJT Ruas Jakarta - Tangerang No. 247/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Jakarta - Tangerang No. 18 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi pengusahaan ruas jalan tol Jakarta - Tangerang dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1527/KPTS/M/2021 tanggal 10 Desember 2021, tentang penyesuaian tarif tol ruas Jakarta - Tangerang: <table border="1" data-bbox="740 1070 1390 1249"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jakarta - Tangerang (ATL: 21,35 KM)</td> <td>8.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>15.500</td> <td>15.500</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Jakarta - Tangerang (ATL: 21,35 KM)	8.000	12.000	12.000	15.500	15.500
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Jakarta - Tangerang (ATL: 21,35 KM)	8.000	12.000	12.000	15.500	15.500															
3.	PPJT Ruas Padalarang - Cileunyi No. 250/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Padalarang - Cileunyi No. 19 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi pengusahaan ruas jalan tol Padalarang - Cileunyi dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 533/KPTS/M/2023 tanggal 17 Mei 2023: <table border="1" data-bbox="740 1451 1390 1547"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Padaleunyi</td> <td>10.500</td> <td>18.500</td> <td>18.500</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Padaleunyi	10.500	18.500	18.500	25.000	25.000
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Padaleunyi	10.500	18.500	18.500	25.000	25.000															
4.	PPJT Ruas Dr. Ir. Sedyatmo No. 251/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Dr. Ir. Sedyatmo No. 22 tanggal 11	Pemberian hak konsesi pengusahaan ruas jalan tol Dr. Ir. Sedyatmo dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 855/KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023: <table border="1" data-bbox="740 1861 1390 1984"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prof DR IR Sedyatmo</td> <td>8.500</td> <td>11.000</td> <td>11.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Prof DR IR Sedyatmo	8.500	11.000	11.000	12.000	12.000
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Prof DR IR Sedyatmo	8.500	11.000	11.000	12.000	12.000															

No.	PPJT	Ruas Jalan Tol	Tarif Tol																	
	November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta																			
5.	PPJT Ruas Cawang - Tomang - Pluit No. 252/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Cawang - Tomang - Pluit No. 14 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Cawang - Tomang - Pluit dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 74/KPTS/M/2022 tanggal 31 Januari 2022: <table border="1" data-bbox="740 427 1390 580"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cawang – Tomang – Pluit</td> <td>10.500</td> <td>15.500</td> <td>15.500</td> <td>17.500</td> <td>17.500</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Cawang – Tomang – Pluit	10.500	15.500	15.500	17.500	17.500
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Cawang – Tomang – Pluit	10.500	15.500	15.500	17.500	17.500															
6.	PPJT Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa No. 253/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa No. 15 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1087/KPTS/M/2023 tanggal 28 Agustus 2023: <table border="1" data-bbox="740 840 1390 931"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belmera</td> <td>9.000</td> <td>16.000</td> <td>16.000</td> <td>23.000</td> <td>23.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Belmera	9.000	16.000	16.000	23.000	23.000
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Belmera	9.000	16.000	16.000	23.000	23.000															
7.	PPJT Ruas Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami No. 255/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah dengan Akta Amendemen I PPJT Ruas Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami No. 21 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Pondok Aren, Bintaro Viaduct dan Ulujami dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1604/KPTS/M/2023 tanggal 16 November 2023: <table border="1" data-bbox="740 1308 1390 1487"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami</td> <td>3.500</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>6.500</td> <td>6.500</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami	3.500	5.000	5.000	6.500	6.500
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami	3.500	5.000	5.000	6.500	6.500															
8.	PPJT Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Amendemen II PPJT Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) No. 11 tanggal 11	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi Non S dari Pemerintah kepada Perseroan.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1604/KPTS/M/2023 tanggal 16 November 2023: <table border="1" data-bbox="740 1776 1390 1899"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JORR E1, E2, E3 dan W2S</td> <td>17.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>33.500</td> <td>33.500</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	JORR E1, E2, E3 dan W2S	17.000	25.000	25.000	33.500	33.500
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
JORR E1, E2, E3 dan W2S	17.000	25.000	25.000	33.500	33.500															

No.	PPJT	Ruas Jalan Tol	Tarif Tol																	
	November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta																			
9.	PPJT Ruas Cikampek - Padalarang No. 258/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Amendemen II PPJT Ruas Cikampek - Padalarang No. 12 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang dari Pemerintah kepada Perseroan.	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 496/KPTS/M/2023 tanggal 2 Mei 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cikampek - Purwakarta - Padalarang</td> <td>45.000</td> <td>76.000</td> <td>76.000</td> <td>110.000</td> <td>110.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	45.000	76.000	76.000	110.000	110.000
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																			
	I	II	III	IV	V															
Cikampek - Purwakarta - Padalarang	45.000	76.000	76.000	110.000	110.000															

Lebih lanjut dan sehubungan dengan Pemisahan, JTT telah menandatangani 4 PPJT dengan BPJT, yang seluruhnya memiliki masa berlaku konsesi sampai dengan tanggal 31 Desember 2044, masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

No.	PPJT	Ruas Jalan Tol	Tarif Tol																							
1.	PPJT Ruas Surabaya – Gempol No. 248/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Amendemen II Pernyataan Kembali PPJT Ruas Surabaya – Gempol No. 07 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Surabaya - Gempol dari Pemerintah kepada JTT.	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 1137KPTS/M/2023 tanggal 5 September 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Porong – Kejapanan</td> <td>6.000</td> <td>9.000</td> <td>9.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>Kejapanan - Gempol</td> <td>3.500</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Porong – Kejapanan	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000	Kejapanan - Gempol	3.500	5.000	5.000	7.000	7.000
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																									
	I	II	III	IV	V																					
Porong – Kejapanan	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000																					
Kejapanan - Gempol	3.500	5.000	5.000	7.000	7.000																					
2.	PPJT Ruas Semarang Seksi A, B, C No. 254/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Amendemen II Pernyataan Kembali PPJT Ruas Semarang Seksi A, B, C No. 06 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol Semarang Seksi A, B dan C dari Pemerintah kepada JTT.	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 33/KPTS/M/2023 tanggal 16 Januari 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ruas/Seksi</th> <th colspan="5">Tarif per golongan (Rp)</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semarang Seksi A, B, C</td> <td>5.500</td> <td>8.500</td> <td>8.500</td> <td>11.000</td> <td>11.000</td> </tr> </tbody> </table>	Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)					I	II	III	IV	V	Semarang Seksi A, B, C	5.500	8.500	8.500	11.000	11.000						
Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)																									
	I	II	III	IV	V																					
Semarang Seksi A, B, C	5.500	8.500	8.500	11.000	11.000																					
3.	PPJT Ruas Palimanan - Kanci No. 256/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006,	Pemberian hak konsesi perusahaan pengusahaan ruas jalan tol	<p>Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 755/KPTS/M/2023 tanggal 12 Juli 2023:</p>																							

No.	PPJT	Ruas Jalan Tol	Tarif Tol					
			Ruas/Seksi	Tarif per golongan (Rp)				
				I	II	III	IV	V
	sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen III PPJT Ruas Palimanan – Kanci No. 05 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Palimanan, Plumbon Kanci dari Pemerintah kepada JTT.	Palikanci	13.500	19.500	19.500	32.000	32.000
4.	PPJT Ruas Jakarta - Cikampek No. 249/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen III PPJT Ruas Jakarta – Cikampek No. 04 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta	Pemberian hak konsesi pengusahaan ruas jalan tol Jakarta - Cikampek dari Pemerintah kepada JTT.	Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 250/KPTS/M/2024 tanggal 2 Februari 2024:					
				Tarif per golongan (Rp)				
				I	II	III	IV	V
			Jakarta – Cikampek Segmen I	5.500	8.000	8.000	11.000	11.000
			Jakarta – Cikampek Segmen II	9.500	14.000	14.000	19.000	19.000
			Jakarta – Cikampek Segmen III	16.500	24.500	24.500	32.500	32.500
			Jakarta – Cikampek Segmen IV	27.000	40.500	40.500	54.000	54.000

Ruang lingkup dari masing-masing PPJT tersebut di atas adalah pemberian hak konsesi pengusahaan jalan tol untuk ruas jalan tol dari masing-masing PPJT tersebut di atas dari Pemerintah kepada Perseroan dan JTT (sebagaimana berlaku), yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai pada ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan masing-masing PPJT tersebut di atas, diatur bahwa jalan tol merupakan milik Pemerintah dan pemberian hak pengusahaan jalan tol tidak berarti sebagai pengalihan hak milik atas jalan tol kepada Perseroan dan JTT (sebagaimana berlaku), melainkan Perseroan dan JTT (sebagaimana berlaku) hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan untuk pengusahaan jalan tol dan melaksanakan pengusahaan jalan tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dan JTT (sebagaimana berlaku) harus mengembalikan dan menyerahkan kembali jalan tol setelah masa konsesi berakhir atau pengakhiran PPJT oleh salah satu pihak.

Berdasarkan masing-masing PPJT tersebut di atas, diatur ketentuan terkait pembatasan bahwa dalam hal Perseroan atau JTT (sebagaimana berlaku) membentuk perusahaan jalan tol yang khusus mengoperasikan ruas jalan tol, selama masa konsesi tanpa persetujuan BPJT, Perseroan atau JTT (sebagaimana berlaku) tidak boleh (i) menjalankan usaha lain dalam bentuk apapun, kecuali yang diperbolehkan berdasarkan PPJT dan (ii) membuat perjanjian dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan PPJT, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah. Lebih lanjut, Perseroan dan JTT (sebagaimana berlaku) tidak dapat memindahkan atau mengalihkan hak, tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan masing-masing PPJT kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah. Perseroan dan JTT (sebagaimana berlaku) dapat memindahkan atau mengalihkan hak atau hak atas pendapatan dalam perjanjian kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk pembayaran, pembayaran kembali atau pembayaran di muka pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Hukum yang berlaku untuk masing-masing PPJT tersebut di atas adalah hukum negara Republik Indonesia dan penyelesaian perselisihan untuk masing-masing PPJT tersebut di atas adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

B. Perjanjian Pinjaman

Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga (termasuk dengan pihak Afiliasi), masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian pinjaman/fasilitas dengan BNI. Berdasarkan masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas dengan BNI tersebut, Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terutang kepada BNI sebelum jatuh tempo suatu pembayaran angsuran dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 10 hari kerja (dan 5 hari kerja khusus untuk Perjanjian Kredit BNI No. 03/2021 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan dipercepat. Seluruh perjanjian pinjaman/fasilitas dengan BNI tersebut tidak mengatur adanya jaminan khusus (*clean basis*). Masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas dengan BNI tidak mencantumkan ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan BNI sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat Perseroan dan Bank BNI merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh Pemerintah.

Berikut merupakan rincian dan ketentuan khusus dari masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas antara Perseroan dan BNI:

- (a) Akta Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 14 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (7) 15 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.1.000.000.000.000 tanggal 27 September 2023, antara Perseroan dan BNI

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas : BNI memberikan fasilitas kredit modal kerja *term loan* kepada Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang bersifat *revolving*.

Tujuan Pinjaman/Fasilitas : Untuk pembiayaan kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dan pendanaan perusahaan (*general corporate purpose*) Perseroan dan dapat digunakan oleh perusahaan anak yang terkonsolidasi dalam grup Perseroan, yaitu JJS. Jika fasilitas kredit yang dipergunakan oleh JJS telah dinyatakan lunas oleh BNI, maka fasilitas kredit sepenuhnya akan kembali menjadi fasilitas kredit atas nama Perseroan.

Bunga : 6,50% selama tiga bulan dan bersifat *reviewable* setiap saat untuk disesuaikan dengan tangka suku bunga yang berlaku di BNI.

Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas : Jangka waktu pinjaman/fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2026.

Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023) : Rp350.000.000.000

- (b) Akta Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 2 Desember 2020, yang di buat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 02 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.500.000.000.000 tanggal 27 September 2023 antara Perseroan dan BNI

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas : BNI memberikan fasilitas kredit modal kerja *term loan* kepada Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 500.000.000.000 yang bersifat *clean-up*.

Tujuan Pinjaman/Fasilitas : Untuk pembiayaan kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dan pendanaan perusahaan (*general corporate purpose*) Perseroan dan dapat digunakan oleh perusahaan anak yang terkonsolidasi dalam

grup Perseroan, yaitu JJS. Jika fasilitas kredit yang dipergunakan oleh JJS telah dinyatakan lunas oleh BNI, maka fasilitas kredit sepenuhnya akan kembali menjadi fasilitas kredit atas nama Perseroan.

Bunga : 6,50% per selama 3 bulan dan bersifat *reviewable* setiap saat untuk disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di BNI.

Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas : Jangka waktu pinjaman/fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2026.

Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023) : Nihil

- (c) Akta Perjanjian Kredit KMK Term Loan Maksimum Rp750.000.000.000 No. 03 tanggal 1 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 03 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.750.000.000.000 tanggal 27 September 2023 antara Perseroan dan BNI (“**Perjanjian Kredit BNI No. 03/2021**”)

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas : BNI memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 750.000.000.000 yang bersifat *plafond/revolving* dengan realisasi kredit modal kerja *term loan* bersifat *clean-up*.

Tujuan Pinjaman/Fasilitas : Untuk pembiayaan kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dan pendanaan perusahaan (*general corporate purpose*) Perseroan dan dapat digunakan oleh perusahaan anak yang terkonsolidasi dalam grup Perseroan, yaitu JJS. Jika fasilitas kredit yang dipergunakan oleh JJS telah dinyatakan lunas oleh BNI, maka fasilitas kredit sepenuhnya akan kembali menjadi fasilitas kredit atas nama Perseroan.

Bunga : 5,70% selama 3 bulan dan bersifat *reviewable* setiap saat untuk disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku di BNI.

Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas : Jangka waktu pinjaman/fasilitas adalah sampai dengan tanggal 26 September 2026.

Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023) : Rp350.000.000.000

- (d) Akta Perjanjian Kredit No. 98 tanggal 31 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dan BNI

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas : BNI memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 1.100.000.000.000 yang bersifat *revolving*.

Tujuan Pinjaman/Fasilitas : Pendanaan perusahaan (*general corporate purposes*), termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dan/atau keperluan pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo atau kewajiban lainnya.

Bunga : 5,80% per tahun yang dihitung dari jumlah pokok kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan kepada BNI (baki debit).

Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Jangka waktu pinjaman/fasilitas diberikan selama 12 bulan sejak tanggal 31 Agustus 2023, atau sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Nihil

2. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

- (a) Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 28 April 2006, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dan BCA (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, “**Perjanjian Kredit BCA**”).

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	BCA menyetujui untuk memberikan (i) fasilitas <i>time loan revolving</i> 1 yang bersifat mengikat (<i>committed</i>), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 3.000.000.000.000 dan (ii) fasilitas <i>time loan revolving</i> 2 yang bersifat tidak mengikat (<i>uncommitted</i>), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 2.500.000.000.000 (secara bersama-sama disebut sebagai “ Fasilitas Time Loan Revolving ”).
-------------------------------------	---	--

Fasilitas *Time Loan Revolving* dapat digunakan juga (sublimit) untuk Fasilitas *Time Loan Revolving* yang bersifat (i) mengikat (*committed*), jika sublimit yang digunakan/ditarik berasal dan merupakan sublimit dari fasilitas *time loan revolving* 1 dan (ii) tidak mengikat (*uncommitted*), jika sublimit yang digunakan/ditarik berasal dan merupakan sublimit dari fasilitas *time loan revolving* 2, sebesar maksimal Rp 4.700.000.000.000 (“**Fasilitas Sublimit Anak Usaha**”). Fasilitas Sublimit Anak Usaha hanya dapat digunakan oleh PT Jasamarga Japek Selatan (“**JJS**”) maksimal Rp 4.000.000.000.000 dan PT Jasamarga Jogja Bawen (“**JJB**”) maksimal Rp 700.000.000.000 secara bersama (*joint facility*) dengan merujuk pada plafon gabungan Fasilitas *Time Loan Revolving*

Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas <i>Time Loan Revolving</i> akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Fasilitas Sublimit Anak Usaha hanya dapat digunakan untuk <i>bridging</i> pembayaran konstruksi (termasuk pembayaran retensi) bagi JJS dan/atau JJB kepada kontraktor atau pembiayaan pada ruas jalan tol JJS dan/atau JJB dan ruas penugasan Pemerintah Republik Indonesia kepada JJS.
---------------------------	---	--

Bunga	:	6,90% per tahun dan dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh BCA.
-------	---	--

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan pinjaman	:	<p>Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan pinjaman/fasilitas adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas <i>time loan revolving</i> 1 berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2026. Masing-masing Fasilitas <i>time loan revolving</i> 2 dan Fasilitas Sublimit Anak Usaha berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2024.
--	---	---

Pembayaran Lebih Awal	:	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk plafon tambahan, Perseroan dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang berdasarkan penarikan pinjaman/fasilitas sebelum tanggal pembayaran kembali, tanpa dikenakan denda, sepanjang Perseroan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BCA sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum dilakukan pembayaran kembali yang dipercepat. • Untuk plafon eksisting, Perseroan tidak diperbolehkan melakukan pembayaran kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang berdasarkan penarikan pinjaman/fasilitas selain pada tanggal pembayaran utang, dengan ketentuan apabila Perseroan melakukan pembayaran kembali sebagian atau seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5,00% dari <i>outstanding</i> yang dilunasi.
Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
Ketentuan Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan BCA sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp2.000.000.000.000

3. PT Bank Danamon Tbk (“Bank Danamon”)

Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian pinjaman/fasilitas dengan Bank Danamon. Masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas dengan Bank Danamon tidak mencantumkan ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Seluruh perjanjian pinjaman/fasilitas dengan Bank Danamon tersebut tidak mengatur adanya jaminan khusus (*clean basis*). Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Bank Danamon sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Berikut merupakan rincian dan ketentuan khusus dari masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas antara Perseroan dan Bank Danamon:

- (a) Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 12 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 015/PP/EB/0124 tanggal 5 Februari 2024 antara Perseroan dan Bank Danamon

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank Danamon memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja musyarakah kepada Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang tidak mengikat (<i>uncommitted</i>) dan bersifat <i>revolving</i> .
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Kebutuhan modal kerja yang terdiri dari biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Perseroan dan <i>capital expenditure</i> Perseroan.

- Nisbah Bagi Hasil : Nisbah bagi hasil akan dihitung oleh Bank Danamon berdasarkan proyeksi indikasi tingkat imbal hasil proyeksi pendapatan atas kegiatan yang terkait dengan pendapatan yang ditentukan oleh Bank Danamon untuk kemudian disepakati oleh para pihak.
- Nisbah bagi hasil ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui dokumen realisasi.
- Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas : Sampai dengan tanggal 21 Oktober 2026.
- Pembayaran Lebih Awal : Tidak diatur.
- Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023) : Rp1.000.000.000.000
- (b) Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 014/PP/EB/0124 tanggal 5 Februari 2024 antara Perseroan dan Bank Danamon
- Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas : Bank Danamon memberikan fasilitas kredit berjangka kepada Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000 yang tidak mengikat (*uncommitted*) dan bersifat *revolving*.
- Tujuan Pinjaman/Fasilitas : Kebutuhan modal kerja Perseroan pada umumnya.
- Bunga : *Reference rate* dimana indikasi suku bunga sebesar 8,00% per tahun. Bank Danamon berhak mengubah besarnya bunga dan/atau sistem perhitungan bunga.
- Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas : Sampai dengan tanggal 21 Oktober 2026.
- Pembayaran Lebih Awal : Tidak diatur.
- Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023) : Rp1.000.000.000.000

4. PT Bank DKI (“Bank DKI”)

Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian pinjaman/fasilitas dengan Bank DKI. Masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas dengan Bank DKI tidak mencantumkan ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Seluruh perjanjian pinjaman/fasilitas dengan Bank DKI tersebut tidak mengatur adanya jaminan khusus (*clean basis*). Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Bank DKI sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Berikut merupakan rincian dan ketentuan khusus dari masing-masing perjanjian pinjaman/fasilitas antara Perseroan dan Bank DKI:

- (a) Akta Pembiayaan Musyarakah No. 42 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan

Adendum I (Pertama) Akad Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah No. 41 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bank DKI

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank DKI setuju menyediakan pembiayaan kepada Perseroan dengan akad musyarakah kepada Perseroan dengan limit sebesar Rp 750.000.000.000 dengan jenis pembiayaan modal kerja dan bersifat <i>revolving</i> .
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan berupa tambahan untuk meng- <i>cover Gap Financing</i> Perseroan, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Nisbah Bagi Hasil	:	Nisbah bagi hasil adalah sebesar 4,94% bagi Bank DKI dan 95,06% bagi Perseroan. Nisbah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan Bank DKI dengan Perseroan.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Jangka waktu akad ini adalah sampai dengan tanggal 9 Desember 2024.
Pembayaran Lebih Awal	:	Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat secara parsial maupun <i>full amount</i> untuk proses sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan <i>penalty</i> .
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp750.000.000.000

(b) Akta Pembiayaan Musyarakah No. 86 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Adendum I (Pertama) Akad Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah No. 39 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Bank DKI

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank DKI setuju menyediakan pembiayaan kepada Perseroan dengan akad musyarakah kepada Perseroan dengan limit sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan jenis pembiayaan pinjaman tetap berjangka dan bersifat <i>revolving</i> .
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan berupa tambahan untuk meng- <i>cover Gap Financing</i> Perseroan, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Nisbah Bagi Hasil	:	Nisbah bagi hasil adalah sebesar 4,94% bagi Bank DKI dan 95,06% bagi Perseroan. Nisbah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan Bank DKI dan Perseroan.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Jangka waktu akad ini adalah sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.
Pembayaran Lebih Awal	:	Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat secara parsial maupun <i>full amount</i> untuk proses sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan <i>penalty</i> .
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp1.000.000.000.000

5. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB”)

- (a) Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 067/PPF/CB/JKT/2017 tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan ke-6 (Keenam) Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 067/PPF/CB/JKT/2017 tanggal 26 Oktober 2023 juncto Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 No. 256/SUP/CB/JKT/2020 tanggal 3 Desember 2020 antara Perseroan dan Bank CIMB

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank CIMB setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan tetap 2 musyarakah yang tidak mengikat dengan sifat <i>revolving</i> dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000.000 kepada Perseroan.
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Modal kerja Perseroan
Nisbah Bagi Hasil	:	Setara dengan 6,50% per tahun. Dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank CIMB mengacu kepada kondisi pasar.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Pinjaman/fasilitas berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.
Pembayaran Lebih Awal	:	Perseroan dapat melakukan pembayaran kembali hutang/kewajiban lebih cepat dari masing masing tanggal jatuh tempo pinjaman/fasilitas yang ditetapkan.
Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
Ketentuan Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Bank CIMB sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp500.000.000.000

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

- (a) Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO/KP/0619.TLN/2022 No. 150 tanggal 21 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Notaris di Kota Bandung sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Term Loan No. WCO/KP/0619.TLN/2022 No. 150 tanggal 15 September 2023 antara Perseroan dan Bank Mandiri.

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan bersifat <i>switchable</i> dengan anak perusahaan Perseroan dengan jenis fasilitas <i>term loan</i> dengan total limit kredit sebesar Rp 7.000.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut: (i) Limit Perseroan maksimal Rp 7.000.000.000.000 dan (ii) Sublimit anak perusahaan Perseroan, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • PT Jasamarga Japek Selatan, maksimal sebesar Rp 2.500.000.000.000;
-------------------------------------	---	---

- PT Jasamarga Jogja Bawen, maksimal sebesar Rp 1.800.000.000.000; dan
- PT Jasamarga Problinggo Banyuwangi, maksimal sebesar Rp 500.000.000.000.

Pinjaman/fasilitas tersebut di atas bersifat *committed, advised*, dan *revolving*.

Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	<p><i>General corporate purposes</i>, yang diantaranya untuk: (i) belanja modal (<i>capital expenditures</i>), <i>refinancing</i> pinjaman, dan/atau kebutuhan operasional lainnya dan (ii) membiayai kebutuhan sementara/<i>bridging</i> terkait pembayaran kontraktor atas nama anak perusahaan Perseroan yang diaksepi oleh Bank Mandiri.</p>
Bunga	:	<ul style="list-style-type: none"> • Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, tarif bunga yang berlaku adalah JIBOR 1 bulan + margin <i>equivalent</i> 6,25% per tahun). • Lebih lanjut, sejak tanggal 1 Januari 2023, acuan tarif bunga yang berlaku adalah JIBOR 1 bulan + 2,25% per tahun.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	<p>Jangka waktu pinjaman/fasilitas ditetapkan maksimum selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022 dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 20 Oktober 2025.</p>
Pembayaran Lebih Awal	:	<p>Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman/fasilitas, sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut. Jika Bank Mandiri menyetujui secara tertulis atas permohonan tersebut, maka Perseroan harus membayar segala kewajibannya yang meliputi baki debit pokok, bunga, biaya, denda serta denda pembayaran dipercepat yang ditentukan oleh Bank Mandiri.</p>
Pembatasan	:	<p>Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.</p>
Ketentuan Jaminan	:	<p>Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).</p>
Sifat Hubungan Afiliasi	:	<p>Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat Perseroan dan Bank Mandiri merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh Pemerintah.</p>
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	<p>Rp2.200.000.000.000</p>

7. PT Bank Maybank Indonesia (“Bank Maybank”)

- (a) Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah iB No. 13 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan ke-7 Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah iB (Badan Usaha) No. 134/PrbMusy/CDU1/23 tanggal 4 Oktober 2023 antara Perseroan dan Bank Maybank

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank Maybank setuju untuk memberikan <i>line</i> fasilitas pembiayaan musyarakah dengan modal musyarakah adalah sebesar Rp 11.126.021.000.000 (“ Modal Musyarakah ”), dimana modal Bank Maybank maksimal adalah sebesar Rp 3.500.000.000.000 atau 31,46% dari Modal Musyarakah dan modal Perseroan maksimal adalah sebesar Rp 7.626.021.000.000 atau sebesar 68,54% dari Modal Musyarakah.
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	<i>Line</i> fasilitas pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank Maybank kepada Perseroan dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan kegiatan investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan kewajiban pembiayaan lainnya ataupun obligasi.
Nisbah Bagi Hasil	:	Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui dokumen realisasi.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Jangka waktu pinjaman/fasilitas ditetapkan maksimum selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022 dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 21 Desember 2025.
Pembayaran Lebih Awal	:	Apabila Perseroan melakukan pelunasan pinjaman/fasilitas sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya administrasi pelunasan maksimum sebesar Rp 50.000.000.000 (pro rate, dihitung dari jumlah <i>outstanding</i> yang dilunasi), kecuali jika sumber dana berasal dari penerbitan obligasi dan/atau penerbitan saham dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dan/atau kas internal perusahaan, maka tidak dikenakan biaya pelunasan dipercepat.
Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
Ketentuan Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Bank Maybank.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp1.643.511.486.767

8. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

- (a) Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Syariah No. 02/ADD-56/CB2-FOG/X/2022/LF tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum III juncto Syarat-Syarat Umum tanggal 2 Desember 2021 antara Perseroan dan BSI

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	BSI setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan, dalam bentuk fasilitas modal kerja <i>line facility</i> musyarakah yang bersifat <i>revolving</i> dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 2.000.000.000.000.
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Modal kerja operasional dan pengembangan usaha perusahaan.
Nisbah Bagi Hasil	:	Pelaksanaan, pencairan, serta syarat-syarat khusus terkait pinjaman/fasilitas, termasuk namun tidak terbatas pada margin keuntungan, nisbah bagi hasil, ujarah, dan/atau biaya akan dituangkan dalam akad tersendiri yang akan dibuat oleh BSI dan Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman/fasilitas.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025.
Pembayaran Lebih Awal	:	Perseroan dapat mengajukan permohonan pembayaran yang dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman/fasilitas, sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BSI selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut. Jika BSI menyetujui secara tertulis atas permohonan tersebut, maka Perseroan harus membayar segala kewajibannya yang berdasarkan perjanjian pinjaman/fasilitas yang belum jatuh tempo dimaksud.
Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
Ketentuan Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan BSI sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, namun demikian BSI merupakan pihak yang berelasi mengingat BSI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Bank Mandiri.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp2.170.000.000.000

9. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

- (a) Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 04 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 36 tanggal 16 November 2023, yang dibuat di hadapan Octariena Harum Wulan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta juncto Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah No. SKU/21/1029/AMD/SOE tanggal 30 September 2021 antara Perseroan dan Bank Permata

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	Bank Permata setuju untuk memberikan fasilitas <i>revolving financing</i> syariah yang tidak mengikat (<i>uncommitted</i>) kepada Perseroan dengan limit sebesar Rp 1.000.000.000.000.
-------------------------------------	---	--

Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Membiayai kebutuhan modal kerja.
Nisbah Bagi Hasil	:	Untuk tenor 1 bulan, 0,31 % bagi Bank Permata dan 99,69% bagi Perseroan. Proyeksi indikasi bagi hasil adalah <i>prime lending rate</i> + 0,50% per tahun. Besarnya <i>prime lending rate</i> akan diatur pada tanggal pencairan pinjaman/fasilitas.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Jangka waktu pinjaman/fasilitas terhitung sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026.
Pembayaran Lebih Awal	:	Pembayaran lebih cepat tidak diperbolehkan.
Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
Ketentuan Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Bank Permata.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp500.000.000.000

10. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")

- (a) Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 29 tanggal 16 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan VIII Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. PERJ-174/SMI/1222 tanggal 1 Desember 2022

Jumlah dan Sifat Pinjaman/Fasilitas	:	SMI setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan skema pembiayaan <i>line facility</i> AI Musyarakah kepada Perseroan dengan jumlah komitmen maksimal sebesar Rp 350.000.000.000.
Tujuan Pinjaman/Fasilitas	:	Pembiayaan modal kerja Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan operasional untuk pemeliharaan periodik dan peningkatan kapasitas jalan tol yang dikelola Perseroan berdasarkan RKAP periode tahun 2022 – 2024.
Nisbah Bagi Hasil	:	Espektasi bagi hasil sebesar (setara) 5,75% per tahun <i>fixed</i> sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023 dan selanjutnya akan direview secara 3 bulanan.
Jatuh Tempo Pinjaman/Fasilitas	:	Jangka waktu penggunaan pinjaman/fasilitas adalah sampai dengan tanggal 15 September 2024.
Pembayaran Lebih Awal	:	Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih awal sebagian atau seluruh pinjaman/fasilitas dari waktu yang dijanjikan dengan ketentuan pelunasan tersebut dilakukan pada tanggal pembayaran bagi hasil dan tanpa dikenakan biaya apapun atau denda atau <i>penalty</i> .

Pembatasan	:	Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
Ketentuan Jaminan	:	Tidak ada jaminan khusus (<i>negative pledge</i>).
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan SMI sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 mengingat Perseroan dan SMI merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan oleh Pemerintah.
Jumlah Terutang (Per 31 Desember 2023)	:	Rp200.000.000.000

C. Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 25 tanggal 15 Mei 2020 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 34 tanggal 26 April 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan PUBPWA 2020**") antara Perseroan dan Bank Mega.

Wali Amanat : Perseroan telah menunjuk Bank Mega selaku ("**Wali Amanat**") dalam rangka penerbitan obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga, dan Jangka Waktu : Jumlah pokok Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 4.500.000.000.000.

Lebih lanjut, obligasi Tahap I diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.000.000.000.000 ("**Pokok Obligasi 2020**"), dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A, dalam jumlah sebesar Rp 1.100.350.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
- Obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp 286.000.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
- Obligasi Seri C, dengan jumlah sebesar Rp 90.050.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% per tahun, untuk jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.
- Obligasi Seri D, dengan jumlah sebesar Rp 523.600.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi.

Jumlah Pokok Obligasi 2020 tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi 2020 dari masing-masing seri obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi.

Penggunaan Dana : Dana hasil penawaran umum obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalimananan PUB 2020 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja, diantaranya namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol.

Jatuh Tempo Obligasi : • Obligasi Seri A, pada tanggal hari ulang tahun ke 3 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu pada tanggal 8 September 2023.
 • Obligasi Seri B, pada tanggal hari ulang tahun ke 5 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu pada tanggal 8 September 2025.
 • Obligasi Seri C, pada tanggal hari ulang tahun ke 7 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu pada tanggal 8 September 2027.
 • Obligasi Seri D, pada tanggal hari ulang tahun ke 10 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu pada tanggal 8 September 2030

Pembatasan : Tidak terdapat ketentuan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Ketentuan Jaminan : Tidak ada jaminan khusus (*negative pledge*).

Jumlah Terutang : Rp899.650.000.000
 (Per 31 Desember 2023)

D. Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Jasa Pengoperasian Jalan Tol antara Perseroan Dengan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan Perusahaan Anak, dimana Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman dan Perusahaan Anak bertindak sebagai penerima pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian Pinjaman	Para Pihak	Jumlah Pinjaman/Fasilitas	Masa Berlaku Perjanjian	Bunga atau Nisbah Bagi Hasil
1.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) No. 73/KONTRAK-DIR/2020 tanggal 14 September 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (<i>Shareholder Loan</i>) tanggal 27 Juni 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan; dan JBS. 	Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman kepada pemegang saham kepada JBS dengan jumlah plafond sebesar Rp 1.617.500.000.000 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan cash flow JBS yang akan digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi PT Jasamarga Balikpapan Samarinda No. 88 dan Akta No. 89 tanggal 21 Desember 2018, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (" Kredit Kredit Investasi ") dan bunga kredit dana talangan tanah serta untuk kebutuhan operasional lainnya.	Sejak ditandatangani ninya perjanjian sampai 1 tahun sejak Kredit Sindikasi Investasi dilunasi oleh JBS atau sampai dengan dilunasinya seluruh pinjaman, berikut bunga, biaya provisi dan denda (jika ada) oleh JBS kepada Perseroan, mana yang	JBS diwajibkan untuk membayar biaya sebesar 0,25% dari fasilitas pinjaman kepada Perseroan.

No.	Perjanjian Pinjaman	Para Pihak	Jumlah Pinjaman/Fasilitas	Masa Berlaku Perjanjian	Bunga atau Nisbah Bagi Hasil
			Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp957.000.000.000	lebih dahulu terjadi.	
2.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Terkait Dana Talangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kepada PT Jasamarga Balikpapan Samarinda No. 49/KONTRAK- DIR/2023 tanggal 15 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JBS. 	<p>Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada JBS dengan jumlah plafond sebesar Rp 43.511.486.767 yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan JBS dalam rangka pembebasan tanah, termasuk untuk melunasi fasilitas kredit untuk pembiayaan Dana Talangan Tanah Pembebasan Lahan untuk ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda berdasarkan Perjanjian Kredit DTT.</p> <p>Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp43.511.486.767</p>	Sejak ditandatangani perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau dilunasinya seluruh hutang JBS kepada Perseroan berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham sebelum tanggal 31 Desember 2024.	JBS diwajibkan untuk membayar bunga dengan suku bunga sebesar 8,00% per tahun yang dikenakan secara <i>simple interest</i> .
3.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 12/Perjanjian- DIR/2023 tanggal 14 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • CSJ. 	<p>Perseroan dan SMI setuju untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada CSJ dengan jumlah plafond sebesar Rp 225.000.000.000, dengan rincian porsi komitmen yakni setinggi-tingginya sebesar: (i) Rp 137.500.000.000 oleh Perseroan dan (ii) Rp 87.500.000.000 oleh SMI.</p> <p>Pemberian pinjaman pemegang saham tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban CSJ berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 09 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, "Kredit Sindikasi") dan pemenuhan kebutuhan operasional lainnya.</p> <p>Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp292.479.463.552</p>	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani perjanjian oleh para pihak sampai dengan: (i) 2 tahun setelah tanggal lunasnya hutang berdasarkan Kredit Sindikasi, (ii) tanggal jatuh tempo. Yakni selambat-lambatnya 15 tahun sejak tanggal 14 Juni 2024, atau 14 Juni 2039, (iii) dilunasinya hutang CSJ berdasarkan perjanjian, atau (iv) diakhiri perjanjian oleh para pihak, mana yang lebih dahulu terjadi.	CSJ diwajibkan untuk membayar bunga dengan besaran suku bunga sebesar bunga Kredit Sindikasi + 2% per tahun yang akan dikenakan secara majemuk.

No.	Perjanjian Pinjaman	Para Pihak	Jumlah Pinjaman/Fasilitas	Masa Berlaku Perjanjian	Bunga atau Nisbah Bagi Hasil
4.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 04/Perjanjian-DIR/2023 atau No. 002.00/PKS/JBT-JMT/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diubah oleh Addendum I Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 28 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan; dan JBT. 	<p>Perseroan sepakat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham JBT untuk menyediakan pinjaman kepada JBT dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp949.045.000.000 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh lima juta Rupiah).</p> <p>Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp629.000.000.001</p>	Sampai dengan 31 Desember 2035.	Dalam hal perjanjian kredit investasi masih berlaku, maka suku bunga sebesar 2% (dua persen) per tahun yang akan dikenakan secara majemuk. Dalam hal perjanjian kredit investasi telah lunas, maka suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) per tahun yang akan dikenakan secara majemuk.
5.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Manado Bitung Tahun 2021 No. JM: 64.5/KONTRAK-DIR/2021, No. JMB: 192.1/AA-JMB/PER/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum II atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 31 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan; dan JMB. 	<p>Perseroan setuju untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada JMB dengan jumlah plafond sebesar Rp 526.448.956.271.</p> <p>Pemberian pinjaman pemegang saham tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan <i>cash flow</i> JMB dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan cicilan pokok Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 23 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Kredit Sindikasi Investasi”) dan pembayaran kewajiban bunga dana talangan tanah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 17 Juli 2018, dibuat di hadapan Ati Mulyati, SH., MKn., Notaris di Jakarta serta untuk kebutuhan operasional lainnya.</p> <p>Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp393.863.423.000</p>	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 1 tahun setelah tanggal lunasnya hutang berdasarkan Kredit Sindikasi Investasi atau sampai dengan dilunasinya seluruh Pinjaman berikut bunga, biaya provisi dan denda (jika ada) oleh JMB kepada Perseroan, mana yang lebih dahulu terjadi.	JMB diwajibkan untuk membayar bunga dengan besaran suku bunga sebesar Kredit Sindikasi + 2% per tahun yang akan dikenakan secara majemuk.

Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki beberapa perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Anak, yakni JMTO dan JMTM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian Kerjasama jalan tol	Para Pihak	Masa Berlaku Perjanjian
1.	Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan; dan JMTO. 	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan

No.	Perjanjian Kerjasama jalan tol	Para Pihak	Masa Berlaku Perjanjian
	– Bogor – Ciawi No. 98/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 29 September 2023		ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
2.	Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol JORR W2S dan Ulujami – Pondok Aren No. 99/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTO. 	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
3.	Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cawang – Tomang Pluit, Prof. DR. Ir. Soedijatmo, Jakarta – Tangerang No. 100/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 29 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTO. 	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
4.	Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cipularang – Padaleunyi No. 101/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 29 September 2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTO. 	Sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
5.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol pada Ruas Jakarta – Bogor – Ciawi PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 02/Kontrak-/Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTM. 	Sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
6.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S dan Ulujami – Pondok Aren PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 05/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTM. 	Sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
7.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol pada Ruas Jakarta – Tangerang – Cengkareng PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 03/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTM. 	Sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.
8.	Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol pada Ruas Cipularang – Padaleunyi PT Jasamarga (Persero) Tbk. No. 04/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan; dan • JMTM. 	Sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028, dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kembali oleh para pihak.

Ruang lingkup dari perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut di atas adalah pemberian tugas dari Perseroan kepada masing-masing (i) JMTO, untuk menyelenggarakan pekerjaan manajemen pengoperasian ruas jalan tol yang dikelola Perseroan sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian jasa pengoperasian jalan tol dalam bidang pelayanan transaksi dan pelayanan lalu lintas, termasuk pemeliharaan rutin fasilitas sarana transaksi, gedung kantor, dan bangunan pelengkap tol sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing perjanjian jasa pengoperasian jalan tol dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) JMTM, untuk menyelenggarakan pekerjaan manajemen di bidang pemeliharaan ruas jalan tol yang dikelola

Perseroan sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian kerjasama dengan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi (a) pembelian aset dan material sehubungan dengan pemeliharaan jalan tol dan (b) pemeliharaan rutin jalan tol sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama, masing-masing JMTO dan JMTM sebagai pemberi jasa ("**Pemberi Jasa**") wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan Perseroan sebagai penerima jasa wajib melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang disediakan oleh masing-masing Pemberi Jasa. Perseroan berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh Pemberi Jasa untuk memastikan pemenuhan kewajiban Pemberi Jasa berdasarkan masing-masing perjanjian kerjasama. Selain itu, Perseroan memberikan kuasa kepada masing-masing Pemberi Jasa untuk mengelola ruas jalan tol lintas sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian kerjasama.

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian kerjasama mengatur bahwa masing-masing Pemberi Jasa tidak diperbolehkan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari Perseroan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Hukum yang berlaku untuk masing-masing perjanjian kerjasama adalah Hukum Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

8.5. ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Saat ini, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang digunakan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan PPJT, dimana Perseroan tidak memiliki alas hak (sertipikat) khusus atas aset tetap tersebut dan aset tersebut merupakan satu kesatuan dari PPJT yang dimiliki oleh Perseroan, kecuali sehubungan dengan kepemilikan hak atas tanah oleh Perseroan dengan alas Hak Guna Bangunan ("**HGB**") dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
1.	No. 2/Undar Andir, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2010	9.895	27 Januari 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
2.	No. 985/Drangong, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2010	2.060	27 Januari 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
3.	No. 6/Parung Raya, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2001	9.990	8 Agustus 2031	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan untuk JMTO area Janger.
4.	No. 3219/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
5.	No. 3220/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
6.	No. 3221/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
7.	No. 3222/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	135	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.

No.	Nomor Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
8.	No. 3223/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	141	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
9.	No. 3224/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	150	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
10.	No. 3225/Cikokol, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2000	9	29 September 2030	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
11.	No. 458/Kampung Dukuh, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2009	232	24 September 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan sebagai kantor Perhimpunan Pensiunan Jasa Marga (PPJM).
12.	No. 459/Kampung Dukuh, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2009	210	24 September 2039	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan untuk pembangunan <i>daycare</i> .
13.	No. 2127/Pluit, oleh Kepala Kantor Pertanahan Walikotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan pada tanggal 15 Fenruari 1989 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utama No. 1458/971-550.2-09.05-2008 tanggal 3 Juli 2008	120	19 Januari 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
14.	No. 2146/Pluit, oleh Kepala Kantor Pertanahan Walikotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan pada tanggal 15 Fenruari 1989 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utama No. 1457/970-550.2-09.05-2008 tanggal 3 Juli 2008	120	19 Januari 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
15.	No. 1/Haruwangi, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur yang diterbitkan pada tanggal 12 November 1994	10.000	30 tahun sejak tanggal diterbitkan, atau yakni 12 November 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
16.	No. 1/Mandalasari, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1995	2.200	29 November 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
17.	No. 1143/Ciatringgul, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2009	93	14 April 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.
18.	No. 72/Puspanegara, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor yang diterbitkan pada tahun 2007	248	27 Mei 2027	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan menjadi Pos <i>security/keamanan</i> .
19.	No. 4278/Katulampa, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2009	453	27 Agustus 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Dimanfaatkan menjadi kantor Patroli Jalan

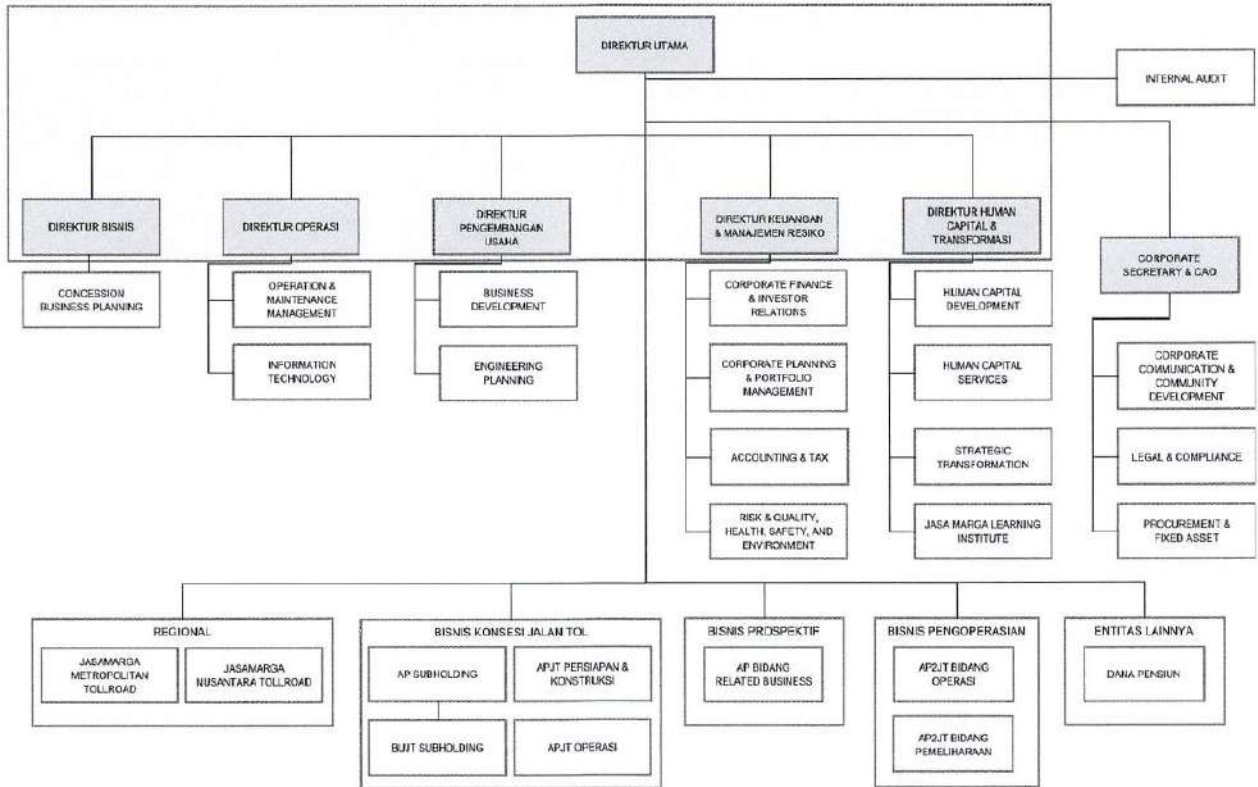
No.	Nomor Sertifikat HGB, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat HGB	Luas Tanah (m ²)	Tanggal Berakhirnya HGB	Keterangan	Pemanfaatan
					Raya (PJR) dan pos <i>security</i> .
20.	No. 1284/Tanah Baru, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2010	450	28 Desember 2029	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. Apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor	Dimanfaat menjadi Gudang ex-peralatan tol.
21.	No. 5/Mliriprowo, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2022	1.742	2 April 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.	Belum dimanfaatkan.

Rencana atas pengoptimalan atas aset yang belum dimanfaatkan antara lain membangun kantor pelayanan operasional untuk memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna jalan tol, membangun gudang penyimpanan dokumen-dokumen penting Perseroan dan juga memanfaatkan peluang usaha secara komersil di bidang usaha lain (non jalan tol) dengan bekerja sama dengan Anak Perusahaan Perseroan dengan membangun perkantoran, daycare, dan usaha komersil lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, nilai buku bersih aset tetap Perseroan sebesar Rp474.401 juta.

8.6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



8.7. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	MSJ	JKC	MTN	JSM	JGP	JBT	JKT	CSJ	JBS	JMB	JJS	JPB
Mohammad Zainal Fatah	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Roskanedi	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raja Erizman	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seppalga Ahmad	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chandra Wijaya	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marsetio	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abdul Rachman	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subakti Syukur	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pramitha Wulanjani	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohamad Agus Setiawan	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reza Febriano	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitri Wiyanti	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagus Cahya Arinta B	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	JLJ (dalam likuidasi)	JMTM	JMRB	JMTO	JTT	LMJ	JRB	JNK	JJB	AJP	JAP	JSN	JSB
Mohammad Zainal Fatah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Roskanedi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raja Erizman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seppalga Ahmad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	JLJ (dalam likuidasi)	JMTM	JMRB	JMTO	JTT	LMJ	JRB	JNK	JJB	AJP	JAP	JSN	JSB
Chandra Wijaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marsetio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abdul Rachman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subakti Syukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pramitha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wulanjani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohamad Agus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setiawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reza Febriano	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Fitri Wiyanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagus Cahya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arinta B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

8.8. PENGURUS DAN PENGAWAS

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan keputusan Rapat No. 41 tanggal 15 Juni 2020 (“Akta No. 41/2020”), *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 4 Juni 2021 (“Akta No. 18/2021”), *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 2 September 2021 (“Akta No. 03/2021”), *juncto* (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 24 Desember 2021 (“Akta No. 53/2021”), *juncto* (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 14 Februari 2023 (“Akta No. 30/2023”), seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mohammad Zainal Fatah
Komisaris	: M. Roskanedi
Komisaris	: Raja Erizman
Komisaris Independen	: Seppalga Ahmad
Komisaris Independen	: Chandra Wijaya
Komisaris Independen	: Marsetio
Komisaris Independen	: Abdul Rachman

Direksi

Direktur Utama	: Subakti Syukur
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Pramitha Wulanjani
Direktur Pengembangan Usaha	: Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis	: Reza Febriano
Direktur Operasi	: Fitri Wiyanti
Direktur Human Capital dan Transformasi	: Bagus Cahya Arinta B

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam masing-masing (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0251998 tanggal 17 Juni 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095624.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk Akta No. 41/2020, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0362157 tanggal 9 Juni 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0101377.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 Juni 2021 untuk Akta No. 18/2021, (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0445305 tanggal 7 September 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0152576.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 September 2021 untuk Akta No. 03/2021, (iv) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0490971

tanggal 27 Desember 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0230110.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Desember 2021 untuk Akta No. 53/2021, dan (v) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091890 tanggal 14 Februari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0032395.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 untuk Akta No. 30/2023.

Penunjukkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan RUPS pada saat pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu, yakni dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fitri Wiyanti selaku Direktur Operasi, menjabat sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya, atau yakni pada penutupan RUPS tahunan tahun 2025;
- b. Subakti Syukur selaku Direktur Utama, Mohamad Agus Setiawan selaku Direktur Pengembangan Usaha, Reza Fabriano selaku Direktur Bisnis, Bagus Cahaya Arinta B. selaku Direktur Human Capital dan Transformasi, Raja Erizman selaku Komisaris, dan M. Roskanedi selaku Komisaris, seluruhnya menjabat sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya, atau yakni pada penutupan RUPS tahunan tahun 2026; dan
- c. Pramitha Wulanjani selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Mohammad Zainal Fatah selaku Komisaris Utama, Seppalga Ahmad selaku Komisaris Independen, Chandra Wijaya selaku Komisaris Independen, Marsetio selaku Komisaris Independen, dan Abdul Rachman selaku Komisaris Independen, seluruhnya menjabat sampai dengan penutupan RUPS yang ke-5 tahunan setelah pengangkatannya, atau yakni pada penutupan RUPS tahunan tahun 2028.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Mohammad Zainal Fatah, Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Sarjana bidang Teknik Pertanian dari Universitas Brawijaya pada tahun 1992.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 - saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015 – 2019) dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019 – 2020).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



M. Roskanedi, Komisararis

Warga negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisararis Perseroan sejak tahun 2021.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1986.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2019 – 2020) dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2020 – 2021).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisararis lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Raja Erizman, Komisararis

Warga negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisararis Perseroan sejak tahun 2021.

Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1985).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Perwira Tinggi (Pati) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri (2020 – saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Republik Indonesia (2019) dan Analis Kebijakan Utama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri (2020).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisararis lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Seppalga Ahmad, Komisararis Independen

Warga negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisararis Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada tahun 1994.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur PT Pasopati Indo Risk (2010 – 2013), Anggota DPRD DKI Jakarta (2014 – 2019), Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Energi (2020 – 2021), dan Komisararis Independen PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – 2023).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisararis lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Chandra Wijaya, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Intitut Teknologi Bandung pada tahun 2000 dan Doktor bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Klaster Riset Tata Kelola dan Daya Saing Badan Usaha, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2017 – saat ini) dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2021 – saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (2016).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Marsetio, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Doktor bidang Ilmu Kajian Budaya dan Media dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 dan Guru Besar / Profesor Maritime Securities Studies dari Universitas Pertahanan pada tahun 2016.

Sebelumnya beliau pernah menjadi KASAL TNI Angkatan Laut (2012 – 2014) dan Komisaris Utama PT Pelindo (2020 – 2023).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Abdul Rachman, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 1980 dan Master of Science in Financial Management dari Kansas State University pada tahun 1989.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005 – 2015) dan Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2021 – 2023).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Direksi



Subakti Syukur, Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Meraih gelar Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986 dan Magister Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta pada tahun 2010.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (2020 – saat ini), Staf Khusus Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (2021 – saat ini), dan Ketua Bidang Investasi II Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (2023 – saat ini). Sebelumnya beliau pernah Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta (2014 - 2016), dan Direktur Operasi Perseroan (2016 – 2020).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Pramitha Wulanjani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, 37 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Keuangan PT Jasamarga Tollroad Operator (2021 – 2022), Direktur Keuangan PT Jasamarga Transjawa Tol (2022 – 2023), dan Komisaris PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2023).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Mohamad Agus Setiawan, Direktur Pengembangan Usaha

Warga negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Meraih gelar Sarjana bidang Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995 dan Magister bidang Teknik Pengelolaan Jaringan Jalan dari Universitas Parahyangan pada tahun 2009.

Sebelumnya beliau pernah menjadi *Corporate Secretary* Perseroan (2017 – 2021), Direktur Bisnis Perseroan (2021), dan Komisaris Utama PT Jasamarga Related Business (2021 – 2023).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Reza Febriano, Direktur Bisnis

Warga negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Meraih gelar Sarjana bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran pada tahun 2002, Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2003, Magister Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 2007, dan Magister Manajemen dari PPM School of Management pada tahun 2021.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Jasamarga Transjawa Tol (2023 saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Regional Jabodetabekjabar Division Head (2019 – 2020), Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head (2020), Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Head (2020 – 2021), *Corporate Secretary* Perseroan (2021), Komisaris Utama PT Jasamarga Transjawa Tol (2023), dan Komisaris Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol (2022 – 2023).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Fitri Wiyanti, Direktur Operasi

Warga negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020.

Meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Bergabung dengan Perseroan sejak 1998, sebelumnya beliau pernah menjabat diantaranya sebagai General Manager Representative Office Jagorawi (2018 – 2019), Operation and Maintenance Management Group Head (2019 – 2020), dan Komisaris Utama PT Jasamarga Tollroad Operator (2020 – 2023).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Bagus Cahya Arinta B, Direktur Human Capital dan Transformasi

Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya pada tahun 1993.

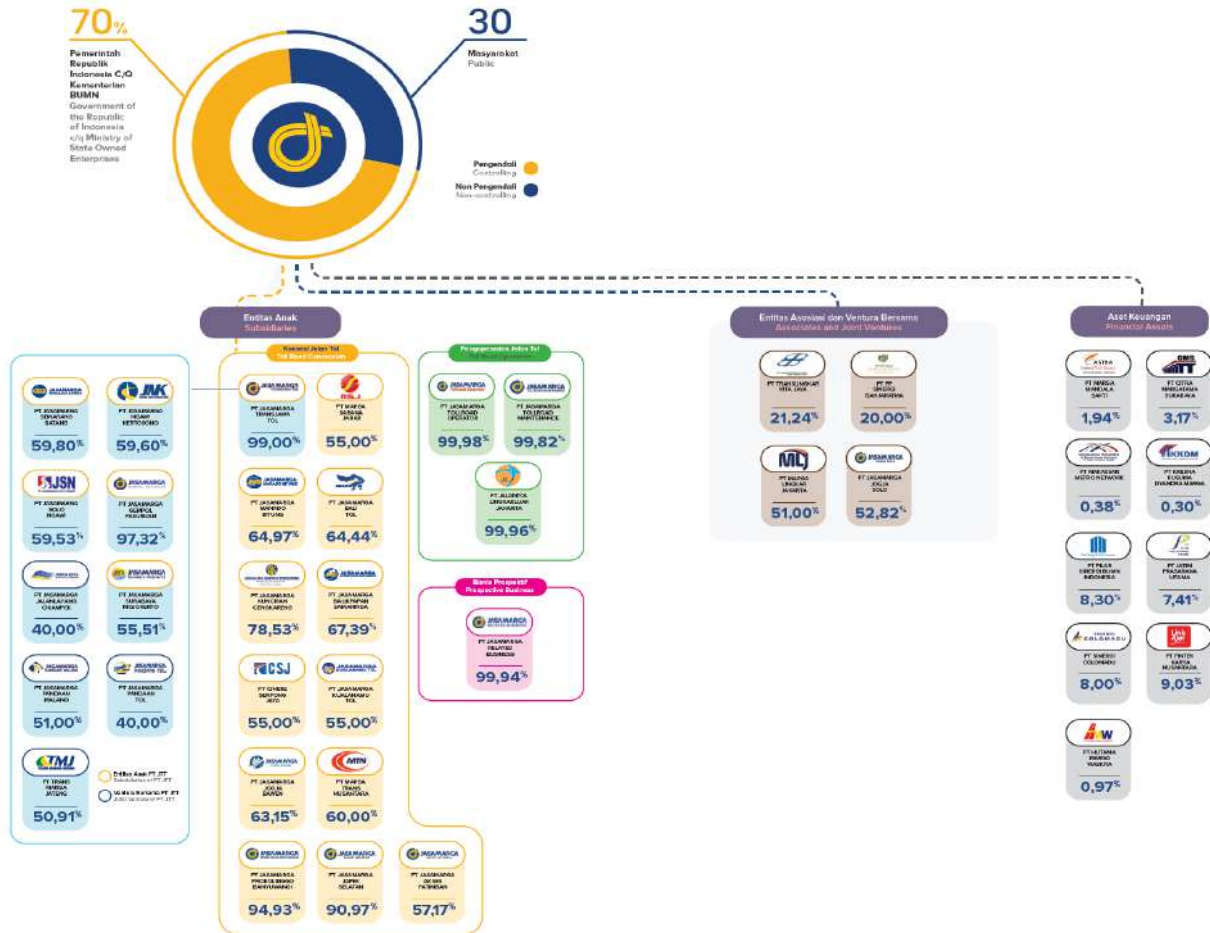
Sebelumnya beliau pernah menjadi Komisaris Utama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (2022 – 2023), Komisaris Utama PT Jasamarga Bali Tol (2021 – 2023), Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head (2021), dan Direktur Utama PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (2020 – 2021).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

Antar para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

8.9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Perusahaan Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pihak yang menjadi Pengendali Perseroan saat ini adalah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Informasi Penyampaian Data berdasarkan pelaporan pemilik manfaat yang disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 2 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 April 2024 tentang Pernyataan Kepemilikan Manfaat, pemilik manfaat Perseroan adalah Subakti Syukur, yang merupakan Direktur Utama sebagai orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

8.10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)

Tujuan penerapan GCG di Perseroan dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 85/KPTS/2020 tanggal 24 September 2020. Tujuan dari penerapan GCG pada Perseroan adalah:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pengguna Jalan Tol/Pelanggan Lainnya, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

3. Memaksimalkan nilai Perseroan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
4. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perseroan.
5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya visi dan misi Perseroan.
6. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan.
7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
9. Meningkatkan pencitraan Perseroan (*image*) yang semakin baik.
10. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
11. Menciptakan Insan Jasa Marga yang bersih dari segala bentuk penyuapan.

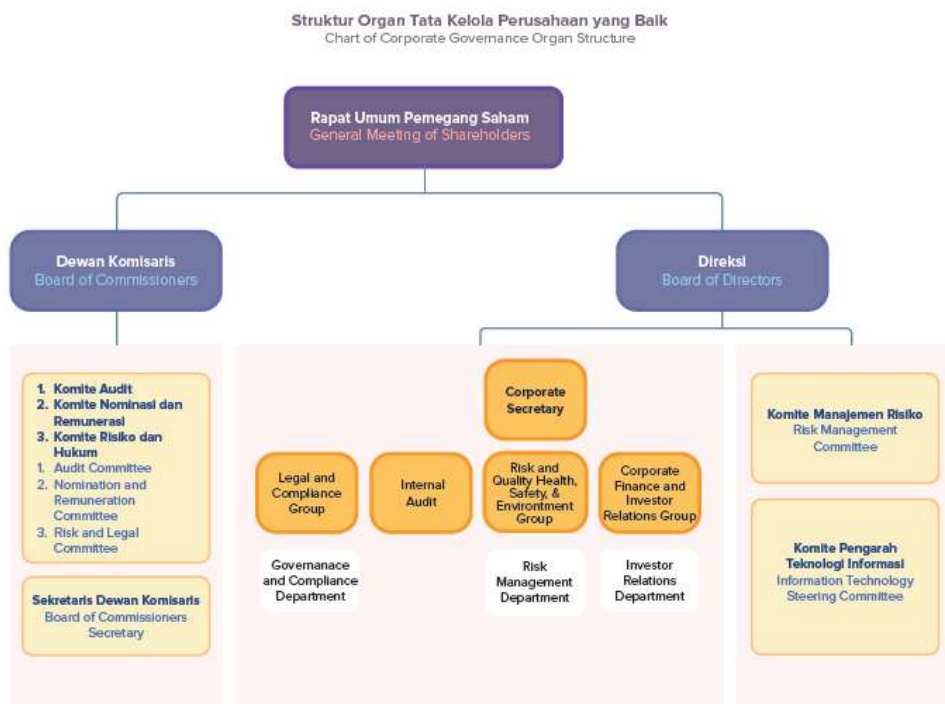
Struktur Tata Kelola

Perseroan telah memiliki *governance structure* yang efektif, yang terdiri dari organ Perseroan dan telah memiliki infrastruktur tata kelola berupa kebijakan-kebijakan internal sebagai acuan dan panduan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Organ Perseroan meliputi RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ di bawahnya sebagai pendukung tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Risiko dan Hukum, sedangkan Direksi memiliki Komite-Komite Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta organ pendukung Direksi lainnya seperti Unit Internal Audit dan satuan kerja lainnya.

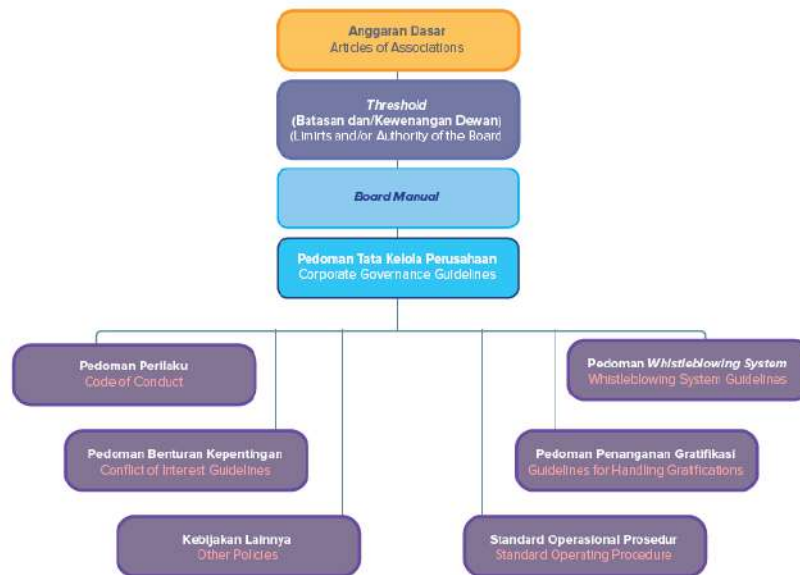
Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ Perseroan, Perseroan memiliki berbagai infrastruktur kebijakan internal, baik dalam bentuk peraturan, keputusan, pedoman, SOP, maupun kebijakan lainnya sebagai acuan dan koridor dalam melaksanakan fungsinya.

Struktur Organ Perusahaan



Sesuai dengan UUPT, organ Perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

- RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.



Perseroan memiliki *Governance Soft Structure* yang telah disusun dan diterapkan bagi seluruh insan Perseroan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Adapun *Governance Soft Structure* yang dimiliki Perseroan, antara lain:

1. Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0429854 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125817.AH.01.11. Tahun 2021 Tanggal 21 Juli 2021.
2. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., di antaranya adalah:
 - a. Keputusan Direksi No. 197/KPTS/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - b. Keputusan Direksi No. 43/KPTS/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perusahaan.
 - c. Keputusan Direksi No. 118/KPTS/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - d. Keputusan Direksi No. 78/KPTS/2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - e. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2018.
 - f. Keputusan Direksi No.150/KPTS/2018 tentang Visi dan Misi Perusahaan.
 - g. Keputusan Direksi No. 58/KPTS/2020 tentang Tata Nilai Perusahaan.
 - h. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. KEP 077/IX/2022 dan No. 112/KPTS/2022 tentang Whistleblowing System PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - i. Keputusan Direksi No. 128/KPTS/2021 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - j. Keputusan Direksi No. 09/KPTS/2022 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

- k. Keputusan Direksi No. 53/KPTS/2022 tentang Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- l. Keputusan Direksi No. 84/KPTS/2020 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- m. Keputusan Direksi No. 85/KPTS/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- n. Keputusan Direksi No. 142/KPTS/2022 tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- o. Keputusan Direksi No. 143/KPTS/2022 tentang Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Mekanisme GCG

Dalam kedudukannya sebagai Perusahaan BUMN, penerapan GCG di Perseroan didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN yang mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa Perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dimaksud meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki tugas masing-masing yang pembagiannya telah ditetapkan berdasarkan peran masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang menyesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya. Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas tugas dan fungsi agar terlaksana secara efektif dan bertanggung jawab, dengan tetap dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, tidak terafiliasi dengan kepentingan Direksi dan pemegang saham pengendali, serta tidak mengabaikan kepentingan pemegang saham publik, pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta dengan tetap memperhatikan bidang tugas masing-masing anggota Direksi. Khusus untuk 3 (tiga) orang anggota Komisaris, masing-masing mendapat tugas sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Ketua Komite Risiko dan Hukum, dan Ketua Komite Audit. 3 (tiga) orang Anggota Dewan Komisaris lainnya, masing-masing masuk menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Risiko dan Hukum dan anggota Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-032/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 bidang tugas anggota Dewan Komisaris dibagi dalam 6 (enam) bidang tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, meliputi:

1. Bidang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pengusahaan Jalan Tol dengan Sarana Penunjangnya;
2. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko;
3. Bidang Pengelolaan Human Capital & Transformasi;
4. Bidang Pengelolaan Pengembangan Usaha;
5. Bidang Pengelolaan Bisnis;
6. Bidang Pengelolaan Operasi & Pemeliharaan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 20 kali rapat Dewan Komisaris dan 11 kali Rapat Gabungan, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran	
		Rapat Dewan Komisaris	Rapat Gabungan
Mohammad Zainal Fatah	Komisaris Utama / Komisaris Independen	100%	90%
M. Roskanedi	Komisaris	86%	100%

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran	
		Rapat Dewan Komisaris	Rapat Gabungan
Raja Erizman	Komisaris	86%	100%
Seppalga Ahmad	Komisaris Independen	90%	100%
Chandra Wijaya ⁽¹⁾	Komisaris Independen	100%	100%
Marsetio ⁽¹⁾	Komisaris Independen	90%	80%
Abdul Rachman ⁽¹⁾	Komisaris Independen	90%	100%

Catatan:

⁽¹⁾ Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada sejak 8 Februari 2023

Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.821 juta dan Rp10.706 juta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengurusan Perseroan, dan berwenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam menjalankan jabatannya, Direksi memiliki tugas untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal, yang dilakukan oleh Unit Internal Audit maupun auditor eksternal. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi, bertujuan untuk perbaikan Perseroan agar kedepannya pengelolaan Perseroan menjadi lebih baik dan tujuan Perseroan dapat tercapai dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, Direksi memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. Direksi juga diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Memperhatikan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu.
3. Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.
4. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.

Selama tahun 2023, Direksi melaksanakan rapat Direksi sebanyak 60 kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran	
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan
Subakti Syukur	Direktur Utama	98%	100%
Pramitha Wulanjani ⁽¹⁾	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	100%	50%
Mohamad Agus Setiawan	Direktur Pengembangan Usaha	100%	100%
Reza Febriano	Direktur Bisnis	100%	100%
Fitri Wiyanti	Direktur Operasi	100%	82%
Bagus Cahya Arinta B	Direktur Human Capital dan Transformasi	98%	82%

Catatan:

⁽¹⁾ Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada sejak 8 Februari 2023

Jumlah remunerasi yang diterima Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.074 juta dan Rp20.754 juta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan dari waktu ke waktu mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Selama tahun 2023, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti pelatihan dan seminar, antara lain:

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara
Pramitha Wulanjani	Workshop Personal Effectiveness With Myers Briggs Type Indicator (MBTI)	Iradat Consulting
	Team Building JM Executive Summit 2023	Bali Mas ACE
	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	LSP MKS
	Sosialisasi IFRS Sustainability Disclosure Standards	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : Pre IPO dan Post IPO	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : Pemeringkatan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : ESG for Boards – Governance of ESG	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : Joint Venture between SOE and Private Sector	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : GRC Integrated Information For Supervisory Board	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : CG Methodology and Environmental and Social Management Systems Pelatihan & Sertifikasi CERG	Kementerian BUMN CRMS
Mohamad Agus Setiawan	Team Building JM Executive Summit 2023	Bali Mas ACE
	Asia Australia Road Conference (REAAA 2023)	REAAA
	GRC Masterclass Program 2023 : ESG for Boards – Governance of ESG	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : GRC Integrated Information For Supervisory Board	Kementerian BUMN
	Seminar Nasional & Kunjungan Proyek “Pembiayaan Kreatif dan Berkelanjutan Pembangunan Jalan di Indonesia”	HPJI
	GRC Masterclass Program 2023 : CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	Kementerian BUMN
	Business Essentials Masterclass : Strategic Management	BUMN School of Excellence (BSE)
Reza Febriano	Team Building JM Executive Summit 2023	Bali Mas ACE
	GRC Masterclass Program 2023 : Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	Kementerian BUMN
Fitri Wiyanti	GRC Masterclass Program 2023 : Joint Venture between SOE and Private Sector	Kementerian BUMN
Bagus Cahya Arinta B.	Webinar FHCI BUMN "Cyber Security Awareness"	FHCI
	Sosialisasi IFRS Sustainability Disclosure Standards	Kementerian BUMN
	GRC Masterclass Program 2023 : Introduction to ESG & IFC Performance Standards	Kementerian BUMN
	Training Chief Human Resource Officers School Tahun 2023	FHCI
	The 4th Indonesia Human Capital Summit 2023 "Navigating Human Experience Journey For Value Creation And Sustainability"	FHCI

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Sdr. Nixon Sitorus sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 087/AA.P-6a/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan Sekretaris. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Adapun alamat sekretaris perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nixon Sitorus

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550

Telp. (021) 841-3630, 841-3526 Fax. (021) 841-3540

Situs web: www.jasamarga

Email: jsmr@jasamarga.co.id, sekper@jasamarga.co.id, investor.relations@jasamarga.co.id

Nixon Sitorus. Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada bulan April 2022. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995 dan Magister Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia pada tahun 2005. Sebelumnya beliau menempati berbagai posisi kunci di Perseroan, diantaranya *Vice President* Jasamarga Learning Institute (2018 – 2019) dan Strategic Transformation Office Coordinator (2019 – 2022).

Tugas dan fungsi jabatan sekretaris perusahaan adalah memastikan, memimpin dan mengarahkan seluruh penyusunan rencana dan kebijakan yang bersifat strategis di tingkat perusahaan, meliputi:

- pengelolaan informasi dan komunikasi pada lingkup eksternal dan internal Perusahaan,
- pengelolaan kegiatan program kemitraan dan kegiatan pembinaan lingkungan serta *Corporate Social Responsibility*, bidang pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan logistik dan pengamanan aset milik negara dan Perusahaan,
- pengelolaan acara-acara yang terkait dengan Perusahaan, antara lain seperti RUPS, peresmian Jalan Tol dan lain-lain serta mengelola hubungan baik dengan pemegang saham, regulator dan *stakeholder* Perusahaan,
- pengelolaan Sistem Manajemen Standardisasi dan Evaluasi Peningkatan Kinerja serta Manajemen Risiko,
- pengelolaan administrasi Kantor Pusat meliputi tata kelola persuratan, pengarsipan, pengelolaan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk pengendalian gratifikasi di Perusahaan dan pengelolaan *Whistleblowing System*,
- pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal serta agar seluruh aktivitas Perusahaan berjalan selaras sehingga memenuhi ketentuan

Tugas dan fungsi jabatan sekretaris perusahaan yang diungkapkan telah sesuai dengan POJK No. 35/2014.

Tanggung jawab sekretaris perusahaan antara lain:

1. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan informasi dan komunikasi pada lingkup eksternal dan internal Perseroan;
2. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan acara-acara yang terkait dengan perusahaan dan mengarahkan acara-acara yang terkait Perusahaan Anak serta mengelola hubungan baik dengan pemegang saham, regulator dan *stakeholder* Perseroan;
3. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan kegiatan program kemitraan dan kegiatan pembinaan lingkungan serta *Corporate Social Responsibility*;
4. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan tata kelola administrasi pimpinan Perusahaan di Kantor Pusat dan mengarahkan tata kelola administrasi di regional dan *Area Offices/Branch Offices* (Cabang), yang meliputi tata kelola persuratan, pengarsipan dan administrasi;
5. Memimpin, dan mengarahkan perumusan kebijakan, tata kelola, ketentuan, perencanaan dan pelaksanaan atas proses pengadaan barang/jasa dan manajemen aset di lingkungan grup Perseroan;
6. Mengarahkan pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa serta pengamanan aset milik negara dan Perseroan berdasarkan prinsip dan peraturan yang berlaku;
7. Memimpin, mengarahkan dan memastikan pengelolaan sistem manajemen risiko, sistem manajemen standarisasi dan evaluasi peningkatan kinerja sesuai dengan rencana dan strategi perusahaan serta memenuhi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan yang berlaku.

8. Memimpin, mengarahkan dan memastikan pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan (termasuk peraturan di bidang pasar modal), pemenuhan dan penerapan GCG dalam Perseroan (meliputi pengendalian gratifikasi, *whistleblowing system* dan hal-hal lainnya);
9. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
10. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta rapat gabungan.
 - e. Pelaksanaan program *executive induction* Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, asosiasi dan lembaga berwenang lainnya. Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, antara lain:

Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara
Workshop Personal Effectiveness With Myers Briggs Type Indicator (MBTI)	Iradat Consulting
Team Building JM Executive Summit 2023	Bali Mas ACE
Workshop BUMN Spokesperson Masterclass "Becoming a Bold Spokeperson in Society"	Kementerian BUMN

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
2. UUPT.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. POJK No. 55/2015.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-029/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dari Unsur Dewan Komisaris ("SK No. 029/2023") juncto Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-125/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("SK No. 125/2023"), dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	: Chandra Wijaya (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	: Seppalga Ahmad (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota	: Mohammad Fahmi Arkanuddin
Anggota	: Siti Purnama Rizki

Masa jabatan Chandra Wijaya sebagai Ketua Komite Audit dan Seppalga Ahmad sebagai anggota Komite Audit adalah selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai efektifnya SK No. 029/2023, sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebagai Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit. Masa jabatan Mohammad Fahmi Arkanuddin dan Siti Purnama Rizki sebagai anggota Komite Audit adalah 3 tahun terhitung sejak mulai efektifnya SK No. 125/2023 sampai dengan tanggal 30 September 2026.

Berikut adalah profil Komite Audit Perseroan:

Chandra Wijaya

Ketua Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Seppalga Ahmad

Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Mohammad Fahmi Arkanuddin

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka pada tahun 2000, Magister Manajemen dari Universitas Terbuka pada tahun 2016, Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2016, Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Terbuka pada tahun 2022 dan Doktor Ilmu Administasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2022. Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak tahun 2023 sampai saat ini.

Sebelumnya beliau pernah menjadi *Division Head Banking & Finance Industry* (1992 – 2020) dan *CFO holding company Stone Mining, Shipyard and Marine Transporter* (2021 – 2023).

Siti Purnama Rizki

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan Indoneisa pada tahun 2010 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak tahun 2023 sampai saat ini.

Sebelumnya beliau pernah menjadi *Assistant Manager Audit Deloitte Indonesia* (2018 – 2019) dan Komite Audit BPJS Kesehatan (2020 – 2022).

Adapun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan akan segera melakukan perubahan keanggotaan Komite Audit untuk menyesuaikan dengan POJK No. 55/2015 terkait persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi.

Penunjukan masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam POJK No. 55/2015 khususnya Pasal 4 yaitu Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tersebut, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi:
 - a. Perbedaan pendapat antara Manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, dan/atau
 - b. Ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi diberikan atas dasar aspek independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang diusulkan oleh Komite Audit dan disetujui oleh Dewan Komisaris atas biaya Perseroan.
8. Menyetujui pengangkatan Kepala Internal Audit.
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, termasuk transaksi dengan pihak terkait.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 Oktober 2018. Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2023, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 21 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Chandra Wijaya	95%
Seppalga Ahmad	55%
Mohammad Fahmi Arkanuddin ⁽¹⁾	100%
Siti Purnama Rizki ⁽¹⁾	100%

Catatan:

⁽¹⁾ Diangkat menjadi Anggota Komite Audit pada bulan Oktober 2023

Internal Audit

Fungsi Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Internal Audit Group. Internal Audit Group membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit internal Perseroan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan serta memberikan saran perbaikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. DK.022/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan *Internal Audit Senior Group Head*, yakni untuk mengangkat Agung Laksana Pranata sebagai *Internal Audit Senior Group Head* Perseroan.

Agung Laksana Pranata. Warga negara Indonesia, 36 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan Master of Laws dari University of Queensland pada tahun 2015. Menjabat sebagai Internal Audit Group Head Perseroan sejak tahun 2023 sampai saat ini.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Legal & Compliance Group Head (2019 – 2022) dan Human Capital Development Advisor (2022 – 2023).

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang disusun dengan menggunakan pendekatan *Risk-Based Audit Planning* (Perencanaan Audit Berbasis Risiko). Perseroan telah memiliki Internal Audit Charter yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 14 September 2023. Secara berkala, Internal Audit Charter dikaji ulang dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Audit Internal tersebut, tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian Internal dan sistem Manajemen Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya terhadap unit kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit dan Internal Audit Perusahaan Anak.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Melakukan sinkronisasi program kerja Audit antara Induk dan Perusahaan Anak.

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Risiko

Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko ("**Komite NRR**") Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Fungsi utama Komite NRR adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengelolaan Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi di bidang nominasi, remunerasi dan risiko berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite NRR disahkan dengan keputusan Dewan Komisaris KEP 007/I/2022 tanggal 14 Januari 2022.

Komite NRR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif melalui sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen. Berdasarkan Piagam Komite NRR, tugas dan tanggung jawab Komite NRR adalah:

1. Tugas terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Tugas terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan, Komisaris dan Direksi Entitas Anak kepada Dewan Komisaris.
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
3. Tugas terkait dengan Pemantauan Manajemen Risiko:
 - a. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem manajemen risiko serta pelaksanaannya.

- c. Menyarankan *Risk Indicator* yang harus disampaikan oleh manajemen atas perkembangan lingkungan eksternal dan organisasi Perseroan yang mempengaruhi proses bisnis Perseroan.

Susunan keanggotaan Komite NRR berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-83/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk juncto Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-028/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dari Unsur Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Ketua : Marsetio (merangkap Komisaris Independen)
 Anggota : Raja Erizman (merangkap Komisaris)
 Anggota : Chitra Mardi Rahayuningsih

Berikut adalah profile Komite NRR Perseroan:

Marsetio

Ketua Komite NRR

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Raja Erizman

Anggota Komite NRR

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Chitra Mardi Rahayuningsih

Anggota Komite NRR

Warga negara Indonesia, 65 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret Solo pada tahun 1984 dan Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta pada tahun 1997. Menjabat sebagai anggota komite NRR Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Kepala Bidang Kompetensi dan Evaluasi, SETJEN – Kementerian PUPR (2011 – 2015) dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, BPSDM – Kementerian PUPR (2015 – 2019).

Rapat Komite NRR dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Komite NRR dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Komite NRR dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite NRR merupakan ketua Komite NRR. Selama tahun 2023, Komite NRR melakukan rapat sebanyak 13 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Marsetio	92%
Raja Erizman	92%
Chitra Mardi Rahayuningsih	100%

8.11. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki total karyawan tetap sejumlah 5.362 orang. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Perusahaan pada masing-masing tanggal:

Tabel komposisi karyawan berdasarkan status

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Perseroan		
Tetap	2.059	1.950
Kontrak	5	-

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
<i>Trainee</i>	6	23
	2.070	1.973
Perusahaan Anak		
Tetap	3.303	3.072
Kontrak	2.623	2.927
<i>Trainee</i>	-	-
	5.926	5.999
Jumlah	7.996	7.972

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Perseroan		
Strata 3		
Strata 2	113	159
Strata 1	1.134	1.070
Diploma	-	4
< SLTA	812	717
	2.059	1.950
Perusahaan Anak		
Strata 3		
Strata 2	9	9
Strata 1	559	635
Diploma	138	124
< SLTA	2.597	2.304
	3.303	3.072
Jumlah	5.362	5.022

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Perseroan		
20 - 24	34	11
25 - 29	121	108
30 - 34	190	219
35 - 39	79	86
40 - 44	230	156
45 - 49	702	660
50 - 54	594	587
> 54	109	123
	2.059	1.950
Perusahaan Anak		
20 - 24	11	7
25 - 29	926	562
30 - 34	1.260	1.364
35 - 39	410	490
40 - 44	126	121
45 - 49	220	186
50 - 54	293	281
> 54	57	61
	3.303	3.072
Jumlah	5.362	5.022

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Perseroan		
Manajemen Puncak	84	84
Manajemen Madya	229	228
Manajemen Dasar	329	314
Pelaksana	1.417	1.324
	2.059	1.950
Perusahaan Anak		
Manajemen Puncak	1	-
Manajemen Madya	15	12
Manajemen Dasar	39	34
Pelaksana	3.248	3.026
	3.303	3.072
Jumlah	5.362	5.022

Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Perseroan		
Operasional	656	601
Non Operasional	1.403	1.349
	2.059	1.950
Perusahaan Anak		
Operasional	2.790	2.525
Non Operasional	513	547
	3.303	3.072
Jumlah	5.362	5.022

Tabel komposisi karyawan berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Kantor Pusat	487	464
<i>Representative Office</i>	68	67
Regional	100	104
Perusahaan Anak	4.707	4.387
Jumlah	5.362	5.022

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan yang mempunyai keahlian ataupun sertifikat khusus yang dimana jika pegawai tersebut tidak ada akan mengganggu jalannya kegiatan operasional Perseroan serta tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Kebijakan *learning and development* menjadi salah satu ruang lingkup *Talent Management* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karyawan sehingga Perseroan memiliki daya saing tinggi dalam mendorong pertumbuhan kinerjanya. Pengembangan kompetensi karyawan tersebut dilakukan dengan menerapkan konsep digital melalui pembelajaran aktif JM-Click serta berdasarkan *Learning Academy*. Pengelolaan *Talent Development* tahun 2023 bertemakan *Utilizing Analytics in Bussiness* untuk menciptakan akselerasi bisnis melalui *high performing toll era industry 4.0*.

Di tahun 2023, program pelatihan prioritas korporasi menysasar pada *Upskilling* dan *Reskilling* serta *Utilizing* kompetensi karyawan di bidang *digital/data analytics*. Program sesuai kebutuhan bisnis yang dikelompokkan berdasarkan *learning academy* (*Project Development, Technological Innovation, Leadership Development, Operational Services, Business Support*) juga tetap dilakukan. Untuk akselerasi peningkatan kompetensi karyawan, tahun 2023 ini program pengembangan juga difokuskan pada program Sertifikasi dan Beasiswa.

Di sepanjang tahun 2023, program-program yang telah berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- i. *Road Runner Program*, dimana adanya *job assignment* dan akselerasi ke jabatan yang dianggap lebih baik dan menantang serta diterapkan *cross mentoring*. Kemudian adanya program *learning from others* melalui *coaching* dan *mentoring* melalui media aplikasi JM-Click.
- ii. Program Sertifikasi meliputi Program Sertifikasi *Human Capital*, Sertifikasi Audit, Sertifikasi *Information Technology*, Sertifikasi Bidang Risiko, serta Sertifikasi *Procurement*.
- iii. Program Pelatihan di Bidang *Data Analytic* yang ditujukan untuk karyawan Operasional maupun Non Operasional, seperti Pelatihan *Basic* seperti *MS Office*, maupun aplikasi terapan seperti *Power BI*, Audit IT, dan lainnya.
- iv. Program *JM Talk* dan *Webinar* dengan peserta internal maupun eksternal Perusahaan yang mengundang Narasumber handal di bidangnya yang dilakukan secara *online* maupun *hybrid* dengan pengelolaan *online system* dari internal / studio JMLI.
- v. Program Beasiswa Internal Dalam Negeri dan Internal Luar Negeri serta Beasiswa Eksternal Perusahaan yang diikuti oleh *Roadster* Jasa Marga.
- vi. Program *Rosela* yang merupakan program konseling yang dirancang oleh Perseroan untuk membantu karyawan mempelajari cara yang lebih konstruktif dalam menangani permasalahan.
- vii. Program *Learning Journey* Rekrutmen Bersama BUMN yang sedang melakukan *Job assisgment* di Unit Kerja.

Perseroan secara rutin menggelar evaluasi yang dilaksanakan sebelum pelatihan, pada saat pelatihan dan setelah pelatihan. Evaluasi lebih difokuskan pada peninjauan kembali proses, menilai hasil, serta dampak pelatihan terhadap kinerja sumber daya manusia. Evaluasi juga memiliki fungsi koreksi menuju program pelatihan yang sistematis, efektif dan efisien. Selain itu, hasil evaluasi akan memberikan *feedback* untuk kelangsungan program pelatihan selanjutnya.

Serikat Pekerja

Manajemen memahami bahwa hubungan industrial merupakan sinergi antara manajemen dan serikat karyawan yang memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan Perseroan. Dalam upaya menciptakan dan menjaga keharmonisan antara manajemen dan karyawan yang dibingkai dalam hubungan sinergi, manajemen memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dalam organisasi Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) yang merupakan bentuk komitmen Manajemen terhadap Peraturan Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Harmonisasi hubungan industrial juga tergambar dalam aktivitas Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yang dapat berjalan dengan baik, segala isu kesejahteraan selalu diinformasikan dan didiskusikan dengan Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) sehingga karyawan memahami program-program Perseroan terutama dalam transformasi organisasi, yang berdampak terhadap kesejahteraan karyawan. Pada tahun 2023, Perseroan melakukan kegiatan rapat Bipartit untuk melakukan kesepakatan terkait pemberian benefit kesejahteraan yang disesuaikan dengan perkembangan kinerja Perseroan.

Pada tahun 2020 Perseroan melakukan Kajian Penataan *Human Capital* tahun 2021-2025 dalam rangka Transformasi Organisasi. Dalam kajian tersebut, disusunlah program Pensiun Dini Sukarela (PDS) dan program Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang dalam proses penyusunannya dilakukan pembahasan dan diskusi secara intensif dengan Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) sehingga didapatkan hasil yang optimal.

Sarana Kesejahteraan

Aspek kesejahteraan karyawan menjadi perhatian Perseroan agar karyawan dapat merasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga hal tersebut memotivasi tiap individu untuk terus meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja. Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi

karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukan bagi seluruh karyawan organik Perseroan dengan beberapa pengecualian seperti fasilitas rumah dan mobil dinas yang hanya diberikan kepada karyawan-karyawan tertentu, dan jaminan asuransi kecelakaan risiko tinggi yang hanya diberikan kepada petugas-petugas operasional. Fasilitas dan program tersebut antara lain meliputi sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2. Fasilitas kesehatan;
3. Program pensiun;
4. Tunjangan pajak;
5. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
6. Ongkos Cuti Tahunan;
7. Jaminan Asuransi Kecelakaan Risiko Tinggi (bagi Petugas Operasional);
8. Santunan kematian;
9. Seragam dinas dan Ongkos Jahit;
10. Fasilitas pinjaman perumahan atau kendaraan dan uang pendidikan anak;
11. Fasilitas rumah dan mobil dinas serta pulsa telepon genggam bagi karyawan tertentu;
12. Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
13. Pencegahan polusi kerja (Petugas Pengumpul Tol);
14. Jasa produksi sesuai dengan kinerja pegawai;
15. Fasilitas olah raga, kesenian, keagamaan dan rekreasi;
16. UKB (Uji Kesehatan Berkala) bagi seluruh Karyawan;
17. Tunjangan Purna Karya.

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas tersebut sudah memenuhi Upah Minimum Regional yang berlaku dan memiliki Kesepakatan Bersama antara karyawan dengan Perseroan.

Program Pasca Kerja

Untuk memberikan kepastian kesejahteraan karyawan setelah berakhirnya masa kerja di Perseroan, maka Perseroan memberikan benefit kepada karyawan apabila telah mencapai usia pensiun. Program pasca kerja yang diberikan kepada karyawan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu yang bersifat *mandatory* dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Sedangkan yang bersifat internal dari Perseroan terdiri dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), Program Purna Karya dan Jaminan Kesehatan dari Perseroan.

Program yang bersifat *mandatory* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Sedangkan pelaksanaan program pasca kerja yang bersifat internal diatur dalam Peraturan Perseroan. Adapun penjelasan mengenai masing-masing program pasca kerja yang dilaksanakan di Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Penyelenggaraan PPMP diselenggarakan oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) yang didirikan oleh Perseroan. Program PPMP diikuti oleh karyawan yang mulai bekerja di Perseroan sebelum 01 Juli 2012. Sedangkan PIIP diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan diikuti oleh karyawan yang mulai bekerja di Perseroan sejak tanggal 01 Juli 2012.

2. Program Purna Karya

Program ini diberikan kepada karyawan dengan manfaat ketika berhenti pada usia pensiun normal akan mendapat 24 x PhDA (Penghasilan Dasar Asuransi), sedangkan karyawan yang berhenti sebelum usia pensiun normal akan mendapatkan manfaat proporsional sesuai peraturan Perseroan.

3. Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan ke dalam program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dasar perhitungan iuran JHT dihitung dari penghasilan yang proporsinya dibayar

sebesar 2% oleh karyawan dan 3,7% oleh Perseroan, sedangkan perhitungan iuran Jaminan Pensiun dihitung dari penghasilan dengan proporsi 1% oleh karyawan dan 2% oleh Perseroan.

4. Program Jaminan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga

Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang diberikan Perseroan berupa bantuan biaya untuk menjaga dan memelihara kesehatan pensiunan beserta keluarganya.

Pada tahun 2023, Perseroan menjalankan program pelatihan untuk karyawan yang akan memasuki masa purnabakti. Jasa Marga melaksanakan program *learning* berbasis digital yang dinamakan dengan Program JM Preneurship. Selain itu, untuk meningkatkan *awareness* serta pemahaman terkait rencana kewirausahaan yang menjadi *second career* bagi karyawan yang akan pensiun, Jasa marga memberikan materi *entrepreneurship* berupa *daily quiz* serta *course* pada aplikasi JM-Click.

8.12. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah daftar asuransi yang dimiliki Perseroan:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Jenis Perlindungan dan Objek Asuransi/Lokasi Risiko	Nilai Pertanggungan dan Premi
1.	209.290.200.23.00015/000/000 tanggal 27 Juni 2023	PT Asuransi Jasindo Syariah	28 Juni 2023 – 28 Juni 2024	<p><u>Jenis Perlindungan:</u> <i>Property All Risk Policy</i></p> <p><u>Objek Asuransi/Lokasi Risiko:</u> Atas harta benda sebagaimana diuraikan dalam lampiran polis asuransi yang berada di kantor pusat Perseroan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Toll Jagorawi, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objek 1 yang terdiri dari, antara lain, gedung kantor pusat, gedung SKJM dan studio JLI, gedung koperasi, dan gedung arsip I, II, dan III: <u>Nilai Pertanggungan:</u> Rp 70.107.840.664,79 <u>Premi:</u> Rp 25.799.685,36 Objek 2, yakni masjid: <u>Nilai Pertanggungan:</u> Rp 8.872.258.287,26 <u>Premi:</u> Rp 3.123.034,92 Objek 3, yang terdiri dari, ruang genset kantor pusat (lama dan baru) dan ruang hydran kantor pusat (lama dan baru): <u>Nilai Pertanggungan:</u> Rp 3.470.865.089,80 <u>Premi:</u> Rp 6.532.168,10
2.	209.283.200.23.00028/000/000 tanggal 27 Juni 2023	PT Asuransi Jasindo Syariah	28 Juni 2023 – 28 Juni 2024	<p><u>Jenis Perlindungan:</u> Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia</p> <p><u>Objek Asuransi/Lokasi Risiko:</u> Atas harta benda sebagaimana diuraikan dalam lampiran polis asuransi yang berada di kantor pusat Perseroan di Plaza Tol Taman Mini</p>	<ul style="list-style-type: none"> Objek 1 yang terdiri dari, antara lain, gedung kantor pusat, gedung SKJM dan studio JLI, gedung koperasi, dan gedung arsip I, II, dan III: <u>Nilai Pertanggungan:</u> Rp 70.107.840.664,79 <u>Suku Premi:</u> Rp 14,300%

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Jenis Perlindungan dan Objek Asuransi/Lokasi Risiko	Nilai Pertanggungan dan Premi
				Indonesia Indah, Jalan Toll Jagorawi, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> Objek 2, yakni masjid: <u>Nilai Pertanggungan:</u> Rp 8.872.258.287,26 <u>Suku Premi:</u> Rp 14,300% Objek 3, yang terdiri dari, ruang genset kantor pusat (lama dan baru) dan ruang hydran kantor pusat (lama dan baru): <u>Nilai Pertanggungan:</u> Rp 3.470.865.089,80 <u>Suku Premi:</u> Rp 14,300%

Seluruh aset berwujud yang dimiliki oleh Perseroan yang penting yang diperlukan dalam kegiatan operasional Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

8.13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Berikut ini adalah daftar HAKI yang tercatat dan terdaftar dimiliki oleh Perseroan:

a. Merek

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Merek	Kelas	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	IDM000270981	30 Januari 2009		9	30 Januari 2029
2.	IDM000446803	15 Mei 2012		42	15 Mei 2032
3.	IDM000441986	15 Mei 2012		9	15 Mei 2032
4.	IDM000434402	15 Mei 2012		25	15 Mei 2032

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Merek	Kelas	Tanggal Berakhirnya Hak
5.	IDM000425223	15 Mei 2012		16	15 Mei 2032
6.	IDM000446801	15 Mei 2012		39	15 Mei 2032

b. Hak Cipta

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Judul	Masa Berlaku
1.	IDS000006773	31 Juli 2019	MODULAR TOLL BOOTH/TOLL ISLAND (GERBANG TOL/PULAU TOL MODULAR)	31 Juli 2029
2.	IDS000007689	15 Juni 2022	ALAT BANTU PENGGANTI RODA KENDARAAN TRUK YANG RUSAK (MOVING ROLLER)	15 Juni 2032

c. Hak Cipta

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pertama Kali Dimumumkan
1.	C00200900304	30 Januari 2009	e-TOLL CARD	Karya Tulis	-
2.	C00201101532	13 April 2011	TAMAN LALU LINTAS EDUKATIF	Buku	-
3.	C00201105072	30 Desember 2011	e-Toll pass	Karya Tulis	-
4.	C00201202391	15 Mei 2012	JASA MARGA	Karya Tulis	-
5.	EC00202352371	6 Juli 2023	Program Komputer berupa perangkat lunak Aplikasi JID (Jasa Marga Integrated Digitalmap)	Program Komputer	-
6.	EC002023104295	3 November 2023	Aplikasi Deteksi Parkir Menggunakan YOLO V-8	Program Komputer	-

8.14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial

atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan, atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit, atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dan rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya; atau 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dan rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

8.15. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 25 (dua puluh lima) Perusahaan Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 8 (delapan) Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama yang memiliki nilai ekonomis bagi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
Perusahaan Anak (Jalan Tol)							
1.	MSJ	Pengusahaan jalan tol Bogor Ring Road	55,00%	2007	2007	Beroperasi	2,56%
2.	JKC	Pengusahaan jalan tol Kunciran-Cengkareng	78,53%	2008	2008	Beroperasi	4,20%
3.	MTN	Pengusahaan jalan tol Kunciran Serpong	60,00%	2008	2008	Beroperasi	3,16%
4.	JSM	Pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto	55,51% ⁽¹⁾	1994	1994	Beroperasi	- (b)
5.	JGP	Pengusahaan jalan tol Gempol-Pasuruan	99,35% ⁽²⁾	2010	2010	Beroperasi	- (b)
6.	JBT	Pengusahaan jalan tol ruas Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa	64,44%	2011	2011	Beroperasi	1,50%
7.	JMKT	Pengusahaan jalan tol ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	55,00%	2014	2014	Beroperasi	3,15%
8.	CSJ	Pengusahaan jalan tol ruas Cinere-Serpong	55,00%	2008	2015	Beroperasi	2,67%
9.	JBS	Pengusahaan jalan tol ruas	67,39%	2016	2016	Beroperasi	7,52%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan	
10.	JMB	Balikpapan-Samarinda Pengusahaan jalan tol ruas	64,97%	2016	2016	Beroperasi	3,52%	
11.	JJS	Manado-Bitung Pengusahaan jalan tol ruas	90,97%	2017	2017	Konstruksi	6,61%	
12.	JPB	Japek-Selatan Pengusahaan jalan tol ruas	94,98%	2017	2017	Konstruksi	1,74%	
13.	JNK	Probolinggo-Banyuwangi Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi –	59,60% ⁽⁸⁾	2009	2015	Beroperasi	- (b)	
14.	JJB	Kertosono Pengusahaan ruas jalan tol	63,15%	2020	2020	Konstruksi	2,46%	
15.	JSN	Yogyakarta - Bawen Pengusahaan jalan tol ruas Solo-	59,53% ⁽⁷⁾	2009	2015	Beroperasi	- (b)	
16.	JSB	Ngawi Pengusahaan jalan tol ruas	59,80% ⁽³⁾	2016	2016	Beroperasi	- (b)	
17.	JAP	Semarang-Batang Pengusahaan jalan tol ruas Akses	57,17%	2023	2023	Konstruksi	0,76%	
		Patimban						
		Perusahaan Anak (Non Jalan Tol)						
18.	JLJ (dalam likuidasi) ^(d)	Operator jalan tol JORR	99,96%	2000	2000	Dalam likuidasi	0,03%	
19.	JMTM	Jasa Konstruksi, Perdagangan, Persewaan kendaraan	99,82%	1988	2010	Beroperasi	2,05%	
20.	JMRB	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa terkait Properti	99,94%	2013	2013	Beroperasi	1,76%	
21.	JMTO	Jasa Pengoperasian Jalan Tol	99,98%	2015	2015	Beroperasi	1,11%	
22.	JTT	Penyertaan pada perusahaan penyelenggara Jalan Tol	99,00%	2017	2017	Beroperasi	47,15%	
23.	JRB	Transjawa Pengelolaan tempat peristirahatan dan pelayanan	89,08% ⁽⁴⁾	2019	2019	Beroperasi	- (c)	
24.	LMJ	Jasa aktivitas konsultasi manajemen	97,32% ⁽⁵⁾	2018	2023	Beroperasi	- (b)	
25.	AJP	Pembangunan properti	99,48% ⁽⁶⁾	2012	2012	Beroperasi	- (c)	
		Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (Jalan Tol)						

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Aset terhadap Total Aset Perseroan
26.	TMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo	50,91% ⁽¹¹⁾	2007	2007	Beroperasi	- (a)
27.	JJC	Pengusahaan jalan tol ruas Jalanlayang-Cikampek	40,00% ⁽¹⁰⁾	2016	2016	Beroperasi	- (a)
28.	JPM	Pengusahaan jalan tol ruas Pandaaan-Malang	51,00% ⁽¹²⁾	2016	2016	Beroperasi	- (a)
29.	TLKJ	Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi	21,24%	2006	2012	Beroperasi	2,51%
30.	JPT	Pengusahaan jalan tol ruas Gempol- Pandaan	40,00%	1996	2011	Beroperasi	- (a)
31.	MLJ	Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Utara	51,00%	2009	2009	Beroperasi	- (a)
32.	JMJ	Pengusahaan jalan tol ruas Jogja – Solo	52,82%	2020	2020	Konstruksi	- (a)
33.	PPSB	Pengelolaan Rest Area KM 260 Brebes	20,00% ⁽¹³⁾	2019	2019	Beroperasi	- (c)

Catatan:

(a) Perusahaan Anak yang didekonsolidasikan

(b) Aset dialihkan ke JTT akibat dari spin off dan buyback RDPT oleh JTT (LMJ)

(c) Perusahaan Anak yang dikonsolidasi oleh JMRB

(d) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLJ No. 11 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Siti Nur Isminingsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, para pemegang saham JLJ telah menyetujui dilakukannya pembubaran atas JLJ dan telah menunjuk likuidator atas nama Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan konsultan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Likuidasi JLJ akan berlaku sejak Menkumham mencatat berakhirnya status badan hukum JLJ dan menghapus nama JLJ dari daftar perseroan.

⁽¹⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 55,51%.

⁽²⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 99,35%.

⁽³⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,80%.

⁽⁴⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 89,08%.

⁽⁵⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 97,32%.

⁽⁶⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 99,48%.

⁽⁷⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,53%.

⁽⁸⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 59,60%

⁽⁹⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%

⁽¹⁰⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 40,00%

⁽¹¹⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 50,91%

⁽¹²⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JTT sebesar 51,00%

⁽¹³⁾ Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui JMRB sebesar 20,00%

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak yang secara material memiliki kontribusi kepada laporan keuangan konsolidasian, yaitu yang memiliki total aset sekitar 10% dari total aset Perseroan :

1. JTT

Riwayat Singkat

JTT berkedudukan di Bekasi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22 tanggal 2 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh

pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027638.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kemenkumham di bawah No. AHU-0078349.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017 ("**Akta Pendirian JTT**").

Anggaran dasar JTT yang dimuat dalam Akta Pendirian JTT tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049552.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0107973 tanggal 23 Agustus 2023, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0163281.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 ("**Akta No. 4/2023 I**").

Berdasarkan Akta No. 4/2023 I, para pemegang saham JTT telah menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 24 anggaran dasar JTT.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar JTT, maksud dan tujuan JTT ialah berusaha dalam bidang jasa atau industry jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pengambilalihan dan/atau penyertaan modal pada perusahaan jalan tol, melakukan investasi di bidang jalan tol, menjalankan aktivitas jalan tol, menjalankan kegiatan *holding*, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan JTT tersebut di atas, JTT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- b. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- d. Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan JTT.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, JTT telah melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang ("**Akta No. 4/2023 II**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir JTT adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Rudi Kurniadi
- Direktur Bisnis : Pratomo Bimawan Putra
- Direktur Keuangan : Siti Sarah

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Gandes Aisyaharum
- Komisaris : Reza Febriano

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JTT berdasarkan Akta No. 4/2023 II tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119777 tanggal 23 Mei 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094043.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Mei 2023.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 03 tanggal 1 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045228.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 Juli 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0259194 tanggal 1 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Juli 2022 (“**Akta No. 3/2022**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497507 tanggal 30 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0263527.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Desember 2022 (“**Akta No. 6/2022 II**”), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham JTT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	60.000.000.000	60.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	20.340.489.661	20.340.489.661.000	99,00
- Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera	205.459.492	205.459.492.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.545.949.153	20.545.949.153.000	100,00
Saham Dalam Portepel	39.454.050.847	39.454.050.847.000	

Perizinan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, JTT telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dengan No. 0220205700518 tanggal 1 Juli 2020 dan dicetak pada tanggal 9 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (“OSS”)	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	Untuk kegiatan usaha Aktivitas Jalan Tol (52213).
2.	Sertifikat Standar No. 02202016002980006 tanggal 14 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri	Sertifikat Standar JTT berlaku selama JTT menjalankan kegiatan usaha.	Sertifikat Standar tersebut diterbitkan untuk KBLI 52213 (Aktivitas Jalan Tol).

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting JTT di bawah ini bersumber dari laporan keuangan JTT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Laporan Posisi Keuangan		
Total Aset	60.972.607	26.040.960
Total Liabilitas	31.163.886	8.469.402
Total Ekuitas	29.808.721	17.571.558
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Pendapatan	4.951.541	3.542.000
Beban Pokok Pendapatan	(2.018.659)	(1.505.800)
Laba Bruto	2.932.882	2.036.200
Laba Usaha	6.880.680	1.917.753
Laba Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Laba	5.608.755	1.345.213

Pada tanggal 31 Desember 2023 total aset JTT adalah sebesar Rp60.972.607 juta atau terjadi peningkatan sebesar 134,14% atau setara dengan Rp34.931.647 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp26.040.960 juta. Peningkatan total aset JTT pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar pada aset tak berwujud - neto hak perusahaan jalan tol dengan dilakukannya pembelian kembali atas Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (MIET) di PT Lintas Marga Jawa (LMJ) pada tiga ruas jalan tol, yakni Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono sehingga berlaku penerapan Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 tentang Kombinasi Bisnis.

Pada tanggal 31 Desember 2023 total liabilitas JTT adalah sebesar Rp31.163.886 juta atau terjadi peningkatan sebesar 267,96% atau setara dengan Rp22.694.484 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.469.402 juta. Peningkatan total liabilitas JTT pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh terkonsolidasinya kembali tiga ruas jalan tol, yakni Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono pada neraca Perseroan sebagai pengaruh dari pembelian kembali RDPT MIET pada PT LMJ melalui PT JTT pada Juli 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 total ekuitas JTT adalah sebesar Rp29.808.721 juta atau terjadi peningkatan sebesar 69,64% atau setara dengan Rp12.237.163 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.571.558 juta. Peningkatan total ekuitas JTT pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan ekuitas neto atas kepentingan non-pengendali terhadap pembelian kembali RDPT MIET pada PT LMJ melalui PT JTT dan juga kinerja laba bersih di tahun 2023.

Pendapatan JTT pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.951.541 juta, di mana peningkatan sebesar 39,80% atau setara dengan Rp1.409.541 juta dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.542.000 juta. Peningkatan JTT ini terutama disebabkan oleh karena pertumbuhan yang didorong oleh kinerja volume lalu lintas yang meningkat seiring dengan pandemi yang dinyatakan telah usai oleh pemerintah yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat khususnya pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta keberhasilan penyesuaian tarif sesuai inflasi maupun terdapat ruas-ruas yang mendapatkan kenaikan tarif spesial akibat kompensasi atas tambahan investasi dengan rincian 3 ruas (JSN, JGP, JSB) yang telah implementasi kenaikan tarif di tahun 2023.

8.16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komitmen Perseroan dalam memenuhi tanggung jawab sosial kepada seluruh pemangku kepentingan tertuang dalam pernyataan setiap Misi Perseroan butir pertama hingga ke lima yang mana keberadaan Perseroan selalu diupayakan untuk dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Berikut adalah pelaksanaan kegiatan program tanggung jawab sosial Perseroan di tahun 2023 :

Foto

Keterangan



Sertifikasi Halal UMKM Mitra Binaan



Program Kampoeng UMKM Rest Area 379 A Semarang



Road Safety Ranger

Foto

Keterangan



Safety Riding For Young Generation



Penanaman Pohon di Area Jalan Tol & Rest Area



Sosialisasi Bahaya Pembakaran dan Bantuan Alat Pengolah Sisa Hasil Panen

Foto



Keterangan

Jasa Marga Medical Keliling (Jamedlink) yang merupakan bantuan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat di sekitar proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

8.17. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Kegiatan Usaha Utama

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- b. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya;
- c. Melakukan kegiatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan tol;
- d. Melakukan kegiatan di bidang jasa layanan pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol;
- e. Aktivitas jalan tol, mencakup pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol; dan
- f. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini.

B. Produk dan Jasa

Bisnis Konsesi Jalan Tol

Sampai dengan akhir tahun 2023, Perseroan memiliki hak konsesi untuk 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol sepanjang 1.736 km yang pengoperasiannya terbagi ke dalam 2 (dua) Regional dan melalui Perusahaan Anak dari *subholding* PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Sampai dengan akhir tahun 2023, dari total 1.736 km konsesi jalan tol yang dimiliki Perseroan, 1.264 km telah beroperasi.

Di bidang pengembangan bisnis jalan tol, Perseroan mengelola penambahan kepemilikan hak pengusaha jalan tol melalui Perusahaan Anak dalam bentuk BUJT. Proses untuk memperoleh hak pengusaha jalan tol tersebut melalui proses tender, akuisisi, dan pemrakarsa.

Berikut adalah tabel ruas jalan tol yang dimiliki Perseroan dalam periode 1978 hingga 2023:

No.	Konsesi	Panjang (km)	Tahun Mulai Operasi
1	Jakarta Bogor-Ciawi (Jagorawi)	59,00	1978
2	Jakarta-Tangerang	33,00	1984
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,30	1984
4	Cawang-Tomang-Pluit	23,55	1987
5	Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi)	64,40	1990
6	Cikampek-Padalarang (Cipularang)	58,50	2003
7	Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)	42,70	1986
8	Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi E1, E2, E3, W2S	31,18	1991
9	Ulujami-Pondok Aren	5,55	2001
10	JORR W2 Utara	7,87	2014
11	Bogor Outer Ring Road (BORR)	11,30	Beroperasi sebagian sejak tahun 2009
12	Cengkareng-Batuceper-Kunciran	14,19	2021
13	Kunciran-Serpong	11,14	2019
14	Semarang-Solo	72,95	2011
15	Surabaya-Mojokerto	36,27	2011
16	Gempol-Pasuruan	34,50	2017
17	Gempol-Pandaan	13,61	2015
18	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	10,07	2013
19	Medan- Kualanamu-Tebing Tinggi	61,11	2017
20	Solo-Ngawi	90,12	2018
21	Ngawi-Kertosono-Kediri	114,92	Beroperasi sebagian sejak tahun 2018
22	Cinere-Serpong	10,14	2021
23	Jakarta-Cikampek (Japek)	83,00	1988
24	Semarang A,B,C	24,75	1983
25	Surabaya-Gempol (Surgem)	48,85	1986
26	Palimanan-Kanci (Palikanci)	26,30	1998
27	Batang-Semarang	75,00	2018
28	Balikpapan-Samarinda	97,99	2019
29	Manado-Bitung	39,90	2020
30	Pandaan-Malang	38,49	2019
31	Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)	38,00	2019
32	Probolinggo-Banyuwangi	172,90	Pembebasan lahan dan konstruksi
33	Jakarta-Cikampek II Selatan	64,0	Pembebasan lahan dan konstruksi
34	Yogyakarta-Bawen	75,82	Pembebasan lahan dan konstruksi
35	Solo-Yogyakarta-NYIA Kuloprogo	96,57	Pembebasan lahan dan konstruksi
36	Akses Patimban	37,05	Pembebasan lahan

Bisnis Pengoperasian Jalan Tol

Perseroan memiliki produk berupa layanan pengoperasian jalan tol (layanan transaksi dan layanan lalu lintas) serta layanan preservasi. Layanan transaksi berhubungan dengan ketersediaan maupun kecepatan alat dan sistem di gerbang tol untuk memproses transaksi yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan tol. Layanan lalu lintas adalah serangkaian upaya kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas khususnya di jalan tol.

Layanan pengoperasian jalan tol disediakan oleh Perusahaan Anak, yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Selain layanan pengoperasian jalan tol, PT JMTO juga menyediakan layanan teknologi informasi dan layanan *Electronic Toll Collection* (ETC) sebagai pendukung operasional jalan tol.

Sementara PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM), Perusahaan Anak, menyediakan layanan jasa manajemen preservasi jalan tol dan konstruksi. Layanan preservasi dilakukan untuk menjaga kualitas jalan tol yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan preservasi jalan tol, peningkatan kapasitas jalan tol dan penyewaan alat berat dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Bisnis Prospektif

Salah satu lini bisnis Perseroan adalah bisnis prospektif dengan mengoptimalkan potensi usaha dan aset di sepanjang koridor Jalan tol ruas jalan milik grup Perseroan. Bisnis prospektif ini dikelola oleh Perusahaan Anak Perseroan yaitu PT Jasamarga Related Business (JMRRB) yang bergerak di bidang pengembangan kawasan, properti, Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dengan *branding* "Travoy", *Toll Corridor Development* (TCD), pemanfaatan koridor jalan tol baik secara konvensional maupun *digital, building management*, serta bisnis digital.

C. Proses Usaha

Sistem Kerja Perseroan mengintegrasikan beberapa Sistem Manajemen yang meliputi persyaratan Standar Internasional dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Proses-proses tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dan urgensinya yang dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. **Proses Inti**, yaitu proses yang dilaksanakan atas dasar dorongan permintaan pelanggan dan *stakeholders* lainnya berupa produk dan layanan. Cakupan dari proses ini adalah pengelolaan layanan transaksi, pengelolaan layanan lalu lintas, pengelolaan layanan konstruksi, pengembangan usaha jalan tol, dan pengembangan usaha lain.
2. **Proses Pendukung**, yaitu proses yang muncul atas dasar kebutuhan karena adanya proses inti atau proses perencanaan yang hasilnya secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses inti. Cakupan dari proses ini adalah pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan teknologi. Cakupan dari proses ini adalah informasi, pengelolaan administrasi perusahaan, pengelolaan logistik, dan manajemen bisnis.
3. **Proses Perencanaan**, yaitu proses yang dilaksanakan atas dasar rencana bisnis dan sasaran Perseroan. Cakupan dari proses ini adalah perencanaan perusahaan, perencanaan dan pengembangan teknik jalan tol, dan manajemen risiko.
4. **Proses Tinjauan dan Perbaikan**, yaitu proses yang dilaksanakan dengan melihat hasil dari berbagai elemen sistem kerja yang memerlukan adanya perbaikan/penyempurnaan. Cakupan dari proses ini adalah pengelolaan audit, pengukuran kinerja manajemen, pengelolaan *Integrated Management System*, dan pengelolaan inovasi.

Guna menunjang pencapaian sasaran Perseroan sesuai dengan Rencana Jangka Panjang tahun 2021- 2025 untuk membangun ketahanan Perseroan dengan menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan keuangan, Perseroan mengembangkan model bisnis yang terdiri dari tiga lini bisnis yakni:

1. Lini bisnis konsesi jalan tol;
2. Lini bisnis pendukung operasi jalan tol yang mencakup bisnis pengoperasian jalan tol serta bisnis perservasi jalan tol; dan
3. Lini bisnis prospektif yang mencakup membangun dan mengelola Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), mengelola sewa iklan dan utilitas di sepanjang koridor ruas jalan tol, mengembangkan *Toll Corridor Development* (TCD), mengelola gedung, dan penjualan properti.

Peran dalam Perseroan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *asset owner*, *asset manager* dan *service provider*. Peran sebagai *asset owner* berada pada *level* pusat atau korporat di mana ruang lingkup pekerjaannya mencakup pengembangan visi dan misi, fungsi strategis dan kepemimpinan. Selanjutnya, peran sebagai *asset manager* berada pada *level* Regional, *Representative Office*, dan Entitas Anak dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, peninjauan, dan evaluasi. Sementara peran *service provider* memiliki ruang lingkup sebagai pendukung bisnis jalan tol yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *asset operator* (lalu lintas dan transaksi), *asset maintainer* (preservasi), dan *asset optimizer* (pengembangan TCD).

D. Perkembangan Bisnis

Perkembangan industri jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 ketika tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Pembangunan jalan tol Jagorawi menggunakan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada Perseroan sebagai penyertaan modal. Pada waktu itu, Perseroan menjadi BUMN tunggal yang memegang hak penyelenggaraan jalan tol di Indonesia. Namun, sejak tahun 1987, pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi dalam mengusahakan jalan tol melalui sistem *Build, Operate, dan Transfer* (BOT) bersama Perseroan.

Sejak berlakunya UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol. Antara lain dibentuknya BPJT sebagai regulator industri jalan tol. Perubahan regulasi tersebut membuat peran otoritas yang diemban Perseroan dikembalikan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol.

Sejak berdiri hingga akhir tahun 2023, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan konsesi jalan tol di Indonesia. Total hak konsesi yang dimiliki Perseroan hingga 31 Desember 2023 mencapai 36 (tiga puluh enam) ruas jalan tol yang dioperasikan melalui Regional, Perusahaan Anak maupun Perusahaan Ventura Bersama Perseroan.

Guna mendukung efisiensi dalam bidang operasional dan guna meningkatkan pendapatan usaha lain Perseroan, Perseroan mengembangkan bisnis pendukung operasional jalan tol. Bisnis pendukung operasional jalan tol yang dimiliki Perseroan dijalankan melalui Perusahaan Anak, antara lain JMTO yang didirikan pada tahun 2015 (sebelumnya PT Jasa Layanan Operasi) dan bergerak dalam bidang usaha layanan pengoperasian jalan tol serta JMTM (sebelumnya PT Sarana Marga Bhakti Utama) yang diakuisisi sejak tahun 2010 dan bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan.

Hingga akhir 2023, JMTO mengoperasikan 1.264 km jalan tol atau 47% dari 2.647 km tol beroperasi di Indonesia. Kontrak jasa pengoperasian yang dikelola JMTO terdiri dari 11 (sebelas) ruas tol Jasa Marga Induk, 11 (sebelas) ruas tol Perusahaan Anak ataupun Ventura Bersama Jasa Marga, dan 4 (empat) ruas tol BUJT lain.

Untuk menjaga keberlanjutan bisnis sebagai pemimpin di bidang pengoperasian jalan tol di Indonesia, PT JMTO berfokus pada layanan pengoperasian jalan tol yang terpadu dan terintegrasi dengan menyediakan layanan operasi, peralatan tol serta sistem informasi dan komunikasi (sisinfokom) berbasis teknologi informasi, sehingga memberikan layanan pengoperasian jalan tol secara menyeluruh (*one stop solution*).

Dalam rangka menuju perusahaan yang berbasis digital, JMTO terus berinovasi mengembangkan produk-produk digital pada tahun 2023 ini, yang menjadi *competitive advantage* bagi Perseroan dalam segmen usaha Pengoperasian Jalan Tol, diantaranya adalah *Tollroad Assistance Mobile Application* dengan *brand* Travoy, *Intelligent Traffic Analysis*, serta Aplikasi Evaluasi Pelayanan Petugas, Trace (*Track and Care*).

Pada tahun 2023, PT JMTM mencatatkan perolehan kontrak manajemen preservasi untuk 20 (dua puluh) ruas Jalan tol sepanjang 1.110,90 km dan 15 (lima belas) proyek terkait jalan tol. Selain itu, JMTM mengimplementasi teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS) dengan penilaian kinerja keselamatan jalan menggunakan metode iRAP STAR *Rating* yaitu penilaian kinerja keselamatan jalan melalui *Star Rating* dengan *Hawkeye 2000*. Penggunaan *Hawkeye 2000*, kendaraan khusus berteknologi pintar (*smart*) untuk mendapatkan nilai kondisi jalan dengan lebih akurat, data geometrik, dan data aset jalan. *Hawkeye 2000* telah digunakan di seluruh ruas jalan tol milik Jasa Marga yang berada di Pulau Jawa. Beroperasi sejak tahun 2018, *Hawkeye 2000* tidak hanya digunakan untuk melakukan survei kondisi jalan pada ruas jalan tol Jasa Marga *Group* tetapi juga pada ruas jalan tol non Jasa Marga *Group*. Pada tahun 2023, *Hawkeye 2000* telah mengolah data kondisi jalan sepanjang 5.217,85 kilometer lajur jalan tol Jasa Marga *Group* dan 55,80 kilometer lajur jalan tol non Jasa Marga *Group*.

JMRB sedang mengembangkan Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) dengan *branding* "Travoy", kawasan industri, perkantoran, perumahan dan *Toll Corridor Development* (TCD), pemanfaatan koridor jalan tol baik secara konvensional maupun digital serta *building management*. JMRB juga terus melakukan inovasi dan menjalin kerjasama strategis dengan mitra untuk mengembangkan bisnis prospektif lainnya.

JMRB senantiasa mengembangkan bisnis usaha lain dan mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memaksimalkan peluang usaha yang dimiliki serta pelayanan terhadap pelanggan Perseroan. Guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna TIP dan melakukan langkah-langkah prediktif dengan memasang *Smart CCTV* di TIP jalan tol untuk *monitoring* kondisi TIP, menyediakan *Travoy Nitro* di *Rest Area* untuk pengisian nitrogen kendaraan.

JMRB turut berkomitmen dalam mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan, salah satunya dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pemasangan panel surya di TIP yang bekerja sama dengan salah satu mitra potensial. Selain itu, PT JMRB melakukan pemasangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di TIP untuk pengisian tenaga kendaraan listrik dalam rangka mendukung pemerintah dalam meningkatkan penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

E. Pemasaran

Bidang Pengembangan Jalan Tol

Perseroan senantiasa berupaya untuk menjadi pemimpin bisnis jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah berfokus pada pembangunan proyek jalan tol yang terkoneksi langsung dengan jalan tol yang sudah ada dan seluruhnya berlokasi di pulau Jawa. Adapun pembangunan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kapabilitas finansial Perseroan. Perseroan juga memperluas jaringan jalan tol yang dimiliki dengan menambah kepemilikan konsesi ruas jalan tol baru yang memiliki tingkat pengembalian investasi yang layak secara komersial. Beberapa cara yang dilakukan oleh Perseroan untuk menambah kepemilikan konsesi ruas jalan tol baru, yaitu melalui:

- Tender (lelang) yang diinisiasi oleh Pemerintah melalui BPJT
- Akuisisi kepemilikan saham dari pihak lain
- Mengajukan Proyek Pemrakarsa kepada Pemerintah

Bidang Pengoperasian Jalan Tol

Dalam bidang pengoperasian jalan tol, Perseroan melalui JMTO senantiasa mewujudkan komitmennya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR nomor 16/PRT-M/2014 tahun 2014. JMTO terus membangun keunggulan bersaing melalui penerapan teknologi di bidang operasi, antara lain: (i) Melakukan pengembangan bisnis *GetPark* sebagai sistem parkir yang memiliki keunggulan transaksi parkir nirsentuh berbasis RFID sehingga tidak perlu melakukan *tapping* kartu pada saat berada di *gate in dan gate out*; (ii) Pengembangan aplikasi *Let it flo* yaitu sistem transaksi tol berbasis RFID yang terkoneksi dengan *smartphone* pengguna jalan untuk mendukung kelancaran dan percepatan layanan transaksi jalan tol; (iii) Mengimplementasikan *Intelligent Transport System* (ITS) yang terintegrasi dengan *dashboard Jasamarga Integrated Digitalmap* (JID) untuk menjamin keakuratan dan percepatan penyampaian informasi dan komunikasi lalu lintas kepada pengguna jalan tol maupun para pemangku kepentingan lainnya; (iv) Pengembangan bisnis *Getoll* untuk *Payment Gateway* (PG) yang merupakan inovasi bisnis baru yang menyediakan, memproses, dan mengelola ekosistem pembayaran digital antara PT JMTO, *Source of Fund*, dan *Merchant* khususnya terkait dengan transaksi melalui pembayaran digital berbasis *server*, dan (v) Pengembangan bisnis *Getpay* sebagai *Point of Sales*.

Bidang Preservasi Jalan Tol

Dalam bidang preservasi jalan tol, melalui anak usahanya yaitu JMTM. Dalam rangka penerapan teknologi di bidang preservasi, JMTM telah menerapkan beberapa inovasi antara lain yaitu implementasi teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS) dengan penilaian kinerja keselamatan jalan menggunakan metode iRAP STAR *Rating* dan pengembangan Aplikasi *Smart* Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu sistem yang mengintegrasikan PJU jalan tol dengan perangkat *Internet of Things* (IoT) dan jaringan komunikasi sehingga mempermudah proses *monitoring* kondisi dan perbaikan PJU.

Bidang Pengembangan Usaha Prospektif

Pengembangan bisnis prospektif yang dijalankan oleh Perseroan saat ini terkait bidang pengembangan properti/*Toll Corridor Development* (TCD), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), iklan dan utilitas, *building management*, serta bisnis komersial secara keseluruhan dikelola oleh PT Jasamarga Related Business (JMRB).

F. Persaingan Usaha

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, adanya salah satu target pembangunan infrastruktur utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang konektivitas yaitu terwujudnya 2.500 km pembangunan jalan tol. Kementerian PUPR bersama BUJT terus melanjutkan penyelesaian pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Hingga tahun 2023, Perseroan masih menjadi pemimpin di industri jalan tol di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pangsa pasar Perseroan sebesar 47% dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri jalan tol dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu masing-masing sebesar 9%, 3% dan 1% untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), dan PT Nusantara Infrastructure Tbk (META).

G. Prospek Usaha

Saat ini, Indonesia sudah mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar daerah. Peran jalan tol sangat signifikan bagi perkembangan suatu daerah. Instruksi Presiden terkait pentingnya untuk meningkatkan kecepatan transportasi masyarakat hingga mobilitas barang. Berbekal kecepatan ini, distribusi barang dan logistik pun menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya logistik. Tingginya ongkos logistik yang berdampak pada masalah harga barang/ jasa dan disparitas harga antar daerah pun bisa teratasi.

Industri infrastruktur, termasuk jalan tol menjadi magnet bagi investor swasta untuk mendukung percepatan tercapainya target sepanjang lebih dari 5.000 km pada akhir 2024. Pemerataan Pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia termasuk pembangunan IKN Nusantara menjadi Proyek Strategis Nasional meningkatkan prospek usaha bagi investor yang berfokus pada industri infrastruktur untuk membangun jalan tol tidak hanya terpusat pada pulau Jawa, seiring dengan pertumbuhan tersebut Perseroan dengan seluruh Perusahaan Anaknya optimis untuk terus berkembang untuk meningkatkan kinerja dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia.

Perseroan menguasai 47% pangsa pasar dari total jalan tol beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, Perseroan memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km dan 1.264 km di antaranya telah beroperasi. Perseroan meyakini bahwa posisi Perseroan sebagai perusahaan jalan tol terbesar di Indonesia akan terus konsisten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat individu dan perusahaan barang dan jasa yang bermobilitas tinggi untuk terus menyediakan layanan jalan tol yang aman dan nyaman.

Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan adanya penambahan konsesi jalan tol baru yaitu ruas jalan tol Akses Patimban sepanjang 37,05 km. Namun, Perseroan juga mencatatkan pengurangan panjang konsesi jalan tol Perseroan dimana pada Februari 2023 dilakukan pengembalian konsesi ruas jalan tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap sepanjang 206,65 km kepada Pemerintah, sehingga sampai dengan tahun 2023, Perseroan memiliki konsesi jalan tol sepanjang 1.736 km.

Di samping panjang jalan tol yang terus bertambah, ada beberapa faktor lain yang membuat prospek industri jalan tol yang dikembangkan Perseroan semakin menarik. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Volume lalu lintas pada ruas tol yang dikelola Perseroan diperkirakan akan tetap tumbuh secara positif, sehingga memberikan jaminan pertumbuhan pendapatan berkesinambungan.
2. Masa konsesi yang masih panjang dengan mayoritas akan berakhir pada tahun 2044.
3. Jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang sudah ada, sehingga akhir konsesi terdekat.
4. Adanya potensi penambahan konsesi penguasaan jalan tol melalui rencana untuk mengambil alih ruas-ruas jalan tol investor lain yang terhenti proses investasinya (akuisisi).
5. Posisi Perseroan sebagai pemimpin dalam industri jalan tol Indonesia.
6. Perkembangan penduduk yang pesat.
7. Perkembangan industri properti.
8. Pertumbuhan penjualan kendaraan roda empat yang merupakan pasar terbesar dari pengguna jalan tol.

H. Strategi Usaha

Perseroan senantiasa meningkatkan daya saingnya untuk terus meningkatkan kinerja operasional dan keuangan sehingga dapat mencapai Visi dan Misi Perseroan. Perseroan telah menetapkan 4 (empat) tema strategis yang telah dicanangkan dan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021-2025, yakni:

1. Peningkatan efisiensi bisnis dan operasional;
2. Memilih proyek dan investasi secara selektif;
3. Memfokuskan ulang portofolio bisnis terkait;
4. Mengoptimalkan aset eksisting (*asset recycling*).

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya mengikuti 4 (empat) kebijakan sebagai berikut:

Operasional

- a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Meningkatkan kapasitas jalan tol sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan/atau memiliki *V/C ratio* mendekati 0,8 kecuali terdapat keterbatasan lahan;
- c. Modernisasi sistem dan teknologi operasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengendalian transaksi berbasis *cashless transaction*, kualitas layanan lalu lintas dan informasi;
- d. Menggunakan *green technology* atau energi terbarukan dan *green construction*;
- e. Melaksanakan rekonstruksi secara bertahap (*staging*);
- f. Melakukan pengendalian kendaraan kelebihan muatan (*overload*) dengan teknologi *Weigh in Motion* (WIM);
- g. Mengimplementasikan rekayasa teknik bidang jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan serta sarana teknologi pendukung yang dapat mengoptimalisasi pengembangan bisnis jalan tol dan berdampak pada efisiensi biaya;
- h. JMTO mengoperasikan ruas jalan tol yang dimiliki anak perusahaan lini bisnis konsesi jalan tol dengan margin minimum dan aktif mencari peluang usaha secara eksternal dengan *margin optimum*;
- i. JMTM melakukan preservasi ruas jalan tol yang dimiliki oleh anak perusahaan lini bisnis konsesi jalan tol;
- j. Mendukung program ETLK Kepolisian melalui Perjanjian Kerja Sama untuk integrasi dengan *speed camera* dan WIM.

Pengembangan Usaha

- a. Kebijakan utama
 - i. Kebijakan ini diterapkan pada lini bisnis konsesi jalan tol dan lini bisnis lainnya yang relevan. Menambah jalan tol baru dengan kriteria kelayakan proyek (*IRR project*) lebih besar dari *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) dan *IRR Equity* lebih besar dari *Cost of Equity*.
 - ii. Menambah jalan tol baru dengan mengutamakan ruas jalan tol potensial yang memiliki koneksi dengan jalan tol yang telah ada;
 - iii. Menambah jalan tol baru diarahkan untuk menguasai ruas-ruas utama pada kota besar dengan pertumbuhan ekonomi tinggi;
 - iv. Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas kecuali terdapat pertimbangan strategis jangka panjang Perseroan;
 - v. Melakukan studi kelayakan ruas jalan tol potensial dan bisnis lainnya yang berpotensi dalam rangka mengembangkan pasar.
- b. Kebijakan Khusus

Kebijakan ini diterapkan pada lini bisnis prospektif yaitu PT Jasamarga Related Business (JMRB). JMRB melakukan pengembangan properti/*Toll Corridor Development* (TCD) untuk mengembangkan kawasan dalam rangka mendukung bisnis jalan tol Perseroan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - i. Pengembangan properti dapat dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain yang berpengalaman dalam pengembangan properti, khususnya melalui sinergi BUMN dan/atau anak perusahaannya;
 - ii. Proporsi pendanaan masing-masing proyek diupayakan dengan modal 40% dan pinjaman 60%;

- iii. Dalam jangka menengah dan panjang, JMRB diharapkan dapat melakukan pengembangan *Toll Corridor Development* (TCD) yang bersinergi dengan pengembangan jalan tol.

Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kapabilitas

- a. Memperbaiki proses bisnis, menata organisasi, dan sistem manajemen *human capital* berbasis *Information and Communications Technology* (ICT) mengacu kepada *best practice* perusahaan kelas dunia;
- b. Melakukan rekrutmen atas kebutuhan kader pemimpin, mengacu pada *manpower planning* yang selalu *update* dilakukan dengan sumber eksternal dan internal serta *professional hire* sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis Perseroan;
- c. Mengembangkan *human capital development plan* yang terintegrasi untuk penyiapan kader pemimpin Perseroan masa depan dengan *personal quality global*;
- d. Memperbaiki proses bisnis, menata organisasi dan melakukan rekrutmen karyawan dengan memperhatikan rasio jumlah karyawan yang wajar dan dampak finansial jangka panjang;
- e. Mengembangkan *human capital* diarahkan untuk membentuk kader pemimpin yang berkarakter dan bertalenta;
- f. Mengembangkan inisiatif tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi kunci yang diperlukan dalam rangka pengembangan Perseroan ke depannya.

Kuangan

- a. Pengembangan bisnis dilakukan dengan memperhatikan stabilitas finansial jangka panjang dengan menjaga batas *covenant* yang dipersyaratkan, menjaga peringkat hutang Perseroan serta menjaga rasio-rasio keuangan lainnya;
- b. Investasi peningkatan kapasitas operasional dan kualitas layanan operasional dilakukan dengan menggunakan dana internal Perseroan;
- c. Investasi pengembangan bisnis, peningkatan kapasitas operasional dan peningkatan kualitas layanan operasional memperhatikan rasio finansial.

I. Riset dan Pengembangan

Seiring berjalannya transformasi Perseroan, salah satu inisiasi menuju perubahan adalah dengan melakukan inovasi teknologi antara lain Teknologi *Intelligent Transport System* (ITS) dan Teknologi *Intelligent Maintenance System* (IMS).

Teknologi *Intelligent Transport System* (ITS)

Penerapan teknologi ITS dilakukan secara bertahap dan komprehensif untuk mendukung penciptaan daya saing Perseroan di bidang pelayanan lalu lintas jalan tol. Adapun beberapa lingkup dari ITS yang diimplementasikan oleh Perseroan, antara lain:

1. Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC)

JMTC merupakan pusat kendali lalu lintas jalan tol pertama dan terlengkap di Indonesia, berguna sebagai *monitoring* dan input pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR khususnya pada saat momen kepadatan terjadi akibat libur panjang.

2. Traffic Counting berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Penghitungan volume lalu lintas menggunakan teknologi radar dan *analytics* CCTV yang dilakukan secara *real time* serta terintegrasi dalam *dashboard* aplikasi bernama *Jasamarga Integrated Digitalmap* (JID).

3. Travel with Comfort and Joy (Travoy)

Teknologi berbasis aplikasi yang diperuntukan bagi pengguna jalan tol untuk memudahkan akses dalam mengetahui informasi seputar jalan tol dan rest area. Pemutakhiran aplikasi Travoy 4.2.1 terkini dengan penambahan fitur seperti *push notification*, informasi event lalu lintas, get pay, resi digital, info tarif berdasarkan rute alternatif, dan "Chat Us" dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

4. **Motorway Incident Detection Automatic Signaling (MIDAS)**

Implementasi MIDAS telah dilakukan pada ruas Jasa Marga Group bertujuan untuk deteksi dini adanya insiden atau kecelakaan di jalan tol dan percepatan penanganan ke lokasi. MIDAS dikembangkan menggunakan *Google Traffic API* dan *Smart CCTV*.

Teknologi Intelligent Maintenance System (IMS)

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran layanan preservasi yang Mantap Optimal dan Berwawasan Lingkungan maka Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi yang disebut dengan *Integrated Tollroad Maintenance System*. Adapun beberapa lingkup produk dari ITMS yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Perseroan antara lain:

1. *Jasamarga Integrated Maintenance Management System (JIMMS)* merupakan Aplikasi *Database Digital* Layanan Pemeliharaan yang memuat seluruh data-data terkait pemeliharaan secara terintegrasi untuk tercapainya penyampaian informasi laporan layanan *Real-Time*. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai tahap *Descriptive Data*, Diagnostik Data, hingga ke tahap *Predictive Data*, *Prescriptive Data*.
2. *Hawkeye 2000 Road Inspection Car* dan *IRAP Star Rating : Road Inspection Hawkeye 2000* dioperasikan menggunakan sistem yang mengintegrasikan beberapa peralatan sensor yang spesifik untuk mendapatkan data karakteristik kondisi jalan dan telah dilengkapi dengan *Automatic Crack Detection* sehingga alat ini mampu mendeteksi retak dan lubang secara otomatis. Teknologi ini dapat membantu untuk melakukan inventarisasi data aset jalan tol dan penilaian kondisi jalan tol secara akurat, efektif dan efisien. Data yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk menyusun program preservasi jalan tol sehingga dapat diperoleh biaya preservasi yang optimal.
3. *Bridge Inspection MOOG* dioperasikan sebagai *platform/alat* bantu untuk melakukan pengecekan/inspeksi kondisi jembatan baik bentang pendek maupun bentang panjang pada ketinggian yang sulit terjangkau dari bawah jembatan. *Platform* ini secara detail dapat membantu pemeriksaan kondisi fisik elemen jembatan, seperti pemeriksaan *bearing pad*, retak dan cacat pada girder, pier jembatan serta mendukung preservasi jembatan seperti pembersihan sekitar *pierhead*, *coating*, pengencangan baut, pembersihan tanaman, serta pemantauan kesehatan jembatan secara menyeluruh. Hasil dari inspeksi kondisi jembatan kemudian dapat digunakan untuk menyusun program preservasi jembatan dengan biaya preservasi yang optimal. Saat ini *Bridge Inspection* telah digunakan untuk melakukan pemeriksaan 5 Jembatan milik Jasa Marga yaitu Jembatan Layang Jalan Tol MBZ, Jembatan Cipada, Jembatan Cikubang, Jembatan Cipatat dan ruas non Jasa Marga yaitu Jembatan Akses Tol Tanjung Priok.
4. *Early Warning System Genangan (EWS) - Water Level Monitoring* adalah suatu sistem pemberitahuan dini untuk melakukan pemantauan ketinggian permukaan air pada titik yang dianggap rawan terjadi genangan agar dapat dilakukan tindak lanjut petugas dengan segera. Sistem ini terintegrasi dengan sistem JID maupun JIMMS.
5. *Roadsweeper* adalah alat sapu mekanis yang berfungsi sebagai alat pendukung pekerjaan pembersih lajur yang memiliki waktu penyelesaian lebih cepat dibandingkan pekerja manual serta relatif lebih aman.
6. Smart PJU sistem yang mengintegrasikan PJU jalan tol dengan perangkat *Internet of Things (IoT)* berupa beberapa sensor dan jaringan komunikasi; yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi *web-based* sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring kondisi PJU dan Perbaikan. Beberapa fitur pada Aplikasi Smart PJU, antara lain yaitu: (1) penyalaan dan pemadaman lampu PJU langsung dari aplikasi; (2) pengaturan jadwal penyalaan dan pemadaman lampu PJU; (3) pengaturan peredupan (*dimming*) lampu PJU untuk menghemat listrik; (4) pengecekan status lampu PJU, yaitu lokasi, kondisi nyala atau padam, pengeluaran daya listrik, kerusakan, dll. Proses pengembangan Aplikasi Smart PJU sudah dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023 pada Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo dengan jumlah lampu sebanyak 15 buah. Sampai dengan tahun 2023, Aplikasi Smart PJU sudah masuk tahapan pengadaan secara komersial pada Ruas Jalan Tol Cipularang, Padaleunyi dan Jagorawi.

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pengembangan adalah sebesar Rp72.183.591.612,- untuk tahun 2023 dan Rp63.521.560.619,- untuk tahun 2022, masing masing sebesar 0,5% dan 0,4% dari pendapatan usaha di luar konstruksi.

J. Sifat Musiman

Saat libur panjang dan libur hari raya keagamaan, lalu lintas transaksi yang melewati jalan tol cenderung meningkat drastis karena tradisi dari masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke kampung halaman saat periode libur tersebut. Untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas selama periode lebaran 2023, Perseroan memberlakukan *one way* mulai dari km 72 jalan tol Cikampek – Palimanan sampai dengan km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang – Semarang sepanjang 412 km. Selain itu, pemberlakuan *contraflow* mulai dari km 36 sampai dengan km 70 Jalan Tol Jakarta – Cikampek. Perseroan mencatatkan rekor layani arus lalu lintas tertinggi di sepanjang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 H pada H-3 sebanyak 163.829 kendaraan dan peningkatan pendapatan tol sebesar 21,7% selama periode arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Pada saat terjadi kepadatan lalu lintas, terutama di musim libur dan hari raya keagamaan, Perseroan dengan sigap melakukan mekanisme jemput transaksi menggunakan *Mobile Reader* yang merupakan perangkat teknologi transaksi yang fleksibel/dapat dipindahkan. Petugas layanan transaksi di Gerbang Tol akan menjemput transaksi pengguna jalan dan membantu tapping/menempelkan *e-Toll Card* pada *Mobile Reader*, sehingga waktu transaksi lebih singkat.

K. Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai Penjaminan			Total	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	62.015	126.010	255.005	443.030	47,52
2.	PT Mandiri Sekuritas	18.105	64.015	191.100	273.220	29,30
3.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	10.035	51.030	155.035	216.100	23,18
TOTAL		90.155	241.055	601.140	932.350	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
Jl. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

Nama rekan : Putu Suryastuti, S.H., M.H.
STTD : No. STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201423
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukkan : No. 17/PL-TIM/OBL-JM/2024 tanggal 21 Februari 2024

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Global)

Plaza Asia, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12910

Nama Rekan : Dedy Sukrisnadi
STTD : No. STTD.AP-233/PM.22/2018 tanggal 6 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan : No. 20/PL-TIM/OBL-JM/2024 tanggal 21 Februari 2024

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH

Jl. Panglima Polim V No. 11
Jakarta Selatan 12160

- STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 205.5.041.221146
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“**UU Notaris**”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Surat Penunjukkan : No 19/SPBJ/2024 tanggal 26 Maret 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12 – 14 A
Jakarta Selatan 12790

- STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwalianamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.
- Surat Penunjukkan : No. 18/PL-TIM/OBL-JM/2024 tanggal 21 Februari 2024

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower Lantai 30, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

- Izin Kegiatan Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mega Tbk ("**Bank Mega**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Bank Mega.

Bank Mega sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank Mega.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 0857/CAMS-WA/24 tanggal 26 Maret 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
 - (ii) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan.
- Surat Pernyataan No. 0856/CAMS-WA/24 tanggal 26 Maret 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat Pernyataan No. 0868/CAMS-WA/24 tanggal 27 Maret 2024, Bank Mega selaku Wali Amanat menyatakan telah melakukan *Due Dilligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan BNRI No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar Bank Mega telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 01 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Susunan pemegang saham Bank Mega per 29 Februari 2024 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada Bank Mega berdasarkan Surat No.DE/III/2024-0849 tanggal 2 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Saham dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 1 tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris Independen	: Achjadi Ranuwisastra

Komisaris Independen : Lambock Victor Nahattands, SH
Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : Yuni Lastianto
Direktur : C. Guntur Triyudianto
Direktur : Y. B Hariantono

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, di antaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega *Transactional Banking*, Mega *Internet Banking*, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (*Mega Pass, Mega First*), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2023, Bank Mega telah memiliki 8 Kantor Wilayah, 3 Kantor Fungsional, 55 Kantor Cabang dan 312 Kantor Cabang Pembantu.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (*Mega Smart Mobile*) yang memberikan *customer experience* selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamentan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut :

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamentan.
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - i. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - iii. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - iv. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - vi. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - vii. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - viii. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - ix. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - x. Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - xi. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamentan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian/cidera janji sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamentan.
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - i. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - ii. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - iii. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamentan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - iv. setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. PENGALAMAN BANK MEGA SELAKU WALI AMANAT DI PASAR MODAL

Berikut adalah pengalaman Bank Mega selaku Wali Amanat di Pasar Modal selama 2 (dua) tahun terakhir:

- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022

- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Th. 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal laporan keuangan Bank Mega pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1298) yang menyatakan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait tertanggal 26 Januari 2024.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Total Aset	132.050	141.750
Total Liabilitas	110.294	121.117
Total Ekuitas	21.756	20.634

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan Bunga – neto	5.532.145	5.869.126
Total Pendapatan Operasional Lainnya	2.288.030	2.497.278
Total Beban Operasional Lainnya	(3.487.697)	(3.364.842)
Pendapatan Operasional - neto	4.332.478	5.001.562
Laba Sebelum Beban Pajak	4.342.729	5.028.070
Laba Bersih	3.510.670	4.052.678
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.958.581	4.289.216

9. INFORMASI LAINNYA

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk.
 Menara Bank Mega, Lt. 16
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
 Email: waliamanat@bankmega.com
 Situs web: www.bankmega.com
 Up.: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 5 Juli 2024;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 Juli 2024.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2024 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank BRI Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 A.n. PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 A.n. PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.00900.949 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, kebakaran, pemogokan, huru-hara atau adanya Tindakan terorisme di Indonesia atau keadaan darurat bencana nasional yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
- iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- iv. Dalam hal masa Penawaran Umum ditunda atau Penawaran Umum yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam 11 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Situs web: www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Tower I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Email : divisi-IB@mandirisek.co.id
Situs web: www.mandirisekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9168
Email : fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1432/03/17/06/2024

Jakarta, 21 Juni 2024

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”)

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550, Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Putu Suryastuti, S.H., M.H., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201423 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0402/02/23/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan (“**Laporan Uji Tuntas**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp 932.350.000.000 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian: (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 90.155.000.000 (sembilan puluh miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar sebesar Rp 241.055.000.000 (dua ratus empat puluh satu miliar lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 601.140.000.000 (enam ratus satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebesar Rp 4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan III**”).

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja berupa pemeliharaan jalan tol dan pengoperasian jalan tol, dengan rincian sebesar 70% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengoperasian jalan tol dan sisanya sebesar 30% akan digunakan untuk pemeliharaan jalan tol.

Rencana modal kerja untuk pengoperasian jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan transaksi jalan tol, pelayanan lalu lintas jalan tol, dan pemeliharaan rutin fasilitas sarana transaksi, gedung kantor Gerbang Tol (GT) maupun bangunan pelengkap jalan tol sedangkan untuk pemeliharaan jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada *overlay* jalan tol, pemeliharaan rutin jalan tol, pemeliharaan sarana pelengkap jalan tol (*guardrail*, *concrete barrier*, pagar *ROW (Right of Way)*) dan marka), penelitian jembatan, dan perkerasan.

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 2

Ruas jalan tol yang menjadi tujuan dalam penggunaan modal kerja tersebut adalah ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan dan berada di wilayah Regional Metropolitan yang mencakup area Jabodetabek dan Bandung.

Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dilakukan berdasarkan perjanjian jasa pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol antara Perseroan dengan Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (“**JMTO**”) dan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (“**JMTM**”), yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan JMTO telah menandatangani beberapa perjanjian jasa pengoperasian jalan tol, yakni sebagai berikut: (i) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol JORR Seksi E1, E2, dan E3 No. 33/KONTRAK-DIR/2020 tanggal 5 Maret 2020 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (ii) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Jakarta – Bogor – Ciawi No. 98/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (iii) Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol JORR W2S dan Ulujami – Pondok Aren No. 99/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (iv) Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cawang – Tomang Pluit, Prof. DR. Ir. Soedijatmo, Jakarta – Tangerang No. 100/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan (v) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cipularang - Padaleunyi No. 101/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan JMTM juga telah menandatangani perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol sebagai berikut: (i) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi PT Jasamarga (Persero) Tbk No. 02/Kontrak-/Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (ii) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S dan Ulujami-Pondok Aren PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 05/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (iii) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Tangerang-Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 03/Kontrak-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), dan (iv) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Cipularang-Padaleunyi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 04/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dimaksud maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan yang lain diantaranya mengoptimalkan *stand by loan* yang dimiliki Perseroan dengan perbankan maupun melakukan aksi korporasi lainnya seperti divestasi saham di *subholding* Perseroan maupun Perusahaan Anak Perseroan.

Perjanjian jasa pengoperasian jalan tol antara Perseroan dan JMTO dan perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol antara Perseroan dan JMTM merupakan suatu transaksi afiliasi yang juga merupakan kegiatan usaha Perseroan, JMTO dan JMTM yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), yang hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

Selain itu, perjanjian jasa pengoperasian jalan tol dan perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol merupakan kegiatan usaha Perseroan, JMTO dan JMTM yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
HALAMAN: 3

17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), sehingga Perseroan hanya wajib mengungkapkan perjanjian pengoperasian jalan tol dan perjanjian pemeliharaan jalan tol tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan yang nilainya termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh (i) PT BRI Danareksa Sekuritas (“**BRIDS**”), (ii) PT Mandiri Sekuritas (“**Mandiri Sekuritas**”), dan (iii) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“**Trimegah Sekuritas**”), selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 72 tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 02 tanggal 2 Mei 2024, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 62 tanggal 27 Mei 2024, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 49 tanggal 20 Juni 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**”). Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk (“**Bank Mega**”) selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 71 tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 01 tanggal 2 Mei 2024, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 61 tanggal 27 Mei 2024, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 47 tanggal 20 Juni 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Perwaliamanatan**”). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BRIDS dan Mandiri Sekuritas, masing-masing selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dimana Perseroan, BRIDS, dan Mandiri Sekuritas merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan (i) Trimegah Sekuritas, (ii) Bank Mega selaku Wali Amanat, dan (iii) perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahun 2024 No. 70 tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahun 2024 No. 60 tanggal 27 Mei 2024 dan (ii) Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahun 2024 No. 46 tanggal 20 Juni 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 4

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 73 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-026/OBL/KSEI/0324 pada tanggal 27 Maret 2024 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”); dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 No. 48 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (“BEI”) atas permohonan pencatatan Obligasi Berkelanjutan berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04582/BEI.PP2/05-2024 tanggal 14 Mei 2024.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-348/PEF-DIR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Periode 25 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, PUB Obligasi Berkelanjutan III memiliki peringkat idAA (*double A*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

Direksi Perseroan telah mencantumkan rencana pemenuhan kebutuhan pendanaan dengan penerbitan surat hutang, antara lain skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan plafond sebesar Rp 4.000.000.000.000 yang akan diterbitkan secara bertahap di tahun 2024 – 2025 sesuai kebutuhan pendanaan dan kondisi suku bunga pasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tahun 2024 (“**RKAP 2024**”). Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 015/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan RKAP 2024 tersebut.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 21 Juni 2024.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap “**Perusahaan Anak**” berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50,00% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 5

perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan anak tersebut aktif beroperasi. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak adalah sebagai berikut: (i) PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (dalam likuidasi) ("JLJ"); (ii) PT Marga Sarana Jabar ("MSJ"), (iii) PT Marga Trans Nusantara ("MTN"), (iv) PT Jasamarga Kunciran Cengkareng ("JMKC"), (v) JMTM, (vi) PT Jasamarga Bali Tol ("JBT"), (vii) PT Jasamarga Related Business ("JMRB"), (viii) PT Jasamarga Kualanamu Tol ("JMKT"), (ix) PT Cinere Serpong Jaya ("CSJ"), (x) JMTO, (xi) PT Jasamarga Manado Bitung ("JMB"), (xii) PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("JBS"), (xiii) PT Jasamarga Transjawa Tol ("JTT"), (xiv) PT Jasamarga Japek Selatan ("JJS"), (xv) PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("JPB"), (xvi) PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB"), (xvii) PT Jasamarga Akses Patimban ("JAP"), (xviii) PT Asiana Jakarta Properti ("AJP"), (xix) PT Jasamarga Restarea Batang ("JRB"), (xx) PT Jasamarga Surabaya Mojokerto ("JSM"), (xxi) PT Jasamarga Gempol Pasuruan ("JGP"), (xxii) PT Jasamarga Solo Ngawi ("JSN"), (xxiii) PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri ("JNK"), (xxiv) PT Jasamarga Semarang Batang ("JSB"), dan (xxv) PT Lintas Marga Jawa ("LMJ").

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1247/03/17/05/2024 tanggal 31 Mei 2024.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan serta berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang didirikan dengan nama 'PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)' berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 1 Maret 1978, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 187 tanggal 19 Mei 1981, yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana saat ini telah diubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982, dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 766 dan No. 767 tanggal 2 Maret 1982, yang keduanya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1982, Tambahan No. 1138/1982 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Marga Tbk No. 40 tanggal 19 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429854 tanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0125817.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 ("**Akta No. 40/2021**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 6

Berdasarkan Akta No. 40/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (5), Pasal 4 ayat (6), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dari anggaran dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 40/2021.

Anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan POJK No. 33/2014 pada saat diangkat.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Maret 2024, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 33/2014 dan telah memenuhi ketentuan untuk tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014.

2. Kegiatan usaha Perseroan belum disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 20 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**").

KBLI 2020 tidak menguraikan lebih lanjut apa yang termasuk 'kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol' dan uraian umum dari KBLI No. 52213 tidak sesuai dengan kegiatan usaha bagi badan usaha di bidang jalan tol ("**BUJT**") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, "**UU No. 38/2004**") dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, "**PP No. 15/2005**"). Lebih lanjut, mengingat Perseroan merupakan suatu BUJT, maka Perseroan tunduk pada UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005, termasuk sehubungan dengan ketentuan terkait ruang lingkup kegiatan usahanya. Dengan demikian, perumusan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

3. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Dengan demikian, struktur

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 7

permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 12 September 2007, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. W7-10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.0110-13313 tanggal 24 September 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur No. 269/RUB/09.04/X/07 tanggal 4 Oktober 2007, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 30 Oktober 2007, Tambahan No. 10676/2007 *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 20 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110503 tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153029.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 Desember 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29, Tambahan Berita Negara Publik Indonesia No. 968/L Tahun 2017 *juncto* (iii) Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 500 PER SAHAM		
		JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
Saham Seri A Dwiwarna				
1.	Negara Republik Indonesia	1	500	-
Saham Seri B				
2.	Negara Republik Indonesia	5.080.509.839	2.540.254.919.500	70,00
3.	Manajemen			
	Subakti Syukur	477.700	238.850.000	0,00
	Fitri Wiyanti	316.600	158.300.000	0,00
	Reza Fabriano	289.600	144.800.000	0,00
	Bagus Cahya Arinta B.	289.200	144.600.000	0,00
	Mohamad Agus	282.000	141.000.000	0,00
	M. Roskanedi	139.300	69.650.000	0,00
	Raja Erizman	139.400	69.700.000	0,00
	Pramitha Wulanjani	50.000	25.000.000	0,00
4.	Masyarakat	2.175.377.560	1.087.688.780.000	29,97
Total		7.257.871.200	3.628.935.600.000	100,00
Saham dalam Portepel		11.782.128.800	5.891.064.400.000	-

Pengendali Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 8

Sesuai dengan Informasi Penyampaian Data berdasarkan pelaporan pemilik manfaat yang disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 2 Mei 2024 dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 April 2024 tentang Pernyataan Kepemilikan Manfaat, pemilik manfaat Perseroan adalah Subakti Syukur, yang merupakan Direktur Utama sebagai orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penetapan Subakti Syukur sebagai pemilik manfaat Perseroan ini telah dilakukan dengan memperhatikan Notulen Rapat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tanggal 10 Maret 2020.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Maret 2024, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Nixon Sitorus sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 087/AA.P-6a/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Chandra Wijaya (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Seppalga Ahmad (Komisaris Independen)
2. Mohammad Fahmi Arkanuddin
3. Siti Purnama Rizki

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-029/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dari Unsur Dewan Komisaris ("**SK No. 029/2023**"), masa jabatan Chandra Wijaya sebagai Ketua Komite Audit dan Seppalga Ahmad sebagai anggota Komite Audit adalah selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai efektifnya SK No. 029/2023, sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka sebagai Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-125/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**SK No. 125/2023**"), masa jabatan Mohammad Fahmi Arkanuddin dan Siti Purnama Rizki sebagai anggota Komite Audit adalah 3 tahun terhitung sejak mulai efektifnya SK No. 125/2023 sampai dengan tanggal 30 September 2026.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
HALAMAN: 9

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-144/XI/2023 tanggal 8 November 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun dan menetapkan Piagam Komite Audit Perseroan yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Marsetio (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Raja Erizman (Komisaris)
 2. Chitra Mardi Rahayuningsih

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-028/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dari Unsur Dewan Komisaris ("**SK No. 028/2023**"), masa jabatan Marsetio sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Raja Erizman sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai efektifnya SK No. 028/2023, sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan mereka sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-83/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, masa jabatan Chitra Mardi Rahayuningsih selaku anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-075/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam rangka memenuhi rangka POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP/007/II/2022 tanggal 14 Januari 2022.

8. Perseroan telah mengangkat Agung Laksana Pranata sebagai *Internal Audit Senior Group Head* Perseroan berdasarkan Petikan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 034/AA.P-6a/2023 tanggal 25 Februari 2023 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, Direksi Perseroan telah mengangkat Agung Laksana Pranata sebagai *Internal Audit Senior Group Head* Perseroan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. DK.022/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Persetujuan Perubahan *Internal Audit Senior Group Head*. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 27 Februari 2023.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**").

Dalam rangka memenuhi rangka POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 14 September 2023.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 10

usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, termasuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Penetapan Pemberian Konsesi Terhadap Ruas Jalan Tol Yang Diusahakan oleh PT Jasa Marga dan Berita Acara Hasil Kesepakatan Masa Konsesi 13 Ruas Jalan Tol Yang Dioperasikan PT Jasa Marga (Persero) no. 378A/BA-PPJT/KE/BPJT/2006 tanggal 8 Juni 2006 antara Kepala BPJT (badan pengatur jalan tol yang dibentuk oleh Menteri Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan jalan tol) dan Perseroan, kecuali sehubungan dengan ketiadaan salinan persetujuan/pengesahan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan usaha Perseroan di ruas jalan tol sebagai berikut: (i) Jakarta Bogor – Ciawi, (ii) Padalarang – Cileunyi, (iii) Belawan – Medan – Tanjung Morawa, dan (iv) Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) atau Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh Sertifikat Usaha Jalan Tol.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan telah memiliki perizinan lingkungan Perseroan untuk 4 (empat) ruas jalan tol, yakni: (i) Jakarta Bogor – Ciawi, (ii) Padalarang – Cileunyi, (iii) Belawan – Medan – Tanjung Morawa, dan (iv) Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami. Meskipun demikian, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut dikeluarkan, dokumen perizinan lingkungan terkait tidak dapat ditemukan.

Sehubungan dengan tidak adanya dokumen perizinan lingkungan tersebut di atas, Perseroan tetap secara rutin melakukan kewajiban pelaporan lingkungan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan tidak pernah memperoleh sanksi dan/atau teguran dari instansi pemerintah manapun sehubungan dengan ketiadaan salinan dokumen perizinan lingkungan Perseroan tersebut.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Pembatasan pembagian dividen dalam perjanjian pinjaman pemegang saham antara Perseroan dengan Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) tidak merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal, mengingat Perseroan masih tetap dapat membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan yang berasal dari pendapatan Perseroan dalam mengoperasikan 9 ruas jalan tol Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 11

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Prospektus sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 telah dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar (*arm's length*) dan seluruh transaksi tersebut bukanlah suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam rangka Obligasi Berkelanjutan, Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing:

- a. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**") sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 28 April 2006, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan BCA, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024;
- b. PT Bank Maybank Indonesia ("**Bank Maybank**") sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah iB No. 13 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Bambang Sularso, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Maybank, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024;
- c. Bank Mega (selaku wali amanat) sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 No. 25 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Mega sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahun 2020, selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024; dan
- d. PT Bank Permata Tbk ("**Bank Permata**") sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 04 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) antara Perseroan dan Bank Permata, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah dilaksanakannya PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.

Perseroan telah memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020, kecuali sehubungan dengan keterlambatan dilakukannya penyampaian laporan transaksi afiliasi oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 atas perjanjian-perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) dengan beberapa kreditur yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan, yakni badan usaha milik negara ("**BUMN**") dan perusahaan anak BUMN, yang disampaikan Perseroan melalui sistem pelaporan elektronik OJK pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan berdasarkan Surat Perseroan No. AB.KU.09.02.176 tanggal 2 Mei 2024 tentang Laporan Transaksi Afiliasi Yang Dikecualikan.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, keterlambatan pelaporan transaksi-transaksi afiliasi tersebut oleh Perseroan, dapat mengakibatkan Perseroan dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 12

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman pemegang saham yang dibuat oleh dan antara JTT selaku pemberi pinjaman dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek ("**JJC**") selaku penerima pinjaman, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 karena perjanjian yang dilaksanakan antara JTT dan JJC bukan merupakan suatu transaksi afiliasi. Hal ini mengingat JJC bukanlah merupakan suatu perusahaan terkendali baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan tidak terdapat kesamaan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, JTT, dan JJC. Dengan demikian tidak memenuhi kriteria "Afiliasi" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Anak sebagai berikut:
 - a. **JLJ**, di mana Perseroan memiliki 17.342.254 lembar saham dalam JLJ, yang merupakan 99,96% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JLJ.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JLJ No. 11 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Siti Nur Isminingsih, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, para pemegang saham JLJ telah menyetujui dilakukannya pembubaran atas JLJ dan telah menunjuk likuidator atas nama Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan konsultan terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembubaran JLJ akan berlaku sejak Menkumham mencatat berakhirnya status badan hukum JLJ dan menghapus nama JLJ dari daftar perseroan.
 - b. **MSJ**, di mana Perseroan memiliki 61.522.472 lembar saham dalam MSJ, yang merupakan 55% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MSJ.
 - c. **MTN**, di mana Perseroan memiliki 735.486 lembar saham dalam MTN, yang merupakan 60% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam MTN.
 - d. **JMKC**, di mana Perseroan memiliki 129.927.188 lembar saham dalam JMKC, yang merupakan 78,67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JMKC.
 - e. **JMTM**, di mana Perseroan memiliki 348.747 lembar saham dalam JMTM, yang merupakan 99,82% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JMTM.
 - f. **JBT**, di mana Perseroan memiliki 609.193 lembar saham dalam JBT, yang merupakan 64,44% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JBT.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 13

- g. **JMRB**, di mana Perseroan memiliki 1.752.888 lembar saham dalam JMRB, yang merupakan 99,93% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JMRB.

JMRB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- i. **AJP**, di mana JMRB memiliki 6.884.000 lembar saham dalam AJP, yang merupakan 99,48% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam AJP.
- ii. **JRB**, di mana JMRB memiliki 757.446.688 lembar saham dalam JRB, yang merupakan 89,08% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JRB.
- h. **JMKT**, di mana Perseroan memiliki 775.885 lembar saham dalam JMKT, yang merupakan 55% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JMKT.
- i. **CSJ**, di mana Perseroan memiliki 34.269.994 lembar saham dalam CSJ, yang merupakan 55% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CSJ.
- j. **JMTO**, di mana Perseroan memiliki 241.977.910 lembar saham dalam JMTO, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JMTO.
- k. **JMB**, di mana Perseroan memiliki 885.043 lembar saham dalam JMB, yang merupakan 64,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JMB.
- l. **JBS**, di mana Perseroan memiliki 2.408.877 lembar saham dalam JBS, yang merupakan 67,39% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JBS.
- m. **JTT**, di mana Perseroan memiliki 20.340.489.661 lembar saham dalam JTT, yang merupakan 99,89% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JTT.

JTT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- i. **JSM**, di mana JTT memiliki 829.398.900 lembar saham dalam JSM, yang merupakan 55,51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JSM.
- ii. **JNK**, di mana JTT memiliki 34.070.766 lembar saham dalam JNK, yang merupakan 45,03% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JNK.
- iii. **LMJ**, di mana JTT memiliki 194.368.293 lembar saham dalam LMJ, yang merupakan 97,32% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam LMJ.

LMJ memiliki penyertaan saham pada Perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) **JSB**, di mana LMJ memiliki 670.506.512 lembar saham dalam JSB, yang merupakan 16,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JSB;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 14

- 2) **JNK**, di mana LMJ memiliki 11.325.786 lembar saham dalam JNK, yang merupakan 14,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JNK.
- iv. **JSB**, dimana JTT memiliki 1.846.112.128 lembar saham dalam JSB, yang merupakan 44,18% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JSB.
- v. **JSN**, dimana JTT memiliki 72.035.758 lembar saham dalam JSN, yang merupakan 42,62% dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JSN.
- n. **JJS**, di mana Perseroan memiliki 2.354.528 lembar saham dalam JJS, yang merupakan 90,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JJS.
- o. **JPB**, di mana Perseroan memiliki 801.373 lembar saham dalam JPB, yang merupakan 94,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JPB.
- p. **JJB**, di mana Perseroan memiliki 213.223 lembar saham dalam JJB, yang merupakan 68,7% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JJB.
- q. **JAP**, di mana Perseroan memiliki 37.400 lembar saham dalam JAP, yang merupakan 57,17% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam JAP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) pada perusahaan-perusahaan di atas telah dilakukan (i) secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) tidak bertentangan dengan klausul pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani Perseroan dan Perusahaan Anak yang berlaku pada saat penyertaan saham dilakukan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Direksi Perseroan atas penyertaan modal pertama kali pada JMTM, sebagaimana dipersyaratkan anggaran dasar Perseroan (yang berlaku pada saat itu). Lebih lanjut, penyertaan saham yang dilakukan Perseroan dan JTT pada Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) di atas dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan JTT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tindakan Direksi Perseroan atas penyertaan modal pertama kali pada JMTM tersebut telah dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yakni untuk melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UUPT, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik.

Namun demikian, apabila Direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, Perseroan tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh pihak ketiga atas tindakan penyertaan oleh Direksi Perseroan tersebut.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 15

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan Perseroan, tidak terdapat pembebanan (fidusia atau gadai saham) atau sengketa atas saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di masing-masing Perusahaan Anak.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2024, seluruh aset material milik Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) perjanjian kerja Bersama ("**PKB**") antara Perseroan dan serikat pekerja Perseroan, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) kewajiban pembentukan Lembaga Kerjasama ("**LKS**") Bipartit, (v) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan ("**WLKP**"), dan (vi) kewajiban pelaporan kembali atas Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**WLTk**").

14. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja berupa pemeliharaan jalan tol dan pengoperasian jalan tol, dengan rincian sebesar 70% dari dana tersebut akan digunakan untuk pengoperasian jalan tol dan sisanya sebesar 30% akan digunakan untuk pemeliharaan jalan tol.

Rencana modal kerja untuk pengoperasian jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan transaksi jalan tol, pelayanan lalu lintas jalan tol, dan pemeliharaan rutin fasilitas sarana transaksi, gedung kantor Gerbang Tol (GT) maupun bangunan pelengkap jalan tol sedangkan untuk pemeliharaan jalan tol termasuk namun tidak terbatas pada *overlay* jalan tol, pemeliharaan rutin jalan tol, pemeliharaan sarana pelengkap jalan tol (*guardrail*, *concrete barrier*, pagar *ROW (Right of Way)* dan marka), penelitian jembatan, dan perkerasan.

Ruas jalan tol yang menjadi tujuan dalam penggunaan modal kerja tersebut adalah ruas jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan dan berada di wilayah Regional Metropolitan yang mencakup area Jabodetabek dan Bandung.

Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dilakukan berdasarkan perjanjian jasa pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol antara Perseroan dengan Perusahaan Anak Perseroan, yaitu JMTD dan JMTM, yang merupakan afiliasi dari Perseroan. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan JMTD telah menandatangani

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 16

beberapa perjanjian jasa pengoperasian jalan tol, yakni sebagai berikut: (i) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Jakarta – Bogor – Ciawi No. 98/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (ii) Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol JORR W2S dan Ulujami – Pondok Aren No. 99/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (iii) Kontrak Manajemen Jasa Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cawang – Tomang Pluit, Prof. DR. Ir. Soedijatmo, Jakarta – Tangerang No. 100/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); dan (iv) Kontrak Manajemen Pengoperasian Jalan Tol di Bidang Pelayanan Transaksi dan Pelayanan Lalu Lintas Pada Ruas Tol Cipularang - Padaleunyi No. 101/KONTRAK-DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan JMTM juga telah menandatangani perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol sebagai berikut: (i) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Bogor-Ciawi PT Jasamarga (Persero) Tbk No. 02/Kontrak/-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (ii) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas JORR Seksi E1, E2, E3, W2S dan Ulujami-Pondok Aren PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 05/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (iii) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Jakarta-Tangerang-Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 03/Kontrak-DIR/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), dan (iv) Kontrak Manajemen Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemeliharaan Jalan Tol Pada Ruas Cipularang-Padaleunyi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 04/Kontrak-Dir/2024 tanggal 2 Januari 2024 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dimaksud maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan yang lain diantaranya mengoptimalkan *stand by loan* yang dimiliki Perseroan dengan perbankan maupun melakukan aksi korporasi lainnya seperti divestasi saham di *subholding* Perseroan maupun Perusahaan Anak Perseroan.

Perjanjian jasa pengoperasian jalan tol antara Perseroan dan JMTO dan perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol antara Perseroan dan JMTM merupakan suatu transaksi afiliasi yang juga merupakan kegiatan usaha Perseroan, JMTO dan JMTM yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, yang hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

Selain itu, perjanjian jasa pengoperasian jalan tol dan perjanjian jasa pemeliharaan jalan tol merupakan kegiatan usaha Perseroan, JMTO dan JMTM yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, sehingga Perseroan hanya wajib mengungkapkan perjanjian pengoperasian jalan tol dan perjanjian pemeliharaan jalan tol tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan yang nilainya termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi (“**RUPO**”), dan perubahan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 17

penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini kepada OJK dan wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah tanggal distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di informasi tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

15. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
16. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 adalah idAA (*double A*), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
17. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank Mega, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, Bank Mega dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25,00% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tugas Bank Mega selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.
18. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 18

material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

19. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Maret 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan, atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak pernah dinyatakan pailit, atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

II. PERUSAHAAN ANAK

1. Pendirian Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti setor modal oleh para pendiri Perusahaan Anak, yakni: (i) AJP; (ii) JSM; (iii) JMKC; (iv) LMJ; (v) JRB; (vi) JMTO; (vii) MSJ; (viii) JBT; (ix) JSN; (x) JMRB; (xi) JMTM, (xii) CSJ, (xiii) JLJ.

Berdasarkan Pasal 33 UUPT, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Untuk JSM, JMKC, MSJ, JBT, JNK, JSN, JMRB, JMTM, CSJ, AJP dan JLJ, pendirian Perusahaan Anak tersebut telah dilakukan lebih dari 10 tahun. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administratif keuangan wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penyimpanan bukti setor modal pendirian sudah melewati batas kewajiban penyimpanan dokumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas atas Surat Pernyataan LMJ dan JRB tanggal 27 Mei 2024 serta keterangan JMTO, sepanjang pengetahuan masing-masing Direksi LMJ, JMTO dan JRB, penyetoran modal oleh para pemegang saham LMJ, JMTO dan JRB telah dilakukan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian LMJ, JMTO dan JRB. Meskipun demikian, bukti penyetoran modal oleh para pemegang saham terkait tidak dapat ditemukan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat pernyataan terkait, masing-masing LMJ, JMTO dan JRB tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham, (ii) kreditur, (iii) karyawan, dan/atau (iv) pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administratif keuangan wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Sehubungan dengan kewajiban penyimpanan dokumen tersebut, berdasarkan Pasal 97 ayat

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 19

(3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk:
 - a. LMJ, sehubungan dengan belum diperolehnya akta pemindahan hak atas saham untuk jual beli 1 saham LMJ milik Jefri Susanto kepada Mei Prabowo, sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham LMJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi.
 - b. JNK, sehubungan dengan: (i) tidak dilakukannya pengumuman koran atas penyetoran saham dalam JNK sebagai hasil dari konversi piutang: (a) Kings Key Limited berdasarkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara PT Waskita Toll Road dan JNK No. 25/FPPS/WTR/2017 tanggal 11 Desember 2017 *jo*. Akta Pengalihan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 93 tanggal 11 Desember 2017 antara JNK, PT Waskita Toll Road, dan Kings Key Limited, dan (b) Perseroan berdasarkan Perjanjian *Mandatory Convertible Loan* No. 133/KONTRAK-DIR/2017 tanggal 31 Oktober 2017 antara Perseroan dan JNK, dan (ii) belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman dalam 1 surat kabar mengenai hasil pengambilalihan JNK berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 76 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. JBT, sehubungan dengan belum diperolehnya bukti setor modal atas nama Perseroan sebesar Rp199.199.930.000 dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp800.070.000 untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor JBT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 Tanggal 12 November 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. AJP, sehubungan dengan belum diperolehnya: (a) bukti pengumuman kepada karyawan AJP sehubungan dengan rencana pengambilalihan AJP; dan (b) bukti pengumuman hasil pengambilalihan dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
 - e. JSM, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman dalam 1 surat kabar mengenai hasil pengambilalihan JSM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 16 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Inggriati Djojoseputro, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.
 - f. JSN, sehubungan dengan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman dalam 1 surat kabar mengenai hasil pengambilalihan JSN berdasarkan Akta No. 75 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Chayanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
 - g. JSB, sehubungan dengan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman dalam 1 surat kabar mengenai hasil pengambilalihan JSB berdasarkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 20

Akta No. 6 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Tjong Agnes Yuana, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal.

- h. JGP, sehubungan dengan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman dalam 1 surat kabar mengenai hasil pengambilalihan JGP berdasarkan Akta No. 10 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Dra. Inggriati Djojoseputro, S.H., Notaris di Kota Surabaya.

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, yang salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Akta pemindahan hak dapat berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Selanjutnya, direksi yang telah menerima salinan akta tersebut wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, penyeteroran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan, harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 133 UUPT, direksi dari perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.
4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk:
 - a. (i) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, serta (ii) Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang MTN; dan
 - b. SLF atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang JMTM dan JSN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan MTN, MTN telah menyampaikan permohonan perpanjangan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (“SIPA”) MTN

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 21

berdasarkan Formulir Isian Data Administrasi Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah tanggal 18 Maret 2024. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, permohonan perpanjangan SIPA MTN tersebut masih dalam proses pemeriksaan teknis oleh instansi terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, JRB telah menyampaikan permohonan SLF kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan No. Registrasi: SLF-332509-30042024-01 tertanggal 30 April 2024 untuk bangunan gedung eksisting (teknis) JRB. Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, permohonan SLF JRB tersebut masih dalam proses pemeriksaan teknis oleh instansi terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan MTN, JSN, dan JMTM masing-masing tertanggal 27 Mei 2024, Direksi MTN, JSN, dan JMTM berkomitmen untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban berupa pengurusan: (i) perpanjangan atas Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dan pengajuan SLF atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang untuk MTN, (ii) pengajuan SLF atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang untuk JSN dan (iii) pengajuan SLF atas bangunan kantor dan fasilitas penunjang untuk JMTM, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah MTN, dalam hal MTN tidak melakukan perpanjangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, maka Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“**LKPM**”) kepada Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal, kecuali untuk AJP, JJS, JBT, JMKT, LMJ, JMRB, dan CSJ.

Berdasarkan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LKPM dapat dikenakan sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iv) pencabutan perizinan berusaha; (v) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pembatasan pembagian dividen dalam:

- a. perjanjian pinjaman pemegang saham antara JTT dengan JJC;
- b. perjanjian pinjaman pemegang saham antara JMRB dengan AJP; dan
- c. perjanjian kredit dengan pihak ketiga yang melibatkan Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) sebagai penerima pinjaman,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
HALAMAN: 22

tidak merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal, mengingat Perseroan masih tetap dapat membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan yang berasal dari pendapatan Perseroan dalam mengoperasikan 9 ruas jalan tol Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perusahaan Anak (sebagaimana relevan) dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perusahaan Anak untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perusahaan Anak tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perusahaan Anak atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan milik JMKC yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Bersyarat Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran No. 47 tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain No. 50 tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00030372.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten;
 - iii. Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pihak Ketiga No. 51 tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. No. W12.00030371.AH.05.01 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Banten;
 - iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 48 tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Jaminan di atas diberikan oleh JMKC kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“**Bank Mandiri**”) sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara JMKC, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“**SMI**”), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”), dan Bank Mandiri.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 23

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JMKC tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JMKC atas harta kekayaan JMKC yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JMKC kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JMKC dan apabila jaminan yang diberikan oleh JMKC akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JMKC secara material.

- b. Harta kekayaan milik JMKT yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- i. Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi No. 02 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Pendapatan Tol) No. 03 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 03/2015**”), berikut perubahannya *juncto* Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W2.00268514.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara;
 - iii. Tagihan (hak tagih) terhadap tagihan lain-lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Lain-Lain) No. 05 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 05/2015**”), berikut perubahannya *juncto* Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W2.00268524.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sumatera Utara;
 - iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 04 tanggal 3 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan di atas diberikan oleh JMKT kepada BNI sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan IV Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 12 November 2021, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara JMKT, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“**BRI**”), BNI, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dan Bank Mandiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JMKT tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JMKT atas harta kekayaan JMKT yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JMKT kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JMKT dan apabila jaminan yang diberikan oleh JMKT akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JMKT secara material.

- c. Harta kekayaan milik JBS yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- i. Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Balikpapan - Samarinda berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Balikpapan -

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 24

Samarinda No. 92 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

- ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pihak Ketiga No. 95 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya *juncto* Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00254895.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
- iii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain No. 93 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00042935.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
- iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 94 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan di atas diberikan oleh JBS kepada Bank Mandiri sebagai agen jaminan berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 88 Tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Kredit Sindikasi No. 27 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara JBS, BRI, SMI, Bank Mandiri, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank, dan PT Bank Mega Tbk; dan (ii) Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah No. 89 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II No. 26 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara JBS, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Jabar Banten Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JBS tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JBS atas harta kekayaan JBS yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JBS kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JBS dan apabila jaminan yang diberikan oleh JBS akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JBS secara material.

- d. Harta kekayaan milik JSM yang sedang dibebankan jaminan adalah atas Hak perusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya - Mojokerto berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya – Mojokerto No. 27 tanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Jaminan tersebut diberikan oleh JSM kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 26 Tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara JSM dengan BCA.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 25

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JSM tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JSM atas harta kekayaan JSM yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JSM kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JSM dan apabila jaminan yang diberikan oleh JSM akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JSM secara material.

- e. Harta kekayaan milik MSJ yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- i. Hak pengusahaan Jalan Tol Bogor *Ring Road* berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Bogor *Ring Road* No. 147 Tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Kuasa Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Ring Road No. 32 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Pendapatan No. 143 Tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Pendapatan No. 30 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00792489.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022;
 - iii. Tagihan dan pendapatan dari hasil klaim asuransi berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Hasil Pembayaran Asuransi No. 144 Tanggal 31 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Akta Pemberian Jaminan Fidusia Hasil Pembayaran Asuransi No. 31 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00792709.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022.
 - iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Penampungan No. 145 Tanggal 2 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Perubahan III (Ketiga) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Gadai atas Rekening Penampungan No. 34 Tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh MSJ kepada BRI sebagai agen jaminan berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan II (Kedua) No. 1 tanggal 29 Maret 2022 antara MSJ dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan BRI; dan (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta antara MSJ dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 26

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MSJ tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh MSJ atas harta kekayaan MSJ yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MSJ kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha MSJ dan apabila jaminan yang diberikan oleh MSJ akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MSJ secara material.

- f. Harta kekayaan milik JBT yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- i. Hak pengelolaan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 84 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Pendapatan Tol) No. 81 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Pendapatan Tol) No. 4 Tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00098579.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020;
 - iii. Tagihan dan pendapatan lain-lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Lain-Lain) No. 82 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Lain-Lain) No. 5 Tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W20.00098509.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020;
 - iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 83 Tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali melalui Akta Addendum I (Pertama) dan Pernyataan Kembali Akta Gadai Rekening Penampungan No. 20 Tanggal 7 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh JBT kepada BRI sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 3 tanggal 3 September 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara JBT dengan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Pembangunan Daerah Bali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JBT tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JBT atas harta kekayaan JBT yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JBT kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JBT dan apabila jaminan yang diberikan oleh JBT akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JBT secara material.

- g. Harta kekayaan milik JJS yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 27

- i. Fidusia atas tagihan atas pengembalian dana talangan tanah dari Pemerintah dan/atau Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah.
- ii. Fidusia atas tagihan klaim penjaminan yang diterima dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berdasarkan Perjanjian Penjaminan tertanggal 29 Desember 2017.
- iii. Gadai rekening atas rekening penampungan dana talangan tanah disertai dengan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pendebitan atas saldo yang terdapat di dalam rekening penampungan dana talangan tanah tersebut.
- iv. Tagihan dana talangan tanah kepada Pemerintah/Badan Layanan Umum – Lembaga Manajemen Aset Negara dan/atau instansi yang bawenang berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Rekening Dana Talangan Tanah No. 3 Tanggal 11 April 2022, yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.
- v. Gadai atas rekening pengembalian dana talangan pembebasan tanah berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 11 April 2022, yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Jaminan pada angka (i), (ii), dan (iii) diberikan oleh JJS kepada BCA sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Dana Talangan Tanah No. 107 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara JJS dengan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Central Asia.

Jaminan pada angka (iv) dan (v) diberikan JJS kepada BRI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 11 April 2022, yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JJS tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JJS atas harta kekayaan JJS yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JJS kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JJS dan apabila jaminan yang diberikan oleh JJS akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JJS secara material.

- h. Harta kekayaan milik MTN yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai Hak perusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran – Serpong berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran – Serpong No. 06 tanggal 23 November 2022, dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Jaminan tersebut di atas diberikan oleh MTN kepada BCA sebagai kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta Pusat antara MTN dan BCA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MTN tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh MTN atas harta kekayaan MTN yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh MTN kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha MTN dan apabila jaminan yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 28

diberikan oleh MTN akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional MTN secara material.

- i. Harta kekayaan milik JMB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Hak perusahaan Jalan Tol Ruas Manado – Bitung berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Manado – Bitung No. 29 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Tol dan Tagihan Terhadap Pendapatan Usaha Lain No. 27 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - iii. Tagihan (hak tagih) klaim penjaminan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Klaim Penjaminan No. 12 tanggal 20 Januari 2017, dibuat di hadapan Ati Muyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 28 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Ati Muyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh JMB kepada BCA sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 23 tanggal 13 Oktober 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara JMB dengan BNI, Bank Mandiri, BCA, BRI, SMI, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JMB tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JMB atas harta kekayaan JMB yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JMB kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JMB dan apabila jaminan yang diberikan oleh JMB akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JMB secara material.

- j. Harta kekayaan milik JPB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Hak perusahaan Jalan Tol Ruas Probolinggo – Banyuwangi Tahap I berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Probolinggo – Banyuwangi Tahap I No. 47 Tanggal 21 November 2023, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain No. 44 tanggal 21 November 2023, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00631188.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
 - iii. Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Tagih Terhadap Pihak Ketiga No. 43 tanggal 21 November 2023,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
HALAMAN: 29

dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00631189.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 45 tanggal 21 November 2023, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

Jaminan pada angka (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas diberikan oleh JPB kepada BCA sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 41 tanggal 21 November 2023 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara JPB dengan BCA, Bank Mandiri, BNI, SMI, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

- v. Tagihan JPB berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas Piutang No. 17 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan *jo.* Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 1 tanggal 12 Januari 2023, dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00028474.AH.05.02 TAHUN 2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- vi. Rekening penampungan dana talangan tanah berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 18 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Jaminan pada angka (v) dan (vi) di atas diberikan oleh JPB kepada PT Bank Permata Tbk sebagai kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 16 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 4 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Indra Wiguna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat antara JPB dan PT Bank Permata Tbk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JPB tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JPB atas harta kekayaan JPB yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JPB kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JPB dan apabila jaminan yang diberikan oleh JPB akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JPB secara material.

- k. Harta kekayaan milik JNK yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Hak perusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono No. 17 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Tol dan Tagihan Terhadap Pendapatan Usaha Lain No. 19 tanggal 14 April 2026, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 30

Fidusia No. W10.00208448.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

- iii. Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Terhadap Pihak Ketiga No. 20 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00208447.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;
- iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 18 tanggal 14 April 2016, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Jaminan pada angka (i), (ii), (iii), dan (iv) di atas diberikan oleh JNK kepada Bank Mandiri sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 14 April 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II (Kedua) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 tanggal 29 Juli 2019 antara JNK dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, SMI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- v. Hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi – Kertosono berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi Kertosono No. 13 Tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- vi. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha-Usaha Lain No. 11 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00607784.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;
- vii. Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hak Tagih Terhadap Pihak Ketiga No. 12 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00607783.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;
- viii. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 17 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Jaminan pada angka (v), (vi), (vii), dan (viii) di atas diberikan oleh JNK kepada BCA sebagai agen jaminan berdasarkan (a) Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 26 Juni 2023, antara JNK dengan Bank Mandiri, BNI, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan (b) Akta Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 15 tanggal 26 Juni 2023, antara JNK dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Mandiri, dan BNI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JNK tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JNK atas harta kekayaan JNK yang saat

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 31

ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JNK kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JNK dan apabila jaminan yang diberikan oleh JNK akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JNK secara material.

- I. Harta kekayaan milik JSB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Hak perusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang No. 82 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
 - ii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain No. 80 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - iii. Tagihan (hak tagih) terhadap pihak ketiga berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pihak Ketiga No. 81 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - iv. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 79 tanggal 26 Januari 2022, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.

Jaminan di atas diberikan oleh JSB kepada BNI sebagai agen jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 161 tanggal 27 Desember 2021 antara JSB dengan BNI, Bank Mandiri, BCA, dan PT Bank KEB Hana Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JSB tanggal 21 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JSB atas harta kekayaan JSB yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JSB kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JSB dan apabila jaminan yang diberikan oleh JSB akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JSB secara material.

- m. Harta kekayaan milik JJB yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Jaminan fidusia atas hak tagihan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - ii. Gadai dan surat kuasa atas rekening penampungan dan rekening JJB berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Gadai Saldo Rekening Tabungan dan/atau Giro No. 23 tanggal 21 Juni 2023 dan Akta Surat Kuasa No. 24 tanggal 21 Juni 2023, keduanya dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta.

Jaminan di atas diberikan oleh JJB kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Akad Line Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 21 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 32

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JJB tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JJB atas harta kekayaan JJB yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JJB kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JJB dan apabila jaminan yang diberikan oleh JJB akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JJB secara material.

- n. Harta kekayaan milik JSN yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- i. Hak konsesi perusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan-Ngawi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan-Ngawi No. 8 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
 - ii. Rekening penampungan berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 5 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
 - iii. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan tol dan pendapatan usaha lain berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Pendapatan Jalan Tol dan Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pendapatan Usaha Lain No. 6 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
 - iv. Tagihan (hak tagih) terhadap pendapatan klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan (Hak Tagih) Terhadap Pihak Ketiga No. 7 tanggal 17 Januari 2022, dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Jaminan di atas diberikan oleh JSN sebagai jaminan *joint collateral* kepada BNI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 6 tanggal 21 Desember 2021, dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Bank Mandiri. berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. WCO.KP/0006/TL/2022 No. 4 tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana diubah oleh Akta Addendum I Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* No. 4 Tanggal 20 April 2022, keduanya dibuat di hadapan Ati Mulyati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JSN tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JSN atas harta kekayaan JSN yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JSN kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JSN dan apabila jaminan yang diberikan oleh JSN akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JSN secara material.

- o. Harta kekayaan milik CSJ yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- i. Hak Perusahaan Jalan Tol selama Masa Konsesi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Perusahaan Jalan Tol (*cessie*);
 - ii. Seluruh tagihan dan pendapatan jalan tol yang diikat secara fidusia;
 - iii. Rekening penampungan yang diikat secara gadai berdasarkan akta gadai rekening penampungan;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 33

- iv. Seluruh tagihan dan pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, klaim penjaminan dari PII, dan penggantian dana (kompensasi) dari Pemerintah yang diikat secara fidusia;

Jaminan di atas diberikan oleh CSJ kepada Bank Mandiri, BNI, dan BCA selaku kreditur sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 09 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

- i. Tagihan atas pengembalian dana talangan tanah yang diikat secara fidusia; dan
- ii. Rekening penampungan dana talangan tanah yang akan diikat dengan gadai rekening.

Jaminan di atas diberikan oleh CSJ kepada Bank Mandiri, BNI, dan BCA selaku kreditur sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Dana Talangan Tanah No. 07 tanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan CSJ tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh CSJ atas harta kekayaan CSJ yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh CSJ kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha CSJ dan apabila jaminan yang diberikan oleh CSJ akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional CSJ secara material.

- p. Harta kekayaan milik JGP yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - i. Hak Konsesi Penggunaan Jalan Tol, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan No. 75 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya;
 - ii. Tagihan dan Pendapatan, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Pendapatan Usaha Lain No. 77 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya;
 - iii. Gadai atas *Escrow Account*, berdasarkan Akta Gadai Rekening Penampungan No. 76 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya; dan
 - iv. Fidusia atas Tagihan Pendapatan dari hasil Klaim Asuransi, Klaim Bank Garansi, dan Penggantian Dana dari Pemerintah, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Terhadap Pihak Ketiga No. 78 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya.

Jaminan di atas diberikan oleh JGP kepada Bank Mandiri berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor WCO.KP/479/KI/2021 No. 73 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya; dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor WCO.KP/480/TL/2021 No. 74 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Isy Karimah Syakir, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Surabaya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 34

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JGP tanggal 27 Maret 2024, jaminan-jaminan yang diberikan oleh JGP atas harta kekayaan JGP yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh JGP kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha JGP dan apabila jaminan yang diberikan oleh JGP akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional JGP secara material.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal 27 Maret 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh Perusahaan Anak telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku, kecuali untuk:

- a. JNK, sehubungan dengan belum dilakukannya perpanjangan atas Polis Asuransi *Civil Engineering Completed Risks* No. 231090722110000018 tanggal 22 November 2022 *jo*. Endorsement Letter tanggal 4 September 2023, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan JNK tanggal 28 Mei 2024, Direksi JNK berkomitmen untuk segera melakukan pengurusan perpanjangan polis asuransi bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024.

- b. JBS, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Polis *Civil Engineering Completed Insurance* No. 0908082100007 tanggal 31 Agustus 2021, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Maret 2024.

Berdasarkan Surat Evaluasi Pemenuhan Administrasi Masa Pemeliharaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda No. CA.PP.02.03.66 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan JBS untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("WIKI"), polis asuransi ini masih dimintakan perpanjangannya kepada WIKI.

- c. JSB, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Polis Asuransi *Civil Engineering Completed Risks* No. IP.01.03.24.100075 tanggal 25 Maret 2024, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 14 Juni 2024.

- d. JMTM, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Polis Asuransi No. 010810123004 tanggal 28 Juni 2023, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Juni 2024.

Berdasarkan Surat *Renewal Notice Property All Risk dan Earthquake Insurance* tanggal 18 Juni 2024 dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, perpanjangan dari polis asuransi ini sedang diproses oleh JMTM.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau PKB, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) pembentukan LKS Bipartit, (v) WLKP, dan (vi) WLTK, dan (vii) rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang telah disahkan, kecuali untuk:

- a. JBS, sehubungan dengan belum diperolehnya pelaporan kembali untuk WLTK;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 35

- b. JJB, sehubungan dengan belum adanya Peraturan Perusahaan berikut pengesahannya dan belum dilaporkannya WLKP;
- c. JBT, sehubungan dengan belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. JMTO, sehubungan dengan belum dilaporkannya WLKP;
- e. JJS, sehubungan dengan (i) belum adanya pengesahan Peraturan Perusahaan, (ii) belum diperolehnya pelaporan kembali untuk WLTK, (iii) belum dilaporkannya WLKP, dan (iv) belum dilakukannya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 periode terakhir;
- f. AJP, sehubungan dengan (i) belum diperolehnya pelaporan kembali untuk WLTK, (ii) belum dilaporkannya WLKP, dan (iii) belum dilakukannya penyesuaian pemberian besaran upah dengan upah minimum regional;
- g. MTN, sehubungan dengan belum dilaporkannya WLKP;
- h. JRB, sehubungan dengan belum dilaporkannya WLKP;
- i. JMRB, sehubungan dengan belum dilaporkannya WLKP;
- j. JMTM, sehubungan dengan belum (i) dilaporkannya WLKP dan (ii) belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Bipartit;
- k. CSJ, sehubungan dengan (i) belum diperolehnya pengesahan atas Peraturan Perusahaan dan (ii) belum dilakukannya pelaporan WLTK;
- l. JGP, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan atas perpanjangan Peraturan Perusahaan;
- m. JAP, sehubungan dengan belum diperolehnya pengesahan atas Peraturan Perusahaan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, JBS masih dalam proses pelaporan WLTK melalui situs web <https://wajiblapor.kemnaker.go.id/>. Meskipun demikian, berdasarkan keterangan JBS dan bukti tangkapan layar komunikasi antara JBS dengan petugas instansi ketenagakerjaan Samarinda per tanggal 22 Mei 2024, akun JBS dalam situs web terkait sedang bermasalah sehingga proses pelaporan WLTK JBS masih tertahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan JPB, JPB telah menyampaikan permohonan perpanjangan atas Peraturan Perusahaan JPB kepada Dinas Tenaga Kerja Probolinggo berdasarkan Tanda Terima tertanggal 19 Juni 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan JBT, JJS, MTN, JRB, JMTM, JJB, JBS, dan JMRB tertanggal 27 Mei 2024, Surat Pernyataan CSJ tertanggal 28 Mei 2024, dan Surat Pernyataan JAP tertanggal 30 Mei 2024, Direksi masing-masing Perusahaan Anak terkait berkomitmen untuk segera melakukan pemenuhan kewajiban atas dokumen ketenagakerjaan bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 36

Berdasarkan Pasal 108 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Ketenagakerjaan**"), pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU Ketenagakerjaan dikenai sanksi pidana paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 88E ayat (2) dan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, "**UU BPJS**"), pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU BPJS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal 21 Maret 2024, 27 Maret 2024, dan 2 April 2024 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 37

kelangsungan usaha masing-masing Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

11. Berdasarkan Surat Pernyataan Perusahaan Anak tanggal 21 Maret 2024, 27 Maret 2024, dan 2 April 2024, selama menjabat, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya, atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing Perusahaan Anak, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 dan rencana penggunaan dananya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; dan (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 38

5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 21 Juni 2024.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
HALAMAN: 39

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Perusahaan Anak dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS



Putu Suryastuti, S.H., M.H.
Partner

No. STTD : STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023
No. HKHPM : 201423

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

***PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022***

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 – 227	<i>Notes to the Consolidated Financial Statement</i>



JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/ Name
Alamat Kantor/ Office Address
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas Lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor telpon/ Phone Number
Jabatan/ Position
2. Nama/ Name
Alamat Kantor/ Office Address
Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas Lain/
Domicile as stated in ID Card
Nomor telpon/ Phone Number
Jabatan/ Position

We, the undersigned :

- : Subakti Syukur
Plaza Tol TMII - Jakarta Timur 13550
Jl. Damai 2 No. 36 A RT005/ RW009 Jatiwaringin,
Pondok Gede, Bekasi
(021) 8413526
Direktur Utama / President Director
- : Pramitha Wulanjani
Plaza Tol TMII - Jakarta Timur 13550
Jl. Cibubur No. 66 RT010/ RW012
Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur
(021) 8413526
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Finance and
Risk Management Director

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak.

State that :

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Jasa Marga Tbk (Persero) Tbk ("the Company") and subsidiaries;
2. The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard in Indonesia; and
 - a. All information contained in the consolidated financial statements in complete and correct;
 - b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or fact and do not omit material informations and fact;
3. We are responsible for the Company's and subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 22 Mei/ May 22, 2024



Subakti Syukur
Direktur Utama / President Director

Pramitha Wulanjani
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00762/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/V/2024

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya ("Kelompok Usaha"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Kelompok Usaha berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Jasa Marga (Persero) Tbk and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023 and 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023 and 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

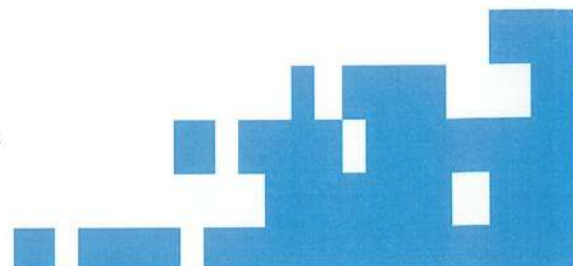
Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Amortisasi hak pengusahaan jalan tol

Sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Kelompok Usaha diharuskan melakukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol (HPJT) selama masa konsesi. Kelompok Usaha mengamortisasi HPJT, khususnya jalan dan jembatan menggunakan metode pola konsumsi jalan tol yang berasal dari lalu lintas selama masa konsesi. Nilai tercatat HPJT pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp111.246.294 juta (2022: Rp66.979.662 juta), yang merupakan 86,03% (2022: 73,49%) dari total aset Kelompok Usaha adalah material terhadap laporan keuangan konsolidasian sehingga dampak amortisasi HPJT ini signifikan. Penerapan metode keakuratan amortisasi pada konsesi jalan tol melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan dari manajemen, khususnya asumsi mengenai estimasi volume lalu lintas yang dipengaruhi oleh perubahan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, pengembangan jaringan jalan tol, tarif tol dan realisasi volume lalu lintas.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain, melakukan:

- Pengujian pengendalian internal terkait proses pengestimasian volume lalu lintas;
- Pengujian substantif bagaimana manajemen menghitung beban amortisasi berdasarkan volume lalu lintas, meliputi pengujian terhadap relevansi dan kehandalan data yang digunakan, ketepatan penggunaan metode dan konsistensi asumsi yang mendasari estimasi amortisasi;
- Pengujian akurasi perhitungan estimasi; dan
- Evaluasi perubahan keadaan dan kejadian setelah tanggal pengukuran estimasi amortisasi hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan.

Key Audit Matters

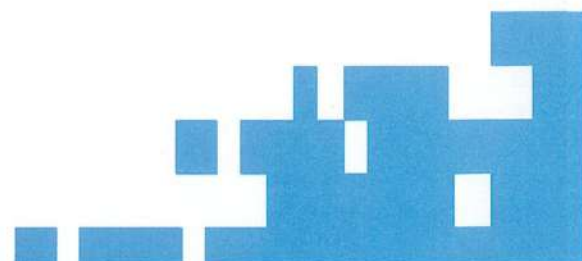
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Amortization of toll road concession right

In accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, the Group is required to amortize toll road concession rights (HPJT over the concession right). The Group amortized the HPJT, particularly roads and bridges using the toll road consumption pattern method derived from traffic over the concession period. The carrying amount of HPJT amounting to Rp111,246,294 million (2022: Rp66,979,662 million), which represents 86.03% (2022: 73.49%) of the Group's total assets as of December 31, 2023, is material to the consolidated financial statements, therefore, the impact of HPJT amortization accuracy is significant. The application of the amortization method to toll road concessions involves significant estimation and judgment from the management, particularly the assumptions regarding the estimated traffic volume which are affected by changes in external factors such as economic growth, development of toll road network, toll tariffs and realization of traffic volume.

Our audit procedures include, among others, performing:

- *Test of internal controls related to the traffic volume estimation process;*
- *Substantive test on how the management calculates amortization expense based on traffic volume, including testing the relevance and reliability of the data used, the appropriateness of the method use and the consistency of the assumptions underlying the amortization estimate;*
- *Test on accuracy of the estimation calculation; and*
- *Evaluate the changes in circumstances and events after the date of measurement of the amortization estimate until the date these consolidated financial statements is released.*



Pengungkapan Kelompok Usaha mengenai HPJT ini dijelaskan dalam Catatan 2.1 dan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kombinasi Bisnis

Sebagaimana diungkap pada Catatan 1.g atas laporan keuangan konsolidasian bahwa Kelompok Usaha menerapkan akuntansi Kombinasi Bisnis sehubungan pengalihan saham milik Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa di PT Lintas Marga Jawa (LMJ) sebanyak 194.336.593 lembar saham kepada PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), entitas anak. Pengalihan ini merupakan bagian dari pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa pada tanggal 27 Juli 2023.

Atas pengalihan ini, Perusahaan memperoleh pengendalian melalui kepemilikan tidak langsung melalui JTT dan LMJ di tiga entitas asosiasi atau ventura bersama, yaitu PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, masing-masing dengan kepemilikan sebanyak 59,80%, 59,53%, dan 59,60% setelah pengalihan. Sebagai dampak diperolehnya pengendalian ini maka Kelompok Usaha menerapkan metode akuisisi atas investasi yang sebelumnya dicatat menggunakan metode ekuitas. Kelompok Usaha pada tanggal akuisisi mengakui keuntungan bersih dari transaksi pengalihan dan pengukuran kembali nilai investasi yang dimiliki sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.112.427 juta.

Penggunaan metode akuisisi ini mengharuskan Kelompok Usaha untuk menentukan tanggal akuisisi, mengakui dan mengukur nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, kepentingan nonpengendali pihak diakuisisi, serta mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Pengukuran tersebut melibatkan subjektivitas dan kompleksitas yang signifikan, melibatkan asumsi manajemen dan ketidakpastian estimasi dalam mengukur nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih.

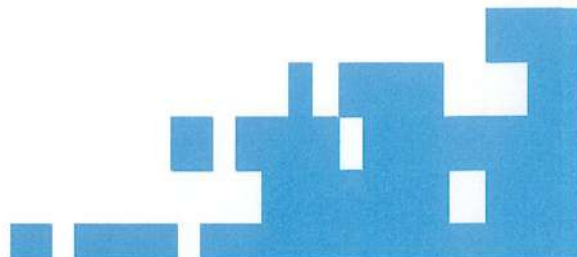
The Group's disclosures on HPJT are set out in Notes 2.1 and 13 to the consolidated financial statements.

Business Combination

As disclosed in Note 1.g to the consolidated financial statements, the Group applied Business Combination accounting regarding the transfer of 194,336,593 shares owned by Mandiri Infrastructure Equity Transjava Limited Partnership Fund to PT Lintas Marga Jawa (LMJ) to PT Jasamarga Transjava Toll (JTT), a subsidiary. This transfer is part of the dissolution and liquidation of Mandiri Infrastructure Equity Transjava Limited Partnership Fund on July 27, 2023.

As a result of this transfer, the Company obtained control through indirect ownership via JTT and LMJ in three associated or joint venture entities, namely PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi, and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, each with ownership after the transfer of 59.80%, 59.53%, and 59.60%, respectively. As a consequence of obtaining control, the Group applies the acquisition method to investments previously accounted for using the equity method. Group recognized a net gain from the transfer transaction and remeasurement of previously held investments, amounting to Rp4,112,427 million, as of the acquisition date.

The use of the acquisition method requires the Group to determine the acquisition date, recognize and measure the fair value of the identifiable assets acquired, liabilities assumed, non-controlling interests in the acquiree, and recognize and measure goodwill or gain on bargain purchase. These measurements involve significant subjectivity and complexity, involving management's assumptions and estimation uncertainties in measuring the fair value of identifiable assets and liabilities assumed.



Kami mengarahkan perhatian kami atas hal-hal ini dengan melakukan, antara lain:

- Menelaah perjanjian pemegang saham, akta keputusan pemegang saham serta dokumen-dokumen legal pengalihan saham untuk memahami syarat, ketentuan dan kondisi kunci dalam mengevaluasi ketepatan perlakuan akuntansi atas pengalihan ini;
- Mengevaluasi penilaian manajemen atas kompetensi, obyektivitas dan kemampuan penilai eksternal yang ditunjuk oleh JTT untuk memahami apakah terdapat hal-hal yang menyebabkan adanya bias saat melakukan pengukuran nilai wajar;
- Menelaah model pengukuran, proyeksi arus kas, asumsi dan data yang digunakan dalam pengukuran tersebut, serta melibatkan tim spesialis internal untuk mengevaluasi kewajaran model, metode serta asumsi yang mendasari pengukuran nilai wajar; dan
- Mengevaluasi ketepatan dan kecukupan pengungkapan transaksi kombinasi bisnis yang telah dibuat dan diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

We direct our attention to those matters by, among other things:

- *Reviewing the shareholders' agreements, shareholders' meeting resolutions, and legal documents of the share transfer to understand the key terms and conditions in evaluating the appropriateness of the accounting treatment for this transfer;*
- *Evaluating management's assessment of the competence, objectivity, and capability of the external valuer appointed by JTT to understand whether there are factors causing bias in measuring fair value;*
- *Reviewing the measurement model, cash flow projections, assumptions, and data used in such measurements, and involving internal specialist teams to evaluate the reasonableness of the model, methods, and assumptions underlying fair value measurements; and*
- *Evaluating the accuracy and sufficiency of the disclosure of business combination transactions made and disclosed in the consolidated financial statements.*

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



Hal-hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/IV/2024 bertanggal 30 April 2024 atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan opini wajar tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 53 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Other Matters

Prior to this report, we have issued our independent auditors' report No. 00065/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/IV/2024 dated April 30, 2024, on the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2023 with an unmodified opinion. With respect to the plan of the Company to conduct public offering, the Company has reissued their consolidated financial statements as described in Note 53 to the accompanying consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Series Issues of Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

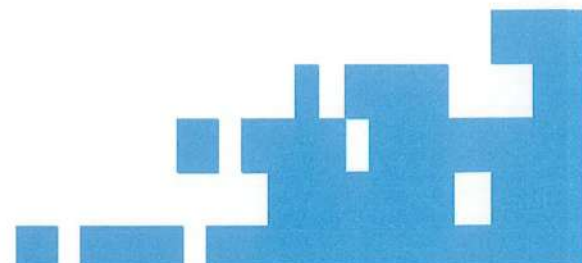
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Kelompok Usaha.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Kelompok Usaha tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Kelompok Usaha untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Kelompok Usaha. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

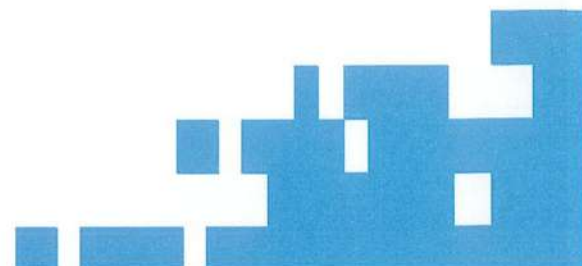
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 22 Mei 2024/May 22, 2024



00762



**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022 *)	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.e, 2.f, 2.q, 2.u, 4, 44.a, 48.e	4.438.951	8.429.118	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2.f, 2.q, 5, 48.e	1.360.795	2.394.007	Short-term investments
Piutang lain-lain setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp. 116.249 (2022: Rp 131.563)				Other receivables Net of provision for impairment of Rp 116,249 (2022: Rp131,563)
Pihak berelasi	2.f, 2.q, 6, 44.a,48.a, 48.e	344.226	527.578	Related parties
Pihak ketiga	2.f, 2.q, 6,48.a, 48.e	922.121	697.414	Third parties
Persediaan	2.g, 7	119.490	98.627	Inventories
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	8	95.910	68.276	Prepaid expenses and advances
Pajak dibayar dimuka	2.o, 18.a	134.956	86.149	Prepaid taxes
Dana dibatasi penggunaannya	2.e, 2.f, 2.q, 9, 44.a, 48.e	558.326	71.043	Restricted funds
TOTAL ASET LANCAR		7.974.775	12.372.212	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain - Berelasi	2.d, 2.p, 6, 44.a,48.a, 48.e	275.000	115.000	Other receivables - Related parties
Dana dibatasi penggunaannya	2.e, 2.f, 2.q, 9, 44.a, 48.e	292.783	165.776	Restricted funds
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama - neto	2.h, 10	6.155.705	8.974.143	Investment in associates and joint ventures - net
Aset tetap - neto	2.i, 11	474.401	360.716	Fixed asset - net
Properti investasi - neto	2.j, 12	751.557	604.289	Investment properties - net
Aset takberwujud - neto				Intangible assets - net
Hak pengusahaan jalan tol	2.l, 13	111.246.294	66.979.662	Toll road concession rights
Lainnya	2.k, 14	109.573	81.074	Others
Goodwill	2.d, 2.m, 15	41.849	41.849	Goodwill
Aset keuangan lainnya - neto	16, 48.e	246.677	349.695	Other financial assets - net
Aset tidak lancar lainnya - neto	2.n, 17	1.720.233	1.094.766	Other non-current assets - net
Aset derivatif	2.q, 2.r, 31	23.142	-	Derivative assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		121.337.214	78.766.970	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		129.311.989	91.139.182	TOTAL ASSETS

*)Direklasifikasi, lihat catatan 50

*)Reclassified, see note 50

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2.f, 2.q, 19, 44.a, 48.c, 48.e	179.230	134.726	Accounts payable
Utang kontraktor	2.f, 2.q, 20, 44.a, 48.e	560.316	457.783	Contractors payable
Utang pajak	2.o, 18.b	363.898	785.809	Taxes payable
Beban akrual	2.q, 22, 48.c, 44.a	8.120.532	5.224.379	Accrued expenses
Utang bank	2.f, 2.q, 23, 44.a, 48.e	4.499.415	1.853.174	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	2.f, 2.q, 24, 44.a, 48.c, 48.e	908.102	-	Non-bank financial institutions loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	2.f, 2.q, 23, 44.a, 48.e, 48.c	5.072.042	360.177	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	2.f, 2.q, 24, 44.a, 48.c, 48.e	200.000	-	Non-bank financial institutions loan
Utang obligasi	2.q, 25, 48.e, 48.c	-	1.100.350	Bonds payable
Liabilitas pembebasan tanah	2.f, 2.q, 26, 48.c, 48.e	1.298.843	838.542	Land acquisition liabilities
Liabilitas sewa	2.i, 2.n, 27, 48.c, 48.e	72.631	29.379	Lease liabilities
Provisi pelapisan jalan tol	2.l, 2.w, 28	541.854	493.242	Provision for overlay
Pendapatan diterima dimuka	29	46.724	139.659	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja	2.p, 30	1.794	1.794	Employee benefits liability
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	2.f, 2.q, 21, 48.c, 48.e	955.782	723.974	Other short-term financial liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		22.821.163	12.142.988	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	2.o, 18.c	5.651.292	1.634.980	Deferred tax liabilities
Utang kontraktor jangka panjang	2.f, 2.q, 20, 44.a, 48.c, 48.e	488.130	213.454	Long-term contractors payable
Beban akrual jangka panjang	2.f, 2.q, 22, 44.a, 48.c, 48.e	715.029	693.945	Long-term accrued expenses
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	2.f, 2.q, 23, 44.a, 48.e	57.046.445	46.687.743	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	2.f, 2.q, 24, 44.a, 48.c, 48.e	-	200.000	Non-bank financial institutions loan
Utang obligasi	2.q, 25, 48.c, 48.e	897.353	895.770	Bonds payable
Liabilitas pembebasan tanah	2.f, 2.q, 26, 48.e	251.067	859.008	Land acquisition liabilities
Liabilitas sewa	2.h, 2.n, 27, 48.c, 48.e	57.385	91.114	Lease liabilities
Provisi pelapisan jalan tol	2.l, 2.w, 28	731.649	475.964	Provision for overlay
Pendapatan diterima dimuka	29	73.683	-	Unearned revenue
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.p, 30	1.316.108	1.256.108	Long-term employee benefits liabilities
Liabilitas derivatif	2.q, 2.r, 31	67.171	90.748	Derivative liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	2.q, 48.c, 48.e	284.308	275.971	Other long term liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		67.579.620	53.374.805	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		90.400.783	65.517.793	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham				Capital stock - Rp500 par value (full amount) per share
Modal dasar 19.040.000.000 saham				Authorized - 19,040,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham seri A Dwiwarna dan 7.257.871.199 saham seri B	32	3.628.936	3.628.936	Issued and fully paid - 1 series A Dwiwarna share and 7,257,871,199 series B shares
Tambahan modal disetor - neto	33	3.997.085	3.997.085	Additional paid in capital - net
Selisih atas transaksi entitas non-pengendali		(51.064)	(46.482)	Difference from non-controlling interest transaction
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya		8.971.304	8.971.304	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		13.697.656	7.453.482	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain:				Other comprehensive income:
Kerugian yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar		(1.166.806)	(1.049.514)	Unrealized loss on financial assets at fair value
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	2.q, 2.r, 31	(50.675)	(100.596)	Measurement of fair value derivative for cashflow hedge
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.p, 30	(1.134.999)	(1.028.612)	Remeasurements of long-term employee benefits liability
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		27.891.437	21.825.603	Net Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	35.a	11.019.769	3.795.786	Non-Controlling Interests
TOTAL EKUITAS		38.911.206	25.621.389	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		129.311.989	91.139.182	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan tol	2.t, 36	13.948.029	12.443.950	Toll operating revenues
Pendapatan usaha lainnya	2.t, 36	1.617.953	1.338.608	Other operating revenues
Pendapatan konstruksi	2.t, 37	5.752.623	2.800.291	Construction revenue
Total		21.318.605	16.582.849	Total
BEBAN POKOK PENDAPATAN				COST OF REVENUES
Beban tol dan usaha lainnya	2.t, 38	(6.643.256)	(6.391.616)	Toll and other operating expenses
Beban konstruksi	2.t, 37	(5.716.823)	(2.773.136)	Construction expense
Total		(12.360.079)	(9.164.752)	Total
LABA BRUTO		8.958.526	7.418.097	GROSS PROFIT
Penghasilan keuangan	2.t, 40	255.966	152.421	Finance income
Penghasilan lain-lain	2.t, 40	150.107	238.004	Other income
Beban umum dan administrasi	2.t, 39	(2.007.934)	(1.934.783)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	2.t, 41	(120.097)	(708.320)	Other expenses
Beban pajak atas penghasilan keuangan	2.o, 40	(30.675)	(27.457)	Tax expense of finance income
Keuntungan dari nilai wajar investasi asosiasi	1.g	4.017.364	-	Gain on fair value of investment in associates
Kerugian dari nilai wajar investasi jangka pendek	1.g	(963.687)	-	Loss on fair value of short-term investments
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	1.g	1.058.750	-	Gain on bargain purchase
Keuntungan dari pelepasan investasi	1.f, 40	-	2.245.045	Gain on divestment
LABA USAHA		11.318.320	7.383.007	PROFIT FROM OPERATIONS
Biaya keuangan	2.q, 42	(3.592.352)	(3.885.342)	Finance costs - net
Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	2.h, 10	200.457	228.130	Share in net gain (loss) of associates and joint ventures
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		7.926.425	3.725.795	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Kini	2.o, 18.c	(867.313)	(1.261.086)	Current
Tangguhan	2.o, 18.c	(309.623)	(141.001)	Deferred
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(1.176.936)	(1.402.087)	TOTAL INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		6.749.489	2.323.708	PROFIT FOR THE YEAR
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE EXPENSE
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya				Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang		(131.347)	(219.139)	Remeasurements of long-term employee benefits liability
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama		(92)	(142)	Share in other comprehensive gain (loss) of associates and joint ventures
Pajak penghasilan terkait		25.398	23.062	Related tax
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - setelah pajak	2.p, 30	(106.041)	(196.219)	Remeasurements of long-term employee benefits liability - net of tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya				Item that will be reclassified to profit and loss in subsequent years
Kerugian yang belum direalisasi dari aset keuangan pada nilai wajar		(1.115.351)	(1.313.484)	Unrealized loss on financial assets at fair value
Penyesuaian reklasifikasi atas Investasi jangka pendek diukur nilai wajar	5	963.687	-	Reclassification adjustment on short term investment measured at fair value
Pengukuran nilai wajar derivatif lindung nilai arus kas	2.q, 2.r, 31	48.884	5.939	Measurement of fair value derivative for cashflow hedge
Bagian atas laba (rugi) komprehensif lain atas asosiasi dan ventura bersama		11.895	(10.242)	Share in other comprehensive gain (loss) of associates and joint ventures
Pajak penghasilan terkait		33.986	7.914	Related tax
Subtotal pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya		(56.899)	(1.309.873)	Subtotal Item that will be reclassified to profit and loss in subsequent years
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		(162.940)	(1.506.092)	OTHER COMPREHENSIVE EXPENSE FOR THE YEAR
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		6.586.549	817.616	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		6.793.551	2.746.884	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(44.062)	(423.176)	Non-controlling interest
TOTAL		6.749.489	2.323.708	TOTAL
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		6.619.793	1.239.322	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	35	(33.244)	(421.706)	Non-controlling interest
TOTAL		6.586.549	817.616	TOTAL
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	2.s, 43	936	378	EARNINGS PER SHARE (FULL RUPIAH)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASHFLOWS
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2023	2022 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pendapatan tol	6, 29, 36, 44.a	13.957.336	12.459.781	Cash receipts from toll revenues
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	28, 36	1.561.622	1.191.174	Cash receipts from other revenues
Pembayaran kepada pemasok	8,17,18,19, 20, 38, 39	(3.710.254)	(3.463.136)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	18,30,38, 39	(2.248.918)	(1.843.883)	Cash paid to employees
Pembayaran biaya pelapisan ulang	29,39	(651.833)	(412.303)	Payment of overlay
Kas Neto Diperoleh dari Operasi		8.907.953	7.931.633	Net Cash Generated from Operations
Pembayaran pajak penghasilan	18, 38, 39	(1.297.085)	(835.321)	Payment of income taxes
Penerimaan bunga	40	225.291	917.842	Receipts from interest income
Pembayaran bunga	22, 42	(3.670.203)	(3.991.947)	Payment of interests
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		4.165.956	4.022.207	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Dampak kombinasi bisnis	1.g	366.494	-	Impact of business combination
Penerimaan atas pelepasan investasi di Entitas Anak dan Asosiasi		-	4.217.916	Proceeds from disposal of investment in a Subsidiaries and Associates
Penambahan hak pengusahaan jalan tol	13, 37, 38, 39	(5.641.190)	(4.367.426)	Acquisitions of toll road concession rights
Penambahan aset takberwujud lainnya	14	(67.713)	(61.804)	Acquisitions of other intangible assets
Penambahan piutang talangan tanah kepada Pemerintah	44	(83.596)	(461.847)	Addition of land bridging fund to the Government
Pencairan dana dibatasi penggunaannya - neto	9	22.689	279.299	Disbursement of restricted fund - net
Penambahan investasi asosiasi dan ventura bersama	10	(704.529)	(371.625)	Addition of investment in associates and joint ventures - net
Penerimaan dividen atas Investasi Asosiasi	10	-	1.822	Receipt of dividends on investment in associates
Penambahan aset tetap	11	(74.372)	(53.593)	Acquisitions of fixed assets
Penerimaan atas penjualan aset tetap		34.493	16.073	Proceeds from disposal of fixed assets
Perolehan properti investasi	12	(227.701)	(207.484)	Acquisitions of property investment
Penambahan uang muka setoran modal aset keuangan	17	(2.365)	-	Addition of advance payments for capital investment in financial assets
Penerimaan dividen atas aset keuangan	40	17.773	10.866	Receipt of dividends on financial assets
Penambahan investasi aset keuangan	16	-	(278.345)	Addition of investment in financial assets
Penambahan aset tidak lancar lainnya	17	(58.383)	(53.490)	Acquisitions of other non-current assets
Penerimaan pelunasan pinjaman entitas asosiasi dan ventura bersama	5	-	621.178	Payment receipt of associates and joint ventures receivables
Pelepasan investasi jangka pendek		-	125.391	Disposal of short-term investment
Penambahan investasi jangka pendek	5	(1.905.953)	(1.056.602)	Addition of short-term investment
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(8.324.353)	(1.639.671)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank	23	17.673.280	10.786.708	Proceeds from bank loans
Penerimaan utang lembaga keuangan bukan bank		908.102	-	Proceeds from non-bank financial institution loan
Penerimaan dari penerbitan saham di entitas anak oleh pihak non-pengendali	24	102.699	244.892	Proceeds from issuance of shares in a subsidiaries by non-controlling interests
Pembayaran utang bank	23	(16.567.983)	(9.863.478)	Payments of bank loans
Pembayaran utang lembaga keuangan bukan bank	24	-	(1.149.300)	Payments of non-bank financial institution loan
Pembayaran utang obligasi	25	(1.100.350)	-	Payment of bonds
Liabilitas pembebasan tanah	26	(147.640)	-	Land acquisition liabilities
Pembayaran liabilitas sewa	27	(144.774)	(76.710)	Payment of lease liability
Pembayaran pinjaman kepada pemegang saham non-pengendali		-	(4.021)	Payment to non-controlling shareholders loan
Pembayaran dividen		(555.104)	(148)	Payment of dividend
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		168.230	(62.057)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(3.990.167)	2.320.479	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan Setara Kas dari Entitas Anak yang Didekonsolidasikan		-	(170.450)	Cash and Cash Equivalents of Deconsolidated Subsidiaries
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4	8.429.118	6.279.089	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	4.438.951	8.429.118	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*)Direklasifikasi, lihat catatan 50

*)Reclassified, see note 50

Transaksi non-kas dan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan disajikan di Catatan 49.

Non-cash transactions and reconciliation of liabilities arising from financing activities are presented in Note 49.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perusahaan”) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia mengenai pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan, tanggal 27 Februari 1978). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi, S.H., No. 1 tanggal 1 Maret 1978. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 766 dan 767, tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1982, tambahan No. 1138.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0091890 tanggal 14 Februari 2023 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Dewan Komisaris dan Direksi diungkapkan pada Catatan 1.d.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan usaha Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

1. GENERAL

a. The Company’s establishment

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “Company”) was established under the Government Regulation of the Republic of Indonesia (the “Government”) No. 4 Year 1978 regarding the State Capital Investment for the establishment of a State-Owned Company (Persero) in the area of management, maintenance and development of toll roads, and the detailed management regulations (State Gazette No. 4 Year 1978 in conjunction with the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 90/KMK.06/1978 regarding the Determination of the Share Capital of the Company dated February 27, 1978). The Company was established based on Notarial Deed No. 1 dated March 1, 1978 of Kartini Mulyadi, S.H., The Deed of Establishment was authorized by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. Y.A.5/130/1 dated February 22, 1982 and was filed in Jakarta High Court No. 766 and 767 on March 2, 1982 and was published in the State Gazette No. 73 dated September 10, 1982, addition No. 1138.

The Company’s articles of association has been amended several times, the last amendment of which was under notarized under Notarial Deed No. 30 dated February 14, 2023 from Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. and a letter of endorsement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0091890 dated February 14, 2023 regarding the change in Directors and Commissioners, Boards of Commissioners and Directors are disclosed in the Note 1.d.

According to Article 3 of the Company’s articles of association, its scope of business is mainly to engage in performing and assisting the Government’s programs and policies in economy sector and generally in national development, especially in development of toll roads and all their supporting facilities while complying to the principles of limited liability company.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- (ii) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain; dan
- (iii) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, baik secara langsung maupun melalui penyertaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada tahun 1978.

Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. Perusahaan mengoperasikan 9 ruas jalan tol yang dikelola oleh dua regional dengan rincian sebagai berikut:

Regional/ <i>Regional</i>	Ruas Jalan Tol/ <i>Toll Road Sections</i>	Panjang Jalan/ <i>Length</i> (KM)	Mulai Konsesi (Tahun)/ <i>Start of Concession</i> (Year)	Periode Masa Konsesi (Tahun)/ <i>Concession</i> <i>Period</i> (Year)
Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad (RJMT)	Jakarta - Bogor - Ciawi	59	2005	40
	Jakarta - Tangerang	33	2005	40
	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14	2005	40
	Cawang - Tomang - Pluit	24	2005	40
	Cikampek - Padalarang	59	2005	40

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

To achieve these objectives, the Company performs the following activities:

- (i) Performs technical planning for construction, operation and/or maintenance of toll road;
- (ii) Organizes the land in toll road area (Rumijatot) and the land along the Rumijatot designated for vehicle rest area and service including the facilities and other businesses operating there either separately or in cooperation with other parties; and
- (iii) Performs other activities and business in order to utilize and develop the Company's resources, either directly or through investments, subject to laws and regulations.

The Company started its commercial operations in 1978.

The Company runs its operations based on Law No. 38 Year 2004 about the Road and PP No. 15 Year 2005 regarding Toll road management authority of the Government. Certain Government authority in the administration of toll roads are implemented by the Indonesia Toll Road Authority (BPJT). Toll road concession are granted to state-owned enterprises and/or regional owned enterprises and/or private companies. Concession are granted by the Government to the business entities through transparent and open tender. The Company's head office is located at Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. The Company operates 9 toll roads, which are managed by its two regions, with details as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

a. The Company's establishment (continued)

Regional/ Regional	Ruas Jalan Tol/ Toll Road Sections	Panjang Jalan/ Length (KM)	Mulai Konsesi (Tahun)/ Start of Concession (Year)	Periode Masa Konsesi (Tahun)/ Concession Period (Year)
Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad (RJMT)	Padalarang - Cileunyi	64	2005	40
	Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR Seksi Non S)	36	2005	40
	Ulujami Pondok Aren	14	2005	40
Regional Jasamarga Nusantara Tollroad (RJNT)	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	43	2005	40

b. Penawaran umum Perusahaan

b. The Company's initial public offering

Pada tanggal 1 November 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam - LK), selanjutnya menjadi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, melalui Surat No. S-5526/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) sebanyak 2.040.000.000 saham atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) dengan harga penawaran sebesar Rp1.700 (Rupiah penuh) per saham melalui pasar modal dan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (selanjutnya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia).

On November 1, 2007, the Company received from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam - LK), currently known as the Indonesian Financial Services Authority, in its notice letter No. S-5526/BL/2007, which stated the effectivity to conduct an Initial Public Offering (IPO) of 2,040,000,000 Series B shares with par value of Rp500 (full Rupiah) of the Company at an offering price per share of Rp1,700 (full Rupiah) through capital market and registered both in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (subsequently combined as the Indonesia Stock Exchange).

Sejak penawaran umum perdana sampai dengan akhir tahun pelaporan, Perusahaan telah melakukan aksi korporasi sebagai berikut:

Since its initial public offering until end of reporting year, the Company has made the following corporate actions:

1. Pembelian kembali saham Perusahaan pada 24 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 dilakukan mengingat kondisi pasar saham saat itu berpotensi krisis dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menurun cukup signifikan sehingga memberikan peluang pada Perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan dalam hal ini dibantu oleh PT Bahana Securities sebagai Perusahaan Wakil Perantara Perdagangan Efek. Dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk membeli kembali 24.523.500 lembar saham (Treasury Stock) sejumlah Rp21.837.

1. Buy back of the Company's shares on October 24, 2008 until January 12, 2009 was done considering the condition of the stock market, indication of potential crisis where the Composite Stock Price Index (CSPI) in Indonesia Stock Exchange (IDX) significantly decreased thus providing an opportunity for the Company to buy back its shares subject to the ability of the Company and applicable regulations. In this case, the Company was aided by PT Bahana Securities as its Corporate Broker Securities Trading. Funds issued by the Company to buy back 24,523,500 shares (Treasury Stock) amounted to Rp21,837.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum Perusahaan (lanjutan)

2. Sesuai dengan Poin 4D Peraturan Bapepam-LK No. KEP-105/BL/2010, Peraturan XI.B2 perihal Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka *treasury stock* tersebut telah memasuki periode wajib menjual (sudah dikuasai Perusahaan selama 3 tahun) dan wajib untuk dijual kembali. Perusahaan dalam penjualan kembali saham *Treasury* dibantu oleh PT Danareksa Sekuritas. Masa penjualan berlangsung dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012.
3. Sesuai dengan berita acara rapat Perseroan yang dimuat dalam Akta Notaris No. 139 tanggal 29 Agustus 2016, pemegang saham menyepakati peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Aksi korporasi Perusahaan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam surat No. S-337/D.01/2016 tanggal 18 November 2016, sehingga jumlah saham Perusahaan meningkat dari 6.800.000.000 menjadi 7.257.871.200 lembar saham. Perubahan jumlah saham Perusahaan tersebut tertuang dalam Akta Notaris No. 39 tanggal 20 Desember 2016.

Dana yang diperoleh Perusahaan akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan tol, khususnya tiga ruas jalan tol baru yang akan dibangun, yaitu:

- a. Sekitar 50% untuk ruas Semarang - Batang sepanjang 75 km;
- b. Sekitar 30% untuk ruas Pandaan - Malang sepanjang 37,6 km; dan
- c. Sekitar 20% untuk ruas Jakarta - Cikampek II Elevated sepanjang 36,4 km.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's initial public offering (continued)

2. Based on Point 4D of Bapepam-LK Regulation No. KEP-105/BL/2010, XI.B2 Regulations regarding Buy Back Shares issued by the Issuer or Public Company, therefore, the Company has reached the maximum period of holding its treasury stock (already held by the Company for 3 years) and it was mandatory for resale. The Company was assisted by PT Danareksa Sekuritas in the resale of treasury shares. Sales period lasted from April 5, 2012 to June 25, 2012.
3. In accordance to minutes of meeting contained in Notarial Deed No. 139 dated August 29, 2016, shareholders of the Company agreed the increase of the Company's issued and fully paid capital through Rights Issue. The corporate action were authorized by the Financial Services Authorization on its letter No. S-337/D.01/2016 dated November 18, 2016, consequently the Company's share increased from 6,800,000,000 to 7,257,871,200 shares. The changes were stated on Notarial Deed No. 39 dated December 20, 2016.

Funds generated by the Company will be used for the funding of toll road construction, particularly for three new toll roads to be build, as follows:

- a. Approximately 50% for Semarang - Batang toll road round 75 km;
- b. Approximately 30% for Pandaan - Malang toll road round 37.6 km; and
- c. Approximately 20% for Jakarta - Cikampek II Elevated round 36.4 km.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Penawaran umum obligasi dan surat berharga komersial Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki jumlah utang obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp899.650 dan Rp2.000.000 dengan rinciannya sebagai berikut:

Obligasi & Surat berharga/ Bonds & commercial paper	2023	2022	Tenor (Tahun/ Years)	Tanggal Penerbitan/ Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Status
Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga 2020/ Continuing Public Offering Bond II PT Jasa Marga 2020						
- Seri A/ Series A	-	1.100.350	3	8 September 2020/ September 8, 2020	8 September 2023/ September 8, 2023	Lunas/ Paid
- Seri B/ Series B	286.000	286.000	5	8 September 2020/ September 8, 2020	8 September 2025/ September 8, 2025	Belum Lunas/ Not Yet Paid
- Seri C/ Series C	90.050	90.050	7	8 September 2020/ September 8, 2020	8 September 2027/ September 8, 2027	Belum Lunas/ Not Yet Paid
- Seri D/ Series D	523.600	523.600	10	8 September 2020/ September 8, 2020	8 September 2030/ September 8, 2030	Belum Lunas/ Not Yet Paid
Total	899.650	2.000.000				

c. The Company's public bonds and commercial paper offering

As of December 31, 2023 and 2022, the Company had a total amount of outstanding bonds amounted to Rp899,650 and Rp2,000,000 as follows:

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

d. Boards of commissioners and directors, audit committee and employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors was as follows:

	2023	2022
<u>Dewan Komisaris/Board of Commissioners</u>		
Komisaris Utama dan Komisaris Independen/ President and Independent Commissioner	Mohammad Zainal Fatah	Yuswanda Arsyad Tumenggung
Wakil Komisaris/ Deputy Commissioner	-	Zulfan Lindan
Komisaris/ Commissioner	-	Anita Firmanti Eko Susetyowati
Komisaris/ Commissioner	M. Roskanedi	M. Roskanedi
Komisaris/ Commissioner	Raja Erizman	Raja Erizman
Komisaris/ Commissioner	-	Yohanes Baptista Satya Nugraha
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Chandra Wijaya	-
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Seppalga Ahmad	-
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Marsetio	-
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Abdul Rachman	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit
serta karyawan (lanjutan)**

**d. Boards of commissioners and directors,
audit committee and employees (continued)**

	2023	2022
<u>Direksi/Directors</u>		
Direktur Utama/ <i>President Director</i>	Subakti Syukur	Subakti Syukur
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ <i>Finance and Risk Management Director</i>	Pramitha Wulanjani	Ade Wahyu
Direktur Pengembangan Usaha/ <i>Business Development Director</i>	Mohamad Agus Setiawan	Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis/ <i>Business Director</i>	Reza Febriano	Reza Febriano
Direktur Operasi/ <i>Operations Director</i>	Fitri Wiyanti	Fitri Wiyanti
Direktur Human Capital & Transformasi/ <i>Director of Human Capital & Transformation</i>	Bagus Cahya Arinta B.	Bagus Cahya Arinta B.

Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

The compositions of the audit committee are as follows:

	2023	2022
<u>Komite Audit/ Audit Committee</u>		
Ketua/ <i>Chairman</i>	Chandra Wijaya	Yuswanda A. Temenggung
Anggota/ <i>Members</i>	Seppalga Ahmad	Anita Firmanti Eko Susetyowati
Anggota/ <i>Members</i>	Mohammad Fahmi Arkanuddin	Agung Nugroho S
Anggota/ <i>Members</i>	Siti Purnama Rizki	Imbuh Sulistyarini

Susunan Sekretaris Perusahaan dan Ketua
Internal Audit adalah sebagai berikut:

*The compositions of the Corporate Secretary
and Head of the Internal Audit are as follows:*

	2023	2022
<u>Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary</u>	Nixon Sitorus	Nixon Sitorus
<u>Ketua Internal Audit/ Head of the Internal Audit</u>	Agung Laksana Pranata	Siti Sarah

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,
Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya
secara bersama-sama disebut "Kelompok
Usaha") memiliki 7.949 dan 7.990 karyawan.

*As of December 31, 2023 and 2022, the
Company and the subsidiaries (collectively
referred to hereinafter as "the Group") had
7,949 and 7,990 employees, respectively.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan

e. Consolidated subsidiaries

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan, secara langsung, adalah sebagai berikut:

The Company's subsidiaries, directly owned, are as follows:

No.	Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in millions of rupiah)	
				2023	2022			2023	2022
1.	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (LJL), berdiri tanggal 22 Desember 2000/ established on December 22, 2000	Jasa pengoperasian jalan tol/ Toll road operation services	Bekasi	99,96	99,96	1 Oktober 2001/ October 1, 2001	-	34.486	36.130
2.	PT Marga Sarana Jabar (MSJ), berdiri tanggal 11 Mei 2007/ established on May 11, 2007	Pengusahaan ruas jalan tol Bogor Outer Ring Road/ Bogor Outer Ring Road toll road concession holder	Bogor	55,00	55,00	23 November 2009/ November 23, 2009	50	3.307.265	3.267.854
3.	PT Marga Trans Nusantara (MTN), berdiri tanggal 14 Mei 2008/ established on May 14, 2008	Pengusahaan ruas jalan tol Kunciran - Serpong/ Kunciran - Serpong toll road concession holder	Tangerang Selatan	60,00	60,00	20 Desember 2019/ December 20, 2019	35	4.091.943	4.072.070
4.	PT Jasmarga Kunciran Cengkareng (JKC), berdiri tanggal 14 Mei 2008/ established on May 14, 2008	Pengusahaan ruas jalan tol Kunciran - Cengkareng/ Kunciran - Cengkareng toll road concession holder	Tangerang	78,53	78,53	11 November 2021/ November 11, 2021	35	5.434.832	5.488.370
5.	PT Jasmarga Tollroad Maintenance (JMTM), berdiri tanggal 26 Agustus 1988/ established on August 26, 1988	Pengusahaan jasa konstruksi dan Pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan/ Services in toll road construction and maintenance, toll road equipments rental, and vehicles rental	Jakarta	99,82	99,82	10 Februari 1989/ February 10, 1989	-	2.644.488	1.919.830
6.	PT Jasmarga Bali Tol (JBT), berdiri tanggal 22 Agustus 2011/ established on August 22, 2011	Pengusahaan ruas jalan tol Nusa Dua - Tanjung Benaol/ Nusa Dua - Tanjung Benaol toll road concession holder	Bali	64,44	64,44	1 Oktober 2013/ October 1, 2013	45	1.940.424	1.909.164
7.	PT Jasmarga Related Business (JMRB), berdiri tanggal 15 Januari 2013/ established on January 15, 2013	Pengembangan bisnis properti/ Business development in property	Jakarta	99,94	99,94	15 Januari 2013/ January 15, 2013	-	2.280.121	2.184.176
8.	PT Jasmarga Kualanamu Tol (JMKT), berdiri tanggal 25 November 2014/ established on November 25, 2014	Pengusahaan ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing tinggi/ Medan-Kualanamu-Tebing tinggi toll road concession holder	Deli Serdang	55,00	55,00	13 Oktober 2017/ October 13, 2017	40	4.072.786	3.972.723

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**e. Entitas anak yang dikonsolidasikan
(lanjutan)**

e. Consolidated subsidiaries (continued)

No.	Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in millions of rupiah)	
				2023	2022			2023	2022
9	PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), berdiri tanggal 10 Juli 2008/ established on July 10, 2008	Pengusahaan ruas jalan tol Serpong - Cinere/ Serpong - Cinere toll road concession holder	Tangerang Selatan	55,00	55,00	2 Juni 2021/ June 2, 2021	35	3.453.921	3.305.258
10	PT Jasamarga Tollroad Operator (JTO), berdiri tanggal 21 Agustus 2015/ established on August 21, 2015	Jasa pengoperasian jalan tol/ Toll road operation services	Jakarta	99,98	99,98	31 Desember 2015/ December 31, 2015	-	1.497.041	1.309.010
11	PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), berdiri tanggal 6 Juni 2016/ established on June 6, 2016	Pengusahaan ruas jalan tol Manado - Bitung/ Manado - Bitung toll road concession holder	Manado	64,97	64,97	30 Oktober 2020/ October 30, 2020	40	4.551.816	4.699.853
12	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS), berdiri tanggal 6 Juni 2016/ established on June 6, 2016	Pengusahaan ruas jalan tol Balikpapan - Samarinda/ Balikpapan - Samarinda toll road concession holder	Balikpapan	67,39	67,39	14 Juni 2020/ June 14, 2020	50	9.727.438	9.986.530
13	PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), berdiri tanggal 2 Juni 2017/ established on June 2, 2017	Pengusahaan ruas jalan tol Trans Jawa/ Trans Jawa toll road concession holder	Jakarta	99,00	99,00	2 Juni 2017/ June 2, 2017	-	60.972.603	26.040.960
14	PT Jasamarga Japek Selatan (JJS), berdiri tanggal 29 Desember 2017/ established on December 29, 2017	Pengusahaan ruas jalan tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan/ Jakarta - Cikampek II South Side toll road concession holder	Jakarta	90,97	90,97	Tahap konstruksi/ Under construction	35	8.544.948	6.432.102
15	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), berdiri tanggal 29 Desember 2017/ established on December 29, 2017	Pengusahaan ruas jalan tol Probolinggo - Banyuwangi/ Probolinggo - Banyuwangi toll road concession holder	Jakarta	94,93	94,93	Tahap konstruksi/ Under construction	50	2.253.693	266.823
16	PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), berdiri tanggal 11 November 2020/ established on November 11, 2020	Pengusahaan ruas jalan tol Yogyakarta - Bawen/ Yogyakarta - Bawen toll road concession holder	Jakarta	63,15	60,00	Tahap konstruksi/ Under construction	40	3.181.299	1.040.142
17	PT Jasamarga Akses Patimban (JAP), berdiri tanggal 16 Januari 2023/ established on January 16, 2023	Pengusahaan ruas jalan tol Akses Patimban/ Akses-Patimban toll road concession holder	Jakarta	57,17	-	Tahap pengembangan/ Under development	50	986.255	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

**e. Entitas anak yang dikonsolidasikan
(lanjutan)**

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan secara tidak langsung melalui JMRB dan JTT adalah sebagai berikut:

The Company's subsidiaries which indirectly owned through JMRB and JTT are as follows:

No.	Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in millions of rupiah)	
				2023	2022			2023	2022
1	PT Asiana Jakarta Properti (AJP), berdiri tanggal 19 September 2012/ established on September 19, 2012	Pembangunan properti yaitu perumahan, gedung perkantoran, dan apartemen/ Construction of property including residential, office building and apartment	Jakarta	99,48	99,48	19 September 2012/ September 19, 2012	-	695.308	685.110
2	PT Jasamarga Restarea Batang (JRB), berdiri tanggal 8 Januari 2019/ established on January 8, 2019	Pengelolaan tempat peristirahatan dan pelayanan/ Rest area management	Jakarta	89,08	89,08	1 Maret 2019/ March 1, 2019	-	113.769	118.483
3	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM), berdiri tanggal 19 Agustus 1994/ established on August 19, 1994	Pengusahaan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto/ Surabaya - Mojokerto toll road concession holder	Sidoarjo	55,51	55,51	26 Agustus 2011/ August 26, 2011	42	4.899.189	4.948.484
4	PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP), berdiri tanggal 28 Juni 2010/ established on June 28, 2010	Pengusahaan ruas jalan tol Gempol - Pasuruan / Gempol - Pasuruan toll road concession holder	Pandaan	99,35	99,35	3 Agustus 2017/ August 3, 2017	45	3.477.940	3.562.714
5	PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN), berdiri tanggal 24 Maret 2009/ established on March 24, 2009	Pengusahaan ruas jalan tol Solo - Ngawi/ Solo - Ngawi toll road concession holder	Solo	59,53	42,62	26 Juni 2018/ June 26, 2018	40	10.029.508	10.319.711
6	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK), berdiri tanggal 24 Maret 2009/ established on March 24, 2009	Pengusahaan ruas jalan tol Ngawi - Kertosono/ Ngawi - Kertosono toll road concession holder	Madiun	59,60	45,03	1 Mei 2018/ May 1, 2018	35	4.870.831	4.814.203
7	PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), berdiri tanggal 21 April 2016/ established on April 21, 2016	Pengusahaan ruas jalan tol Semarang - Batang/ Semarang - Batang toll road concession holder	Semarang	59,80	44,18	12 November 2018/ November 12, 2018	45	12.519.352	12.746.879
8	PT Lintas Marga Jawa (LMJ), berdiri tanggal 26 Februari 2018/ established on February 26, 2018	Sebagai special purpose company terkait pengelolaan saham JSN, JNK, JSB/ As a special purpose company related to the management of JSB, JSN, JNK Shares	Jakarta	97,32	-	26 Februari 2018/ February 26, 2018	-	1.989.627	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan

PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 7 Agustus 2023 dari Notaris Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn. dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0110304 tanggal 25 Agustus 2023, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp13.424 atau sebanyak 13.423.910 lembar saham secara non-tunai atau berupa inbreng atas Aset Jasamarga Tollroad Command Center oleh Perusahaan dan sebesar Rp2 atau sebanyak 2.702 lembar saham secara tunai oleh Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga sehingga kepemilikan saham pada PT JMTO menjadi sebagai berikut:

1. Perusahaan sebagai pemilik atas 241.977.910 lembar saham atau setara dengan Rp241.978 yang mewakili 99,98% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan
2. Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga sebagai pemilik atas 48.702 lembar saham atau setara dengan Rp48 yang mewakili 0,02% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JMTO saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp1.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp250.000.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp242.026.

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year

PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO)

Based on Notarial Deed No. 19 dated August 7, 2023 from Notary Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn. and a letter of endorsement from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0110304 dated August 25, 2023, the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital of Rp13,424 or as many as 13,423,910 shares in non-cash or in the form of inbreng on the Jasamarga Tollroad Command Center by the Company and Rp2 or as many as 2,702 shares in cash by Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga so that share ownership in PT JMTO is as follows:

1. The Company as the owner of 241,977,910 shares or equivalent to Rp241,978 which represents 99.98% of the total issued shares; and
2. Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga as the owner of 48,702 shares or equivalent to Rp48 which represents 0.02% of the total issued shares.

The current capital structure of JMTO is as follows:

1. The nominal price per share is Rp1,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp250,000.
3. The issued capital is Rp242,026.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Japek Selatan (JJS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 21 Desember 2023 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dan surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162805 tanggal 27 Desember 2023, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp145.552 atau sebanyak 145.552 lembar saham secara tunai oleh Perusahaan dan sebesar Rp14.448 atau sebanyak 14.448 lembar saham secara tunai oleh PT Wiranusantara Bumi sehingga kepemilikan saham pada PT JJS menjadi sebagai berikut:

1. Perusahaan sebagai pemilik atas 2.354.528 lembar saham atau setara dengan Rp2.354.528 yang mewakili 90,97% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan
2. PT Wiranusantara Bumi sebagai pemilik atas 233.612 lembar saham atau setara dengan Rp233.612 yang mewakili 9,03% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JJS saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp1.000.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp2.588.140.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp2.588.140.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 6 September 2023 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dan surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0114693 tanggal 7 September 2023, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp22.800 atau sebanyak 22.800 lembar saham secara tunai oleh Perusahaan dan sebesar Rp1.200 atau sebanyak 1.200 lembar saham secara tunai oleh PT Brantas Abipraya sehingga kepemilikan saham pada PT JPB menjadi sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Japek Selatan (JJS)

Based on Notarial Deed No. 09 dated December 21, 2023 from Notary Rina Utami Djauhari, S.H., and a letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0162805 dated December 27, 2023, the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital of Rp145,552 or as many as 145,552 shares in cash by the Company and Rp14,448 or as many as 14,448 shares in cash by PT Wiranusantara Bumi so that share ownership in PT JJS is as follows:

1. The Company as the owner of 2,354,528 shares or equivalent to Rp2,354,528 which represents 90.97% of the total issued shares; and
2. PT Wiranusantara Bumi as the owner of 233,612 shares or equivalent to Rp233,612 which represents 9.03% of the total issued shares.

The current capital structure of JJS is as follows:

1. The par value per share is Rp1,000,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp2,588,140.
3. The issued capital is Rp2,588,140.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

Based on Notarial Deed No. 01 dated September 6, 2023 from Notary Rina Utami Djauhari, S.H., and a letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0114693 dated September 7, 2023, the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital of Rp22,800 or as many as 22,800 shares in cash by the Company and Rp1,200 or as many as 1,200 shares in cash by PT Brantas Abipraya so that share ownership in PT JPB is as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) (lanjutan)

1. Perusahaan sebagai pemilik atas 288.373 lembar saham atau setara dengan Rp288.373 yang mewakili 94,93% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
2. PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai pemilik atas 15.188 lembar saham atau setara dengan Rp15.188 yang mewakili 5% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan
3. PT Waskita Toll Road sebagai pemilik atas 200 lembar saham atau setara dengan Rp200 yang mewakili 0,07% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JPB saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp1.000.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp600.000.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp303.761.

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB)

Berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 18 April 2023 dari Notaris Inne Kusumawati, S.H., dan surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0059172 tanggal 4 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp108.000 atau sebanyak 108.000 lembar saham, menjadi sebagai berikut:

1. Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp42.960 atau sebanyak 42.960 lembar saham menjadikan Perusahaan sebagai pemilik atas 107.760 lembar saham atau setara dengan Rp107.760 yang mewakili 63,15% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp64.800 atau sebanyak 64.800 lembar saham yang mewakili 60,00% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) (continued)

1. The Company as the owner of 288,373 shares or equivalent to Rp288,373 which represents 94.93% of the total issued shares;
2. PT Brantas Abipraya (Persero) as the owner of 15,188 shares or equivalent to Rp15,188 which represents 5% of the total issued shares; and
3. PT Waskita Toll Road as the owner of 200 shares or equivalent to Rp200 which represents 0.07% of the total issued shares.

The current capital structure of JPB is as follows:

1. The par value per share is Rp1,000,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp600,000.
3. The issued capital is Rp303,761.

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB)

Based on Notarial Deed No. 05 dated April 18, 2023 from Notary Inne Kusumawati, S.H., and a letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0059172 dated May 4, 2023, the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital which was originally Rp108,000 or as many as 108,000 shares, to be as follows:

1. The Company increase the issued and paid-up capital of Rp42,960 or as many as 42,960 shares making the Company as the owner of 107,760 shares or equivalent to Rp107,760 representing 63.15% of the total issued shares, which was originally had Rp64,800 or as many as 64,800 shares representing 60.00% of the total issued shares;

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) (lanjutan)

2. PT Adhi Karya (Persero) Tbk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp8.950 atau sebanyak 8.950 lembar saham menjadikan PT Adhi Karya sebagai pemilik atas 22.450 lembar saham atau setara dengan Rp22.450 yang mewakili 13,16% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp13.500 atau sebanyak 13.500 lembar saham yang mewakili 12,50% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
3. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp8.950 atau sebanyak 8.950 lembar saham menjadikan PT Pembangunan Perumahan sebagai pemilik atas 22.450 lembar saham atau setara dengan Rp22.450 yang mewakili 13,16% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp13.500 atau sebanyak 13.500 lembar saham yang mewakili 12,50% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
4. PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pemilik atas 13.500 lembar saham atau setara dengan Rp13.500 yang mewakili 7,91% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan
5. PT Brantas Abipraya (Persero) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.790 atau sebanyak 1.790 lembar saham menjadikan PT Brantas Abipraya sebagai pemilik atas 4.490 lembar saham atau setara dengan Rp4.490 yang mewakili 2,63% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp2.700 atau sebanyak 2.700 lembar saham yang mewakili 2,50% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) (continued)

2. *PT Adhi Karya (Persero) Tbk increase the issued and paid-up capital of Rp8,950 or as many as 8,950 shares making PT Adhi Karya as the owner of 22,450 shares or equivalent to Rp22,450 which represents 13.16% of the total issued shares, which was originally had Rp13,500 or as many as 13,500 shares representing 12.50% of the total issued shares;*
3. *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk increase the issued and paid-up capital of Rp8,950 or as many as 8,950 shares making PT Pembangunan Perumahan as the owner of 22,450 shares or equivalent to Rp22,450 which represents 13.16% of the total issued shares, which originally had Rp13,500 or as many as 13,500 shares which represents 12.50% of the total issued shares;*
4. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk as the owner of 13,500 shares or equivalent to Rp13,500 which represents 7.91% of the total issued shares; and*
5. *PT Brantas Abipraya (Persero) increase the issued and paid-up capital of Rp1,790 or as many as 1,790 shares making PT Brantas Abipraya as the owner of 4,490 shares or equivalent to Rp4,490 which represents 2.63% of the total issued shares, which was originally had Rp2,700 or as many as 2,700 shares which represents 2.50% of the total issued shares.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) (lanjutan)

Struktur permodalan JJB saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp1.000.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp300.000.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp170.650.

PT Jasamarga Akses Patimban (JAP)

JAP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 16 Januari 2023 dibuat oleh Cindy Annisa Mulia, S.H., M.Kn. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-0004789.AH.01.01 tanggal 20 Januari 2023, dalam rangka melaksanakan perusahaan ruas jalan tol Akses Patimban. Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 23 November 2023 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dan surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0149031 tanggal 30 November 2023, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp25.000 atau sebanyak 25.000 lembar saham, menjadi sebagai berikut:

1. Perusahaan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp23.650 atau sebanyak 23.650 lembar saham menjadikan Perusahaan sebagai pemilik atas 37.400 lembar saham atau setara dengan Rp37.400 yang mewakili 57,17% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp13.750 atau sebanyak 13.750 lembar saham yang mewakili 55% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
2. PT Nusa Raya Cipta Tbk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp9.460 atau sebanyak 9.460 lembar saham menjadikan PT Nusa Raya Cipta Tbk sebagai pemilik atas 14.960 lembar saham atau setara dengan Rp14.960 yang mewakili 22,87% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp5.500 atau sebanyak 5.500 lembar saham yang mewakili 22% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

**PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB)
(continued)**

The current capital structure of JJB is as follows:

1. The par value per share is Rp1,000,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp300,000.
3. The issued capital is Rp170,650.

PT Jasamarga Akses Patimban (JAP)

JAP was established based on Notarial Deed No. 32 dated January 16, 2023 made by Cindy Annisa Mulia, S.H., M.Kn. and authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0004789.AH.01.01 dated January 20, 2023, aimed to develop the concession of the Akses Patimban toll road section. Based on Notarial Deed No. 07 dated November 23, 2023 from Notary Rina Utami Djauhari, S.H., and a letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0140031 dated November 30, 2023, the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital which was originally Rp25,000 or as many as 25,000 shares, to be as follows:

1. The Company increased its issued and paid-up capital by Rp23,650 or as many as 23,650 shares, making the Company the owner of 37,400 shares or equivalent to Rp37,400 which represents 57.17% of the total issued shares, which originally owned Rp13,750 or as many as 13,750 shares which represents 55% of the total issued shares;
2. PT Nusa Raya Cipta Tbk increased its issued and paid-up capital by Rp9,460 or as many as 9,460 shares, making PT Nusa Raya Cipta Tbk the owner of 14,960 shares or equivalent to Rp14,960 which represents 22.87% of the total issued shares, which originally owned Rp5,500 or as many as 5,500 shares which represents 22% of the total issued shares;

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

**PT Jasamarga Akses Patimban (JAP)
(lanjutan)**

3. PT Adhi Karya (Persero) Tbk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.580 atau sebanyak 2.580 lembar saham menjadikan PT Adhi Karya sebagai pemilik atas 4.080 lembar saham atau setara dengan Rp4.080 yang mewakili 6,24% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp1.500 atau sebanyak 1.500 lembar saham yang mewakili 6% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
4. PT PP (Persero) Tbk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.580 atau sebanyak 2.580 lembar saham menjadikan PT PP (Persero) Tbk sebagai pemilik atas 4.080 lembar saham atau setara dengan Rp4.080 yang mewakili 6,24% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp1.500 atau sebanyak 1.500 lembar saham yang mewakili 6% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
5. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pemilik atas 1.500 lembar saham atau setara dengan Rp1.500 yang mewakili 2,29% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan di JAP; dan
6. PT Subang Sejahtera meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.150 atau sebanyak 2.150 lembar saham menjadikan PT Subang Sejahtera sebagai pemilik atas 3.400 lembar saham atau setara dengan Rp3.400 yang mewakili 5,2% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan, yang semula memiliki Rp1.250 atau sebanyak 1.250 lembar saham yang mewakili 5% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JAP saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp1.000.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp100.000.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp65.420.

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

**PT Jasamarga Akses Patimban (JAP)
(continued)**

3. *PT Adhi Karya (Persero) Tbk increased its issued and paid-up capital by Rp2,580 or as many as 2,580 shares, making PT Adhi Karya the owner of 4,080 shares or equivalent to Rp4,080 which represents 6.24% of the total issued shares, which originally owned Rp1,500 or as many as 1,500 shares which represents 6% of the total issued shares;*
4. *PT PP (Persero) Tbk increased its issued and paid-up capital by Rp2,580 or as many as 2,580 shares making PT PP (Persero) Tbk the owner of 4,080 shares or equivalent to Rp4,080 which represents 6.24% of the total issued shares, which originally owned Rp1,500 or as many as 1,500 shares which represents 6% of the total issued shares;*
5. *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the owner of 1,500 shares or equivalent to Rp1,500 which represents 2.29% of the total shares issued in JAP; and*
6. *PT Subang Sejahtera increased its issued and paid-up capital by Rp2,150 or as many as 2,150 shares, making PT Subang Sejahtera the owner of 3,400 shares or equivalent to Rp3,400 which represents 5.2% of the total issued shares, which originally owned Rp1,250 or as many as 1,250 shares which represents 5% of the total issued shares.*

The current capital structure of JAP is as follows:

1. *The par value per share is Rp1,000,000 (full Rupiah).*
2. *Authorized capital of Rp100,000.*
3. *The issued capital is Rp65,420.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

Berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 27 Juli 2023 dari Notaris Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., komposisi kepemilikan saham pada JSN sebagai berikut:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol sebagai pemilik atas 72.035.758 lembar saham atau setara dengan Rp1.584.787 yang mewakili 43% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
2. Kings Key Limited sebagai pemilik atas 67.607.830 lembar saham atau setara dengan Rp1.487.372 yang mewakili 40% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan
3. PT Lintas Marga Jawa sebagai pemilik atas 29.375.987 lembar saham atau setara dengan Rp646.272 yang mewakili 17% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JSN saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp22.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp3.718.431.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp3.718.431.

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 27 Juli 2023 dari Notaris Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., komposisi kepemilikan saham pada JNK sebagai berikut:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol sebagai pemilik atas 34.070.766 lembar saham atau setara dengan Rp749.557 yang mewakili 45% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
2. Kings Key Limited sebagai pemilik atas 30.264.368 lembar saham atau setara dengan Rp665.816 yang mewakili 40% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

Based on Notarial Deed No. 20 dated July 27, 2023 from Notary Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., the composition of share ownership in JSN is as follows:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol as the owner of 72,035,758 shares or equivalent to Rp1,584,787 which represents 43% of the total issued shares;
2. Kings Key Limited as the owner of 67,607,830 shares or equivalent to Rp1,487,372 which represents 40% of the total issued shares; and
3. PT Lintas Marga Jawa as the owner of 29,375,987 shares or equivalent to Rp646,272 which represents 17% of the total issued shares.

The current capital structure of JSN is as follows:

1. The par value per share is Rp22,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp3,718,431.
3. The issued capital is Rp3,718,431.

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)

Based on Notarial Deed No. 21 dated July 27, 2023 from Notary Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., the composition of share ownership in JNK is as follows:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol as the owner of 34,070,766 shares or equivalent to Rp749,557 which represents 45% of the total issued shares;
2. Kings Key Limited as the owner of 30,264,368 shares or equivalent to Rp665,816 which which represents 40% of the total issued shares; and

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan (lanjutan)

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) (lanjutan)

3. PT Lintas Marga Jawa sebagai pemilik atas 11.325.786 lembar saham atau setara dengan Rp249.167 yang mewakili 15% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JNK saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp22.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp2.000.075.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp1.664.540.

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 5 Desember 2022 dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., komposisi kepemilikan saham pada JSB sebagai berikut:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol sebagai pemilik atas 1.846.112.128 lembar saham atau setara dengan Rp1.846.112 yang mewakili 44% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan;
2. Kings Bless Limited sebagai pemilik atas 1.662.045.760 lembar saham atau setara dengan Rp1.662.046 yang mewakili 40% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan; dan
3. PT Lintas Marga Jawa sebagai pemilik atas 670.506.512 lembar saham atau setara dengan Rp670.506 yang mewakili 16% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan.

Struktur permodalan JSB saat ini adalah sebagai berikut:

1. Harga nominal per lembar saham Rp1.000.000 (Rupiah penuh).
2. Modal dasar sebesar Rp4.346.858.
3. Modal ditempatkan sebesar Rp4.178.664.

1. GENERAL (continued)

f. Changes in ownership in subsidiaries during the year (continued)

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) (continued)

3. PT Lintas Marga Jawa as the owner of 11,325,786 shares or equivalent to Rp249,167 which represents 15% of the total issued shares.

The current capital structure of JNK is as follows:

1. The par value per share is Rp22,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp2,000,075.
3. The issued capital is Rp1,664,540.

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

Based on Notarial Deed No. 12 dated December 5, 2022 from Notary Mala Mukti, S.H., LL.M., the composition of share ownership in JSB is as follows:

1. PT Jasamarga Transjawa Tol as the owner of 1,846,112,128 shares or equivalent to Rp1,846,112 which represents 44% of the total issued shares;
2. Kings Bless Limited as the owner of 1,662,045,760 shares or equivalent to Rp1,662,046 which represents 40% of the total issued shares; and
3. PT Lintas Marga Jawa as the owner of 670,506,512 shares or equivalent to Rp670,506 which represents 16% of the total issued shares.

The current capital structure of JSB is as follows:

1. The par value per share is Rp1,000,000 (full Rupiah).
2. Authorized capital of Rp4,346,858.
3. The issued capital is Rp4,178,664.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kombinasi bisnis

Pada tanggal 27 Juli 2023, PT Jasamarga Transjawa Tol menerima pengalihan hak kepemilikan atas seluruh saham milik Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa pada PT Lintas Marga Jawa sebanyak 194.336.593 lembar saham. Pengalihan ini merupakan bagian dari pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (Catatan 5).

Kegiatan utama PT Lintas Marga Jawa adalah sebagai Perusahaan induk atas investasi saham pada tiga Perusahaan yang bergerak dalam pengusahaan jalan tol yaitu PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 15,62%, 16,91% dan 14,60%.

Setelah pengalihan ini, PT Jasamarga Transjawa Tol memperoleh pengendalian langsung dan tidak langsung atas PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri dengan persentase kepemilikan pada masing-masing sebesar 97,32%, 59,80%, 59,53% dan 59,60%.

Sebelum pengendalian diperoleh, PT Jasamarga Transjawa Tol memiliki kepemilikan langsung atas PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri yang mana Investasi ini diperhitungkan dengan menggunakan metode ekuitas (Catatan 10).

Sebagai bagian dari akuntansi kombinasi bisnis, Perusahaan mengukur kembali kepemilikan sebelumnya pada nilai wajar dan menggunakan nilai tersebut untuk menentukan nilai goodwill. Pengukuran kembali dihitung oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai independen Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), dalam laporannya No :

- a. 00505/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham JSN
- b. 00506/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham JNK
- c. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham JSB
- d. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham LMJ

dengan tanggal penilaian 31 Juli 2023 dan tanggal laporan penilaian 23 November 2023.

1. GENERAL (continued)

g. Business combination

On July 27, 2023, PT Jasamarga Transjawa Tol received the transfer of ownership rights to all shares belonging to the Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa to PT Lintas Marga Jawa totaling 194,336,593 shares. This transfer is part of the dissolution and liquidation of the Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (Note 5).

The main activity of PT Lintas Marga Jawa is as a holding company for share investments in three companies engaged in toll road operations, namely PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, with ownership percentages of 15.62%, 16.91% and 14.60%, respectively.

After this transfer, PT Jasamarga Transjawa Tol obtained direct and indirect control over PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri with ownership percentages of 97.32%, 59.80%, 59.53% and 59.60%, respectively.

Before control was obtained, PT Jasamarga Transjawa Tol had direct ownership of PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri which these investments were accounted for using the equity method (Note 10).

As part of business combination accounting, the Company remeasures its prior holdings at fair value and uses that value to determine the value of goodwill. The remeasurement was calculated by KJPP Suwendho Rinaldy & Partners, independent appraiser Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), in his report No:

- a. 00505/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JSN shares
- b. 00506/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JNK shares
- c. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JSB shares
- d. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of LMJ shares

with an assessment date of July 31, 2023 and an assessment report date of November 23, 2023.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

g. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar kepemilikan sebagai entitas asosiasi oleh PT Jasamarga Transjawa Tol yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>28 Juli 2023/ July 28, 2023</u>
Nilai wajar atas entitas	
Asosiasi yang sebelumnya dimiliki	7.752.591
Nilai tercatat investasi asosiasi	<u>(3.735.227)</u>
Keuntungan	<u>4.017.364</u>

Kerugian dari pengukuran kembali nilai wajar kepemilikan dari investasi jangka pendek oleh PT Jasamarga Transjawa Tol yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>28 Juli 2023/ July 28, 2023</u>
Nilai wajar atas investasi jangka pendek	1.929.240
Nilai tercatat investasi jangka pendek	<u>(2.892.927)</u>
Kerugian	<u>(963.687)</u>

Keuntungan atau kerugian kumulatif dari investasi jangka pendek yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi.

Pada saat tanggal akuisisi, nilai wajar aset bersih atas entitas yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

	<u>28 Juli 2023/ July 28, 2023</u>
Kas setara kas	366.494
Aset lancar	649.670
Aset tetap (Catatan 11)	34.111
Aset takberwujud - neto	
Hak pengusahaan jalan tol (Catatan 13)	37.972.418
Lainnya (Catatan 14)	233
Aset tidak lancar lainnya	185.976
Liabilitas jangka pendek	<u>(644.967)</u>
Liabilitas pajak tangguhan (Catatan 18.c)	<u>(3.766.073)</u>
Liabilitas jangka panjang	<u>(16.899.653)</u>
Nilai wajar aset bersih	<u>17.898.209</u>

Keuntungan dari pembelian dengan diskon atas akuisisi ditentukan sebagai berikut:

	<u>28 Juli 2023/ July 28, 2023</u>
Nilai wajar atas entitas asosiasi yang sebelumnya dimiliki	7.752.591
Nilai wajar atas investasi jangka pendek	1.929.240
Nilai wajar atas kepentingan non-pengendali	<u>7.157.628</u>
Total	<u>16.839.459</u>
Dikurangi :	
Nilai wajar aset bersih	<u>17.898.209</u>
Keuntungan pembelian dengan diskon	<u>(1.058.750)</u>

g. Business combination (continued)

The gain from remeasurement of fair value revaluation of ownership as an associated by PT Jasamarga Transjawa Tol which are recognized in profit or loss are as follows:

<i>Fair value of the ownership interest on investment in Associates that previously held</i>	
<i>Carrying amount of investment in associates</i>	
	Gain

The losses from from remeasurement of fair value of ownership of short-term investments by PT Jasamarga Transjawa Tol which are recognized in profit or loss are as follows:

<i>Fair value of short-term investment</i>	
<i>Carrying amount of short-term investment</i>	
	Loss

Cumulative gains or losses from short-term investments recognized as other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

As at the acquisition date, the fair value of net assets acquired of entities is as follows:

<i>Cash and cash equivalents</i>	
<i>Current assets</i>	
<i>Fixed assets (Notes 11)</i>	
<i>Intangible assets - net</i>	
<i>Toll road concession rights (Notes 13)</i>	
<i>Others (Notes 11)</i>	
<i>Non-current assets</i>	
<i>Current liabilities</i>	
<i>Deferred tax liabilities (Notes 18.c)</i>	
<i>Non-current liabilities</i>	
	Fair value of net assets

Gain from bargain purchase is determine as follow:

<i>Fair value of the ownership interest on investment in associates that previously held</i>	
<i>Fair value of short-term investment</i>	
<i>Fair value of non-controlling interest</i>	
	Total
Less:	
<i>Fair value of net assets</i>	
	Gain on bargain purchase

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasi dari nilai wajar saham yang dihitung oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai independen Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert) yang terdaftar di OJK, dalam laporannya No :

- a. 00505/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham JSN
- b. 00506/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham JNK
- c. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham JSB
- d. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian saham LMJ

dengan tanggal penilaian 31 Juli 2023 dan tanggal laporan penilaian 23 November 2023.

Nilai wajar dari aset bersih diestimasi dari nilai wajar aset takberwujud hak perusahaan jalan tol yang dihitung oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai independen Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), dalam laporannya No :

- a. 00502/2.0059-02/PP/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian aset JSN
- b. 00503/2.0059-02/PI/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian aset JNK
- c. 00504/2.0059-02/PP/05/0242/1/XI/2023 atas penilaian aset JSB

dengan tanggal penilaian 31 Juli 2023 dan tanggal laporan penilaian 23 November 2023.

Pendapatan PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri yang termasuk dalam laporan laba rugi sejak tanggal akuisisi sebesar Rp427.253.

Kontribusi laba dari PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri yang termasuk dalam laporan laba rugi sejak tanggal akuisisi sebesar Rp49.108.

Jumlah arus kas yang diperoleh berupa jumlah kas dan setara kas pada tanggal akuisisi dari PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri sebesar Rp366.494. Tidak terdapat arus kas keluar berupa imbalan yang dialihkan dalam proses kombinasi bisnis.

1. GENERAL (continued)

g. Business combination (continued)

The fair value of the non-controlling interest is estimated from fair value of shares calculated by KJPP Suwendho Rinaldy & Partners, independent appraiser Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), in his report No:

- a. 00505/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JSN shares
- b. 00506/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JNK shares
- c. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JSB shares
- d. 00507/2.0059-02/BS/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of LMJ shares with an assessment date of July 31, 2023 and an assessment report date of November 23, 2023.

The fair value of net assets is estimated from fair value of toll road concession rights calculated by KJPP Suwendho Rinaldy & Partners, independent appraiser Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), in his report No:

- a. 00502/2.0059-02/PP/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JSN assets
- b. 00503/2.0059-02/PI/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JNK assets
- c. 00504/2.0059-02/PP/05/0242/1/XI/2023 regarding the assessment of JSB assets with an assessment date of July 31, 2023 and an assessment report date of November 23, 2023.

The revenue of PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri which is included in the profit and loss statement since the date of acquisition is Rp427,253.

The profit contribution from PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri which is included in the profit and loss statement since the date of acquisition is Rp 49,108.

The amount of cash flow obtained in the form of cash and cash equivalents at the date of acquisition from PT Lintas Marga Jawa, PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri amounted to Rp366,494. There is no cash outflow in the form of consideration transferred in the business combination process.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION**

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Selain laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten diantara laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and regulation in Capital Market regulations including the Financial Services Authority Regulation/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the return given in exchange for assets.

Other than the consolidated statement of cash flows, the consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, using the historical cost, basis of accounting, except for certain accounts which are stated on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using the direct method, presents cash receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing, and financing activities.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is also the functional currency of the Group. The accounting policies applied are consistent between the consolidated financial statements years ended December 31, 2023 and 2022.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian interim meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.e, dimana Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas tersebut.

Laporan keuangan entitas anak disiapkan untuk tahun pelaporan yang sama dengan Perusahaan dan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendment and revised to standards which effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to PSAK 16: Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.

The implementation of the above standards had no material on the amounts reported for the current period or prior financial year.

d. Principles of consolidation

The interim consolidated financial statements include the accounts of the Group as disclosed in Note 1.e, in which the Company has control over those entities.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting year as that of the Company and using consistent accounting policies.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. Kekuasaan atas *investee* (misal, adanya hak yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- b. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- a. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- b. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- c. Hak suara dan hak suara potensial Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas anak perusahaan dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban atas anak perusahaan yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas entitas anak.

d. Principles of consolidation (continued)

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Group controls an investee if and only if the Group owns all of the following:

- a. Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);
- b. Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- c. The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
- b. Rights arising from other contractual arrangement; and
- c. The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laba rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada Kepentingan Non-Pengendali, walaupun hasil di Kepentingan Non-Pengendali (KNP) mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- c. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- g. Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengalihkan secara langsung ke defisit atau saldo laba.

Kombinasi bisnis dan *goodwill*

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

d. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the Non-Controlling Interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All material intercompany accounts and transactions, including unrealized gains or losses, if any, are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as one business entity.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, then:

- a. *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the Subsidiary;*
- b. *Derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- c. *Derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;*
- d. *Recognizes the fair value of the consideration received;*
- e. *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- f. *Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- g. *Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to the statement of profit or loss and other comprehensive income or deficit or retained earnings, as appropriate.*

Business combinations and *goodwill*

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable to the parent entity, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan termasuk dalam beban administrasi.

Kelompok Usaha menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka Kelompok Usaha mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih nilai lebih agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan.

d. Principles of consolidation (continued)

Business combinations and goodwill (continued)

A change in a parent's ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control is accounted for as an equity transaction (i.e., a transaction with owners in their capacity as owners).

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured at the aggregate value of the consideration transferred, measured at fair value on acquisition date and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

The Group determines whether a transaction or other event is a business combination that the assets acquired and liabilities assumed constitute a business. If the assets acquired are not a business, the Group accounts for the transaction or other event as an asset acquisition.

When the Group acquires a business, it classifies and determines the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities recognized.

If this consideration is lower than the fair value of the acquired subsidiary's net assets, the difference is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Kombinasi bisnis dan goodwill (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK.

e. Kas dan setara kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan setara kas" melainkan disajikan pada akun "Dana dibatasi penggunaannya" dan sebagai bagian dari "Aset Lancar" dan "Aset Tidak Lancar".

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata.

d. Principles of consolidation (continued)

Business combinations and goodwill (continued)

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-Generating Units (CGU) that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGU.

e. Cash and cash equivalents

Time deposits with maturities of three months or less at the time of placement, which are not restricted, are classified as "Cash Equivalents".

Restricted cash in banks and time deposits used for collateral are not classified as part of "Cash and cash equivalents" but presented in "Restricted funds" account as part of "Current Asset" and "Non-current Asset".

f. Transactions with related parties

The Group has transactions with certain parties which have related party relationships as defined under PSAK 7, "Related Party Disclosures".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the Note 44 to the consolidated financial statements.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined using the average method.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Persediaan (lanjutan)

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah untuk pengembangan, biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan *real estate* serta biaya-biaya pinjaman, jika ada. Pada saat dijual, semua biaya dialokasikan secara proporsional berdasarkan luas area masing-masing.

Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan kepada luas area yang dapat dijual.

Biaya perolehan bangunan dalam penyelesaian dipindahkan ke rumah, ruko dan apartemen (*strata title*) tersedia untuk dijual pada saat pembangunan telah selesai.

Properti yang diperoleh atau dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang tidak untuk disewakan atau untuk mendapatkan kenaikan nilai, dicatat sebagai persediaan.

Komisi yang tidak dapat dikembalikan yang dibayarkan kepada agen penjualan atas penjualan unit *real estate* dibebankan pada saat terutang.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal yang didasarkan pada harga pasar pada tanggal pelaporan dan didiskontokan untuk nilai waktu uang, jika material, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya untuk melaksanakan penjualan.

Penurunan nilai persediaan ditetapkan setiap tanggal pelaporan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto dan penurunannya diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun yang bersangkutan.

g. Inventories (continued)

The cost of land under development consists of the cost of land for development, direct and indirect development costs related to real estate development activities and borrowing costs, if any. At the time of sale, total project costs are allocated proportionately based on their respective areas.

The cost of land development, including land which is used for roads and infrastructure or other unsaleable area, is allocated to the saleable area.

The cost of buildings under construction is transferred to houses, shop houses and apartments (strata title) available for sale when the construction is substantially completed.

Properties acquired or being constructed for sale in the ordinary course of business, rather than to be held for rental or capital appreciation, are classified as inventories.

Non-refundable commissions paid to sales or marketing agents on the sale of real estate units are expensed when incurred.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, based on market prices at the reporting date and discounted for the time value of money if material, less estimated costs to complete and estimated costs to sell.

The decline in value of inventories is determined every reporting date to write down the carrying amount of inventories to their net realizable value and the decline is recognized as a loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the related year.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dan ventura bersama diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Kelompok Usaha telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan bersama tersebut sebagai ventura bersama.

Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi dan ventura bersama, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi dan ventura bersama. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama mengalami penurunan nilai. Kelompok Usaha menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi dan ventura bersama.

Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama dan nilai tercatatnya, dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h. Investments in associates and joint venture

The Group's investments in its associates and joint venture are accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group has significant influence. The Group has assessed the nature of its joint arrangements and determined them to be joint ventures.

Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Group's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associate and joint venture since the date of acquisition.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the share of the results of operations of the associates and joint venture. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates and joint venture, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity.

Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associates and joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associates and joint venture. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that its investments in the associates and joint venture are impaired. The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investments in its associates.

If there is objective evidence of impairment, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates and their carrying value, and recognizes the impairment in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

i. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan dipindahkan ke aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	20
Peralatan Operasi dan Kantor	3 - 5
Kendaraan Bermotor	3 - 5

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Tanah yang diungkapkan di aset tetap tidak diperuntukan untuk jalan tol.

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek dalam pelaksanaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially recognized as the cost of acquisition which includes their acquisition price and any costs attributable directly to bring the asset to the necessary condition and location in order for the asset to be ready for use as per management's intentions.

Assets in construction are expressed at the cost of acquisition and transferred to fixed assets at the time of completion and ready for use.

After initial recognition, fixed assets, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation is calculated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

Office and Other Buildings
Operational and Office Equipment
Vehicles

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. The land disclosed in fixed assets is not intended for toll road.

Construction in progress are stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the constructed asset is ready for its intended use.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

j. Properti investasi

Properti investasi Kelompok Usaha terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Total tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atas taksiran masa manfaat ekonomis berkisar dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

i. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to current operations in the year the asset is derecognized.

The fixed assets residual values, useful lives and methods of depreciation and amortization are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

j. Investment properties

Investment properties of the Group consist of land, building and infrastructures held by the Group to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Carrying total cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.

Depreciation of buildings and infrastructures is computed using the straight-line method over their estimated useful lives ranging from 10 (ten) years to 30 (thirty) years.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

j. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Kelompok Usaha menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan.

Jika properti yang digunakan Kelompok Usaha menjadi properti investasi, Kelompok Usaha mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, properti investasi tidak diasuransikan dan tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

j. Investment properties (continued)

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized or disposed.

A transfer to an investment property is made if, and only if, there is a change of use indicated by the expiration of the owner's use, the commencement of an operating lease to another party or the completion of construction or development. A transfer of an investment property is made if, and only if, there is a change of use indicated by the commencement of use by the owner or the commencement of development for sale.

For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Group uses the cost method at the date of change in use.

If the property occupied by the Group becomes an investment property, the Group records the investment property in accordance with the fixed assets policies up to the date of change in use.

As of December 31, 2023 and 2022, investment properties are not insured and there is no capitalized borrowing costs.

Based on the assessment of the management, there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment in the value of investment properties as of December 31, 2023 and 2022.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

k. Aset takberwujud lain

Perangkat Lunak

Perangkat lunak dicatat sebagai aset takberwujud lain. Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Nilai perolehan aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud adalah 3 tahun.

Aset Konsesi Pra-Konstruksi

Aset Konsesi yang belum memasuki masa konstruksi dicatat sebagai aset tak berwujud lain. Aset tersebut direklasifikasi sebagai aset hak pengusahaan jalan tol ketika sudah memasuki masa konstruksi.

l. Perjanjian konsesi jasa

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

k. Other intangible assets

Software

Software recorded as other intangible assets. Intangible assets are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired from business combinations is initially recognized at fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and if any, accumulated impairment loss. The useful life of intangible assets are 3 years.

Pre-Construction Concession Assets

Concession assets that have not yet entered the construction period are recorded as other intangible assets. These assets are reclassified as toll road concession rights assets when they enter the construction period.

l. Service concession arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to the concession rights.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

I. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

**I. Service concession arrangement
(continued)**

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

Aset konsesi dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Indonesia Toll Road Authority ("BPJT") for no consideration.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dialihkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Concession asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/BPJT. These concession assets will be transferred to the Government/BPJT at the end of the concession period and at such time, all accounts related to the concession assets will be discontinued.

Selama periode hak perusahaan jalan tol, aset hak perusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/BPJT has changed the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

I. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

**I. Service concession arrangement
(continued)**

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 72 "Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan". Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 72 "Revenue from contracts with customers". When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract. Construction cost is the value of the amount of acquisition of a construction contract.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:

The concession assets are amortized over the concession period using the following method:

- Aset hak perusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas; dan
- Aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

- *Toll road concession rights for toll roads and toll bridges are amortised using unit of usage method based on traffic volume; and*
- *Toll road concession rights aside from toll roads and toll bridges are amortised using straight-line method.*

Aset kerja sama operasi

Joint operation assets

Jalan tol yang pembangunannya didanai oleh investor tanpa kuasa penyelenggaraan dengan pola bagi pendapatan atau bagi hasil tol untuk masa tertentu, selama pengoperasiannya dikendalikan oleh Perusahaan, dicatat sebagai jalan tol kerja sama operasi dan liabilitas (jangka panjang) kerja sama operasi pada saat jalan tol selesai dibangun dan diserahkan oleh investor kepada Perusahaan untuk operasi.

The construction of toll road is funded by investors without operation rights under revenue or profit sharing scheme for certain period of time, while the operation is controlled by the Company and is recorded as joint operation toll road and joint operation liabilities (long-term) when the construction is completed and transferred by the investor to the Company for operation.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION (continued)
<p>I. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)</p> <p><u>Provisi pelapisan jalan tol</u></p> <p>Dalam pengoperasian jalan tol, Kelompok Usaha mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini.</p> <p><u>Biaya pinjaman</u></p> <p>Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.</p> <p>Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (<i>qualifying assets</i>), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.</p>	<p>I. Service concession arrangement (continued)</p> <p><u>Provision for overlay</u></p> <p><i>In operating toll roads, the Group is required to maintain quality in accordance with the SPM (Minimal Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing overlay regularly. The cost of overlay is periodically provided for based on estimated utilization of toll road by customers. Provision for overlay is measured by the present value of management's estimate on required expenditure to complete the current liabilities.</i></p> <p><u>Borrowing costs</u></p> <p><i>Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.</i></p> <p><i>Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying assets, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.</i></p>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION (continued)
<p>I. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)</p> <p><u>Biaya pinjaman (lanjutan)</u></p> <p>Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.</p> <p>m. Penurunan nilai aset non-keuangan</p> <p>Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.</p> <p>Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.</p>	<p>I. Service concession arrangement (continued)</p> <p><u>Borrowing costs (continued)</u></p> <p>Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.</p> <p>m. Impairment of non-financial assets</p> <p>At the end of each reporting year, the Group assesses whether there are indications of an asset declining in value. If there is such indication, the Group shall make a formal estimate of the recovered amount of the asset.</p> <p>An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its Cash-Generating Unit's (CGU's) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. If the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.</p>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

**m. Impairment of non-financial assets
(continued)**

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai “rugi penurunan nilai”, jika ada.

Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as “impairment losses”, if any.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terkini dijadikan sebagai acuan, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are considered, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset.

Kerugian penurunan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Impairment losses, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah terbalik. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

An assessment is made at each annual reporting year as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have reversed. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Apabila terdapat pembalikan penurunan nilai, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah disesuaikan, penyusutan bersih, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill*. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode-periode berikutnya.

n. Sewa

Kelompok Usaha sebagai lessee

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Kelompok Usaha harus menilai apakah:

- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika Kelompok Usaha memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dengan:

**m. Impairment of non-financial assets
(continued)**

If there is reversal of impairment, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. However, the reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGU) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill can not be reversed in future periods.

n. Leases

The Group as lessee

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

n. Sewa (lanjutan)

n. Leases (continued)

Kelompok Usaha sebagai lessee (lanjutan)

The Group as lessee (continued)

1. Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
2. Kelompok Usaha telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

1. The Group has the right to operate the asset; or
2. The Group has designed assets by pre-stipulating how and for what purpose they will be used during the period of use.

Pada tanggal inepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The Group recognises a right of use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

The right of use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap.

Lease payments included in the measurement of the lease liability from fixed payments.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

n. Sewa (lanjutan)

n. Leases (continued)

Kelompok Usaha sebagai lessee (lanjutan)

The Group as lessee (continued)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Liabilitas sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa".

Each lease payment is allocated between finance cost and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance cost, are included in "lease liabilities".

Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Kelompok Usaha menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari "aset tetap" dan "liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

The Group presents right of use assets as part of "fixed assets" and "lease liabilities" in the statement of financial position.

Kelompok Usaha menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

The Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Sewa jangka pendek

Short-term leases

Kelompok Usaha memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognise right of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Perpajakan

o. Taxation

Pajak penghasilan badan

Corporate income tax

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
- c) Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak), dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

o. Taxation (continued)

Corporate Income tax (continued)

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) *The initial recognition of goodwill; or*
- b) *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss); and*
- c) *At the time of the transaction does not give rise to equal taxable and deduction temporary difference.*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss), and at the time the transaction does not give rise to taxable temporary differences and the temporary differences can be deducted in the same amount.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Atau dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Kelompok Usaha mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Kelompok Usaha melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Kelompok Usaha memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

o. Taxation (continued)

Corporate income tax (continued)

Or in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *The Group has rights that can be enforced by law to offsets current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *The deferred tax assets and deferred tax liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on:*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

o. Perpajakan (lanjutan)

o. Taxation (continued)

Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Corporate income tax (continued)

- i. Entitas kena pajak yang sama; atau
- ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

- i. The same taxable entity; or
- ii. Different taxable entities which intend to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or realize the asset and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of the assets or deferred tax liabilities are expected to be completed or restored.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini disajikan jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha:

The offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- 1) Memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menghapus dalam jumlah yang diakui; dan
- 2) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- 1) Owned legally enforceable right to set-off the recognized amounts; and

- 2) Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Pajak penghasilan final

Final income tax

Penghasilan dari penjualan rumah (subsidi dan non-subsidi) dan penghasilan dari sewa gedung merupakan subjek pajak final masing-masing sebesar 1%, 2,5%, dan 10%. Pajak penghasilan final dihitung pada jumlah total tagihan untuk nilai kontrak yang dikumpulkan selama setahun.

Income from sale of real property (subsidy and non-subsidy) and income from rental building is subject to final tax rates of 1%, 2.5%, and 10%, respectively. The final income tax is calculated on the total amount of billings for the contract value which is collected during the year.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

The differences between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Beban pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi.

Tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportional to total income recognized during the current year for accounting purposes.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)
<p>o. Perpajakan (lanjutan)</p> <p><u>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</u></p> <p>Pendapatan, beban dan aset diakui setelah dikurangi dengan jumlah PPN kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika PPN yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban. • Piutang dan utang yang disajikan termasuk PPN. <p>p. Imbalan kerja</p> <p>Imbalan Pascakerja</p> <p><u>Program pensiun</u></p> <p>Perusahaan memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala.</p> <p>Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.</p> <p>Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun kini dan sebelumnya.</p> <p>Perusahaan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Cipta Kerja No. 06/2023 namun dalam perhitungan ini masih mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama dan PP 35/2021. Program pensiun Perusahaan berdasarkan perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh program pensiun Perusahaan akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.</p>	<p>o. Taxation (continued)</p> <p><u>Value-Added Tax (VAT)</u></p> <p>Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT, except:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the tax office, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable. • Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included. <p>p. Employee benefits</p> <p>Post-employment benefits</p> <p><u>Pension program</u></p> <p>The Company has pension schemes in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and the Company's policy. The schemes are generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations.</p> <p>A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors, such as age, years of service or compensation.</p> <p>A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.</p> <p>The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Job Creation Law No. 06/2023 however, in this calculation, it still refers to the Collective Labor Agreement and PP 35/2021. The Company's pension plan based on the calculation of the benefit obligation performed by the actuaries provide that the expected benefits under the Company's pension plan will exceed the minimum requirements of the pension liability regulated by Labor Law.</p>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

p. Employee benefits (continued)

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Program pensiun (lanjutan)

Pension program (continued)

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM). Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja pegawai.

The Company provides a defined benefit pension plan covering all permanent employees which is managed by the Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM). Pension benefit to be paid are determined based on basic pension income and the period of the employment.

DPJM telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-370/KM.17/1997, tanggal 15 Juli 1997 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-578/NB.11/2018 tanggal 25 Mei 2018.

The DPJM has been authorized by the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-370/KM.17/1997, dated July 15, 1997 and amended by the Decree of Financial Services Authority No. KEP-578/NB.11/2018 dated May 25, 2018.

Jumlah iuran karyawan untuk program pensiun sebesar 3% dari gaji pokok dan sisa pendanaan sebesar 23,96% menjadi beban Perusahaan.

The employees contribute 3% of their basic salaries to the plan and the remaining funding of 23.96% is contributed by the Company.

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 06/2023 namun dalam perhitungan ini masih mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama dan PP 35/2021.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Company changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in PSAK 24 for the general fact pattern of pension programs based on the Job Creation Law No. 06/2023 however, in this calculation, it still refers to the Collective Labor Agreement and PP 35/2021.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*.

The liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statement of financial position date less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected-Unit-Credit* method.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan, dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Program pensiun (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial disajikan di ekuitas.

Program purna karya

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/KPTS/2003 tanggal 23 September 2003, Perusahaan akan memberikan tunjangan purna karya berupa pembayaran sekaligus sebanyak 24 kali penghasilan terakhir (diluar lembur dan tunjangan pajak) kepada karyawan yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal, atau cacat. Bagi karyawan yang memasuki usia pensiun dipersyaratkan memiliki masa kerja minimal 25 tahun. Surat keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2003.

Jumlah iuran premi bulanan *coming service* setiap bulan adalah sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Asuransi (PhDA) dengan proporsi Perusahaan dan karyawan masing-masing sebesar 4% dan 2% dari PhDA.

Perusahaan mengadakan kontrak kerja sama pengelolaan program Purna Karya karyawan dengan AJB Bumiputera 1912, melalui Perjanjian No. 34/Kontrak-DIR/2007 dan No. 441/AJB/JM/PKS/12/07, tanggal 19 Desember 2007. Perusahaan dan AJB Bumiputera 1912 telah mengadakan addendum I melalui perjanjian No. 52/Kontrak-DIR/2019 dan No. 007/BP-PT JM/ADD/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.

Program Purna Karya dalam kontrak ini akan memberikan manfaat dalam bentuk uang purna karya secara sekaligus (*lump sum*) kepada karyawan tetap yang berhenti bekerja.

p. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Pension program (continued)

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income. Accumulated actuarial gains and losses are reported in equity.

Post retirement benefit program

Based on the Company's Directors Decree No. 163/KPTS/2003 dated September 23, 2003, the Company provides retirement benefit which is equal to 24 times the monthly salary (excluding overtime and tax allowance) for employees who cease work due to retirement, death, or disability. Employees who have reached retirement age are required to have a minimum working period of 25 years to obtain this benefit. The decree was effective on January 1, 2003.

The amount of monthly premium contribution for coming service is 6% from insurance basic income (PhDA) which represent 4% and 2% from insurance basic income of the Company and employee proportion, respectively.

The Company entered into a cooperation agreement to manage employee Post Retirement with AJB Bumiputera 1912, through agreement No. 34/Kontrak-DIR/2007 and No. 441/AJB/JM/PKS/12/07, dated December 19, 2007. The Company and AJB Bumiputera 1912 entered into addendum I through agreement No. 52/Kontrak-DIR/2019 and No. 007/BP-PT JM/ADD/VII/2019 dated July 23, 2019.

The post retirement in this contract will give a benefit in post retirement cash in lump sum to the retired of permanent employee.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

program purna karya (lanjutan)

Perusahaan menyediakan imbalan kesehatan pascakerja untuk pensiunan yang berhak. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Prakiraan biaya imbalan ini masih harus diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

Imbalan pelayanan kesehatan pensiun

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 228/KPTS/2006, tanggal 26 Desember 2006, tentang Penyempurnaan Keputusan Direksi No. 61/KPTS/2001 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga, yang bertujuan untuk tetap menjaga agar pensiunan dan keluarga pensiunan dapat melakukan pola hidup sehat dan memiliki produktivitas yang tinggi, keluarga pensiunan yang mendapat bantuan pengobatan dari Perusahaan dibatasi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) anak dan telah terdaftar di Perusahaan.

Entitas Anak

Entitas Anak menghitung liabilitas imbalan pascakerja dengan metode *Projected-Unit-Credit*, sesuai dengan PSAK 24. Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui langsung dalam diakui sebagai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

JLJ menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya. Program pensiun didanai seluruhnya oleh JLJ. Kontribusi yang diberikan JLJ dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

p. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Post retirement benefit program (continued)

The Company provides post-retirement health care benefits to its entitled retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employees' remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting method similar to that for defined benefit pension plans. These obligations are valued annually by independent actuary.

Post-retirement health care benefits

Based on the Directors' Decision Letter No. 228/KPTS/2006, dated December 26, 2006 regarding Improvement of the Directors' Decrees No. 61/KPTS/2001 about The Management of Health Maintenance for the Pensioner and Family, which its objective is to allow the pensionary and their family to have a healthy life and high productivity, the pensionary family that are eligible to receive medical assistance from the Company are limited to 3 (three) children that are registered with the Company.

Subsidiaries

The Subsidiaries has calculated the liability for other employee benefits using the *Projected-Unit-Credit* method based on PSAK 24. Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost, actuarial adjustments and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees are directly recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

JLJ provides a defined contribution pension program covering all permanent employees. The pension program is entirely funded by JLJ. The contribution borne by JLJ is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the current year.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	2. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION (continued)
<p>p. Imbalan kerja (lanjutan)</p> <p>Imbalan Pascakerja (lanjutan)</p> <p>Kompensasi kepada Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT")</p> <p>Perusahaan mencatat penyisihan untuk kompensasi yang akan dibayarkan kepada karyawan saat selesainya jangka waktu perjanjian berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.</p> <p>q. Instrumen keuangan</p> <p>1. Aset keuangan</p> <p>Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.</p> <p><u>Pengakuan awal</u></p> <p>Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.</p> <p>Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laba rugi.</p> <p>Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.</p> <p>Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain-lain, dana yang dibatasi penggunaannya, dan aset keuangan lainnya neto.</p>	<p>p. Employee benefits (continued)</p> <p>Post-employment benefits (continued)</p> <p>Compensation for Employees under Fixed Term Employment Agreement ("PKWT")</p> <p><i>The Company recognizes a provision for compensation to be paid to employees under Fixed Term Employment Agreement (PKWT) at the end of the agreement period in accordance with Government Regulation No. 35/2021.</i></p> <p>q. Financial instruments</p> <p>1. Financial assets</p> <p><i>A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.</i></p> <p><u>Initial recognition</u></p> <p><i>Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.</i></p> <p><i>Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (OCI), and fair value through profit or loss.</i></p> <p><i>The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.</i></p> <p><i>All financial assets are initially recognized at their fair value plus transaction costs, unless financial assets are recorded at fair value through profit or loss.</i></p> <p><i>As of December 31, 2023 and 2022, the Group's financial assets include cash and cash equivalents, short-term investments, other receivables, restricted funds, and other financial assets - net.</i></p>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan awal (lanjutan)

Initial recognition (continued)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

- (i) Financial assets at amortised cost

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the *Effective Interest Rate* ("EIR") method, less impairment.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in profit or loss.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Kelompok Usaha terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain-lain, dan dana yang dibatasi penggunaannya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Group's financial assets that measured at amortized cost consist of cash and cash equivalents, other receivables and restricted funds in the consolidated statement of financial position.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)

- (ii) Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi.

Financial assets at fair value through other comprehensive income are subsequently carried in the consolidated statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the other comprehensive income, except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss.

Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

Kelompok Usaha memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, mencakup investasi jangka pendek dan aset keuangan lainnya neto, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The Group has investments in equity instruments, includes short-term investments and other financial assets - net, which are classified as financial asset at fair value through other comprehensive income.

Investasi pada saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai aset keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investments in shares with ownership interest of less than 20% carried at fair value through other comprehensive income are subsequently presented in the consolidated statement of financial position as financial assets at fair value, with changes in fair value recognized in the consolidated other comprehensive income.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets measured on FVTPL are measured at their fair value. Gains or losses arising from changes in the fair value of financial assets are recognized in profit and loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL.

Financial assets in the form of derivatives and investments in equity instruments do not meet the criteria to be measured at amortized cost of acquisition or the criteria to be measured at FVTOCI, so they are measured at FVTPL.

Namun demikian, Kelompok Usaha dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Kelompok Usaha telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through" dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan nilai

Pada setiap tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Kelompok Usaha menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Kelompok Usaha membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred the rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Impairment

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of Expected Credit Losses.

To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Penurunan nilai (lanjutan)

Impairment (continued)

Kelompok Usaha menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang lain-lain.

The Group applied a simplified approach to measure such Expected Credit Loss (ECL) for other receivables.

2. Liabilitas keuangan

2. Financial liabilities

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

1. Financial liabilities at amortized cost; and
2. Financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL).

Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Pengakuan Awal

Initial Recognition

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

At initial recognition, financial liabilities are recognized at fair value and, in the case of financial liabilities at amortized cost, less directly attributable transaction costs.

Pada tanggal 31 Desember 2023, liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup utang usaha, utang kontraktor, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, utang lembaga keuangan bukan bank, utang bank, utang obligasi, liabilitas pembebasan tanah, liabilitas derivatif dan liabilitas jangka panjang lainnya yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

As of December 31, 2023, the Group's financial liabilities include trade payables, contractors payable, other short-term financial liabilities, accrued expenses, non-bank financial institutions loan, bank loans, bonds payable, land acquisition liabilities and other long-term liabilities, which are classified as financial liabilities at amortized cost. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

2. Financial liabilities (Continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Entities classify all financial liabilities so that after initial recognition financial liabilities are measured at amortized cost of acquisition.

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Upon initial recognition, an entity may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit and loss.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

A financial liability is derecognized when it is discharged or cancelled or has expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original financial liability and the recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

Such valuation techniques include the use of arm's length market transactions, references to the current fair value of substantially the same instruments, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

5. Reklasifikasi

Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan ketika Kelompok Usaha mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

5. Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

Jika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest which recognized before are not restated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

5. Reklasifikasi (lanjutan)

5. Reclassification (continued)

Ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification.

Sebaliknya, ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

q. Financial instruments (continued)

5. Reklasifikasi (lanjutan)

5. Reclassification (continued)

Pada saat Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

r. Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

r. Derivative financial instruments and hedging activities

Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dilakukan dan selanjutnya diukur kembali sebesar nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul tergantung pada apakah derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, sifat pos yang dilindung nilai. Kelompok Usaha menetapkan derivatif tertentu sebagai:

Derivatives are initially recognized at fair value on the date the derivative contract is entered into and subsequently remeasured at fair value. The method of recognizing the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument, and if so, the nature of the item being hedged. The Group defines certain derivatives as:

- i. Lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau terhadap komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar); atau
- ii. Lindung nilai atas risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau terhadap transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar akan terjadi (lindung nilai arus kas).

- i. Hedging the fair value of recognized assets or liabilities or of unrecognized firm commitments (fair value hedges); or*
- ii. Hedging of certain risks associated with a recognized asset or liability or of a transaction that is expected to be probable (cash flow hedge).*

Pada awal terjadinya transaksi, Kelompok Usaha mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan pos yang dilindung nilai, serta tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan berbagai transaksi lindung nilai. Kelompok Usaha juga mendokumentasikan penilaiannya, pada awal lindung nilai dan pada setiap akhir tahun, apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam saling menghapus perubahan nilai wajar atau arus kas pos yang dilindung nilai.

In the beginning of transaction, the Group documents the relationship between the hedging instrument and the item being hedged, as well as its risk management objectives and strategy for executing various hedging transactions. The Group also documents its assessment, at the inception of the hedge and at the end of each year, whether the derivative used in the hedging transaction is highly effective in offsetting changes in fair value or cash flows of the hedged item.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**r. Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas
lindung nilai (lanjutan)**

Nilai wajar penuh derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang ketika sisa jatuh tempo pos yang dilindung nilai lebih dari 12 bulan, dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek ketika sisa jatuh tempo pos yang dilindung nilai kurang dari 12 bulan. Derivatif yang diperdagangkan diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai lindung nilai arus kas diakui pada penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan atau kerugian dari bagian yang tidak efektif diakui segera di dalam laba rugi sebagai "penghasilan/ beban lain-lain".

Jumlah yang terakumulasi pada ekuitas direklasifikasikan ke dalam laba rugi di dalam periode ketika pos yang dilindung nilai memengaruhi laba rugi (misalnya, ketika perkiraan penjualan yang menjadi pos yang dilindung nilai terjadi). Keuntungan atau kerugian yang berhubungan dengan bagian efektif swap tingkat bunga sebagai instrumen lindung nilai pinjaman bersuku bunga variabel diakui dalam laba rugi sebagai "biaya keuangan".

Ketika instrumen lindung nilai kedaluwarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di dalam ekuitas akan tetap berada di dalam ekuitas dan diakui ketika transaksi yang diperkirakan akhirnya diakui pada laba rugi. Ketika transaksi yang diperkirakan tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang dilaporkan di ekuitas segera dipindahkan ke laba rugi sebagai "penghasilan/ beban lain-lain".

Perubahan nilai wajar dari derivatif yang tidak ditetapkan, atau tidak memenuhi kriteria untuk, akuntansi lindung nilai diakui secara langsung dalam laba rugi.

**r. Derivative financial instruments and
hedging activities (continued)**

The full fair value of hedging derivatives is classified as non-current assets or long-term liabilities when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 months, and as current assets or short-term liabilities when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 months. Derivatives traded are classified as current assets or current liabilities.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and meet the criteria as cash flow hedges are recognized in other comprehensive income. Gains or losses from the ineffective portion are recognized immediately in profit or loss as "other income/ expenses".

Amounts accumulated in equity are reclassified to profit or loss in the period when the hedged item affects profit or loss (for example, when an expected sale of the hedged item occurs). Gains or losses relating to the effective portion of interest rate swaps as hedging instruments on variable interest rate loans are recognized in profit or loss as "finance costs".

When the hedging instrument expires or is sold, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, the cumulative gain or loss held in equity will remain in equity and is recognized when the expected transaction is eventually recognized in profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss reported in equity is immediately transferred to profit or loss as "other income/ expenses".

Changes in the fair value of derivatives that are not designated, or do not meet the criteria for, hedge accounting are recognized directly in profit or loss.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

s. Laba per saham

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek saham biasa yang berpotensi bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

t. Pengakuan pendapatan dan beban

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut) pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu.

Harga transaksi merupakan angka yang ditagihkan kepada pelanggan setelah mengeluarkan Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

s. Earnings per share

Earnings per share amount is computed by dividing the profit for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding issued and fully paid shares during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023 and 2022.

t. Revenue and expense recognition

The Group applies PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment as follows:

1. *Identify contracts with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services) at certain time or all the time.*

The transaction price is based on the amount billed to customer excluding Value-Added Taxes.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**t. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

**t. Revenue and expense recognition
(continued)**

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Kelompok Usaha diakui pada suatu waktu tertentu saat penjualan karcis tol. Imbalan kas yang diterima sehubungan dengan pengalihan hak atas pendapatan tol masa datang dicatat sebagai pendapatan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada suatu periode waktu berdasarkan aktual jumlah *traffic* selama masa jangka waktu pengalihan hak atas pendapatan tol tersebut.

Toll revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized at certain time upon the sale of toll tickets. Cash consideration received in connection with the transfer of the rights on future toll revenue are recorded as deferred revenue and recognized as revenue over time based on actual traffic volume over the term of transfer of the rights on future toll revenues.

Pendapatan sewa

Pendapatan dari sewa iklan, lahan, dan tempat peristirahatan diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diakui pada suatu periode waktu dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa. Sewa diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan diterima di muka".

Rental income

Revenue from advertisement, space, and rest area rental are classified as operating lease and recognized over time on a straight-line basis over the lease term. Rent revenue received in advance are presented as "Unearned revenue".

Pendapatan jasa pengoperasian

Pendapatan jasa pengoperasian diakui pada suatu periode waktu dengan menggunakan metode garis lurus selama masa jasa. Pendapatan jasa diterima di muka disajikan sebagai "Pendapatan diterima di muka".

Toll road operating service

Revenue toll road operating service is recognized over time on a straight-line basis over the service term. Service revenue received in advance are presented as "Unearned revenue".

Pendapatan penjualan properti

JMRB (entitas anak) mengakui pendapatan dari penjualan real estat pada suatu titik waktu setelah penyelesaian akta jual beli.

Revenue from sale of property

JMRB (a subsidiary) recognizes revenues from real estate sales at a point in time upon the completion of the sale and purchase agreement.

Pendapatan konstruksi dan beban konstruksi

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi pada suatu periode waktu menggunakan metode *output* berdasarkan laporan bulanan atas kemajuan penyelesaian pembangunan aset yang diterima dari pihak eksternal yang telah ditunjuk untuk membangun aset tersebut.

Construction revenue and construction cost

The Group recognizes construction revenues over time by using the output method based on the monthly report over the completed construction progress from the external party that was appointed for the assets' construction.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Expenses

Expenses are recognized when incurred or according to the useful life.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**t. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Beban pokok penjualan tanah

Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan untuk menyelesaikan pekerjaan.

u. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>
1 Dolar Amerika Serikat	15.026

v. Segmen operasi

Segmen adalah komponen dari Kelompok Usaha yang dapat dibedakan yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen yang dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**t. Revenue and expense recognition
(continued)**

Cost of land sold

Cost of land sold is determined based on acquisition cost of the land plus other estimated expenditures for its improvement and development. The cost of residential house sold covers all construction expenses to complete the work.

u. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are translated to rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction day of the year, as published by Bank Indonesia. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

The exchange rates used are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
1 Dolar Amerika Serikat	15.026	15.731	1 United States Dollar

v. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operating decision-maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra-group transactions are eliminated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

w. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

x. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

w. Provisions

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, where it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

x. Contingencies

Contingent liabilities are disclosed, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure to the consolidated financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require a material adjustment to the carrying amounts of the assets or liabilities in future periods.

a. Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

• Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2q.

• Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Kelompok Usaha mengadakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Kelompok Usaha termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2.I).

Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan, dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, dimana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

a. Judgments (continued)

• Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition financial liabilities based on PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2q.

• Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

The Group entered into Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) with BPJT granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construction, operate, and maintain the toll roads (Note 2.I).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities, and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities.

The Group has made judgment that the PPJT met the criteria under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

• Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp5.752.623 dan Rp2.800.291 (Catatan 37).

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 72. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

• Pengklasifikasian properti

Kelompok Usaha menentukan apakah sebuah properti yang diperoleh diklasifikasikan sebagai properti investasi atau persediaan properti:

- Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan (terutama kantor dan properti ritel) yang tidak bertujuan untuk digunakan oleh atau dalam kegiatan operasi Kelompok Usaha, tidak juga untuk dijual dalam kegiatan bisnis, tetapi digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa dan peningkatan nilai.
- Persediaan properti terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Secara khusus, berkaitan dengan properti hunian yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha dan digunakan untuk dijual sebelum atau pada saat penyelesaian konstruksi.

a. Judgments (continued)

• Service concession arrangement (continued)

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Group recognized construction revenue amounting to Rp5,752,623 and Rp2,800,291, respectively (Note 37).

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 72. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management estimation calculated in certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

• Classification of property

The Group determines whether an acquired property is classified as investment property or property inventory:

- *Investment property consists of land and buildings (principally offices and retail property) which are not occupied substantially for use by, or in the operations of the Group, nor for sale in the ordinary course of business, but are held primarily to earn rental income and capital appreciation.*
- *Property inventory consists of property that is held for sale in the ordinary course of business. In particular, it pertains to the residential property that the Group develops and intends to sell on or before the completion of construction.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

• Pengendalian atas entitas anak

Direksi Perusahaan menilai apakah Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak berdasarkan kemampuan Kelompok Usaha untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas Anak secara sepihak.

Dalam membuat pertimbangannya, direksi mempertimbangkan ukuran absolut kepemilikan Kelompok Usaha pada Entitas Anak dan ukuran relatif dan penyebaran kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Setelah penilaian, Direksi menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha memiliki hak suara yang cukup dominan untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas Anak dan karenanya Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan dalam paragraf berikut. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

• Nilai wajar instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

a. Judgments (continued)

• Control over subsidiaries

The directors of the Company's assessed whether or not the Group has control over a subsidiary based on whether the Group has the practical ability to direct the relevant activities of the subsidiaries unilaterally.

In making their judgment, the directors considered the Group's absolute size of holding in the subsidiary and the relative size of and dispersion of the shareholdings owned by the other shareholders. After assessment, the Directors concluded that the Group has a sufficiently dominant voting interest to direct the relevant activities of the subsidiary and therefore the Group has control over the subsidiaries.

b. Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation of uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed in the following paragraphs. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes will be reflected in the assumptions when they occur.

• Fair value of financial instruments

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Estimates and assumptions (continued)

• Penyusutan aset tetap dan properti investasi

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 3 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11 dan 12.

• Depreciation of fixed assets and investment properties

The costs of fixed assets and investment properties are depreciated using the straight-line method over their estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets and investment properties to be between 3 to 30 years. This is the range of common life expectancies applied in the industry in which the Group conducts its business. Changes in the level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and residual values of assets and, therefore, future depreciation charges may be revised. Further details are disclosed in Notes 11 and 12.

• Amortisasi hak pengusahaan jalan tol

Kelompok Usaha melakukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan dan jembatan selama masa konsesi dengan menggunakan metode pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas selama masa konsesi.

• Amortization of toll road concession right

The Group decided to amortize toll road concession rights - road and bridge using the toll road consumption pattern method derived from traffic over the concession period.

Nilai tercatat neto atas hak pengusahaan jalan tol Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp111.246.294 dan Rp66.979.662.

The net carrying value of toll road concession rights of the Group as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp111,246,294 and Rp66,979,662, respectively.

• Estimasi volume lalu lintas

Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat memengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

• Estimation of traffic volume

Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted for comparison to actual traffic volume. However, over time, actual traffic volume may differ from these estimates, depending on changes in external factors that may affect toll rates and traffic volume.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Estimates and assumptions (continued)

• Estimasi volume lalu lintas (lanjutan)

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Kelompok Usaha akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

• Estimation of traffic volume (continued)

The Management perform periodic assessment on the total projected traffic volume. The Group will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual traffic volume.

• Provisi pelapisan jalan tol

Provisi pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

• Provision for overlay

Provision for overlay will be recorded periodically based on the estimated utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

• Aset konsesi dalam pengerjaan

Umur konsesi atas hak konsesi jalan tol mulai berlaku efektif sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh BPJT, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan konstruksi dimulai atau biaya pra konstruksi jalan tol, termasuk biaya pembebasan lahan atau tanah ditangguhkan sehingga belum dihitung margin konstruksinya.

• Concession asset in progress

The concession period of toll road concession rights effective from Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) published by BPJT, so that the costs incurred before the construction activities started or pre-construction costs of toll roads, including the cost of land or soil acquisition were suspended and therefore, the construction margin has not been determined.

• Imbalan pascakerja

Penentuan kewajiban Kelompok Usaha untuk menyediakan imbalan pascakerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut.

• Post-employment benefits

Determination of the Group's obligations for providing post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Those assumptions include, among others, discount rate, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Estimates and assumptions (continued)

• Imbalan kerja (lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat memengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.316.108 dan Rp1.256.108.

• Employee benefits (continued)

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Group are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated long term employee benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,316,108 and Rp1,256,108, respectively.

• Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 18.

• Income tax

Significant considerations are made in determining corporate income tax liability. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the normal course of business. The Group recognizes the income tax liability based on estimates of whether there will be an additional income tax. Details of the nature and amount of recorded income tax are disclosed in Note 18.

Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023 (PMK-72) tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud telah berlaku pada 13 Juli 2023. PMK-72 menetapkan bahwa Perusahaan dapat memilih untuk menyusun/mengamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Perusahaan untuk bangunan permanen dan harta takberwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun.

Minister of Finance Regulation No. 72 of 2023 (PMK-72) concerning Depreciation of Tangible Assets and/or Amortization of Intangible Assets has effectively applied on 13 July 2023. PMK-72 stipulates that the Company can choose to depreciate/amortize according to the actual useful life based on the Company's bookkeeping for permanent buildings and intangible assets that have a useful life of more than 20 years.

• Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan.

• Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that taxable income will be available so that all of part of the deferred tax assets can be utilized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

b. Estimates and assumptions (continued)

• Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

• Sewa

Kelompok Usaha mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Kelompok Usaha bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu.

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Selain itu, dalam pengukuran awal liabilitas sewa juga mengharuskan penggunaan suku bunga. Karena Kelompok Usaha tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Kelompok Usaha sebagai tingkat diskonto.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental yang banyak diantaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

• Deferred tax assets (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that taxable income will be available so that all of part of the deferred tax assets can be utilized.

Significant estimates by management are required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies.

• Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets.

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In addition, the initial measurement of lease liabilities also requires the use of interest rates. Since the Group could not readily determine the implicit rate, management use the Group's incremental borrowing rate as a discount rate.

There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

*For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Kelompok Usaha juga mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan. Opsi perpanjangan hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan di perpanjang.

b. Estimates and assumptions (continued)

• Leases (continued)

In determining the lease term, the Group also considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option. Extension options are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended. Extension options are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2023	2022	
Kas			Cash
Kas Proyek	10.076	9.681	Cash for Project
Kas Kecil	3.153	5.838	Petty Cash
Total Kas	13.229	15.519	Total Cash
Bank			Cash in Banks
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 44)	896.871	3.828.404	Related Parties (Note 44)
Pihak Ketiga:			Third Parties:
PT Bank Central Asia Tbk	127.192	166.244	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	19.203	9.978	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	11.914	153.361	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	6.933	5.785	PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Sharia Business Unit
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.626	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	4.444	2.529	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	2.439	11.172	PT Bank Permata Tbk - Sharia Business Unit
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.790	8.715	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank DKI	1.350	302.873	PT Bank DKI
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.201	5.441	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	929	2.446	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	544	7.428	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Jabar Banten Syariah	459	451	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	312	423	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	21	28	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	1	1	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Subtotal	1.082.229	4.505.279	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak Berelasi (Catatan 44)	384	85	Related Party (Note 44)
Subtotal	384	85	Subtotal
Total Bank	1.082.613	4.505.364	Total Cash in Banks
Total Kas dan Bank	1.095.842	4.520.883	Total Cash on Hand and in Banks
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak Berelasi (Catatan 44)	2.824.795	3.218.564	Related Parties (Note 44)
Pihak Ketiga:			Third Parties:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	86.000	40.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah	75.000	140.000	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	67.300	21.300	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Capital Indonesia Tbk	65.056	35.067	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	52.000	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	50.000	60.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	50.000	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30.000	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah	26.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Business Unit
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	100.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk	-	276.000	PT Bank Mega Tbk
Subtotal	3.326.151	3.890.931	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak Berelasi (Catatan 44)	16.958	17.304	Related Party (Note 44)
Total Deposito Berjangka	3.343.109	3.908.235	Total Time Deposits
Total Kas dan Setara Kas	4.438.951	8.429.118	Total Cash and Cash Equivalents

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka
adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Rupiah	2,25% - 7,85%	2,50% - 5,25%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2,00%	1,60%	United States dollar
Jatuh Tempo	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	Maturity Period

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Ranges of annual interest rates on time deposits
are as follows:

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022	
Efek yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain			Marketable Securities Measured at Fair Value Other Comprehensive Income
KIK DINFRA Toll Road Mandiri-001	1.109.651	1.028.619	KIK DINFRA Toll Road Mandiri-001
Reksa Dana Mandiri Investasi Dana Obligasi Seri II	4.530	4.530	Mutual Fund Mandiri Investment - Bond II Series
Reksa Dana Penyertaan Terbatas MIET	-	1.068.007	MIET Mutual Fund
Kenaikan Nilai Aset Neto	246.614	292.851	Increase in Net Assets Value
Total	1.360.795	2.394.007	Total

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

This account consist of:

Mutasi nilai aset bersih adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Saldo Awal	292.851	176.541	Beginning Balance
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Neto	(46.237)	116.310	Increase (Decrease) in Net Assets Value
Saldo Akhir	246.614	292.851	Ending Balance

Movement in net assets value are as follows:

Pada Juli 2023, terdapat pengalihan hak
kepemilikan atas seluruh saham milik Reksa Dana
Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas
Transjawa (MIET) pada PT Lintas Marga Jawa
(Catatan 1.g).

On July 2023, there is transfer of ownership rights to
all shares belonging to the Reksa Dana Penyertaan
Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa
(MIET) to PT Lintas Marga Jawa (Note 1.g).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang dari pelanggan terkait dengan penerimaan pendapatan tol, pendapatan usaha lain, pinjaman pemegang saham, dividen, pinjaman karyawan dan bunga deposito.

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022 *)
Piutang Usaha - Lancar		
Pendapatan Tol		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	39.666	29.075
Pihak Ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	19.735	20.529
Piutang Lain-lain - Lancar		
Pinjaman Pemegang Saham		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	140.989	130.264
Pinjaman Karyawan		
Pihak Ketiga		
Pegawai	4.228	7.647
Pendapatan Lain		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	163.571	368.239
Pihak Ketiga		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	547.363	463.767
PT Marga Maju Mapan	160.500	33.035
Tenan Tempat Istirahat dan Pelayanan	106.710	66.213
PT Metropolitan City Center	17.168	17.641
PT Bintaro Serpong Damai	17.127	4.760
PT Maligi Permata Industrial Estate	15.227	15.227
PT Nancy Wijaya	9.500	9.500
PT Sinabung	7.629	12.129
PT Bank DKI	6.829	25.642
PT Dirgantara Yudha Artha	4.852	-
KSO Waskita - Acset	4.766	6.730
PT Lanais	4.664	3.914
PT Jakarta Lingkar Barat Satu	4.596	4.572
PT Samudra Adidaya Sentosa	3.695	3.695
PT Marga Bhakti Sari Sejahtera	3.485	3.485
PT Trans Bumi Serbaraja	3.046	3.876
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	2.628	6
PT Toll Square Jakarta	2.351	2.351
PT Ranggi Sugiron Perkasa	2.243	-
PT Alya Sinar Pratama	2.044	2.044
KSO PT Jaya Konstruksi - Adhi	2.039	2.693
PT Gemilang Prima Sukses	-	37.400
PT Lintas Marga Sedaya	-	14.975
KSO JMTM - PT Citra Persada Infrastruktur	-	4.220
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	3.277
PT Kereta Cepat Indonesia China	-	2.728
PT Gienda Putra	-	2.728
CV Akur Mandiri Sukses	-	2.365
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	85.945	51.828
Subtotal	1.382.596	1.356.555
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Piutang	(116.249)	(131.563)
Total	1.266.347	1.224.992

6. OTHER RECEIVABLES

This account represents receivable from customers related to toll income, other business income, shareholder loans, dividends, employee loans and deposit interest.

The details of other receivables are as follows:

	2023	2022 *)
Trade Receivables - Current		
Toll Income		
Related Parties (Note 44)	39.666	29.075
Third Parties		
PT Bank Central Asia Tbk	19.735	20.529
Other Receivables - Current		
Shareholder Loans		
Related Parties (Note 44)	140.989	130.264
Employee Loans		
Third Parties		
Employees	4.228	7.647
Other Income		
Related Parties (Note 44)	163.571	368.239
Third Parties		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	547.363	463.767
PT Marga Maju Mapan	160.500	33.035
Tenant for Rest and Services Area	106.710	66.213
PT Metropolitan City Center	17.168	17.641
PT Bintaro Serpong Damai	17.127	4.760
PT Maligi Permata Industrial Estate	15.227	15.227
PT Nancy Wijaya	9.500	9.500
PT Sinabung	7.629	12.129
PT Bank DKI	6.829	25.642
PT Dirgantara Yudha Artha	4.852	-
KSO Waskita - Acset	4.766	6.730
PT Lanais	4.664	3.914
PT Jakarta Lingkar Barat Satu	4.596	4.572
PT Samudra Adidaya Sentosa	3.695	3.695
PT Marga Bhakti Sari Sejahtera	3.485	3.485
PT Trans Bumi Serbaraja	3.046	3.876
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	2.628	6
PT Toll Square Jakarta	2.351	2.351
PT Ranggi Sudiron Perkasa	2.243	-
PT Alya Sinar Pratama	2.044	2.044
KSO PT Jaya Konstruksi - Adhi	2.039	2.693
PT Gemilang Prima Sukses	-	37.400
PT Lintas Marga Sedaya	-	14.975
KSO JMTM - PT Citra Persada Infrastruktur	-	4.220
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	3.277
PT Kereta Cepat Indonesia China	-	2.728
PT Gienda Putra	-	2.728
CV Akur Mandiri Sukses	-	2.365
Others (below Rp2,000)	85.945	51.828
Subtotal	1.382.596	1.356.555
Less:		
Allowance for Impairment Losses	(116.249)	(131.563)
Total	1.266.347	1.224.992

	2023	2022 *)
Piutang Lain-lain - Tidak Lancar		
Pinjaman Pemegang Saham		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	275.000	115.000
Total	275.000	115.000

Other Receivables - Non Current
Shareholder Loans
Related Parties (Note 44)

*)Direklasifikasi, lihat catatan 50

*)Reclassified, see note 50

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Kelompok Usaha menerapkan simplifikasi kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang lain-lain. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal tahun	131.563	95.105
Penambahan (Catatan 41)	10.606	39.001
Pemulihan (Catatan 40)	(25.920)	(2.543)
Saldo akhir tahun	<u>116.249</u>	<u>131.563</u>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas ketidaktertagihan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

6. OTHER RECEIVABLES (continued)

The Group applies simplified lifetime expected credit loss for all other receivables. To measure the expected credit losses, other receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The movement of the allowance for impairment losses account are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beginning balance of the year	95.105	95.105
Addition (Note 41)	39.001	39.001
Recovery (Note 40)	(2.543)	(2.543)
Ending balance of the year	<u>131.563</u>	<u>131.563</u>

Based on a review of the condition of other receivables at the end of year, management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is sufficient to cover possible losses that may arise from uncollected other receivables as of December 31, 2023 and 2022.

7. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan yang dimiliki oleh JMRB dan JMTM, entitas anak, meliputi persediaan properti dan persediaan manufaktur dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Persediaan Properti		
Tanah siap guna	90.672	72.921
Rumah tersedia untuk dijual	17.313	14.711
Subtotal	107.985	87.632
Persediaan Lain-lain		
Persediaan BBM SPBU	6.549	5.028
Persediaan Retail	239	-
Subtotal	6.788	5.028
Persediaan Manufaktur		
Material Manufaktur	4.717	5.967
Total	<u>119.490</u>	<u>98.627</u>

Tanah siap guna adalah unit kavling berupa tanah yang diperuntukkan untuk dijual atau dibangun perumahan yang terletak di Perumahan Spring Residence Sidoarjo dan Perumahan Royal Pandaan.

Rumah tersedia untuk dijual adalah unit rumah yang telah dibangun dan sampai dengan akhir periode buku belum serah terima kunci yang terletak di Perumahan Green Residence Sidoarjo, Perumahan Spring Residence Sidoarjo, dan Perumahan Royal Pandaan.

7. INVENTORIES

This account represents inventories owned by JMRB and JMTM, subsidiaries, which consists of property inventory and manufacturing inventory with details as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Property Inventory		
Land ready for use	90.672	72.921
House available for sale	17.313	14.711
Subtotal	107.985	87.632
Other Inventory		
Fuel Supplies	6.549	5.028
Retail Supplies	239	-
Subtotal	6.788	5.028
Manufacturing Inventory		
Manufacturing Materials	4.717	5.967
Total	<u>119.490</u>	<u>98.627</u>

Land ready for use is a plot unit in the form of land earmarked for sale or for housing construction located in Spring Residence Sidoarjo Housing and Royal Pandaan Housing.

House available for sale are housing units that have been built and until the year end period the keys have not been handed over located in Green Residence Sidoarjo Housing, Spring Residence Sidoarjo Housing, and Royal Pandaan Housing.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Beban persediaan yang diakui pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp376.302 dan Rp241.178.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan, manajemen berpendapat bahwa nilai neto persediaan tersebut diatas dapat direalisasikan sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Persediaan tidak diasuransikan dan tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

7. INVENTORIES (continued)

Cost from sales Inventory recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 are amounting to Rp376.302 and Rp241,178.

Based on the review of the physical condition and net realizable value of inventories, management consider that above net inventories can be fully realized, so there is no provision for inventory impairment required on December 31, 2023 and 2022.

Inventories are not insured and there are no capitalized borrowing costs.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Uang muka pekerjaan	39.764	49.097
Biaya dibayar dimuka	38.730	10.886
Uang muka operasional	17.416	8.293
Total	95.910	68.276

8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

This account consists of:

Work advances
Prepaid expenses
Operational advances
Total

9. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Lancar Bank		
Rekening Pembebasan Tanah		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	4.309	3.302
Pihak Ketiga:		
PT Bank Permata Tbk	-	1.366
Subtotal	4.309	4.668
Jaminan Sindikasi Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	278.842	30.166
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	21.395	7.899
PT Bank DKI	3	73
Subtotal	300.240	38.138
Jaminan Pelaksanaan		
Pihak Ketiga:		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	423
Subtotal	-	423
Rekening Amanat Pendapatan Tol		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	201.185	6.966
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia Tbk	43.519	10.875
Subtotal	244.704	17.841
Subtotal Bank	549.253	61.070
Deposito		
Jaminan Pembebasan Tanah		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	-	9.973
Pihak Ketiga:		
PT Bank Panin Dubai Syariah	1.728	-
Jaminan Pelaksanaan		
Pihak Berelasi (Catatan 44)	7.345	-
Subtotal Deposito	9.073	9.973
Total Lancar	558.326	71.043

9. RESTRICTED FUNDS

This account consists of:

Current Bank
Land Aquisition Account
Related Parties (Note 44)
Third Parties:
PT Bank Permata Tbk
Subtotal
Syndicated Bank Guarantee
Related Parties (Note 44)
Third Parties:
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI
Subtotal
Performance Bond
Third Party:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Subtotal
Toll Collection Escrow Account
Related Parties (Note 44)
Third Parties:
PT Bank Central Asia Tbk
Subtotal
Subtotal Bank
Deposits
Land Aquisition Account
Related Parties (Note 44)
Third Parties:
PT Bank Panin Dubai Syariah
Performance Bond
Related Parties (Note 44)
Deposits Subtotal
Total Current

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

9. RESTRICTED FUNDS (continued)

	2023	2022	
Tidak Lancar			Non-Current
Bank			Bank
Jaminan Sindikasi Bank			Syndicated Bank Guarantee
Pihak Berelasi (Catatan 44)	136.862	42.352	Related Parties (Note 44)
Pihak Ketiga :			Third Parties:
PT Bank Central Asia Tbk	82.076	27.688	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.512	6.407	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.713	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.700	1.681	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank DKI	-	3	PT Bank DKI
Subtotal	232.863	78.131	Subtotal
Jaminan Pelaksanaan			Performance Bond
Pihak Berelasi (Catatan 44)	49.270	57.955	Related Party (Note 44)
Subtotal Bank	282.133	136.086	Subtotal Bank
Deposito			Deposits
Jaminan Sindikasi Bank			Syndicated Bank Guarantee
Pihak Berelasi (Catatan 44)	5.419	7.345	Related Parties (Note 44)
Jaminan Pemeliharaan			Maintenance Bond
Pihak Berelasi (Catatan 44)	5.231	5.231	Related Party (Note 44)
Jaminan Pelaksanaan			Performance Bond
Pihak Berelasi (Catatan 44)	-	17.114	Related Party (Note 44)
Subtotal Deposito	10.650	29.690	Deposits Subtotal
Total Tidak Lancar	292.783	165.776	Total Non-Current
Total	851.109	236.819	Total
	2023	2022	
Rupiah	2,25% - 4,75%	2,50% - 5,25%	Rupiah
Jatuh Tempo Lancar		Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Current Maturity Period
Jatuh Tempo Tidak Lancar		Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Non-Current Maturity Period

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of the investments in associates and joint venture are as follows:

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associated Entity and Joint Venture	Status	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage Ownership (%)	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Additions (Deduction) of Investment	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Perubahan Selama Setahun/ Changes in a Year			Nilai Tercatat Penyertaan Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of Year	
						Penerimaan Dividen/ Dividend Received	Bagian Penghasilan Lain/ Portion in Other Comprehensive Income	Selisih Transaksi dengan Entitas Non-Pengendali/ Difference from Non-Controlling Interest transaction		
X										
Perusahaan/ The Company										
Entitas Asosiasi/ Associated Entity										
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	Operasi/ Operate	21,24	129.518	78.592	3.161	-	-	-	-	211.271
PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	34,83	56.787	-	-	-	-	-	-	56.787
PT Citra Ganeshia Marga Nusantara (CGMN)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	30	16.914	-	-	-	-	-	-	16.914
PT Bukaka Marga Utama (BMU)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	20	9.436	-	-	-	-	-	-	9.436
PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	32,5	52.975	-	-	-	-	-	-	52.975
Ventura Bersama/ Joint Venture										
PT Jasamarga Jogja Solo (JMS) d/h PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM)	Konstruksi/ Construction	52,82	332.308	625.937	(4.107)	-	-	-	-	954.138
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	Operasi/ Operate	51	932.810	-	28.129	-	-	-	-	960.939

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

		2023 Perubahan Selama Setahun/ Changes in a Year							
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associated Entity and Joint Venture	Status	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage Ownership (%)	Nilai Tertcatat Penyertaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Additions (Deduction) of Investment	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Penerimaan Dividen/ Dividend Received	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Portion in Other Comprehensive Income	Selisih Transaksi dengan Entitas Non-Pengendali/ Difference from Non-Controlling Interest transaction	Nilai Tertcatat Penyertaan Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of Year
Penyertaan tidak langsung melalui JTT <i>Indirect investment through JTT</i>									
Entitas Asosiasi/ Associated Entity									
PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)	Operasi/ Operate		1.566.777	(1.573.534)	(464)	-	7.221	-	-
PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)	Operasi/ Operate		1.368.078	(1.455.599)	82.847	-	4.674	-	-
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)	Operasi/ Operate		644.000	(706.094)	62.094	-	-	-	-
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPJT)	Operasi/ Operate	40	423.151	-	22.466	-	(15)	-	445.602
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)	Operasi/ Operate	40	1.833.491	-	(163.935)	-	(13)	-	1.669.543
Ventura Bersama/ Joint Venture									
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	Operasi/ Operate	50,91	612.256	-	235.088	-	(65)	-	847.279
PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)	Operasi/ Operate	51	1.122.417	-	(64.761)	-	1	-	1.057.657
Penyertaan tidak langsung melalui JMRB <i>Indirect investment through JMRB</i>									
PT PP Sinergi Banjaratna (PPSB)	Operasi / Operate	20	9.337	-	(61)	-	-	-	9.276
			<u>9.110.255</u>	<u>(3.030.698)</u>	<u>200.457</u>	<u>-</u>	<u>11.803</u>	<u>-</u>	<u>6.291.817</u>
Dikurangi/ Deducted									
Penurunan Nilai Penyertaan pada: <i>Impairment of Investment in:</i>									
CBMP			(56.787)	-	-	-	-	-	(56.787)
CGMN			(16.914)	-	-	-	-	-	(16.914)
BMU			(9.436)	-	-	-	-	-	(9.436)
JGC			(52.975)	-	-	-	-	-	(52.975)
			<u>(136.112)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(136.112)</u>
Total			<u>8.974.143</u>	<u>(3.030.698)</u>	<u>200.457</u>	<u>-</u>	<u>11.803</u>	<u>-</u>	<u>6.155.705</u>

		2022 Perubahan Selama Setahun/ Changes in a Year							
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associated Entity and Joint Venture	Status	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage Ownership (%)	Nilai Tertcatat Penyertaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan/ Additions (Deduction) of Investment	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Penerimaan Dividen/ Dividend Received	Bagian Penghasilan Komprehensif Lain/ Portion in Other Comprehensive Income	Selisih Transaksi dengan Entitas Non-Pengendali/ Difference from Non-Controlling Interest transaction	Nilai Tertcatat Penyertaan Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of Year
Perusahaan/ The Company									
Entitas Asosiasi/ Associated Entity									
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	Operasi/ Operate	21,24	137.671	-	(8.153)	-	-	-	129.518
PT Ismawa Trimitra (IT)	Operasi / Operate	25	11.202	(10.113)	756	(1.822)	(23)	-	-
PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	34,83	56.787	-	-	-	-	-	56.787
PT Citra Ganeshia Marga Nusantara (CGMN)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	30	16.914	-	-	-	-	-	16.914
PT Jatim Marga Utama (JMU)	Belum Operasi/ Not Yet Operated		-	-	-	-	-	-	-
PT Bukaka Marga Utama (BMU)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	20	9.436	-	-	-	-	-	9.436
PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM)	Konstruksi/ Construction	42,23	18.903	318.650	(5.245)	-	-	-	332.308
PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	32,5	-	52.975	-	-	-	-	52.975
Ventura Bersama/ Joint Venture									
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	Operasi/ Operate	51	916.744	-	16.066	-	-	-	932.810
Penyertaan tidak langsung melalui JTT <i>Indirect investment through JTT</i>									
Entitas Asosiasi/ Associated Entity									
PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)	Operasi/ Operate	44,18	1.594.157	-	(22.429)	-	(4.951)	-	1.566.777
PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)	Operasi/ Operate	42,62	1.281.069	-	92.303	-	(5.294)	-	1.368.078
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)	Operasi/ Operate	45	552.202	-	91.798	-	-	-	644.000
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPJT)	Operasi/ Operate	40	405.862	-	17.289	-	-	-	423.151
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)	Operasi/ Operate	40	-	1.915.407	(79.556)	-	9	(2.369)	1.833.491
Ventura Bersama/ Joint Venture									
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	Operasi/ Operate	50,91	405.408	-	206.979	-	(131)	-	612.256
PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)	Operasi/ Operate	51	1.203.846	-	(81.435)	-	6	-	1.122.417
Penyertaan tidak langsung melalui JMRB <i>Indirect investment through JMRB</i>									
PT PP Sinergi Banjaratna (PPSB)	Operasi / Operate	20	9.580	-	(243)	-	-	-	9.337
			<u>6.619.781</u>	<u>2.276.919</u>	<u>228.130</u>	<u>(1.822)</u>	<u>(10.384)</u>	<u>(2.369)</u>	<u>9.110.255</u>
Dikurangi/ Deducted									
Penurunan Nilai Penyertaan pada: <i>Impairment of Investment in:</i>									
CBMP			(56.787)	-	-	-	-	-	(56.787)
CGMN			(16.914)	-	-	-	-	-	(16.914)
BMU			(9.436)	-	-	-	-	-	(9.436)
JGC			(52.975)	-	-	-	-	-	(52.975)
			<u>(83.137)</u>	<u>(52.975)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(136.112)</u>
Total			<u>6.536.644</u>	<u>2.276.919</u>	<u>228.130</u>	<u>(1.822)</u>	<u>(10.384)</u>	<u>(2.369)</u>	<u>8.974.143</u>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

Informasi tambahan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Additional information for the period ended December 31, 2023 and 2022 related to investment in associates and joint venture are as follows:

Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associated Company and Joint Ventures	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total Liabilities	Total Pendapatan/ Total Revenues	Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
2023				
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)	15.289.796	11.148.876	893.421	(407.840)
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	6.466.017	4.765.354	975.149	460.488
PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ)	6.311.283	4.540.517	3.488.444	(8.113)
PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)	4.817.281	3.965.490	360.355	(126.983)
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	3.248.835	2.623.596	197.732	3.182
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	1.876.298	1.184.313	333.877	55.343
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)	1.473.040	809.895	187.965	56.657
PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB)	153.490	8.560	18.389	(198)
PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)	51.224	24.343	-	(30.902)
2022				
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)	15.505.221	10.956.430	869.239	(391.952)
PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)	12.552.927	8.983.307	1.027.719	(41.590)
PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)	10.079.355	6.864.105	1.028.937	218.532
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	6.438.953	5.197.372	925.251	406.326
PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)	4.948.064	3.969.291	328.363	(159.677)
PT Jasamarga Ngawiertosono Kediri (JNK)	4.757.903	3.250.837	652.785	206.685
PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM)	3.117.985	2.069.176	890.370	(19.271)
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	2.396.821	2.032.945	171.159	(44.348)
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	1.816.895	1.180.159	311.679	32.485
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)	1.400.089	793.941	178.357	43.310
PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB)	161.581	113.690	12.474	(1.205)
PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)	83.423	25.640	-	(14.997)

PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)

TLKJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 19 Januari 2006, Agus Madjid, S.H., dalam rangka pengusahaan ruas tol Cinere-Jagorawi. Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-03269.HT.01.01 tanggal 7 Februari 2006.

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 17 November 2023, Doddy Radjasa, S.H., Perusahaan menambah setoran modal sebesar Rp78.592 atau sebanyak 78.592 lembar saham. Akta Perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0151632 tanggal 6 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 231.520 saham yang merupakan 21,24% dari total kepemilikan.

PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)

TLKJ was established based on Notarial Deed No. 18 dated January 19, 2006, Agus Madjid, S.H., aimed to develop Cinere-Jagorawi toll road. The Deed of Establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C-03269.HT.01.01 dated February 7, 2006.

Based on Notarial Deed No. 27 dated November 17, 2023, Doddy Radjasa, S.H., The Company increased its capital contributions amounting to Rp78,592 or 78,592 shares. The Deed of Amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0151632 dated December 6, 2023.

As of December 31, 2023, the Company owned 231,520 shares which represent 21.24% of the total ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Trans Marga Jateng (TMJ)

PT Trans Marga Jateng (TMJ) didirikan pada tanggal 7 Juli 2007 untuk menyelenggarakan Jalan Tol Semarang - Solo berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-03976.HT.01.01-TH.2007 tanggal 22 November 2007 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 914 Tambahan Berita Negara No. 8 tanggal 25 Januari 2008.

Berdasarkan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 71 tanggal 17 Mei 2017 mengenai Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Usaha Patungan, para pemegang saham PT Trans Marga Jateng (TMJ) telah sepakat bahwa pengendalian TMJ dilakukan secara bersama oleh Perusahaan dan PT Astratel Nusantara. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 17 Mei 2017, Perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas laporan keuangan TMJ.

Berdasarkan Akta No. 280 Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., tanggal 30 Desember 2019, Perusahaan melakukan penjualan saham kepada PT Trans Optima Luhur sebanyak 18.990.410 lembar saham atau setara dengan Rp189.990 dengan harga jual sebesar Rp427.284. Dengan demikian, kepemilikan Perusahaan pada TMJ menjadi sebesar 50,91%.

Berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad oleh PT Jasa Marga kepada PT Jasamarga Transjawa Tol tanggal 1 Juli 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan telah melakukan pemisahan usaha dengan mengalihkan seluruh kepemilikan Perusahaan pada TMJ berupa 50,91% kepemilikan saham kepada JTT (entitas anak).

PT Trans Marga Jateng (TMJ)

PT Trans Marga Jateng (TMJ) was established on July 7, 2007 to operate the Semarang-Solo Toll Road based on Notarial Deed No. 27 dated July 7, 2007 made before the Notary Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Notary in Jakarta. The Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. C-03976.HT.01.01-TH.2007 dated November 22, 2007 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 914 Supplement State Gazette No. 8 dated January 25, 2008.

Based on the Notarial Deed of Leolin Jayayanti, S.H., No. 71 dated May 17, 2017 concerning Amendments and Restatement Joint Venture Agreement, PT Trans Marga Jateng (TMJ) shareholders have agreed that TMJ's control is carried out jointly by the Company and PT Astratel Nusantara. This has resulted since May 17, 2017, the Company has not consolidated the TMJ's financial statements.

Based on Notarial Deed No. 280 of Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., dated December 30, 2019, the Company sold 18,990,410 shares or equivalent to Rp189,990 to PT Trans Optima Luhur with sales price of Rp427,284. Therefore, the Company's ownership in TMJ was 50.91%.

Based on the Deed of Separation of the Regional Division of Jasamarga Transjawa Tollroad by PT Jasa Marga to PT Jasamarga Transjawa Tol dated July 1, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has separated its business by transferring all ownership of the Company to TMJ in the form of 50.91% share ownership to JTT (subsidiary).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

PT Jasamarga Solo Ngawi didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., No. 59 tanggal 24 Maret 2009. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-17204.AH.01.01 Tahun 2009, yang kemudian dilakukan pengambilalihan dan pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 36 tanggal 10 Juni 2015. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0947005 (Perubahan Perseroan) dan No. AHU-AH.01.03-0947006 (Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan) tanggal 1 Juli 2015.

Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham pada JSN sebesar 20% sesuai Akta pemindahan saham No. 5 tanggal 5 Juli 2018 kepada PT Lintas Marga Jawa (LMJ) sebanyak 12.157.077 saham atau setara Rp267.456 dengan harga penjualan sebesar Rp492.000 berdasarkan addendum Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 8 tanggal 5 Juli 2018 kepemilikan Perusahaan pada JSN turun menjadi 40%.

Atas perubahan kepemilikan saham tersebut Perusahaan sudah tidak lagi memiliki pengendalian terhadap JSN dan investasi Perusahaan di JSN dicatat sebagai ventura bersama.

Sesuai Akta Notaris Windalina, S.H., No. 1 tanggal 6 Februari 2020, Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp292.243 sehingga modal ditempatkan dan disetor pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.584.787. Kepemilikan Perusahaan pada JSN meningkat menjadi 42,62%.

Berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk kepada PT Jasamarga Transjawa Tol tanggal 1 Juli 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan telah melakukan pemisahan usaha dengan mengalihkan seluruh kepemilikan Perusahaan pada JSN berupa 42,62% kepemilikan saham kepada JTT.

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN)

PT Jasamarga Solo Ngawi was established in Indonesia based on Notarial Deed Sugito Tedjamulja, S.H., No. 59 dated March 24, 2009. The Deed of Establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-17204.AH.01.01 year 2009, which was subsequently taken over and transferred shares based on Notarial Deed Fathiah Helmi, S.H., No. 36 dated June 10, 2015. Such changes have been authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0947005 (Amendment to the Company) and No. AHU-AH.01.03-0947006 (Amendment to Directors and Commissioner of the Company) dated July 1, 2015.

The Company divested 20% of share ownership in JSN in accordance with the Deed of Share Transfer No. 5 dated July 5, 2018 to PT Lintas Marga Jawa (LMJ) totaling 12,157,077 shares or equivalent to Rp267,456 at a sales price of Rp492,000 based on the addendum to the Deed of Shareholders Agreement No. 8 dated on July 5, 2018 the Company's ownership in JSN dropped to 40%.

Due to the change in share ownership, the Company no longer has control over the JSN and the Company's investment in JSN is treated as joint venture.

In accordance with Notarial Deed of Windalina, S.H., No. 1 February 6, 2020, The Company agreed to increase total issued and paid up share capital totaling to Rp292,243 and as of December 31, 2023 total issued and paid up share capital totaling Rp1,584,787. The Company's ownership in JSN increased to 42.62%.

Based on the Deed of Separation of the Regional Division of Jasamarga Transjawa Tollroad by PT Jasa Marga (Persero) Tbk to PT Jasamarga Transjawa Tol dated July 1, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has carried out a business separation by transferring all company ownership in JSN in the form of 42.62% share ownership to JTT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 19 tanggal 27 Juli 2023 oleh Notaris Mudita Chitta Odang, S.H, M.Kn, JTT menerima pengalihan saham terhadap LMJ yang memiliki saham di JSN sebesar 17%. Atas hal tersebut Perusahaan melalui JTT memiliki saham secara langsung dan tidak langsung terhadap JSN sebesar 59,53% dan melakukan pengendalian di JSN yang dicatat sebagai entitas anak yang dikonsolidasikan (Catatan 1.e).

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., No. 60, tanggal 24 Maret 2009. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17226.AH.01.01.TH.2009 tanggal 30 April 2009 yang kemudian dilakukan pengambilalihan dan pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 35, tanggal 10 Juni 2015,

Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham pada JNK sebesar 20% sesuai Akta Pemindahan Saham No. 5 tanggal 5 Juli 2018 kepada PT Lintas Marga Jawa (LMJ) sebanyak 8.864.210 saham atau setara Rp195.013 dengan harga penjualan sebesar Rp360.000 sehingga berdasarkan addendum Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 7 tanggal 5 Juli 2018 kepemilikan Perusahaan pada JNK turun menjadi 40%. Atas perubahan kepemilikan tersebut Perusahaan sudah tidak lagi memiliki pengendalian terhadap JNK dan beralih menjadi ventura bersama.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar JNK No. 139 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., perihal perubahan struktur permodalan Pemegang Saham JNK yang mana JNK telah melakukan konversi atas *Mandatory Convertible Loan* milik Perusahaan sebesar Rp251.222, sebagai bentuk penyertaan modal di JNK. Sehingga, Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebanyak 34.070.766 lembar saham atau setara Rp749.557 yang merupakan 45% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor di JNK.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) (continued)

Based on Deed of Share Transfer No. 19 dated July 27, 2023 by Notary Mudita Chitta Odang, S.H, M.Kn, JTT received the transfer of shares to LMJ which owns 17% of shares in JSN. Due to this, the Company through JTT owns shares directly and indirectly in JSN amounting to 59.53% and exercises control over JSN which is recorded as a consolidated subsidiary (Note 1.e).

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri was established in Indonesia based on Notarial Deed Sugito Tedjamulja, S.H., No. 60, dated March 24, 2009. The Deed of Establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-17226.AH.01.01.TH.2009 dated April 30, 2009 which was subsequently taken over and transferred shares based on the Notarial Deed Fathiah Helmi, S.H., No. 35, dated on June 10, 2015,

The Company divested 20% of the share ownership in JNK in accordance with the Deed of Transfer No. 5 dated on July 5, 2018 to PT Lintas Marga Jawa (LMJ) 8,864,210 shares or equivalent to Rp195,013 at a selling price of Rp360,000 so that based on the addendum to the Deed of Shareholder Agreement No. 7 dated on July 5, 2018, the Company's ownership in JNK decreased to 40%. Due to the change in ownership, the Company no longer has control over JNK and it becomes a joint venture.

In accordance with the Amendment Deed of the JNK Articles of Association No. 139 dated December 23, 2019 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Bachelor of Law, Master of Notary, regarding the change in Shareholder capital structure of JNK which JNK has converted the *Mandatory Convertible Loan* owned by the Company amounted to Rp251,222, as capital investment in JNK. Therefore, the Company has 34,070,766 shares or equivalent to Rp749,557 which represent 45% of the total issued and paid up share capital in JNK.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad oleh Perusahaan kepada JTT tanggal 1 Juli 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan telah melakukan pemisahan usaha dengan mengalihkan seluruh kepemilikan Perusahaan pada JNK sebesar 45% kepemilikan saham kepada JTT.

Berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 19 tanggal 27 Juli 2023 oleh Notaris Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn, JTT menerima pengalihan saham terhadap LMJ yang memiliki saham di JNK sebesar 15%. Atas hal tersebut Perusahaan melalui JTT memiliki saham secara langsung dan tidak langsung terhadap JNK sebesar 59,60% dan melakukan pengendalian di JNK yang dicatat sebagai entitas anak yang dikonsolidasikan (catatan 1.e).

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) didirikan pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta Notaris No. 128 dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., di Jakarta. Anggaran dasar JSB telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui surat Keputusan tertanggal 21 April 2016 No. AHU-0020465.AH.01.01 tahun 2016.

Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham di JSB sebesar 20% sesuai Akta Pemindahan Saham No. 5 tanggal 5 Juli 2018 kepada PT Lintas Marga Jawa (LMJ) yaitu sebanyak 26.725.000 saham atau setara Rp26.725 dengan harga penjualan sebesar Rp60.820. Berdasarkan addendum Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 9 tanggal 5 Juli 2018, kepemilikan Perusahaan pada JSB turun menjadi 40%. Atas perubahan kepemilikan saham tersebut, Perusahaan sudah tidak lagi memiliki pengendalian pada JSB dan investasi Perusahaan di JSB dicatat sebagai ventura bersama.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, sesuai Akta Notaris Toni Lizardo, S.H., M.Kn., No. 4007 tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp37.680 sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp1.846.112. Kepemilikan Perusahaan pada JSB meningkat menjadi 44,18%.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

**PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK)
(continued)**

Based on the Deed of Separation of the Regional Division of Jasamarga Transjawa Tollroad by the Company to JTT dated July 1, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has separated the business by transferring all the Company's ownership in JNK of 45% share ownership to JTT.

Based on Deed of Share Transfer No. 19 dated 27 July 2023 by Notary Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn, JTT received the transfer of shares to LMJ which owns 15% of shares in JNK. Due to this, the Company through JTT owns shares directly and indirectly in JNK amounting to 59.60% and exercises control over JNK which is recorded as a consolidated subsidiary (note 1.e).

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) was established on April 21, 2016 based on Notarial Deed No. 128 made before Haji Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Articles of Association of JSB have been authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, through in the Decision Letter dated April 21, 2016 No. AHU-0020465.AH.01.01 of 2016.

The Company divested 20% of the share ownership in JSB in accordance with the Deed of Share Transfer No. 5 dated on July 5, 2018 to 26,725,000 shares of PT Lintas Marga Jawa (LMJ) or equivalent to Rp26,725 at a selling price of Rp60,820. Based on the addendum to the Deed of Shareholder Agreement No. 9 dated on July 5, 2018, the Company's ownership in JSB decreased to 40%. Due to the change in share ownership, the Company no longer has control over the JSB and the Company's investment in JSB is accepted for as joint venture.

On October 29, 2021, in accordance with Notarial Deed of Toni Lizardo, S.H., M.Kn., No. 4007 dated October 29, 2021, the Company agreed to increase total issued and paid-up share capital totaling to Rp37,680 and total issued and paid-up share capital totaling Rp1,846,112. The Company's ownership in JSB increased to 44.18%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad oleh Perusahaan kepada JTT tanggal 1 Juli 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan telah melakukan pemisahan usaha dengan mengalihkan seluruh kepemilikan Perusahaan pada JSB sebesar 44,18% kepemilikan saham kepada JTT.

Berdasarkan Akta Pengalihan Saham No. 19 tanggal 27 Juli 2023 oleh Notaris Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., JTT menerima pengalihan saham terhadap LMJ yang memiliki saham di JSB sebesar 16%. Atas hal tersebut Perusahaan melalui JTT memiliki saham secara langsung dan tidak langsung terhadap JSB sebesar 59,80% dan melakukan pengendalian di JSB yang dicatat sebagai entitas anak yang dikonsolidasikan (Catatan 1.e).

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) didirikan pada tanggal 25 September 1996 untuk membangun Jalan Tol Gempol - Pandaan dengan mendirikan PT Margabumi Adhikaraya berdasarkan Akta Notaris No. 142 tanggal 25 September 1996 bersama dengan PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal dan PT Adhika Prakarsatama.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JPT tanggal 26 November 2015, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar JPT. Setelah penyeteroran oleh Perusahaan, maka porsi saham Perusahaan di JPT meningkat menjadi sebesar 90,71%.

Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham pada JPT berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 24 Mei 2019 kepada PT Trans Optima Luhur dengan mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh JPT sehingga kepemilikan saham di JPT adalah 252.053.913 lembar saham atau setara dengan Rp252.054 yang mewakili 40% dari total seluruh saham yang berjumlah 630.134.783 lembar saham, atau setara Rp630.135. Atas perubahan kepemilikan tersebut, Perusahaan sudah tidak lagi memiliki pengendalian terhadap JPT dan beralih menjadi ventura bersama.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

**PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)
(continued)**

Based on the Deed of Separation of the Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division by the Company to JTT dated July 1, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has separated the business by transferring all the Company's ownership in JSB of 44.18% share ownership to JTT.

Based on Deed of Share Transfer No. 19 dated July 27, 2023 by Notary Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., JTT received the transfer of shares to LMJ which owns 16% of shares in JSB. Due to this, the Company through JTT owns shares directly and indirectly in JSB amounting to 59.80% and exercises control over JSB which is recorded as a consolidated subsidiary (Note 1.e).

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

PT Jasamarga Pandaan Toll (JPT) was established on September 25, 1996 to build Gempol - Pandaan with PT Margabumi Adhikaraya established by Notarial Deed No. 142 dated September 25, 1996, together with PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal and PT Adhika Prakarsatama.

Based on the Deed of Shareholders resolution in lieu of General Meeting of JPT's shareholders dated November 26, 2015, the shareholders agreed to increase the authorized capital of JPT. After the payment of shares by the Company, the portion of the Company's shares in JPT increased to 90.71%.

The Company divested shares in JPT based on Notarial Deed No. 46 dated May 24, 2019 to PT Trans Optima Luhur by taking part in new shares issued by JPT so that the share ownership JPT is 252,053,913 shares or equivalent to Rp252,054 which represents 40% of the total shares 630,134,783 or equivalent to Rp630,135. Due to the change in ownership, the Company no longer has control of JPT and it becomes a joint venture.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad oleh Perusahaan kepada JTT tanggal 1 Juli 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan telah melakukan pemisahan usaha dengan mengalihkan seluruh kepemilikan Perusahaan pada JPT sebesar 40% kepemilikan saham kepada JTT.

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ)

JMJ didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 9 September 2020 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0044988.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 9 September 2020.

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0003427.AH.01.02 tanggal 19 Januari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jasamarga Jogja Solo, komposisi pemegang saham JMJ adalah Perusahaan sebesar 49,15%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 47,18% dan PT Daya Mulia Turangga sebesar 3,67%.

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0148518 tanggal 7 Agustus 2023, terdapat transaksi penjualan atau pengalihan saham milik PT Dayamulia Turangga kepada Perusahaan sebanyak 54.060 lembar saham sehingga komposisi kepemilikan Perusahaan sebesar Rp777.780 atau sebesar 52,82%.

Berdasarkan akta nomor 04 tanggal 27 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0150356 tanggal 4 Desember 2023 terdapat peningkatan modal saham sebesar Rp350.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan sebesar Rp184.867.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 962.647 lembar saham yang mewakili kepemilikan sebesar 52,82%.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) (continued)

Based on the Deed of Separation of the Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division by the Company to JTT dated July 1, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has separated the business by transferring all the Company's ownership in JPT of 40% share ownership to JTT.

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ)

JMJ was established based on Notarial Deed No. 6 dated on September 9, 2020 from Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0044988.AH.01.01.TAHUN 2020 dated September 9, 2020.

Based on Notarial Deed No. 03 dated January 13, 2023 made before Notary Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn. and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0003427.AH.01.02 dated January 19, 2023 regarding receipt of notification of changes in the Company's Articles of Association, the composition of JMJ's shareholders is the Company at 49.15%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk at 47.18% and PT Daya Mulia Turangga at 3.67%.

Based on Deed No. 02 dated August 1, 2023 made before Notary Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn., which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0148518 dated August 7, 2023, there was a sale or transfer transaction of shares belonging to PT Dayamulia Turangga to the Company amounting to 54,060 shares so that the composition of share ownership for the Company was Rp777,780 or 52.82%.

Based on deed number 04 dated November 27, 2023 made before Notary Ni Nyoman Rai Sumawati S.H., M.Kn., which has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0150356 dated December 4, 2023 there is an increase in capital shares amounting to Rp350,000 which the Company took part amounting to Rp184,867.

As of December 31, 2023, the Company owns 962,647 shares which represents 52.82% of ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)

CBMP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 50, tanggal 11 Desember 1995, Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CBMP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi E2 - E3 - N (Cikunir - Cakung - Cilincing - Tanjung Priok) untuk jangka waktu 33 tahun dan akan berakhir pada tahun 2028, Perusahaan memiliki 56.787.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp56.787 yang merupakan 34,83% dari total kepemilikan.

Pembangunan jalan tol oleh CBMP dibiayai dari fasilitas pinjaman sindikasi bank. Krisis ekonomi telah menyebabkan ketidakpastian terhadap kemampuan CBMP dalam menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dan dalam merealisasikan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan jalan tol tahap konstruksi. Restrukturisasi yang dilakukan terhadap sebagian dari kreditur CBMP telah mengakibatkan penghentian pelaksanaan pembangunan jalan tol.

Adanya surat Perusahaan kepada CBMP No. AA.02.1009 tanggal 25 Juli 2000 mengenai pengakhiran PKP No. 96 tanggal 16 Desember 1995 mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada CBMP tidak memiliki nilai ekonomis, Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CBMP pada tahun 2000 sebesar Rp56.787.

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

CGMN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 300, tanggal 22 Desember 1993, Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., dalam Akta No. 67 tanggal 7 Juli 1994 dari Notaris Sri Laksmi Damayanti, S.H. Penyertaan pada CGMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Cikampek - Padalarang. Perusahaan memiliki 5.310 saham dengan nilai nominal Rp1.841 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp9.775 yang merupakan 30% dari total kepemilikan.

PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)

CBMP was established based on the Notarial Deed No. 50, dated December 11, 1995, Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CBMP was made in relation to the construction and operation of JORR toll road Section E2 - E3 - N (Cikunir - Cakung - Cilincing - Tanjung Priok) for period of 33 years and will be ending in 2028. The Company owns 56,787,000 shares at par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp56,787 representing 34.83% of the total ownership.

Toll road construction by CBMP was financed by loan facilities from a syndicated bank loan. The economic crisis created an uncertainty about the ability of CBMP to settle its liabilities at the maturity date and in using its loan facilities to finance the toll road construction progress. A restructuring conducted by certain of CBMP's creditors resulted to the stoppage of toll road construction.

The Company issued Letter No. AA.02.1009, dated July 25, 2000, to CBMP regarding the termination of the Concession Agreement No. 96, dated December 16, 1995. As a consequence of this termination, the Company's investment in CBMP has no economic value. The Company has recognized loss on impairment of the investment shares of CBMP in 2000 amounting to Rp56,787.

PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

CGMN was established based on the Notarial Deed No. 300, dated December 22, 1993, Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., in conjunction with the Deed No. 67 dated July 7, 1994 of Notary Sri Laksmi Damayanti, S.H. The investment in CGMN was made in relation to the construction and operation of the Cikampek - Padalarang toll road project. The Company owned 5,310 shares at par value of Rp1,841 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp9,775 representing 30% of the total ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)
(lanjutan)**

Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. KU.201-Mn/68 tanggal 4 Maret 1996 dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1562/A/52/0496 tanggal 18 April 1996, Perusahaan memperoleh pengalihan *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bentuk rancangan proyek jalan tol Cikampek - Padalarang sebesar £4,700,000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp16.914 sebagai Tambahan Modal Disetor Pemerintah pada Perusahaan.

Selanjutnya, Perusahaan mengalihkan IPR tersebut kepada CGMN sebagai penyertaan saham Perusahaan di CGMN. Berdasarkan perjanjian usaha patungan antara Perusahaan dengan CGMN, IPR tersebut dinilai setara dengan US\$8,530. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGMN tanggal 10 Juli 1998 mengenai Peningkatan Modal Disetor, kepemilikan saham pada CGMN sejumlah 8.530 lembar saham dengan nilai nominal US\$8,530,000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp16.914.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada CGMN No. AA.HK01.1273 tanggal 25 Juli 2001 mengenai pengakhiran PKP No. 297 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Menkimpraswil) No. 417 tanggal 18 Juli 2001 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 321/KPTS/1994, tanggal 24 Oktober 1994 mengenai Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek - Padalarang kepada Perusahaan dalam bentuk usaha patungan dengan CGMN mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada CGMN tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CGMN sebagai beban tahun 2001 sebesar Rp16.914.

PT Bukaka Marga Utama (BMU)

BMU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 17 Februari 1997, Sri Rahayu Sedyono, S.H. Penyertaan pada BMU dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi. Perusahaan memiliki 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.359.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp9.436 yang merupakan 20% dari total kepemilikan.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

**PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)
(continued)**

Based on the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. KU.201-Mn/68 dated March 4, 1996 and the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1562/A/52/0496 dated April 18, 1996, the Company obtained a transfer of "Intellectual Property Rights (IPR)" in the form of project design of Cikampek - Padalarang toll road amounting to £4,700,000 (full amount) or equivalent to Rp16,914 as additional paid-in capital from the Government to the Company.

The Company then transferred the IPR to CGMN as an investment by the Company to CGMN. Based on the joint venture agreement between the Company and CGMN, the IPR was valued at US\$8,530. According to the decision during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held by CGMN on July 10, 1998 regarding the increase in paid up capital, the Company owns 8,530 shares at par value of US\$8,530,000 (full amount) or equal to Rp16,914.

Based on the Company's Letter No. AA.HK01.1273 to CGMN regarding termination of the Concession Agreement No. 297 dated July 25, 2001 as a follow up from the Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure of the Republic of Indonesia No. 417 dated July 18, 2001 regarding cancellation of the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 321/KPTS/1994 dated October 24, 1994 regarding the Granting of license to Concession Agreement to the Company to operate the Cikampek - Padalarang toll road in the form of a joint venture with CGMN. Due to such termination, the investment in CGMN has no economic value. The Company recognized loss on the impairment of this investment in shares of CGMN in 2001 amounting to Rp16,914.

PT Bukaka Marga Utama (BMU)

BMU was established based on Notarial Deed No. 5 dated February 17, 1997 Sri Rahayu Sedyono, S.H. The investment in BMU was made in relation to the construction and operation of the Ciawi-Sukabumi toll road project. The Company owns 4,000 shares at par value Rp2,359,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp9,436 which represent 20% of the total ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Bukaka Marga Utama (BMU) (lanjutan)

Pemegang saham mayoritas BMU tidak dapat memberi kepastian atas pembangunan ruas jalan tol yang telah disetujui sesuai dengan PKP.

Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada BMU sebagai beban tahun 2005 sebesar Rp9.436.

PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB)

PPSB didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 7 Februari 2019, Ni Nyoman Raisumawati, S.H., M.Kn., di Jakarta dalam rangka pengelolaan Rest Area KM 260 Brebes. Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 2460435.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019.

JMRB, Entitas Anak, memiliki 126.849.230 lembar saham dengan nominal Rp100 per lembar saham atau setara dengan Rp12.685 dengan total keseluruhan saham sebesar Rp63.425 atau setara dengan 20% kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

MLJ didirikan berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009.

Berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H., di Jakarta mengenai penambahan jumlah modal ditempatkan dan disetor pada PT MLJ, Perusahaan memiliki 267.167.550 lembar saham atau setara dengan 65% kepemilikan saham dan PT Jakarta Marga Jaya memiliki 143.859.450 lembar saham atau setara dengan 35% kepemilikan saham yang diterbitkan oleh MLJ.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Bukaka Marga Utama (BMU) (continued)

The majority shareholders of BMU could not give assurance regarding the toll road development as agreed under the Concession Agreement.

The Company recognized loss on impairment related to this investment in 2005 amounting to Rp9,436.

PT PP Sinergi Banjaratma (PPSB)

PPSB was established based on Notarial Deed No. 2 dated February 7, 2019, Ni Nyoman Raisumawati, S.H., M.Kn., in Jakarta in the framework of the management of the Rest Area KM 260 Brebes. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU 2460435.AH.01.01 of 2019 on October 12, 2019.

JMRB, a Subsidiary, has 126,849,230 shares with a nominal value of Rp100 per share or equivalent to Rp12,685 with a total stock of Rp63,425 or equal to 20% of share ownership as of December 31, 2023 and 2022.

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

MLJ was established based on Deed No. 26 dated August 24, 2009 made before Edi Priyono, S.H., Notary in Jakarta. The Company's Articles of Association have been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-45700. AH.01.01 Year 2009 dated September 15, 2009.

Based on Deed No. 3 from Notary Tatyana Indrati Hasjim, S.H., in Jakarta regarding the addition of the issued and paid-up capital in PT MLJ, the Company has 267,167,550 shares or equivalent to 65% share ownership and PT Jakarta Marga Jaya has 143,859,450 shares or equivalent to 35% share ownership issued by MLJ.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) (lanjutan)

Pada tanggal 28 Juni 2021, Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham pada MLJ. Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 28 Juni 2021, Perusahaan mengurangi kepemilikan saham yang diterbitkan oleh MLJ menjadi 334.420.770 lembar saham yang mewakili 51% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan di MLJ. Berdasarkan akta tersebut, MLJ dikendalikan secara bersama antara Perusahaan dan PT Jakarta Marga Jaya (JMJ) yang menyebabkan Perusahaan kehilangan kendali atas MLJ sehingga sejak tanggal 28 Juni 2021 Perusahaan tidak lagi mengkonsolidasikan laporan keuangan MLJ ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan mencatat investasi di MLJ sebagai investasi pada ventura bersama.

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

JPM didirikan pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 09. Anggaran dasar telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dari surat Keputusan tertanggal 8 Juni 2016 No. AHU-0027731.AH.01.01 Tahun 2016.

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 16 Maret 2020 dari Notaris Dra.Ec. Inggriati Djojoseputro, S.H., di Surabaya mengenai penambahan jumlah modal ditempatkan dan disetor pada JPM, Perusahaan memiliki 1.066.788 lembar saham atau setara dengan 60% kepemilikan saham, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk memiliki 622.293 lembar saham atau setara dengan 35% kepemilikan saham, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memiliki 88.899 lembar saham atau setara dengan 5% kepemilikan saham yang diterbitkan oleh JPM.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) (continued)

On June 28, 2021, the Company divested its share ownership in MLJ. Based on Notarial Deed No. 11 dated June 28, 2021, the Company reduced its shareholding issued by MLJ to 334,420,770 shares representing 51% of the total issued shares in MLJ. Based on the deed, MLJ is jointly controlled between the Company and PT Jakarta Marga Jaya (JMJ) which causes the Company to lose control of MLJ so that since June 28, 2021 the Company no longer consolidates MLJ's financial statements into the Company's consolidated financial statements and records the investment in MLJ as an investment in a joint venture.

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)

JPM was established on June 6, 2016 based on Notarial Deed Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 09. The articles of association have obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as from the Decree dated June 8, 2016 No. AHU-0027731. AH.01.01 Year 2016.

Based on Deed No. 4 dated March 16, 2020 from Notary Dra.Ec. Inggriati Djojoseputro, S.H., in Surabaya regarding the addition of the issued and paid-up capital in JPM, the Company has 1,066,788 shares or equivalent to 60% share ownership, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk has 622,293 shares or equivalent to 35% share ownership, and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) has 88,899 shares or equivalent to 5% share ownership issued by JPM.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2021, Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham pada JPM. Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 30 Desember 2021, Perusahaan mengurangi kepemilikan saham yang diterbitkan oleh JPM menjadi 906.770 lembar saham yang mewakili 51% dari total seluruh saham yang telah diterbitkan di JPM. Berdasarkan akta tersebut, JPM dikendalikan secara bersama antara Perusahaan dan PT Astra Tol Nusantara yang menyebabkan Perusahaan kehilangan kendali atas JPM sehingga sejak tanggal 30 Desember 2021, Perusahaan tidak lagi mengkonsolidasikan laporan keuangan JPM ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan mencatat investasi di JPM sebagai investasi pada ventura bersama.

Berdasarkan Akta Pemisahan Divisi Regional Jasamarga Transjawa Tollroad oleh Perusahaan kepada JTT tanggal 1 Juli 2022 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan telah melakukan pemisahan usaha dengan mengalihkan seluruh kepemilikan Perusahaan pada JPM sebesar 51% kepemilikan saham kepada JTT. JPM dikendalikan secara bersama antara JTT dan PT Astra Tol Nusantara.

PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)

JGC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Januari 2022 dibuat oleh Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan AHU-007369.AH.01.01 tanggal 29 Januari 2022, dalam rangka melaksanakan pengusahaan ruas jalan tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.

Berdasarkan surat BPJT Nomor BM.08-P/69.2 tanggal 14 Februari 2022, menyatakan bahwa JGC melakukan cidera janji dengan gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai yang dipersyaratkan dalam PPJT. Setelah tenggat waktu masa perbaikan cidera janji telah terlewati, JGC tetap tidak sanggup untuk menyediakan jaminan pelaksanaan. Atas dasar hal tersebut, Perusahaan berkeyakinan bahwa JGC tidak memiliki nilai ekonomis.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

**PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM)
(continued)**

On December 30, 2021, the Company divested its share ownership in JPM. Based on Notarial Deed No. 16 dated December 30, 2021, the Company reduced its shareholding issued by JPM to 906,770 shares representing 51% of the total issued shares in JPM. Based on this deed, JPM is jointly controlled between the Company and PT Astra Tol Nusantara which causes the Company to lose control of JPM so that since December 30, 2021, the Company no longer consolidates JPM's financial statements into the Company's consolidated financial statements and records the investment in JPM as an investment in a joint venture.

Based on the Deed of Separation of the Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division by the Company to JTT dated July 1, 2022 by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has carried out a business separation by transferring all the Company's ownership in JPM of 51% share ownership to JTT. JPM is jointly controlled between JTT and PT Astra Tol Nusantara.

PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)

JGC was established based on Notarial Deed No. 08 dated January 28, 2022 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., and authorized by The Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-007369.AH.01.01 dated January 29, 2022, aimed to develop the concession of the Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap toll road section.

Based on the letter Number BM.08-P/69.2 dated February 14, 2022 by BPJT, JGC committed default by failing to submit the implementation guarantee as required in the PPJT. After the deadline for the default period has passed, JGC remains unable to provide guarantees of implementation. Therefore, the Company considers that JGC has no economic value.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)
(lanjutan)**

Perusahaan memiliki 19.811 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp1.981 yang merupakan 32,5% dari total kepemilikan. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada JGC sebagai beban akhir tahun 2022 sebesar Rp52.975.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

JJC didirikan pada tanggal 24 November 2016 berdasarkan Akta No. 13 dibuat di hadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., di Jakarta. Anggaran dasar telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dari surat Keputusan tanggal 28 November 2016 No. AHU-0052873.AH.01.01 tahun 2016.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., di Karawang mengenai penambahan jumlah modal ditempatkan dan disetor pada JJC, Perusahaan memiliki 4.531.556 lembar saham atau setara dengan 80% kepemilikan saham, dan PT Ranggi Sugironperkasa memiliki 1.132.889 lembar saham atau setara dengan 20% kepemilikan saham yang diterbitkan oleh JJC.

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2022 dari Notaris Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., terkait pengalihan saham dalam JJC yang dimiliki oleh Perusahaan kepada JTT sebesar 2.265.778 lembar saham atau setara dengan 40% kepemilikan saham yang diterbitkan oleh JJC.

Pada tanggal 10 Oktober 2022, Perusahaan melakukan divestasi kepemilikan saham pada JJC. Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 10 Oktober 2022, Perusahaan melakukan penjualan atas seluruh kepemilikan 2.265.778 lembar saham atau setara dengan 40% kepemilikan saham yang diterbitkan oleh JJC. Perusahaan tidak lagi mengkonsolidasikan laporan keuangan JJC ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

**PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)
(continued)**

The Company owns 19,811 shares at par value of Rp100,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp1,981 which represent 32.5% of the total ownership. The company acknowledged the loss of impairment of shares in JGC as an expense at the end of 2022 of Rp52,975.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC)

JJC was established on November 24, 2016 based on Deed No. 13 made before Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., in Jakarta. The articles of association have obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as from the Decree dated November 28, 2016 No. AHU-0052873. AH.01.01 of 2016.

Based on Deed No. 5 dated December 31, 2021 from Notary Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., in Karawang regarding the addition of the issued and paid-up capital in JJC, the Company has 4,531,556 shares or equivalent to 80% share ownership, and PT Ranggi Sugironperkasa has 1,132,889 shares or equivalent to 20% share ownership issued by JJC.

Based on Deed No. 1 dated July 1, 2022 from Notary Mudita Chitta Odang, S.H., M.Kn., regarding the transfer of shares JJC owned by the Company to JTT in the amount of 2,265,778 shares or equivalent to 40% share ownership issued by JJC.

On October 10, 2022, the Company divested its share ownership in JJC. Based on Notarial Deed No. 2 dated October 10, 2022, the Company sold its entire ownership of 2,265,778 shares or equivalent to 40% share ownership issued by JJC. The Company no longer consolidates JJC's financial statements into the Company's consolidated financial statements.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

PT Ismawa Trimitra (IT)

IT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 14 Juni 1995 dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., dalam rangka perusahaan jasa sewa ruang perkantoran. Anggaran dasar IT telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 16 Oktober 2015 dari Vidhya Shah, S.H., Akta Perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0977531 tanggal 4 November 2015.

Pada tanggal 14 September 2022, Perusahaan melakukan penjualan atas seluruh kepemilikan 6.250.000 lembar saham IT dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp6.250 yang merupakan 25% dari total kepemilikan.

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURE (continued)**

PT Ismawa Trimitra (IT)

IT was established based on Notarial Deed No. 69 dated June 14, 1995 of Imas Fatimah, S.H., aimed to develop services in office spaces for rental. IT's articles of association had been amended several times, with the latest of which was based on Notarial Deed No. 3 dated October 16, 2015 of Vidhya Shah, S.H., The Deed of Amendment was authorized by The Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0977531 dated November 4, 2015.

As of September 14, 2022, the Company sold its entire ownership of 6,250,000 shares of IT at par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp6,250 which represent 25% of the total ownership.

11. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS

The details of fixed assets are as follows:

2023							
Saldo Awal/ Beginning	Penambahan dari efek Kombinasi Bisnis/ Addition of Business Combination	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan							Acquisition Cost
Aset Tetap Pemilikan Langsung							Direct Acquisition Assets
Tanah	43.483	2.672	-	-	46.155	Land	
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	82.740	22.990	31.222	4.048	171.102	Office and Other Buildings	
Peralatan Operasi dan Kantor	585.814	13.365	30.937	5.779	627.884	Operational and Office Equipment	
Kendaraan Bermotor	87.644	18	276	-	87.938	Vehicles	
Sub Total	799.681	39.045	62.435	9.827	933.079	Sub Total	
Aset Tetap dalam Konstruksi							Construction in Progress
Aset Hak Guna							Right of Use Assets
Kendaraan Bermotor	197.664	15.432	72.582	4.583	279.358	Vehicles	
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	7.207	21.417	1.947	190	32.118	Office and Other Buildings	
Peralatan Operasi dan Kantor	19.442	22	30.673	-	50.137	Operational and Office Equipment	
Sub Total	224.313	36.871	105.202	4.773	361.613	Sub Total	
Total Harga Perolehan	1.042.731	75.916	182.626	14.600	1.316.127	Total Acquisition Cost	
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Aset Tetap Pemilikan Langsung							Direct Acquisition Assets
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	21.024	4.901	8.521	3.671	38.838	Office and Other Buildings	
Peralatan Operasi dan Kantor	475.452	13.938	33.478	5.779	516.179	Operational and Office Equipment	
Kendaraan Bermotor	79.514	14	2.804	-	82.332	Vehicles	
Sub Total	575.990	18.853	44.803	9.450	637.349	Sub Total	
Aset Hak Guna							Right of Use Assets
Kendaraan Bermotor	90.499	4.602	66.564	4.583	155.397	Vehicles	
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	5.539	18.328	3.167	190	28.529	Office and Other Buildings	
Peralatan Operasi dan Kantor	9.987	22	10.442	-	20.451	Operational and Office Equipment	
Sub Total	106.025	22.952	80.173	4.773	204.377	Sub Total	
Total Akumulasi Penyusutan	682.015	41.805	124.976	14.223	841.726	Total Accumulated Depreciations	
Nilai Tercatat	360.716				474.401	Carrying Amount	

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Ases Tetap Pemilikan Langsung						Direct Acquisition Assets
Tanah	43.483	-	-	-	43.483	Land
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	76.572	4.883	1.462	2.747	82.740	Office and Other Buildings
Peralatan Operasi dan Kantor	543.308	15.097	15.833	43.242	585.814	Operational and Office Equipment
Kendaraan Bermotor	91.009	4.571	9.546	1.610	87.644	Vehicles
Sub Total	754.372	24.551	26.841	47.599	799.681	Sub Total
Ases Tetap dalam Konstruksi	64.698	18.770	-	(64.731)	18.737	Construction in Progress
Ases Hak Guna						Right-of-Use Assets
Kendaraan Bermotor	180.435	70.496	48.290	(4.977)	197.664	Vehicles
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	1.653	402	-	5.152	7.207	Office and Other Buildings
Peralatan Operasi dan Kantor	30.668	4.951	15.800	(377)	19.442	Operational and Office Equipment
Sub Total	212.756	75.849	64.090	(202)	224.313	Sub Total
Total Harga Perolehan	1.031.826	119.170	90.931	(17.334)	1.042.731	Total Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Ases Tetap Pemilikan Langsung						Direct Acquisition Assets
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	17.265	3.842	55	(28)	21.024	Office and Other Buildings
Peralatan Operasi dan Kantor	386.240	103.270	15.086	1.028	475.452	Operational and Office Equipment
Kendaraan Bermotor	82.907	4.456	4.776	(3.073)	79.514	Vehicles
Sub Total	486.412	111.568	19.917	(2.073)	575.990	Sub Total
Ases Hak Guna						Right of Use Assets
Kendaraan Bermotor	79.397	60.116	45.886	(3.128)	90.499	Vehicles
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	1.210	1.232	-	3.097	5.539	Office and Other Buildings
Peralatan Operasi dan Kantor	19.199	6.714	15.800	(126)	9.987	Operational and Office Equipment
Sub Total	99.806	68.062	61.686	(157)	106.025	Sub Total
Total Akumulasi Penyusutan	586.218	179.630	81.603	(2.230)	682.015	Total Accumulated Depreciations
Nilai Tercatat	445.608				360.716	Carrying Amount

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets are allocated as follows:

	2023	2022	
Beban tol dan usaha lainnya (Catatan 38)	56.752	102.373	Toll and other operating expenses (Note 38)
Beban umum dan administrasi (Catatan 39)	68.224	77.257	General and administrative expenses (Note 39)
Total	124.976	179.630	Total

Kelompok Usaha telah mengasuransikan aset tetapnya dan beberapa aset tertentu pada aset hak perusahaan jalan tol terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada pihak berelasi: PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja Putra dan pihak ketiga: PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bringin Sejahtera, PT Asuransi Bumiputera Muda dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp2.634.773 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp2.749.014 pada 31 Desember 2022. Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

The Group's fixed assets and certain assets in toll road concession right are insured against fire and other risks with related parties: PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja Putra and third parties: PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bringin Sejahtera, PT Asuransi Bumiputera Muda with total coverage amounting to Rp2,634,773 as of December 31, 2023 and Rp2,749,014 as of December 31, 2022. Management of the Group believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Nilai perolehan aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah Rp352.029 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp349.557 pada 31 Desember 2022. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat dari aset tetap Kelompok Usaha.

Acquisition cost of fixed assets that are fully depreciation but still used is amounted to Rp352,029 as of December 31, 2023 and Rp349,557 as of December 31, 2022. There is no significant difference between the fair value and carrying value of the Group's fixed assets.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai aset tetap dalam konstruksi yang direklasifikasi senilai Rp12.291 di tahun 2023 sebagian besar direklasifikasi ke aset tetap peralatan operasi dan kantor sebesar Rp2.798 dan aset takberwujud lain Rp9.493.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan divestasi JJC sehingga menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu. Aset tetap JJC yang dihentikan pengakuannya, dengan nilai tercatat sebesar Rp1.876.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset yang dibatasi hak miliknya akibat utang.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset yang bersumber dari hibah.

Aset Tetap dalam Konstruksi adalah peralatan Tol yang masih dalam progres implementasi, dan pekerjaan tambah lingkup dan renovasi dari aset Gedung dan bangunan milik Perusahaan JMTM, dan JM RB.

Jumlah nilai kontraktual dalam perolehan aset tetap dalam konstruksi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.312.

Estimasi Penyelesaian Aset tetap dalam konstruksi pada 31 Desember 2023 dialokasikan sebagai Berikut :

	2023		
	Akumulasi Saldo/ Acumulated Balance	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year Of Completion	
Peralatan Operasi dan Kantor	16.667	2024	Office and Other Buildings
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	4.768	2024-2025	Operational and Office Equipment
Total	21.435		Total

Pada 2023, Perusahaan melakukan pengurangan atas aset hak guna kendaraan bermotor yang telah habis masa kontraknya.

Reklasifikasi aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS (continued)

The value of fixed assets in construction that were reclassified worth Rp12,291 in 2023 was mostly reclassified to fixed assets of operating and office equipment of Rp2,798 and other intangible asset Rp9,493.

The Group's Management believe that, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

In 2022, the Company divested JJC, thereby stopping the recognition of assets and liabilities of its previous subsidiaries. JJC's fixed assets were discontinued, with a recorded value of Rp1,876.

On December 31, 2023 and 2022, there are not assets to restricted due to loan.

On December 31, 2023 and 2022, there are not assets sourced from hibah.

Fixed Assets under Construction are Toll road equipment that is still in the progress of implementation, and increase the scope and renovation of building and building assets own by the Company, JMTM, and JM RB.

Total Contractual Value in the acquisition of construction in progress on December 31, 2023 amounted to Rp7,312.

Estimated completion of construction in Progress on December 31, 2023 are allocated as follows :

In 2023, the Company reduce the assets of motor vehicle use rights that have expired their contracts.

Reclassification of fixed assets are allocated as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. PROPERTI INVESTASI

12. INVESTMENT PROPERTIES

Akun ini merupakan properti investasi yang dimiliki oleh JMRB, entitas anak.

This account represents investment properties owned by JMRB, a subsidiary.

	2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						At cost
Properti Investasi	681.008	227.701	48.561	(1.722)	858.426	Investment properties
Akumulasi Penyusutan						Accumulated
Properti Investasi	76.719	30.150		-	106.869	Investment properties
Nilai Tercatat	604.289				751.557	Carrying Amount
	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						At cost
Properti Investasi	482.699	207.484	8.846	(329)	681.008	Investment properties
Akumulasi Penyusutan						Accumulated
Properti Investasi	57.678	20.285	1.244	-	76.719	Investment properties
Nilai Tercatat	425.021				604.289	Carrying Amount

Properti investasi terutama merupakan investasi pada bangunan tempat peristirahatan dan pelayanan, dan properti di Klungkung dan TOD taman Mini. Properti investasi tersebut disewakan ke pihak ketiga.

Investment properties represent investment in rest area building, and properties in Klungkung and Tod Taman Mini. These investment properties are rented to third parties.

Pengurangan pada properti investasi tahun 2023 dan 2022 merupakan penyesuaian pada saldo harga perolehan dan akumulasi penyusutan.

Deductions for investment properties in 2023 and 2022 are adjustments to the balance of the at cost and accumulated depreciation.

Nilai wajar dari aset bersih diestimasi dari nilai wajar Properti Investasi yang dihitung oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai independen Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), dalam laporannya No :

The fair value of net assets is estimated from the fair value of the Investment Properties calculated by KJPP Suwendho Rinaldy & Partners, independent appraiser Ocky Rinaldi, MAPPI (Cert), in report No :

- 00059/2.0059-02/PI/03/0242/1/II/2024 atas Tamansari Lagoon Apartement Condohotel Senilai Rp18.905
- 00061/2.0059-02/PI/03/0242/1/II/2024 atas penilaian atas Wyndham Tamansari Jivva Resort senilai Rp11.675

- 00059/2.0059-02/PI/03/0242/1/II/2024 for Tamansari Lagoon Apartment Condohotel Worth Rp. 18,905
- 00061/2.0059-02/PI/03/0242/1/II/2024 for the assessment of the Wyndham Tamansari Jivva Resort worth IDR 11,675

dengan tanggal penilaian 31 Desember 2023 dan tanggal laporan penilaian 12 Febuari 2024.

with an assessment date of December 31, 2023 and an assessment report date of February 12, 2024.

Penyusutan sebesar Rp30.150 dan Rp20.285 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan pada akun beban tol dan usaha lainnya (Catatan 38).

Depreciation amounting to Rp30,150 and Rp20,285, respectively for the years ended December 31, 2023 and 2022 was charged to toll and other operating expenses (Note 38).

Pendapatan sewa dan pendapatan properti investasi yang diakui pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp233.571 dan Rp225.463 (Catatan 36).

Revenues from rental and investment properties recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 are amounting to Rp233,571 and Rp225,463 (Note 36), respectively.

Beban sewa lahan dan properti yang diakui pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp182.190 dan Rp171.697 (Catatan 38).

Cost from properties and land rental recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2023 and 2022 are amounting to Rp182,190 and Rp171,697 (Note 38), respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL

13. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS

Rincian hak pengusahaan jalan tol adalah sebagai berikut:

The detail of toll road concession rights are as follows:

		2023					
	Saldo Awal/ Beginning	Penambahan dari efek Kombinasi Bisnis/ Addition of Business Combination	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan	80.568.946	39.819.882	8.360.223	-	(38.054)	128.710.997	Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi	13.589.284	1.847.464	2.035.946	-	(7.991)	17.464.703	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	<u>66.979.662</u>					<u>111.246.294</u>	Carrying Amount
		2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification		Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan	91.541.016	4.485.229	15.734.171		276.872	80.568.946	Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi	11.896.696	2.248.623	556.035		-	13.589.284	Accumulated Amortization
Nilai Tercatat	<u>79.644.320</u>					<u>66.979.662</u>	Carrying Amount

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Kelompok Usaha.

Toll road concession are rights are granted by the Government of Indonesia in the form of toll road concessions to the Group.

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.035.946 dan Rp2.248.623 dan dibebankan sebagai bagian dari beban tol dan usaha lainnya untuk ruas jalan tol yang sudah beroperasi secara komersial (Catatan 38).

Amortization of toll road concession rights for the years then ended December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp2.035.946 and Rp2,248,623 respectively and charged to toll and other operating expenses for the toll road section that already operated (Note 38).

Selama tahun 2023 dan 2022, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam hak pengusahaan jalan tol - aset konsesi dalam penyelesaian adalah masing-masing sebesar Rp441.296 dan Rp347.247.

During 2023 and 2022, borrowing cost capitalized to toll road concession rights - concession assets in progress is amounting to Rp441,296 and Rp347,247, respectively.

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan divestasi JJC sehingga menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu. Aset hak pengusahaan jalan tol JJC yang dihentikan pengakuannya sebesar Rp15.178.136.

In 2022, the Company divested JJC, thereby stopping the recognition of assets and liabilities of its previous subsidiaries. The assets of JJC toll road concession rights that were terminated were recognized as Rp15,178,136.

Beberapa hak penguasaan jalan tol pada entitas anak terikat sebagai jaminan kepada bank, Dimana didalamnya terdapat kuasa kepada bank untuk menarik hak pengusahaan dan menunjuk pihak ketiga sebagai operator jalan tol untuk melaksanakan PPJT terkait (Catatan 23).

Toll road concession rights in subsidiaries are bound as collateral to the bank, in which there is power for the bank to withdraw the right to operate and appoint a third party as the toll road operator to implement the related PPJT (Note 23).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

14. OTHER INTANGIBLE ASSETS

Rincian aset takberwujud lainnya adalah sebagai berikut:

Details of other intangible assets are as follows:

2023						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan dari efek Kombinasi Bisnis/ Addition of Business Combination	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Perangkat Lunak	401.960	5.329	67.713	-	10.322	485.324
Jumlah Harga Perolehan	401.960	5.329	67.713	-	10.322	485.324
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	320.886	5.096	48.931	-	838	375.751
Nilai Tercatat	81.074					109.573
						Carrying Amount
2022						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Biaya Perolehan						Cost
Aset Konsesi				(262.846)	-	-
Pra Konstruksi	262.846	-	-	3.637	-	-
Perangkat Lunak	338.532	60.078	287	(259.209)	401.960	401.960
Jumlah Harga Perolehan	601.378	60.078	287	(259.209)	401.960	401.960
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	277.018	41.660	22	2.230	320.886	320.886
Nilai Tercatat	324.360				81.074	81.074
						Carrying Amount

Beban amortisasi aset takberwujud lainnya sebesar Rp48.931 dan Rp41.660 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dibebankan pada akun beban umum dan administrasi (Catatan 39).

Amortization expense for other intangible assets amounting to Rp48,931 and Rp41,660 for the years ended December 31, 2023 and 2022, were charged to general and administrative expenses, respectively (Note 39).

15. GOODWILL

15. GOODWILL

Saldo *goodwill* merupakan selisih antara nilai wajar aset neto Perusahaan yang diakuisisi dari pihak ketiga dengan nilai akuisisi secara keseluruhan, dengan detail sebagai berikut:

The balance of goodwill consists of the difference between fair value of net assets of the following Companies acquired from third parties and the total acquisition price:

	2023	2022	
Nilai Tercatat			Carrying Amount
Akuisisi PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36.880	36.880	Acquisition of PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
Akuisisi PT Jasamarga Tollroad Maintenance	2.848	2.848	Acquisition of PT Jasamarga Tollroad Maintenance
Akuisisi PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	2.121	2.121	Acquisition of PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
Total	41.849	41.849	Total

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2023.

The Group's Management believes that there is no impairment in goodwill as of December 31, 2023.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA

Kelompok Usaha memiliki investasi pada instrumen ekuitas yang dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

16. OTHER FINANCIAL ASSETS

The Group has investment in equity instruments categorized as financial assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI) with details as follows:

Perusahaan/The Company	Status/ Status	%	2023 Perubahan Selama Setahun/ Changes in a Year				Saldo Akhir/ Ending Balance
			Saldo Awal/ Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan/ Addition	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value	
PT Marga Mandala Sakti (MMS)	Operasi/ Operate	1,94	72.619	-	-	20.879	93.498
PT Citra Margatama Surabaya (CMS)	Operasi/ Operate	3,17	12.071	-	-	13.514	25.585
	Pengakhiran PKP/						
PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)	Termination of Concession	4,75	-	-	-	-	-
	Pengakhiran PKP/						
PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)	Termination of Concession	15,00	-	-	-	-	-
	Belum Operasi/ Not Yet Operated						
PT Margaraya Jawa Tol (MJT)		2,47	-	-	-	-	-
PT Makassar Metro Network (MMN) d/h PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)	Operasi/ Operate	0,38	4.349	-	-	998	5.347
PT Jatim Prasarana Utama (JPU)	Operasi/ Operate	7,41	715	-	-	368	1.083
	Pengakhiran PKP/						
PT Marga Mawatindo Esprit (MME)	Termination of Concession	8,33	-	-	-	-	-
	Pengakhiran PKP/						
PT Marga Net One Limited (MNOL)	Termination of Concession	10,00	-	-	-	-	-
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Operasi/ Operate	8,30	-	-	-	-	-
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	Operasi/ Operate	0,30	3.003	-	-	(3.003)	-
PT Utama Marga Waskita (HAMAWAS)	Konstruksi/ Construction	0,50	44.859	-	-	(22.057)	22.802
Penyertaan tidak langsung melalui JMTO/ Indirect investment through JMTO							
PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA)	Operasi/ Operate	9,03	205.079	-	-	(108.048)	97.031
Penyertaan tidak langsung melalui JMRB/ Indirect investment through JMRB							
PT Sinergi Colomadu (SC)	Operasi/ Operate	8,00	7.000	-	-	(5.669)	1.331
Total			349.695	-	-	(103.018)	246.677

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

Perusahaan/The Company	Status/ Status	%	2022 Perubahan Selama Setahun/ Changes in a Year					Saldo Akhir/ Ending Balance
			Saldo Awal/ Beginning Balance	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan/ Addition	Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar/ Increase (Decrease) in Fair Value		
PT Marga Mandala Sakti (MMS)	Operasi/ Operate	1,94	50.571	-	-	22.048	72.619	
PT Citra Margatama Surabaya (CMS)	Operasi/ Operate	3,17	13.715	-	-	(1.644)	12.071	
PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	4,75	-	-	-	-	-	
PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	15,00	-	-	-	-	-	
PT Margaraya Jawa Tol (MJT)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	2,47	-	-	-	-	-	
PT Makassar Metro Network (MMN) d/h PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)	Operasi/ Operate	0,38	12.461	-	-	(8.112)	4.349	
PT Jatim Prasarana Utama (JPU)	Operasi/ Operate	7,41	1.576	-	-	(861)	715	
PT Marga Mawalindo Esprit (MME)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	8,33	-	-	-	-	-	
PT Marga Net One Limited (MNOL)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	10,00	-	-	-	-	-	
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	8,30	-	1.018.350	278.345	(1.296.695)	-	
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)	Operasi/ Operate	0,30	4.913	-	-	(1.910)	3.003	
PT Utama Marga Waskita (HAMAWAS)	Konstruksi/ Construction	0,97	-	-	-	44.859	44.859	
Penyertaan tidak langsung melalui JMTO/ Indirect investment through JMTO								
PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA)	Operasi/ Operate	9,03	391.246	-	-	(186.167)	205.079	
Penyertaan tidak langsung melalui JMRRB/ Indirect investment through JMRRB								
PT Sinergi Colomadu (SC)	Operasi/ Operate	8,00	8.293	-	-	(1.293)	7.000	
Total			482.775	1.018.350	278.345	(1.429.775)	349.695	

a. PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA)

FINARYA didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Januari 2019 dari Notaris Bonardo Nasution, S.H., dalam rangka penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 0003446.AH.01.01 tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019.

Berdasarkan Akta Notaris Neilly Iralita Iswari S.H., M.Si., M.Kn., No. 185 tanggal 23 Desember 2019, JMTO menyetujui untuk mengambil bagian di dalam FINARYA melalui pembelian saham senilai Rp182.600 atau setara dengan kepemilikan 10% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 26 Oktober 2020 dari Notaris Bonardo Nasution, S.H., FINARYA meningkatkan modal saham atas 13.632 lembar seri B. Namun, JMTO tidak mengambil porsi atas penambahan tersebut. Dengan demikian, komposisi kepemilikan JMTO mengalami dilusi menjadi 9,31% pada tanggal 31 Desember 2020.

a. PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA)

FINARYA was established based on Deed No. 13 dated January 21, 2019 of Notary Bonardo Nasution, S.H., In the context of providing payment system services. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU 0003446.AH.01.01 of 2019 dated January 21, 2019.

Based on Notary Deed Neilly Iralita Iswari S.H., M.Sc., M.Kn., No. 185 dated December 23, 2019, JMTO agreed to take part in FINARYA through the purchase of shares amounted to Rp182,600 or equivalent to 10% ownership for the year ended December 31, 2020.

Based on Deed No. 18 dated October 26, 2020 of Notary Bonardo Nasution, S.H., FINARYA increase its paid-in capital by 13,632 shares series B. However, JMTO did not take any portion to the additional of shares. Thus, JMTO's composition of the ownership was diluted to 9.31% as of December 31, 2020.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**a. PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA)
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 8 Maret 2021 dari Notaris Bonardo Nasution, S.H., FINARYA menerbitkan 5.398 lembar saham seri B. Namun, JMTO tidak mengambil porsi atas saham tersebut. Dengan demikian, kepemilikan saham JMTO di FINARYA mengalami dilusi menjadi 9,06%.

Berdasarkan Akta No. 199 tanggal 23 Desember 2021 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., FINARYA meningkatkan modal saham atas 540 saham seri B. Namun, JMTO tidak mengambil porsi atas penambahan tersebut. Dengan demikian, komposisi kepemilikan JMTO mengalami dilusi menjadi 9,03% pada tanggal 31 Desember 2021.

Nilai wajar investasi saham di FINARYA ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 26 Februari 2024 untuk untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 4 Oktober 1989 dari Kartini Muljadi, S.H., penyertaan pada MMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Tangerang - Merak. Perusahaan memiliki 28.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp2.800 yang merupakan 8,68% kepemilikan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 4 April 1995 dari Notaris Sutjipto, S.H., penyertaan saham Perusahaan pada MMS sebesar 14.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham telah dijamin oleh Perusahaan sehubungan dengan fasilitas pinjaman sindikasi yang diperoleh MMS.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**a. PT Fintek Karya Nusantara (FINARYA)
(continued)**

Based on Deed No. 13 dated March 8, 2021 of Notary Bonardo Nasution, S.H., FINARYA issued 5,398 shares series B. However, JMTO did not take a portion of the shares. Thus, JMTO's share ownership in FINARYA has diluted to 9.06%.

Based on Deed No. 199 dated December 23, 2021 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., FINARYA issued 540 shares series B. However, the JMTO did not take a portion of the shares. Thus, JMTO's share ownership in Finarya has diluted to 9.03% as of December 31, 2021.

The fair value of share investments in FINARYA is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investments is based on the assessment conducted by KJPP Stefanus Tonny Hardi & Partner, an independent appraiser registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 26, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS was established based on the Notarial Deed No. 14 dated October 4, 1989 from Kartini Muljadi, S.H., The investment in MMS relates to the construction and operation of the Tangerang - Merak toll road. The Company originally owned 28,000,000 shares at par value of Rp100 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp2,800 which represent 8.68% ownership interest.

Based on the Notarial Deed No. 4 dated April 4, 1995 of the Notary Sutjipto, S.H., the investment in MMS amounting to 14,000,000 shares with the par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share has been pledged by the Company in connection with syndicated loan facilities received by MMS.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS) (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 9 Desember 2004 dari Hendra Karyadi, S.H., para pemegang saham menyetujui penerbitan 921.310.773 lembar saham baru kepada pemegang obligasi konversi. Para pemegang saham lama menyatakan telah melepaskan hak masing-masing untuk membeli saham baru yang diterbitkan kepada pemegang obligasi konversi tersebut. Perubahan pemegang saham tersebut sesuai dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 1 Agustus 2005 dari Notaris Benny Kristianto, S.H., mengenai perubahan pemegang saham MMS dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.14078 tanggal 23 September 2005, sehingga kepemilikan Perusahaan pada MMS menjadi sebesar 1,94% dari total kepemilikan.

Nilai wajar investasi saham di MMS ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 99 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Penyertaan pada CMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru-Juanda. Perusahaan memiliki 8.550.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau sebesar Rp8.550 yang merupakan 15% dari total kepemilikan.

Berdasarkan Akta No. 717 tanggal 27 Juni 2007 dari Margaretha Dynawati, S.H., para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp380.000. Perusahaan hanya melakukan setoran modal sebesar Rp20.000 dari total Rp48.000.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS) (continued)

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as included in the Notarial Deed No. 5 dated December 9, 2004 from Hendra Karyadi, S.H., the shareholders agreed with the issuance of 921,310,773 new shares to convertible bondholders. The predecessor shareholders had already waived their rights to subscribe for new shares issued to the convertible bondholders. This change of shareholders, according to the Deed No. 11 dated August 1, 2005 of Notarial Deed Benny Kristianto, S.H., regarding to change of MMS shareholders, has been received by the Directorate General of General Law Administration, Department of Law and Human Rights under receipt No.C-UM.02.01.14078 dated September 23, 2005, as a consequence, the Company's ownership in MMS become 1.94% from total ownership.

The fair value of share investments in MMS is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS was established based on the Notarial Deed No. 99 dated December 26, 1996 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., The investment in CMS was made in relation to the constructions and operations of the Waru - Juanda toll road project. The Company owns 8,550,000 shares at par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp8,550 which represent 15% of total ownership.

Based on Deed No. 717 dated June 27, 2007 from Margaretha Dynawati, S.H., the shareholders increased the capital provided and paid up to Rp380,000. The Company just paid for capital of Rp20,000 of Rp48,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
(lanjutan)**

Dengan demikian kepemilikan Perusahaan di CMS mengalami penurunan menjadi sebesar 5,26% yang merupakan 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp20.000. Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 21 Mei 2005 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Perusahaan dan CMS mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang mengubah penyelenggaraan jalan tol Waru - Tanjung Perak menjadi kurang lebih 12 Km.

Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan telah dialihkan menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah dengan CMS pada tanggal 12 Februari 2007 dengan masa hak pengusahaan (konsesi) hingga tahun 2040. Jalan Tol Waru - Juanda telah beroperasi sejak bulan April 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Citra Margatama Surabaya No. 25 tanggal 25 Januari 2018, para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 630.000.000 lembar saham, namun Perusahaan tidak mengambil bagian dari porsi saham yang ditawarkan atas peningkatan modal tersebut sehingga kepemilikan saham Perusahaan di CMS mengalami penurunan menjadi sebesar 3,28% dari total kepemilikan.

Nilai wajar investasi saham di CMS ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
(continued)**

Therefore, the Company's ownership in CMS has decrease to 5.26%, representing 20,000,000 shares at par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp20,000. Based on the Deed No. 40 dated May 21, 2005 of Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company and CMS entered into a Joint Operation Agreement that changed the authority of Waru - Tanjung Perak toll road to become approximately 12 Km.

On February 12, 2007, a Joint Operation Agreement has been changed to a Concession Rights Agreement between the Government and CMS with concession right until 2040. Waru - Juanda toll road has been operating since April 2008.

Based on the Deed of Decision Statement Outside the Meeting of PT Citra Margatama Surabaya No. 25 dated January 25, 2018, the shareholders agreed, among other things, to increase the issued and fully paid up capital to 630,000,000 shares, but the Company did not take part of the portion of shares offered for capital increase thus the Company's share ownership in CMS decreased to become 3.28% of total ownership.

The fair value of share investments in CMS is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

d. PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 8 April 2017 dari Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., di Jakarta. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 0020383.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017.

JMRB memiliki 68.800.000 lembar saham dengan nominal Rp100 per lembar saham atau setara dengan Rp6.880 dengan total keseluruhan saham sebesar Rp86.000 atau setara dengan 8% kepemilikan saham.

Nilai wajar investasi saham di PT Sinergi Colomadu ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

e. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

KKDM didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 94 tanggal 20 Desember 1996 dari Mudofir Hadi, S.H., Penyertaan pada KKDM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Bekasi Timur - Cawang - Kampung Melayu yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 7.650.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp7.650 yang merupakan 10% kepemilikan di KKDM.

Berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 5 Juni 2018 dari Ariani L. Rachmi, S.H., kepemilikan Perusahaan terdilusi dari sebesar 1,03% menjadi sebesar 0,35%.

Nilai wajar investasi saham di KKDM ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

d. PT Sinergi Colomadu

PT Sinergi Colomadu was established based on Notarial Deed No. 8 dated April 8, 2017 from Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU 0020383.AH.01.01 of 2017 on May 3, 2017.

JMRB has 68,800,000 shares with a nominal value of Rp100 per share or equivalent to Rp6,880 with a total stock of Rp86,000 or equivalent to 8% of share ownership.

The fair value of investment in shares in PT Sinergi Colomadu was determined by using discounted cash flow method. The investment's fair values are based on valuations performed by KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

e. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM)

KKDM was established based on the Notarial Deed No. 94 dated December 20, 1996 of Mudofir Hadi, S.H., The investment in KKDM relates to the operation of the Bekasi Timur - Cawang - Kampung Melayu toll road project, which comprise construction, operation and maintenance of the toll road. The Company owns 7,650,000 shares with a par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp7,650 which represent 10% ownership of KKDM.

Based on Notarial Deed No. 4 dated June 5, 2018 of Ariani L. Rachmi, S.H., the Company's ownership was diluted from 1.03% to become 0.35%.

The fair value of share investments in KKDM is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

f. PT Makassar Metro Network (MMN)

MMN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 12 April 1993 dari Mestariyany Habie, S.H. Penyertaan pada MMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ujung Pandang, yaitu Jalan Satando - Simpang Urip Sumoharjo/Petta Rani (tahap I) - Jalan Sultan Alauddin (tahap II). Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 5 September 1998, Perusahaan memiliki 3.332 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp3.332 yang merupakan 10% dari total kepemilikan.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994 dan Akta Notaris No. 322 tanggal 29 Agustus 1994, Mestariyany Habie, S.H., menyatakan bahwa MMN mengoperasikan jalan tol selama 30 (tiga puluh) tahun untuk tahap I dan tahap II akan ditentukan kemudian namun tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya. Ruas jalan tol Ujung Pandang tahap I dan II telah dioperasikan sejak tahun 1998.

Anggaran Dasar MMN beberapa kali berubah sampai dengan yang tercantum dalam Akta Notaris No. 8 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., terdapat peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor perusahaan. Akibat perubahan tersebut, kepemilikan saham Perusahaan terdilusi menjadi 0,54%.

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 November 2020 dari Karin Christiana Basoeki, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah nama menjadi PT Metro Makassar Nusantara. Akta Perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0404065 tanggal 5 November 2020.

f. PT Makassar Metro Network (MMN)

MMN was established based on the Notarial Deed No. 20 dated April 12, 1993 of Mestariyany Habie, S.H. The investment in MMN was made in relation to the construction and operation of the Ujung Pandang toll roads that is Jalan Satando - Urip Sumoharjo/Petta Rani Interchange (phase I) - Jalan Sultan Alauddin (phase II). Based on the Deed No. 25 dated September 5, 1998, the Company owned 3,332 shares at par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp3,332 which represent 10% of total ownership.

The Decree of the Minister of Public Work No. 276/KPTS/1994 dated August 26, 1994 and the Notarial Deed No. 322 dated August 29, 1994, Mestariyany Habie, S.H., stated that MMN would operate phase I of the toll road for 30 (thirty) years and phase II will be decided later but not for a period longer than 30 (thirty) years for the operation of either part or all of the toll road. Phase I and Phase II of the Ujung Pandang toll road have been operating since 1998.

MMN's Articles of Association have been changed several times up to those stated in the Notary Deed No. 8 dated December 12, 2019 which was made in front of Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn., there was an increase in the Company's authorized, issued and paid-up capital. As a result of this change, the Company's share ownership was diluted to 0.54%.

Based on the Notarial Deed No. 2 dated November 2, 2020 of Karin Christiana Basoeki, S.H., regarding the amendment to the articles of association, the shareholders agreed to change the name to PT Metro Makassar Nusantara. The Amendment Deed was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-AH.01.03-0404065 dated November 5, 2020.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**f. PT Makassar Metro Network (MMN)
(lanjutan)**

Nilai wajar investasi saham di MMN ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

g. PT Jatim Prasarana Utama (JPU)

JPU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Desember 2002 dari Rosida, S.H., Perusahaan memiliki 12.858 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp12.858 yang merupakan 30% kepemilikan.

JPU merupakan perusahaan ventura bersama antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. JPU didirikan dengan maksud untuk meneruskan kelanjutan proyek jalan tol Surabaya - Mojokerto yang telah terhenti setelah Menteri Perumahan, Prasarana dan Wilayah Tertinggal mencabut izin konsesi yang diberikan kepada PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) melalui surat Menkimpraswil No. 418/KPTS/M/2001 tanggal 18 Juli 2001.

Setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Menkimpraswil pada tanggal 31 Maret 2005, maka hak penyelenggaraan jalan tol dikembalikan kepada JSM. Sebagai akibatnya, JPU tidak lagi terlibat dalam proyek jalan tol tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2007, JPU ikut serta dalam penyertaan saham JGP untuk proyek jalan tol Gempol Pasuruan dengan kepemilikan setara dengan 1,4% dari total kepemilikan.

Berdasarkan Berita Acara RUPS PT JPU tanggal 6 Mei 2013, pemegang saham JPU memutuskan penurunan modal dasar menjadi Rp150.000 sebelumnya Rp171.400 dan modal disetor menjadi Rp40.502 yang terdiri dari kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp37.502 atau setara dengan 93%, dan Perusahaan sebesar Rp3.000 atau setara dengan 7,41% dari total kepemilikan.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**f. PT Makassar Metro Network (MMN)
(continued)**

The fair value of share investments in MMN is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

g. PT Jatim Prasarana Utama (JPU)

JPU was established based on the Notarial Deed No. 25 dated December 27, 2002 of Rosida, S.H., the Company owns 12,858 shares at a par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp12,858 which represent 30% ownership interest.

JPU is a joint venture between the Company with Local Government of East Java. JPU was established in order to continue the construction of Surabaya - Mojokerto toll road project that was suspended after the Minister of Settlement and Regional Infrastructure cancelled the concession granted to PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) as stated in its Letter No. 418/KPTS/M/2001 dated July 18, 2001.

After the Supreme Court refused the application for Judicial Review of Minister of Settlement and Regional Infrastructure, dated March 31, 2005, the concession rights have been returned to JSM. As a result, JPU is no longer involved in such toll road project. On May 8, 2007, JPU participated in investment in shares of JGP to develop toll road project of Gempol Pasuruan, with the equivalent of 1.4% of total ownership.

Based on the Minutes of PT JPU General Meeting of Shareholders dated May 6, 2013, JPU's shareholders decreased its authorized capital to Rp150,000 previously Rp171,400 and paid in capital to Rp40,502 with ownership consisting of East Java Provincial Government amounting to Rp37,502 or equivalent to 93% ownership, and the Company amounting to Rp3,000 or equivalent to 7.41% of total ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

g. PT Jatim Prasarana Utama (JPU) (lanjutan)

Penurunan tersebut akibat dari penghapusan piutang modal disetor ke Perusahaan sebesar Rp9.858. Perusahaan mereklasifikasi nilai saldo penyertaan sebesar Rp3.000 ke akun Aset Keuangan Lainnya sejak bulan Agustus 2014.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JPU tanggal 23 April 2018 No. 52, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemindahan atas saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp37.502 atau setara dengan 93%.

Nilai wajar investasi saham di JPU ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

h. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dari Mala Mukti, S.H., LL.M., dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta - Bandung. Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Penyertaan Perusahaan di PSBI merupakan bentuk penugasan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Sesuai dengan Akta Notaris atas Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 67 tanggal 21 November 2022 dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar dan penerbitan saham baru, Perusahaan memiliki 1.297.235 lembar saham atau setara dengan 8,30% kepemilikan saham yang diterbitkan oleh PSBI.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

g. PT Jatim Prasarana Utama (JPU) (continued)

The decrease was a result of the write off of the paid in capital receivables from the Company amounting to Rp9,858. The Company reclassified the balance of investment amounting to Rp3,000 to Other Financial Assets account since August 2014.

Based on the Minutes of PT JPU Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 52 dated April 23, 2018, the East Java Provincial Government transferred the shares owned by the East Java Provincial Government amounting to Rp37,502 or equivalent to 93%.

The fair value of share investments in JPU is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

h. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI was established based on Notarial Deed No. 21 dated October 2, 2015 of Mala Mukti, S.H., LL.M., for Jakarta - Bandung high speed train operation. The Deed of Establishment were legalized by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-2460435.AH.01.01 year 2015 dated October 12, 2015.

The Company's investment in PSBI is a form of government assignment as stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 107 of 2015 concerning the Acceleration of The Implementation of Infrastructure and Facilities for High Speed Rail between Jakarta and Bandung.

In accordance with the Notarial Deed on the Statement of Resolutions of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 67 dated November 21, 2022 made by Mala Mukti, S.H.,LL.M., Notary in Jakarta, regarding increase the authorized capital and the issuance of new shares, the Company has 1,297,235 shares or equivalent to 8.30% share ownership issued by PSBI.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**h. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)
(lanjutan)**

Nilai wajar investasi saham di PSBI ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

i. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)

MNB didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 2 Desember 1991 dari B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonogoro, S.H., *juncto* Akta Notaris No. 19 tanggal 4 Maret 1998 dari Agus Madjid, S.H. Penyertaan pada MNB dilakukan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol JORR Seksi S dan E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). Perusahaan memiliki 1.350 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp13.500 yang merupakan 10% dari total kepemilikan.

Anggaran Dasar MNB beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 25 Desember 2010 dari Ny. Etty Roeswitha Moelia, S.H. Akta Perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-06698 tanggal 3 Maret 2011.

Perusahaan memiliki 950 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp9.500 yang merupakan 4,75% kepemilikan.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada MNB No. AA.HK.02.1143 tanggal 11 Agustus 2000, Perusahaan mengambil alih proyek yang dibangun oleh MNB.

Pengambilalihan proyek ini mengakibatkan penyertaan Perusahaan dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen tahun 2000 sebesar Rp9.500.

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**h. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)
(continued)**

The fair value of share investments in PSBI is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

i. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)

MNB was established based on The Notarial Deed No. 9 dated December 2, 1991 of B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonogoro, S.H., in conjunction with the Notarial Deed No. 19 dated March 4, 1998 of Agus Madjid, S.H. The investment in MNB relates to the construction and operation of the JORR toll road Section S and E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). The Company owned 1,350 shares at par value of Rp10,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp13,500 which represent 10% of total ownership.

MNB's Articles of Association had been amended several times, with the latest was based on Notarial Deed No. 23 dated December 25, 2010 of Ny. Etty Roeswitha Moelia, S.H. The Deed of Amendment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-06698 dated March 3, 2011.

The Company has 950 shares with par value Rp10,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp9,500 which represent 4.75% ownership interest.

Based on the Company's Letter No. AA.HK.02.1143 dated August 11, 2000 to MNB, the Company took over the project being built by MNB.

As a consequence, the Company's investment in MNB has no more economic value, therefore, the Company recognized the loss on the permanent impairment of its investment in year 2000 amounting to Rp9,500.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**j. PT Citra Mataram Satriamarga Persada
(CMSP)**

CMSP didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 12 April 1996 dari Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CMSP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi W2 (Kebon Jeruk - Pondok Pinang).

Perusahaan memiliki 4.725.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.725 yang merupakan 15% dari total kepemilikan.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada CMSP No. AA.HK.02.820 tanggal 21 Juni 2000, mengenai pengambilalihan proyek dan pengakhiran PKP, investasi Perusahaan pada CMSP dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan tahun 2000 sebesar Rp4.725.

k. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 6 Juni 1997 dari Enimarya Agoes Suwarako, S.H. Penyertaan pada MJT dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru (Aloha) - Tanjung Perak. Perusahaan memiliki 4.143.438 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.143 yang merupakan 5% dari total kepemilikan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai restrukturisasi MJT yang tercantum dalam Akta Notaris Adrian Djuaini, S.H., No. 17 tanggal 20 Oktober 2004, Perusahaan memperoleh 1.250.000 lembar saham dari hasil kapitalisasi atau konversi 20.000.000 saham baru sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi 5.393.438 lembar saham atau setara dengan Rp5.393. Selain itu, MJT juga mengeluarkan saham baru dari saham portepel sebanyak 110.458.000 lembar saham.

**j. PT Citra Mataram Satriamarga Persada
(CMSP)**

CMSP was established based on the Notarial Deed No. 36 dated April 12, 1996 from Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CMSP relates to operation of the JORR Section W2 (Kebon Jeruk - Pondok Pinang) toll road project.

The Company owns 4,725,000 shares at par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp4,725 which represent 15% of total ownership.

Based on the Company Letter No. AA.HK.02.820 dated June 21, 2000 to CMSP, regarding the takeover of the project and termination of Concession Agreement, the Company's investment in CMSP was deemed to have no economic value, therefore, the Company has recognized loss from the impairment of this investment in 2000 amounting to Rp4,725.

k. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT was established based on the Notarial Deed No. 18 dated June 6, 1997 dari Enimarya Agoes Suwarako, S.H. The investment in MJT relates to the construction and operation of the Waru (Aloha) - Tanjung Perak toll road project. The Company originally owned 4,143,438 shares at par value of Rp1,000 (full Rupiah), amounting to Rp4,143 which represent 5% of total ownership.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders, regarding MJT restructuring, as included in the Notarial Deed No. 17 dated October 20, 2004, Adrian Djuaini, S.H., the Company acquired 1,250,000 shares from capitalization or conversion of convertible bond to 20,000,000 new shares, hence, the Company's shares became 5,393,438 shares or equivalent to Rp5,393. In addition, MJT issued new shares from its portfolio of 110,458,000 shares.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

k. PT Margaraya Jawa Tol (MJT) (lanjutan)

Perusahaan tidak menambah modal disetor tersebut sehingga kepemilikan Perusahaan mengalami dilusi menjadi sebesar 2,47%. Pemerintah dan MJT telah menandatangani PPJT pada tanggal 19 Juli 2007 dengan masa konsesi hingga tahun 2047.

Perusahaan menganggap penyertaan pada MJT sudah tidak memiliki nilai ekonomis disebabkan tidak adanya kepastian pengembalian investasi atas penyertaannya dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan sebesar Rp4.143 sebagai beban tahun 2019.

l. PT Marga Mawatindo Esprit (MME)

MME didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 96 tanggal 30 Mei 1997 Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada MME dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Semarang - Demak. Perusahaan memiliki 1.154.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.409 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp2.780 yang merupakan 8,33% kepemilikan.

Berdasarkan Surat No. 001/SPK-DIR/2003 tanggal 6 Januari 2003, Perusahaan dan MME sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan No. 58 tanggal 25 Februari 1998. Pengakhiran PKP ini mengakibatkan penyertaan pada perusahaan ini tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai penyertaan tahun 2002 sebesar Rp2.781.

m. Marga Net One Limited (MNOL)

MNOL didirikan berdasarkan hukum Negara Bangladesh sebagaimana termuat dalam *Incorporated Under The Company Act 1994 (ACT-XVIII of 1994) (Private Company Limited By Shares)* dan *Memorandum of Association of Marga Net One Limited* tanggal 29 Februari 2003 dalam *Certificate of Incorporation* No. C-50732(1027)/2003 tanggal 11 Oktober 2003 yang dikeluarkan *Registrar of Joint Stock Companies And Firms* dari Bangladesh.

k. PT Margaraya Jawa Tol (MJT) (continued)

The Company did not increase its investment and as a result, the Company's ownership diluted to 2.47%. The Government and MJT have entered into Concession Rights Agreement on July 19, 2007 with concession period until year 2047.

The Company has identified the investment in MJT does not have any expected future economic benefit and, therefore, the Company recognized the loss on impairment its investment amounting to Rp4,143 as an expense in 2019.

l. PT Marga Mawatindo Esprit (MME)

MME was established based on the Notarial Deed No. 96 dated May 30, 1997 Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in MME relates to the construction and operation of the Semarang - Demak toll road. The Company owns 1,154,364 shares at par value of Rp2,409 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp2,780, which represent 8.33% ownership.

Based on Letter No. 001/SPK-DIR/2003 dated January 6, 2003, the Company and MME agreed to terminate the Concession Rights Agreement No. 58 dated February 25, 1998. The result of such termination of Concession Rights Agreement caused the Company's investment to have no economic value, therefore, the Company recognized the loss on impairment of the investment in year 2002 amounting to Rp2,781.

m. Marga Net One Limited (MNOL)

MNOL was established based on the Law of Bangladesh as stated in The Company Act 1994 (ACT-XVIII of 1994) (Private Company Limited by Shares) and Memorandum of Association of Marga Net One Limited dated February 29, 2003, in conjunction with Certificate of Incorporation No. C-50732(1027)/2003 dated October 11, 2003, issued by the Bangladesh's Registrar of Joint Stock Companies And Firms.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

16. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

m. Marga Net One Limited (MNOL) (lanjutan)

Berdasarkan *Memorandum of Association of MNOL* tanggal 29 Februari 2003, Perusahaan memiliki 200 lembar saham dengan nominal TK 100 (mata uang Taka penuh) per lembar saham atau 10% kepemilikan dan setoran modal sejumlah US\$1,800 atau setara dengan Rp15 yang dilakukan pada tanggal 2 September 2003.

Perusahaan menganggap penyertaan pada MNOL sudah tidak memiliki nilai ekonomis disebabkan tidak adanya kepastian pengembalian investasi atas penyertaannya dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan sebesar Rp15 sebagai beban tahun 2006.

n. PT Utama Marga Waskita (HAMAWAS)

HAMAWAS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 20 Februari 2017 dari Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dalam rangka pengusahaan ruas tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat. Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008223.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 Februari 2017.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham HAMAWAS No. 7 tanggal 11 Oktober 2021, oleh notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar HAMAWAS. Perusahaan tidak melakukan pembayaran sehingga presentase kepemilikan Perusahaan terhadap HAMAWAS turun dari 30% menjadi 0,97%. Perusahaan memiliki 53.560 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp53.560.

Nilai wajar investasi saham di HAMAWAS ditentukan dengan menggunakan metode diskonto arus kas dan perbandingan nilai pasar. Nilai wajar investasi saham didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 17 Februari 2023 dan 12 Februari 2024 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2023.

m. Marga Net One Limited (MNOL) (continued)

Based on the *Memorandum of Association of MNOL* dated February 29, 2003, the Company owns 200 shares at par value of TK 100 (full Taka amount) per share or 10% ownership and subscribed to paid in capital amounting to US\$1,800 or equivalent to Rp15 on September 2, 2003.

The Company has identified that the investment in MNOL does not have any expected future economic benefit and, therefore, the Company recognized the loss on impairment its investment amounting to Rp15 as an expense in 2006.

n. PT Utama Marga Waskita (HAMAWAS)

HAMAWAS was established based on the *Notarial Deed No. 24* dated February 20, 2017 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., in the framework of exploiting the Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat toll road. The *Deed of Establishment* was authorized by the Minister of law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0008223.AH.01.01.TAHUN 2017 dated February 21, 2017.

Based on the *Deed of Shareholders resolution in lieu of General Meeting of HAMAWAS's Shareholder No. 7* dated October 11, 2021, by notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to increase the authorized capital of HAMAWAS. The Company did not make any payment, so the company's percentage of ownership on HAMAWAS decreased from 30% to 0.97%. The Company owned 53,560 shares at par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share or equivalent to Rp53,560.

The fair value of share investments in HAMAWAS is determined using the method of discounting cash flow and comparing market values. The fair value of stock investment is based on the assessment made by KJPP Budi, Edy, Saptono and Rekan, independent appraisers registered with the OJK, in its reports dated February 17, 2023 and February 12, 2024 for the years ended December 31, 2022 and 2023.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Aset tidak lancar lainnya terdiri dari tanah dalam pengembangan milik JMRB (Entitas Anak). Kemudian uang muka setoran modal kepada. Kemudian biaya prakarsa yaitu biaya untuk prakarsa jalan tol dalam rangka memprakarsai proyek ruas jalan tol baru. Dan aset diambil alih.

Other non-current assets consist of land under development owned by JMRB (Subsidiary). Then advance for capital investment. Then initiative costs are costs for toll road initiatives, in order to initiate new toll road projects. And Foreclosed Assets.

	2023	2022	
Tanah dalam Pengembangan	763.505	720.925	Land under Development
Uang Muka Kontraktor dan Konsultan	729.587	34.446	Advances for Contractors and Consultants
Biaya prakarsa	99.944	124.960	Initiative Cost
Taksiran Tagihan Pajak			Estimated Claim for Tax Refund
Entitas Anak	53.942	117.318	Subsidiary
Uang Muka Pembelian Tanah	47.573	48.001	Advances for Purchase of Land
Aset Diambil Alih	26.102	26.102	Foreclosed Assets
Uang Muka Biaya Fasilitas Pinjaman	8.522	36.468	Advances for Loans Facility Fee
Uang Muka Setoran Modal	2.365	-	Advances for Capital Investment
Lainnya	17.160	12.648	Others
Total Aset Lain-lain	1.748.700	1.120.868	Total Other Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			Allowance for Impairment Losses
Aset Diambil Alih	(26.102)	(26.102)	Foreclosed Assets
Uang Muka Setoran Modal	(2.365)	-	Advances for Capital Investment
Total Penurunan nilai	(28.467)	(26.102)	Total Impairment Losses
Total - Bersih	1.720.233	1.094.766	Total - Net

a. Tanah dalam pengembangan

Akun ini merupakan nilai tercatat tanah dalam pengembangan milik JMRB yang berada di TB Simatupang - Jakarta, Pesanggrahan - Jakarta, Kaum Sari - Bogor, Ambawani - Cibinong. Untuk lokasi Ambawani, Bekasi Timur dan Angraini, Cibinong telah di reklasifikasi sebagai persediaan Tanah Siap Guna

a. Land under development

This account is the recorded value of land under JMRB's development located in TB Simatupang - Jakarta, Pesanggrahan - Jakarta, Kaum Sari - Bogor, Ambawani - Cibinong. For the locations of Ambawani, East Bekasi and Angraini, Cibinong has been reclassified as a land ready-to-use.

Lokasi / Location	Realisasi / Realization		2023	Realisasi / Realization		2022
	(%)	Luas / Area (m2)		(%)	Luas / Area (m2)	
TB Simatupang, Jakarta Selatan	86	19.569	614.465	84	18.874	606.923
TDC Delta Mas	89	50.000	71.055	58	50.000	46.025
Pesanggrahan, Jakarta Selatan	100	3.115	27.086	100	3.115	27.086
Kaumsari, Bogor	100	7.254	26.403	100	7.254	26.403
Paramount	50	1.000	24.496	-	-	-
Ambawani, Bekasi Timur	100	-	-	35	4.740	11.156
Angraini Cibinong	100	-	-	100	1.296	3.332
Total			763.505			720.925

b. Uang Muka Setoran Modal

	2023	2022
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	2.365	-
Subtotal	2.365	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:		
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	(2.365)	-
Subtotal	(2.365)	-
Total	-	-

b. Advances for Capital Investment

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	-
Subtotal	-
Allowance for Impairment Losses:	
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	-
Subtotal	-
Total	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

c. Biaya Prakarsa

Biaya Prakarsa adalah biaya prakarsa jalan tol dalam rangka memprakarsai proyek ruas jalan tol baru. Pada tahun 2023, manajemen melakukan penurunan nilai terhadap biaya prakarsa ruas Ciranjang - Padalarang dan Salabenda - Caringin.

c. Initiative Cost

Initiative costs are costs for toll road initiative in relation with initiating new toll road projects. In 2023, Management impair initiative cost of the Ciranjang - Padalarang and Salabenda - Caringin.

d. Aset Diambil Alih

d. Foreclosed assets

	2023	2022
Ruas Tol Porong - Gempol	12.028	12.028
Ruas Tol Cileunyi - Nagrek (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	12.000	12.000
Ruas Tol Pandaan - Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)	2.074	2.074
Subtotal	<u>26.102</u>	<u>26.102</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:		
Ruas Tol Porong - Gempol	12.028	12.028
Ruas Tol Cileunyi - Nagrek (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)	12.000	12.000
Ruas Tol Pandaan - Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)	2.074	2.074
Subtotal	<u>26.102</u>	<u>26.102</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

Porong - Gempol Toll Road
Cileunyi - Nagrek Toll Road (PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pandaan - Pasuruan Toll Road (PT Giri Adya Sejati)
Subtotal
Allowance for Impairment Losses:
Porong - Gempol Toll Road
Cileunyi - Nagrek Toll Road
Karya (Persero) Tbk
Pandaan - Pasuruan Toll Road (PT Giri Adya Sejati)
Subtotal
Total

Ruas Tol Porong - Gempol

Jalan tol Seksi Porong - Gempol merupakan bagian dari jalan tol Surabaya - Gempol yang mengalami dampak dari musibah genangan lumpur PT Lapindo Brantas sehingga mengakibatkan jalan tol tersebut tidak dapat beroperasi (Catatan 46.b).

Sehubungan dengan dilakukannya penutupan sebagian jalan tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol pada tanggal 11 Juli 2006, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. 297/KPTS/M/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Pencabutan Sementara Status Sebagai Jalan Tol Sebagian Ruas Jalan Tol Porong - Gempol Seksi Surabaya - Gempol, Perusahaan mencatat aset jalan tol seksi Porong - Gempol ke dalam Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar Rp12.028.

Porong - Gempol Toll Road

Section Porong - Gempol toll road is part of Surabaya - Gempol toll road that has been affected by mud disaster of PT Lapindo Brantas which resulting in the toll road unable to operate (Note 46.b).

In line with the partial closure of Section Porong - Gempol of Surabaya - Gempol toll road on July 11, 2006, which followed up by letter from the Minister of Public Works No. 297/KPTS/M/2006 dated August 11, 2006 regarding the Temporary Revocation of Status of Some Part of Section Porong - Gempol in Surabaya - Gempol Toll Road, the Company recognized the Section Porong - Gempol toll road into Other Non-current Assets amounting to Rp12,028.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

d. Aset Diambil Alih (lanjutan)

d. Foreclosed assets (continued)

Ruas Pandaan - Pasuruan

Pandaan – Pasuran Toll Road

PT Giri Adya Sejati (GAS) selaku investor proyek jalan tol pandaan- pasuruan tidak dapat membayar biaya pekerjaan perencanaan yang dilakukan oleh PT Ideo Utama sesuai dengan kontrak No. 105/g21-IDI/96 tanggal 15 Februari 1995,. Berdasarkan pasal 1 surat perjanjian penyelesaian penggantian biaya perencanaan jalan tol Pandaan – Pasuran No.13/SPK-Dir/2001 tanggal 14 Desember 2001, kedua belah pihak sepakat bahwa penggantian biaya pekerjaan perencanaan ditentukan oleh hasil Due diligence. Berdasarkan laporan hasil due diligence oleh akuntan publik, nilai pekerjaan perencanaan jalan tol tersebut ditetapkan sebesar sebesar Rp2.074. Oleh karena itu, pada tahun 2001 Perseroan mengakui kewajiban karena pengakhiran PKP sebesar Rp2.074. Kewajiban ini telah seluruhnya dilunasi pada tanggal 14 Februari 2002.

PT Giri Adya Sejati (GAS) as the investor in the Pandaan-Pasuruan toll road project was unable to pay the costs of the planning carried out by PT Ideo Utama in accordance with contract No. 105/g21-IDI/96 dated February 15, 1995,. Based on article 1 of the agreement on settlement of reimbursement for planning costs for the Pandaan – Pasuran toll road No.13/SPK-Dir/2001 dated December 14, 2001, both parties agreed that reimbursement for planning work costs would be determined by the results of due diligence. Based on the due diligence report by public accountant, the value cost of toll road planning was determined at Rp2,074. Therefore, in 2001 the Company recognized a liability due to the termination of the PKP amounting to Rp.2,074. This obligation was fully paid on February 14, 2002.

Ruas Cileunyi - Nagrek

Cileunyi – Nagrek Toll Road

Pada tanggal 28 September 2001 Perusahaan dan PT Wijaya Karya telah menandatangani Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan (PKP) Bagi Hasil Jalan Tol Cileunyi - Nagreg No.38 tanggal 9 Mei 1996 yang dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 20 September 2001 oleh Notaris Drs. Andy A.Agus, S.H.,. Berdasarkan perjanjian ini diperoleh kesepakatan Pengakhiran Perjanjian dengan ketentuan akan membayar biaya pembiayaan jalan tol sebesar Rp12.000 dengan cara angsuran tetap sesuai perhitungan sebagaimana dicantumkan dan dituangkan dalam Perjanjian Hutang-Piutang No.13 tanggal 28 September 2001.

On September 28, 2001, the Company and PT Wijaya Karya signed an Agreement to Terminate of concession agreement for the Cileunyi - Nagreg Toll Road No. 38 dated May 9, 1996 which was stated in deed no. 12 dated September 20, 2001 by Notary Drs. Andy A. Agus, S.H.,. Based on this agreement, an agreement was obtained to terminate the agreement with the provisions that the Company would pay the toll road financing costs amounting to Rp12,000 in fixed installments according to the calculation as stated and outlined in the Payables and Receivables Agreement No. 13 dated September 28, 2001.

e. Lainnya

e. Other

Akun ini merupakan biaya dari cetak blue print dan biaya dari software yang masih dalam tahap pengembangan.

This account represents costs from blueprints and costs from software that is still in the development stage.

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	2023	2022	
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	134.956	86.149	Value Added Tax
Total	134.956	86.149	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 4 (2)	3.174	3.355	Article 4 (2)
Pasal 21	9.796	13.874	Article 21
Pasal 22	106	16	Article 22
Pasal 23	2.869	1.874	Article 23
Pasal 26	-	8	Article 26
Pasal 29			Article 29
2023	160.360	-	2023
2022	-	582.876	2022
Pasal 25	31.243	19.008	Article 25
Pajak Pertambahan Nilai	<u>31.608</u>	<u>15.335</u>	Value-Added Tax
	<u>239.156</u>	<u>636.346</u>	
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 4 (2)	25.598	44.175	Article 4 (2)
Pasal 21	12.023	3.020	Article 21
Pasal 23	36.579	19.885	Article 23
Pasal 25	2.438	28.413	Article 25
Pasal 26	5	6	Article 26
Pasal 29			Article 29
2023	28.849	-	2023
2022	-	32.058	2022
Pajak Bumi Bangunan	17.116	20.518	Property Tax
Pajak Pertambahan Nilai	1.148	440	Value-Added Tax
Kewajiban Pajak Lainnya	<u>986</u>	<u>948</u>	Other Tax Liabilities
	<u>124.742</u>	<u>149.463</u>	
Total	<u>363.898</u>	<u>785.809</u>	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

Beban pajak penghasilan Kelompok Usaha terdiri dari:

The income tax expense of the Group consists of the following:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak Kini	496.959	1.036.300	Current Tax
Pajak Tangguhan	<u>33.200</u>	<u>(169.209)</u>	Deferred Tax
	<u>530.159</u>	<u>867.091</u>	
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	370.354	224.786	Current Tax
Pajak Tangguhan	<u>276.423</u>	<u>310.210</u>	Deferred Tax
	<u>646.777</u>	<u>534.996</u>	
Konsolidasian			Consolidated
Pajak kini	867.313	1.261.086	Current Tax
Pajak Tangguhan	<u>309.623</u>	<u>141.001</u>	Deferred Tax
Total	<u>1.176.936</u>	<u>1.402.087</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan laba kena pajak, menjadi dasar dalam pengisian SPT PPh Badan.

A reconciliation between the consolidated income before income tax as reported in the consolidated statements of other comprehensive income and taxable income, are the basis for filling in the corporate income tax return.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan	7.926.425	3.725.795	Consolidated Income Before Tax Income
Ditambah: Laba Entitas Anak	(6.088.444)	(247.029)	Add: Portion of Subsidiaries Income
Dampak eliminasi	5.792.715	458.400	Elimination effect
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	<u>7.630.696</u>	<u>3.937.166</u>	Income Before Tax - The Company
Beda waktu			Timing differences
Provisi pelapisan ulang	12.094	289.514	Provision of overlay
Penyisihan piutang tak tertagih	(44.009)	(4.778)	Allowance for doubtful accounts
Provisi atas liabilitas imbalan kerja	(81.811)	(76.395)	Provision of employee benefits liabilities
Beban Insentif	15.818	451.789	Incentive Expenses
Penyusutan aset tetap dan hak pengusahaan jalan tol	(48.139)	109.909	Depreciation of fixed assets and toll road concession rights
Sewa	(2.350)	(487)	Lease
Subtotal	<u>(148.397)</u>	<u>769.552</u>	Subtotal
Beda tetap			Permanent differences
Beban tol dan usaha lainnya	43.204	189.507	Toll and other operating expense
Bagian laba entitas anak dan entitas asosiasi	(5.512.818)	(356.103)	Share in gain of subsidiaries and associates
Beban bunga akrual	24.542	165.903	Accrued interest expenses
Beban umum dan administrasi	161.930	110.449	General and administrative expenses
Biaya atas penghasilan dikenakan pajak final	6.701	11.569	Cost of income subject to final tax
Beban pajak	3.782	6.785	Tax expenses
Beban bunga efektif	56.150	52.463	Effective interest rate expenses
Beban lainnya - bersih	80.322	397.391	Other expenses - net
Beban pajak atas penghasilan keuangan	9.662	12.409	Tax expense on interest income
Beban piutang karyawan	263	413	Employee receivable expenses
Penghasilan dikenakan pajak final	(20.409)	(36.702)	Income subject to final tax
Keuntungan dari pelepasan investasi	-	(418.573)	Income from divestment
Penghasilan Investasi dan Dividen Saham	(17.773)	(69.973)	Investment Income and Stock Dividends
Penghasilan Lain-lain	(13.408)	(911)	Other Income
Pendapatan bunga yang telah dikenakan PPh Final	(45.542)	(60.878)	Interest income subjected to final tax
Subtotal	<u>(5.223.391)</u>	<u>3.749</u>	Subtotal
Total	<u>(5.371.788)</u>	<u>773.301</u>	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan	2.258.908	4.710.467	Estimated Taxable Income of the Company
Total beban pajak kini			Current income tax provision
Beban pajak kini Perusahaan	496.959	1.036.300	Current income tax expense - The Company
Total	<u>496.959</u>	<u>1.036.300</u>	Total
Pajak penghasilan dibayar dimuka			Prepayment of income taxes
Pajak Penghasilan Pasal 23	40.565	139.541	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	296.034	313.882	Income Tax Article 25
Total	<u>336.599</u>	<u>453.424</u>	Total
Utang pajak penghasilan			Income Tax Payable
Perusahaan	160.360	582.876	The Company
Entitas Anak	28.849	32.058	Subsidiaries
Total Utang Pajak - Konsolidasian	189.209	614.934	Income Tax Payable - Consolidated

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expenses (continued)

Pajak tangguhan

Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

Deferred tax is calculated using all temporary differences between tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2023						31 Desember 2023 December, 31 2023	
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Diakui di laba rugi/ Recognized in Profit or loss	Penyesuaian PMK-72/ Adjustment of PMK-72	Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Recognized in Other Comprehensive Income	Dampak konsolidasi/ Consolidation Effect	Dampak Pemekaran Usaha/ Impact of Business Expansion		
Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan								Deferred Tax Liabilities (Assets)
<u>Perusahaan</u>								<u>The Company</u>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	753.976	11.143	-	-	-	-	765.119	Fixed Assets and Intangible Assets
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(99.319)	(2.660)	-	-	-	-	(101.979)	Provision for Overlay
Liabilitas Imbalan Kerja	(134.344)	17.998	-	(25.397)	-	-	(141.743)	Employee Benefits Liabilities
Beban Insentif	(206.785)	(3.480)	-	-	-	-	(210.265)	Incentive Expenses
Penyisihan piutang tak tertagih	(13.064)	9.682	-	-	-	-	(3.382)	Allowance for doubtful accounts
Eteq Tersedia untuk Dijual	1.353	-	-	134	-	-	1.487	Securities Available for Sale
Aset Hak Guna	6.549	4.331	-	-	-	-	10.880	Right-of-use Assets
Liabilitas Sewa	(6.501)	(3.814)	-	-	-	-	(10.315)	Lease Liabilities
Total	301.865	33.200	-	(25.263)	-	-	309.802	Total
<u>Entitas Anak</u>								<u>Subsidiaries</u>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	1.340.616	338.034	22.463	-	3.766.073	-	5.467.186	Fixed Assets and Intangible Assets
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(48.789)	(809)	-	-	-	-	(49.598)	Provision for Overlay
Liabilitas Imbalan Kerja	(36)	62	-	(1)	-	-	25	Employee Benefits Liabilities
Penyisihan Kerugian Penurunan Piutang	(4.427)	58	-	-	-	-	(4.369)	Allowance for Impairment Losses
Rugi Fiskal	-	(72.969)	-	-	-	-	(72.969)	Loss on Fiscal
Beban Akumul	(21.852)	(12.126)	-	-	-	-	(33.978)	Accrued Expenses
Nilai Wajar Investasi Saham	68.288	-	-	(34.120)	-	-	34.168	Fair Value of Investment in Shares
Aset Hak Guna	13.711	1.251	-	-	-	-	14.962	Right-of-use Assets
Liabilitas Sewa	(14.306)	459	-	-	-	-	(13.847)	Lease Liabilities
Total	1.333.115	253.960	22.463	(34.121)	3.766.073	-	5.341.490	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	1.634.980	287.160	22.463	(59.384)	3.766.073	-	5.651.292	Consolidated Deferred Tax Liability
2022								
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Diakui di laba rugi/ Recognized in Profit or loss	Penyesuaian PMK-72/ Adjustment of PMK-72	Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain/ Recognized in Other Comprehensive Income	Dampak Dekonsolidasi/ Deconsolidation Effect	Dampak Pemekaran Usaha/ Impact of Business Expansion	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas (Aset) Pajak Tangguhan								Deferred Tax Liabilities (Assets)
<u>Perusahaan</u>								<u>The Company</u>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	993.122	(24.087)	-	-	-	(215.059)	753.976	Fixed Assets and Intangible Assets
Provisi Pelapisan Jalan Tol	(96.716)	(63.693)	-	-	-	61.090	(99.319)	Provision for Overlay
Liabilitas Imbalan Kerja	(120.610)	16.807	-	(30.541)	-	-	(134.344)	Employee Benefits Liabilities
Beban Insentif	(107.391)	(99.394)	-	-	-	-	(206.785)	Incentive Expenses
Penyisihan piutang tak tertagih	(14.115)	1.051	-	-	-	-	(13.064)	Allowance for doubtful accounts
Eteq Tersedia Untuk Dijual	(6.041)	-	-	7.394	-	-	1.353	Securities Available for Sale
Aset Hak Guna	10.567	(4.019)	-	-	-	-	6.549	Right-of-use Assets
Liabilitas Sewa	(10.626)	4.125	-	-	-	-	(6.501)	Lease Liabilities
Total	648.190	(169.209)	-	(23.147)	-	(153.969)	301.865	Total
<u>Entitas Anak</u>								<u>Subsidiaries</u>
Aset Tetap dan Aset Takberwujud	858.031	311.174	-	-	(43.648)	215.059	1.340.616	Fixed Assets and Intangible Assets
Provisi Pelapisan Jalan Tol	-	12.301	-	-	-	(61.090)	(48.789)	Provision for Overlay
Liabilitas Imbalan Kerja	(7.488)	(27)	-	7.479	-	-	(36)	Employee Benefits Liabilities
Penyisihan Kerugian Penurunan Piutang	(1.627)	(2.800)	-	-	-	-	(4.427)	Allowance for Impairment Losses
Rugi Fiskal	-	-	-	-	-	-	-	Loss on Fiscal
Beban Akumul	(12.232)	(9.620)	-	-	-	-	(21.852)	Accrued Expenses
Nilai Wajar Investasi Saham	83.596	-	-	(15.308)	-	-	68.288	Fair Value of Investment in Shares
Aset Hak Guna	10.489	3.222	-	-	-	-	13.711	Right-of-use Assets
Liabilitas Sewa	(10.356)	(4.040)	-	-	-	-	(14.396)	Lease Liabilities
Total	920.413	310.210	-	(7.829)	(43.648)	153.969	1.333.115	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian	1.568.603	141.001	-	(30.976)	(43.648)	-	1.634.980	Consolidated Deferred Tax Liability

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

	2023	2022
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak		
Penghasilan Badan	7.926.425	3.725.795
Ditambah: Laba Entitas Anak	(6.088.444)	(247.029)
Efek eliminasi	5.792.715	458.400
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	7.630.696	3.937.166
Beban Pajak atas Laba		
dengan Tarif Pajak yang Berlaku	1.678.753	866.176
Pengaruh Pajak atas Beda Tetap	(1.149.146)	825
Penyesuaian	552	90
Total Beban Pajak	530.159	867.091
Beban Pajak Entitas Anak - Neto	646.777	534.996
Beban Pajak - Neto	1.176.936	1.402.087

c. Income tax expenses (continued)

The reconciliation between the accounting income before income tax with the current tax rate and income tax expense are as follows:

Consolidated Income Before Tax	
Corporate Income	
Add: Portion of Subsidiaries Income	
Elimination effect	
Income Before Tax - The Company	
Revenue Tax Expense	
with Effective Tax Rate	
Tax Effect on the Permanent Differences	
Adjustment	
Total Tax Expense	
Tax Expenses of the Subsidiaries - Net	
Tax Expense - Net	

d. Administrasi Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pajak terutang.

d. Tax Administration

Based on Indonesian tax regulations, the Company submits its own notification letter on the amount of tax payable. The Directorate General of Taxation may determine and change tax obligations within a time limit of 5 (five) years after the date when the tax become payable.

e. Kontribusi Pajak

Kontribusi pajak merupakan kontribusi Kelompok Usaha kepada negara yang dibayar di tahun berjalan (tidak diaudit), dengan rincian sebagai berikut:

e. Tax Contribution

Tax contributions represent the Group's contributions to the state which paid in the current year (unaudited), details as follows:

	2023	2022	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Pusat			Central Governance Tax
Pajak Penghasilan	1.102.212	946.782	Income Tax
Pajak Pertambahan Nilai	216.119	485.023	Value Added Tax
Subtotal	1.318.331	1.431.805	Subtotal
Pajak Daerah			Local Tax
Pajak Bumi Bangunan	420.405	486.657	Land and Building Tax
Total	1.738.736	1.918.462	Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pusat			Central Governance Tax
Pajak Penghasilan	627.479	557.787	Income Tax
Pajak Pertambahan Nilai	68.131	35.891	Value Added Tax
Subtotal	695.610	593.678	Subtotal
Pajak Daerah			Local Tax
Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Atas			Land and Building Tax and
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	206.133	85.055	Acquisition Duty of Right on Land and Building
Total	901.743	678.733	Total
Total Kontribusi Pajak	2.640.479	2.597.195	Total Tax Contribution

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pemasok terkait dengan pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, obat-obatan, pakaian dinas, dan utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol yang memiliki jatuh tempo di bawah 12 bulan dengan sumber pendanaan menggunakan kas Perusahaan.

	2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	9.523	6.821	<i>Related Parties (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
PT Armada Antar Lintas Nusa	16.984	16.842	<i>PT Armada Antar Lintas Nusa</i>
PT Tirtobumi Adyatunggal	10.012	-	<i>PT Tirtobumi Adyatunggal</i>
CV Tirta Nusa Tjipta	5.980	1.661	<i>CV Tirta Nusa Tjipta</i>
PT Eskapindo Matra	5.033	-	<i>PT Eskapindo Matra</i>
PT Mitra Setya Utama	4.501	-	<i>PT Mitra Setya Utama</i>
UPTD Tahura Bukit Soeharto	4.025	-	<i>UPTD Tahura Bukit Soeharto</i>
Inti Karya Utama	3.838	98	<i>Inti Karya Utama</i>
CV Putra Mandiri	3.655	-	<i>CV Putra Mandiri</i>
PT Tataartha Swabuana Pratama	3.649	-	<i>PT Tataartha Swabuana Pratama</i>
PT Tyvas Adhigana	3.569	123	<i>PT Tyvas Adhigana</i>
PT Pramita	2.890	-	<i>PT Pramita</i>
CV Sinar Terang Abadi	2.801	1.080	<i>CV Sinar Terang Abadi</i>
PT Pulo Airbiru	2.760	78	<i>PT Pulo Airbiru</i>
PT Buntara Megah Inti	2.672	1.550	<i>PT Buntara Megah Inti</i>
PT Secon Dwitunggal Putra	2.585	580	<i>PT Secon Dwitunggal Putra</i>
PT Sinergi Prima Inti	2.545	-	<i>PT Sinergi Prima Inti</i>
PT Pelita Adhidaya Servindo	2.329	1.115	<i>PT Pelita Adhidaya Servindo</i>
PT DCT Total Solutions	2.277	-	<i>PT DCT Total Solutions</i>
CV Kawijaya	2.229	-	<i>CV Kawijaya</i>
PT Integrasi Transit Jakarta	2.209	-	<i>PT Integrasi Transit Jakarta</i>
PT Subur Jaya Mukti	2.053	2.039	<i>PT Subur Jaya Mukti</i>
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	81.111	102.739	<i>Others (below Rp2,000)</i>
Subtotal	<u>169.707</u>	<u>127.905</u>	<i>Subtotal</i>
Total	<u>179.230</u>	<u>134.726</u>	Total

Seluruh utang usaha terdenominasi dalam mata uang Rupiah.

19. ACCOUNTS PAYABLE

This account represents payables to suppliers related to the procurement of printing goods, office stationery, medicine, uniform, and toll road maintenance and cleaning services which have maturity of less than 12 months with the funding source for repayment using Company cash.

All account payables are denominated in Rupiah.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG KONTRAKTOR

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol, dan bangunan lain yang memiliki jatuh tempo di bawah 12 bulan untuk jangka pendek dan lebih dari 12 bulan untuk jangka panjang dengan sumber pendanaan menggunakan kas Perusahaan.

Utang kontraktor jangka pendek

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak Berelasi (Catatan 44)	336.172	241.416
Pihak Ketiga		
PT Marga Maju Mapan	31.184	24.557
PT Roadmixindo Raya	22.530	11.007
KSO Adhi-Abipraya-MKN	15.375	-
KSO PP-Waskita-Wika	10.794	-
PT Gienda Putra	9.559	4.479
PT Tirtobumi Adyatunggal	7.638	7.041
PT Dirgantara Yudha Artha	6.619	19.464
PT Multi Karya Cemerlang	6.489	17.438
PT Amber Hasya	5.417	14.519
PT Delameta Bilano	5.138	7.592
PT Sinabung	4.546	2.400
PT Module Intracs Yasatama	4.182	9.019
KSO HKI-ACSET-NK	3.357	-
PT Modern Widya Tehnical	3.263	742
PT Tyvas Prast Adhigana	2.833	734
PT Evic Mora Sugih	2.764	693
PT Kadi International	2.568	12.374
KSO Abipraya-Aremix	-	12.144
PT Mitra Setya Utama	-	11.872
PT Perkasa Adiguna Sembada	-	4.155
PT Trimurti Perkasa	-	2.774
Lain-lain (Di bawah Rp2.000)	79.888	53.363
Subtotal	<u>224.144</u>	<u>216.367</u>
Total	<u>560.316</u>	<u>457.783</u>

20. CONTRACTOR PAYABLE

This account represents payables to contractors, consultants and partners associated with the construction of roads, overlay and procurement of toll facilities, and other buildings which has a maturity of less than 12 months for the short-term and more than 12 months for the long-term with funding sources using the Company cash.

Short-term contractor payables

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Related Parties (Note 44)		
Third Parties		
PT Marga Maju Mapan		
PT Roadmixindo Raya		
KSO Adhi-Abipraya-MKN		
KSO PP-Waskita-Wika		
PT Gienda Putra		
PT Tirtobumi Adyatunggal		
PT Dirgantara Yudha Artha		
PT Multi Karya Cemerlang		
PT Amber Hasya		
PT Delameta Bilano		
PT Sinabung		
PT Module Intracs Yasatama		
KSO HKI-ACSET-NK		
PT Modern Widya Tehnical		
PT Tyvas Prast Adhigana		
PT Evic Mora Sugih		
PT Kadi International		
KSO Abipraya-Aremix		
PT Mitra Setya Utama		
PT Perkasa Adiguna Sembada		
PT Trimurti Perkasa		
Others (Below Rp2,000)		
Subtotal		
Total		

Utang kontraktor jangka panjang

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak Berelasi (Catatan 44)	267.658	213.454
Pihak Ketiga		
KSO Adhi-Abipraya-MKN	110.983	-
KSO PP-Waskita-Wika	105.489	-
Lain-lain (Di bawah Rp2.000)	4.000	-
Total	<u>488.130</u>	<u>213.454</u>

Long-term contractors payables

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Related Parties (Note 44)		
Third Parties		
KSO Adhi-Abipraya-MKN		
KSO PP-Waskita-Wika		
Others (Below Rp2,000)		
Total		

Seluruh utang kontraktor terdenominasi dalam mata uang Rupiah.

All contractor payables are denominated in Rupiah.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
LAINNYA**

21. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
Utang titipan	249.113	209.612	<i>Deposit payable</i>
Utang pencadangan			<i>Provisions for</i>
<i>Multi Lane Free Flow (MLFF)</i>	257.096	258.638	<i>Multi Lane Free Flow (MLFF)</i>
Utang pinjaman afiliasi	162.518	42.000	<i>Due to related party</i>
Utang jaminan pihak lain	101.642	77.080	<i>Guarantee payable</i>
Lainnya (Di bawah Rp2.000)	185.413	136.644	<i>Others (Below Rp2,000)</i>
Total	<u>955.782</u>	<u>723.974</u>	Total

Utang titipan merupakan utang yang muncul akibat belum selesainya proses rekonsiliasi penerimaan pendapatan tol pada rekening escrow antar ruas yang saling bersinggungan dengan BUJT lainnya yang masuk kedalam rekening Perseroan.

This account represent payable which arise from reconciliation of toll revenue receive which has not yet been done on escrow account between section that intersect with other BUJT's which connecting road with that are received into the company bank statements.

22. BEBAN AKRUAL

22. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban kontraktor dan konsultan			<i>Contractors and consultant expense</i>
Pihak Berelasi (Catatan 44)	2.679.752	1.839.415	<i>Related Parties (Note 44)</i>
Pihak Ketiga	2.684.231	1.130.008	<i>Third Parties</i>
Beban umum dan administrasi			<i>General and administrative expenses</i>
Pihak Ketiga	1.588.273	1.261.019	<i>Third Parties</i>
Akrual insentif kinerja	936.739	932.930	<i>Performance incentive accrual</i>
Hutang investasi ke Pemerintah	715.029	549.674	<i>Government's investment liability</i>
Beban bunga			<i>Interest expenses</i>
Pihak Berelasi (Catatan 44)			<i>Related Parties (Note 44)</i>
Utang bank	13.826	10.839	<i>Bank loans</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
Utang pembebasan lahan	88.555	112.172	<i>Land acquisition liability</i>
Utang bank sindikasi	81.853	39.112	<i>Syndicated bank loan</i>
Utang obligasi	5.013	9.648	<i>Bonds payable</i>
Utang bagi hasil			<i>Profit Sharing Liabilities</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	13.809	4.875	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank DKI	5.425	4.253	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Permata Tbk	2.500	1.452	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	650	729	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
Utang bank			<i>Bank loans</i>
PT Bank Central Asia Tbk	8.744	6.892	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.089	1.591	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	74	-	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
Lain-lain	4.999	13.715	<i>Others</i>
Total	<u>8.835.561</u>	<u>5.918.324</u>	Total
Dikurangi bagian lancar	8.120.532	5.224.379	<i>Net of current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>715.029</u>	<u>693.945</u>	Non - current portion

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK

23. BANK LOANS

Utang bank jangka pendek:

Short-term bank loans:

	2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 44)	2.726.257	1.598.442	Related Parties (Note 44)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	1.173.216	54.087	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	599.942	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	-	200.000	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	645	PT Bank Permata Tbk
Total	4.499.415	1.853.174	Total

Informasi lain mengenai pinjaman bank pada
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Other information related to bank loans as at
December 31, 2023 is as follows:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
Perusahaan/The Company								
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Modal Kerja IV (KMK) Working Capital Credit IV (KMK)	-	30 Agustus 2024/ August 30, 2024	-	-	1.100.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Balikpapan Samarinda								
Pinjaman Dana Talangan Tanah/ Land Bailout Loans								
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Dana Talangan Tanah/ Land Bailout	-	31 Desember 2023/ December 31, 2023	-	Hak konsesi, Fidusia atas tagihan pengembalian dana talangan tanah kepada BLU LMAN dan Rekening dana talangan tanah dan kuasa mendebet rekening (Catatan 13) <i>Concession rights, Fiduciary on bills for returning land bailout funds to BLU LMAN and Accounts for land bailout funds and authorization to debit accounts (Note 13)</i>	56.925	-	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Japek Selatan								
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loans								
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Pinjaman Talangan/ Bridging Loan	1.538.257	17 Juli 2024/ July 17, 2024	6,75%	-	2.206	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	729.088	31 Agustus 2024/ August 31, 2024	6,40%	-	-	-	-
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi								
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loans								
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Pinjaman Talangan/ Bridging Loan	-	31 Desember 2023/ December 31, 2023	-	-	344.437	EBITDA to Interest Ratio: Minimal 1,10:1 Minimal 1,10:1	Maksimal 5:1/ Maximum 5:1
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Jogja Bawen								
Pinjaman Dana Talangan Tanah/ Land Bailout Loans								
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	37.942	21 September 2024/ September 21, 2024	7,00%	-	-	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	444.128	26 Desember 2024/ December 26, 2024	6,50%	-	-	-	Maksimal 70% dari Project Cost/ Maximum 70% of Project Cost
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Transjawa Tol								
Pinjaman Dana Talangan Tanah/ Land Bailout Loans								
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	563.000	20 Januari 2024/ January 20, 2024	6,00%	-	737.000	Interest Coverage Ratio (ICR): Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	525.000	21 Januari 2023/ January 21, 2023	5,88%	-	675.000	Debt Service Coverage Ratio (DSCR): Minimal 1,5 : 1/ Minimum 1.5 : 1 Interest Coverage Ratio (ICR): Minimal 1,25 : 1/ Minimum 1.25 : 1	Maksimal 3:1/ Maximum 3:1
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	562.000	20 Januari 2024/ January 20, 2024	6,00%	-	400.000	Debt Service Coverage Ratio (DSCR): Minimal 1 : 1 / Minimum 1 : 1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Danamon, Tbk ("Danamon")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	-	21 November 2023/ November 21, 2023	-	-	50.000	EBITDA to Interest Ratio: Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	-	20 Oktober 2023/ October 20, 2023	-	-	500.000	EBITDA to Interest Ratio: Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Kredit Jangka Pendek/ Short Term Credit	100.000	20 Januari 2024/ January 20, 2024	6,15%	-	-	EBITDA to Interest Ratio: Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110% / 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
		4.499.414				3.865.568		

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang bank jangka panjang:

Long-term bank loans:

	2023	2022	
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - utang bank jangka panjang			Current maturities of - long-term bank loan
Pihak Berelasi (Catatan 44)	815.638	257.903	<i>Related Parties (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
PT Bank DKI	1.750.000	-	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.004.901	3.419	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	1.000.000	-	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Sharia Business Unit</i>
PT Bank Central Asia Tbk	357.606	36.262	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Permata Tbk	35.891	22.227	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	18.450	-	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	14.489	7.217	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank ICBC Indonesia	12.583	4.714	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	10.841	6.775	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	9.658	8.567	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Bali</i>
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.249	-	<i>PT Bank KEB Hana Indonesia</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	7.239	3.606	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	5.065	2.523	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Papua</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	4.940	1.109	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Riau</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	4.940	1.109	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	4.348	2.166	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	2.902	1.445	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1.853	415	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.449	720	<i>PT Bank Jabar Banten Syariah</i>
Subtotal	4.256.404	102.274	<i>Subtotal</i>
Total Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun - Utang Bank Jangka Panjang	5.072.042	360.177	Total Current Maturities of Long Term Bank Loans
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long-term portion - net off current maturities
Pihak Berelasi (Catatan 44)	35.263.080	24.057.717	<i>Related Parties (Note 44)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
PT Bank Central Asia Tbk	13.602.235	10.412.739	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.943.511	3.000.000	<i>PT Bank Maybank Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.229.459	700.000	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.129.200	2.134.243	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank Mega Tbk	940.507	955.050	<i>PT Bank Mega Tbk</i>
PT Bank ICBC Indonesia	593.454	610.744	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
PT Bank Permata Tbk	500.000	500.000	<i>PT Bank Permata Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	494.562	477.192	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	345.240	333.901	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Papua</i>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	282.218	286.582	<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	210.092	232.072	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	188.364	191.277	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan</i>
PT Bank KEB Hana Indonesia	164.422	-	<i>PT Bank KEB Hana Indonesia</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	158.169	163.236	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Riau</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	158.169	163.236	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</i>
PT Bank Jabar Banten Syariah	93.854	95.305	<i>PT Bank Jabar Banten Syariah</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	59.316	61.216	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	40.252	44.977	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Bali</i>
PT Bank DKI	-	1.500.000	<i>PT Bank DKI</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	-	1.000.000	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Sharia Business Unit</i>
Subtotal	22.133.024	22.861.770	<i>Subtotal</i>
Biaya belum diamortisasi	(349.659)	(231.744)	<i>Unamortized cost</i>
Total bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	57.046.445	46.687.743	Long-term portion - net off current maturities
Total Utang Bank Jangka Panjang	62.118.487	47.047.920	Total Long-Term Bank Loans

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang bank jangka panjang: (lanjutan)

Long-term bank loans: (continued)

Informasi lain mengenai pinjaman bank pada
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Other information related to bank loans as at
December 31, 2023 is as follows:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Interest Coverage Ratio (ICR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities	Porsi jangka panjang setelah dikurangi satu Tahun/ Long-term portion - net off current maturities						
Perusahaan/The Company									
PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")	PMK IB Musyarakah/ PMK IB Musyarakah	-	500.000	31 Juli 2025/ July 31, 2025	6,50%	-	200.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Term Loan/ Term Loan	-	2.200.000	21 Oktober 2025/ October 21, 2025	6,50%	-	3.600.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNP")	Kredit Modal Kerja I (KMK)/ Working Capital Credit I (KMK)	-	350.000	26 September 2026/ September 26, 2026	6,25%	-	350.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNP")	Kredit Modal Kerja III (KMK)/ Working Capital Credit III (KMK)	-	350.000	26 September 2026/ September 26, 2026	6,25%	-	350.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Musyarakah/ Musyarakah	-	1.485.000	14 Oktober 2025/ October 14, 2025	6,15%	-	15.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Musyarakah/ Musyarakah	-	685.000	14 Oktober 2025/ October 14, 2025	5,95%	-	15.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Maybank, Tbk ("Maybank")	PPB Musyarakah IB/ PPB Musyarakah IB	-	1.643.511	21 Desember 2025/ December 21, 2025	6,20%	-	3.150.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Maybank, Tbk ("Maybank")	PPB Musyarakah IB/ PPB Musyarakah IB	-	300.000	21 Desember 2025/ December 21, 2025	6,00%	-	-	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Time Loan	-	2.000.000	24 Mei 2026/ May 24, 2026	6,40%	-	300.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Musyarakah/ Musyarakah	-	500.000	30 Oktober 2026/ October 30, 2026	6,00%	-	500.000	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Shinhan Indonesia ("Shinhan")	Demand Loan	-	-	24 September 2025/ September 24, 2025	-	-	200.000	Minimal 125% / 1.25/ Minimum 125%/ 1.25	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")	Kredit Berjangka/ Term Credit	1.000.000	-	21 Oktober 2024/ October 21, 2024	5,85%	-	-	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank Danamon - Unit Usaha Syariah ("Danamon Syariah")	Pembiayaan Musyarakah/ Musyarakah Financing	1.000.000	-	21 Oktober 2024/ October 21, 2024	6,00%	-	-	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank DKI ("DKI")	Modal Kerja - Musyarakah/ Working Capital - Musyarakah	1.000.000	-	21 Desember 2024/ December 21, 2024	6,20%	-	-	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%
PT Bank DKI ("DKI")	Modal Kerja - Musyarakah/ Working Capital - Musyarakah	750.000	-	9 Desember 2024/ December 9, 2024	6,20%	-	-	Minimal 110% / 1.1/ Minimum 110%/ 1.1	Maksimal 5 (lima) kali / 500%/ Maximum 5 (Five) times/ 500%

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu Tahun/ Long-term portion - net off current maturities						
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Marga Sarana Jabar									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	5.046	993.021	30 Desember 2035/ December 30, 2035	6,75%	Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lainnya Selama Masa Konsesi (Catatan 36) Toll Revenues and Other Business Revenues During the Concession Period (Note 36)	6.093	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	-
2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")									
Pinjaman Bank/ Bank Loan									
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Danamon")	Pembiayaan Bilateral/ Bilateral Financing	4.901	1.129.200	28 Maret 2035/ March 28, 2035	6,25%		3.561		-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang bank jangka panjang: (lanjutan)

Long-term bank loans: (continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount		Tanggall Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu Tahun/ Long-term portion - net off current maturities						
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasmarga Kunciran Cengkareng									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")									Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi/ Investment Credit			28 November 2035/ November 28, 2035		Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset jalan tol (Catatan 13) Toll Revenue and Toll Road Asset Insurance Policy (Note 13)	2.718.460	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")									
4. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tbk ("SMI")									Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	21.667	3.188.329	18 Desember 2038 / December 18 2038	6,75%	Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset jalan Tol (Catatan 36) Toll Revenue and Toll Road Asset Insurance Policy (Note 36)	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")									
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Marga Trans Nusantara									
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loans									
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi/ Investment Credit	1.227	2.576.655	23 Oktober 2037/ October 23, 2037	6,30%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13) Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 13)	1.853	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasmarga Bali Tol									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	167.980	614.310	22 Juni 2027/ June 22, 2027	7,13%	Hak Koneksi, Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya yang Dikait secara Fidusia (Catatan 13) Concession Rights, Toll Revenues and Other Fiduciary Bound Businesses (Note 13)	149.008	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")									
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")									
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ("BTN")									
5. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									
6. PT Bank Pembangunan Daerah Bali									
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasmarga Kualanamu Tol									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi/ Investment Credit	94.514	1.800.916	13 Juli 2030/ July 13, 2030	5,92%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13) Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 13)	170.361	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")									
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")	2. Bunga Masa Konstruksi/ Interest During Construction	8.464	194.677			2. Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Aset jalan Tol (Catatan 36) Toll Revenue and the Toll road Asset Insurance Policy (Note 36)			
4. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara						3. Rekening Dana Penampungan/ Escrow Account			
						4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia/ Claims on income from insurance claims, bank guarantees and reimbursement of funds from the government are bound by fiduciary			
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Cinere Serpong Jaya									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")									Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitor/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	-	2.140.191	11 Oktober 2034/ October 11, 2034	7,38%	Pendapatan Tol/ Toll Revenue	126.723	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang bank jangka panjang: (lanjutan)

Long-term bank loans: (continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount		Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun/ Long-term portion - net off current maturities						
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Cinere Serpong Jaya									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Dana Talangan Tanah/ Land Bailout	32.645	-	4 Maret 2024/ March 4, 2024	8,50%	1. Tagihan atas pengembalian Dana Talangan Tanah dan Pemerintah dan/atau instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah/ Claims for returning Land Bailout Funds from the Government and/or other authorized agencies appointed by the Government	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNP")						2. Rekening Penampungan Dana Talangan Tanah yang dikait dengan gadai rekening senilai Rp 720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh milyar rupiah) yang dimiliki nasabah/ Land Bailout Fund Escrow Account tied to a pawn account in the amount of IDR 720,000,000,000 (seven hundred and twenty billion rupiah) owned by the customer			
3. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")						3. LoU (Letter of Undertaking) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemegang Saham Nasabah dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler/ LoU (Letter of Undertaking) or Statement of Commitment from Customer Shareholders in the form of Circular General Meeting of Shareholders Resolutions			
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasmarga Tollroad Operator									
Pinjaman Modal Kerja/ Working Capital Loans									
PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	MMQ Ase/ MMQ Asset	-	-	15 September 2023/ September 15, 2023	-	Piutang Usaha, mesin, alat kendaraan, dan perangkat pendukung lain terkait proyek Perusahaan/ Receivables, machinery, vehicle equipment, and other supporting devices related to the Company project	22.227	Minimal 125% / 1.25/ Minimum 125%/ 1.25	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasmarga Balikpapan Samarinda									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	101.106	6.563.202	20 Desember 2033/ December 20, 2033	6,25%	1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13)/ Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 13)	50.743	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("BRI")						2. Pendapatan Tol dan Polis Asuransi Asset jalan Tol (Catatan 36)/ Toll Revenue and the Toll road Asset Insurance Policy (Note 36)			
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")						3. Rekening dana tanggungan/ Escrow Account			
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")						4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia/ Claims on income from insurance claims, bank guarantees and reimbursement of funds from the government are bound by fiduciary			
5. PT Bank Mega, Tbk									
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk									
7. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")									
8. PT Bank ICBC Indonesia									
9. PT Bank Pembangunan Daerah Papua									
10. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk									
11. PT Bank Pembangunan Kalimantan Selatan									
12. PT Bank Jabar Banten Syariah ("BJB")									
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasmarga Manado Bitung									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNP")	1. Kredit Investasi/ Investment Credit	79.476	2.544.548				25.188		Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")				23 Desember 2030/ December 23, 2030	6,28%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13)/ Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 13)		Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
3. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	2. Bunga Masa Konstruksi/ Interest During Construction	8.937	286.129						
4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")									
5. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")									
6. PT Bank ICBC Indonesia									
7. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat									
8. PT Bank Pembangunan Daerah Riau									
9. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah									

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang bank jangka panjang: (lanjutan)

Long-term bank loans: (continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount		Tanggall Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu tahun/ Long-term portion - net off current maturities						
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Japek Selatan									
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loans									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Pinjaman Talangan/ Bridging Loan	-	1.500.000	27 Oktober 2025/ October 27, 2025	6,50%	-	49.176	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank BRI (Persero), Tbk ("BRI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	98.879	-	11 April 2024/ April 11, 2024	7,75%	-	184.018	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi									
Pinjaman Sindikasi terdiri dari/ Syndicated Loans consist of:									
1. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	1. Kredit Investasi/ Investment Credit	-	243.323	20 November 2038/ November 20, 2038	7,85%	-	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
2. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	2. Bunga Masa Konstruksi/ Interest During Construction	-	37	-	-	-	-	-	-
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI")	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PT Bank Pembangunan Daerah Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Dana Talangan Tanah/ Land Bailout Loans									
1. PT Bank Permata, Tbk ("Permata")	Dana Talangan Tanah/ Land Bailout	35.891	-	30 Oktober 2024/ October 30, 2024	8,75%	-	-	Menjaga ekuitas Penjualan seluruh posisi/ Maintaining the Company's equity is always positive	-
1. Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13) Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 13)									
2. Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha Lain terkait dengan Hak Pengusahaan Jalan Tol (Catatan 36) Toll Revenue and other Business Income related to Toll Road Concession Rights (Note 36)									
3. Rekening Dana Penampungan/ Escrow Account									
4. Tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, bank garansi dan penggantian dana dari pemerintah diikat fidusia/ Claims on income from insurance claims, bank guarantees and reimbursement of funds from the government are bound by fiduciary									
2. Rekening Penampungan Dana Talangan Tanah yang diikat dengan gadai rekening senilai Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dimiliki nasabah (Catatan 9) Land Bailout Fund Escrow Account tied to a pawn account in the amount of IDR 100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) owned by the customer (Note 9)									
3. LoU (Letter of Undertaking) atau Surat Pernyataan Kesanggupan dari Pemegang Saham Nasabah dalam bentuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler/ LoU (Letter of Undertaking) or Statement of Commitment from Customer Shareholders in the form of Circular General Meeting of Shareholders Resolutions									
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Jogja Bowen									
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loans									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	-	1.587.233	25 Oktober 2025/ October 25, 2025	6,50%	-	-	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	1.587.233
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Transjawa Tol									
Pinjaman Sindikasi PT JSMI Syndicated Loans PT JSM									
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi/ Investment Credit	119.510	3.607.054	13 Oktober 2033/ October 13, 2033	6,75%	-	54.087	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 2.2 (dua korae dua) kali / 220% / Maximum 2.2 (two point two) times / 220%
Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13) Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 36)									

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. UTANG BANK (lanjutan)

23. BANK LOANS (continued)

Utang bank jangka panjang: (lanjutan)

Long-term bank loans: (continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas Terutang/ Outstanding Facility Amount		Tanggpal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Pelunasan/ Acquittance	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Debt to Equity Ratio (DER)
		Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/ Current maturities	Bagian jangka panjang setelah dikurangi satu Tahun/ Long-term portion - net off current maturities						
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Jasamarga Trans Jawa Tol									
Pinjaman Sindikasi PT JGP/ Syndicated Loans PT JGP									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	65.703	2.286.457	24 Agustus 2032/ August 24, 2032	6,65%	Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) selama masa konsesi (Catatan 13)/ Toll Road Concession Rights (HPJT) during the concession period (Note 13)	157.687	Minimal lebih dari 100% / 1 kali sejak tahun ke 4 setelah ruas tol beroperasi/ At least more than 100% / 1 time since the 4th year after the toll road section is operational	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
Pinjaman Sindikasi PT JSN/ Syndicated Loans PT JSN									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	48.833	1.930.671	21 Desember 2034/ December 21, 2034	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha- usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah (Catatan 13)/ Toll Road Concession Rights, entire claims and operational revenues, all escrow accounts, income from insurance claims, Bank Guarantee, fund compensation from the Government (Note 13)	3.417		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	43.358	1.714.228	21 Desember 2034/ December 21, 2034	6,75%		73.724	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi/ Investment Credit	31.359	1.239.815	21 Desember 2034/ December 21, 2034	6,75%		53.321		
PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("CIMB")	Kredit Investasi/ Investment Credit	18.450	729.459	21 Desember 2034/ December 21, 2034	6,75%		31.372		
Pinjaman Sindikasi PT JNK/ Syndicated Loans PT JNK									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	11.958	1.171.896	25 Juni 2037/ June 25, 2037	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha- usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah (Catatan 13)/ Toll Road Concession Rights, entire claims and operational revenues, all escrow accounts, income from insurance claims, Bank Guarantee, fund compensation from the Government (Note 13)	9.965	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank Nasional Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	11.958	1.171.896	25 Juni 2037/ June 25, 2037	6,75%		9.965	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("BSI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	4.234	414.908	25 Juni 2037/ June 25, 2037	6,75%		3.528	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
Pinjaman Sindikasi PT JSB/ Syndicated Loans PT JSB									
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Mandiri")	Kredit Investasi/ Investment Credit	23.721	2.845.896	27 Desember 2036/ December 27, 2036	6,75%	Hak Pengusahaan Jalan Tol, seluruh tagihan dan pendapatan dan usaha- usaha lain, keseluruhan escrow accounts, pendapatan dari hasil klaim asuransi, Garansi Bank, dan penggantian dana dari Pemerintah (Catatan 13)/ Toll Road Concession Rights, entire claims and operational revenues, all escrow accounts, income from insurance claims, Bank Guarantee, fund compensation from the Government (Note 13)	6.094	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI")	Kredit Investasi/ Investment Credit	111.978	1.873.637	27 Desember 2036/ December 27, 2036	6,75%		42.532	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	Maksimal 70:30 antara porsi kreditur dan debitur/ Maximum 70:30 between the portion of creditors and debtors
PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")	Kredit Investasi/ Investment Credit	160.996	2.870.481	27 Desember 2036/ December 27, 2036	6,75%		65.775	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
PT Keb Hana Indonesia, Tbk ("Hana")	Kredit Investasi/ Investment Credit	9.249	164.424	27 Desember 2036/ December 27, 2036	6,75%		3.537	Minimal lebih dari 100% / 1 kali/ Minimum more than 100% / 1 time	
		5.072.041	57.386.104				12.702.415		

Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank,
Kelompok Usaha diwajibkan memenuhi kewajiban-
kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

As specified by the bank loan agreements, the
Group is required to comply with certain covenants,
such as financial ratio covenants.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

24. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION LOAN

Rincian utang lembaga keuangan bukan bank
adalah sebagai berikut:

The details of non-bank financial institution loan are
as follows:

	2023	2022	
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Pendek Pihak Berelasi (Catatan 44)	908.102	-	Short-term Non-bank Financial Institution Loan Related Party (Note 44)
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Pendek	908.102	-	Total
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang Pihak Berelasi (Catatan 44) Biaya belum diamortisasi	200.000 -	200.000 -	Long-term Non-bank Financial Institution Loan Related Party (Note 44) Unamortized cost
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.000	200.000	Total Non-Bank Financial Institution Loan
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun - utang lembaga keuangan bukan bank	200.000	-	Current maturities of non-bank financial institutions loan
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang	-	200.000	Total

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 29 tanggal 16 September 2020 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dengan perubahan terakhir ke VIII No.PERJ-174/SMI/1222, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp350.000 dengan jangka waktu selambat-lambatnya pada 15 September 2024. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 6,10% per tahun dan pada 31 Desember 2022 adalah 5,75% per tahun. Pinjaman bank tidak mensyaratkan Perusahaan untuk menyerahkan jaminan/agunan kepada bank maupun kepada kreditur lainnya.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- a. *Interest coverage ratio* minimal 1,1 kali; dan
- b. *Debt to equity ratio* maksimal 5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan penting.

Saldo terutang fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp200.000.

The Company

Based on the Deed of Loan Agreement No. 29 dated September 16, 2020 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., with the latest amendment VIII No.PERJ-174/SMI/1222, The Company obtained loan facilities from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounting to Rp350,000 for a period of as late as September 15, 2024. As of December 31, 2023 the applicable interest rate is 6.10% per annum and as of December 31, 2022 the applicable interest rate is 5.75% per annum. The bank loan does not require the Company to submit guarantee/collateral to the bank or other creditors.

The major covenant of this facility include the following:

- a. *Minimum interest coverage ratio* is 1.1 times; and
- b. *Maximum debt to equity ratio* is 5 times.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has met with all major covenant requirement.

On December 31, 2023 and 2022, the Company has an outstanding balance on this financing facility amounting to Rp200,000 each, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**24. UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
(lanjutan)**

Anak Perusahaan – JAP

Akun ini merupakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (“SMI”) di JAP. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan No. 06 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 4 April 2023, JAP menandatangani perjanjian kredit dengan SMI untuk membiayai dana talangan pengadaan tanah. Fasilitas kredit yang diterima JAP adalah sebesar Rp908.102 dengan jangka waktu selama 12 bulan. Tingkat suku bunga yang berlaku pada 31 Desember 2023 adalah sebesar 6,75% per tahun.

Perjanjian tersebut tidak akan menjaminkan harta kekayaan JAP yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali atau pelunasan kewajiban secara tepat waktu yang telah disepakati berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka JAP berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyatakan *Negative Pledge*. Apabila terdapat harta kekayaan JAP yang telah dijaminkan terlebih dahulu menjadi agunan bagi kreditur lain sebelum perjanjian pembiayaan ditandatangani, maka *Negative Pledge* berlaku. SMI sebagai kreditur akan memperoleh bagian secara proporsional sesuai jumlah fasilitas pembiayaan masing-masing.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- Interest coverage ratio* minimal 1,10 kali; dan
- Debt to equity ratio* maksimal 5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, JAP telah memenuhi seluruh pembatasan penting.

Saldo terutang jangka panjang JAP pada pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp908.102.

**24. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION LOAN
(continued)**

Subsidiary – JAP

This account represents loan from PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (“SMI”) in JAP. Based on Notarial Deed of Financing Agreement No. 06 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dated April 4, 2023, JAP signed a credit agreement with SMI to financing a land acquisition bailout. The credit facility received by JAP amounted to Rp908,102 with terms of 12 months. Interest rates applicable to December 31, 2023 is at 6.75% per annum.

The agreement will not pledge JAP's existing or future assets. To ensure the order of timely repayment or repayment of obligations that have been agreed under the financing agreement, JAP promises and hereby binds itself to declare a Negative Pledge. If there are JAP assets that have been pledged as collateral for other creditors before the financing agreement is signed, the Negative Pledge applies. SMI as a creditor will get a proportional share according to the amount of each financing facility.

The major covenant of this facility include the following:

- Minimum interest coverage ratio is 1.10 times; and*
- Maximum debt to equity ratio is 5 times.*

As of December 31, 2023 and 2022, JAP has met with all major covenant requirement.

As of December 31, 2023, JAP has an outstanding loan on this facility is Rp908,102.

25. UTANG OBLIGASI

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Perusahaan		
Obligasi Berkelanjutan II		
PT Jasa Marga 2020		
Seri A	-	1.100.350
Seri B	286.000	286.000
Seri C	90.050	90.050
Seri D	523.600	523.600
Subtotal	899.650	2.000.000
Biaya Penerbitan Obligasi yang		
Belum Diamortisasi	(2.297)	(3.880)
Total Utang Obligasi	897.353	1.996.120
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	-	(1.100.350)
Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang	897.353	895.770

25. BONDS PAYABLE

The details of bonds payable are as follows:

	The Company
	Continuing Public Offering Bond II
	PT Jasa Marga 2020
	Series A
	Series B
	Series C
	Series D
	Subtotal
	Unamortized Bond Issuance Cost
	Total Bond Payable
	Current Maturities
	Bond Payable of Long-term Portion

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

25. BONDS PAYABLE (continued)

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The amounts of repayments of bonds payable by years of maturity as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	2023	2022
2023	-	1.100.350
2025	286.000	286.000
2027	90.050	90.050
2030	523.600	523.600
Total	899.650	2.000.000

Obligasi Berkelanjutan II PT Jasa Marga Tahun 2020

Continuing Public Offering Bond II PT Jasa Marga 2020

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") 4 (empat) seri dengan nilai nominal, suku bunga dan jatuh tempo sebagai berikut:

On August 31, 2020, the Company obtained an effective statement from OJK on the issuance of Jasa Marga Bond II Phase I Year 2020 ("Bonds") with 4 (four) series with par value, annual interest rate and maturity dates as follows:

- Seri A sebesar Rp1.100.350 dan suku bunga 7,90% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023.
- Seri B sebesar Rp286.000 dan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2025.
- Seri C sebesar Rp90.050 dan suku bunga 8,60% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2027.
- Seri D sebesar Rp523.600 dan suku bunga 9,00% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 September 2030.

- Series A amounting to Rp1,100,350 and annual interest rate of 7.90%, will mature on September 8, 2023.
- Series B amounting to Rp286,000 and annual interest rate of 8.25%, will mature on September 8, 2025.
- Series C amounting to Rp90,050 and annual interest of 8.60%, will mature on September 8, 2027.
- Series D amounting to Rp523,600 and annual interest of 9.00%, will mature on September 8, 2030.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 8 September 2020 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp2.000.000. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan sesuai dengan prospektus penerbitan obligasi Perusahaan, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan, diantaranya namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol, serta peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol. Peringkat obligasi ini adalah idAA berdasarkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 13 November 2023.

Total fund received by the Company on September 8, 2020 from the issuance of Bonds was Rp2,000,000. Acting as trustee for the bonds is PT Bank Mega Tbk and in accordance with the Company's prospectus for bonds issuance, the funds will be used for funding the Company's working capital, including but not limited to toll road maintenance and toll road supporting facilities, also for toll road facilities enhancement and toll road supporting facilities. The bond rating is idAA based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) on November 13, 2023.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK selama periode utang obligasi sebagai berikut:

The Company is also required to maintain certain financial ratios base on annual financial statements which have been audited by public accounting firm registered in OJK during the bonds payable as follows:

- Interest Coverage Ratio (ICR) (rasio cakupan bunga) minimal 1,1:1; dan
- Debt to Equity Ratio (DER) (rasio utang) maksimal 5:1

- Minimum Interest Coverage Ratio (ICR) of 1.1:1; and
- Maximum Debt to Equity Ratio (DER) of 5:1

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

25. BONDS PAYABLE (continued)

The Bonds are not collateralized by a specific collateral, but are collateralized by the Company's entire assets, either movable or immovable, whether existing or will exist in the future.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has met the financial ratio requirements.

26. LIABILITAS PEMBEBASAN TANAH

Akun ini merupakan liabilitas Entitas Anak atas dana talangan pembelian tanah dan untuk pembangunan ruas jalan tol dengan menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol. Penggunaan dana talangan tersebut oleh JSM adalah untuk pembangunan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto, MTN adalah untuk pembangunan ruas Tol Kunciran - Serpong dan JKC adalah untuk pembangunan ruas tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran.

Selain itu, kewajiban pembebasan tanah juga merupakan kewajiban pembebasan tanah untuk pelunasan utang ganti rugi pelebaran Jalan Tol Sedyatmo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

26. LAND ACQUISITION LIABILITIES

This account represents liabilities of the Subsidiaries for the bail out loan and for land acquisition and for construction of toll roads by using bail out loan from the Public Service Assistance Unit - the Indonesian Toll Road Authority. The use of bail out funds by JSM is for construction of Surabaya - Mojokerto toll road, MTN is for construction of Kunciran - Serpong Toll road and JKC is for construction of Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Toll Road.

In addition, the land acquisition liabilities also represent settlement of payable for widening of Sedyatmo Toll Road to Ministry of Environment and Forestry.

27. LIABILITAS SEWA

Kelompok Usaha menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa lahan, gedung, kendaraan, alat pengangkutan dan peralatan lainnya. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset hak guna tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

27. LEASE LIABILITIES

The Group entered into several lease agreements which are related to rent of land, buildings, vehicles, transportation equipment and other equipments. Rental agreements are typically made for fixed period of 1 year to 5 years. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants, but right of use assets may not be used as security for borrowing purposes.

The consolidated statement of financial position as at December 31, 2023 and 2022 shows the following amounts related to leases:

	2023	2022	
Kurang dari 1 Tahun	72.912	29.747	Less than 1 Year
Antara 1 - 3 Tahun	74.436	104.169	Between 1 - 3 Years
Total	147.348	133.916	Total
Dikurangi: Bunga diskonto	(17.332)	(13.423)	Less: Discount interest
Nilai Kini Pembayaran Sewa Minimum	130.016	120.493	Current Payment Minimum Lease
Dikurangi: bagian jatuh tempo satu tahun	(72.631)	(29.379)	Less: short-term portion
Bagian jangka panjang	57.385	91.114	Long-term portion

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

27. LEASE LIABILITIES (continued)

	2023	2022	
Kendaraan bermotor			Vehicles
PT Pulo Air Biru	25.550	30.243	PT Pulo Air Biru
PT Armada Antar Lintas Nusa	24.482	-	PT Armada Antar Lintas Nusa
Koperasi Jasa Marga Bhakti	16.437	-	Koperasi Jasa Marga Bhakti
PT Multi Adhi Perkasa	14.980	5.822	PT Multi Adhi Perkasa
PT Adi Sarana Armada	6.354	11.357	PT Adi Sarana Armada
PT Surya Sudeco	5.320	8.942	PT Surya Sudeco
PT Metrindo	4.826	7.789	PT Metrindo
PT Torin Citra Sejahtera	3.299	3.894	PT Torin Citra Sejahtera
PT Citra Persada Infrastruktur	3.825	6.672	PT Citra Persada Infrastruktur
PT Ario Aditya Persada	3.105	5.964	PT Ario Aditya Persada
PT Otni Elektra	2.905	-	PT Otni Elektra
PT Pratama Mitra Sejati	2.801	4.650	PT Pratama Mitra Sejati
PT Surya Darma Perkasa	2.682	9.263	PT Surya Darma Perkasa
PT Resqtec Indonesia	-	3.709	PT Resqtec Indonesia
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	12.337	16.170	Others (below Rp2,000)
Subtotal	128.903	114.475	Subtotal
Peralatan Operasi dan Kantor			Operational and Office Equipment
PT Mitra Integrasi Informatika	-	5.621	PT Mitra Integrasi Informatika
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	-	18	Others (below Rp2,000)
Subtotal	-	5.639	Subtotal
Gedung Kantor dan Bangunan Lain			Office and Other Buildings
Lain-lain (di bawah Rp2.000)	1.113	379	Others (below Rp2,000)
Subtotal	1.113	379	
Dikurangi: Bagian jatuh tempo 1 tahun	72.631	29.379	Less: short-term portion
Bagian tidak lancar	57.385	91.114	Non - current portion

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The statement of profit or loss shows the following amounts related to leases:

	2023	2022	
Depresiasi atas aset hak guna (Catatan 11)			Depreciation related to right-of-use assets (Note 11)
Kendaraan Bermotor	66.564	60.115	Vehicles
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	3.167	1.232	Office and Other Buildings
Peralatan Operasi dan Kantor	10.442	6.714	Operational and Office Equipment
Beban bunga (Catatan 42)	12.224	6.867	Interest expense (Note 42)
Beban sewa jangka pendek (Catatan 38 dan 39)	91.244	97.451	Current leases expense (Notes 38 and 39)

Pergerakan pada liabilitas sewa yang timbul dari aktivitas pendanaan di 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movement in the lease liabilities arising from financing activities in 2023 and 2022 were as follows:

	2023	2022	
Pada Awal Tahun	120.493	114.487	At the Beginning of the Year
Penambahan liabilitas sewa	105.202	75.848	Addition of lease liabilities
Penambahan dari efek kombinasi bisnis	36.871	-	Addition of business combination
Beban bunga liabilitas sewa	12.224	6.868	Interest on lease liabilities
Pembayaran liabilitas sewa	(144.774)	(76.710)	Payment of lease liabilities
Saldo Akhir Tahun	130.016	120.493	Ending Balance of the Year

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PROVISI PELAPISAN JALAN TOL

Jumlah dari provisi pelapisan jalan tol ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo Awal	969.206	699.113
Penambahan (Catatan 38)	756.824	733.600
Dampak Akuisisi Entitas Anak	242.884	-
Dampak Dekonsolidasi Entitas Anak	-	(51.244)
Realisasi	(695.411)	(412.263)
Saldo Akhir	<u>1.273.503</u>	<u>969.206</u>
Bagian Jangka Pendek	541.854	493.242
Bagian Jangka Panjang	731.649	475.964
Total	<u>1.273.503</u>	<u>969.206</u>

28. PROVISION FOR OVERLAY

The amounts of provision for overlay are as follows:

Beginning Balance
Addition (Note 38)
Subsidiary Acquisition Impact
Deconsolidated Subsidiary Impact
Realization
Ending Balance
Current Portion
Long-term Portion
Total

29. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka merupakan jumlah dari pendapatan sewa iklan, lahan, tempat peristirahatan, dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol).

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan diterima dimuka		
Sewa Lahan Iklan	51.043	81.022
Sewa Lahan Tempat Peristirahatan	36.493	35.732
Sewa Lahan Pemanfaatan RUMIJA	27.869	1.059
Uang Muka Penjualan Properti	2.280	12.465
Lainnya (Di bawah Rp2.000)	2.722	9.381
Subtotal	120.407	139.659
Dikurangi bagian jangka pendek	(46.724)	(139.659)
Bagian jangka panjang	<u>73.683</u>	<u>-</u>

29. UNEARNED REVENUE

Unearned revenue represents amounts received from rental of advertisements, space, rest areas, and for use of the Space Owned Toll Road Area (Rumijatol).

Unearned income
Advertising Land Rent
Rest Area Land Rent
Rent of RUMIJA Utilization Land
Advance Payment for Property Sales
Other (Below Rp2,000)
Subtotal
Less: short-term portion
Long-term portion

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The long-term employee benefits liability with detail are follows:

	2023	2022	
Perusahaan			The Company
Program Kesehatan Pensiunan	618.557	599.299	Pension Healthcare Program
Program Purna Karya	493.295	471.199	Post-Retirement Benefits Program
Program Pasca kerja Lainnya	140.267	128.693	Other Post-Employment Benefits Program
Program Jangka Panjang Lainnya	20.499	19.811	Other Long-term Employee Benefits Program
Program Pensiun	-	-	Pension Plan
Subtotal	<u>1.272.618</u>	<u>1.219.002</u>	Subtotal
Entitas Anak			Subsidiaries
Program Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya			Pension Program and Other Post Benefits Program
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	23.557	18.817	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Jasamarga Transjawa Tollroad	10.867	9.983	PT Jasamarga Transjawa Tollroad
PT Jasamarga Related Business	4.472	4.030	PT Jasamarga Related Business
PT Jasamarga Bali Tol	4.466	4.471	PT Jasamarga Bali Tol
PT Marga Sarana Jabar	635	740	PT Marga Sarana Jabar
PT Jasamarga Tollroad - Maintenance	295	110	PT Jasamarga Tollroad - Maintenance
PT Jasamarga Japek Selatan	262	168	PT Jasamarga Japek Selatan
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	212	169	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Cinere Serpong Jaya	165	119	PT Cinere Serpong Jaya
PT Jasamarga Balikpapan - Samarinda	150	101	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Manado Bitung	109	85	PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	47	-	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
PT Jasamarga Kualanamu Tol	46	107	PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jasamarga Jogja Bawen	1	-	PT Jasamarga Jogja Bawen
Subtotal	<u>45.284</u>	<u>38.900</u>	Subtotal
Total	<u>1.317.902</u>	<u>1.257.902</u>	Total
Dikurangi: bagian jangka pendek	(1.794)	(1.794)	Less: short-term portion
Bagian jangka panjang	<u>1.316.108</u>	<u>1.256.108</u>	Long-term portion

Estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui Perusahaan adalah sebagai berikut:

The estimated employee benefits liabilities recognized by the Company are as follows:

a. Program kesehatan pensiunan

a. Pension healthcare program

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang.

Employee benefits liability is estimated using the *Projected-Unit-Credit* method based on long-term actuarial assumptions.

Perusahaan menyelenggarakan program fasilitas kesehatan untuk karyawan yang sudah pensiun bersama dengan keluarganya sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan tidak melakukan pendanaan untuk Program ini.

The Company established a healthcare facility for employees who had retired together with their families in accordance with the Company Regulation. The Company does not undertake any funding for this Program.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 9.064 dan 9.294 karyawan beserta keluarganya sesuai Peraturan Perusahaan.

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	599.299	559.407
Biaya Bunga	44.947	41.956
Biaya Jasa Kini	7.703	7.686
Pembayaran Imbalan	(40.143)	(43.607)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	611.806	565.442
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto		
- Kerugian dari Perubahan Asumsi	14.122	-
- Penyesuaian atas Pengalaman	(7.371)	33.857
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	618.557	599.299
Nilai Kini Liabilitas Tidak Didanai - Akhir Tahun	618.557	599.299

Rincian (keuntungan)/kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
Kerugian aktuarial		
- Perubahan asumsi aktuarial	14.122	-
- Penyesuaian atas pengalaman	(7.371)	33.857
Biaya yang diakui dalam - Penghasilan Komprehensif Lain	6.751	33.857
Pajak penghasilan terkait	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang - setelah pajak	6.751	33.857

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya Jasa Kini	7.703	7.686
Biaya Bunga	44.947	41.956
Beban yang Diakui	52.650	49.642

a. Pension healthcare program (continued)

The number of employees entitled to these benefits as of December 31, 2023 and 2022 amounting to 9,064 and 9,294 employees with their families in accordance with the Company Regulation.

	2023	2022
Present Value Liability - Beginning of Year	599.299	559.407
Interest Cost	44.947	41.956
Current Service Cost	7.703	7.686
Benefits Payments	(40.143)	(43.607)
Present Value Liability - End of Year	611.806	565.442
Re-measurement of net liability defined return		
Loss from Changes In - Assumptions	14.122	-
Adjustment of Experiences -	(7.371)	33.857
Present Value Liability - End of Year	618.557	599.299
Present Value Liability Unfunded - End of Year	618.557	599.299

The details of actuarial (gains)/losses in other comprehensive income are as follows:

	2023	2022
Other Comprehensive Income		
Re-Measurement of define benefits liability (asset) net		
Actuarial loss		
Actuarial assumption changes - Experiences adjustment -	14.122	-
Recognized cost at - Other Comprehensive Income	6.751	33.857
Related tax income	-	-
Remeasurements of long-term employee benefits liability - net of tax	6.751	33.857

The details of the expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2023	2022
Current Service Cost	7.703	7.686
Interest Cost	44.947	41.956
Recognized Expenses	52.650	49.642

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Tingkat Bunga Aktuarial Awal Tahun	7,00%	7,50%	Discount Rate - Beginning of Year
Estimasi Kenaikan Biaya Kesehatan	6% menurun linier sampai 4% kemudian flat	6% decreased linearly to 4% then flat	Health Care Increment
Proporsi Usia Pensiun Normal		100%	Proportion of Normal Retirement Age
Tingkat Mortalitas	TMI 4 & GAM 1971	TMI 4 & GAM 1971	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10 % dari TMI 4	10 % of TMI 4	Disability Rate
Tingkat Perputaran Pekerja		Tingkat perputaran pekerja/ Turnover rate	Turnover Rate
	Usia/ Age		
	15 – 29	6%	
	30 – 34	3%	
	35 – 39	1,8%	
	40 – 50	1,2%	
	51 – 52	0,6%	
	> 52	0,0%	
Metode Aktuarial	Projected-Unit-Credit		Actuarial Method
Usia Pensiun Normal (tahun)	56	56	Normal Retirement Age (years)

Sensitivitas juga dihitung dengan metode *Projected-Unit-Credit* sebagaimana diterapkan ketika menghitung nilai kini kewajiban imbalan pasti. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan satu asumsi dan menganggap semua asumsi lainnya konstan.

The actuarial assumptions used in determining the expenses and liabilities of post-employment benefits are as follows:

Sensitivities are also calculated with the *Projected-Unit-Credit* method as applied when calculating present value of defined benefit obligation. The sensitivity analyses are based on a change of one assumption while holding all other assumptions constant.

	2023	2022	
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	618.557	599.299	Present Value Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
+ 1,00%	571.402	513.787	+ 1,00%
- 1,00%	673.434	609.607	- 1,00%
Asumsi Tingkat Inflasi Biaya Kesehatan			Healthcare Inflation Rate Assumptions
+ 1,00%	624.742	563.643	+ 1,00%
- 1,00%	612.230	552.440	- 1,00%

b. Program pensiun

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun JASA MARGA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia KEP-379/KM.6/2004 pada tanggal 14 September 2004.

b. Pension Program

The retirement program is managed by Dana Pensiun JASA MARGA which has been authorized by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia KEP-379/KM.6 /2004 on September 14, 2004.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program pensiun (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 1.568 karyawan aktif dan 1.681 karyawan aktif.

Khusus untuk karyawan yang masuk mulai tahun 2012, program pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya berupa program pensiun iuran pasti yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Kep. 171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 386 dan 389 karyawan aktif.

Rekonsiliasi jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas	1.656.624	1.501.041
Nilai Wajar Aset Program	(1.664.221)	(1.521.655)
Status Pendanaan	(7.597)	(20.614)
Jumlah yang tidak diakui sebagai aset	7.597	20.614
Liabilitas Neto	-	-

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	1.501.041	1.403.438
Penyesuaian Metode Atribusi Imbalan	-	(7.375)
Biaya Bunga	112.578	105.258
Biaya Jasa Kini	17.742	15.262
Pembayaran Imbalan	(103.939)	(99.383)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	1.527.422	1.417.200
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto		
- (Keuntungan)/Kerugian dari Perubahan Asumsi	52.200	(633)
- Penyesuaian atas Pengalaman	77.002	84.474
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	1.656.624	1.501.041

b. Pension Program (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the number of employees are entitled to these benefits are 1,568 active employees and 1,681 active employees.

Employee that enroll from 2012, the retirement program is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya in form of defined contribution pension program which has been authorized by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia 171-KMK/7/1993 on August 16, 1993. As of December 31, 2023 and 2022, the number of employees which are entitled to these benefits are 386 and 389 active employees.

The reconciliation of amount recognized in the statement of financial position as follows:

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas	1.656.624	1.501.041
Nilai Wajar Aset Program	(1.664.221)	(1.521.655)
Status Pendanaan	(7.597)	(20.614)
Jumlah yang tidak diakui sebagai aset	7.597	20.614
Liabilitas Neto	-	-

The reconciliation of the opening and ending balances of the present value of liabilities is as follows:

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas - Awal Tahun	1.501.041	1.403.438
Penyesuaian Metode Atribusi Imbalan	-	(7.375)
Biaya Bunga	112.578	105.258
Biaya Jasa Kini	17.742	15.262
Pembayaran Imbalan	(103.939)	(99.383)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	1.527.422	1.417.200
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto		
- (Keuntungan)/Kerugian dari Perubahan Asumsi	52.200	(633)
- Penyesuaian atas Pengalaman	77.002	84.474
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	1.656.624	1.501.041

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program pensiun (lanjutan)

b. Pension Program (continued)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the beginning and ending balances of the fair value plan of asset is as follows:

	2023	2022	
Nilai Wajar Aset Program -			Plan Assets -
Awal Tahun	1.521.655	1.401.326	Beginning of Year
Ekspektasi Imbal Hasil dari			Expected Return from
- Aset Program	114.124	105.099	Program Assets -
- Imbal Hasil Aset Program	24.465	17.342	Return of Plan's Asset -
Pembayaran iuran - Pemberi Kerja	105.844	95.094	Payment of Contributions from Employer
Pembayaran iuran - Peserta Program	2.072	2.177	Payment of Contributions from Employee
Pembayaran Imbalan Kerja	(103.939)	(99.383)	Benefits Paid
Aset Program Akhir Tahun	1.664.221	1.521.655	Plan Assets - End of the Year

Rincian (keuntungan)/kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of actuarial (gains)/losses in the other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto (Keuntungan) dan kerugian aktuarial			Re-Measurement of define benefit liability (asset), net Actuarial (gain) and loss
- Perubahan asumsi aktuarial	52.200	(633)	Actuarial Assumption Changes -
- Penyesuaian atas pengalaman	77.002	84.474	Adjustment for Experience -
Imbal hasil atas aset program	(24.465)	17.342	Return of plan's asset
Dampak batas atas	(13.017)	20.614	Upper Limit effect
Biaya yang diakui dalam Penghasilan - Komprehensif Lain	91.720	121.797	Recognized cost at Other - Comprehensive Income

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of the expenses recognized in the profit or loss are as follows:

	2023	2022	
Biaya Jasa Kini	15.670	13.085	Current Service Cost
Bunga Neto atas Liabilitas	(1.546)	158	Net Interest of Liability
Beban yang Diakui	14.124	13.243	Recognized Expenses

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used in determining the expenses and liabilities for post-employment benefits are as follows:

	2023	2022	
Tingkat Diskonto	7,00%	7,50%	Discount Rate
Estimasi Kenaikan Gaji	5,00%	5,00%	Salary Increment
Tingkat Mortalitas	100% TMI IV	100% TMI IV	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10 % Tabel Mortalitas		Disability Rate
Tingkat Perputaran Pekerja			Turnover Rate
	Usia/ Age	Tingkat perputaran pekerja/ Turnover rate	
	15 – 29	6%	
	30 – 34	3%	
	35 – 39	1,8%	
	40 – 50	1,2%	
	51 – 52	0,6%	
	> 52	0,0%	
Metode Aktuarial	Projected-Unit-Credit		Actuarial Method
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years		Normal Retirement Age
Usia Pensiun Dini	46 tahun/ years		Early Retirement Age
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal	100%		Proportion of Normal Retirement Age

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program pensiun (lanjutan)

b. Pension Program (continued)

	2023	2022	
Portofolio Aset Program			Portfolio of Plan Asset
Instrumen Ekuitas	11%	11%	Equity Instrument
Deposito Berjangka	3%	4%	Time Deposits
Reksa Dana	7%	28%	Mutual Fund
Obligasi	77%	52%	Bond
Properti	1%	2%	Property
Aset Lainnya (Group Saving Product)	1%	3%	Other Assets (Group Saving Product)
Total	100%	100%	Total

Sensitivitas juga dihitung dengan metode *Projected-Unit-Credit* sebagaimana diterapkan ketika menghitung nilai kini kewajiban imbalan pasti. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan satu asumsi dan menganggap semua asumsi lainnya konstan.

Sensitivities are also calculated with the Projected-Unit-Credit method as applied when calculating present value of defined benefit obligation. The sensitivity analyses are based on a change of one assumption while holding all other assumptions constant.

	2023	2022	
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1.656.624	1.501.041	Present Value Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
- 1,00%	1.795.224	1.581.594	- 1,00%
+ 1,00%	1.526.764	1.428.408	+ 1,00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
- 1,00%	1.507.138	1.410.626	- 1,00%
+ 1,00%	1.802.869	1.603.531	+ 1,00%
Metode Analisis Sensitivitas	<i>Deterministic Method</i>		<i>Sensitivity Analysis Method</i>

c. Program purna karya

c. Post-retirement benefits program

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Perusahaan menyelenggarakan program ini sesuai perjanjian kerja bersama. Perusahaan melakukan pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut yang ditempatkan pada program asuransi dikelola oleh AJB Bumiputera. Pendanaan manfaat Purnakarya yang ditempatkan di AJB Bumiputera dikeluarkan dari perhitungan Aktuarial sejak perhitungan per 31 Desember 2019.

Employee benefits liabilities are estimated using the Projected-Unit-Credit method based on long-term actuarial assumptions. The Company maintains its program based on collective labor agreement. The Company committed funding the employee benefits program on insurance program managed by AJB Bumiputera. Funding for Purnakarya benefit placed at AJB Bumiputera has been taken out from actuarial calculation since valuation per 31 December 2019.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 1.944 dan 2.059 karyawan.

The number of employees as of December 31, 2023 and 2022 entitled to this benefits are 1,944 and 2,059 employees.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Program purna karya (lanjutan)

c. Post-retirement benefits program (continued)

Rekonsiliasi jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of amount recognize in the statement of financial position as follows:

	2023	2022	
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti	493.295	471.199	Present value of Defined Benefit Liability
Nilai Wajar Aset Program	-	-	Fair Value of Program Assets
Posisi Pendanaan	493.295	471.199	Funding

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the beginning and ending balances of the presentvalue of liabilities as follows:

	2023	2022	
Nilai Kini Liabilitas -			Present Value Liability -
Awal Tahun	471.199	429.026	Beginning of Year
Biaya Bunga	31.870	27.633	Interest Cost
Biaya Jasa Kini	20.549	18.153	Current Service Cost
Pembayaran Imbalan	(48.503)	(43.889)	Benefits Payments
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	475.115	430.923	Present Value Liability - End of Year (Expectation)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto			Re-measurement of liability (asset) defined return
- (Keuntungan)/Kerugian dari Perubahan Asumsi	8.002	(10.243)	(Gain)/Loss from Changes in Assumptions
- Penyesuaian atas Pengalaman	10.178	50.519	Experiences Adjustment-
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	493.295	471.199	Present Value Liability - End of Year

Rincian (keuntungan)/kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of actuarial (gains)/losses in the other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	
(Keuntungan) dan Kerugian Aktuarial			Actuarial (gain) and loss
- Perubahan Asumsi Aktuarial	8.002	(10.243)	Actuarial Assumption Changes -
- Penyesuaian atas Pengalaman	10.178	50.519	Adjustment for Experience -
Biaya yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	18.180	40.276	Recognized Expenses at Other Comprehensive Income

Rincian beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	2023	2022	
Bunga Neto atas Liabilitas	31.870	27.633	Net Interest of Liability
Biaya Jasa Kini	20.549	18.153	Current Service Cost
Beban yang Diakui	52.419	45.786	Recognized Expense

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Program purna karya (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Tingkat Diskonto	6,75%	7,00%	Discount Rate
Estimasi Kenaikan Gaji Pegawai Aktif	7,00%	7,00%	Salary Increment
Tingkat Mortalitas	100% TM14	100% TM4	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10% dari TM14	10% dari TM14	Disability Rate
Tingkat Perputaran Pekerja			Turnover Rate

<u>Usia/ Age</u>	<u>Tingkat perputaran pekerja/ Turnover rate</u>
15 – 29	6%
30 – 34	3%
35 – 39	1,8%
40 – 50	1,2%
51 – 52	0,6%
> 52	0,0%

Metode Aktuarial		Actuarial Method
Usia Pensiun Normal	56 tahun/years	Normal Retirement Age
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal	100%	Proportion of Normal Retirement Age

Sensitivitas juga dihitung dengan metode *Projected-Unit-Credit* sebagaimana diterapkan ketika menghitung nilai kini kewajiban imbalan pasti. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan satu asumsi dan menganggap semua asumsi lainnya konstan.

c. Post-retirement benefits program (continued)

The actuarial assumptions used in determining the expenses and liabilities for post-employment benefits are as follows:

Sensitivities are also calculated with the *Projected-Unit-Credit* method as applied when calculating present value of defined benefit obligation. The sensitivity analyses are based on a change of one assumption while holding all other assumptions constant.

	2023	2022	
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	493.295	471.199	Present Value Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			<i>Discount Rate Assumptions</i>
- 1,00%	525.327	501.796	- 1,00%
+ 1,00%	464.432	443.630	+ 1,00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			<i>Salary Increment Assumptions</i>
- 1,00%	463.472	442.712	- 1,00%
+ 1,00%	525.849	502.296	+ 1,00%

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Program Pascakerja lainnya

Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (*post-retirement benefit*) sesuai perjanjian kerja bersama dengan memberikan imbalan sesuai UU. No. 13/2003 bagi karyawan meninggal atau sakit berkepanjangan dan imbalan emas untuk karyawan yang berhenti bekerja selain dikarenakan pengunduran diri. Perusahaan tidak melakukan pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas -		
Awal Tahun	128.693	107.395
Biaya Bunga	9.541	7.558
Biaya Jasa Kini	5.662	4.599
Biaya Jasa Lalu	-	10.913
Pembayaran Imbalan	(9.167)	(13.203)
	<u>134.729</u>	<u>117.262</u>
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
- (Keuntungan)/Kerugian dari Perubahan Asumsi	1.948	(1.872)
- Penyesuaian atas Pengalaman	3.590	13.303
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	<u>140.267</u>	<u>128.693</u>

Rincian (keuntungan)/kerugian aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
(Keuntungan) atau Kerugian Aktuarial		
- Perubahan Asumsi Aktuarial	1.948	(1.872)
- Penyesuaian atas Pengalaman	3.590	13.303
Biaya yang diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	<u>5.538</u>	<u>11.431</u>

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya Jasa Kini	5.662	4.599
Biaya Jasa Lalu	-	10.913
Bunga Neto atas Liabilitas	9.541	7.558
Beban yang Diakui	<u>15.203</u>	<u>23.070</u>

d. Other post-retirement benefits program

The Company maintains its employee post-retirement benefits program based on collective labor agreement by providing benefits according to Law No. 13/2003 for employee who decease or has a prolonged illness and gold reward benefits for employee who retire besides due to resign. The Company does not undertake any funding for this program.

The reconciliation of the beginning and ending balances of the present value of liabilities is as follows:

	2023	2022
Present Value Liability -		
Beginning of Year	128.693	107.395
Interest Cost	9.541	7.558
Current Service Cost	5.662	4.599
Post Service Cost	-	10.913
Benefits Payments	(9.167)	(13.203)
	<u>134.729</u>	<u>117.262</u>
Re-measurement of liability (asset) defined return (Gain)/Loss from Changes In - Assumptions	1.948	(1.872)
Adjustment of Experiences -	3.590	13.303
Present Value Liability - End of Year	<u>140.267</u>	<u>128.693</u>

The details of actuarial (gains)/losses in other comprehensive income are as follows:

	2023	2022
Actuarial (Gain) or Loss		
Actuarial Assumption Changes -	1.948	(1.872)
Adjustment for Experience -	3.590	13.303
Recognized Expenses at Other Comprehensive Income	<u>5.538</u>	<u>11.431</u>

The details of actuarial (gains)/losses in profit or loss are as follows:

	2023	2022
Current Service Cost	5.662	4.599
Post Service Cost	-	10.913
Net Interest of Liability	9.541	7.558
Recognized Expenses	<u>15.203</u>	<u>23.070</u>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Program Pascakerja lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Tingkat Diskonto	6,75%	7,00%	Discount Rate
Estimasi Kenaikan Gaji Pegawai Aktif	6,50%	6,50%	Estimated Salary Increment
Tingkat Mortalitas	100% TM14	100% TM14	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5% dari TM14	5% dari TM14	Disability Rate
Tingkat Perputaran Pekerja			Turnover Rate
	<u>Usia/ Age</u>	<u>Tingkat perputaran pekerja/ Turnover rate</u>	
	15 – 29	6%	
	30 – 34	3%	
	35 – 39	1,8%	
	40 – 50	1,2%	
	51 – 52	0,6%	
	> 52	0,0%	
Metode Aktuarial	Projected-Unit-Credit		Actuarial Method
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years		Normal Retirement Age
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal	100%		Proportion of Normal Retirement Age

Sensitivitas juga dihitung dengan metode *Projected-Unit-Credit* sebagaimana diterapkan ketika menghitung nilai kini kewajiban imbalan pasti. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan satu asumsi dan menganggap semua asumsi lainnya konstan.

Sensitivities are also calculated with the Projected-Unit-Credit method as applied when calculating present value of defined benefit obligation. The sensitivity analyses are based on a change of one assumption while holding all other assumptions constant.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	140.267	128.693	Present Value Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
- 1,00%	149.375	137.050	- 1,00%
+ 1,00%	132.060	121.163	+ 1,00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
- 1,00%	131.787	120.913	- 1,00%
+ 1,00%	149.524	137.186	+ 1,00%

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

e. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan penghargaan kesetiaan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja 20, 25, 30, dan 35 tahun berupa piagam penghargaan dan emas masing-masing 5 gram.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai Kini Liabilitas -		
Awal Tahun	19.811	18.682
Biaya Bunga	1.262	1.233
Biaya Jasa Kini	921	1.011
Pembayaran Imbalan	(1.023)	(1.022)
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun (Ekspektasi)	20.971	19.904
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
- (Keuntungan) dari		
Perubahan Asumsi	274	(275)
- Penyesuaian atas Pengalaman	(746)	182
Nilai Kini Liabilitas - Akhir Tahun	20.499	19.811

Rincian beban yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya Jasa Kini	921	1.011
Bunga Neto atas Liabilitas	1.262	1.233
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
- (Keuntungan) dari		
Perubahan Asumsi	274	(275)
- Penyesuaian atas Pengalaman	(746)	182
Beban yang Diakui	1.711	2.151

Mutasi liabilitas yang diakui laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Liabilitas Neto - Awal Tahun	19.811	18.682
Beban Tahun Berjalan	1.711	2.151
Pembayaran Iuran Tahun Berjalan	(1.023)	(1.022)
Liabilitas Neto - Akhir Tahun	20.499	19.811

e. Other long-term employment benefits program

The Company rewards employees with working period of 20, 25, 30, and 35 years in the form of award and gold certificates of 5 grams each.

The reconciliation of the opening and ending balances of the present value of liabilities is as follows:

Present Value Liability -
Beginning of Year
Interest Cost
Current Service Cost
Benefits Payments
Present Value Liability - End of Year (Expectation)
Re-measurement of liability (asset) defined return (Gain) from Changes In - Assumptions
Adjustment of Experiences -
Present Value Liability - End of Year

The details of the expenses recognized in profit or loss are as follows:

Current Service Cost
Net Interest of Liability
Re-measurement of liability (asset) defined return (Gain) from Changes In - Assumptions
Adjustment of Experiences -
Recognized Expenses

Movements of liabilities recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

Net Liability - Beginning of Year
Recognized Expenses
Contribution of Employer for the Year
Net Liability - End of Year

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

e. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Tingkat Diskonto	6,75%	7,00%	Discount Rate
Estimasi Kenaikan Gaji Pegawai Aktif	6,50%	6,50%	Salary Increment
Tingkat Mortalitas	100% TMI4	100% TMI4	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5% dari TMI4	5% dari TMI4	Disability Rate
Tingkat Perputaran Pekerja			Turnover Rate
	<u>Usia/ Age</u>	<u>Tingkat perputaran pekerja/ Turnover rate</u>	
	15 – 29	6%	
	30 – 34	3%	
	35 – 39	1,8%	
	40 – 50	1,2%	
	51 – 52	0,6%	
	> 52	0,0%	
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years		Normal Retirement Age
Proporsi Pengambilan Usia Pensiun Normal	100%		Proportion of Normal Retirement Age

Sensitivitas juga dihitung dengan metode *Projected-Unit-Credit* sebagaimana diterapkan ketika menghitung nilai kini kewajiban imbalan pasti. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan satu asumsi dan menganggap semua asumsi lainnya konstan.

30. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

e. Other long-term employment benefits program (continued)

The actuarial assumptions used in determining the expenses and liabilities for post-employment benefits are as follows:

Sensitivities are also calculated with the *Projected-Unit-Credit* method as applied when calculating present value of defined benefit obligation. The sensitivity analyses are based on a change of one assumption while holding all other assumptions constant.

	2023	2022	
Analisis Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	20.499	19.811	Present Value Defined Benefit Obligations
Asumsi Tingkat Diskonto			Discount Rate Assumptions
- 1,00%	19.512	18.540	- 1,00%
+ 1,00%	21.718	20.630	+ 1,00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji			Salary Increment Assumptions
- 1,00%	21.805	20.714	- 1,00%
+ 1,00%	19.278	18.309	+ 1,00%

31. LIABILITAS DERIVATIF

31. DERIVATIVE LIABILITIES

2023				
Instrumen/ Instrument	Jumlah Nosional/ Notional amount	Aset Derivatif/ Derivative Assets	Liabilitas Derivatif/ Derivative Liabilities	Instrumen/ Instrument
Lindung Nilai Arus Kas Interest Rate Swap	2.532.881	23.142	67.171	Cash Flow Hedges Interest Rate Swap
		<u>23.142</u>	<u>67.171</u>	
2022				
Instrumen/ Instrument	Jumlah Nosional/ Notional amount	Aset Derivatif/ Derivative Assets	Liabilitas Derivatif/ Derivative Liabilities	Instrumen/ Instrument
Lindung Nilai Arus Kas Interest Rate Swap	2.532.881	-	90.748	Cash Flow Hedges Interest Rate Swap
		<u>-</u>	<u>90.748</u>	

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Transaksi pokok yang mendasari nilai arus kas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada anak perusahaan PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) No. 73 WCO. KP/479/KI/2021 dengan limit kredit setinggi-tingginya Rp2.630.000 dan suku bunga berlaku terdiri dari JIBOR 1M + margin 1,35% per tahun. Dengan menggunakan lindung nilai arus kas, suku bunga JGP menjadi datar sebesar 6,65%, dimulai dari tanggal 5 November 2021 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2024;
2. Fasilitas *treasury line* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada anak perusahaan PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) No. 04 WCO. KP/0006/TL/2022 dengan limit kredit setinggi-tingginya Rp1.989.404; dan
3. Fasilitas *Treasury Line-interest rate swap* (IRS) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada anak perusahaan PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) No. 42 WCO. KP/0007/TL/2022 dengan limit kredit setinggi-tingginya Rp2.935.061 dan suku bunga berlaku terdiri dari JIBOR 1M + margin per tahun. Dengan menggunakan lindung nilai arus kas, suku bunga JSB menjadi tetap sebesar 6,75%, dimulai dari tanggal 28 Desember 2021 dan berakhir tanggal 28 Desember 2024.

Perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas derivatif diakui dalam penghasilan/(beban) komprehensif lain.

31. DERIVATIVE LIABILITIES (continued)

The principal transaction underlying the cash flow value are as follows:

1. The investment credit facility of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to its subsidiary PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) No. 73 WCO. KP/479/KI/2021 with a maximum credit limit of Rp2,630,000 and the current interest rate consists of JIBOR 1M + margin of 1.35% per annum. By using cash flow hedging, the JGP interest rate will be flat at 6.65%, starting from November 5, 2021 and ending on October 28, 2024;
2. The treasury line facility of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to its subsidiaries PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) No. 04 WCO. KP/0006/TL/2022 with a maximum credit limit of Rp1,989,404; and
3. The treasury Line-interest rate swap (IRS) facility of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to a subsidiary of PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) No. 42 WCO. KP/0007/TL/2022 with a maximum credit limit of Rp2,935,061 and applicable interest rates consisting of JIBOR 1M + margin per year. Using cash flow hedging, JSB's interest rate will remain at 6.75%, starting from December 28, 2021 and ending December 28, 2024.

Changes in the fair value of derivative assets and liabilities are recognized in other comprehensive income/(expenses).

32. MODAL SAHAM

32. CAPITAL STOCK

Pemegang Saham	2023			Shareholders
	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Presentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Total (Rupiah Penuh)/ (Full Rupiah)	
Saham Seri A Dwiwarna				Series A Dwiwarna - Share
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00	500	The Government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B				Series B - Share
Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70,00	2.540.254.919.500	The Government of the Republic of Indonesia
Komisaris:				Commissioners:
Raja Erizman	139.400	0,00	69.700.000	Raja Erizman
M. Roskanedi	139.300	0,00	69.650.000	M. Roskanedi
Direksi:				Directors:
Subakti Syukur (Direktur Utama)	477.700	0,01	238.850.000	Subakti Syukur (President Director)
Fitri Wiyanti (Direktur Operasi)	316.600	0,00	158.300.000	Fitri Wiyanti (Operations Director)
Reza Febriano (Direktur Bisnis)	289.600	0,00	144.800.000	Reza Febriano (Business Director)
Bagus Cahya Arinta B (Direktur Human Capital dan Transformasi)	289.200	0,00	144.600.000	Bagus Cahya Arinta B (Human Capital and Transformation Director)
Mohammad Agus Setiawan (Direktur Pengembangan Usaha)	282.000	0,00	141.000.000	Mohammad Agus Setiawan (Business Development Director)
Pramitha Wulanjani (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)	50.000	0,00	25.000.000	Pramitha Wulanjani (Finance and Risk Management Director)
DJS Ketenagakerjaan - JHT	247.524.233	3,41	123.762.116.500	DJS Ketenagakerjaan - JHT
BNYM RE BNYMLB RE Employees ProvidentFD	175.445.592	2,42	87.722.796.000	BNYM RE BNYMLB RE Employees ProvidentFD
PT Taspen (Persero)	159.509.900	2,20	79.754.950.000	PT Taspen (Persero)
Masyarakat (Masing-masing dibawah 2%)	1.592.897.835	21,95	796.448.917.500	Public (each below 2%)
Total	7.257.871.200	100	3.628.935.600.000	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

32. CAPITAL STOCK (continued)

Pemegang Saham	2022			Shareholders
	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Presentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Total (Rupiah Penuh)/ (Full Rupiah)	
Saham Seri A Dwiwarna				Series A Dwiwarna - Share
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00	500	The Government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B				Series B - Share
Pemerintah Republik Indonesia	5.080.509.839	70,00	2.540.254.919.500	The Government of the Republic of Indonesia
Direksi:				Directors
Subakti Syukur (Direktur Utama)	154.000	0,00	77.000.000	Subakti Syukur (President Director)
Fitri Wiyanti (Direktur Operasi)	35.500	0,00	17.750.000	Fitri Wiyanti (Operations Director)
Bagus Cahya Arinta B (Direktur Human Capital dan Transformasi)	9.600	0,00	4.800.000	Bagus Cahya Arinta B (Human Capital and Transformation Director)
Reza Febriano (Direktur Bisnis)	5.400	0,00	2.700.000	Reza Febriano (Business Director)
DJS Ketenagakerjaan - JHT	247.524.233	3,41	123.762.116.500	DJS Ketenagakerjaan - JHT
BNYM RE BNYMLB RE Employees ProvidentFD	167.934.792	2,31	83.967.396.000	BNYM RE BNYMLB RE Employees ProvidentFD
PT Taspen (Persero)	159.509.900	2,20	79.754.950.000	PT Taspen (Persero)
Masyarakat (Masing-masing dibawah 2%)	1.602.187.935	21,88	801.093.967.500	Public (each below 2%)
Total	7.257.871.200	100	3.628.935.600.000	Total

Pemegang Saham Seri A mempunyai hak istimewa tertentu sebagai tambahan atas hak Pemegang Saham Seri B. Hak istimewa tersebut mencakup hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan komisaris dan untuk memberikan persetujuan atas: (a) peningkatan modal, (b) perubahan anggaran dasar, (c) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, (d) pembubaran dan likuidasi, dan (e) pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

The Shareholder of Series A shares has certain privileges in addition to any rights of Series B Shareholders. These privileges include the exclusive rights to nominate directors and commissioners and to give approval for: (a) an increase in capital, (b) changes in the article of association, (c) merger, consolidation and acquisition, (d) dissolution and liquidation, and (e) appointment and dismissal of directors and commissioners.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR-NETO

33. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL-NET

	2023	2022	
Tambahan Modal Disetor dari:			Additional Paid in Capital from:
Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2007	2.343.266	2.343.266	Initial Public Offering Year 2007
Pembelian Saham Kembali (Treasury Shares)	(7.741)	(7.741)	Repurchase of Treasury Shares
Hasil Neto Penjualan Treasury Shares	118.365	118.365	Net Proceeds from Sales of Treasury Shares
Hasil Neto Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	1.543.195	1.543.195	Net Proceeds from Right Issue
Total	3.997.085	3.997.085	Total

34. DIVIDEN DAN LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

34. DIVIDENDS AND APPROPRIATE OF RETAINED EARNINGS

Berdasarkan keputusan RUPS masing-masing pada tanggal 10 Mei 2023 dan 27 April 2022, pemegang saham memutuskan dana Cadangan Umum sebesar Rp2.197.507 dan Rp1.615.281. Pemegang saham juga menyetujui untuk melakukan pembagian dividen dari laba tahun 2022 dan tidak melakukan pembagian dividen dari laba tahun 2021 dengan penggunaan sebagai berikut:

Based on the resolutions of the General Meeting of Shareholders on May 10, 2023 and April 27, 2022 the shareholders decided on a General Reserve fund of Rp2,197,507 and Rp1,615,281, respectively. Shareholders also agreed to distribute dividends from 2022 earnings and not to distribute dividends from 2021 earnings using the following:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**34. DIVIDEN DAN LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

**34. DIVIDENDS AND APPROPRIATE OF RETAINED
EARNINGS (continued)**

	Laba tahun 2022/ Income for the year 2022	Laba tahun 2021/ Income for the year 2021	
Dividen	549.377	-	Dividend
Belum ditentukan penggunaannya	2.197.507	1.615.281	Unappropriated reserves
Total	2.746.884	1.615.281	Total

35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

35. NON-CONTROLLING INTERESTS

Akun ini merupakan hak pemegang saham non-pengendali atas aset bersih dan bagian rugi bersih entitas anak yang dikonsolidasikan.

This account represents non-controlling interests in net assets and portion of net loss of the consolidated subsidiaries.

- a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali adalah sebagai berikut:

- c. *Net equity attributable to non-controlling interests is shown below:*

	2023	2022	
PT Jasamarga Transjawa Tol	7.593.796	396.638	PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	647.383	830.628	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Kualanamu Tol	542.157	436.234	PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Marga Sarana Jabar	439.342	405.145	PT Marga Sarana Jabar
PT Cinere Serpong Jaya	408.490	422.590	PT Cinere Serpong Jaya
PT Jasamarga Manado Bitung	326.353	380.871	PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	300.750	281.741	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Marga Trans Nusantara	272.809	280.588	PT Marga Trans Nusantara
PT Jasamarga Japek Selatan	226.249	169.859	PT Jasamarga Japek Selatan
PT Jasamarga Jogja Bawen	106.912	55.865	PT Jasamarga Jogja Bawen
PT Jasamarga Bali Tol	75.248	101.344	PT Jasamarga Bali Tol
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	29.119	12.231	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
PT Jasamarga Akses Patimban	28.032	-	PT Jasamarga Akses Patimban
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	15.121	13.716	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Jasa Marga Related Business	7.205	7.627	PT Jasa Marga Related Business
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	709	599	PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator	94	110	PT Jasamarga Tollroad Operator
Total	11.019.769	3.795.786	Total

- b. Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali:

- b. *Comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests:*

	2023	2022	
PT Jasamarga Transjawa Tol	229.797	34.205	PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasamarga Kualanamu Tol	127.697	61.241	PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Marga Sarana Jabar	17.705	(7.596)	PT Marga Sarana Jabar
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	754	488	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Japek Selatan	487	680	PT Jasamarga Japek Selatan
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	146	(314)	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
PT Jasamarga Tollroad Operator	29	(1)	PT Jasa Marga Tollroad Operator
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	-	19.464	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Gempol Pasuruan	-	(87)	PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	-	(103.236)	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	(3)	(9)	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Jasa Marga Related Business	(1.013)	(1.191)	PT Jasa Marga Related Business
PT Jasamarga Jogja Bawen	(1.489)	(3.340)	PT Jasamarga Jogja Bawen
PT Jasamarga Akses Patimban	(3.202)	-	PT Jasamarga Akses Patimban
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	(9.232)	(10.076)	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Marga Trans Nusantara	(18.718)	(36.868)	PT Marga Trans Nusantara
PT Jasamarga Bali Tol	(26.243)	(36.710)	PT Jasamarga Bali Tol
PT Cinere Serpong Jaya	(66.994)	(57.921)	PT Cinere Serpong Jaya
PT Jasamarga Manado Bitung	(125.642)	(94.205)	PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	(157.323)	(186.230)	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
Total	(33.244)	(421.706)	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat Entitas Anak yang memiliki kepentingan non-pengendali yang material secara individu terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

35. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company's management believes that there are no Subsidiaries with non-controlling interests that are individually material to the Company's consolidated financial statements.

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA

Rincian pendapatan tol adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Perusahaan		
Cikampek - Padalarang	1.202.685	1.148.388
Jakarta - Bogor - Ciawi	1.142.588	1.029.529
JORR Seksi non S	1.139.550	1.062.439
Jakarta - Tangerang	997.036	955.984
Cawang - Tomang - Pluit	971.096	923.278
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	664.599	588.041
Padalarang - Cileunyi	463.176	430.584
Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	176.039	164.127
Belawan - Medan - Tanjung Morawa	172.532	165.827
Jakarta - Cikampek	-	674.179
Surabaya - Gempol	-	389.308
Palimanan - Kanci	-	136.421
Semarang Seksi A,B,C	-	110.944
Subtotal	<u>6.929.301</u>	<u>7.779.049</u>
Entitas Anak		
Jasamarga Transjawa Tol (JTT)		
Jakarta - Cikampek	1.360.970	685.158
Surabaya - Gempol	851.150	413.666
Palimanan - Kanci	268.879	128.893
Semarang Seksi A,B,C	234.557	114.276
Surabaya - Mojokerto (JSM)	579.874	549.029
Medan - Kualanamu (JMKT)	523.283	497.802
Semarang - Batang (JSB)	485.914	-
Kunciran - Cengkareng (JKC)	435.302	354.423
Ngawi - Kertosono (JNK)	419.483	-
Balikpapan - Samarinda (JBS)	363.817	264.314
Gempol - Pasuruan (JGP)	357.872	314.485
Bogor Outer Ring Road (MSJ)	287.774	251.278
Kunciran - Serpong (MTN)	287.206	215.682
Solo - Ngawi (JSN)	286.048	-
Nusa Dua - Bena (JBT)	145.784	91.329
Cinere - Serpong (CSJ)	76.776	61.384
Manado - Bitung (JMB)	54.038	51.226
Jalanlayang Cikampek (JJC)	-	671.956
Subtotal	<u>7.018.728</u>	<u>4.664.901</u>
Total	<u>13.948.029</u>	<u>12.443.950</u>

Kontribusi pendapatan tol Entitas Anak terhadap total Pendapatan Tol Kelompok Usaha untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing 50,32% dan 37,49%.

36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES

The details of toll revenues are as follows:

	The Company	Subsidiaries
	Cikampek - Padalarang	Jasamarga Transjawa Tol (JTT)
	Jakarta - Bogor - Ciawi	Jakarta - Cikampek
	JORR Seksi non S	Surabaya - Gempol
	Jakarta - Tangerang	Palimanan - Kanci
	Cawang - Tomang - Pluit	Semarang Seksi A,B,C
	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Surabaya - Mojokerto (JSM)
	Padalarang - Cileunyi	Medan - Kualanamu (JMKT)
	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	Semarang - Batang (JSB)
	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	Kunciran - Cengkareng (JKC)
	Jakarta - Cikampek	Ngawi - Kertosono (JNK)
	Surabaya - Gempol	Balikpapan - Samarinda (JBS)
	Palimanan - Kanci	Gempol - Pasuruan (JGP)
	Semarang Seksi A,B,C	Bogor Outer Ring Road (MSJ)
	Subtotal	Kunciran - Serpong (MTN)
		Solo - Ngawi (JSN)
		Nusa Dua - Bena (JBT)
		Cinere - Serpong (CSJ)
		Manado - Bitung (JMB)
		Jalanlayang Cikampek (JJC)
		Subtotal
		Total

The contribution of the Subsidiary's toll revenue to total Toll Revenue of the Group for 2023 and 2022 is 50.32% and 37.49%, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 1 Juli 2022 Perusahaan melakukan pemisahan (*spin off*) Regional Transjawa Tollroad, kepada Entitas Anak, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) dengan mengalihkan empat segmen ruas hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) yang meliputi ruas Jakarta – Cikampek, Palimanan - Kanci, Semarang Seksi A, B, C dan Surabaya - Gempol. Sehubungan dengan transaksi tersebut, maka pencatatan pendapatan tol pada empat ruas hak pengusahaan jalan tol (Jakarta - Cikampek, Surabaya - Gempol, Palimanan - Kanci, dan Semarang Seksi A, B, C) dialihkan ke JTT.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan telah mengalihkan saham di PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) sebesar 40% kepada JTT dan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Oktober 2022 No. 01 oleh Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Perusahaan telah mengalihkan keseluruhan kepemilikan saham di JJC sebesar 40% kepada PT Margautama Nusantara, sehingga Perusahaan hanya memiliki kepemilikan tidak langsung melalui JTT sebesar 40% dan tidak lagi mengkonsolidasikan pendapatan tol JJC ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

Beberapa entitas anak menjaminkan pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya sepanjang konsesi untuk kredit (Catatan 23).

Rincian pendapatan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Jasa Pengoperasian Jalan Tol	533.225	458.790	Toll Road Operating Services
Pendapatan Pemeliharaan Jalan Tol	497.386	395.073	Toll Road Maintenance
Pendapatan BBM SPBU	302.067	181.420	Petroleum Sales
Sewa Lahan	180.723	173.038	Land Rent
Sewa Properti	52.848	52.425	Property Rent
Penjualan Properti	8.584	62.219	Property Sales
Lainnya (Di bawah 2.000)	43.120	15.643	Others (Below Rp2,000)
Total	1.617.953	1.338.608	Total

Peningkatan saldo signifikan lainnya terdapat pada PT Jasamarga Related Business terkait KSO JMRB - ISS (bergerak pada bidang penyedia cleaning service rest area dan representative office)

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

On July 1, 2022 the Company spin off the Regional Transjawa Tollroad, to its Subsidiary, PT Jasamarga Transjawa Tollroad (JTT) by transferring four segments of toll road concession rights (Concession Rights) covering the Jakarta - Cikampek section, Palimanan - Kanci sections, Semarang Sections A, B, C and Surabaya - Gempol. In connection with this transaction, the recording of toll revenues on the four toll road concession rights sections (Jakarta - Cikampek, Surabaya - Gempol, Palimanan - Kanci, and Semarang Sections A, B, C) was transferred to JTT.

On July 1, 2022, the Company has transferred 40% of its shares in PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) to JTT and based on the Deed of Sale and Purchase dated October 10, 2022 No. 01 by Notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., the Company has transferred its entire 40% share ownership in JJC to PT Margautama Nusantara, so that the Company only has indirect ownership through JTT of 40% and no longer consolidates toll revenues JJC into the Company's consolidated financial statements.

Several subsidiaries pledge toll revenues and other operating income within the concession period for credit (Note 23).

The details of other operating revenues are as follows:

Significant increase in Other balance was at PT Jasamarga Related Business related to KSO JMRB - ISS (engaged in the field of providing cleaning service, rest area and representative office)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1524/KPTS/M/2020 tanggal 22 Oktober 2020, tentang penyesuaian tarif tol ruas Jakarta - Cikampek. Tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1524/KPTS/M/2020 dated October 22, 2020, concerning toll tariff adjustment of Jakarta - Cikampek. The farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jakarta - Cikampek Segmen I (Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur)	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000
2	Jakarta - Cikampek Segmen II (Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat)	7.000	10.500	10.500	14.000	14.000
3	Jakarta - Cikampek Segmen III (Cibatu, Cikarang Timur, Karawang barat)	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
4	Jakarta - Cikampek Segmen IV (Karawang Timur, Dawuan, Kalihurip, Cikampek)	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 855/KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023, tarif tol terjauh ruas jalan tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 855/KPTS/M/2023, dated July 31, 2023, the farthest toll tariffs of Prof. Dr. Ir. Sedyatmo toll road segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Prof DR IR Sedyatmo	8.500	11.000	11.000	12.000	12.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 74/KPTS/M/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan tarif dan sistem pengumpulan tol secara integrasi pada jalan tol Cawang – Tomang - Pluit (Lingkar Dalam Kota Jakarta). Berikut tarif tol terjauh:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 74/KPTS/M/2022 dated January 31, 2022 concerning the establishment of tariffs and integrated toll collection systems on Cawang – Tomang - Pluit (The Inner-City Ring Jakarta) toll road. Following the farthest toll rates:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Cawang - Tomang - Pluit	10.500	15.500	15.500	17.500	17.500

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1137/KPTS/M/2023 tanggal 5 September 2023 tentang penyesuaian tarif tol ruas Surabaya - Gempol dan Kejapanan - Gempol, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1137/KPTS/M/2023 dated September 5, 2023, concerning toll tariff adjustment of Surabaya - Gempol and Kejapanan - Gempol segment, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Porong - Kejapanan	6.000	9.000	9.000	12.000	12.000
2	Kejapanan - Gempol	3.500	5.000	5.000	7.000	7.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1087/KPTS/M/2023 tanggal 28 Agustus 2023, tentang penyesuaian tarif tol ruas Belawan – Medan - Tanjung Morawa, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1087/KPTS/M/2023 dated August 28, 2023, concerning toll tariff adjustment of Belawan – Medan - Tanjung Morawa segment, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Belmera	9.000	16.000	16.000	23.000	23.000

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 755/KPTS/M/2023 tanggal 12 Juli 2023, penyesuaian tarif tol ruas Palikanci adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 755/KPTS/M/2023 dated July 12, 2023, toll tariffs adjustment of Palikanci segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Palikanci	13.500	19.500	19.500	32.000	32.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 33/KPTS/M/2023 tanggal 16 Januari 2023, tentang penyesuaian tarif tol ruas Semarang seksi A, B, C, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 33/KPTS/M/2023 dated January 16, 2023, concerning toll tariff adjustment of Semarang A,B,C segment section, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Semarang Seksi A, B, C	5.500	8.500	8.500	11.000	11.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 533/KPTS/M/2023 tanggal 17 Mei 2023, tentang penyesuaian tarif tol ruas Padalarang – Cileunyi, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 533/KPTS/M/2023 dated May 17, 2023, concerning toll tariff adjustment of Padalarang - Cileunyi segment, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Padaleunyi	10.500	18.500	18.500	25.000	25.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 496/KPTS/M/2023 tanggal 2 Mei 2023, tentang penyesuaian tarif tol ruas Cikampek – Purwakarta - Padalarang, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 496/KPTS/M/2023 dated May 2, 2023 concerning toll tariff adjustment of Cikampek - Purwakarta - Padalarang segment, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Cipularang	45.000	76.000	76.000	110.000	110.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1604/KPTS/M/2023 tanggal 16 November 2023 tentang kenaikan tarif dan sistem pengumpulan tol secara Integrasi pada jalan tol lingkaran luar Jakarta seksi W1-W2 utara-W2 selatan-S-E1-E2-E3-jalan akses Tanjung Priok seksi E-1, E-2, E-2A, NS dan jalan tol Pondok Aren-Ulujami.

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1604/KPTS/M/2023 dated November 16, 2023 regarding tariff increases and the system is called in an integrated manner on the Jakarta outer ring toll road section W1-W2 utara-W2 selatan-S-E1-E2-E3-Tanjung Priok access road section E-1, E-2, E-2A, NS and the Pondok Aren - Ulujami toll road.

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	JORR E1, E2, E3 dan W2S	17.000	25.000	25.000	33.500	33.500
2	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	3.500	5.000	5.000	6.500	6.500

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1527/KPTS/M/2021 tanggal 10 Desember 2021, tentang penyesuaian tarif tol ruas Jakarta - Tangerang, tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1527/KPTS/M/2021 dated December 10, 2021, concerning toll tariff adjustment of Jakarta - Tangerang segment, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jakarta - Tangerang	8.000	12.000	12.000	15.500	15.500

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 854/KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023, tentang penyesuaian tarif tol ruas Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi), tarif tol terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 854/KPTS/M/2023 dated July 31, 2023, concerning toll tariff adjustment of Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) segment, the farthest toll tariffs for that segment are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	7.500	12.000	12.000	17.000	17.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 310/KPTS/M/2023 tanggal 24 Februari 2023, tarif tol terjauh ruas Sentul Selatan - Simpang Semplak, yang dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 310/KPTS/M/2023 dated February 24, 2023, the farthest toll tariffs of Sentul Selatan - Simpang Semplak segment, which operated by PT Marga Sarana Jabar are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Sentul Selatan - Simpang Semplak	15.000	22.500	22.500	30.000	30.000
2	Cibadak - Kayumanis	5.500	8.000	8.000	11.000	11.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 236/KPTS/M/2022 tanggal 4 Maret 2022 untuk ruas Surabaya - Mojokerto yang dikelola PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 236/KPTS/M/2022 dated March 4, 2022 for the Surabaya - Mojokerto section managed by PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, the farthest rates for these sections are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	SS Waru Sepanjang (terbuka)	2.500	4.500	4.500	6.500	6.500
2	SS Waru - WRR Warugunung (Terbuka)	7.500	12.500	12.500	19.000	19.000
3	PWRR - Mojokerto (Tertutup)	31.500	52.000	52.000	78.500	78.500

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/2022 tanggal 31 Januari 2022 untuk ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang dikelola PT Jasamarga Bali Tol, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 75/KPTS/M/2022 dated January 31, 2022 for the Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa section managed by PT Jasamarga Bali Tol, the farthest rates for these sections are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Bali Mandara (Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa)	13.000	19.500	19.500	25.500	25.500	5.000

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1519/KPTS/M/2023 tanggal 25 Oktober 2023, tarif tol terjauh ruas Tanjung Morawa - Tebing Tinggi, yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of Minister of PUPR No. 1519/KPTS/M/2021 dated October 25, 2023, the farthest toll tariffs of Tanjung Morawa - Tebing Tinggi segment, which operated by PT Jasamarga Kualanamu Tol are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Tanjung Morawa - Tebing Tinggi	60.000	89.500	89.500	119.500	119.500

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 967/KPTS/M/2023 tanggal 15 Agustus 2023, tarif tol terjauh ruas Gempol - Pasuruan, yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Gempol Pasuruan adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 967/KPTS/M/2023 dated August 15, 2023, the farthest toll tariffs of Gempol - Pasuruan segment, which operated by PT Jasamarga Gempol Pasuruan are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Gempol - Pasuruan	46.500	70.000	70.000	93.000	93.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 325/KPTS/M/2023 tanggal 3 Maret 2023, tarif tol terjauh ruas Kunciran - Serpong yang dioperasikan oleh PT Marga Trans Nusantara adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 325/KPTS/M/2023 dated March 3, 2023, the farthest toll tariffs of Kunciran - Serpong segment, which operated by PT Marga Trans Nusantara are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Kunciran - Serpong	21.000	31.500	31.500	41.500	41.500

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 398/KPTS/M/2023 tanggal 27 Maret 2023, tarif tol terjauh ruas Balikpapan - Samarinda yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Balikpapan Samarinda adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 398/KPTS/M/2023 dated March 27, 2023, the farthest toll tariffs of Balikpapan - Samarinda segment, which operated by PT Jasamarga Balikpapan Samarinda are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Balikpapan - Samarinda	146.500	219.500	219.500	293.000	293.000

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 168/KPTS/M/2022 tanggal 25 Februari 2022, tarif tol terjauh ruas Manado - Bitung yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Manado Bitung adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 168/KPTS/M/2022 dated February 25, 2022, the farthest toll tariffs of Manado - Bitung segment, which operated by PT Jasamarga Manado Bitung are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Manado - Bitung	44.000	66.000	66.000	88.000	88.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 592/KPTS/M/2021 tanggal 18 Mei 2021, tarif tol terjauh ruas Junction Serpong - Pamulang yang dioperasikan oleh PT Cinere Serpong Jaya adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 592/KPTS/M/2021 dated May 18, 2021, the farthest toll tariffs of Junction Serpong - Pamulang segment, which operated by PT Cinere Serpong Jaya are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Junction Serpong - Pamulang	11.000	16.500	16.500	22.000	22.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1982/KPTS/M/2023 tanggal 29 Desember 2023, tarif tol terjauh ruas Jc. Benda – Jc. Kunciran yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1982/KPTS/M/2023 dated December 29, 2023, the farthest toll tariffs of Jc. Benda – Jc. Kunciran operated by PT Jasamarga Kunciran Cengkareng are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	JB Benda - JC Kunciran	27.000	41.000	41.000	54.500	54.500

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 873/KPTS/M/2023 tanggal 31 Juli 2023, tarif tol terjauh ruas Ngawi - Kertosono yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 873/KPTS/M/2023 dated July 31, 2023, the farthest toll tariffs of Ngawi – Kertosono operated by PT Jasamarga Ngawi Kertosono are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Ngawi - Kertosono	98.000	147.000	147.000	196.000	196.000

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR No. 1155/KPTS/M/2023 tanggal 15 September 2023, tarif tol terjauh ruas Batang-Semarang yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Semarang - Batang adalah sebagai berikut:

Based on the decree of Minister of PUPR No. 1155/KPTS/M/2023 dated September 15, 2023, the farthest toll tariffs of Batang – Semarang operated by PT Jasamarga Semarang Batang are as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	Batang - Semarang	111.500	167.500	167.500	223.000	223.000

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. PENDAPATAN TOL DAN LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Operasional Jasa Pengelolaan Fasilitas Antara PT Jasa Marga Related Business (JMRB) dan PT ISS Indonesia tanggal 16 Agustus 2022, para pihak sepakat membentuk KSO JMRB-ISS dalam rangka pengelolaan fasilitas di tempat peristirahatan dan fasilitas yang dikelola JMRB dengan jangka waktu 5 (Lima) tahun, dimana para pihak sepakat untuk pembagian atas pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan keuntungan dengan porsi 65% (ISS) dan 35% (JMRB) dan akan berubah menjadi 60% (ISS) dan 40% (JMRB), apabila *scope market* didalam KSO diperoleh diluar dari tempat peristirahatan dan fasilitas sebagaimana yang dicantumkan dalam kesepakatan.

**37. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI
PENYELENGGARA TOL**

Pendapatan konstruksi penyelenggara tol adalah kompensasi untuk jasa yang dilakukan Kelompok Usaha dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol. Pendapatan konstruksi penyelenggara tol dinilai dengan menggunakan metode *cost-plus*, dimana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan dengan margin tertentu.

	2023	2022
Pendapatan Konstruksi Penyelenggara Tol		
PT Jasamarga Jogja Bawen	2.050.710	890.265
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	2.032.970	-
PT Jasamarga Japek Selatan	1.456.484	1.686.469
PT Cinere Serpong Jaya	132.904	35.278
PT Jasamarga Transjawa Tollroad	68.964	-
PT Marga Sarana Jabar	10.591	9.598
PT Jasamarga Manado Bitung	-	178.681
Subtotal	<u>5.752.623</u>	<u>2.800.291</u>
Beban Konstruksi Penyelenggara Tol		
PT Jasamarga Jogja Bawen	(2.042.539)	(886.717)
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	(2.024.869)	-
PT Jasamarga Japek Selatan	(1.437.793)	(1.664.827)
PT Cinere Serpong Jaya	(132.243)	(35.103)
PT Jasamarga Transjawa Tollroad	(68.964)	-
PT Marga Sarana Jabar	(10.415)	(9.437)
PT Jasamarga Manado Bitung	-	(177.052)
Subtotal	<u>(5.716.823)</u>	<u>(2.773.136)</u>
Margin Konstruksi Penyelenggara Tol	<u>35.800</u>	<u>27.155</u>

**36. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

Based on Minutes of Operational Joint Agreement on Facilities Management Services Between PT Jasa Marga Related Business (JMRB) and PT ISS Indonesia dated August 16, 2022, the parties are agree to establish KSO JMRB-ISS in order to facilities management on rest area and facilities which manage by JMRB with term periode for 5 (Five) years, where are the parties agree to distribute proportionally on revenue, cost, assets, liabilities and gain with portion 65% (ISS) and 35% (JMRB), and will change to 60% (ISS) and 40% (JMRB), if marker scope in KSO obtained outside from rest area and facilities which stated in agreement.

**37. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSE
TOLL ROAD OPERATOR**

Construction revenue toll road operator is the compensation for the service performed by the Group for building new toll roads and upgrading toll roads capacity. Construction revenue toll road operator is measured using cost-plus method, which specifies the margin and added up to all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

Construction Revenues Toll Road Operator
PT Jasamarga Jogja Bawen
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
PT Jasamarga Japek Selatan
PT Cinere Serpong Jaya
PT Jasamarga Transjawa Tollroad
PT Marga Sarana Jabar
PT Jasamarga Manado Bitung
Subtotal
Construction Expense Toll Road Operator
PT Jasamarga Jogja Bawen
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
PT Jasamarga Japek Selatan
PT Cinere Serpong Jaya
PT Jasamarga Transjawa Tollroad
PT Marga Sarana Jabar
PT Jasamarga Manado Bitung
Subtotal
Construction Margin Toll Road Operator

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. BEBAN TOL DAN USAHA LAINNYA

38. TOLL AND OTHER OPERATING EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	2023	2022	
Amortisasi (Catatan 13)	2.035.946	2.248.623	<i>Amortization (Notes 13)</i>
Gaji dan Tunjangan	902.894	719.503	<i>Salaries and Allowance</i>
Harga Pokok Penjualan	886.980	705.816	<i>Cost of Goods Sold</i>
Provisi Pelapisan Ulang Jalan Tol (Catatan 28)	756.824	733.600	<i>Provision for Toll Road Overlay (Notes 28)</i>
Pemeliharaan Jalan dan Sarana Pelengkap Jalan Tol	635.729	547.247	<i>Maintenance of Roads and Toll Road Complementary Facilities</i>
Pajak Bumi dan Bangunan	617.245	649.370	<i>Land and Building Tax</i>
Pelayanan Jalan Tol	314.176	265.128	<i>Toll Road Services</i>
Bahan Bakar, Listrik, dan Air	151.216	123.521	<i>Fuel, Electricity, and Water</i>
Pengumpulan Tol	109.261	139.049	<i>Toll Collection</i>
Penyusutan (Catatan 11 dan 12)	86.902	122.658	<i>Depreciation (Notes 11 and 12)</i>
Sewa (Catatan 27)	73.863	72.440	<i>Rent (Note 27)</i>
Lainnya (Di bawah Rp2.000)	72.220	64.661	<i>Others (Below Rp2,000)</i>
Total	6.643.256	6.391.616	Total

Harga Pokok Penjualan merupakan beban langsung yang dimiliki oleh JMRB dan JMTM, Entitas Anak, meliputi kontrak manajemen, BBM, pemeliharaan jalan tol, dan lainnya. Beban sewa lahan dan properti yang diungkapkan (catatan 11) merupakan bagian dari Harga Pokok Penjualan.

Cost of Goods Sold are direct expenses owned by JMRB and JMTM, Subsidiaries, which consist of management fee, fuel, toll road maintenance, and others. Cost from properties and land rental disclosed in (note 11) are part of Cost of Goods Sold.

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	2023	2022	
Gaji dan Tunjangan	1.378.044	1.385.337	<i>Salaries and Allowance</i>
Pajak luran dan Retribusi	97.146	84.492	<i>Taxes, Contribution and Retribution</i>
Jasa Profesional	95.104	75.010	<i>Professional Fees</i>
Administrasi Kantor dan Sumbangan	81.533	64.156	<i>Office Administration and Donation</i>
Penyusutan (Catatan 11)	68.224	77.257	<i>Depreciation (Note 11)</i>
Perbaikan dan Pemeliharaan Aset Tetap	57.574	42.822	<i>Repair and Maintenance Fixed Asset</i>
Amortisasi (Catatan 14)	48.931	41.660	<i>Amortization (Note 14)</i>
Transportasi dan Perjalanan Dinas	42.867	36.413	<i>Transportation and Business Travel</i>
Publikasi	29.168	8.664	<i>Publications</i>
Bahan Bakar, Listrik, dan Air	26.167	20.952	<i>Fuel, Electricity, and Water</i>
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	24.344	11.406	<i>Social and Environmental Responsibility Program</i>
Sewa (Catatan 27)	17.381	25.011	<i>Rent (Note 27)</i>
Lainnya (Di bawah Rp3.000)	41.451	61.603	<i>Others (Below Rp3,000)</i>
Total	2.007.934	1.934.783	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**40. PENGHASILAN KEUANGAN DAN PENGHASILAN
LAIN-LAIN**

	2023	2022
Penghasilan Keuangan		
Penghasilan bunga deposito	120.355	78.913
Penghasilan jasa giro	42.095	57.908
Penghasilan bunga pinjaman entitas asosiasi, ventura bersama, dan lainnya	93.516	15.600
Subtotal	255.966	152.421
Beban Pajak Penghasilan Keuangan		
Beban pajak giro	(8.258)	(11.648)
Beban pajak deposito	(22.417)	(15.809)
Subtotal	(30.675)	(27.457)
Keuntungan Pelepasan Investasi		
Pelepasan investasi PT Ismawa Trimitra	-	58.367
Pelepasan investasi PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	-	2.186.678
Subtotal	-	2.245.045
Penghasilan Lain-Lain		
Penghasilan atas ganti rugi kerusakan aset	26.757	2.003
Pemulihan Penyisihan Piutang Lain-Lain (Catatan 6)	25.919	2.543
Penyesuaian pencadangan MLFF	14.768	-
Pendapatan Dividen PT Marga Mandala Sakti	13.118	10.866
Pendapatan Dividen PT Jakarta Lingkar Baratsatu	4.655	-
Keuntungan penjualan aset tetap	2.587	8.621
Penyesuaian Atribusi Imbalan Kerja atas Program Pensiun	-	7.375
Keuntungan Investasi KIK EBA	-	58.913
Pemulihan Nilai Piutang PSBI	-	93.763
Lainnya (Di bawah Rp2.000)	62.303	53.920
Subtotal	150.107	238.004
Total	375.398	362.968

Finance Income
Deposits interest income
Current accounts income
Income interest on in associates, joint ventures, and others
Subtotal
Tax Expense of Finance Income
Current accounts expense
Deposits interest expense
Subtotal
Gain on Divestment
Divestment of PT Ismawa Trimitra
Divestment of PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
Subtotal
Other Income
Income on asset damage compensation
Recovery of Other Receivables Allowance (Note 6)
Adjustment on provisions for MLFF
Dividend Income from PT Marga Mandala Sakti
Dividend Income from PT Jakarta Lingkar Baratsatu
Gains on disposal of fixed assets
Adjustments to Attribution of Employee Benefits for Pension Plan
Gain on Investment KIK EBA
Recovery of Impairment Receivable PSBI
Others (Below Rp2,000)
Subtotal
Total

41. BEBAN LAIN-LAIN

Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Dampak Penurunan Nilai Biaya Prakarsa	25.726	13.500
Penyisihan Piutang Lain-Lain (Catatan 6)	10.606	39.001
Pencadangan Implementasi MLFF	8.961	189.271
Biaya Keagenan	7.272	1.499
Administrasi Bank	3.608	5.371
Beban Provisi Pinjaman	3.577	23.329
Pencadangan atas ISAK 34	780	211.681
luran Tambahan Defisit Selain Kekurangan Solvabilitas	-	103.421
Dampak Penurunan Nilai Atas Investasi Jasamarga Gedebage Cilacap	-	52.975
Biaya Kelebihan Pembayaran Manfaat Multi Lane Free Flow	-	14.912
Penghapusan Aset Properti Investasi Tempat Istirahat 389 B	-	6.438
Lainnya (Di bawah Rp2.000)	59.567	46.922
Total	120.097	708.320

The details of other expenses are as follows:

Impairment of Initiative Cost
Other Receivables Allowance (Note 6)
Provision for implementation of MLFF
Agency Fee
Bank Administration
Loan Provision Expense
Provision of ISAK 34
Additional Deficit Dues Other Than Solvency Deficiencies
Impairment of Investment Jasamarga Gedebage Cilacap
Cost of Overpayment of Benefits of Multi Lane Free Flow
Write-off of Rest Area Investment Property Assets 389 B
Others (Below Rp2,000)
Total

42. BIAYA KEUANGAN

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Utang bunga bank	2.844.956	2.988.452
Beban bagi hasil syariah	444.358	551.077
Utang bunga obligasi	154.821	162.558
Utang bunga BLU	96.808	84.226
Beban bunga liabilitas sewa	12.224	6.867
Utang lembaga keuangan bukan bank	12.196	31.535
Lainnya	26.989	60.627
Total	3.592.352	3.885.342

The details of finance costs are as follows:

Bank interest loans
Profit sharing syariah
Bonds Interest
BLU interest expense
Lease interest expense
Non-bank financial institutions
Others
Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. LABA PER SAHAM

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali saham maupun menerbitkan saham baru, sehingga jumlah saham pada 31 Desember 2023 adalah 7.257.871.200 lembar.

Laba per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham pada tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba tahun berjalan (Rupiah penuh)	6.793.551.210.505	2.746.884.072.330	<i>Profit for the year (full Rupiah)</i>
Rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	<u>7.257.871.200</u>	<u>7.257.871.200</u>	<i>Weighted average of outstanding shares</i>
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	<u>936,03</u>	<u>378,47</u>	<i>Earnings per Share (full Rupiah)</i>

43. EARNINGS PER SHARE

Until the date of December 31, 2023, the Company did not repurchase its shares or issued new shares, so the number of shares as of December 31, 2023 is 7,257,871,200 shares.

Earnings per share is calculated from profit of the current year attributable to owners of the parent divided by the weighted average of outstanding shares during the year, with details as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI**

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS**

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berikut adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang material:

The Group normally enters into transactions with related parties. Below are the material transactions with related parties:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transactions
Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Hak Konsesi atas Ruang Tol, Utang Bantuan Pemerintah, Dana Talangan Pembebasan Tanah dan Perpajakan/ <i>Concession Rights on Toll Roads, Government Assistance Debt, Land Acquisition Bailouts and Taxation</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ <i>Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban Asuransi Jiwa Pensiunan Karyawan/ <i>Life Insurance Expenses for Pension Employees</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Investasi Jangka Pendek, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan, Piutang Lain-lain dan Pendapatan Bunga/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Short Term Investments, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges, Other Receivables and Interest Income</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Bank untuk Pengumpulan Tol, Biaya Keuangan Pendapatan Bunga dan Dana Dibatasi Penggunaannya/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Bank for Toll Collection, Finance Charges, Interest Income and Restricted Funds</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Bank untuk Pengumpulan Tol, Biaya Keuangan, Piutang Lain-lain dan Pendapatan Bunga/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Bank for Toll Collection, Finance Charges, Other Receivables and Interest Income</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges and Interest Income</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank/ <i>Loans to Non-Bank Financial Institutions</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank/ <i>Loans to Non-Bank Financial Institutions</i>
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol dan Piutang Lain-lain/ <i>Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads and Other Receivables</i>
BPJS Ketenagakerjaan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban Asuransi Kecelakaan Kerja Karyawan, Pemegang Saham Non-Pengendali/ <i>Insurance Expenses for Employees and Non Controlling Shareholder</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan, Dana Talangan Tanah/ <i>Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads, Land Bridging Fund</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban Listrik Peralatan Tol dan Gedung/ <i>Electricity for Toll Equipment and Buildings</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan, Dana Talangan Tanah/ <i>Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads, Land Bridging Fund</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan, Dana Talangan Tanah dan Piutang Lain-lain/ <i>Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads, Land Bridging Fund and Other Receivables</i>
Koperasi Jasa Marga Bhakti	Pengendalian Manajemen Kunci/ <i>Key Management Control</i>	Pembelian Aset dan Perlengkapan, Beban Outsourcing Pegawai, Sewa Kendaraan dan Peralatan Tol/ <i>Purchase of Property and Equipment, Outsourcing Expenses, Vehicles and Toll Equipment Lease</i>

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berikut adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang material: (lanjutan)

The Group normally enters into transactions with related parties. Below are the material transactions with related parties: (continued)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transactions
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Entitas Asosiasi/ Associate	Investasi pada Perusahaan Asosiasi/ Investments in Associated Company
PT Virama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Konsultan dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Consultant for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Investasi Jangka Pendek, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ Placement of Current Accounts, Time Deposits, Short Term Investments, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges and Interest Income
PT Yodya Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Beban Akrual/ Accrued Expense
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Penempatan Giro/ Placement of Current Accounts
PT Utama Marga Waskita (HAMAWAS)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Aset Keuangan Lainnya/ Other Financial Assets
PT Pertamina Retail	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Waskita Bumi Wira	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Waskita Sriwijaya Tol	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Wijaya Karya Realty Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT PP Semarang Demak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Trans Jabar Tol	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Jasamarga Pandaan Tol	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Marga Lingkar Jakarta	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Trans Marga Jateng	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berikut adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang material: (lanjutan)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transactions
PT Jasamarga Pandaan Malang	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Jasamarga Semarang Batang	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Jasamarga Solo Ngawi	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Entitas Asosiasi/ Associate	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga	Pengendalian Manajemen Kunci/ Key Management Control	Piutang Lain-lain/ Other Receivables

Dalam kegiatan usahanya, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Kelompok Usaha atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

The Group normally enters into transactions with related parties. Below are the material transactions with related parties: (continued)

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

a. Pemerintah

a. Government

	2023	2022	Persentase dari Total Aset/ Percentage from Total Asset	
			2023	2022
Aset/ Assets				
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents				
Bank/ Cash in Banks				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	690.954	3.615.494	0,53%	3,97%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	101.095	139.470	0,08%	0,15%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	94.034	54.096	0,07%	0,50%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.396	1.531	0,00%	0,00%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.321	17.749	0,00%	0,02%
PT Bank Mandiri Taspen	71	64	0,00%	0,00%
Sub Total	896.871	3.828.404	0,68%	4,20%
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	384	85	0,00%	0,00%
Sub Total	384	85	0,00%	0,00%
Deposito Berjangka/ Time Deposits				
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.632.600	2.076.562	1,26%	0,43%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	724.690	330.000	0,56%	0,36%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	269.505	242.896	0,21%	0,27%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	89.000	367.500	0,07%	0,40%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	77.000	201.606	0,06%	0,22%
PT Bank Mandiri Taspen	32.000	-	0,02%	0,00%
Sub Total	2.824.795	3.218.564	2,18%	3,53%
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.958	17.304	0,01%	0,02%
Sub Total Deposito Berjangka/ Time Deposits	16.958	17.304	0,01%	0,02%
Total Kas dan Setara Kas/ Total Cash and Cash Equivalents	3.739.008	7.064.357	2,89%	7,75%
Piutang Lain-lain/ Other Receivables				
Lancar/ Current				
Pendapatan Tol / Toll Income				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.198	12.580	0,02%	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.334	13.853	0,00%	0,02%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.134	2.642	0,00%	0,00%
Pinjaman Pemegang Saham/ Shareholder Loans				
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek *)	140.989	130.264	0,11%	0,14%
Pendapatan Lain / Other Income				
PT Utama Karya (Persero)	28.247	28.309	0,02%	0,03%
PT Waskita Sriwijaya Tol	24.254	7.413	0,02%	0,01%
PT Trans Jabar Tol	20.397	16.548	0,02%	0,02%
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	14.186	48.180	0,01%	0,05%
PT Jasamarga Pandaan Tol	13.308	11.043	0,01%	0,01%
PT Cimanggis Cibitung Tollways	11.068	7.715	0,01%	0,01%
PT Waskita Bumi Wira	10.239	10.369	0,01%	0,01%
PT PP Semarang Demak	9.503	-	0,01%	-
PT Marga Lingkar Jakarta	7.831	17.935	0,01%	0,02%
PT Pertamina Retail	7.101	25.269	0,01%	0,03%
PT Trans Marga Jateng	5.651	5.862	0,00%	0,01%
PT Jasamarga Pandaan Malang	3.934	13.436	0,00%	0,01%
PT Waskita Beton Precast Tbk	2.567	3.198	0,00%	0,00%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.486	2.525	0,00%	0,00%
PT Jasamarga Semarang Batang	-	54.044	-	0,06%
PT Jasamarga Solo Ngawi	-	54.036	-	0,06%
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	-	39.002	-	0,04%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	12.117	-	0,01%
Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga	-	4.160	-	0,00%
Lainnya Berelasi (Di bawah Rp2.000)/ Others (Below Rp2,000)	2.799	7.078	0,00%	0,01%
Total Piutang Lain-lain/ Other Receivables	344.226	527.578	0,27%	0,58%
Piutang Lain-lain/ Other Receivables Tidak lancar/ Non Current				
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek *)	275.000	115.000	0,21%	0,13%
Total	275.000	115.000	0,21%	0,13%

*)Direklasifikasi, lihat catatan 50/ Reclassified, see note 50

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

a. Pemerintah (lanjutan)

a. Government (continued)

	2023	2022	Persentase dari Total Aset/ Percentage from Total Asset	
			2023	2022
Dana Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Funds				
Lancar/ Current				
Bank				
Rekening Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Account				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.769	125	0,00%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	522	46	0,00%	0,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18	3.131	0,00%	0,00%
Subtotal	4.309	3.302	0,00%	0,00%
Jaminan Sindikasi Bank/ Syndicated Bank Guarantee				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	146.476	15.366	0,11%	0,02%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	130.119	9.840	0,10%	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.247	4.960	0,00%	0,01%
Subtotal	278.842	30.166	0,22%	0,03%
Rekening Amanat Pendapatan Tol/ Toll Collection Escrow Account				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	181.296	6.803	0,14%	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.295	116	0,01%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.594	47	0,00%	0,00%
Subtotal	201.185	6.966	0,16%	0,01%
Deposito				
Rekening Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Account				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	9.973	0,00%	0,01%
Subtotal	-	9.973	0,00%	-
Jaminan pelaksanaan/ Performance Bond				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.345	-	0,01%	-
Subtotal	7.345	-	0,01%	-
Subtotal Lancar/ Subtotal Current	491.681	50.407	0,38%	0,06%
Tidak Lancar/ Non-Current				
Bank				
Jaminan Sindikasi Bank/ Syndicated Bank Guarantee				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.966	26.406	0,04%	0,03%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54.443	5.261	0,04%	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.453	10.685	0,02%	0,01%
Subtotal	136.862	42.352	0,11%	0,05%
Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44.821	57.955	-	0,06%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.449	-	0,00%	-
Subtotal	49.270	57.955	0,04%	0,06%
Deposito				
Jaminan Sindikasi Bank/ Syndicated Bank Guarantee				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.419	7.345	0,00%	0,01%
Subtotal	5.419	7.345	0,00%	0,01%
Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	17.114	0,00%	0,02%
Subtotal	-	17.114	0,00%	0,02%
Jaminan Pemeliharaan/ Maintenance Bond				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.231	5.231	0,00%	0,01%
Subtotal	5.231	5.231	0,00%	0,01%
Subtotal Tidak Lancar/ Subtotal Non-Current	196.782	129.997	0,15%	0,14%
Total Dana Dibatasi Penggunaannya/ Total Restricted Funds	688.463	180.404	0,53%	0,20%

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

a. Pemerintah (lanjutan)

a. Government (continued)

	2023	2022	Persentase dari Total Liabilitas/ Percentage from Total Liabilities	
			2023	2022
Liabilitas/ Liabilities				
Beban Akrua/ Accrued Expenses				
Beban Kontraktor dan Konsultan/ Contractors and Consultant Expense				
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.873.180	1.413.258	2,07%	3,02%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	698.506	389.920	0,77%	0,43%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	51.851	23.378	0,06%	0,04%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	42.957	9.660	0,05%	1,65%
PT Virama Karya (Persero)	11.230	3.199	0,01%	0,00%
PT Yodya Karya (Persero)	2.028	-	0,00%	-
Subtotal	2.679.752	1.839.415	2,95%	5,14%
Beban Bunga/ Interest Expenses				
Utang Bank/ Bank Loans				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.098	5.972	0,01%	0,01%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.241	3.787	0,00%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.603	729	0,00%	0,00%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	884	351	0,00%	0,00%
Subtotal	13.826	10.839	0,02%	0,01%
Total Beban Akrua/ Total Accrued Expenses	2.693.578	1.850.254	2,97%	5,15%
Utang Bank/ Bank Loans				
Utang Jangka Pendek/ Short Term Loans				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.101.257	1.598.442	2,32%	2,44%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	525.000	-	0,58%	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100.000	-	0,11%	-
Subtotal	2.726.257	1.598.442	3,01%	2,44%
Utang Bank Jangka Panjang-Bagian Jangka Pendek/ Long Term Bank Loans-Current Maturities				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	281.081	86.573	0,31%	0,13%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	274.283	73.368	0,30%	0,11%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	177.994	65.549	0,20%	0,10%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	40.485	11.717	0,04%	0,02%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17.266	6.492	0,02%	0,01%
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	14.456	5.269	0,02%	0,01%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.073	8.935	0,01%	0,01%
Subtotal	815.638	257.903	0,90%	0,39%
Utang Bank Jangka Panjang - Bagian Jangka Panjang/ Long Term Bank Loans - Long Term Portion				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.037.489	12.586.942	19,95%	19,21%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.608.686	3.394.032	9,52%	5,18%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.430.905	3.059.078	3,80%	4,67%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	3.010.962	1.815.093	3,33%	2,77%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.437.213	2.440.005	1,59%	3,72%
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	700.987	715.656	0,78%	1,09%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	36.838	46.911	0,04%	0,07%
Subtotal	35.263.080	24.057.717	39,02%	36,72%
Total Utang Bank/ Bank Loans	38.804.975	25.914.062	42,94%	39,55%
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non - Bank Financial Institution				
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Pendek/ Non - Bank Financial Institution Short Term Loan				
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	908.102	-	1,00%	-
Subtotal	908.102	-	1,00%	-
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang Bagian Jangka Pendek/ Non - Bank Financial Institution Long - Current Maturities				
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	200.000	-	0,22%	-
Subtotal	200.000	-	0,22%	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**44. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

**44. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

a. Pemerintah (lanjutan)

a. Government (continued)

			Persentase dari Total Liabilitas/ Percentage from Total Liabilities	
	2023	2022	2023	2022
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank Jangka Panjang/ Non - Bank Financial Institution Long Term Loan				
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	200.000	-	0,33%
Subtotal	-	200.000	-	0,31%
Total Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non - Bank Financial Institution	1.108.102	200.000	1,23%	0,31%
Utang Usaha/ Accounts Payable				
Koperasi Jasa Marga Bhakti I	3.296	-	0,00%	0,00%
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lainnya (Dibawah Rp2.000) / Others (Below Rp2,000)	-	2.231	0,00%	0,00%
	6.227	4.590	0,01%	0,01%
Total Utang Usaha/ Accounts Payable	9.523	6.821	0,01%	0,01%
Utang Kontraktor Jangka Pendek/ Short-Term Contractors Payable				
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	225.538	186.867	0,25%	0,29%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	70.019	27.085	0,08%	0,04%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	32.899	24.676	0,04%	0,04%
PT Virama Karya (Persero)	4.176	-	0,00%	0,00%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.499	2.695	0,00%	0,00%
Lain-lain (Dibawah Rp2.000) / Others (Below Rp2,000)	41	93	0,00%	0,00%
Total Utang Kontraktor Jangka Pendek/ Short-Term Contractors Payable	336.172	241.416	0,38%	0,37%
Utang Kontraktor Jangka Panjang/ Long-term Contractors Payable				
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	128.427	95.272	0,14%	0,15%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	97.815	43.346	0,11%	0,07%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	41.416	74.836	0,05%	0,11%
Total Utang Kontraktor Jangka Panjang/ Long-term Contractors Payable	267.658	213.454	0,30%	0,33%

b. Remunerasi Komisaris dan Direksi

**b. Remuneration of Commissioners and
Directors**

- (i) Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.821 dan Rp10.706.
- (ii) Jumlah remunerasi yang diterima Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.074 dan Rp20.754.

- (i) Total remuneration received by the Board of Commissioners for the years ended on December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp10,821 and Rp10,706, respectively.
- (ii) Total remuneration received by the Board of Directors for the years ended on December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp20,074 and Rp20,754, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS**

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

- (i) Kelompok Usaha telah memperoleh penetapan hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) yang diterbitkan oleh Pemerintah, meliputi 13 (tiga belas) ruas jalan tol, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006 tanggal 8 Juni 2006, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan PPJT pada tanggal 7 Juli 2006 untuk masing-masing ruas jalan tol, dengan masa konsesi selama 40 (empat puluh) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2044, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi, berdasarkan PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen III Nomor 10 tanggal 15 Desember 2022;
2. Ruas Jakarta - Tangerang, berdasarkan PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen II Nomor 06 tanggal 8 Desember 2022;
3. Ruas Surabaya - Gempol, berdasarkan PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen pertama kali pada 11 November 2021 dan telah dialihkan kepada PT Jasamarga Transjawa Tol sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya;
4. Ruas Jakarta - Cikampek, berdasarkan PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006 dan telah dialihkan kepada PT Jasamarga Transjawa Tol sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya;
5. Ruas Padalarang - Cileunyi, berdasarkan PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen II Nomor 01 tanggal 7 November 2022;

a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)

- (i) The Group has acquired the right of toll road concession (Concession Right) issued by the Government, which consists of 13 (thirteen) toll roads, in accordance with the Minister of Public Works Decree No. 242/KPTS/M/2006 dated June 8, 2006, followed by the signing of the PPJT for each toll road dated July 7, 2006 with concession period of 40 (forty) years, and effective on January 1, 2005 until December 31, 2044 with details as follows:

1. Jakarta - Bogor - Ciawi Toll Road, according to PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment III Number 10 dated December 15, 2022;
2. Jakarta - Tangerang Toll Road, according to PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment II Number 06 dated December 8, 2022;
3. Surabaya - Gempol Toll Road, according to PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006 that has been amended for the first time on November 11, 2021 and has been transferred to PT Jasamarga Transjawa Tol as explained in the next section;
4. Jakarta - Cikampek Toll Road, according to PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006 and has been transferred to PT Jasamarga Transjawa Tol as explained in the next section;
5. Padalarang - Cileunyi Toll Road, according to PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment II Number 01 dated November 7, 2022;

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

6. Ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, berdasarkan PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006 dengan Akta Amendemen II Nomor 04 tanggal 8 Desember 2022;
7. Ruas Cawang - Tomang - Pluit, berdasarkan PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen II Nomor 02 tanggal 8 Desember 2022;
8. Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa, PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen II Nomor 03 tanggal 7 November 2022;
9. Ruas Semarang Seksi A. B. C, berdasarkan PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen pertama kali pada 11 November 2021 dan telah dialihkan kepada PT Jasamarga Transjawa Tol sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya;
10. Ruas Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami, berdasarkan PPJT No. 255/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen II Nomor 03 tanggal 8 Desember 2022;
11. Ruas Palimanan - Kanci, berdasarkan PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen pertama kali pada 11 November 2021 dan telah dialihkan kepada PT Jasamarga Transjawa Tol sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya;
12. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Ruas E1. E2. E3. W2, berdasarkan PPJT No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen III Nomor 05 tanggal 8 Desember 2022; dan
13. Ruas Cikampek - Padalarang, berdasarkan PPJT No.258/PPJT/VII/Mn/2006 yang telah diamendemen terakhir dengan Akta Amendemen II Nomor 02 tanggal 7 November 2022.

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

6. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo Toll Road, according to PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment II Number 04 dated December 8, 2022;
7. Cawang - Tomang - Pluit Toll Road, according to PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment II Number 02 dated December 8, 2022;
8. Belawan - Medan - Tanjung Morawa Toll Road, according to PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment II Number 03 dated November 7, 2022;
9. Semarang Toll Road, Sections A. B. C according to PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006 that has been amended for the first time on November 11, 2021 and has been transferred to PT Jasamarga Transjawa Tol as explained in the next section;
10. Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami Toll Road, according to PPJT No. 255/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment II Number 03 dated December 8, 2022;
11. Palimanan - Kanci Toll Road, according to PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006 that has been amended for the first time on November 11, 2021 and has been transferred to PT Jasamarga Transjawa Tol as explained in the next section;
12. Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll Road, Sections E1. E2. E3. W2, according to PPJT No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment III Number 05 dated December 8, 2022; and
13. Cikampek - Padalarang Toll Road, according to PPJT No. 258/PPJT/VII/Mn/2006 which was lastly amended by Deed of Amendment of II Number 02 dated November 7, 2022.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

Pada tanggal 1 Juli 2022 Perusahaan melakukan pemisahan (*spin off*) Regional Transjawa Tollroad, kepada PT Jasamarga Transjawa Tol. Perusahaan mengalihkan empat segmen ruas hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) yang meliputi:

On July 1, 2022, the Company will spin off the Regional Transjawa Tollroad, to PT Jasamarga Transjawa Tol. The Company transferred four segments of toll road concession rights (Concession Rights) which include:

1. Ruas Jakarta – Cikampek, sebagaimana Akta Amendemen II Pernyataan Kembali nomor 04 tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amendemen III nomor 25 tanggal 17 Januari 2023;
2. Ruas Palimanan – Kanci sebagaimana Akta Amendemen II Pernyataan Kembali nomor 05 tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amendemen III nomor 26 tanggal 17 Januari 2023;
3. Ruas Semarang Seksi A, B, C sebagaimana Akta Amendemen II Pernyataan Kembali nomor 06 tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amendemen III nomor 24 tanggal 17 Januari 2023; dan
4. Ruas Surabaya – Gempol sebagaimana Akta Amendemen II Pernyataan Kembali nomor 07 tanggal 29 Juni 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amendemen III nomor 23 tanggal 17 Januari 2023.

1. *Jakarta – Cikampek Toll Road as the Restatement Amendment II Deed number 04 dated June 29, 2022 as last amended by Amendment III Deed number 25 dated January 17, 2023;*
2. *Palimanan – Kanci Toll Road as the Restatement Amendment II Deed number 05 dated June 29, 2022 as last amended by Amendment III Deed number 26 dated January 17, 2023;*
3. *Semarang Seksi A, B, C, Toll Road as the Restatement Amendment II Deed number 06 dated June 29, 2022 as last amended by Amendment III Deed number 24 dated January 17, 2023; and*
4. *Surabaya – Gempol Toll Road as the Restatement Amendment II Deed number 07 dated June 29, 2022 as last amended by Amendment III Deed number 23 dated January 17, 2023.*

Sehubungan dengan perolehan Hak Konsesi dimaksud, Perusahaan diwajibkan membentuk jaminan pemeliharaan dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang diterima pada atau sebelum tahun terakhir masa konsesi dimana besarnya berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang tersedia dan telah diaudit. Jaminan pemeliharaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa konsesi berakhir dan jaminan pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa konsesi.

In connection with the aforementioned Concession Rights, the Company is required to establish a maintenance guarantee with a value of not less than 10% (ten percent) of the actual toll revenue and revenue obtained from other businesses on or before the last year of the concession period whereby such amount is calculated based on the latest audited annual financial statements. The aforementioned maintenance guarantee shall be given to the Government within 6 (six) months before the expiration of concession period and shall continue for the successive 12 (twelve) months following the expiration of concession period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol

(ii) Toll Road Investment Agreement

1. Ruas Bogor Outer Ring Road

1. Bogor Outer Ring Road

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 4 tanggal 8 Agustus 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen XI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 01 tanggal 3 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Marga Sarana Jabar (MSJ) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement No. 4 dated August 8, 2011 which was last amended by Amendment XI of Toll Road Concession Agreement Deed No. 01 dated January 3, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki penyertaan saham di MSJ sebesar 55%.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Company's has a 55% shareholding in MSJ each.

2. Ruas Tol Gempol - Pasuruan

2. Gempol - Pasuruan Toll Road

PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 5 tanggal 7 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen XI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 03 tanggal 9 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) and the Government have signed the Deed of Concession Agreement for Toll Road No. 5 dated June 7, 2011, the latest amended by Amendment XI of Toll Road Concession No. 03 dated January 9, 2023 made in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan telah mengalihkan saham di JGP sebesar 99,35% kepada JTT.

As of July 1, 2022, the Company has transferred its 99.35% stake in JGP to JTT.

3. Ruas Tol Semarang - Solo

3. Semarang - Solo Toll Road

PT Trans Marga Jateng (TMJ) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 10 tanggal 30 Maret 2012 yang terakhir diubah dengan Amendemen XI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 5 tanggal 10 Februari 2020 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Trans Marga Jateng (TMJ) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement No. 10 dated March 30, 2012 which was last amended by Amendment XI of Toll Road Concession Agreement No. 5 dated February 10, 2020 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan telah mengalihkan saham di TMJ sebesar 50,91% kepada JTT.

As of July 1, 2022, the Company has transferred its 50.91% stake in TMJ to JTT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

4. Ruas Tol Cengkareng - Kunciran

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 6 tanggal 7 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen XII Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 02 tanggal 17 Juli 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham di JKC sebesar 78,53%.

5. Ruas Tol Kunciran - Serpong

PT Marga Trans Nusantara (MTN) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 7 tanggal 7 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen XII Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 25 tanggal 26 Desember 2022 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham di MTN sebesar 60%.

6. Ruas Tol JORR seksi W2 Utara

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 3 tanggal 7 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 02 tanggal 6 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham di MLJ sebesar 51%.

4. Cengkareng - Kunciran Toll Road

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) and the Government have signed Deed of Toll Road Concession Agreement No. 6 dated June 7, 2011 which was last amended by Amendment XII of Toll Road Concession Agreement No. 02 dated July 17, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company's owns JKC amounting to 78.53%.

5. Kunciran - Serpong Toll Road

PT Marga Trans Nusantara (MTN) and the Government have stipulated the Toll Road Concession Agreement Deed No. 7 dated June 7, 2011 which was last amended by Amendment XII of the Toll Road Concession Agreement No. 25 dated December 26, 2022 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company's owns MTN amounting to 60%.

6. JORR Toll Road section W2 North

PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement No. 3 dated June 7, 2011 which was last amended by Amendment V of Toll Road Concession Agreement No. 02 January 6, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company owns MLJ Shares amounting to 51%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

**7. Ruas Tol Medan - Kualanamu -
Tebing Tinggi**

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 1 tanggal 5 Januari 2015 yang terakhir diubah dengan Amendemen IX Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi No. 02 tanggal 7 Februari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada JMKT sebesar 55%.

8. Ruas Tol Solo - Mantingan - Ngawi

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 18 tanggal 28 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen XI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 09 tanggal 23 November 2022 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham secara tidak langsung pada JSN melalui JTT sebesar 60%.

9. Ruas Tol Ngawi - Kertosono

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol tanggal 28 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen XI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol nomor 08 tanggal 23 November 2022 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

**7. Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi
Toll Road**

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) and the Government has signed Toll Road Concession Agreement No. 1 dated January 5, 2015 which was last amended by Amendment IX of Toll Road Concession Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road Agreement No. 02 February 7, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company owns JMKT Shares amounting to 55%.

8. Solo - Mantingan - Ngawi Toll Road

PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed No. 18 dated June 28, 2011 which was last amended by Amendment XI of the Toll Road Concession Agreement No. 09 dated November 23, 2022 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company has an indirect share participation in JSN through JTT of 60%.

9. Ngawi - Kertosono Toll Road

PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed dated June 28, 2011 which was last amended by Amendment XI Toll Road Concession Agreement number 08 dated November 23, 2022 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

9. Ruas Tol Ngawi - Kertosono (lanjutan)

**9. Ngawi - Kertosono Toll Road
(continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham secara tidak langsung pada JNK melalui JTT sebesar 60%.

As of December 31, 2023, the Company has an indirect share participation in JNK through JTT of 60%.

10. Ruas Tol Serpong - Cinere

10. Serpong - Cinere Toll Road

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 20 tanggal 28 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen X berdasarkan Akta No. 16 tanggal 10 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement No. 20 dated June 28, 2011 the latest amended by Amendment X of Toll Road Concession Agreement No. 16 dated January 10, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham dalam CSJ sebesar 55%.

As of December 31, 2023, the Company owns 55% of CSJ shares.

11. Ruas Tol Gempol - Pandaan

11. Gempol – Pandaan Toll Road

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 4 tanggal 7 Juni 2011 yang terakhir diubah dengan Amendemen III Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 18 tanggal 10 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) and the Government have signed the Deed of Concession Agreement for Toll Road No. 4 dated June 7, 2011, the latest amended by Amendment III of Toll Road Concession No. 18 dated January 10, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 1 Juli 2022, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan saham di JPT sebesar 40% kepada JTT.

As of July 1, 2022, the Company has transferred its 40% stake in JPT to JTT.

12. Ruas Tol Nusa Dua - Tanjung Benoa

12. Nusa Dua - Tanjung Benoa Toll Road

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 10 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Amendemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 11 tanggal 19 Desember 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) and the Government have approved the Toll Road Concession Agreement Deed No. 10 dated December 16, 2011 of Rina Utami Djauhari, S.H., notary in Jakarta as last amended by Amendment II of Toll Road Concession No. 11 dated December 19, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

**12. Ruas Tol Nusa Dua - Tanjung Benoa
(lanjutan)**

**12. Nusa Dua - Tanjung Benoa Toll Road
(continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2023,
perusahaan kepemilikan saham di JBT
sebesar 64,44%.

As of December 31, 2023, the
Company has 64.44% stake in JBT.

13. Ruas Tol Surabaya - Mojokerto

13. Surabaya - Mojokerto Toll Road

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
(JSM) dan Pemerintah telah
menandatangani Akta Perjanjian
Pengusahaan Jalan Tol No. 2 tanggal
7 Juni 2011 yang terakhir diubah
dengan Amendemen XI berdasarkan
Akta No. 08 tanggal 9 Februari 2023
dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari,
S.H., Notaris di Jakarta.

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
(JSM) and the Government have signed
the Toll Road Concession Agreement
Deed No. 2 dated June 7, 2011 the
latest amended by Amendment XI
based on Deed No. 08 dated February
9, 2023 in front of Rina Utami Djauhari,
S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan
telah mengalihkan kepemilikan saham
sebesar 55,51% di JSM kepada JTT.

As of July 1, 2022, the Company has
transferred its 55.51% stake in JSM to
JTT.

14. Ruas Tol Semarang - Batang

14. Semarang - Batang Toll Road

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)
dan Pemerintah telah menandatangani
Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
tanggal 27 April 2016 yang terakhir
diubah dengan Amendemen IX
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
berdasarkan Akta No. 02 tanggal
13 Maret 2023 dibuat di hadapan Rina
Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Jasamarga Semarang Batang (JSB)
and the Government have signed the
Toll Road Concession Agreement Deed
dated April 27, 2016 which was last
amended by Amendment IX based on
the Deed No 02 dated March 13, 2023
in front of Rina Utami Djauhari, S.H.,
Notary in Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023,
Perusahaan memiliki penyertaan
saham secara tidak langsung pada JSB
melalui JTT sebesar 60%.

As of December 31, 2023, the
Company has an indirect share
participation in JSB through JTT of
60%.

15. Ruas Tol Manado - Bitung

15. Manado - Bitung Toll Road

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)
dan Pemerintah telah menandatangani
Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
tanggal 9 Juni 2016, yang terakhir
diubah dengan Amendemen VI
berdasarkan Akta nomor 09 tanggal
31 Maret 2023 dibuat di hadapan Rina
Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB)
and the Government have signed a
Deed of Agreement on Toll Road
Concession dated June 9, 2016, which
was last amended by Amendment VI
based on Deed number 09 dated March
31, 2023 in front of Rina Utami Djauhari,
S.H., Notary in Jakarta.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

15. Ruas Tol Manado - Bitung (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki penyertaan saham pada JMB sebesar 64,97%.

**15. Manado - Bitung Toll Road
(continued)**

As of December 31, 2023, the Company owns 64.97% of shares of JMB.

16. Ruas Tol Balikpapan - Samarinda

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 3 tanggal 9 Juni 2016 yang terakhir diubah dengan Amendemen V berdasarkan Akta No. 10 tanggal 10 Februari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, porsi Perusahaan pada JBS adalah 67,39%.

16. Balikpapan - Samarinda Toll Road

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) and the Government have signed Deed of Agreement on Toll Road Concession No. 3 dated June 9, 2016 which was last amended by Amendment V based on Deed No. 10 dated February 10, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, portion of the Company's ownership in JBS is 67.39%.

17. Ruas Tol Pandaan - Malang

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 4 tanggal 9 Juni 2016 yang terakhir diubah dengan Amendemen VI berdasarkan Akta No. 05 tanggal 7 Oktober 2022 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan telah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada JPM sebesar 51% kepada JTT.

17. Pandaan - Malang Toll Road

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed No. 4 dated June 9, 2016 which was last amended by Amendment VI based on the Deed No. 05 dated October 7, 2022 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of July 1, 2022, the Company has transferred its 51% stake in JPM to JTT.

18. Ruas Tol Jakarta - Cikampek II Elevated

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 4 tanggal 5 Desember 2016 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Amendemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 39 tanggal 27 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

18. Jakarta - Cikampek II Elevated Toll Road

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed No. 4 dated December 5, 2016 of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta as last amended by Amendment II of Toll Road Concession No. 39 dated January 27, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**18. Ruas Tol Jakarta - Cikampek II
Elevated (lanjutan)**

Pada tanggal 1 Juli 2022, Perusahaan telah mengalihkan saham di JJC sebesar 40% kepada PT Jasamarga Transjawa Tol. Selanjutnya, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Oktober 2022 nomor 01 dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Perusahaan telah mengalihkan keseluruhan kepemilikan saham di JJC yaitu sebesar 40% kepada PT Margautama Nusantara. Perusahaan memiliki kepemilikan tidak langsung melalui JTT sebesar 40%.

**19. Ruas Tol Jakarta - Cikampek II Sisi
Selatan (Jatiasih-Cipularang-
Sadang)**

PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 7 tanggal 29 Desember 2017 yang terakhir diubah dengan Amendemen IV berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 November 2022 yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, porsi kepemilikan Perusahaan pada JJS adalah sebesar 90,97%.

20. Ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 8 tanggal 29 Desember 2017 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Akta Amendemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol nomor 32 tanggal 24 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, porsi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebesar 94,93%.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

**18. Jakarta - Cikampek II Elevated Toll
Road (continued)**

On July 1, 2022, the Company has transferred 40% of its shares in JJC to PT Jasamarga Transjawa Tol. Furthermore, based on the Deed of Sale and Purchase dated October 10, 2022 number 01 drawn up before Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., the Company has transferred its entire share ownership in JJC of 40% to PT Margautama Nusantara. The Company has indirect ownership through JTT by 40%.

**19. Jakarta - Cikampek II South Side
(Jatiasih-Cipularang-Sadang) Toll
Road**

PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed No. 7 dated December 29, 2017 which was last amended by Amendment IV based on Deed No. 10 dated November 23, 2022 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, portion of the Company's ownership in JJS is 90.97%.

20. Probolinggo-Banyuwangi Toll Road

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed No. 8 dated December 29, 2017 of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta as last amended by Amendment II of Toll Road Concession No. 32 dated January 24, 2023 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company's ownership is 94.93%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

**a. Toll Road Concession Agreements (PPJT)
(continued)**

Ruas Tol Jogja-Bawen

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol tanggal 13 November 2020 yang terakhir diubah dengan Amendemen II no. 5 tanggal 16 November 2022 yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, porsi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebesar 60%.

21. Jogja-Bawen Toll Road

PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed dated November 13, 2020 which was last amended by Amendment II no. 5 dated November 16, 2022 in front of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company's ownership is 60%.

22. Ruas Tol Akses Patimban

PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) dan Pemerintah telah menandatangani Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2023, porsi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebesar 55%.

22. Patimban Access Toll Road

PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) and the Government have signed the Toll Road Concession Agreement Deed dated January 24, 2023 of Rina Utami Djauhari, S.H., Notary in Jakarta.

As of December 31, 2023, the Company's ownership is 55%.

**b. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir
Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur
Jalan Tol (BLU - BPJT)**

**b. Agreement of Fund Facility for
Reimbursement of Land Acquisition for Toll
Road with BLU - BPJT**

Kelompok Usaha memiliki perjanjian dengan BLU - BPJT mengenai penggunaan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan ruas jalan tol sebagai berikut (Catatan 26):

The Group has agreements with the BLU - BPJT concerning the usage of fund for reimbursement of land acquisition cost of toll roads as follows (Note 26):

	2023	2022	
Entitas Anak:			Subsidiaries:
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	750.226	765.536	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Marga Trans Nusantara	548.618	645.433	PT Marga Trans Nusantara
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	142.058	177.573	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
Total	1.549.910	1.697.550	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**b. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir
Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur
Jalan Tol (BLU - BPJT) (lanjutan)**

**b. Agreement of Fund Facility for
Reimbursement of Land Acquisition for Toll
Road with BLU – BPJT (continued)**

Tata cara penggunaan dana bergulir pada BLU-BPJT untuk pengadaan tanah jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 4/PRT/M/2007, tanggal 26 Februari 2007. BLU-BPJT akan melaksanakan pembayaran terlebih dahulu (dana talangan), untuk pembelian tanah untuk pembangunan ruas jalan tol yang merupakan kewajiban Kelompok Usaha kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PPJT. Dalam hal 1 (satu) seksi selesai dibebaskan, Kelompok Usaha harus mentransfer seluruh biaya ganti rugi tanah termasuk bunga ke Rekening BLU-BPJT dan BLU-BPJT membuat Berita Acara Serah Terima Tanah kepada entitas.

The procedure using of pre-fund at BLU-BPJT for toll road land acquisition is based on the Decree of Public Works No. 4/PRT/M/2007 dated February 26, 2007. BLU-BPJT will conduct the payment firstly, for acquisition land for toll road construction, which represents the Group obligation to the Government, according to concession rights agreement (PPJT). In case one section has been completed, the Group should transfer all land acquisition costs including interest to BLU-BPJT account and BLU-BPJT should provide of Land Hand Over Report to the entity.

Dalam hal Perjanjian Pengusahaan Ruas Jalan Tol untuk ruas jalan tol dialihkan kepada Entitas Anak dari Perusahaan, maka hak dan kewajiban Perusahaan dalam Perjanjian Penggunaan Dana BLU ini akan dialihkan kepada Entitas Anak.

After the transfer of the Company's rights under the Concession to its Subsidiaries, the Company's rights and obligations in the BLU Fund Usage Agreement will be transferred to its Subsidiaries.

Menunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2008 tentang tata cara penggunaan dana bergulir pada Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol untuk pengadaan tanah jalan tol diatur penghapusan *surety bond* (jaminan) dalam perjanjian Penggunaan Dana Bergulir BLU, maka sebagai pengganti jaminan atas pengembalian dana bergulir ini akan diberlakukan *cross default* PPJT apabila Perusahaan gagal membayar dana bergulir BLU.

Referring to the Decree of the Minister of Public Works No.14/PRT/M/2008 regarding the procedure for pre-fund usage at Public Service Assistance Unit ("Badan Layanan Umum /BLU") for land acquisition of toll road which stipulated the cancellation of surety bond on pre-fund usage agreement of BLU, and as a replacement of guarantee on the prepayment of pre-fund the cross default will be applied on PPJT if the Company failed to repay such pre-fund to BLU.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 822/KPTS/M/2021 (Kepmen 822/2021), bahwa terhitung sejak tanggal 18 April 2019, Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Pendanaan dan Sekretariat Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditutup dan untuk selanjutnya Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan layanan dana bergulir.

Based on the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing number: 822/KPTS/M/2021 (Kepmen 822/2021), dated April 18, 2019, the Public Service Agency (BLU) for Funding and the Secretariat of Toll Road Regulatory Affairs of the Ministry of Public Works and Housing The people were closed and henceforth the Secretariat Work Unit of the Toll Road Regulatory Agency of the Ministry of Public Works and Public Housing was given the authority to resolve problems with revolving fund services.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**b. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir
Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur
Jalan Tol (BLU - BPJT) (lanjutan)**

**b. Agreement of Fund Facility for
Reimbursement of Land Acquisition for Toll
Road with BLU – BPJT (continued)**

Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara Satuan Kerja Sekretariat BPJT dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang paling sedikit memuat:

The resolution of these problems is carried out with an agreement as stated in the agreement between the BPJT Secretariat Work Unit and the Toll Road Business Entity (BUJT) which at least contains:

1. Nilai Utang Pokok, Nilai Tambah dan Denda atas Nilai Tambah sampai dengan tanggal 18 April 2019;
2. Perhitungan Nilai Utang Pokok berdasarkan hasil revidu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dengan memperhatikan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. Perhitungan Nilai Tambah sebesar LPS+1% dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dengan menggunakan bunga tunggal sejak ditandatanganinya perjanjian layanan dan bergulir dan/atau amendemen perjanjian layanan dana bergulir;
4. Menghapus denda atas Nilai Tambah dari kewajiban BUJT;
5. Jangka waktu penyelesaian atas Nilai Utang Pokok dan Nilai Tambah yang harus dibayarkan oleh BUJT paling lambat tahun 2024;
6. Tata cara pembayaran atas Nilai Utang Pokok dan Nilai Tambah untuk masing-masing BUJT;
7. Penyelesaian atas kelebihan pembayaran Nilai Tambah dan Denda atas Nilai Tambah yang telah dibayarkan BUJT akan ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi BPJT sebagai bagian dari investasi, dan/atau penyesuaian tarif tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. *Value of Principal Debt, Value Added and Fines for Value Added up to April 18, 2019;*
2. *Calculation of the Principal Debt Value based on the results of the review by the State Audit Board of the Republic of Indonesia in accordance to Presidential Instruction Number 1 of 2016 concerning the Acceleration of Implementation of National Strategic Projects;*
3. *Calculation of Value Added of LPS+1% with a period of 2 (two) years using single interest since the signing of the service and revolving agreement and/or amendment of the revolving fund service agreement;*
4. *Removing fines for Value Added from BUJT's obligations;*
5. *The settlement period for the Principal and Value Added Debt that must be paid by BUJT is no later than 2024;*
6. *Payment procedures for the Principal Debt Value and Value Added for each BUJT;*
7. *Settlement of overpayment of Value Added and Fines for Value Added that has been paid by BUJT will be determined by the Minister on the recommendation of BPJT as part of the investment, and/or adjustment of toll rates in accordance with the provisions of the Law.*

Menindaklanjuti Kepmen 822/2021, telah dilaksanakan rekonsiliasi Nilai Utang Pokok, Nilai Tambah dan Denda atas Nilai Tambah pada bulan Agustus tahun 2021 antara BPJT dengan seluruh BUJT yang memiliki BLU.

Following up on Kepmen 822/2021, a reconciliation of the Principal Debt Value, Value Added and Fines for Value Added in August 2021 between BPJT and all BUJTs that have BLU has been carried out.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**c. Jasa Pengoperasian Jalan Tol antara
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
(Entitas Anak) dengan PT Utama Karya
(Persero)**

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) mengadakan kerja sama dengan PT Utama Karya (Persero) (HK) melalui Perjanjian Jasa Layanan Transaksi dan Layanan Lalu Lintas Pada Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 24/SP-JLJ/III/2016 tanggal 16 Maret 2016. Lingkup pekerjaan meliputi transaksi dan layanan lalu lintas Jalan Tol Ruas JORR Seksi S.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019. Nilai kontrak sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 adalah sebesar Rp182.778 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum I Perjanjian Jasa Layanan Transaksi dan Layanan Lalu Lintas Pada Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi), No. 24/SP-JLJ/III/2016 tanggal 15 Maret 2017, jangka waktu perjanjian diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp181.946 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum II Perjanjian Jasa Layanan Transaksi dan Layanan Lalu Lintas Pada Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 24/SP-JLJ/III/2016 tanggal 15 Maret 2017, jangka waktu perjanjian diperpanjang 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019, nilai kontrak selama 1 tahun adalah sebesar Rp175.523 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum XI, kedua belah pihak menyepakati tentang penambahan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, pada Addendum XII dan Addendum XIII, kedua belah pihak menyepakati tentang perubahan biaya pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan atas ruas tersebut untuk tahun 2016 dan 2017.

**c. Toll Road Operation Services between PT
Jalantol Lingkarluar Jakarta
(a Subsidiary) and PT Utama Karya
(Persero)**

The Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) entered into an agreement with PT Utama Karya (Persero) for the Transaction and Traffic Services Agreement of JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 24/SP-JLJ/III/2016 dated March 16, 2016. The scope of work includes transactions and traffic services for JORR Toll Road Section S.

The period of work started from March 16, 2016 until March 16, 2019. The contract value from March 16, 2016 until March 16, 2017 amounted to Rp182,778 (including VAT).

Based on Addendum I of the Transaction and Traffic Services Agreement of JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi), No. 24/SP-JLJ/III/2016 dated March 15, 2017, the contract period was extended for 1 (one) year started from March 16, 2017 until March 15, 2018 with contract value amounted to Rp181,946 (including VAT).

Based on Addendum II of the Transaction and Traffic Services Agreement of JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 24/SP-JLJ/III/2016 dated March 15, 2017, the contract period was extended for 1 year started from March 16, 2018 until March 15, 2019, with contract value amounted to Rp175,523 (including VAT).

Based on Addendum XI, both parties agreed to extend the agreement period for 3 (three) years and commencing from January 1, 2016 up to December 31, 2019. Furthermore, on Addendum XII and Addendum XIII, both of parties agreed about operating costs, security, and maintenance cost changes of these toll road section for year 2016 and 2017.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**c. Jasa Pengoperasian Jalan Tol antara
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
(Entitas Anak) dengan PT Utama Karya
(Persero) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian No. 60/SP-JLJ/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, JLJ dan HK menandatangani Perjanjian Jasa Pengoperasian, Pengamanan dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 60/SP-JLJ/III/2019. Jangka waktu perjanjian adalah satu tahun mulai dari tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp107.556 (termasuk PPN).

Berdasarkan Adendum I atas Perjanjian Jasa Pengoperasian, Pengamanan dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 55/SP-JLJ/III/2020 tanggal 15 Maret 2020, jangka waktu perjanjian diperpanjang 2 tahun terhitung dari tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp99.706 (termasuk PPN).

Berdasarkan Adendum II atas Perjanjian Jasa Pengoperasian, Pengamanan, dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 77/SP-JLJ/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, nilai kontrak diamendemen menjadi sebesar Rp96.693 (termasuk PPN).

Berdasarkan Adendum III atas Perjanjian Jasa Pengoperasian, Pengamanan, dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 41/SP-JLJ/2021 tanggal 1 Maret 2021, nilai kontrak periode 17 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2022 adalah sebesar Rp92.581 (termasuk PPN).

Berdasarkan Adendum IV atas Perjanjian Jasa Pengoperasian, Pengamanan, dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang-Jagorawi) No. OPJT/AW.31/S.Perj-ADD-4/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, nilai kontrak periode 17 Maret 2022 sampai dengan 16 Maret 2023 adalah sebesar Rp92.581 (termasuk PPN).

**c. Toll Road Operation Services between PT
Jalantol Lingkarluar Jakarta
(a Subsidiary) and PT Utama Karya
(Persero) (continued)**

Based on agreement No. 60/SP-JLJ/III/2019 dated March 15, 2019, JLJ and HK signed the JORR Section S (Pondok Pinang-Jagorawi) Toll Road Operation, Security and Maintenance Services Agreement No. 60/SP-JLJ/III/2019. The period is one year started from March 16, 2019 until March 15, 2020, with a contract value amounted to Rp107,556 (including VAT).

Based on Addendum I to the Operation, Security and Maintenance Agreement for JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 55/SP-JLJ/III/2020 dated March 15, 2020, the expected period to be renewed in 2 years is visited from March 17, 2020 to March 16, 2021 with a contract value of Rp99,706 (including VAT).

Based on Addendum II to the Operation, Security and Maintenance Agreement for JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 77/SP-JLJ/V/2020 dated May 4, 2020, the contract value is amendment to Rp96,693 (including VAT).

Based on Addendum III to the Operation, Security and Maintenance Agreement for JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi) No. 41/SP-JLJ/2021 dated March 1, 2021, the contract value from March 17, 2021 to March 16, 2022 period is Rp92,581 (including VAT).

Based on Addendum IV to the Operation, Security and Maintenance Agreement for JORR Section S Toll Road (Pondok Pinang-Jagorawi) No. OPJT/AW.31/S.Perj-ADD-4/III/2022 dated March 14, 2022, the contract value from March 17, 2022 to March 16, 2023 period is Rp92,581 (including VAT).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**c. Jasa Pengoperasian Jalan Tol antara
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
(Entitas Anak) dengan PT Utama Karya
(Persero) (lanjutan)**

Berdasarkan Addendum V Perjanjian Jasa Pengoperasian, Pengamanan, dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi S (Pondok Pinang – Jagorawi) No. OPJT/AW.31/S.Perj-ADD-5/II/2023 dan No. 14/SP-JLJ/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, nilai kontrak periode 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2023 adalah sebesar Rp96.211 (termasuk PPN). Perjanjian tersebut telah berakhir.

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dengan PT Utama Karya (Persero) kemudian menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Layanan Operasi Jalan Tol Ruas JORR-S (Jagorawi – Pondok Pinang) nomor OPT/WK.89/S.Perj/IV/2023 dan nomor 17/SP-JLJ/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 365 hari sejak SPMK. Nilai kontrak adalah sebesar Rp88.971.

**d. Kerja Sama Pengoperasian Jalan Tol
dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada
Tbk (CMNP)**

Perusahaan mengadakan kerja sama dengan CMNP dalam bentuk pengoperasian jalan tol secara terpadu yang dimuat dalam Akta Notaris No. 42 tanggal 4 Juni 1993 *juncto* Akta Notaris No. 386 tanggal 31 Desember 1994.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum No. 272-A/KPTS/1996 dan Menteri Keuangan No. 434/KMK.016/1996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Pengoperasian Terpadu Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (Tomang-Cawang Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga Pluit-Grogol Tomang) serta Penetapan Angka Perbandingan Pembagian Pendapatan Tol dinyatakan bahwa jalan tol lingkar dalam kota dijadikan sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan tol dalam kota Jakarta yang pengoperasiannya dilakukan secara terpadu dengan bagi pendapatan tol masing-masing sebesar 25% untuk Perusahaan dan sebesar 75% untuk CMNP.

**c. Toll Road Operation Services between PT
Jalantol Lingkarluar Jakarta
(a Subsidiary) and PT Utama Karya
(Persero) (continued)**

Based on Addendum V of the Agreement for Operation, Security, and Maintenance of JORR Section S (Pondok Pinang – Jagorawi) Toll Road No. OPJT/AW.31/S.Perj-ADD-5/II/2023 and No. 14/SP-JLJ/II/2023 dated February 16, 2023, the contract value for the period March 17, 2022 to April 16, 2023 is Rp96,211 (including VAT). The agreement has expired.

PT Jalantol Lingkarluar Jakarta with PT Utama Karya (Persero) then signed a Contracting Agreement for Toll Road Operation Services for the JORR-S (Jagorawi - Pondok Pinang) Toll Road number OPT/WK.89/S.Perj/IV/2023 and number 17/SP-JLJ/IV/2023 dated April 14, 2023 with an implementation period of 365 days from SPMK. The contract value is Rp88,971.

**d. Toll Road Joint Operation with PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)**

The Company has entered into a joint operation agreement with CMNP in the form of integrated toll road operation as put forth in the Notarial Deed No. 42 dated June 4, 1993 in conjunction with the Notarial Deed No. 386 dated December 31, 1994.

Based on the Joint Decrees of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 272-A/KPTS/1996 and the Minister of Finance No. 434/KMK.016/1996 dated June 20, 1996 regarding the integrated operation of the Jakarta Inner Ring Road (Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga Pluit-Grogol Tomang) and determination of Toll Revenue Sharing Ratio, the inner city ring road will be operated as one toll road network system with toll road revenue sharing of 25% for the Company and 75% for CMNP.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**d. Kerja Sama Pengoperasian Jalan Tol
dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada
Tbk (CMNP) (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No. JL.01.04-Mn/582 tanggal 7 November
2002, ditetapkan persentase bagi hasil jalan tol
dalam kota Jakarta antara CMNP dan
Perusahaan sebagai berikut:

	Persentase Bagi Hasil/ Percentage of Revenue Sharing		
	CMNP	Perusahaan/ Company	
Mulai Awal Konsesi s/d 9 Mei 2002	75%	25%	Beginning of Concession Period until May 9, 2002
Mulai 10 Mei 2002 s/d 31 Desember 2002	65%	35%	From May 10, 2002 to December 31, 2002
Mulai 1 Januari 2003 s/d Akhir Masa Konsesi (Tahun 2025)	55%	45%	From January 1, 2003 to the End of Concession (Year 2025)

**e. Kerja Sama Pengoperasian Jalan Tol
dengan PT Bintaro Serpong Damai (BSD)**

Perusahaan telah mengadakan kerja sama
kontrak manajemen dengan BSD sebagai
operator jalan tol berdasarkan perjanjian kerja
sama pengoperasian dan pemeliharaan jalan
tol Pondok Aren - Serpong No. 004/SPK-
DIR/1998 tanggal 19 Mei 1998, yaitu dimulai
sejak tanggal pengoperasian sampai dengan
berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol
Pondok Aren - Serpong atau pada saat
diakhirinya perjanjian ini mana yang lebih awal.
Berdasarkan Putusan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia No. 217/1/ARB-BANI/2006
tanggal 31 Agustus 2006, lingkup
pengoperasian Perusahaan sebagai berikut:

1. Pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji
(Pondok Aren Timur).
2. Pelayanan lalu lintas dan keamanan
pengguna jalan tol serta pengamanan
aset, dengan catatan yang dilakukan oleh
Perusahaan adalah yang menyangkut
patroli seperti kendaraan rusak dan
kecelakaan sesuai lingkup pekerjaan
patroli sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) jalan tol yang dikeluarkan Menteri
Pekerjaan Umum.

Masa berakhirnya perjanjian bersamaan
dengan berakhirnya masa konsesi ruas Ulujami
– Pondok Aren hingga 2045, kecuali kedua
pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih
awal.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**d. Toll Road Joint Operation with PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)
(continued)**

Based on the Decree of the Minister of Housing
and Regional Infrastructure No. JL.01.04-
Mn/582 dated November 7, 2002, the Jakarta
Inner Ring Road revenue sharing between
CMNP and the Company is set forth as follows:

**e. Toll Road Joint Operation with PT Bintaro
Serpong Damai (BSD)**

The Company has entered into a joint operation
agreement with BSD as toll road operator for
Pondok Aren - Serpong section based on toll
road operation and maintenance agreement
No. 004/SPK-DIR/1998 dated May 19, 1998,
which started from the date of operation until
the expiration of the toll concession for Pondok
Aren - Serpong or at the time of the termination
of the agreement, whichever ever is earlier. Based
on the Decree of the Indonesian Board of
Arbitration No. 217/1/ARB-BANI/2006 dated
August 31, 2006, the scope of the Company's
operations are as follows:

1. Operation of Pondok Ranji toll gates (East
Pondok Aren).
2. Providing patrol and safety service for toll
road users and safeguarding toll road
assets whereby the Company is dealing
with toll road users in the patrol area
including damaged vehicles and accidents
on toll roads in compliance with Standard
of Minimal Service (SPM) for toll roads
issued by the Minister of Public Works.

The term of the agreement terminates with the
end of the concession of Ulujami – Pondok Aren
toll road until 2045, unless both parties agree to
terminate the contract earlier.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**f. Konversi Pinjaman Pemegang Saham
Menjadi Setoran Modal ke PSBI**

Pada tanggal 9 Desember 2016 dan 26 Januari 2017, Perusahaan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan total nilai sebesar Rp228.951.256. Pengembalian dana telah ditentukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati yaitu sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dengan tingkat suku bunga sebesar LPS rate + 4,50% per tahun.

Perusahaan dan PSBI juga telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham, masing-masing di tanggal 12 Januari 2018, 15 Februari 2018, 31 Mei 2018, 19 Juli 2018 dan 7 Oktober 2020 sehingga jumlah pokok pinjaman pemegang saham keseluruhan menjadi sebesar Rp1.018.350 dengan tingkat suku bunga sebesar LPS rate + 4,50% per tahun.

Pada 27 Desember 2021, Perusahaan dan PSBI melakukan Pengubahan Keseluruhan Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham dengan saldo pinjaman sebesar Rp1.018.350 dan menyepakati 2 (dua) opsi pelunasan, yaitu tunai atau konversi menjadi setoran modal. Perusahaan setuju tidak mengenakan bunga atas pinjaman kepada PSBI sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal yang sama, Perusahaan dan PSBI juga menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang untuk menyepakati bunga yang timbul dari perjanjian pinjaman pemegang saham sebesar Rp271.262 dikurangi dengan kewajiban pajak yang menjadi beban Perusahaan dan tidak berbunga hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022. Kewajiban pajak yang menjadi beban Perusahaan adalah sebesar Rp40.493 dan dicatat sebagai beban lain-lain tahun 2022.

Tujuan dari pemberian pinjaman adalah untuk memenuhi setoran modal kepada PT Kereta Cepat Indonesia China.

**f. The Conversion of Shareholder Loan into
Paid-Up Capital to PSBI**

On December 9, 2016 and January 26, 2017, the Company and PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) signed a shareholder loan agreement with a total value of Rp228,951,256. The refund has been determined according to the agreed payment schedule, which is until January 25, 2018 with an interest rate of LPS rate + 4.50% per year.

The Company and PSBI also entered into shareholder loan agreements dated January 12, 2018, February 15, 2018, May 31, 2018, July 19, 2018 and October 7, 2020 and the total principal amount of the shareholder loan amounted to Rp1,018,350 with an interest rate of LPS rate + 4.50% per year.

On December 27, 2021, the Company and PSBI entered into reinstatement of the shareholder loan agreement amounting to Rp1,018,350 and agreed 2 (two) settlement options, i.e. cash repayment or conversion into paid-in capital. The Company agreed to not charge interest on PSBI's loans from January 1, 2021 until maturity date on December 31, 2022.

On the same date, the Company and PSBI also entered into a debt acknowledgement agreement to interest arising from the shareholder loan agreement amounting to Rp271,262 deducted by the tax payable borne by the Company and does not bear interest to maturity date on December 31, 2022. The tax payable borne by the Company amounted to Rp40,493 and was recorded in 2022 as other expenses.

The purpose of the loan is to meet the paid up capital to PT Kereta Cepat Indonesia China.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**f. Konversi Pinjaman Pemegang Saham
Menjadi Setoran Modal ke PSBI (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PSBI Nomor 67 tanggal 21 November 2022, pinjaman Perusahaan kepada PSBI telah dikonversi menjadi setoran modal Perusahaan di PSBI.

Partisipasi Perusahaan di PSBI merupakan bentuk penugasan Pemerintah sesuai dengan Perpres No. 107/2015. Ketentuan mengenai penugasan oleh Pemerintah ini juga diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 66 ayat 4 dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.45 BUMN Pasal 65 ayat 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan, dalam hal penugasan tersebut secara finansial tidak terlaksana/ menguntungkan.

**g. Kerja Sama Pengoperasian Jalan Tol
Jakarta Outer Ring Road (JORR)**

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Integrasi JORR No. 82/BA/Pt.6/2018 tanggal 21 September 2018 dan Perjanjian No. 28.1/KONTRAK-DIR/2019 tanggal 29 Maret 2019, pelaksanaan integrasi dan proporsi bagi hasil yang akan digunakan secara terus menerus adalah sebagai berikut:

1. PT Jakarta Lingkarbarat Satu (JLB) selaku operator Ruas JORR W1 sebesar 15,32% dari realisasi total pendapatan tol integrasi JORR;
2. PT Marga Lingkar Jakarta, Anak Perusahaan, selaku operator Ruas JORR W2U sebesar 9,59% dari realisasi total pendapatan tol integrasi JORR;
3. Perusahaan selaku operator Ruas JORR W2S, E1, E2, E3 sebesar 32,69% dari realisasi total pendapatan tol integrasi JORR;
4. Perusahaan selaku operator Ruas Ulujami-Bintaro Viaduct-Pondok Aren sebesar 5,05% dari realisasi total pendapatan tol integrasi JORR;

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**f. The Conversion of Shareholder Loan into
Paid-Up Capital to PSBI (continued)**

Based on the Deed of Statement of Resolutions of the PSBI General Meeting of Shareholders Number 67 dated November 21, 2022, the Company's loan to PSBI has been converted into the Company's paid in capital in PSBI.

The Company's participation in PSBI is a form of government assignment in accordance with Presidential Regulation No. 107/2015. Provisions regarding assignments by the Government are also regulated in Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises which has been amended into Law No. 11 of 2020 Article 66 paragraph 4 and also regulated in Government Regulation No. 45 BUMN Article 65 paragraph 3 which states that the Central Government must provide compensation for all costs that have been incurred by BUMN, including the expected margin as long as it is within a reasonable level in accordance with the assigned assignment. granted, in the event that the assignment is not financially feasible/ profitable.

**g. Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll
Road Operation Cooperation**

Based on the Official Minutes of Agreement on JORR Integration No. 82/BA/Pt.6/2018 dated September 21, 2018 and Agreement No. 28.1/KONTRAK-DIR/2019 dated March 29, 2019, the implementation of integration and the profit sharing proportion that will be used continuously are as follows:

1. *PT Jakarta Lingkarbarat Satu (JLB) as operator of JORR W1 Section is 15.32% of the total realization of JORR integrated toll revenues;*
2. *PT Marga Lingkar Jakarta, a Subsidiary, as the operator of the JORR W2U Section is 9.59% of the total realization of the JORR integration toll revenue;*
3. *The Company as operator of JORR W2S, E1, E2, E3 Sections is 32.69% of the total realization of JORR integrated toll revenues;*
4. *The Company as the operator of the Ulujami-Bintaro Viaduct-Pondok Aren Section is 5.05% of the total realization of JORR integration toll revenues;*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**45. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**g. Kerja Sama Pengoperasian Jalan Tol
Jakarta Outer Ring Road (JORR)
(lanjutan)**

5. PT Utama Karya (Persero) selaku operator Ruas JORR S sebesar 24,23% dari realisasi total pendapatan tol integrasi JORR; dan
6. PT Utama Karya (Persero) selaku operator Ruas ATP sebesar 13,12% dari realisasi total pendapatan tol integrasi JORR.

**h. Kerja Sama Pengoperasian Jalan Tol
Jakarta-Tangerang**

Perusahaan telah mengadakan kerja sama pengoperasian terpadu ruas jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak dengan PT Marga Mandalasakti (MMS) berdasarkan kontrak perjanjian No. 60/Kontrak-DIR/2017.

Kerja sama operasi terpadu diatur dalam perjanjian meliputi kegiatan manajemen pengumpulan tol, manajemen lalu lintas, dan pemeliharaan jalan tol. Perjanjian berlaku efektif sejak dilakukan integrasi yaitu pada tanggal 9 April 2017. Proporsi pendapatan bagi hasil tol sejak awal pengoperasian dengan Jasa Marga sebesar 81,58% dan MMS sebesar 18,42%.

**i. Kerja Sama Pembangunan Akses Tol KM
1+842 pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek**

Perusahaan telah mengadakan kerja sama terkait pembangunan Akses Tol KM 1+842 pada Jalan Tol Jakarta – Cikampek dengan PT Kereta Cepat Indonesia China dan PT Jasamarga Transjawa Tol berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan Aksesibilitas Stasiun Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung nomor 1 tanggal 9 Juni 2023 dibuat di hadapan Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang.

Lingkup perjanjian tersebut meliputi menyusun gambar basic design dan gambar Rencana Teknik Akhir (RTA) akses menuju dan dari tol ke arah Stasiun Halim KCJB sesuai batasan dalam perjanjian, melakukan pengurusan persetujuan gambar *basic design* dan RTA akses menuju dan dari tol ke arah Stasiun Halim KCJB kepada Kementerian PUPR, melaksanakan pembangunan akses tol menuju Stasiun Halim KCJB, dan menyediakan peralatan tol dan instalasinya untuk gerbang tol pada akses Stasiun Halim KCJB.

**45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**g. Jakarta Outer Ring Road (JORR) Toll
Road Operation Cooperation (continued)**

5. PT Utama Karya (Persero) as operator of JORR S Section is 24.23% of the total realization of JORR integration toll revenues; and
6. PT Utama Karya (Persero) as the operator of the ATP Section is 13.12% of the total realization of the JORR integration toll revenue.

**h. Jakarta-Tangerang Toll Road Operation
Cooperation**

The Company has entered into an integrated operation of Jakarta-Tangerang-Merak toll road section with PT Marga Mandalasakti (MMS) based on contract agreement No. 60/Kontrak-DIR/2017.

Integrated operational cooperation is in the agreement covering toll collection management activities, traffic management, and toll road maintenance. The agreement is effective from the integration on April 9, 2017. The proportion of toll revenue share revenue since the beginning of operation with Jasa Marga is 81.58% and MMS is 18.42%.

**i. Development of KM 1+842 Toll Access on
the Jakarta - Cikampek Toll Road
Cooperation**

The Company has entered into cooperation related to the construction of KM 1+842 Toll Access on the Jakarta - Cikampek Toll Road with PT Kereta Cepat Indonesia China and PT Jasamarga Transjawa Tol based on the Deed of Cooperation Agreement for the Development of Accessibility of Halim Station of the Jakarta Bandung Fast Train number 1 dated June 9, 2023 made before Mira Aranti Ciptadi, S.H., M.Kn., Notary in Karawang Regency.

The scope of the agreement includes preparing basic design drawings and Final Technical Plan (RTA) drawings for access to and from the toll road to Halim KCJB Station according to the limitations in the agreement, managing the approval of basic design drawings and RTA access to and from the toll road towards Halim KCJB Station to the Ministry of PUPR, carrying out the construction of toll access to Halim KCJB Station, and providing toll equipment and installation for toll gates at Halim KCJB Station access.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI

46. CONTINGENCIES

a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan

Pada tahun 1994, Perusahaan melakukan kerja sama operasi dengan PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) untuk pembangunan Jalan Tol Cikampek - Padalarang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297 tanggal 21 Desember 1994. Namun demikian, pada 18 Juli 2001, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) dengan Surat Keputusan No. 417 mencabut keputusan pemberian izin Kerja Sama Penyelenggaraan Jalan Tol antara Perusahaan dengan CGMN. Pada tanggal 25 Juli 2001, Perusahaan mengakhiri PKP dengan CGMN.

PKP No. 297 tanggal 21 Desember 1994 menyebutkan bahwa bila terjadi pengakhiran masa penyelenggaraan jalan tol lebih awal sebelum masa konsesi berakhir, maka Perusahaan berkewajiban untuk mengambil alih seluruh utang dan harus memenuhi hak Penanam Modal (CGMN).

Dalam Pasal 14.1 PKP disebutkan bahwa Perusahaan harus membayar sejumlah uang atas nilai buku jalan tol setelah dikurangi nilai kewajiban yang harus diambil alih Perusahaan.

Atas prinsip kehati-hatian, Perusahaan telah melakukan estimasi nilai aset akibat pengakhiran PKP dengan CGMN sebesar Rp202.454 yang merupakan nilai buku yang telah diaudit atas aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 1999 dengan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Perusahaan masih terus mengupayakan penyelesaian penetapan secara definitif atas jumlah liabilitas.

Perusahaan telah membentuk tim untuk mengkaji penyelesaian permasalahan akibat pengakhiran PKP Jalan Tol Cikampek - Padalarang antara Perusahaan dan CGMN.

a. Obligation Due to Termination of Concession Agreement

In 1994, the Company entered into a joint operation with PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) for construction of the Cikampek - Padalarang Toll Road as set forth in the Concession Agreement No. 297 dated December 21, 1994. However, on July 18, 2001, the Minister of Housing and Regional Infrastructure with the Letter No. 417 revoked the decision granting permission of Toll Road Joint Operation license between the Company and CGMN. On July 25, 2001, the Company terminated the Concession Agreement with CGMN.

The Concession Agreement No. 297 dated December 21, 1994 states that if there is termination of concession agreement before the concession period is due, the Company has an obligation to take over the overall liabilities and should fulfill the rights of shareholders (CGMN).

Article 14.1 of the Concession Agreement states that the Company should pay some amount over the book value of the toll road after deducting amount of liabilities taken over by the Company.

On the basis of prudent principles, the Company has estimated the asset value as a result of the termination of PKP with CGMN amounting to Rp202,454 which is the audited book value of the construction in progress as of December 31, 1999 with disclaimer opinion. The Company is still working on completing a definitive determination of the amount of the liability.

The Company has formed a team to analyze the disputed settlement that has arisen from the termination of the Cikampek-Padalarang Toll Road PKP between the Company and CGMN.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

**a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian
Kuasa Penyelenggaraan (lanjutan)**

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui surat No. AA.HK05.0.645, Perusahaan telah memberikan tanggapan atas surat dari Kementerian BUMN No. S-268/MBU/D2/2014 tanggal 10 Juni 2014 mengenai rencana pengajuan gugatan oleh Trafalgar House Construction (Jersey) Limited (THCJ) yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas CGMN melalui Arbitrase Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Februari 2017, THCJ menyampaikan surat kepada BKPM mengenai rencana pengajuan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia. Dalam hal untuk menjawab surat dari THCJ, BKPM mengundang rapat Perusahaan melalui surat No. 18/B.6/A.3/2017 tanggal 7 Maret 2017.

THCJ menyampaikan surat kepada Perusahaan No. 2018/08/JM tanggal 31 Agustus 2018 berisi:

1. THCJ meminta metode perhitungan kompensasi untuk CGMN berdasarkan PKP harus mengacu pada Nilai Wajar.
2. Selain kompensasi pada angka 1 diatas, THCJ mengklaim berhak atas kompensasi beserta bunga akibat pengakhiran PKP.
3. Selama kompensasi belum dibayarkan ke CGMN maka CGMN berhak atas pendapatan tol.

Pada tanggal 13 Juni 2019 THCJ menembuskan surat kepada Perusahaan terkait surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Rencana THCJ untuk mengajukan Gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia kepada Arbitrase Internasional sebagaimana surat yang pernah THCJ sampaikan tertanggal 14 Maret 2014 mengenai tuntutan dan gugatan yang diajukan THCJ pada sengketa CGMN.

Perusahaan secara lisan menyampaikan bahwa penyelesaian permasalahan terkait pengakhiran PKP dengan CGMN diselesaikan sesuai ketentuan dalam PKP. Dalam hal ini, pembayaran kompensasi kepada CGMN berdasarkan nilai buku CGMN yang telah diaudit oleh auditor yang ditunjuk bersama.

**a. Obligation Due to Termination of
Concession Agreement (continued)**

On June 23, 2014, through letter No. AA.HK05.0.645, the Company has responded to the letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-268/MBU/D2/2014 dated June 10, 2014, regarding the filing plan by Trafalgar House Construction (Jersey) Limited (THCJ) which acts as the majority shareholder of CGMN through International Arbitration to the government of the Republic of Indonesia.

On February 28, 2017, THCJ was sent a letter to the BKPM about the plan to propose arbitration claim against the Government of Indonesia. In the case to answer the letter of THCJ, BKPM invite the Company through a letter No. 18/B.6/A.3/2017 dated March 7, 2017.

THCJ sent a letter to the Company No. 2018/08/JM dated August 31, 2018 informed as follows:

1. *THCJ requested the calculation method of the compensation to CGMN must have based on Fair Value.*
2. *In addition to number 1 above, THCJ claimed entitlement to compensation and its interest caused by the termination of Concession Agreement.*
3. *As long as the Compensation have not fulfilled by the Company to CGMN, thus CGMN entitled to the Toll Revenue.*

On June 13, 2019 THCJ Conveyed a letter to the Company and also the General Attorney of Republic Of Indonesia concerning THCJ Intention to raise the case to the International Arbitration which has the same information as the letter on March 14, 2014 considering THCJ's claims on the dispute of CGMN.

The Company has informed verbally that the dispute settlement regarding the termination of concession agreement with CGMN shall be settled in accordance with the stipulation on the Concession Agreement. In this case, the payment of compensation to CGMN shall be based on book value CGMN which has been audited by the appointed auditor

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian
Kuasa Penyelenggaraan (lanjutan)**

Hingga 31 Desember 2023, Pihak CGMN atau THCJ tidak dapat memberikan bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar Jasa Marga untuk melakukan pembayaran dan juga tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan ataupun arbitrase oleh THCJ.

**b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo
Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol
Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol**

Sebagai dampak dari bencana luapan Lumpur PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian jalan tol Surabaya-Gempol, Perusahaan telah mengirimkan beberapa surat permintaan ganti rugi dan somasi pada tahun 2006 atas kehilangan pendapatan tol dan pengeluaran berbagai biaya kepada PT Lapindo Brantas.

Klaim kerusakan jalan tol tersebut akan meningkat menjadi klaim biaya relokasi ruas jalan tol Porong-Gempol, yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Surabaya-Gempol dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian dampak semburan Lumpur di Sidoarjo, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2006 tentang penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tanggal 3 September 2006 mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, semua biaya yang timbul sebagai akibat relokasi pembangunan jalan tol dimaksud selain biaya rehabilitasi kerusakan sarana menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2006, mengenai Penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol seksi Porong Gempol. Menyatakan antara lain sebagai berikut:

46. CONTINGENCIES (continued)

**a. Obligation Due to Termination of
Concession Agreement (continued)**

Until 31 December 2023, CGMN or THCJ has not been able to provide evidence of expenditure as a basis for Jasa Marga to make payments and also no lawsuit has been filed to the court or arbitration by THCJ.

**b. Claim of Compensation Against
PT Lapindo Brantas and Closing of Part of
the Surabaya-Gempol Toll Road Section
Porong-Gempol**

As a consequence of the mud flood disaster in PT Lapindo Brantas was damaged part of the Surabaya-Gempol toll road. In 2006, the Company has submitted several claims of compensation to PT Lapindo Brantas covering loss of toll revenues and expenditures.

The claim for damage to the toll roads is expected to increase and later include a claim for cost to relocate the Porong-Gempol Section toll road and will be settled in connection with the stipulation in the Concession Agreement of the Surabaya-Gempol toll road and the Government policy in settlement of the effects of the mud flood disaster at Sidoarjo in accordance with the Decree of the Minister of Public Works No. 394/KPTS/M/2006 dated November 30, 2006 regarding the Closure of Part of the Surabaya-Gempol Toll Road.

Based on the Decree of the President No. 13 Year 2006 dated September 3, 2006 regarding the National Team for Mud Floods Disaster at Sidoarjo, all expenditures incurred due to the relocation of toll road development, except for rehabilitation expenses for damaged facilities, will become the responsibility of PT Lapindo Brantas. In addition, the Decree of the Minister of Public Works No. 394/KPTS/M/2006 dated November 30, 2006 related to the Closure of Part of the Surabaya-Gempol Toll Road Porong-Gempol Section provides:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol (lanjutan)

1. Menutup dan tidak mengoperasikan kembali sebagian jalan tol Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol; dan
2. Segala hal yang timbul pada pengusahaan jalan tol Surabaya-Gempol sebagai akibat dari penutupan seksi Porong-Gempol akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam PPJT Surabaya-Gempol dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian dampak semburan lumpur di Sidoarjo.

Berdasarkan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-196/MBU/2007 tanggal 4 April 2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan sehubungan dengan kerugian atas hilangnya sebagian aset jalan tol seksi Porong-Gempol, maka sejalan dengan Undang-Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, klaim atas kerugian dimaksud seharusnya dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum kepada PT Lapindo Brantas.

Pada tanggal 17 Juli 2007, melalui surat Perusahaan No. AA.TN.02.1153, Perusahaan mengajukan tuntutan ganti rugi akibat genangan lumpur pada ruas jalan tol seksi Porong-Gempol kepada PT Lapindo Brantas. Klaim atas kerugian kehilangan pendapatan tol dan biaya tambahan lainnya akibat genangan lumpur pada ruas Porong-Gempol sampai dengan bulan Mei 2007 adalah sebesar Rp24.725 dan klaim atas kerusakan jalan tol sebesar Rp16.334.

Dalam Surat Perusahaan No.AA.KU.02.1268. tanggal 7 Agustus 2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum, Perusahaan menyampaikan antara lain mengenai kesediaan Perusahaan untuk membiayai pembangunan relokasi ruas jalan tol Porong-Gempol dengan memperhitungkan pengembalian investasi dari tarif baru (termasuk pengembalian akibat tidak berfungsinya ruas jalan tol Porong-Gempol).

46. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya-Gempol Toll Road Section Porong-Gempol (continued)

1. To close and stop the operation of a part of the Surabaya-Gempol toll road Porong Gempol Section; and
2. Those all matter which impacted on the operation of the Surabaya-Gempol toll road as a result of the closure of the Porong Gempol Section will be handled according to the regulation of Surabaya-Gempol Toll Road Concession Agreement and the Government policy for settlement of the effect of the mud flood disaster at Sidoarjo.

Based on the Minister of State-Owned Enterprises letter No. S-196/MBU/2007 dated April 4, 2007 regarding the loss of part of Porong-Gempol toll road assets and according to the Road Law No. 38 of 2004 and the State Finance Law No. 17 of 2003, the claim for losses should be submitted by the Government through the Department of Public Works to PT Lapindo Brantas.

On July 17, 2007, through the Company's letter No. AA.TN.02.1153, the Company claimed compensation caused by mud floods in Porong Gempol Section to PT Lapindo Brantas. The claim for loss of toll revenue and additional expenditures arising from mud in Porong-Gempol Section until May 2007 amounted to Rp24,725 and the claim for damage to the toll road amounted to Rp16,334.

Based on the Company's Letter No.AA.KU.02.1268 dated August 7, 2007, to the Minister of Public Works, the Company delivered such matter as readiness to finance development for relocation Porong-Gempol toll road by estimating the reversion of investment from new tariff (included reversion caused by un-function Porong-Gempol toll road section).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo
Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol
Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
(lanjutan)**

Surat Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/ Menteri Pekerjaan Umum No. 20/DPBPLS/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Menteri Negara BUMN menyebutkan antara lain mengenai usulan pelaksanaan konstruksi jalan tol Porong-Gempol dapat dilakukan oleh Perusahaan.

Pada tanggal 14 Januari 2008, melalui surat Perusahaan No. AA.TN.02.50 kepada Menteri Negara BUMN, Perusahaan menyampaikan antara lain mengenai jumlah klaim total kerugian sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp24.725 dan permohonan bantuan agar Pemerintah memfasilitasi melalui Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Lapindo Brantas dengan musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat ditempuh dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan.

Pada tanggal 13 Mei 2009, melalui surat Perusahaan No. AA.TN.02.730 kepada Direktur Utama PT Lapindo Brantas, Perusahaan kembali mengajukan tuntutan ganti rugi akibat penutupan Ruas Jalan Tol Porong-Gempol. Adapun klaim atas kehilangan pendapatan tol dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan bulan Maret 2009 beserta biaya-biaya lainnya, termasuk biaya pembongkaran Jembatan Tol Porong adalah sebesar Rp71.976.

Pada tanggal 17 September 2009, melalui surat Perusahaan No. AA.TN.02.1286 kepada Direktur Utama PT Lapindo Brantas, Perusahaan kembali mengajukan tambahan kenaikan besaran rugi atas kehilangan pendapatan tol sebesar Rp76.942 dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan bulan Juni 2009 yakni sebesar Rp4.965.

46. CONTINGENCIES (continued)

**b. Claim of Compensation Against
PT Lapindo Brantas and Closing of Part of
the Surabaya-Gempol Toll Road Section
Porong-Gempol (continued)**

The letter of the Chairman of Direction Board of Mud Prevention Agency Sidoarjo/ the Minister of Public Works No. 20/DPBPLS/2007 dated September 24, 2007 to Minister of State-Owned Enterprises mentioned such proposal of construction and implementation of Porong-Gempol toll road can be performed by the Company.

On January 14, 2008, through the Company's letter No. AA.TN.02.50 to the Minister of State-Owned Enterprises, the Company reported loss until May 2007 amounted to Rp24,725 and requested assistance from the Government to facilitate through Law Bureau and Public Relation of the Minister of State-Owned Enterprises in solving the problem with PT Lapindo Brantas by deliberation. Otherwise, the Company will take the case to the court.

On May 13, 2009, through letter No. AA.TN.02.730 to the President Director of PT Lapindo Brantas, the Company claimed compensation due to closure of the Porong-Gempol Toll Road Section. The claim for loss of toll revenue, loss of interest income and other expenses, including demolishing cost of Porong Toll Bridge until March 2009 totaling Rp71,976.

On September 17, 2009, through letter No. AA.TN.02.1286 to the President Director of PT Lapindo Brantas, the Company claimed additional compensation for the loss of toll revenue amounting to Rp76,942 and the loss of interest income until June 2009 amounted to Rp4,965.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo
Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol
Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
(lanjutan)**

Pada tanggal 9 Februari 2010, Perusahaan mengirimkan surat No. AA.PR.02.94 tentang Relokasi Jalan Tol Ruas Porong-Gempol kepada BPJT yang ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN. Surat tersebut dibuat dengan dasar bahwa Pemerintah (Kementerian PUPR) mempunyai rencana untuk melakukan relokasi terhadap jalan tol Ruas Porong-Gempol yang terendam luapan lumpur Sidoarjo.

Pada tanggal 7 Februari 2011 BPJT melalui suratnya No. 70/BPJT/KE/JI.01.03/2011, memberikan persetujuan untuk melakukan pelaksanaan relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol ruas Porong-Gempol yang dimana, lahan yang menjadi sasaran proyek relokasi telah mencapai pembebasan sebesar 81,77% dan terus berjalan.

Pada tahun 2015, BPJT dan Perusahaan telah sepakat untuk menentukan besaran tarif yang diterapkan pada Jalan Tol Surabaya-Gempol pada Ruas Porong-Gempol, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tentang Relokasi Ruas Porong-Gempol pada Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Gempol No. 10/BA/PT.6/2015.

Sejak bulan Mei 2011, Perusahaan telah melakukan aktivitas pembangunan relokasi jalan tol ruas Porong-Gempol. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menyelesaikan pembangunan paket terakhir ruas Porong-Gempol seksi Porong-Kejapanan sesuai Berita Acara No. 66.5/BA-DIR/2018 dan No. 66.6/BA-DIR/2018.

Pada tanggal 14 Januari 2019, jalan tol ruas Porong - Gempol seksi Porong Kejapanan telah dioperasikan.

Pada tanggal 30 Maret 2020, Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menetapkan kompensasi bagi Perusahaan sesuai dengan SK Menteri PUPR No. BM.06.03-MN/587 tentang Perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Surabaya-Gempol. Keputusan tersebut menegaskan terkait izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk membuat rute baru atas ruas jalan tol yang terdampak lumpur PT Lapindo Brantas.

46. CONTINGENCIES (continued)

**b. Claim of Compensation Against
PT Lapindo Brantas and Closing of Part of
the Surabaya-Gempol Toll Road Section
Porong-Gempol (continued)**

On February 9, 2010, the Company sent letter No. AA.PR.02.94 regarding to relocation of Porong-Gempol toll road section to BPJT and the copy was forwarded to the Minister of State-Owned Enterprises. The letter was made based on the plan of Government (Ministry of PUPR) to relocate Porong-Gempol Toll Road affected by the Sidoarjo mudflow.

On February 7, 2011, BPJT through its letter No. 70/BPJT/KE/JI.01.03/2011, gave an approval to carry out the relocation of the Surabaya-Gempol Toll Road in the Porong-Gempol section, where the target of the relocation project had reached 81.77% and keep going.

In 2015, BPJT and the Company agreed to determine the tariff rate applied to the Surabaya-Gempol Toll Road on the Porong-Gempol Section, as stated in the Minutes of Agreement on the Relocation of the Porong-Gempol Section on the Operation of the Surabaya-Gempol Toll Road No. 10/BA/PT.6/2015.

Since May 2011, the Company has carried out construction activities for the relocation of the Porong-Gempol toll road. As of December 31, 2019, the Company has completed the construction of the last package of the Porong-Gempol section of the Porong-Kejapanan section according to Minutes No. 66.5/BA-DIR/2018 and No. 66.6/BA-DIR/2018.

On January 14, 2019, the Porong - Gempol toll road section of the Porong Kejapanan section has been operated.

On March 30, 2020, the Government through Ministry of PUPR has set compensation for the Company in accordance with the Decree of Ministry of PUPR No. BM.06.03-MN/587 about the Amendment of Toll Road Concession of Surabaya-Gempol. The decision confirms the permission given to the Company to establish new toll road route to mud-affected toll road section of PT Lapindo Brantas.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo
Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol
Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
(lanjutan)**

Pada tanggal 9 September 2022 Perusahaan melalui PT Jasamarga Transjawa Tol dengan BPKP Provinsi Jawa Timur dan BPJT telah melakukan pembahasan terkait review terhadap perubahan rencana usaha pada perusahaan jalan tol Surabaya-Gempol.

Pada tanggal 12 September 2022, BPKP melalui surat nomor LHP-597/PW13/2/2022 perihal Laporan Hasil Reviu Atas Perubahan Rencana Usaha pada Pengusaha Jalan Tol Surabaya – Gempol menyampaikan laporan hasil reviu yang kesimpulannya adalah

- a. Nilai total investasi perusahaan Jalan Tol Surabaya – Gempol Ruas Porong – Gempol dengan adanya perubahan lingkup adalah sebesar Rp2.688.289.
- b. Dengan masa konsesi tetap 40 tahun dan tarif yang berlaku untuk ruas Porong – Gempol sebesar Rp912/Km (rupiah penuh), distribusi kompensasi tarif tambahan

Pada ruas Waru – Porong sebesar Rp201/Km (rupiah penuh) dan ruas Dupak – Waru sebesar Rp1.500, serta dengan memperhitungkan koreksi pada nilai investasi dan arus kas financial model, maka untuk mempertahankan IRR (*Internal Rate of Return*) sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan BPJT selaku wakil pemerintah dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku BUJT pada 14,84%, penyesuaian tarif regular sesuai model keuangan yang seharusnya dilakukan pada Oktober 2021 disesuaikan menjadi April 2023.

Dalam surat tersebut BPKP juga menyampaikan saran kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol agar hasil reviu BPKP menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam Usulan Perubahan Rencana Usaha Perusahaan Jalan Tol Surabaya – Gempol Ruas Porong – Gempol kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

46. CONTINGENCIES (continued)

**b. Claim of Compensation Against
PT Lapindo Brantas and Closing of Part of
the Surabaya-Gempol Toll Road Section
Porong-Gempol (continued)**

On September 9, 2022, the Company through PT Jasamarga Transjawa Tol with BPKP East Java Province and BPJT has held discussions related to the review of changes to the business plan on the Surabaya-Gempol toll road operation.

On September 12, 2022, BPKP through letter number LHP-597/PW13/2/2022 regarding the Review Report on Changes in Business Plans for Surabaya - Gempol Toll Road Entrepreneurs submitted a review report whose conclusions were

- a. The total investment value of the Surabaya - Gempol Porong - Gempol Toll Road with a change in scope is Rp2,688,289
- b. With a fixed concession period of 40 years and the applicable tariff for the Porong - Gempol section is Rp912/Km (full rupiah), the distribution of additional tariff

Compensation on the Waru - Porong section is Rp201/Km (full rupiah) and the Dupak - Waru section of Rp1,500, and taking into account the correction in investment value and financial model cash flow, to maintain the IRR in accordance with the agreement made by BPJT as the government representative and PT Jasa Marga (Persero) Tbk as BUJT at 14.84%, regular tariff adjustment according to the financial model that was supposed to be carried out in October 2021 was adjusted to April 2023.

In the letter, BPKP also conveyed suggestions to the Head of the Toll Road Regulatory Agency so that the results of the BPKP review would be input and consideration in the Proposed Changes to the Surabaya - Gempol Toll Road Business Plan for the Porong - Gempol Section to the Minister of Public Works and Public Housing.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo
Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol
Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
(lanjutan)**

Pada tanggal 5 Desember 2022, BPJT dengan Perusahaan melalui PT Jasamarga Transjawa Tol membuat berita acara evaluasi perubahan rencana usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Surabaya – Gempol ruas Porong – Gempol, dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Para pihak menyepakati besaran biaya investasi yang wajar yang dapat dimasukkan dalam perhitungan perubahan rencana usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Surabaya – Gempol ruas Porong – Gempol adalah sebesar Rp2.688.289.
- b. Dengan mempertimbangkan masa konsesi tetap 40 tahun terhitung sejak tanggal Satu Januari Dua Ribu Lima (1 Januari 2005) dan tarif yang berlaku untuk ruas Porong – Gempol sebesar Rp912/km (rupiah penuh), distribusi kompensasi tarif tambahan pada ruas Waru – Porong sebesar Rp201/km (rupiah penuh) dan ruas Dupak – Waru sebesar Rp1.500 (rupiah penuh), serta dengan memperhitungkan koreksi pada nilai investasi dan arus kas financial model, maka untuk mempertahankan IRR sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan BPJT selaku wakil pemerintah dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku BUJT pada 14,84%, penyesuaian tarif regular sesuai model keuangan yang seharusnya dilakukan pada Oktober 2021 disesuaikan menjadi April 2023.
- c. Mempertimbangkan bahwa reviu BPKP dilaksanakan terhadap rencana usaha Porong – Gempol namun penyesuaian tarif dilaksanakan bersamaan untuk keseluruhan ruas Surabaya – Gempol (termasuk Porong – Gempol) dan mengingat penundaan tarif Surabaya – Gempol pada Tahun 2019 yang seharusnya dilaksanakan pada November 2019 (2 Tahun setelah Kepmen PUPR Tahun 2017) menjadi Juni 2020 (Kepmen PUPR Tahun 2020), maka periode inflasi untuk segmen Surabaya – Gempol (di luar Porong – Gempol) dihitung sejak batas akhir periode inflasi pada penyesuaian tarif tahun 2020 (November 2019) sampai dengan jadwal penyesuaian tarif atas rekomendasi BPKP (April 2023).

46. CONTINGENCIES (continued)

**b. Claim of Compensation Against
PT Lapindo Brantas and Closing of Part of
the Surabaya-Gempol Toll Road Section
Porong-Gempol (continued)**

On December 5, 2022, BPJT and the Company through PT Jasamarga Transjawa Tol made minutes of evaluation of changes in business plans on the Surabaya – Gempol Porong – Gempol Toll Road Concession, with the following conclusion of the agreement:

- a. The parties agree on a reasonable amount of investment costs that can be included in the calculation of changes to the business plan of the Surabaya – Gempol Toll Road Concession Porong - Gempol section is Rp2,688,289.
- b. Taking into account the fixed concession period of 40 years starting from the First of January Two Thousand Five (January 1, 2005) and the applicable tariff for the Porong – Gempol section of Rp912/km (full rupiah), the distribution of additional tariff compensation on the Waru – Porong section of Rp201/km (full rupiah) and the Dupak – Waru section of Rp1,500 (full rupiah), and taking into account corrections in Investment and financial model cash flow, then to maintain the IRR in accordance with the agreement made by BPJT as the government representative and PT Jasa Marga (Persero) Tbk as BUJT at 14.84%, regular tariff adjustments according to the financial model that should have been carried out in October 2021 was adjusted to April 2023.
- c. Considering that the BPKP review was carried out on the Porong - Gempol business plan but the tariff adjustment was carried out simultaneously for the entire Surabaya - Gempol section (including Porong - Gempol) and considering the postponement of the Surabaya - Gempol tariff in 2019 which was supposed to be carried out in November 2019 (2 years after the PUPR Decree in 2017) to June 2020 (PUPR Decree in 2020), the inflation period for the Surabaya - Gempol segment (outside Porong - Gempol) is calculated from the limit the end of the inflation period in the 2020 tariff adjustment (November 2019) until the scheduled tariff adjustment on the recommendation of BPKP (April 2023).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo
Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol
Surabaya-Gempol Seksi Porong-Gempol
(lanjutan)**

- d. Berita Acara akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usulan perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Surabaya – Gempol Ruas Porong – Gempol kepada Menteri PUPR.

Kesepakatan dalam berita acara tersebut berlaku efektif setelah BPJT mendapatkan persetujuan dari Menteri PUPR.

Pada tanggal 6 Januari 2023, Menteri PUPR telah memberikan persetujuan atas Hasil Evaluasi Pengusahaan Jalan Tol Surabaya – Gempol Ruas Porong – Gempol yang telah memperhitungkan kompensasi atas relokasi ruas Porong-Gempol sebagai akibat dari bencana lumpur Lapindo. Persetujuan Menteri PUPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Amandemen III PPJT Ruas Surabaya – Gempol Nomor 23 tanggal 17 Januari 2023 dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, SH, Notaris di Jakarta.

**c. Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah
untuk Jalan Tol**

Perusahaan masih menghadapi perkara litigasi/gugatan dari beberapa orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol JORR W2, JORR E1, Jalan Tol Pondok Aren - Ulujami, Gempol-Pasuruan, dan Jalan Tol Belmera. Penanganan perkara litigasi tersebut masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Pada akhir tahun 31 Desember 2023, Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya provisi.

d. Penggantian Lahan

JBT, Entitas Anak, memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di area lahan yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III). Karena pembangunan gedung kantor tersebut di area lahan AP I dan Pelindo III, maka JBT memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

46. CONTINGENCIES (continued)

**b. Claim of Compensation Against
PT Lapindo Brantas and Closing of Part of
the Surabaya-Gempol Toll Road Section
Porong-Gempol (continued)**

- d. *The Minutes will be used as consideration in the proposed changes to the Surabaya – Gempol Toll Road Business Plan for the Porong – Gempol Section to the Minister of PUPR.*

The agreement on official report became effective after BPJT obtained approval from the Minister of PUPR.

On January 6, 2023, the Minister of PUPR has given approval to the Evaluation Results of the Surabaya – Gempol Toll Road Exploitation of the Porong – Gempol Section which has taken into account compensation for the relocation of the Porong - Gempol section as a result of the Lapindo mud disaster. The approval of the Minister of PUPR was then followed up by the signing of Deed of Amendment III of PPJT Surabaya - Gempol Section Number 23 dated January 17, 2023 made in front of Rina Utami Djauhari, SH, Notary in Jakarta.

c. Claims from Land Owners for Toll Road

The Company is facing several litigation cases filed by parties the construction of claimed to be the owners of land whose land is used for Semarang Toll Road C Section, JORR W2 Toll Road Section, JORR E1 Toll Road Section, Pondok Aren-Ulujami Toll Road, Gempol-Pasuruan and Belmera Toll Gate. These litigation cases are still under trial in the District Courts, the High Courts and the Supreme Court.

At the end of the year December 31, 2023, the Company believes that no provision is required.

d. Land Exchange

JBT, a Subsidiary, has a liability to construct office building as required in PPJT. The construction of office building will be conducted in land owned by PT Angkasa Pura I (AP I) and PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III). Since the construction of the office building conducted in land owned by AP I and Pelindo III, JBT has liabilities to give the land compensation to AP I and Pelindo III as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

d. Penggantian Lahan (lanjutan)

d. Land Exchange (continued)

No./ No.	Dimiliki/ Owned by	Area/ Area	NJOP/ SVTO (Rp)	Harga Penilaian/ Appraisal Price (Rp)
1.	Angkasa Pura I	3.404 m ²	3.581	29.291
2.	Pelindo III (darat)	522 m ²	1.227	2.589
3.	Pelindo III (perairan)	41.490 m ²	-	-
Total			4.808	31.880

JBT menerima surat tembusan dari Dirjen Bina Marga No. TB09.02-DB/496 tanggal 16 Juni 2017 Perihal Tanah HPL Angkasa Pura I. Dalam surat tersebut Dirjen Bina Marga berpendapat bahwa lahan HPL milik PT Angkasa Pura I tidak dapat diberikan ganti rugi kecuali terhadap bangunan, tanaman, dan benda-benda di atas lahan HPL.

JBT received a copy letter from the Directorate General ("DG") of Highways No. TB09.02-DB/496 dated June 16, 2017 regarding the Land of HPL Angkasa Pura I. In the letter of DG Bina Marga believes that PT Angkasa Pura I HPL land can not be given compensation for building, plants and objects on HPL land.

JBT memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di akses masuk tol di jalan Pelabuhan Benoa. Luas tanah yang akan dibangun kantor oleh Perseroan seluas 1.150 m².

JBT has an obligation to build office buildings in accordance with the provisions in PPJT. The construction of the office building will be carried out at toll entry access on the Benoa Harbor road. The total land to be built by Office is obtained by the Company with an area of 1,150 sqm.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, JBT telah menandatangani Akta Jual Beli No. 4 tanggal 11 Januari 2019 dan Akta Kuasa Jual No. 5 tanggal 11 Januari 2019 dengan nilai jual tanah yang diperoleh JBT sebesar Rp13.200.

As of December 31, 2019, JBT has signed the Sale and Purchase Deed No. 4 of January 11, 2019 and Deed of Sale No. 5 January 11, 2019 with land value of Rp13,200.

Sampai dengan tahun 2023 sesuai surat tersebut Dirjen Bina Marga berpendapat bahwa lahan HPL milik PT Angkasa Pura I tidak dapat diberikan ganti rugi kecuali terhadap bangunan, tanaman, dan benda-benda di atas lahan HPL.

Until 2023, according to the letter, the Director General of Highways believes that HPL land owned by PT Angkasa Pura I cannot be compensated except for buildings, plants, and objects on HPL land.

e. Pengembalian Investasi Pemerintah

e. Return on Government Investment

JMKT, Entitas Anak, wajib mengembalikan investasi Pemerintah sebesar Rp178.000 (nilai kini 2013) yang dilakukan atas pembangunan ruas jalan tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi untuk seksi 1 dan 2. Berdasarkan lampiran dalam PPJT, investasi Pemerintah akan dibayarkan pada tahun 2033, setelah utang bank sindikasi dilunasi seluruhnya. Pada tanggal 7 Mei 2018, berita acara serah terima penyelesaian seksi 1 dan 2 telah ditandatangani dan JMKT telah mencatatkan utang kepada pemerintah tersebut.

JMKT, a subsidiary, is obliged to return the Government's investment amounted to Rp178,000 (present value of 2013) made on the construction of toll road Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi sections I and II. According to the minutes attached on PPJT, such investment will be returned to the government in 2033, after syndicated bank loan is fully repaid. On May 7, 2018, the hand over document I and II was signed and JMKT recorded the payable to government.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

e. Pengembalian Investasi Pemerintah (lanjutan)

JMB, Entitas Anak, wajib mengembalikan investasi Pemerintah sebesar Rp356.800 yang dilakukan atas pembangunan ruas tol dari Ring Road Manado sampai dengan SS Air Madidi sepanjang 14 Km. Investasi tersebut akan dikembalikan sesuai berita acara yang terlampir di PPJT selambat-lambatnya tahun 2054.

Meskipun berita acara serah terima belum ditandatangani, ruas tol tersebut telah beroperasi komersial pada tanggal 30 Oktober 2020 berdasarkan SK Menteri, sehingga sejak tanggal tersebut, JMB telah mengakui utang kepada Pemerintah tersebut (Catatan 22).

f. Kompensasi Pengembalian Aset Tanah Jalan Tol Semarang-Demak

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 367/KPTS/1997 tanggal 29 Agustus 1997. PT Marga Mawatindo Esprit (MME) dan Perusahaan mendapatkan izin kerja sama penyelenggaraan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak.

Pada tanggal 20 September 1997 pembangunan jalan tol ditangguhkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2001, akibat pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP), PT MME melakukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pada tahun 2002, Perusahaan menerima surat keputusan dari BANI yang berisi:

- a. Membayar ganti rugi kepada PT MME sebesar Rp8.141 dan bunga 8% per tahun.
- b. Membayar biaya pembebasan tanah sebesar Rp11.831 ditambah bunga 8% per tahun.
- c. Membayar biaya arbitrase dan biaya administrasi masing-masing 50%.

Pada tanggal 31 Desember 2002, Perusahaan telah melunasi semua kewajiban.

e. Return on Government Investment (Continued)

JMB, a subsidiary, is obliged to return the Government's investment amounting to Rp356,800 made on the construction of toll road from Ring Road Manado until SS Air Madidi ranging 14 Km. The investment will be returned according to the minutes attached on PPJT at the latest in year 2054.

Despite the hand over document is not yet signed, the toll roads have been operating commercially since October 30, 2020 based on Minister Decree, so since that date, JMB has recognized the amount payable to the Government (Note 22).

f. Compensation for Returning Land Assets for Semarang-Demak Toll Road

Based on the Decree of the Minister of Public Works No. 367/KPTS/1997 dated August 29, 1997. PT Marga Mawatindo Esprit (MME) and the Company obtained a joint permit for the implementation of the Semarang-Demak Toll Road Project.

On September 20, 1997 the construction of the toll road was suspended by the government.

In 2001, due to the termination of the Proxy for Implementation (PKP), PT MME filed a lawsuit against the Indonesian National Arbitration Board (BANI).

In 2002, the Company received a decree from BANI which contained:

- a. *Paid compensation to PT MME amounted to Rp8,141 and interest of 8% per annum.*
- b. *Paid land acquisition costs of Rp11,831 plus 8% interest per annum.*
- c. *Paid arbitration fees and administration fees of 50% each.*

On December 31, 2002, the Company has paid all obligation.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

**f. Kompensasi Pengembalian Aset Tanah
Jalan Tol Semarang-Demak (lanjutan)**

Pada tanggal 27 Mei 2020 atas Berita Acara Serah Terima Tanah Bebas Pada Jalan Tol Semarang-Demak No. 29/BA-DIR/2020, No. 6/BA/Db/2020, No. BA.35/BPJT/2020. Perusahaan menyerahkan Tanah Semarang-Demak kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian belum terdapat lanjutan atas pengajuan kompensasi yang secara resmi diterima oleh Perusahaan.

**g. Gugatan Perjanjian Pembangunan
Simpang Susun Karawang Barat STA
47+130**

Pada tanggal 27 November 2007 Perusahaan dan PT Maligi Permata Industrial Estate (Maligi) telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Barat Jalan Tol Jakarta-Cikampek STA 47+130 No. 78/BA-DIR/2007.

Pada tanggal 1 Mei 2009, Perusahaan dan Maligi membuat Perjanjian Pembangunan Modifikasi/ perluasan Simpang Susun Karawang Barat STA. 47+130, dimana perjanjian ini mencabut perjanjian Akta Perjanjian No. 2 tanggal 13 Desember 2001 Pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Barat sebagaimana angka 3 di atas.

Kewajiban Maligi berdasarkan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembangunan Simpang susun sesuai dengan Jangka Waktu Membangun yang ditetapkan oleh Menteri PUPR, yaitu 2 tahun sejak tanggal 12 Juni 2007.
- b. Menyerahkan jaminan pembangunan Simpang susun berupa Sertifikat Hak Atas Tanah seluas 5.750 m² yang terletak di Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe, Kab Karawang, Jawa Barat.
- c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kerusakan simpang susun dalam jangka waktu 2 tahun setelah tanggal pengoperasian, serta menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Proyek dalam bentuk Bank Garansi.

**f. Compensation for Returning Land Assets
for Semarang-Demak Toll Road (continued)**

On May 27, 2020, on the Minutes of Handover of Free Land on the Semarang-Demak Toll Road No. 29/BA-DIR/2020, No. 6/BA/Db/2020, No. BA.35/BPJT/2020. The Company handed over the Semarang-Demak land to the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Housing.

Until the issuance of these consolidated financial statements, there has been no further compensation application officially received by the Company.

**g. Road Interchange Karawang Barat STA
47+130 Development Agreement Lawsuit**

On November 27, 2007 the Company and PT Maligi Permata Industrial Estate (Maligi) signed the Minutes of the Modification of the West Karawang Interchange Modification Development Agreement Jakarta-Cikampek Toll Road STA 47+130 No. 78/BA-DIR/2007.

On May 1, 2009, the Company and Maligi made a Modification/ Extension Development Agreement for the Karawang Barat STA Interchange. 47+130, where this agreement revokes the Deed of Agreement No. 2 dated December 13, 2001 on the Construction of the Modified Intersection of West Karawang as stated in number 3 above.

Maligi's obligations under the agreement are as follows:

- a. Carry out construction of Interchanges in accordance with the Building Period stipulated by the Minister of PUPR, which is 2 years since June 12, 2007.
- b. Submit guarantee for the construction of the Interchange in the form of a Certificate of Land Rights covering an area of 5,750 sqm located in Sukaluyu Village, Teluk Jambe District, Karawang Regency, West Java.
- c. Perform maintenance and repairs to damage to interchanges within a period of 2 years after the date of operation, and submit maintenance guarantees of 5% of the Project Value in the form of a Bank Guarantee.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**g. Gugatan Perjanjian Pembangunan
Simpang Susun Karawang Barat STA
47+130 (lanjutan)**

- d. Menanggung kekurangan biaya *Operation Management* (OM) sampai akumulasi pendapatan tol dalam satu tahun lebih besar atau sama besar dengan Biaya OM; atau volume lalu lintas aktual di tahun 2014 telah mencapai 49.749 kendaraan per hari.
- e. Perhitungan kekurangan biaya *Operation Management* (OM) dihitung selama satu tahun dan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Perusahaan dan Maligi, dikurangi uang sebesar Rp15.227 yang sudah dibayar oleh Maligi pada tahun 2002. Adapun formula perhitungan pendapatan tol bangunan diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Perjanjian.

Pada tanggal 7 Februari 2013 Perusahaan dan Maligi mengadakan rapat untuk membahas mekanisme penagihan biaya OM terkait modifikasi Simpang Susun Karawang Barat. Berdasarkan hasil rapat Direksi Perusahaan dan Maligi disepakati membentuk tim Evaluasi Perhitungan kekurangan Biaya OM melalui Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2013 dan 274/MPIE/9/13 tanggal 18 September 2013.

Pada tanggal 16 September 2015 Perusahaan dan Maligi mengadakan rapat mengenai pembahasan realisasi biaya operasional dan pemeliharaan serta pendapatan tol Simpang Susun Karawang Barat dengan hasil antara lain:

- a. Maligi menjelaskan bahwa perhitungan pendapatan tol bangkitan tidak dapat dilakukan dengan hanya perjanjian, melainkan dengan kajian ulang lalu lintas yang dilakukan oleh Konsultan pada tahun 2008; dan
- b. Perusahaan meminta Maligi untuk mengundang konsultan studi lalu lintas tersebut.

Perusahaan melalui surat No. BC.KU02.672 tanggal 8 Februari 2017 menyampaikan Tagihan Beban Operasional dan *Maintenance* Gerbang Tol Karawang Barat 2 mulai triwulan kedua tahun 2009 sampai dengan triwulan keempat tahun 2016 sejumlah Rp23.068.

46. CONTINGENCIES (continued)

**g. Road Interchange Karawang Barat STA
47+130 Development Agreement Lawsuit
(continued)**

- d. Bear the shortfall in *Operation Management* (OM) costs until the accumulated generated toll revenue in one year is greater or equal to OM Costs; or the actual traffic volume in 2014 has reached 49,749 vehicles per day.
- e. The calculation of *Operation Management* (OM) cost shortages is calculated for one year and is carried out by a team formed by the Company and Maligi, minus Rp15,227 already paid by Maligi in 2002. The formula for calculating the generated toll revenue is regulated in Article 10 paragraph 3 of the Agreement .

On February 7, 2013 the Company and Maligi held a meeting to discuss the OM fee collection mechanism related to the modification of the West Karawang Intersection. Based on the results of the meeting of the Directors of the Company and Maligi which agreed to form an Evaluation Team for the Calculation of OM Cost Shortfalls through Directors Decree No. 129/KPTS/2013 and 274/MPIE/9/13 dated September 18, 2013.

On September 16, 2015 the Company and Maligi held a meeting to discuss of the realization of operational and maintenance costs and revenue of the Simpang Susun Karawang Barat toll road with the results including:

- a. Maligi explained that the calculation of the toll revenue cannot be done through an agreement only, but with a traffic review conducted by a Consultant in 2008; and
- b. The Company asked Maligi to invite the traffic study consultant.

The Company through a letter No. BC.KU02.672 dated February 8, 2017 submitted invoice for the Operational and Maintenance Charges of West Karawang Toll Gate 2 from second quarter of 2009 to fourth quarter of 2016 totaling Rp23,068.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**g. Gugatan Perjanjian Pembangunan
Simpang Susun Karawang Barat STA
47+130 (lanjutan)**

Maligi melalui surat No. 190/FA/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 menyampaikan kepada Perusahaan bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Maligi, total beban yang atas gerbang tol Karawang Barat yang harus ditanggung Maligi adalah Rp8 dan meminta Perusahaan untuk melakukan revisi atas faktur yang sebelumnya dikirim.

Pada tanggal 3 Mei 2017, Perusahaan melalui Jakarta-Cikampek dan Maligi melaksanakan rapat koordinasi. Pada rapat tersebut, Perusahaan dan Maligi sepakat untuk melakukan koreksi atas perhitungan kekurangan biaya OM. Atas koreksi perhitungan tersebut, Perusahaan menyampaikan perhitungan kekurangan biaya OM menjadi Rp16.722. Biaya ini belum termasuk defisit yang harus ditanggung Maligi sebesar Rp1.495. Hasil rapat ini telah disampaikan notulen rapat pada tanggal 8 Mei 2017 melalui surat No. CB.TR05.1831.

Pada tanggal 20 Juni 2017, Maligi melalui surat No. 94/MPIE/VI/2017 mengembalikan faktur tagihan Perusahaan dikarenakan angka dalam faktur berbeda dengan angka berdasarkan hasil audit Maligi.

Selanjutnya, Maligi secara sepihak menitipkan kekurangan biaya operasional dan pemeliharaan Simpang Susun Karawang Barat ke Pengadilan Negeri Karawang sejumlah Rp7.947 dan Pengadilan Negeri Karawang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyampaikan hal penawaran tersebut kepada Perusahaan pada tanggal 22 Juni 2017.

Perusahaan, melalui surat No. AA.HK02.1086 tanggal 11 Juli 2017 menolak penawaran Maligi karena jumlahnya tidak sesuai dengan kewajiban Maligi dalam perjanjian.

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan menerima relaas panggilan sidang pertama atas gugatan yang diajukan Maligi kepada Perusahaan pada Pengadilan Negeri Karawang dengan perkara No. 104/Pdt/G/2018/PN.Kwg. melalui relaas tersebut, Perusahaan mendapatkan informasi bahwa Maligi telah lebih dahulu mengajukan gugatan pada tanggal 20 Desember 2019 tanpa memberikan tanggapan atas somasi yang disampaikan Perusahaan.

46. CONTINGENCIES (continued)

**g. Road Interchange Karawang Barat STA
47+130 Development Agreement Lawsuit
(continued)**

Maligi through a letter No. 190/FA/III/2017 dated March 21, 2017 informed the Company that based on the audit results conducted by Maligi, the total lost on the West Karawang toll gate that must be borne by Maligi was Rp8 and requested the Company to revise the invoice previously sent invoice.

On May 3, 2017, the Company through Jakarta-Cikampek and Maligi held a coordination meeting. At the meeting, the Company and Maligi agreed to make corrections to the calculation of OM cost shortages. Due to the correction in the calculation, the Company conveyed the calculation of OM cost shortages to become Rp16,722. This fee does not include deficits that must be borne by Maligi amounting to Rp1,495. The results of this meeting have been submitted minutes of the meeting on May 8, 2017 through letter No. CB.TR05.1831.

On June 20, 2017, Maligi via letter No. 94/MPIE/VI/2017 return the Company invoice for bills due to because the figures in the invoice differ from Maligi's audit result.

Furthermore, Maligi unilaterally left a shortfall in operational costs and maintenance of the West Karawang Interchange to the Karawang District Court in the amount of Rp7,947 and the Karawang District Court through the East Jakarta District Court submitted the offer to the Company on June 22, 2017.

The Company, through a letter No. AA.HK02.1086 dated July 11, 2017 rejected Maligi's offer because the amount did not match with Maligi's obligations in the agreement.

On January 11, 2019, the Company accepted the first court summons for a lawsuit filed by Maligi to the Company at the Karawang District Court with case No.104/Pdt/G/2018/PN.Kwg. Through this case, the Company received information that Maligi had first filed a lawsuit on December 20, 2019 without giving a response to the subpoena submitted by the Company.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**g. Gugatan Perjanjian Pembangunan
Simpang Susun Karawang Barat STA
47+130 (lanjutan)**

Dalam gugatannya, Maligi selaku Penggugat menyampaikan dalil dan tuntutan kepada Perusahaan selaku Tergugat, antara lain:

- a. Dalil:
- i. Perhitungan Kekurangan beban biaya OM oleh PT LAPI Ganeshatama telah tepat dan berdasarkan perjanjian. Penggugat mempertimbangkan tabel layanan gardu rata-rata berdasarkan Lampiran IV Akta No. 1 tertanggal 1 Mei 2008 dan Pasal 10 ayat (7) Akta No. 1 tertanggal 1 Mei 2009.
 - ii. Perjanjian sudah sepatutnya berakhir karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat itu. Pasal 10 ayat (7) Akta No. 1 tertanggal 1 Mei 2009 digunakan Penggugat sebagai pembenaran perhitungan penanggung beban Biaya OM yang dihitung Penggugat dan/atau PT LAPI Ganeshatama.
 - iii. Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki kewajiban lagi untuk membayar Biaya OM untuk periode 2017 sampai dengan seterusnya serta menyatakan telah melakukan pembayaran penanggung beban Biaya OM periode 2009 sampai dengan 2016 dengan mekanisme Konsinyasi dan menurut Hasil Audit LAPI Ganeshatama mekanisme perhitungan lalu lintas harian sudah tidak sesuai dan tidak akan memenuhi kondisi pengakhiran perjanjian sehingga perjanjian sudah sepatutnya berakhir.
- b. Tuntutan:
- i. Menyatakan sah dan mengikat hasil audit PT LAPI Ganeshatama terkait dengan perhitungan besaran biaya OM yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp7.947;
 - ii. Menyatakan keabsahan dan mengikat konsinyasi Maligi kepada Perusahaan;
 - iii. Menyatakan perjanjian berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Mei 2009 antara Maligi dan Perusahaan berakhir;
 - iv. Menyatakan bahwa Maligi tidak memiliki kewajiban membayar kekurangan biaya OM.

46. CONTINGENCIES (continued)

**g. Road Interchange Karawang Barat STA
47+130 Development Agreement Lawsuit
(continued)**

In the lawsuit, Maligi as the Plaintiff submitted the argument and demand to the Company as the Defendant, including:

- a. Grounds:
- i. The calculation of the OM Cost Expense shortage by PT LAPI Ganeshatama is correct and based on the agreement. The Plaintiff considers the average substation service table based on Attachment IV Deed No. 1 dated May 1, 2008 and Article 10 paragraph (7) Deed No. 1 dated May 1, 2009.
 - ii. The agreement was duly terminated because it was not in accordance with the conditions at that time. Article 10 paragraph (7) Deed No. 1 dated May 1, 2009 was used by the Plaintiff as a justification for calculating the shortfall of OM Cost calculated by the Plaintiff and/or PT LAPI Ganeshatama.
 - iii. The Plaintiff stated that it no longer had the obligation to pay OM Fees for the period of 2017 onwards, and stated that it had paid the OM Cost for the period 2009 to 2016 with the Consignment mechanism and according to the LAPI Ganeshatama Audit Results the daily traffic calculation mechanism was not appropriate and would not be met the conditions of termination of the agreement so that the agreement is duly terminated.
- b. Claims:
- i. Declaring legality and binding on the audit results of PT LAPI Ganeshatama related to the calculation of the amount of OM costs that must be paid by the Plaintiff to the Defendant, amounting to Rp7,947;
 - ii. Stating legality and binding Maligi consignment to the Company;
 - iii. Declare agreement based on the Deed No. 1 dated May 1, 2009 between Maligi and the Company ended;
 - iv. Stating that Maligi has no obligation to pay the OM fee shortage.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**g. Gugatan Perjanjian Pembangunan
Simpang Susun Karawang Barat STA
47+130 (lanjutan)**

Pada tanggal 11 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Karawang membacakan amar putusan perkara No. 104/Pdt/G/2018/PN.Kwg sebagai berikut:

- a. Menyatakan sah dan mengikat hasil audit PT LAPI Ganeshatama terkait dengan perhitungan besaran biaya OM yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp7.947;
- b. Menyatakan Perjanjian Pembangunan Modifikasi/Perluasan Simpang Susun Karawang Barat Jalan Tol Jakarta-Cikampek Secara Hibah yang tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 1 Mei 2009 antara Maligi dan Perusahaan berakhir; dan
- c. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya OM pada periode 2017 sampai dengan seterusnya.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, antara lain:

- a. Penggugat mempunyai hak untuk melakukan audit setelah tidak tercapainya kesepakatan Tim Bersama dalam menentukan perhitungan biaya OM, sehingga besaran biaya OM yang tepat adalah dengan mengikuti hasil audit dari PT LAPI Ganeshatama;
- b. Terdapat keadaan yang menyebabkan sulitnya pemenuhan perubahan kondisi pengakhiran perjanjian sulit untuk dicapai, sehingga Majelis Hakim menyatakan pengakhiran Akta No. 1 tanggal 1 Mei 2009 layak untuk dikabulkan.

Menanggapi putusan tersebut, Perusahaan telah melakukan upaya banding tanggal 23 Desember 2019 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang. Majelis Hakim pada tingkat banding telah memutus perkara No. 104/Pdt.G/2018/PN.Kwg jo. No. 136/PDT/2020/PT.BDG tersebut dengan amar putusan mengabulkan permohonan banding Perusahaan dan membatalkan putusan No. 104/Pdt.G/ 2018/PN.Kwg dan menyatakan bahwa gugatan Maligi tidak dapat diterima.

46. CONTINGENCIES (continued)

**g. Road Interchange Karawang Barat STA
47+130 Development Agreement Lawsuit
(continued)**

On December 11, 2019, the Panel of Judges at the Karawang Court read the case ruling No. 104/Pdt/G/2018/ PN.Kwg are as follows:

- a. Declaring legality and binding on the audit results of PT LAPI Ganeshatama related to the calculation of the amount of OM costs that the Plaintiff must pay to the Defendant, amounting to Rp7,947;
- b. Stating the Modification/Extension Development Agreement for the Karawang Barat Interchange in the Jakarta - Cikampek Toll Road in a Grant as stipulated in the Deed No. 1 dated May 1, 2009 between Maligi and the Company ended; and
- c. States the Plaintiff has no obligation to pay OM fees from 2017 onwards.

The consideration of the Panel of Judges in deciding the case, among others:

- a. The Plaintiff has the right to conduct an audit after the Joint Team's agreement was not reached in determining the OM cost calculation, therefore the exact OM fee amount is to follow the audit results from PT LAPI Ganeshatama;
- b. There are circumstances which make it difficult to meet the changes in conditions for terminating the agreement that are difficult to achieve, so the Panel of Judges declared the termination of the Deed No. 1 dated May 1, 2009 is eligible to be granted.

In response to the ruling, the Company has made an appeal on December 23, 2019 at the High Court of West Java through the Clerkship of karawang district court. The Panel of Judges at the appeal level has decided the case No. 104/Pdt.G/2018/PN.Kwg jo. No. 136/PDT/2020/PT.BDG with the warning of the decision granted the Company's appeal and overturned the decision No. 104/Pdt.G/2018/PN.Kwg and stated that Maligi's lawsuit was unacceptable.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**g. Gugatan Perjanjian Pembangunan
Simpang Susun Karawang Barat STA
47+130 (lanjutan)**

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut antara lain gugatan yang diajukan Maligi masih bersifat premature karena masih terikat perjanjian dan konsinyasi yang dilakukan Maligi tidak serta merta menghapuskan perjanjian antara Perusahaan dan Maligi tersebut.

Pada tanggal 7 September 2020, Perusahaan menerima Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi yang diajukan Maligi kepada Perusahaan untuk kembali membatalkan Putusan Tingkat Banding. Dalam pengajuan kasasi tersebut, Maligi juga turut menyerahkan memori kasasi yang mengungkapkan dasar keberatan atau pembelaan Maligi terhadap Putusan Tingkat Banding. Atas permohonan kasasi yang disampaikan Maligi, Perusahaan mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 September 2020. Pada tanggal 3 Juni 2021, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memutuskan perkara dengan amar mengabulkan upaya kasasi Maligi, sehingga membatalkan putusan pada tingkat banding dan menyatakan kembali bahwa gugatan Maligi diterima.

Atas dasar hal tersebut, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 Mei 2022.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memutuskan perkara dengan putusan nomor 1103PK/PDT/2022 yang pada pokoknya menolak permohonan PK Jasa Marga sehingga putusan kembali pada putusan Kasasi.

**h. Gugatan Budhi Yulianor pada Perkara
Ganti Rugi Banjir**

Pada tanggal 27 Oktober 2020, Budhi Yulianor melayangkan somasi atas terjadinya banjir disekitar rumahnya di daerah Rawalumbu, yang menurut Budhi diakibatkan tidak dirawatnya dengan baik saluran *box culvert* milik Jasa Marga sehingga menyebabkan tersumbat dan banjir.

46. CONTINGENCIES (continued)

**g. Road Interchange Karawang Barat STA
47+130 Development Agreement Lawsuit
(continued)**

The consideration of the Panel of Judges in updating the ruling, among others, the lawsuit filed by Maligi is still premature because it is still bound by the agreement and the consignment made by Maligi does not necessarily eliminate the agreement between the Company and Maligi.

On September 7, 2020, the Company received a Notice of Cassation request submitted by Maligi to the Company to re-cancel the Appeal Level Decision. In the submission of the cassation, Maligi also submitted a cassation memory that reveals the basis of Maligi's objection or defense against the Appeal Level Verdict. Upon the application for cassation submitted by Maligi, the Company filed a counter memory cassation on September 18, 2020. On June 3, 2021, the Panel of Judges of the Supreme Court of Indonesia decided that has accepted the Maligi cassation so the decision in court of appeal become nullified and restoring the previous district court decision in the process.

Based on this, the Company has submitted a judicial review to the Supreme Court of Indonesia through Karawang District Court Clerk on May 30, 2022.

The panel of judges of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has decided the case with decision number 1103PK/PDT/2022 which basically rejected Jasa Marga's PK application so that the decision returned to the Cassation decision.

**h. Budhi Yulianor's Lawsuit on the Flood
Compensation Case**

On October 27, 2020, Budhi Yulianor sent a summons on the occurrence of flooding around his house in the Rawalumbu area, which according to Budhi was the result of not properly cared for in Jasa Marga's box culvert channel, causing blockage and flooding.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

**h. Gugatan Budhi Yulianor pada Perkara
Ganti Rugi Banjir (lanjutan)**

Atas somasi tersebut, Budhi Yulianor melakukan gugatan terhadap Jasa Marga di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Februari 2021, dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp180 dan immateriil Rp13.000 atas kerusakan yang diakibatkan oleh banjir.

Bahwa dalam proses peradilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 25/Pdt.G/2021/PN.Bks, majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud memutuskan dalam Putusan Sela menerima eksepsi Jasa Marga dalam kompetensi relatif bahwa Permohonan Penggugat tidak dapat diperiksa karena bukan merupakan Wilayah kewenangannya perkara Pengadilan Negeri Bekasi melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh karena itu perkara tidak dapat dilanjutkan dan biaya perkara untuk dapat dibebankan kepada Penggugat.

Perkara ini kembali diajukan oleh Budi Yulianor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor register perkara 355/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM. Adapun duduk perkaranya serupa dengan perkara yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor perkara 355/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM tanggal 4 Februari 2021.

Pada tanggal 11 April 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus perkara nomor 355/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM. dengan isi putusannya yaitu menerima Eksepsi Penggugat dalam Kompetensi Absolut dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara sebagaimana dimaksud. Perkara masih dalam tahap banding yang diajukan oleh Penggugat.

Pada 20 Oktober 2023 Penggugat mengajukan Kasasi, kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 Perusahaan telah mengajukan kontra Memori Kasasi. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini perkara dalam tahap Kasasi.

46. CONTINGENCIES (continued)

**h. Budhi Yulianor's Lawsuit on the Flood
Compensation Case (continued)**

Based on the summons, Budhi Yulianor filed a lawsuit against Jasa Marga at the Bekasi District Court on February 4, 2021, and demanded material compensation of Rp180 and immaterial Rp13,000 for the damage caused by the flood.

Whereas in the judicial process at the first level at the Bekasi District Court with Case No. 25/Pdt.G/2021/PN.Bks, the panel of judges examining the case in question decided in the Decision to accept Jasa Marga's exception in relative competence that the Plaintiff's Application could not be examined because it is not the jurisdiction of the Bekasi District Court case but the East Jakarta District Court, therefore the case cannot be continued and the costs of the proceedings can be charged to the Plaintiff.

This case was again filed by Budi Yulianor to the East Jakarta District Court with case register number 355/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM. The sitting case is similar to the case registered at the Bekasi District Court with case Number 355/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM dated February 4, 2021.

On April 11, 2022, the East Jakarta District Court ruled on case number 355/Pdt.G/2021/PN.JKT.TIM. with the content of the decision, namely accepting the Plaintiff's Exception in Absolute Competence where the East Jakarta District Court does not have the authority to examine the case as intended. The case in High Court due to the plaintiff decided to appeal the verdict.

On October 20, 2023 the Plaintiff filed a Cassation, then on December 1, 2023 the Company has filed a counter Memory Cassation. Until the issuance of these consolidated financial statements the case is in the Cassation stage.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

i. Gugatan Eucharia Binti Neneng S.

Pada tanggal 16 November 2021, Eucharia Binti Neneng S. menggugat Perusahaan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kasus Ini Eucharia Binti Neneng S. melakukan klaim atas sebagian tanah yang di miliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diatasnya terdapat Hak Konsesi Jalan tol Padalarang-Cileunyi dan juga terdapat proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Gugatan ini merupakan gugatan kedua dengan pokok perkara yang serupa yang sempat di ajukan pada 22 Februari 2021 dengan nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Bdg. dan dicabut pada 21 Mei 2021.

Berdasarkan klaim dari Eucharia Binti Neneng S., sebagian tanah tersebut adalah miliknya karena telah memiliki Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan telah dikonsinyasikan untuk dibayar uang ganti ruginya oleh pihak ketiga.

Dalam gugatan tersebut, Eucharia Binti Neneng S. pada intinya menggugat untuk dapat mencairkan uang ganti kerugian yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Bandung. Khusus kepada Perusahaan, Penggugat menuntut untuk menghentikan tindakan yang dianggap menghalangi proses pencairan uang konsinyasi sebagaimana dimaksud. Perkara ini telah diputus pada tanggal 9 Desember 2022 dengan amar putusan menyatakan menerima sebagian tuntutan dari Penggugat.

Pada tanggal 24 Maret 2023 perkara ini telah dimohonkan Kasasi di Mahkamah Agung. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini perkara dalam tahap Kasasi.

i. Eucharia Binti Neneng S. Lawsuit

On November 16, 2021, Eucharia Binti Neneng S. sued the Company at the Bandung District Court. In this case Eucharia Binti Neneng S. made a claim over part of the land owned by the Ministry of Public Works and Public Housing at which the concession of Padalarang Cileunyi and Jakarta-Bandung high-speed railway project are located. This lawsuit is the second lawsuit with a similar subject matter which was filed on February 22, 2021 under number 100/Pdt.G/2021/PN.Bdg. and was dismissed on May 21, 2021.

Based on the claim of Eucharia Binti Neneng S., part of the land belongs to him because he already has a Bandung District Court Decision and has been consigned for compensation by a third party.

In the lawsuit, Eucharia Binti Neneng S. essentially sued to be able to disburse the compensation money that had been constituted in the Bandung District Court. Specifically to the Company, the Plaintiff demands to stop actions that are considered obstructing the process of disbursement of consignment money as intended. The case was decided on December 9, 2022 with a verdict stating that it accepted part of the claim from the Plaintiff.

On March 24, 2023, the case was appealed for Cassation in the Supreme Court. Until the publication of these consolidated financial statements, the case is in the Cassation stage.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

j. Gugatan PT Citra Lamtoro Gung Persada dan PT Hanurata

Perkara ini dimulai dari adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Marga Nurindo Bhakti pada awal Desember 2021. Dalam RUPS tersebut terdapat suatu keputusan yang dimana terjadinya penjualan saham PT Marga Strukturindo Raya dan PT Investakusuma Artha kepada pihak ketiga. Keputusan tersebut menurut PT Citra Lamtoro Gung Persada dan PT Hanurata sebagai Pemegang Saham PT Marga Nurindo Bhakti merugikan kepentingannya karena PT Citra Lamtoro Gung Persada dan PT Hanurata tidak dapat membeli saham yang dijual tersebut. Gugatan melawan hukum atas kerugian tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 1122/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

Dalam Perkara ini Para Tergugat digugat dengan total nominal kerugian material maupun imaterial senilai Rp600.000. Dalam perkara ini Jasa Marga ditetapkan sebagai Turut Tergugat II yang artinya hanya dimasukkan dalam perkara karena sebagai sesama Pemegang Saham pada PT Marga Nurindo Bhakti serta demi lengkapnya gugatan. Perkara ini telah diputus pada tanggal 22 November 2022 dengan amar putusan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 24 Mei 2023, hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, perkara sedang dalam tenggang waktu Pengajuan Kasasi.

k. Gugatan Sumarliyah, Dkk di PN Temanggung

Gugatan ini diajukan atas keberatan para warrga yang tinggal di daerah temanggung dimana terkena proyek jalan tol jogja-bawen, perusahaan digugat atas dasar sebagai BUJT yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan tol dimaksud. Para penggugat meminta nilai atas tanah mereka dinaikkan menjadi Rp800.000/M2. Sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan hakim.

j. PT Citra Lamtoro Gung Persada and PT Hanurata Lawsuit

This case started when General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Marga Nurindo Bhakti was taken place in early December 2021. In that GMS, the decision which related to sale and purchase of PT Marga Nurindo Bhakti shares from PT Marga Strukturindo Raya dan PT Investakusuma Artha to Third Parties. Such decision made violating the right of two shareholder namely PT Citra Lamtoro Gung Persada and PT Hanurata because they could not buy the shares. The tort lawsuit was filled in South Jakarta District Court with registered number of 1122/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

In this case defendants are sued to pay both material and immaterial damage with total of Rp600,000. Jasa Marga, in this case, is Co-Defendant meaning its involvement in this case is only as fellow shareholder in PT Marga Nurindo Bhakti and also to fulfill the needs of avoiding the claim being incompleteness of parties. This verdict of this case on November 22, 2022 is the lawsuit is dismissed. The case currently in High Court due to the plaintiff decided to appeal the verdict. The plaintiffs decided to appeal the verdict to High Court. On May 24, 2023, High Court gave their verdict to reinforce the District Court's verdict. Until the issuance of these consolidated financial statements, the case is on the grace period for the parties to appeal to Supreme Court.

k. Sumarliyah, et al's lawsuit in PN Temanggung

This lawsuit was filed over the objections of warrga who live in the Temanggung area where affected by the Jogja-Bawen toll road project, the company was sued on the basis that it was the BUJT responsible for the construction of the toll road. The plaintiffs requested that the value of their land be increased to Rp800,000/M2. Until the issuance of these consolidated financial statements, the Company still waiting for the judge's decision.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. KONTINJENSI (lanjutan)

46. CONTINGENCIES (continued)

I. Gugatan Nurliani, Dkk di PN Medan

Gugatan ini diajukan karena penggugat mengklaim mempunyai tanah yang sebahagiannya telah dipergunakan sebagai fasilitas peruntukan jalan tol Medan-Binjai namun belum mendapat ganti untung.

I. Nurliani, et al's lawsuit in PN Medan

This lawsuit was filed because the plaintiff claimed to have land that had been partly used as a facility for the Medan-Binjai toll road but had not received compensation.

47. SEGMENT OPERASI

47. OPERATING SEGMENTS

Kelompok Usaha dikelola dan dikelompokkan dalam segmen usaha yang terdiri dari beberapa lini usaha sebagai berikut:

The Group is managed and classified into business segments which consist of business line as follow:

	2023							
	Usaha Jalan Tol/ Induk/ Parent	Tollroad Business/ Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal	Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Aset/Assets								
Aset Lancar/ Current Assets								
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalent	735.749	2.424.321	3.160.070	595.628	419.424	263.829	-	4.438.951
Investasi Jangka Pendek/ Short Term Investments	11.285	1.349.510	1.360.795	-	-	-	-	1.360.795
Piutang Lain-lain - Neto/ Other Receivables - Net	3.055.797	630.354	3.686.151	594.048	1.963.226	119.941	(5.097.019)	1.266.347
Persediaan/ Inventories	-	-	-	-	4.717	114.773	-	119.490
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka - Neto/ Prepaid Expenses and Advances - Net	9.728	33.068	42.796	12.178	31.108	9.958	(130)	95.910
Pajak Dibayar Dimuka/ Prepaid Taxes	-	-	-	30.738	55.423	48.795	-	134.956
Dana Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Funds	-	558.326	558.326	-	-	-	-	558.326
Aset Lancar Entitas/ Total Current Assets	3.812.559	4.995.579	8.808.138	1.232.592	2.473.898	557.296	(5.097.149)	7.974.775
Aset Tidak Lancar/ Non-Current Assets								
Piutang Lain-lain - Neto/ Other Receivables - Net	-	275.000	275.000	-	-	-	-	275.000
Dana Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Funds	-	288.335	288.335	4.448	-	-	-	292.783
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Neto/ Investment in Associates and Joint Ventures - Net	39.262.665	4.060.829	43.323.494	-	-	9.276	(37.177.065)	6.155.705
Aset Tetap - Neto/ Fixed Asset - Net	86.310	72.289	158.599	114.445	112.951	120.150	(31.744)	474.401
Properti Investasi - Neto/ Investment Properties - Net	-	-	-	-	-	771.280	(19.723)	751.557
Aset Tidak Berwujud - Neto/ Intangible Assets - Net								
Hak Pengusahaan Jalan Tol/ Toll Road Concession Rights	10.361.103	101.945.522	112.306.625	-	-	-	(1.060.331)	111.246.294
Lain-lain/ Others	43.105	46.990	90.095	6.168	3.600	9.710	-	109.573
Goodwill/ Goodwill	-	36.880	36.880	-	-	-	4.969	41.849
Aset Keuangan Lainnya - Neto/ Other Financial Assets - Net	148.315	-	148.315	97.031	-	1.331	-	246.677
Aset Derivatif Lindung Nilai/ Hedge Derivative Assets	-	23.142	23.142	-	-	-	-	23.142
Aset Tidak Lancar Lainnya - Neto/ Other Non-Current Assets - Net	148.704	774.630	923.334	13.981	54.037	811.077	(82.196)	1.720.233
Aset Segmen Dilaporkan/ Segment Assets	50.050.202	107.523.617	157.573.819	236.073	170.588	1.722.824	(38.366.090)	121.337.214

	2023							
	Usaha Jalan Tol/ Induk/ Parent	Tollroad Business/ Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal	Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Liabilitas/ Liabilities								
Liabilitas Lancar/ Current Liabilities								
Utang Usaha/ Accounts Payable	6.532	158.490	165.022	69.857	72.231	11.438	(139.318)	179.230
Utang Kontraktor/ Contractors Payable	25.286	300.708	325.994	13.229	222.689	14.932	(16.828)	569.316
Utang Pajak/ Taxes Payable	239.155	101.775	340.930	8.091	9.566	5.311	-	363.898
Beban Akumul/ Accrued Expenses	2.629.677	5.762.494	8.392.171	579.894	1.317.233	229.062	(2.397.828)	8.120.532
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek/ Short-Term Employee Benefits Liability	-	-	-	1.794	-	-	-	1.794
Utang Bank/ Bank Loan	-	4.499.415	4.499.415	-	-	-	-	4.499.415
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non-Bank Financial Institution Loan	-	908.102	908.102	-	-	-	-	908.102
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun/ Current Maturities of Long - Term Liabilities								
Utang Bank/ Bank Loan	3.750.000	1.322.042	5.072.042	-	-	-	-	5.072.042
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non-Bank Financial Institution Loan	200.000	-	200.000	-	-	-	-	200.000
Liabilitas Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Liabilities	-	1.298.843	1.298.843	-	-	-	-	1.298.843
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	19.787	19.773	39.560	35.652	4.557	1.738	(8.876)	72.631
Provisi Pelapisan Jalan Tol/ Provision for Overlay	369.418	172.436	541.854	-	-	-	-	541.854
Pendapatan Diterima di Muka/ Unearned Revenue	465	27.637	28.102	550	83.544	16.852	(82.324)	46.724
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Short-Term Financial Liabilities	550.671	321.103	871.774	155.877	83.345	126.032	(281.246)	955.782
Liabilitas Lancar Entitas/ Total Current Liabilities	7.790.991	14.892.818	22.683.809	864.344	1.793.465	405.365	(2.926.420)	22.821.163

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

47. OPERATING SEGMENTS (continued)

	2023							
	Usaha Jalan Tol/ Induk/ Parent	Tolroad Business/ Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal	Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Liabilitas Tidak Lancar/ Non-Current Liabilities								
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities	309.802	5.397.285	5.707.087	(62.862)	7.067	-	-	5.651.292
Utang Kontraktor Jangka Panjang/ Long-Term Contractors Payable	-	490.701	490.701	-	-	-	(2.571)	488.130
Beban Akruai Jangka Panjang/ Long-Term Accrued Expenses	-	715.029	715.029	-	-	-	-	715.029
Liabilitas Jangka panjang - Setelah Dikurangi								
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun/ Long-term Liabilities - Net of Current Maturities								
Utang Bank/ Bank Loan	9.993.305	47.053.140	57.046.445	-	-	-	-	57.046.445
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non-Bank Financial Institution Loan	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Obligasi/ Bonds Payable	897.353	-	897.353	-	-	-	-	897.353
Liabilitas Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Liabilities	109.008	142.059	251.067	-	-	-	-	251.067
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	27.095	11.847	38.942	34.712	-	31.776	(48.045)	57.385
Provisi Pelapangan Jalan Tol/ Provision for Overlay	94.125	637.524	731.649	-	-	-	-	731.649
Pendapatan Diliangguhkan/ Deferred Revenues	-	1.142	1.142	-	-	72.541	-	73.683
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang/ Long-Term Employee Benefits Liabilities	1.272.618	16.960	1.289.578	21.763	295	4.472	-	1.316.108
Liabilitas Derivatif Lindung Nilai/ Hedge Derivative Liabilities	-	67.171	67.171	-	-	-	-	67.171
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Liabilities	218.282	2.326.771	2.545.053	-	-	-	(2.260.745)	284.308
Liabilitas Tidak Lancar Entitas/ Total Non-Current Liabilities	12.921.588	56.859.629	69.781.217	(6.387)	7.362	108.789	(2.311.361)	67.579.620
Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Segment Liabilities	20.712.579	71.752.447	92.465.026	858.557	1.800.827	514.154	(6.237.781)	90.400.783

	2023							
	Usaha Jalan Tol/ Induk/ Parent	Tolroad Business/ Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal	Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan/ Revenues								
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	6.981.166	7.070.274	14.051.440	2.100.397	1.498.379	617.665	(2.701.899)	15.565.982
Pendapatan Konstruksi/ Construction Revenues	-	5.752.623	5.752.623	-	-	-	-	5.752.623
Pendapatan Entitas/ Total Revenues	6.981.166	12.822.897	19.804.063	2.100.397	1.498.379	617.665	(2.701.899)	21.318.605
Beban Pendapatan/ Cost of Revenues								
Beban Usaha/ Operating Expense	(2.687.808)	(3.038.984)	(5.726.792)	(1.690.807)	(967.359)	(550.009)	2.291.711	(6.643.256)
Beban Konstruksi/ Construction Expenses	-	(5.716.823)	(5.716.823)	-	-	-	-	(5.716.823)
Laba Bruto/ Gross profit	4.293.358	4.067.090	8.360.448	409.590	531.020	67.656	(410.188)	8.958.526
Penghasilan Lain - lain/ Other Income (Penghasilan) Keuangan / Financial Income	88.588	11.328	99.916	13.249	32.861	14.727	(10.646)	150.107
Keuntungan dari pelepasan investasi/ Gain on Divestment	289.054	91.128	380.182	13.466	13.387	17.792	(168.861)	255.966
Beban Pajak atas Penghasilan Keuangan/ Tax Expense of Financial Income	(9.662)	(15.586)	(25.248)	(2.693)	(2.677)	(57)	-	(30.675)
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses	(1.435.663)	(322.973)	(1.758.636)	(103.966)	(138.544)	(66.221)	59.433	(2.007.934)
Beban Lain - lain/ Other Expenses	(48.670)	(36.904)	(85.574)	(20.046)	(11.763)	(11.371)	8.657	(120.097)
Kerugian dari Nilai Wajar Investasi Jangka Pendek/ Loss on Fair Value of Short-term Investments	-	(963.687)	(963.687)	-	-	-	-	(963.687)
Keuntungan dari Nilai Wajar Investasi Asosiasi/ Gain on Fair Value of Investment in Associates	-	3.970.112	3.970.112	-	-	-	47.252	4.017.364
Keuntungan Pembelian dengan Diskon/ Gain on bargain purchase	-	1.058.750	1.058.750	-	-	-	-	1.058.750
Laba Usaha/ Profit on operations	3.177.005	6.895.571	10.072.576	309.600	424.284	22.526	(474.353)	11.318.320
Laba Rugi/ Profit and Loss								
Biaya Keuangan/ Finance Charges	(1.059.128)	(2.693.211)	(3.752.339)	(7.233)	(398)	(3.058)	170.676	(3.592.352)
Bagian Laba-Rugi atas Entitas Asosiasi/ Net Equity on Associates	5.512.818	176.738	5.689.556	-	-	(61)	(5.489.038)	200.457
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Earning Before Income Tax	7.630.695	4.379.098	12.009.793	302.367	423.886	19.407	(5.792.715)	7.926.425
Beban Pajak Penghasilan/ Income Tax	(530.159)	(567.887)	(1.098.046)	(68.713)	(7.324)	(2.853)	-	(1.176.936)
Laba Tahun Berjalan/ Income for the Year	7.100.536	3.811.211	10.911.747	233.654	416.562	16.554	(5.792.715)	6.749.489

	2022							
	Usaha Jalan Tol/ Induk/ Parent	Tolroad Business/ Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal	Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Aset/Assets								
Aset Lancar/ Current Assets								
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalent	5.359.983	1.898.897	7.258.880	548.447	257.414	364.377	-	8.429.118
Investasi Jangka Pendek/ Short Term Investments	10.672	2.383.335	2.394.007	-	-	-	-	2.394.007
Piutang Lain-lain - Neto/ Other Receivables - Net	2.967.594	515.086	3.482.680	439.257	1.309.879	144.857	(4.151.681)	1.224.992
Persediaan/ Inventories	-	-	-	-	5.967	92.660	-	98.627
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka - Neto/ Prepaid Expenses and Advances - Net	5.765	12.887	18.652	4.013	24.086	21.525	-	68.276
Pajak Dibayar Dimuka/ Prepaid Taxes	-	-	-	26.851	22.891	36.407	-	86.149
Dana Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Funds	-	67.258	67.258	3.785	-	-	-	71.043
Aset Lancar Entitas/ Total Current Assets	8.344.014	4.877.463	13.221.477	1.022.353	1.620.237	659.826	(4.151.681)	12.372.212
Aset Tidak Lancar/ Non-Current Assets								
Piutang Lain-lain - Neto/ Other Receivables - Net	-	115.000	115.000	-	-	-	-	115.000
Dana Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Funds	-	107.821	107.821	-	57.955	-	-	165.776
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Neto/ Investment in Associates and Joint Ventures - Net	33.256.595	7.654.766	40.911.361	-	-	9.337	(31.946.555)	8.974.143
Aset Tetap - Neto/ Fixed Asset - Net	67.414	35.238	102.652	72.153	116.970	69.353	(412)	360.716
Properti Investasi - Neto/ Investment Properties - Net	-	-	-	-	-	625.385	(21.096)	604.289
Aset Tidak Berwujud - Neto/ Intangible Assets - Net	10.042.778	57.609.528	67.652.306	-	-	32.443	(705.087)	66.979.662
Hak Pengusahaan Jalan Tol/ Toll Road Concession Rights	49.340	8.589	57.929	4.790	6.449	11.906	-	81.074
Lain-lain/ Others	-	36.880	36.880	-	-	-	4.969	41.849
Goodwill/ Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Keuangan Lainnya - Neto/ Other Financial Assets - Net	137.616	-	137.616	205.078	-	7.001	-	349.695
Aset Tidak Lancar Lainnya - Neto/ Other Non-Current Assets - Net	164.413	36.468	200.881	6.775	118.221	768.927	(38)	1.094.766
Aset Tidak Lancar Entitas/ Total Non-Current Assets	43.718.156	65.604.290	109.322.446	288.796	299.595	1.524.352	(32.668.219)	78.766.970
Aset Segmen Dilaporkan/ Segment Assets	52.062.170	70.481.753	122.543.923	1.311.149	1.919.832	2.184.178	(36.819.900)	91.139.162

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

47. OPERATING SEGMENTS (continued)

		2022							
		Usaha Jalan Tol/ Tollroad Business			Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Induk/ Parent	Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal							
Liabilitas/ Liabilities									
Liabilitas Lancar/ Current Liabilities									
Utang Usaha/ Accounts Payable	5.709	97.399	103.108	43.939	66.487	3.244	(82.052)	134.726	
Utang Kontraktor/ Contractors Payable	34.114	218.068	252.182	20.042	185.299	8.863	(8.603)	457.783	
Utang Pajak/ Taxes Payable	636.346	114.521	750.867	10.923	13.055	10.964	-	785.809	
Beban Akrual/ Accrued Expenses	1.976.273	3.194.894	5.171.167	369.257	880.901	140.887	(1.337.833)	5.224.379	
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek/ Short-Term Employee Benefits Liability	-	-	-	1.794	-	-	-	1.794	
Utang Bank/ Bank Loan	200.000	1.653.174	1.853.174	-	-	-	-	1.853.174	
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun/ Current Maturities of Long-Term Liabilities									
Utang Bank/ Bank Loan	-	337.950	337.950	22.227	-	-	-	360.177	
Utang Obligasi/ Bonds Payable	1.100.350	-	1.100.350	-	-	-	-	1.100.350	
Liabilitas Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Liabilities	-	838.542	838.542	-	-	-	-	838.542	
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	18.256	5.024	23.280	355	5.744	-	-	29.379	
Provisi pelapisan jalan tol/ Provision for overlay	337.033	156.209	493.242	-	-	-	-	493.242	
Pendapatan Diterima di Muka/ Unearned Revenue	14.610	2.540	17.150	4.273	1.927	116.309	-	139.659	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Short-Term Financial Liabilities	511.991	721.986	1.233.977	195.013	93.299	77.100	(875.415)	723.974	
Liabilitas Lancar Entitas/ Total Current Liabilities	4.834.682	7.340.307	12.174.989	667.823	1.246.712	357.367	(2.303.903)	12.142.988	
Liabilitas Tidak Lancar/ Non-Current Liabilities									
Liabilitas Pajak Tanggahan/ Deferred Tax Liabilities	301.865	1.329.853	1.631.718	-	2.978	284	-	1.634.980	
Utang Kontraktor Jangka Panjang/ Long-Term Contractors Payable	-	213.454	213.454	-	-	-	-	213.454	
Beban Akrual Jangka Panjang/ Long-Term Accrued Expenses	-	693.945	693.945	-	-	-	-	693.945	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun/ Long-term liabilities - net of current maturities	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utang Bank/ Bank Loan	17.180.565	29.507.178	46.687.743	-	-	-	-	46.687.743	
Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank/ Non-Bank Financial Institution Loan	200.000	-	200.000	-	-	-	-	200.000	
Utang Obligasi/ Bonds Payable	895.770	-	895.770	-	-	-	-	895.770	
Liabilitas Pembebasan Tanah/ Land Acquisition Liabilities	109.008	750.000	859.008	-	-	-	-	859.008	
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	11.290	11.162	22.452	62.061	-	34.013	(27.412)	91.114	
Provisi pelapisan jalan tol/ Provision for overlay	114.455	361.509	475.964	-	-	-	-	475.964	
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang/ Long-Term Employee Benefits Liabilities	1.219.002	15.942	1.234.944	17.023	110	4.031	-	1.256.108	
Liabilitas derivatif lindung nilai/ Hedge derivative Liabilities	-	90.748	90.748	-	-	-	-	90.748	
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya/ Other Long-Term Liabilities	424.755	1.697.593	2.122.348	-	-	-	(1.846.377)	275.971	
Liabilitas Tidak Lancar Entitas/ Total Non-Current Liabilities	20.456.710	34.671.384	55.128.094	79.084	3.088	38.328	(1.873.789)	53.374.805	
Liabilitas Segmen Dilaporkan/ Segment Liabilities	25.291.392	42.011.691	67.303.083	746.907	1.249.800	395.695	(4.177.692)	65.517.793	
		2022							
		Usaha Jalan Tol/ Tollroad Business			Pengoperasian/ Operation	Pemeliharaan/ Maintenance	Bisnis Terkait/ Related Business	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated
Induk/ Parent	Anak/ Subsidiary	Subtotal/ Subtotal							
Pendapatan/ Revenues									
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	7.846.420	4.695.467	12.541.887	1.880.023	1.155.661	503.224	(2.298.237)	13.782.558	
Pendapatan Konstruksi/ Construction Revenues	-	2.800.291	2.800.291	-	-	-	-	2.800.291	
Pendapatan Entitas/ Total Revenues	7.846.420	7.495.758	15.342.178	1.880.023	1.155.661	503.224	(2.298.237)	16.582.849	
Beban Pendapatan/ Cost of Revenues									
Beban Usaha/ Operating Expense	(3.466.186)	(2.239.826)	(5.706.012)	(1.572.471)	(740.819)	(415.467)	2.043.153	(6.391.616)	
Beban Konstruksi/ Construction Expenses	-	(2.773.136)	(2.773.136)	-	-	-	-	(2.773.136)	
Laba Bruto/ Gross profit	4.380.234	2.482.796	6.863.030	307.552	414.842	87.757	(255.084)	7.418.097	
Penghasilan Lain - lain/ Other Income	200.586	3.610	204.196	9.597	6.282	24.641	(6.712)	238.004	
(Penghasilan) keuangan / Financial Income	270.138	47.611	317.749	5.500	4.832	18.584	(194.244)	152.421	
Keuntungan dari pelepasan investasi/ Gain on Divestment	2.245.045	-	2.245.045	-	-	-	-	2.245.045	
Beban pajak atas penghasilan keuangan/ Tax Expense of Financial Income	(12.409)	(9.265)	(21.674)	(1.100)	(966)	(3.717)	-	(27.457)	
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses	(1.420.866)	(252.933)	(1.673.799)	(88.346)	(122.560)	(59.876)	9.798	(1,934,783)	
Beban Lain - lain/ Other Expenses	(572.499)	(38.796)	(611.295)	(46.396)	(28.573)	(27.611)	5.555	(708.320)	
Laba Usaha/ Profit on operations	5.090.229	2.233.023	7.323.252	186.807	273.857	39.778	(440.687)	7.383.007	
Laba Rugi/ Profit and Loss									
Biaya Keuangan/ Finance Charges	(1.509.180)	(2.559.336)	(4.068.516)	(6.371)	(292)	(3.037)	192.874	(3.885.342)	
Bagian Laba-Rugi atas Entitas Asosiasi/ Net Equity on Associates	356.103	82.841	438.944	-	-	(241)	(210.573)	228.130	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan/ Earning Before Income Tax	3.937.152	(243.472)	3.693.680	180.436	273.565	36.500	(458.386)	3.725.795	
Beban Pajak Penghasilan/ Income Tax	(867.091)	(480.399)	(1.347.490)	(46.546)	(4.215)	(3.836)	-	(1,402,087)	
Laba Tahun Berjalan/ Income for the Year	3.070.061	(723.871)	2.346.190	133.890	269.350	32.664	(458.386)	2.323.708	

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Bisnis Kelompok Usaha mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Kelompok Usaha adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

Kelompok Usaha mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Kelompok Usaha.

Tujuan Kelompok Usaha dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Kelompok Usaha.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Kelompok Usaha adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Instrumen keuangan Kelompok Usaha yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain dan investasi tertentu. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The business of the Group includes risks - taking activities with certain target by professional management. The main function of the risk management of the Group is to identify all key risks, to measure these risks and manage risk positions.

The Group defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by internal factors as well as external factors that may potentially have negative impact on achievement of The Group goals.

The purpose of the Group in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risks and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Group.

The main financial risks of the Group are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and, social - economic and political conditions. Attention to this risk management has increased significantly by considering changes and financial market volatility in Indonesia and internationally.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to met its obligations and cause the other party to suffer financial losses.

The Group's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, other receivables and certain investments. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts.

	2023			
	0 - 1 Tahun/ Year 0 - 1	> 1 Tahun/ > 1 Years	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
Piutang Lain-lain				Other Receivables
Lancar - Bersih				Current - Net
Pihak Berelasi	344.226	-	344.226	Related Parties
Pihak Ketiga	922.121	-	922.121	Third Parties
Tidak Lancar				Non-Current
Pihak Berelasi	-	275.000	275.000	Related Parties
Total	1.266.347	275.000	1.541.347	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

	2022			
	0 - 1 Tahun/ Year 0 - 1	> 1 Tahun/ > 1 Years	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
Piutang Lain-lain				Other Receivables
Lancar - Bersih				Current - Net
Pihak Berelasi	527.578	-	527.578	Related Parties
Pihak Ketiga	697.414	-	697.414	Third Parties
Tidak Lancar				Non-Current
Pihak Berelasi	-	115.000	115.000	Related Parties
Total	1.224.992	115.000	1.339.992	Total

b. Risiko Mata Uang

b. Currency Risk

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Kelompok Usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Kelompok Usaha tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Revenue, funding and most of the operating costs of the Group are made in the Rupiah currency and therefore the Group do not have significant exposure to fluctuations in foreign currency exchange rates.

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Liquidity risk is the risk in which the Group will experience difficulties in acquiring funds to meet commitments associated with financial instruments.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Kelompok Usaha untuk operasi normal Kelompok Usaha. Selain itu Kelompok Usaha juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to enable the Group to meet its commitment to the normal operation of the Group. In addition, the Group also controls its cash flow projections and actual cash flow and continuously monitors the maturity dates of financial assets and liabilities.

	2023			Jumlah/ Total	
	Kurang Dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	Lebih Dari 1 Tahun dan Kurang Dari 5 Tahun/ More Than 1 Year and Less Than Five Years	Lebih Dari 5 Tahun/ More Than 5 Years		
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang Usaha	179.230	-	-	179.230	Accounts Payable
Utang Kontraktor	560.316	488.130	-	1.048.446	Contractors Payable
Beban Akrua	8.120.532	715.029	-	8.835.561	Accrued Expenses
Liabilitas Keuangan Lainnya	955.782	-	-	955.782	Other Financial Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	4.499.415	-	-	4.499.415	Short Term Bank Loan
Utang Bank Jangka Panjang	5.072.042	13.883.035	43.163.410	62.118.487	Long Term Bank Loan
Utang Lembaga Keuangan					Long Term Non-Bank
Bukan Bank Jangka Panjang	200.000	-	-	200.000	Financial Institutions Loan
Liabilitas Pembebasan Tanah	1.298.843	-	251.067	1.549.910	Land Acquisition Liabilities
Liabilitas Sewa	72.631	57.385	-	130.016	Lease Liability
Utang Obligasi	-	376.050	521.303	897.353	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	284.308	284.308	Other Long Term Liabilities
Total	20.958.791	15.519.629	44.220.088	80.698.508	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	2022			Jumlah/ Total	
	Kurang Dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	Lebih Dari 1 Tahun dan Kurang Dari 5 Tahun/ More Than 1 Year and Less Than Five Years	Lebih Dari 5 Tahun/ More Than 5 Years		
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang Usaha	134.726	-	-	134.726	Accounts Payable
Utang Kontraktor	457.783	213.454	-	671.237	Contractors Payable
Beban Akrua	5.224.379	693.945	-	5.918.324	Accrued Expenses
Liabilitas Keuangan Lainnya	723.974	-	-	723.974	Other Financial Liabilities
Utang Bank Jangka Pendek	1.853.174	-	-	1.853.174	Short Term Bank Loan
Utang Bank Jangka Panjang	360.177	-	46.687.743	47.047.920	Long Term Bank Loan
Utang Lembaga Keuangan					Long Term Non-Bank
Bukan Bank Jangka Panjang	-	-	200.000	200.000	Financial Institutions Loan
Liabilitas Pembebasan Tanah	838.542	-	859.008	1.697.550	Land Acquisition Liabilities
Liabilitas Sewa	29.379	91.114	-	120.493	Lease Liability
Utang Obligasi	1.100.350	376.050	519.720	1.996.120	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	275.971	275.971	Other Long Term Liabilities
Total	10.722.484	1.374.563	48.542.442	60.639.489	Total

d. Risiko Suku Bunga

d. Interest Rate Risk

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Interest on the cash flow risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.

Eksposur terhadap suku bunga Kelompok Usaha terus diawasi dengan melakukan analisis terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, Kelompok Usaha memiliki liabilitas keuangan sebesar Rp25.211.003 dan Rp24.964.219 yang dikenakan suku bunga mengambang. Pada 31 Desember 2023, penurunan (kenaikan) 19 poin dasar pada tingkat bunga liabilitas keuangan bunga mengambang, variabel lain dianggap konstan, ekuitas dan laba atau rugi masing-masing akan naik (turun) sebesar Rp48.600.

The Group's exposure to interest rate is monitored continuously by analyzing financial liabilities's. For the year ended December 31, 2023 and 2022, Group has outstanding financial liabilities amounting to Rp25,211,003 and Rp24,964,219 which are borne floating interest rate. As of December 31, 2023, decrease (increase) 19 base point on financial liabilities interest floating rate, other variables are constant, equity and profit or loss each will increase (decrease) amounting to Rp48,600.

e. Nilai Wajar

e. Fair Value

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. Aset dan liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang diukur dan diakui pada nilai wajar adalah piutang dan utang derivatif.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes. The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value are derivative receivables and payables.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Kelompok Usaha untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga permintaan (*ask price*).

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, for financial liabilities is the current ask price.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi, apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2023	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	4.438.951	4.438.951
Dana dibatasi penggunaannya	851.109	851.109
Piutang Usaha	59.401	59.401
Pihak Berelasi		
Pihak Ketiga		
Piutang lain-lain	215.599	215.599
Pihak Berelasi		
Pihak Ketiga		
Investasi jangka pendek	1.360.795	1.360.795
Aset tidak lancar lainnya - neto	246.677	246.677
Total	7.172.532	7.172.532
Liabilitas Keuangan		
Utang kontraktor jangka pendek	560.316	560.316
Utang kontraktor jangka panjang	488.130	488.130
Utang usaha	179.230	179.230
Beban akrual	8.120.532	8.120.532
Utang bank jangka pendek	4.499.415	4.499.415
Utang lembaga keuangan bukan bank	200.000	200.000
Beban akrual jangka panjang	715.029	715.029
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	955.782	955.782
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas pembebasan tanah	1.298.843	1.298.843
Utang bank	5.072.042	5.072.042
Liabilitas sewa	72.631	72.631
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	57.046.445	57.046.445
Liabilitas sewa	57.385	57.385
Liabilitas pembebasan tanah	251.067	251.067
Utang obligasi	897.353	897.353
Liabilitas jangka panjang lainnya	284.308	284.308
Total	80.698.508	80.698.508

e. Fair Value (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates, if all significant inputs required to fair value an instrument are observable.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, specific valuation techniques are used to value financial instrument include:

- The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- Other techniques such as discounted cash flows analysis are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

	Financial Assets
Cash and cash equivalents	
Restricted funds	
Trade Receivables	
Related Parties	
Third Parties	
Other receivables	
Related Parties	
Third Parties	
Short-term investments	
Other financial assets - net	
Total	
Financial Liabilities	
Short-term contractors payable	
Long-term contractors payable	
Accounts payable	
Accrued expense	
Short-term bank loan	
Non-bank financial institutions loan	
Long-term accrued expense	
Other short-term financial liabilities	
Current maturities of long - term Liabilities	
Land acquisition liabilities	
Bank loans	
Lease liabilities	
Long - term liabilities net of current maturity	
Bank loans	
Lease liabilities	
Land acquisition liabilities	
Bonds payable	
Other long-term liabilities	
Total	

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

e. Fair Value (continued)

	2022		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan setara kas	8.429.118	8.429.118	Cash and cash equivalents
Dana dibatasi penggunaannya	236.819	236.819	Restricted funds
Piutang lain-lain	1.339.992	1.339.992	Other receivables
Investasi jangka pendek	2.394.007	2.394.007	Short term investments
Aset keuangan lainnya	349.695	349.695	Other financial assets - net
Total	12.749.631	12.749.631	Total
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang kontraktor jangka pendek	457.783	457.783	Short-term contractors payable
Utang kontraktor jangka panjang	213.454	213.454	Long-term contractors payable
Utang usaha	134.726	134.726	Accounts payable
Beban akrual	5.224.379	5.224.379	Accrued expense
Utang bank jangka pendek	1.853.174	1.853.174	Short-term bank loan
Beban akrual jangka panjang	693.945	693.945	Long-term accrued expense
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	723.974	723.974	Other short-term financial liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturities of long - term Liabilities
Liabilitas pembebasan tanah	838.542	838.542	Land acquisition liabilities
Utang bank	360.177	360.177	Bank loans
Utang obligasi	1.100.350	1.100.350	Bonds payable
Liabilitas sewa	29.379	29.379	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long - term liabilities net of current maturity
Utang bank	46.687.743	46.687.743	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	200.000	200.000	Non-bank financial institutions loan
Liabilitas sewa	91.114	91.114	Lease liabilities
Liabilitas pembebasan tanah	859.008	859.008	Land acquisition liabilities
Utang obligasi	895.770	895.770	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	275.971	275.971	Other long-term liabilities
Total	60.639.489	60.639.489	Total

f. Manajemen Permodalan

Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Kelompok Usaha memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham).

f. Capital Management

Consistent with other companies in the industry, The Group monitors capital on the basis of the ratio of adjusted debt to capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents. Adjusted capital comprises all components of equity (including capital stock).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

48. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

f. Manajemen Permodalan (lanjutan)

Selama tahun 31 Desember 2023 dan 2022, strategi Kelompok Usaha tidak berubah yaitu mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas sebesar maksimum 5:1. Rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Liabilitas Jangka Pendek	22.821.163	12.142.988
Liabilitas Jangka Panjang	67.579.620	53.374.805
Total Liabilitas	90.400.783	65.517.793
Dikurangi: Kas dan Setara Kas	(4.438.951)	(8.429.118)
Liabilitas - Bersih	85.961.832	57.088.675
Total Ekuitas	38.911.206	25.621.389
Rasio Utang terhadap Ekuitas	2,2 : 1	2,2 : 1

Tujuan dari Kelompok Usaha dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Kelompok Usaha menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Kelompok Usaha mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

f. Capital Management (continued)

During the year of December 31, 2023 and 2022, the Group's strategy has not changed, namely, to maintain the debt to equity ratio at maximum 5:1. The ratio of debt to equity are as follows:

	2023	2022
Short-term Liabilities	22.821.163	12.142.988
Long-term Liabilities	67.579.620	53.374.805
Total Liabilities	90.400.783	65.517.793
Less: Cash and cash equivalents	(4.438.951)	(8.429.118)
Liabilities - Net	85.961.832	57.088.675
Total Equity	38.911.206	25.621.389
Debt to Equity Ratio	2,2 : 1	2,2 : 1

The Group's purpose in managing capital is to protect the ability of the Group in maintaining business continuity, so that entities can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

The Group set a number of capital ratios proportion to the risk. The Group manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

49. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMENGARUHI ARUS KAS DAN REKONSILIASI YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

49. NON-CASH TRANSACTIONS AND RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi non-kas dan pendanaan adalah sebagai berikut:

Supplemental cash flows information related to non-cash investing and financing activities is as follows:

	2023	2022	
Aset Takberwujud -			Intangible Assets -
Hak Pengusahaan Jalan Tol	2.719.033	117.803	Toll Road Concession Rights
Lainnya	-	1.726	Others
Aset Tetap	108.254	65.576	Fixed Asset
Pengurangan Aset Tetap karena			Reduction of Fixed Assets Due
Divestasi Entitas Anak	-	(1.876)	to Divestment of Subsidiaries
Pembagian Dividen kepada			Dividend Distribution to
Entitas Nonpengendali	(464)	(203)	Non-controlling Interest
Penambahan Investasi Entitas Asosiasi dan			Increase in Investment in Associates and
Ventura Bersama akibat Dekonsolidasi	-	1.915.407	Joint Venture due to Deconsolidation
Keuntungan/(Kerugian) Belum Direalisasikan dari			Unrealized (Losses)/ Gain
Investasi Jangka Pendek	(46.237)	116.310	of Short-Term Investments
Pengurangan Investasi Jangka Pendek			Deduction in Short-term Investment
Akibat Konsolidasi	(2.892.928)	-	due to Consolidation
Pengurangan Investasi Entitas Asosiasi dan			Decrease in Investment in Associates and
Ventura Bersama akibat Konsolidasi	(3.735.227)	-	Joint Venture due to Consolidation
Penambahan Utang Pajak PPh Pasal 29			Increase in PPh Article 29 Payable
Akibat Konsolidasi	9.696	-	due to Consolidation
Penambahan Dana Dibatasi Penggunaannya			Increase in Restricted Cash
Akibat Konsolidasi	636.979	-	due to Consolidation

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**49. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMENGARUHI
ARUS KAS DAN REKONSILIASI YANG TIMBUL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)**

**49. NON-CASH TRANSACTIONS AND
RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)**

	2023				
	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus Kas/ Cash Flows	Lainnya/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Utang Bank	48.901.094	1.105.297	16.611.511	66.617.902	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan					Non Bank Financial
Bukan Bank	200.000	908.102	-	1.108.102	Institutions Loan
Utang Obligasi	1.996.120	(1.100.350)	1.583	897.353	Bonds Payable
Liabilitas Pembebasan Tanah	1.697.550	(147.640)	-	1.549.910	Land Acquisition Liabilities
Liabilitas Sewa	120.493	(144.774)	154.297	130.016	Lease Liability
Liabilitas Jangka Panjang					Other Long-term Liabilities
Lainnya - Pinjaman dari					Minority Shareholders Loan
Pemegang Saham Minoritas	33.872	-	-	33.872	
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	52.949.129	620.635	16.767.391	70.337.155	Total Liabilities from Financing Activities
	2022				
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Arus Kas/ Cash Flows	Lainnya/ Others	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang Bank	58.296.833	923.230	(10.318.969)	48.901.094	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan					Non Bank Financial
Bukan Bank	1.342.660	(1.149.300)	6.640	200.000	Institutions Loan
Utang Obligasi	1.994.185	-	1.935	1.996.120	Bonds Payable
Liabilitas Pembebasan Tanah	1.697.550	-	-	1.697.550	Land Acquisition Liabilities
Liabilitas Sewa	114.487	(76.710)	82.716	120.493	Lease Liability
Liabilitas Jangka Panjang					Other Long-term Liabilities
Lainnya - Pinjaman dari					Minority Shareholders Loan
Pemegang Saham Minoritas	37.893	(4.021)	-	33.872	
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	63.483.608	(306.801)	(10.227.678)	52.949.129	Total Liabilities from Financing Activities

Pada akhir tahun 31 Desember 2023, kolom "Lainnya" merupakan pengakuan liabilitas keuangan akibat konsolidasi JSN, JNK, dan JSB, penambahan pokok pinjaman Kredit Investasi *Interest During Construction (IDC)*, biaya transaksi pinjaman neto yang belum diamortisasi dan dampak dari penerapan PSAK 73.

Pada akhir tahun 31 Desember 2022 kolom "Lainnya" merupakan penghentian pengakuan liabilitas keuangan JJC, penambahan pokok pinjaman Kredit Investasi *Interest During Construction (IDC)*, biaya transaksi pinjaman neto yang belum diamortisasi dan dampak dari penerapan PSAK 73.

At the end of year December 31, 2023, the "Others" column represents recognition of financial liabilities resulting from the consolidation of JSN, JNK, and JSB, addition to *Interest During Construction (IDC)* Investment Credit Loan Principal, net unamortized loan transaction cost and impact of PSAK 73 Implementation.

At the end of year December 31, 2022, the "Others" column represents derecognition of financial liabilities of JJC, addition to *Interest During Construction (IDC)* Investment Credit Loan Principal, net unamortized loan transaction cost and the impact of the implementation of PSAK 73.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. REKLASIFIKASI AKUN

Laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 telah dilakukan reklasifikasi sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk akun sebagai berikut:

	2023		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Piutang Lain-lain	1.266.347	(1.266.347)	-
Piutang Lain-lain Setelah Dikurangi			
Penyisihan Penurunan Nilai			
Pihak Berelasi (Catatan 44)	-	344.226	344.226
Pihak Ketiga	-	922.121	922.121
	<u>1.266.347</u>		<u>1.266.347</u>

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Other Receivables

Other Receivables Net of Provision
for Impairment
Related Parties
Third Parties

	2022		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Piutang Lain-lain	1.224.992	(1.224.992)	-
Piutang Lain-lain Setelah Dikurangi			
Penyisihan Penurunan Nilai			
Pihak Berelasi (Catatan 44)	-	527.578	527.578
Pihak Ketiga	-	697.414	697.414
	<u>1.224.992</u>		<u>1.224.992</u>

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Other Receivables

Other Receivables Net of Provision
for Impairment
Related Parties
Third Parties

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah direklasifikasi sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tujuan perbandingan.

Several accounts in the financial statements ended December 31, 2022 have been reclassified according to the presentation of financial statements for comparison purposes.

	2022		
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Piutang Lain-lain - Lancar			
Pihak Berelasi (Catatan 44)			
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	245.264	(115.000)	130.264
Piutang Lain-lain - Tidak Lancar			
Pihak Berelasi (Catatan 44)			
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	-	115.000	115.000
	<u>245.264</u>		<u>245.264</u>
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
OPERASI			
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	1.261.431	(70.257)	1.191.174
Pembayaran kepada pemasok	(3.476.662)	13.526	(3.463.136)
Pembayaran kepada Karyawan	(2.411.573)	567.690	(1.843.883)
	<u>(4.626.804)</u>	<u>510.959</u>	<u>(4.115.845)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
INVESTASI			
Penambahan investasi asosiasi dan ventura bersama	(370.803)	(822)	(371.625)
Penambahan hak pengusahaan jalan tol	(3.828.493)	(538.933)	(4.367.426)
Penerimaan dividen atas Investasi Asosiasi	-	1.822	1.822
Penerimaan dividen atas aset keuangan	-	10.866	10.866
Penambahan aset tidak lancar lainnya	(11.207)	(42.283)	(53.490)
Pelepasan investasi jangka pendek	-	125.391	125.391
Penambahan investasi jangka pendek	(989.602)	(67.000)	(1.056.602)
	<u>(5.478.450)</u>	<u>(510.959)</u>	<u>(5.989.409)</u>

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Other Receivables - Current
Related Parties (Notes 44)

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Other Receivables - Non-Current
Related Parties (Notes 44)

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW
CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES
Cash receipts from other revenues
Cash paid to suppliers
Cash paid to employees

**CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES**
Addition of investment in
associates and joint ventures - net
Acquisitions of toll road concession rights
Receipt of dividends on investment in associates
Receipt of dividends on financial assets
Acquisitions of other non-current assets
Disposal of short-term investment
Addition of short-term investment

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**51. PERISTIWA - PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN**

51. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

1. Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 30 Januari 2024 dari Notaris Inne Kusumawati, S.H., dijelaskan bahwa Perusahaan melakukan pengalihan saham melalui proses lelang milik PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng sebanyak 231.069 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.103.
2. Pada tanggal 01 Februari 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp200.000 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 254/KPTS/M/2024 tanggal 2 Februari 2024, tarif tol terjauh ruas *Junction* Serpong - Pamulang, yang dioperasikan oleh PT Cinere Serpong Jaya adalah sebagai berikut:

No	Ruas/ Section	Golongan/Group				
		I	II	III	IV	V
1	<i>Junction</i> Serpong - Pamulang	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000

4. Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 2 Februari 2024 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan melakukan penyertaan modal perseroan secara tunai kepada PT Jasamarga Jogja Bawen sebesar Rp105.463 atau sebanyak 105.463 lembar saham.
5. Berdasarkan perubahan perjanjian nomor 014/PP/EB/0124 tanggal 5 Februari 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyetujui usulan Perusahaan untuk mengubah jangka waktu Fasilitas Kredit yang semula berakhir tanggal 21 Oktober 2024 menjadi tanggal 21 Oktober 2026.
6. Berdasarkan perubahan perjanjian nomor 015/PP/EB-Syariah/0124 tanggal 5 Februari 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah menyetujui usulan Perusahaan untuk mengubah jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang semula berakhir tanggal 21 Oktober 2024 menjadi tanggal 21 Oktober 2026.
7. Berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 15 Februari 2024 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., Perusahaan melakukan penyertaan modal perseroan secara tunai kepada PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi sebesar Rp292.600 atau sebanyak 292.600 lembar saham.

1. *Based on Notarial Deed No. 02 dated January 30, 2024 from Notary Inne Kusumawati, S.H., it was explained that the Company transferred shares through an auction process belonging to PT Istaka Karya (Persero) (In Bankruptcy) to PT Jasamarga Kunciran Cengkareng totaling 231,069 shares with a nominal value of Rp2,103.*
2. *On February 1, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp200,000 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
3. *Based on the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) No. 254/KPTS/M/2024 dated February 2, 2024, the farthest toll rates of the Serpong - Pamulang Junction section, operated by PT Cinere Serpong Jaya are as follows:*

4. *Based on Notarial Deed No. 07 dated February 2, 2024 from Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company invested in PT Jasamarga Jogja Bawen of Rp105,463 or as many as 105,463 shares in cash.*
5. *Based on the amendment of agreement number 014/PP/EB/0124 dated February 5, 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk approved the Company's proposal to change the Credit Facility period which originally ended on October 21, 2024 to October 21, 2026.*
6. *Based on the amendment of agreement number 015/PP/EB-Syariah/0124 dated February 5, 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sharia Business Unit approved the Company's proposal to change the period of the Musyarakah Financing Facility which originally ended on October 21, 2024 to October 21, 2026.*
7. *Based on Notarial Deed No 07 dated February 15, 2024, from Notary Rina Utami Djauhari, the Company made a capital participation in cash to PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi amounting to Rp292,600 or 292,600 shares.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**51. PERISTIWA - PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (lanjutan)**

**51. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

- | | |
|---|--|
| <p>8. Pada tanggal 23 Februari 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp300.000 pada PT Bank Danamon Indonesia.</p> <p>9. Pada tanggal 29 Februari 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp400.000 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>10. Pada tanggal 29 Februari 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp500.000 pada PT Bank Permata Tbk.</p> <p>11. Pada tanggal 01 Maret 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp500.000 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>12. Pada tanggal 01 Maret 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp500.000 pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah.</p> <p>13. Pada tanggal 18 Maret 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp200.000 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>14. Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp200.000 pada PT pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</p> <p>15. Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp150.000 pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).</p> <p>16. Pada tanggal 22 Maret 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp450.000 pada PT Bank Danamon Indonesia.</p> <p>17. Pada tanggal 26 Maret 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp1.016.442 pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.</p> <p>18. Pada tanggal 1 April 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp100.000 pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah.</p> <p>19. Pada tanggal 4 April 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp316.442 pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.</p> | <p>8. On February 23, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp300,000 to PT Bank Danamon Indonesia.</p> <p>9. On February 29, 2024, the Company made a bank debt withdrawal of Rp400,000 to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>10. On February 29, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp500,000 to PT Bank Permata Tbk.</p> <p>11. On March 01, 2024, the Company withdrew bank debt amounting to IDR 500,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>12. On March 01, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp500,000 to PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah.</p> <p>13. On March 18, 2024, the Company withdrew bank debt amounting to IDR 200,000 from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>14. On March 22, 2024, the Company withdrew bank debt amounting to Rp. 200,000 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</p> <p>15. On March 22, 2024, the Company made a bank debt withdrawal of Rp150,000 to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).</p> <p>16. On March 22, 2024, the Company paid a bank debt of IDR 450,000 to PT Bank Danamon Indonesia.</p> <p>17. On March 26 2024, the Company withdrew bank debt amounting to IDR 1,016,442 from PT Bank Maybank Indonesia Tbk.</p> <p>18. On April 1, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp100,000 to PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Sharia Business Unit.</p> <p>19. On April 4, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp316,442 to PT Bank Maybank Indonesia Tbk.</p> |
|---|--|

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**51. PERISTIWA - PERISTIWA SETELAH TANGGAL
PELAPORAN (lanjutan)**

20. Pada tanggal 4 April 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp400.000 pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah.
21. Pada tanggal 23 April 2024, Perusahaan melakukan pembayaran utang bank sebesar Rp250.000 pada PT Bank Danamon Indonesia.
22. Pada tanggal 23 April 2024, Perusahaan melakukan penarikan utang bank sebesar Rp200.000 pada PT Bank Shinhan.

**52. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI
STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN
BELUM BERLAKU EFEKTIF**

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2023.

Amandemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang Dengan Kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa – Balik;
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah; dan
- Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing masing PSAK dan ISAK tersebut.

**51. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
(continued)**

20. On April 4, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp400,000 to PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Sharia Business Unit.
21. On April 23, 2024, the Company made a bank debt payment of Rp250,000 to PT Bank Danamon Indonesia.
22. On April 23, 2024, the Company made a bank debt withdrawal of Rp200,000 to PT Bank Shinhan.

**52. NEW ACCOUNTING STANDARD AND
INTERPRETATION OF STANDARD WHICH HAS
ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE**

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2023.

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements related to Non- Current Liabilities with Covenants; and
- Amendments PSAK 73: Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Revised PSAK 101: Presentation of Shariah Financial Statement; and
- Revised PSAK 109: Zakah, Infaq and Sadaqah.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract.
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

DSAK-IAI also ratified changes to the number of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of requirement in each PSAK and ISAK.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**53. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada tanggal 22 Mei 2024, sehubungan dengan rencana perusahaan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi, Manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan keuangan konsolidasian diterbitkan kembali disertai dengan perubahan penyajian piutang lain-lain dalam laporan posisi keuangan serta beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian dibawah ini:

- Catatan No. 1.e "Entitas anak yang dikonsolidasikan"
- Catatan No. 1.g "Kombinasi bisnis"
- Catatan No. 2.i "Aset tetap"
- Catatan No. 6 "Piutang lain-lain"
- Catatan No. 7 "Persediaan"
- Catatan No. 10 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- Catatan No. 11 "Aset tetap"
- Catatan No. 12 "Properti investasi"
- Catatan No. 17.e "Aset tidak lancar lainnya-lainnya"
- Catatan No. 21 "Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya"
- Catatan No. 23 "Utang bank"
- Catatan No. 27 "Liabilitas sewa"
- Catatan No. 29 "Pendapatan diterima dimuka"
- Catatan No. 36 "Pendapatan tol dan lainnya"
- Catatan No. 37 "Pendapatan dan beban konstruksi"
- Catatan No. 38 "Beban tol dan usaha"
- Catatan No. 40 "Penghasilan keuangan dan penghasilan lain-lain"
- Catatan No. 41 "Beban lain-lain"
- Catatan No. 44 "Saldo dan sifat pihak-pihak yang berelasi"
- Catatan No. 51 "Peristiwa-peristiwa setelah tanggal pelaporan"

**54. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 22 Mei 2024.

**53. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

On May 22, 2024 in relation to the company's plan to do Public Offering of Shelf Bonds, Management has reissued with several changes and additional disclosures in consolidated financial statements for the years ending 31 December 2023 and 2022. The consolidated financial statements were reissued accompanied by changes in the presentation of other receivables in the statement of financial position as well as several changes and additional disclosures to the consolidated statements of financial position and notes to the consolidated financial statements with details below:

- Notes No. 1.e "Consolidated subsidiaries"
- Notes No. 1.g "Business combination"
- Notes No. 2.i "Fixed assets"
- Notes No. 6 "Receivables"
- Notes No. 7 "Inventories"
- Notes No. 10 "Investment in associates and joint venture"
- Notes No. 11 "Fixed assets"
- Notes No. 12 "Investment Property"
- Notes No. 17.e "Other non-current assets-other"
- Notes No. 21 "Other current financial liabilities"
- Notes No. 23 "Bank loans"
- Notes No. 27 "Lease liabilities"
- Notes No. 29 "Unearned revenues"
- Notes No. 36 "Toll and other operating revenue"
- Notes No. 37 "Construction revenues and expenses"
- Notes No. 38 "Toll and operating expenses"
- Notes No. 40 "Finance income and other income"
- Notes No. 41 "Other expenses"
- Notes No. 44 "Balance and nature of related parties transactions"
- Notes No. 51 "Events after the reporting date"

**54. THE MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized for issued on May 22, 2024.

